



BAGIAN ANGGARAN 010

LAPORAN KEUANGAN KEMENDAGRI TAHUN 2025 AUDITED

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NOMOR 7
JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 3450038
WEBSITE : WWW.KEMENDAGRI.GO.ID**

BAGIAN ANGGARAN 010



**LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025
*AUDITED***

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual, sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan, bimbingan, dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 8 Mei 2026

MENTERI DALAM NEGERI,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	xvi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	29
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	73
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	131
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	166
F. Pengungkapan Penting Lainnya	177
G. Penutup	183
VI. Lampiran dan Daftar	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Pagu dan Realisasi Belanja untuk Pelaksanaan Prioritas Nasional s.d. 31 Desember 2025	12
Tabel 2 : Rekapitulasi Jumlah Satker Aktif Menurut Unit Eselon I	17
Tabel 3 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	24
Tabel 4 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	26
Tabel 5 : Kriteria Kualitas Piutang	28
Tabel 6 : Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja Tahun Anggaran 2025	29
Tabel 7 : Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program	29
Tabel 8 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2025 per Kode MAP	30
Tabel 9 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2025 per Eselon I	31
Tabel 10 : Perbandingan Realisasi PNPB Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Eselon I	31
Tabel 11 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	32
Tabel 12 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program s.d. 31 Desember 2025	33
Tabel 13 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bruto s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Unit Eselon I	33
Tabel 14 : Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Eselon I s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	34
Tabel 15 : Perbandingan Realisasi Belanja Neto s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	34
Tabel 16 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	35
Tabel 17 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	36

Tabel 18	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Akun s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	37
Tabel 19	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	37
Tabel 20	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	38
Tabel 21	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	38
Tabel 22	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	39
Tabel 23	: Rincian Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	39
Tabel 24	: Perbandingan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi per Eselon I s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	40
Tabel 25	: Perbandingan Realisasi Belanja Dana Tugas Pembantuan per Eselon I s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	40
Tabel 26	: Pagu dan Realisasi PLN P3PD Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025	46
Tabel 27	: Pagu dan Realisasi PLN ILASP Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025	47
Tabel 28	: Pagu dan Realisasi PLN ISWMP Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025	50
Tabel 29	: Pagu dan Realisasi PLN NUFReP Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025	54
Tabel 30	: Pagu dan Realisasi PLN MFPCNJP Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025	57
Tabel 31	: Pagu dan Realisasi PLN NUDP Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025	60
Tabel 32	: Pagu dan Realisasi PLN ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025	64
Tabel 33	: Pagu dan Realisasi HLN Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Phase II Ditjen Bina Pemdes Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025	65

Tabel 34	: Pagu dan Realisasi HLN Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Phase II Ditjen Bina Bangda Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025	68
Tabel 35	: Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Per Eselon I untuk masing-masing Fungsi dan Sub Fungsi Tahun 2025	69
Tabel 36	: Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional I	70
Tabel 37	: Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional II	70
Tabel 38	: Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional III	71
Tabel 39	: Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional IV	71
Tabel 40	: Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional V	71
Tabel 41	: Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional VI	71
Tabel 42	: Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional VII	72
Tabel 43	: Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional VIII	72
Tabel 44	: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I	73
Tabel 45	: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I	74
Tabel 46	: Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I	78
Tabel 47	: Mutasi Belanja Dibayar Dimuka	78
Tabel 48	: Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon I	79
Tabel 49	: Mutasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima	80
Tabel 50	: Rincian Piutang Bukan Pajak per Eselon I	80
Tabel 51	: Mutasi Piutang Bukan Pajak per Jenis Transaksi	81
Tabel 52	: Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak	82
Tabel 53	: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	84

Tabel 54	: Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I	84
Tabel 55	: Mutasi Bagian Lancar TP/TGR sampai dengan 31 Desember 2025	85
Tabel 56	: Rincian Persediaan	86
Tabel 57	: Rincian Persediaan per Unit Eselon I	86
Tabel 58	: Mutasi Persediaan	87
Tabel 59	: Rincian Tanah per Unit Eselon I	92
Tabel 60	: Rincian Mutasi Tanah	92
Tabel 61	: Rincian Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I	93
Tabel 62	: Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	94
Tabel 63	: Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Berasal dari Realisasi Belanja TAB	99
Tabel 64	: Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Berasal dari Realisasi Belanja	99
Tabel 65	: Rincian Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I	100
Tabel 66	: Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	101
Tabel 67	: Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Berasal dari Realisasi Belanja TAB	105
Tabel 68	: Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Berasal dari Realisasi Belanja	105
Tabel 69	: Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Unit Eselon I	106
Tabel 70	: Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	106
Tabel 71	: Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang Berasal dari Realisasi Belanja TAB	107
Tabel 72	: Rincian Perhitungan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan	107
Tabel 73	: Rincian Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I	108
Tabel 74	: Mutasi Aset Tetap Lainnya	109
Tabel 75	: Mutasi Aset Tetap Lainnya yang Berasal dari Realisasi Belanja TAB	110

Tabel 76	: Rincian Perhitungan Realisasi Belanja Modal Lainnya yang Menjadi Aset Tetap Lainnya	111
Tabel 77	: Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit Eselon I	111
Tabel 78	: Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	112
Tabel 79	: Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	112
Tabel 80	: Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Realisasi Belanja TAB	115
Tabel 81	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	115
Tabel 82	: Rincian Piutang TP/TGR per Eselon I	116
Tabel 83	: Mutasi Tagihan TP/TGR sampai dengan 31 Desember 2025	116
Tabel 84	: Rincian Penyisihan Piutang TP/TGR per Eselon I	119
Tabel 85	: Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025	119
Tabel 86	: Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I	119
Tabel 87	: Mutasi Aset Tak Berwujud	120
Tabel 88	: Mutasi Aset Tak Berwujud yang Berasal dari Realisasi Belanja TAB	122
Tabel 89	: Rincian Perhitungan Realisasi Belanja Modal Lainnya yang Menjadi Aset Tak Berwujud	123
Tabel 90	: Rincian Aset Lain-Lain Menurut Uraian Akun per 31 Desember 2025	124
Tabel 91	: Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I	124
Tabel 92	: Mutasi Aset Lain-Lain	124
Tabel 93	: Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	126
Tabel 94	: Daftar Perbandingan Utang Pihak Ketiga per Unit Eselon I	128
Tabel 95	: Pendapatan Diterima di Muka	128
Tabel 96	: Utang Jangka Pendek Lainnya	130
Tabel 97	: Perbandingan Rincian PNBPN Tahun 2025 dengan Tahun 2024	131
Tabel 98	: Selisih PNBPN antara Basis Kas dan Basis Akrua	132
Tabel 99	: Perbandingan Beban Pegawai Tahun 2025 dengan Tahun 2024	135

Tabel 100	: Selisih Beban Pegawai antara Basis Kas dan Basis Akrua	136
Tabel 101	: Perbandingan Beban Persediaan Tahun 2025 dengan Tahun 2024	143
Tabel 102	: Penjelasan Hubungan Mutasi Kurang Persediaan dengan Beban Persediaan Tahun 2025	143
Tabel 103	: Penjelasan Selisih Mutasi Kurang Persediaan Dengan Beban Persediaan	144
Tabel 104	: Perbandingan Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dengan Tahun 2024	145
Tabel 105	: Selisih Beban Barang dan Jasa antara Basis Kas dan Basis Akrua	146
Tabel 106	: Penyajian Beban Aset Ekstrakomtabel	150
Tabel 107	: Perbandingan Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dengan Tahun 2024	150
Tabel 108	: Selisih Beban Pemeliharaan antara Basis Kas dan Basis Akrua	151
Tabel 109	: Penyajian Beban Pemeliharaan	152
Tabel 110	: Penjelasan Selisih Pemakaian Persediaan dengan Beban Pemeliharaan	153
Tabel 111	: Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dengan Tahun 2024	154
Tabel 112	: Perbandingan Beban Perjalanan Dinas antara Basis Kas dan Basis Akrua	154
Tabel 113	: Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dengan Tahun 2024	155
Tabel 114	: Penyajian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	156
Tabel 115	: Penjelasan Selisih Mutasi Persediaan yang Diserahkan dengan Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	157
Tabel 116	: Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024	158

Tabel 117	: Penjelasan Hubungan Penyusutan Periode Berjalan dengan Beban Penyusutan	158
Tabel 118	: Penjelasan Selisih Penyusutan Periode Berjalan dengan Beban Penyusutan	159
Tabel 119	: Penjelasan Hubungan Amortisasi Periode Berjalan dengan Beban Amortisasi	159
Tabel 120	: Penjelasan Selisih Amortisasi Periode Berjalan dengan Beban Amortisasi	160
Tabel 121	: Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dengan Tahun 2024	160
Tabel 122	: Perbandingan Perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	161
Tabel 123	: Penjelasan Selisih Perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	161
Tabel 124	: Perbandingan Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dengan Tahun 2024	162
Tabel 125	: Selisih Realisasi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional antara Basis Kas dan Basis Akrua	163
Tabel 126	: Selisih Realisasi Beban dari Kegiatan Non Operasional antara Basis Kas dan Basis Akrua	164
Tabel 127	: Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sampai dengan 31 Desember 2025	167
Tabel 128	: Rincian Transaksi Antar Entitas sampai dengan 31 Desember 2025	172
Tabel 129	: Rincian Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025	172
Tabel 130	: Rincian Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025	173
Tabel 131	: Rincian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025	175
Tabel 132	: Rekapitulasi Jumlah Satker Inaktif yang Dialihkan Saldo Asetnya ke Satker Pusat Tahun 2021 dan Progres Penyelesaiannya s.d. Tahun 2024	180

Tabel 133	: Rekapitulasi Progres Penyelesaiannya Aset Eks. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama per 31 Desember 2025	181
Tabel 134	: Rekapitulasi Total Aset Satker Inaktif Bersaldo per 31 Desember 2025	182

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1 : Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Neto T.A. 2025 dan T.A 2024	33

DAFTAR LAMPIRAN

A. DAFTAR LAMPIRAN LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG CALK

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
- Lampiran II : Laporan Realisasi Anggaran Belanja
- Lampiran III : Rekapitulasi Penerimaan Hibah Langsung sampai dengan 2025
- Lampiran IV : Laporan Capaian Output Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025
- Lampiran V : Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output, Target, dan Kegiatan Prioritas Nasional Per Masing-Masing Eselon I
- Lampiran VI : Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Modal Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025
- Lampiran VII : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, serta Kas Lainnya, dan Setara Kas Per Satker
- Lampiran VIII : Rincian Penyetoran Kas Setelah Tanggal Neraca
- Lampiran IX : Rekapitulasi Persediaan Per Satker Menurut Akun
- Lampiran X : Rincian Mutasi Persediaan Per Eselon I
- Lampiran XI : Rincian Mutasi Persediaan Per Akun
- Lampiran XII : Daftar Persediaan Tidak dikuasai Per 31 Desember 2025
- Lampiran XIII : Rekapitulasi Aset Tetap Per Satker Per 31 Desember 2025
- Lampiran XIV : Rincian Mutasi Tanah Per Unit Eselon I
- Lampiran XV : Rincian Mutasi Peralatan Dan Mesin Per Unit Eselon I

Lampiran XVI	: Rincian Pembelian (101) Peralatan Dan Mesin Per Satker
Lampiran XVII	: Rincian Mutasi Gedung Dan Bangunan Per Unit Eselon I
Lampiran XVIII	: Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Unit Eselon I
Lampiran XIX	: Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I
Lampiran XX	: Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Satker
Lampiran XXI	: Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Satker
Lampiran XXII	: Rekapitulasi Saldo Aset Lainnya serta Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Per Satuan Kerja Per 31 Desember 2025
Lampiran XXIII	: Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Per Unit Eselon I
Lampiran XXIV	: Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
Lampiran XXV	: Rincian Mutasi Aset Lain-Lain Per Unit Eselon I
Lampiran XXVI	: Rekapitulasi Utang Kepada Pihak Ketiga
Lampiran XXVII	: Rincian Pendapatan Diterima Di Muka Per Satker
Lampiran XXVIII	: Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Lampiran XXIX	: Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk
Lampiran XXX	: Rincian Desa yang Belum Lengkap Bukti Pertanggungjawabannya Per 31 Desember 2025
Lampiran XXXI	: Rekapitulasi Satker Inaktif yang Saldonya Dialihkan ke Satker Pusat untuk Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025
Lampiran XXXII	: Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode Persediaan Kementerian Dalam Negeri Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025

Lampiran : Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN Kementerian
XXXIII Dalam Negeri Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025

Lampiran : Daftar Rekening Kementerian Dalam Negeri
XXXIV

B. DAFTAR LAMPIRAN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN

Lampiran Neraca Percobaan AkruaI Tingkat Kemendagri Per 1 Januari 2025

Lampiran Neraca Percobaan AkruaI Tingkat Kemendagri Per 31 Desember 2025

Lampiran Neraca Percobaan Kas Tingkat Kemendagri Per 31 Desember 2025

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Jenis Belanja/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Wilayah/Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Jenis Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Sumber Dana/Jenis Belanja/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

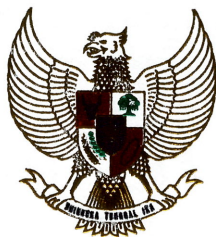
Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kemendagri Menurut Kelompok Pendapatan/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Wilayah/Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAPA Audited TA 2025



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 *Audited* yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sepanjang sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan selaku Menteri Dalam Negeri.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 8 Mei 2026

MENTERI DALAM NEGERI,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.229.296.647.039,00 atau mencapai 225,30% dari estimasi pendapatan sebesar Rp545.622.680.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.769.888.073.000,00 atau mencapai 78,07% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.828.552.050.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp17.486.075.324.585,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp388.386.048.132,00, Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp16.710.167.512.034,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya) sebesar Rp387.521.764.419,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp559.919.680.429,00 dan Rp16.926.155.644.156,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.007.665.353.221,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3.594.179.286.360,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp2.586.513.933.139,00). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp1.515.934.874,00) dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp2.588.029.868.013,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp16.905.781.871.164,00, ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp2.588.029.868.013,00), kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp7.245.411.680,00 dan transaksi antar entitas sebesar Rp2.601.158.229.325,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp16.926.155.644.156,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode pelaporan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Pendapatan Perpajakan		0	0	0,00	0
Pajak Dalam Negeri		0	0	0,00	0
Pajak Perdagangan Internasional		0	0	0,00	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	545.622.680.000	1.229.296.647.039	225,30	972.605.329.846
Pendapatan Sumber Daya Alam		0	0	0,00	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		0	0	0,00	0
Pendapatan BLU		0	0	0,00	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		545.622.680.000	1.229.296.647.039	225,30	972.605.329.846
Pendapatan Hibah		0	0	0,00	0
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		545.622.680.000	1.229.296.647.039	225,30	972.605.329.846
BELANJA NEGARA	B.2.				
Belanja Pemerintah Pusat		4.828.552.050.000	3.769.888.073.000	78,07	5.169.335.036.396
Belanja Pegawai	B.3	885.454.035.000	880.577.494.695	99,45	870.809.194.004
Belanja Barang	B.4	2.989.838.772.000	2.211.247.455.975	73,96	3.635.460.169.466
Belanja Modal	B.5	953.259.243.000	678.063.122.330	71,13	663.065.672.926
Belanja Pembayaran Bunga Utang		0	0	0,00	0
Belanja Subsidi		0	0	0,00	0
Belanja Hibah		0	0	0,00	0
Belanja Bantuan Sosial		0	0	0,00	0
Belanja Lain-lain		0	0	0,00	0
Transfer ke Daerah dan Dana Desa		0	0	0,00	0
Transfer ke Daerah		0	0	0,00	0
Dana Perimbangan		0	0	0,00	0
Dana Transfer Umum		0	0	0,00	0
Dana Bagi Hasil		0	0	0,00	0
Dana Alokasi Umum		0	0	0,00	0
Dana Transfer Khusus		0	0	0,00	0
Dana Alokasi Khusus Fisik		0	0	0,00	0
Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0	0	0,00	0
Dana Insentif Daerah		0	0	0,00	0
Dana Keistimewaan DIY		0	0	0,00	0
Dana Otonomi Khusus		0	0	0,00	0
Dana Desa		0	0	0,00	0
Hibah Kepada Daerah		0	0	0,00	0
JUMLAH BELANJA		4.828.552.050.000	3.769.888.073.000	78,07	5.169.335.036.396
PEMBIAYAAN		0	0	0,00	0

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	2025				2024			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	545.622.680.000	1.229.296.647.039	683.673.967.039	225,30	726.399.819.000	972.605.329.846	246.205.510.846	133,89
	1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	3. Pendapatan BLU	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	545.622.680.000	1.229.296.647.039	683.673.967.039	225,30	726.399.819.000	972.605.329.846	246.205.510.846	133,89
	III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I+A.II+A.III)	545.622.680.000	1.229.296.647.039	683.673.967.039	225,30	726.399.819.000	972.605.329.846	246.205.510.846	133,89
	B. Belanja Negara	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	I. Belanja Pemerintah Pusat	4.828.552.050.000	3.769.888.073.000	(1.058.663.977.000)	78,07	5.354.037.566.000	5.169.335.036.396	(184.702.529.604)	96,55
	1. Belanja Pegawai	885.454.035.000	880.577.494.695	(4.876.540.305)	99,45	879.202.795.000	870.809.194.004	(8.393.600.996)	99,05
	2. Belanja Barang	2.989.838.772.000	2.211.247.455.975	(778.591.316.025)	73,96	3.809.656.702.000	3.635.460.169.466	(174.196.532.534)	95,43
	3. Belanja Modal	953.259.243.000	678.063.122.330	(275.196.120.670)	71,13	665.178.069.000	663.065.672.926	(2.112.396.074)	99,68
	4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	5. Belanja Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	6. Belanja Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	2025				2024			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	4. Dana Otonomi Daerah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	6. Dana Desa	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	7. Insentif Fiskal	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Jumlah Belanja Negara (B.I+B.II)	4.828.552.050.000	3.769.888.073.000	(1.058.663.977.000)	78,07	5.354.037.566.000	5.169.335.036.396	(184.702.529.604)	96,55
	C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 8 Mei 2026
Menteri Dalam Negeri,



Muhammad Tito Karnavian



NERACA

II. NERACA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	777.785	112.599.303
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	14.820.792.658	64.956.638.835
Belanja Dibayar Dimuka	C.3	1.078.586.075	299.007.100
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	34.616.450	94.651.450
Piutang Bukan Pajak	C.5	12.483.563.956	12.640.675.594
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6	(11.665.928.013)	(11.043.686.930)
Bagian Lancar TP/TGR	C.7	375.796.795	300.680.096
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.8	(1.878.984)	(1.503.401)
Persediaan	C.9	371.259.721.410	338.870.256.976
JUMLAH ASET LANCAR		388.386.048.132	406.229.319.023
ASET TETAP			
Tanah	C.10	13.259.318.847.812	13.251.627.720.522
Peralatan dan Mesin	C.11	4.639.205.845.247	4.156.760.195.772
Gedung dan Bangunan	C.12	2.939.685.514.821	2.922.592.918.649
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.13	295.425.617.843	299.793.586.980
Aset Tetap Lainnya	C.14	80.846.861.744	95.015.581.772
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.15	19.373.327.423	25.366.869.749
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.16	(4.523.688.502.856)	(4.211.432.344.941)
JUMLAH ASET TETAP		16.710.167.512.034	16.539.724.528.503
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.17	17.850.089.235	17.950.315.934
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.18	(17.850.089.235)	(17.850.590.368)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		-	99.725.566
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.19	801.986.445.593	830.510.381.843
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.20	228.247.203.927	384.325.357.961
Aset Lain-Lain	C.21	339.285.684.989	182.864.064.500
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(981.997.570.090)	(875.727.657.235)
JUMLAH ASET LAINNYA		387.521.764.419	521.972.147.069
JUMLAH ASET		17.486.075.324.585	17.468.025.720.161
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.23	224.035.968.924	401.816.267.044
Pendapatan Diterima di Muka	C.24	335.485.577.077	160.307.263.241
Uang Muka dari KPPN	C.25	777.785	112.599.303
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.26	397.356.643	7.719.409
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		559.919.680.429	562.243.848.997
JUMLAH KEWAJIBAN		559.919.680.429	562.243.848.997
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	16.926.155.644.156	16.905.781.871.164
JUMLAH EKUITAS		16.926.155.644.156	16.905.781.871.164
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		17.486.075.324.585	17.468.025.720.161

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2025	2024	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	777.785	112.599.303	(111.821.518)	(99,31)
Kas Lainnya dan Setara Kas	14.820.792.658	64.956.638.835	(50.135.846.177)	(77,18)
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	1.078.586.075	299.007.100	779.578.975	260,72
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	34.616.450	94.651.450	(60.035.000)	(63,43)
Piutang Bukan Pajak	12.483.563.956	12.640.675.594	(157.111.638)	(1,24)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(11.665.928.013)	(11.043.686.930)	(622.241.083)	5,63
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	817.635.943	1.596.988.664	(779.352.721)	(48,80)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	375.796.795	300.680.096	75.116.699	24,98
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(1.878.984)	(1.503.401)	(375.583)	24,98
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	373.917.811	299.176.695	74.741.116	24,98
Persediaan	371.259.721.410	338.870.256.976	32.389.464.434	9,56
JUMLAH ASET LANCAR	388.386.048.132	406.229.319.023	(17.843.270.891)	(4,39)
ASET TETAP				
Tanah	13.259.318.847.812	13.251.627.720.522	7.691.127.290	0,06
Peralatan dan Mesin	4.639.205.845.247	4.156.760.195.772	482.445.649.475	11,61
Gedung dan Bangunan	2.939.685.514.821	2.922.592.918.649	17.092.596.172	0,58
Jalan Irigasi dan Jaringan	295.425.617.843	299.793.586.980	(4.367.969.137)	(1,46)
Aset Tetap Lainnya	80.846.861.744	95.015.581.772	(14.168.720.028)	(14,91)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	19.373.327.423	25.366.869.749	(5.993.542.326)	(23,63)
Akumulasi Penyusutan	(4.523.688.502.856)	(4.211.432.344.941)	(312.256.157.915)	7,41
JUMLAH ASET TETAP	16.710.167.512.034	16.539.724.528.503	170.442.983.531	1,03
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	17.850.089.235	17.950.315.934	(100.226.699)	(0,56)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi	(17.850.089.235)	(17.850.590.368)	501.133	(0,00)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	0	99.725.566	(99.725.566)	(100,00)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	0	99.725.566	(99.725.566)	(100,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2025	2024	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	801.986.445.593	830.510.381.843	(28.523.936.250)	(3,43)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	228.247.203.927	384.325.357.961	(156.078.154.034)	(40,61)
Aset Lain-lain	339.285.684.989	182.864.064.500	156.421.620.489	85,54
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(981.997.570.090)	(875.727.657.235)	(106.269.912.855)	12,14
JUMLAH ASET LAINNYA	387.521.764.419	521.972.147.069	(134.450.382.650)	(25,76)
JUMLAH ASET	17.486.075.324.585	17.468.025.720.161	18.049.604.424	0,10
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	224.035.968.924	401.816.267.044	(177.780.298.120)	(44,24)
Pendapatan Diterima Dimuka	335.485.577.077	160.307.263.241	175.178.313.836	109,28
Uang Muka dari KPPN	777.785	112.599.303	(111.821.518)	(99,31)
Utang Jangka Pendek Lainnya	397.356.643	7.719.409	389.637.234	5.047,50
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	559.919.680.429	562.243.848.997	(2.324.168.568)	(0,41)
JUMLAH KEWAJIBAN	559.919.680.429	562.243.848.997	(2.324.168.568)	(0,41)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	16.926.155.644.156	16.905.781.871.164	20.373.772.992	0,12
JUMLAH EKUITAS	16.926.155.644.156	16.905.781.871.164	20.373.772.992	0,12
JUMLAH EKUITAS	16.926.155.644.156	16.905.781.871.164	20.373.772.992	0,12
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	17.486.075.324.585	17.468.025.720.161	18.049.604.424	0,10

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta 8 Mei 2026
Menteri Dalam Negeri,



Muhammad Tito Karnavian



LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan PNBP Lainnya	D.1	1.007.665.353.221	922.205.703.793
JUMLAH PENDAPATAN		1.007.665.353.221	922.205.703.793
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	891.273.211.005	864.086.036.643
Beban Persediaan	D.3	16.551.402.319	19.970.224.791
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.525.203.514.885	2.478.607.689.361
Beban Pemeliharaan	D.5	141.900.113.486	132.764.844.357
Beban Perjalanan Dinas	D.6	261.160.085.157	581.369.053.204
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	294.351.949.651	341.841.028.210
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	463.076.985.107	376.790.972.933
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	662.024.750	1.426.661.534
JUMLAH BEBAN		3.594.179.286.360	4.796.856.511.033
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.586.513.933.139)	(3.874.650.807.240)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
Pendapatan Pelepasan Aset		1.811.155.189	1.941.411.725
Beban Pelepasan Aset		23.796.700.091	10.076.972.716
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		20.780.660.822	12.681.234.768
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		311.050.794	195.208.585
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(1.515.934.874)	4.350.465.192
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.588.029.868.013)	(3.870.300.342.048)
POS LUAR BIASA	D.11		
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		(2.588.029.868.013)	(3.870.300.342.048)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2025	2024	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.007.665.353.221	922.205.703.793	85.459.649.428	9,267
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.007.665.353.221	922.205.703.793	85.459.649.428	9,267
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
JUMLAH PENDAPATAN	1.007.665.353.221	922.205.703.793	85.459.649.428	9,267
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	891.273.211.005	864.086.036.643	27.187.174.362	3,146
Beban Persediaan	16.551.402.319	19.970.224.791	(3.418.822.472)	(17,120)
Beban Barang dan Jasa	1.525.203.514.885	2.478.607.689.361	(953.404.174.476)	(38,465)
Beban Pemeliharaan	141.900.113.486	132.764.844.357	9.135.269.129	6,881
Beban Perjalanan Dinas	261.160.085.157	581.369.053.204	(320.208.968.047)	(55,078)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	294.351.949.651	341.841.028.210	(47.489.078.559)	(13,892)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	463.076.985.107	376.790.972.933	86.286.012.174	22,900
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	662.024.750	1.426.661.534	(764.636.784)	(53,596)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	3.594.179.286.360	4.796.856.511.033	(1.202.677.224.673)	(25,072)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2.586.513.933.139)	(3.874.650.807.240)	1.288.136.874.101	(33,245)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2025	2024	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET	(21.985.544.902)	(8.135.560.991)	(13.849.983.911)	170,240
Pendapatan Pelepasan Aset	1.811.155.189	1.941.411.725	(130.256.536)	(6,709)
Beban Pelepasan Aset	23.796.700.091	10.076.972.716	13.719.727.375	136,149
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	20.469.610.028	12.486.026.183	7.983.583.845	63,940
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	20.780.660.822	12.681.234.768	8.099.426.054	63,869
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	311.050.794	195.208.585	115.842.209	59,343
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(1.515.934.874)	4.350.465.192	(5.866.400.066)	(134,845)
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	(2.588.029.868.013)	(3.870.300.342.048)	1.282.270.474.035	(33,131)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(2.588.029.868.013)	(3.870.300.342.048)	1.282.270.474.035	(33,131)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 8 Mei 2026
Menteri Dalam Negeri,



Muhammad Tito Karnavian



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN DALAM NEGERI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	16.905.781.871.164	16.599.721.292.944
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.588.029.868.013)	(3.870.300.342.048)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	7.245.411.680	(1.436.536.902)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	(857.981.630)	395.757
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.2	8.331.320.763	(1.285.557.409)
Koreksi Lain-lain	E.3.3	(227.927.453)	(151.375.250)
JUMLAH		7.245.411.680	(1.436.536.902)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.601.158.229.325	4.177.797.457.170
EKUITAS AKHIR	E.5	16.926.155.644.156	16.905.781.871.164

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2025	2024	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	16.905.781.871.164	16.599.721.292.944	306.060.578.220	1,84
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.588.029.868.013)	(3.870.300.342.048)	1.282.270.474.035	(33,13)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	7.245.411.680	(1.436.536.902)	8.681.948.582	(604,37)
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	(857.981.630)	395.757	(858.377.387)	(216.895,06)
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	8.331.320.763	(1.285.557.409)	9.616.878.172	(748,07)
Lain-lain	(227.927.453)	(151.375.250)	(76.552.203)	50,57
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2.601.158.229.325	4.177.797.457.170	(1.576.639.227.845)	(37,74)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	20.373.772.992	306.060.578.220	(285.686.805.228)	(93,34)
EKUITAS AKHIR	16.926.155.644.156	16.905.781.871.164	20.373.772.992	0,12

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta 8 Mei 2026
Menteri Dalam Negeri



Muhammad Tito Karnavian



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Dalam Negeri

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri mengatur tugas Kementerian Dalam Negeri dalam hal menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam

negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi objektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029.

Visi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 yaitu “Kementerian Dalam Negeri yang Berorientasi Kinerja, Adaptif, Kompeten, Sinergi, dan Inovatif (BerAKSI) sebagai Poros Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kualitas demokrasi Indonesia.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang inovatif berbasis teknologi.
4. Memperkuat sinergitas dan keselarasan tata kelola pemerintahan dalam negeri, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kewilayahan berbasis otonomi daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang akan dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2025-2029, sebagai berikut:

1. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia. Ketercapaian tujuan diukur melalui pencapaian Indikator Tujuan pada akhir periode Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2029 berupa:
 - a. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi, dengan nilai

80,77, dan;

- b. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (ITKPU-PUM), dengan nilai 70.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri. Ketercapaian tujuan diukur melalui pencapaian Indikator Tujuan pada akhir periode Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2029 berupa:
 - a. Jumlah program studi IPDN dengan Akreditasi Unggul sebanyak 13 Program Studi (Prodi), dan;
 - b. Indeks Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (IKAPDN), dengan nilai 100.
3. Menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan. Ketercapaian tujuan diukur melalui pencapaian Indikator Tujuan pada akhir periode Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2029 berupa Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil), dengan nilai 89.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan desa, serta kualitas kebijakan dalam negeri dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan. Ketercapaian tujuan diukur melalui pencapaian Indikator Tujuan pada akhir periode Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2029 berupa:
 - a. Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN), dengan nilai 70;
 - b. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKPK), dengan nilai 70;
 - c. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT), dengan nilai 85;
 - d. Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDDes), dengan nilai 11,5;
 - e. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB), dengan nilai 100,01;
 - f. Persentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti sebesar 70 persen.
 - g. Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan nilai 92; dan
 - h. Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Indeks Kinerja GWPP), dengan nilai 85.

Untuk mendukung tujuan di atas, dirumuskan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2025-2029 sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia” ditetapkan Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional”, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian, meliputi:
 - a. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi.
 - b. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (ITKPU-PUM)
2. Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri” ditetapkan Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian, meliputi:
 - a. Jumlah program studi IPDN dengan Akreditasi Unggul.
 - b. Indeks Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (IKAPDN).
3. Untuk mewujudkan tujuan “Menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan” ditetapkan Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik”, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian, yaitu Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil).
4. Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan desa, serta kualitas kebijakan dalam negeri dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan” ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a. Meningkatkan kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan

administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian, meliputi:

- 1) Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN).
 - 2) Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKPK).
 - 3) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT).
 - 4) Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDDes).
 - 5) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB).
 - 6) Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti.
 - 7) Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- b. Terwujudnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian, yaitu Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Indeks Kinerja GWPP).

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 menjadi acuan Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional. Rincian alokasi anggaran dan realisasi belanja bruto sampai dengan 31 Desember 2025 dari delapan Prioritas Nasional yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri selama Tahun 2025 disajikan pada tabel 1.

Tabel 1
Pagu dan Realisasi Belanja Bruto untuk Pelaksanaan Prioritas Nasional
s.d. 31 Desember 2025

Kode PN	Uraian PN	Pagu Belanja Rupiah	Realisasi Belanja Bruto Rupiah	%
01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	4.794.140.000	2.243.511.944	46,80
02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	6.841.960.000	2.090.248.067	30,55
03	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1.472.048.000	602.952.944	40,96
04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	12.735.739.000	2.511.609.061	19,72
05	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1.435.685.000	387.375.103	26,98
06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	43.800.784.000	24.793.957.284	56,61
07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	439.215.131.000	216.047.585.587	49,19
08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	15.200.943.000	6.724.825.168	44,24
Jumlah		525.496.430.000	255.402.065.158	48,60

Rincian pagu belanja dan realisasi belanja s.d. 31 Desember 2025 untuk masing-masing Prioritas Nasional berdasarkan penanggung jawab Unit Eselon I disajikan pada Catatan Penting Lainnya bagian Laporan Realisasi Anggaran.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 disusun untuk tujuan umum dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan, antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan ini disusun dan disajikan dengan basis akrual sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan diharapkan dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan entitas Kementerian Dalam Negeri.

Laporan keuangan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Laporan keuangan ini disusun dan disajikan sebagai suatu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat terdapat ketentuan yang mengatur bahwa SAI diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat Satker sampai dengan tingkat Kementerian Negara/Lembaga untuk memproses data transaksi keuangan, barang dan transaksi lainnya. Pemrosesan transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kementerian Negara/Lembaga. Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan SAI diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI diterbitkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab melalui sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi, yaitu Sistem SAKTI.

SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

SAKTI diterapkan dalam sembilan modul, yaitu Modul Administrasi, Modul Anggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul GL dan Pelaporan (GLP). Data transaksi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kementerian Negara/Lembaga. Pelaksanaan SAKTI didukung oleh Aplikasi MonSAKTI yang digunakan untuk monitoring data dan transaksi SAKTI.

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di

bawah Kementerian Dalam Negeri yang meliputi eselon I, dan satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri terdiri dari 11 Unit Eselon I sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pada Eselon I Setjen terdapat satuan kerja IPDN yang merupakan Lembaga Pendidikan Kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. IPDN merupakan penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.22.701 Tahun 2004 tanggal 13 Oktober 2004 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Struktur Organisasi dan Tata Kerja IPDN mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, IPDN Kampus Jakarta tidak berdiri sendiri sebagai satuan kerja. IPDN Kampus Jakarta melebur menjadi bagian dari struktur organisasi satuan kerja IPDN Jatinangor yang berada dibawah Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Peleburan IPDN Kampus Jakarta tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2024. Program studi diselenggarakan di IPDN Kampus Jatinangor dan Kampus Daerah. Terdapat enam IPDN Kampus Daerah yang berdiri sebagai satuan kerja yang mengelola anggaran sendiri, yaitu IPDN Kampus Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa, IPDN Kampus Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa, IPDN Kampus Sumatera Barat di Kabupaten Agam, IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah, IPDN Kampus Kalimantan Barat di Kabupaten Mempawah, dan IPDN Kampus Papua di Kota Jayapura.

Pada Eselon I Setjen juga terdapat satker Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yaitu lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2025, Eselon I Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki satker Dekonsentrasi dengan status aktif sebanyak 18 satker yang tersebar di 15 provinsi.
4. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Eselon I Ditjen Bina Pemerintahan Desa membawahi tiga satker daerah, yaitu Balai Besar Pemerintahan Desa Malang, Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta, dan Balai Pemerintahan Desa Lampung.
7. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Inspektorat Jenderal
Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di

lingkungan Kementerian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.

11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2025, Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahi Unit Pelaksana Teknis yang terdiri atas Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, dan Loka Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Pelayanan. Dengan demikian pada Tahun 2025 terdapat perubahan nama satker pada lima satker daerah yang telah memperoleh DIPA, yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi menjadi Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri I, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung menjadi Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar menjadi Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri IV, dan Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan.

Jumlah satuan kerja dengan status aktif di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 sebanyak 45 satker. Rincian jumlah satker dengan status aktif pada masing-masing Unit Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Rekapitulasi Jumlah Satker Aktif Menurut Unit Eselon I

NO	KODE ES1	UNIT ESELON I	KP	KD	DK	TP	JUMLAH
1	01	SEKRETARIAT JENDERAL	3	6	-	-	9
2	02	INSPEKTORAT JENDERAL	1	-	-	-	1
3	03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	1	-	-	-	1
4	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1	-	18	-	19
5	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	1	3	-	-	4
6	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1	-	-	-	1
7	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	1	-	-	-	1
8	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	-	-	-	1
9	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	1	-	-	-	1
10	11	BADAN PELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	-	-	-	1
11	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	5	-	-	6
JUMLAH			13	14	18	-	45

Kemendagri memiliki satker inaktif bersaldo untuk periode pelaporan Tahun 2025. Satker yang masih menyajikan saldo pada akun-akun Neraca per 31 Desember 2025 sebanyak enam satker, yaitu Bappeda Provinsi Maluku Utara, Bappeda Provinsi Papua, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Morotai pada Unit Eselon I Ditjen BAK, serta Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Rokan Hilir pada Unit Eselon I BPSDM. Dengan demikian Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 ini merupakan konsolidasi laporan keuangan 11 Unit Eselon I yang berstatus entitas akuntansi dan 51 satker yang berstatus entitas akuntansi.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian Dalam Negeri menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan dan

penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan akuntansi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Dalam hal terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka kas disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas yang dikelola Kementerian Dalam Negeri terdiri atas Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, serta Kas Lainnya dan Setara Kas.
- Piutang Bukan Pajak dan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang berdasarkan pungutan diakui dengan memperhatikan terpenuhi kriteria telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.
- Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan dalam neraca dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu membentuk

penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian). Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Aset Tetap juga mencakup biaya-biaya atas

pembangunan Aset Tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisihnya tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah berdasarkan keputusan pertimbangan entitas bahwa BMN tersebut tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional, sehingga tidak memenuhi definisi Aset Tetap, maka harus disajikan pada pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Transaksi penghentian BMN dari penggunaan akan mereklasifikasi saldo akun Aset Tetap ke

akun Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan (166112) sesuai dengan nomenklatur pada Bagan Akun Standar.

- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas ke pengelola barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap. Kebijakan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 50 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi disajikan dengan memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan tersebut disajikan pada pos tersendiri dalam neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset nonkeuangan

yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB meliputi *software*, hak paten dan hak cipta, lisensi dan waralaba (*franchise*), hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang dan ATB lainnya.

- ATB diakui jika memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki oleh entitas, mempunyai potensi manfaat ekonomi dan sosial atau jasa di masa depan, dan biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
- ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria, yaitu menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya, atau meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi.
- Pengeluaran untuk memperoleh ATB melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas, harus dapat dibedakan antara tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan. Seluruh pengeluaran untuk kegiatan pada tahap penelitian atau riset diakui sebagai beban pada saat terjadi. Seluruh pengeluaran untuk kegiatan pada tahap pengembangan, apabila telah memenuhi kriteria pengakuan, dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan. Dalam hal terdapat tahapan setelah implementasi/operasionalisasi, umumnya dalam pengembangan *software* komputer, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
- Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Terhadap kondisi tersebut maka pencatatan ATB yang bersangkutan harus dikoreksi. Transaksi penghentian BMN dari penggunaan akan mereklasifikasi saldo akun ATB ke akun Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan (166113) sesuai dengan nomenklatur pada Bagan Akun Standar.
- ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset

Lainnya. ATB memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika ATB memiliki masa manfaat terbatas maka dilakukan amortisasi dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa ATB pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukkan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Dana Yang Dibatasi Penggunaannya dicatat sebesar saldo di Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) atas pengeluaran belanja yang belum diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan akhir tahun anggaran atau terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dan diberikan kesempatan untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- Aset Lain-lain dapat berupa Aset Tetap dan ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan. Aset lain-lain tersebut terdiri atas Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan (166112) dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan (166113).
- Aset Lain-lain diakui pada saat Aset Tetap dan ATB

dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain.

- Aset Tetap dan ATB yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap/ATB menjadi objek penyusutan dan amortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan Aset Tetap dan amortisasi Aset Tak Berwujud.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh

tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 5
Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan berdasarkan Aplikasi Monsakti. Kemendagri melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, salah satunya penerimaan Pinjaman dan Hibah Tahun 2025.

Perubahan estimasi pendapatan dan pagu belanja tersaji pada tabel 6.

Tabel 6

Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Perubahan (Rp)
Estimasi Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	527.235.310.007	545.622.680.000	18.387.369.993
Total Estimasi Pendapatan	527.235.310.007	545.622.680.000	18.387.369.993
Pagu Belanja			
Belanja Pegawai	845.964.837.000	885.454.035.000	39.489.198.000
Belanja Barang	3.006.468.336.000	2.989.838.772.000	(16.629.564.000)
Belanja Modal	939.895.345.000	953.259.243.000	13.363.898.000
Jumlah Pagu Belanja	4.792.328.518.000	4.828.552.050.000	36.223.532.000

Perubahan pagu belanja berdasarkan program Kemendagri tersaji pada tabel 7.

Tabel 7

Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program

Kode	Program	Anggaran TA 2025	
		Awal	Setelah Revisi
WA	Program Dukungan Manajemen	2.037.205.856.000	2.106.261.396.000
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	471.039.306.000	640.403.777.000
CP	Program Tata Kelola Kependudukan	2.120.117.603.000	1.917.921.124.000
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	163.965.753.000	163.965.753.000
Total Pagu Belanja		4.792.328.518.000	4.828.552.050.000

Pada TA 2025 pagu Kemendagri sebesar Rp4.828.552.050.000,00, terdapat blokir pagu sebesar Rp1.038.067.413.000,00 sehingga pagu setelah blokir sebesar Rp3.790.484.637.000,00. Rincian pagu blokir Kemendagri TA 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan pagu blokir sebesar Rp1.035.699.357.000,00, yang terdiri dari Rupiah murni sebesar Rp260.279.707.000,00, Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp775.234.703.000,00, dan PNPB sebesar Rp184.947.000,00.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdapat pagu blokir yang semuanya berasal dari Rupiah Murni dengan rincian sebagai berikut:

- Terkait kekurangan data dukung berupa *clearance* untuk pengadaan belanja TIK sebesar Rp257.582.000,00.
- Terkait kekurangan data dukung berupa interpolasi untuk kegiatan renovasi gedung dan bangunan sebesar Rp2.110.474.000,00.

Realisasi
Pendapatan
Rp1.229.296.647.039,00

B.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.229.296.647.039,00 atau 225,30% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp545.622.680.000,00. Keseluruhan pendapatan Kemendagri merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian estimasi dan realisasi pendapatan per tanggal pelaporan berdasarkan Mata Anggaran Pendapatan (MAP) tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2025 per Kode MAP

Kode MAP	Uraian	Estimasi	Realisasi	%
425121	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	888.600	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	250.750.000	1.169.718.497	466,49
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	640.548.092	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.049.796.000	4.837.278.420	460,78
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	199.266.000	188.828.705	94,76
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	28.672.000	64.272.000	224,16
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	200.000.000	248.750.000	124,38
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	16.033.260.000	15.658.456.000	97,66
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat	1.116.000.000	1.124.000.000	100,72
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	291.846.000	375.969.000	128,82
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	56.483.200.000	59.806.240.000	105,88
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	5.079.019.000	4.889.212.000	96,26
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	464.890.871.000	1.095.067.090.000	235,55
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	46.010.000	0,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	1.011.980.429	0,00
425839	Pendapatan Denda Lainnya	-	500.000	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	168.278.274	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	41.794.217.382	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.182.540.752	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	21.868.888	0,00
Total Pendapatan		545.622.680.000	1.229.296.647.039	225,30

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan per tanggal pelaporan berdasarkan Eselon I tersaji pada tabel 9.

Tabel 9
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2025 per Eselon I

No	Eselon I	Estimasi	Realisasi	% Realisasi Pendapatan
1	Setjen	19.239.238.000	23.751.639.763	123,45
2	Itjen	-	83.796.309	0,00
3	Ditjen Polpum	-	314.277.102	0,00
4	Ditjen Bina Adwil	-	923.742.920	0,00
5	Ditjen Bina Pemdes	737.073.000	23.700.056.668	3215,43
6	Ditjen Bina Bangda	-	6.528.831.078	0,00
7	Ditjen Otda	-	332.388.676	0,00
8	Ditjen Dukcapil	464.890.871.000	1.107.113.298.287	238,14
9	Ditjen Bina Keuda	-	15.910.505	0,00
10	BSKDN	-	104.784.760	0,00
11	BPSDM	60.755.498.000	66.427.920.971	109,34
Jumlah		545.622.680.000	1.229.296.647.039	225,30

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan per satker disajikan pada **Lampiran I** (Rekap Laporan PNBPN).

Rincian realisasi pendapatan per tanggal pelaporan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan Eselon I tersaji pada tabel 10.

Tabel 10
Perbandingan Realisasi PNBPN
untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Eselon I

No	Eselon I	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik (Turun) %
1	Setjen	23.751.639.763	27.455.178.729	(13,49)
2	Itjen	83.796.309	302.113.155	(72,26)
3	Ditjen Polpum	314.277.102	141.897.551	121,48
4	Ditjen Bina Adwil	923.742.920	810.701.626	13,94
5	Ditjen Bina Pemdes	23.700.056.668	4.310.043.515	449,88
6	Ditjen Bina Bangda	6.528.831.078	3.702.959.209	76,31
7	Ditjen Otda	332.388.676	61.401.202	441,34
8	Ditjen Dukcapil	1.107.113.298.287	864.477.683.755	28,07
9	Ditjen Bina Keuda	15.910.505	118.018.368	(86,52)
10	BSKDN	104.784.760	34.288.826	205,59
11	BPSDM	66.427.920.971	71.191.043.910	(6,69)
Jumlah		1.229.296.647.039	972.605.329.846	26,39

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.229.296.647.039,00 mengalami kenaikan sebesar 26,39% dibandingkan realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp972.605.329.846,00. Kenaikan pendapatan ini karena bertambahnya nilai PNBPN fungsional berupa Pendapatan Jasa Tenaga,

Pekerjaan, dan Informasi yang merupakan pendapatan dari penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri pasal 1 ayat (1) huruf f, yaitu pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan pada Ditjen Dukcapil.

Realisasi Belanja
Rp3.769.888.073.000,00

B.2. BELANJA

Realisasi belanja Kemendagri sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.769.888.073.000,00 atau 78,07% dari anggaran belanja sebesar Rp4.828.552.050.000,00. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 27,07% dibandingkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.169.335.036.396,00. Penurunan realisasi belanja ini karena adanya efisiensi serta pagu blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Rincian anggaran belanja dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 menurut jenis belanja disajikan pada tabel 11.

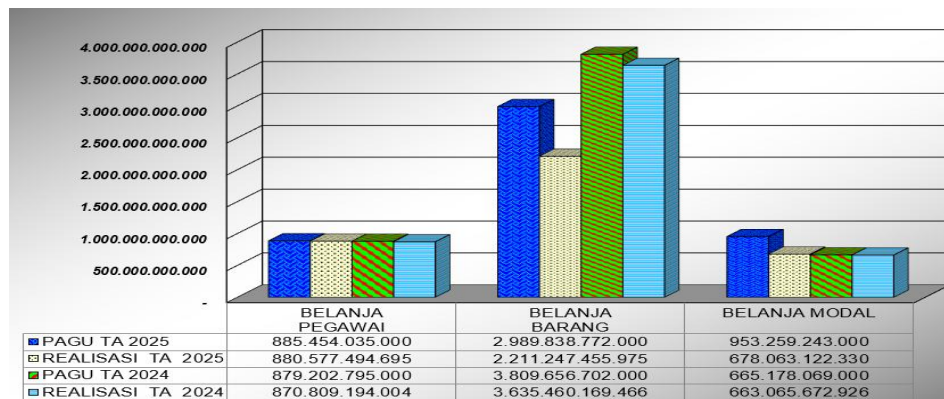
Tabel 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025		%	2024		%	Selisih Realisasi Belanja	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Rp	%
Belanja Bruto								
Belanja Pegawai	885.454.035.000	880.787.425.327	99,47	879.202.795.000	871.025.629.871	99,07	9.761.795.456	1,12
Belanja Barang	2.989.838.772.000	2.214.875.829.841	74,08	3.809.656.702.000	3.638.733.335.388	95,51	(1.423.857.505.547)	(39,13)
Belanja Modal	953.259.243.000	678.063.122.330	71,13	665.178.069.000	663.082.040.140	99,68	14.981.082.190	2,26
Total Belanja Bruto	4.828.552.050.000	3.773.726.377.498	78,15	5.354.037.566.000	5.172.841.005.399	96,62	(1.399.114.627.901)	(27,05)
Pengembalian Belanja								
Belanja Pegawai	-	209.930.632	0,00	-	216.435.867	0,00	(6.505.235)	(3,01)
Belanja Barang	-	3.628.373.866	0,00	-	3.273.165.922	0,00	355.207.944	10,85
Belanja Modal	-	-	0,00	-	16.367.214	0,00	(16.367.214)	(100,00)
Total Pengembalian Belanja	-	3.838.304.498	0,00	-	3.505.969.003	0,00	332.335.495	9,48
Belanja Neto	4.828.552.050.000	3.769.888.073.000	78,07	5.354.037.566.000	5.169.335.036.396	96,55	(1.399.446.963.396)	(27,07)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Satker disajikan pada **Lampiran II** (Rekap Laporan Belanja).

Komposisi anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja disajikan pada Grafik 1.

**Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Neto
T.A. 2025 dan T.A. 2024**



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel 12.

**Tabel 12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program
s.d. 31 Desember 2025**

Kode	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
WA	Program Dukungan Manajemen	2.106.261.396.000	2.071.429.382.136	98,35
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	640.403.777.000	437.477.359.288	68,31
CP	Program Tata Kelola Kependudukan	1.917.921.124.000	1.108.708.043.945	57,81
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	163.965.753.000	152.273.287.631	92,87
Jumlah		4.828.552.050.000	3.769.888.073.000	78,07

Rincian anggaran dan realisasi belanja per unit Eselon I sampai dengan 31 Desember 2025 dan realisasi belanja per unit Eselon I sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel 13.

**Tabel 13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bruto
s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Unit Eselon I**

No	Eselon I	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Belanja Bruto 2025 (Rp)	%	Realisasi Belanja Bruto 2024 (Rp)
1	Setjen	1.203.451.903.000	1.196.441.582.866	99,42	1.335.056.785.902
2	Itjen	74.902.301.000	75.012.285.983	100,15	88.261.883.714
3	Ditjen Polpum	228.816.877.000	217.120.382.866	94,89	220.430.489.194
4	Ditjen Bina Adwil	216.596.903.000	128.626.755.937	59,39	210.972.613.374
5	Ditjen Bina Pemdes	165.770.824.000	151.674.107.522	91,50	1.093.324.279.868
6	Ditjen Bina Bangda	416.948.656.000	356.816.541.273	85,58	480.348.606.361
7	Ditjen Otda	95.199.015.000	71.440.393.395	75,04	91.113.353.918
8	Ditjen Dukcapil	2.001.814.306.000	1.188.968.100.608	59,39	1.261.819.250.731
9	Ditjen Bina Keuda	109.386.087.000	78.250.597.845	71,54	107.493.995.075
10	BSKDN	57.481.498.000	50.937.321.342	88,62	54.579.518.742
11	BPSDM	258.183.680.000	258.438.307.861	100,10	229.440.228.520
Jumlah Keseluruhan		4.828.552.050.000	3.773.726.377.498	78,15	5.172.841.005.399

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja transaksi kas yang terjadi pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai kontra pos belanja pada periode pelaporan. Pengembalian belanja atas belanja yang terjadi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.838.304.498,00. Rincian realisasi pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Eselon I disajikan pada tabel 14.

Tabel 14
Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Eselon I
s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Eselon I	Pengembalian Belanja 31 Desember 2025 (Rp)	Pengembalian Belanja 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
1	Setjen	740.402.296	1.214.610.332	(39,04)
2	Itjen	132.773.348	62.222.712	113,38
3	Ditjen Polpum	3.851.707	17.948.093	(78,54)
4	Ditjen Bina Adwil	141.703.301	182.980.289	(22,56)
5	Ditjen Bina Pemdes	262.484.411	1.009.767.112	(74,01)
6	Ditjen Bina Bangda	253.366.209	376.801.092	(32,76)
7	Ditjen Otda	154.642.918	210.146.937	(26,41)
8	Ditjen Dukcapil	614.720.508	135.368.324	354,11
9	Ditjen Bina Keuda	88.810.340	165.708.509	(46,41)
10	BSKDN	5.819.988	24.632.380	(76,37)
11	BPSDM	1.439.729.472	105.783.223	1261,02
Jumlah Pengembalian		3.838.304.498	3.505.969.003	9,48

Realisasi pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp332.335.495,00 atau sebesar 9,48% dibandingkan dengan pengembalian realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Neto sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji pada tabel 15.

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Neto
s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis Belanja	Realisasi Belanja Neto 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi Belanja Neto 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	880.577.494.695	870.809.194.004	1,12
Belanja Barang	2.211.247.455.975	3.635.460.169.466	(39,18)
Belanja Modal	678.063.122.330	663.065.672.926	2,26
Jumlah Belanja	3.769.888.073.000	5.169.335.036.396	(27,07)

*Realisasi Belanja
Pegawai
Rp880.577.494.695,00*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp880.577.494.695,00 atau 99,45% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp885.454.035.000,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,12% dibandingkan realisasi Belanja

Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp870.809.194.004,00. Kenaikan Belanja Pegawai ini berasal dari Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito sebagai dampak penerimaan pegawai CPNS dan PPPK TA 2025 namun terdapat penurunan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS berasal dari CPNS Purna Praja IPDN Angkatan XXXI dan XXXII pembayaran gajinya sudah bukan di Kemendagri lagi namun sesuai dengan penempatan masing-masing. Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel 16.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Urian	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	391.461.160.251	436.547.676.918	(10,33)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	2.493.260.000	2.399.008.376	3,93
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	-	348.272.400	(100,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	35.222.592.001	2.599.238.722	1.255,11
Belanja Lembur	13.805.553.000	16.557.715.000	(16,62)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	437.804.860.075	412.573.718.455	6,12
Jumlah Belanja Bruto	880.787.425.327	871.025.629.871	1,12
Pengembalian Belanja			
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	190.951.145	85.557.077	123,19
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	13.245.204	-	0,00
Belanja Lembur	2.675.450	-	0,00
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	3.058.833	130.878.790	(97,66)
Jumlah Pengembalian Belanja	209.930.632	216.435.867	(3,01)
Jumlah Belanja Neto	880.577.494.695	870.809.194.004	1,12

Pengembalian belanja pegawai sebesar Rp209.930.632,00 antara lain disebabkan oleh adanya mutasi pegawai yang gajinya telah dibayarkan terlebih dahulu pada awal bulan, adanya pegawai PPPK yang mengundurkan diri, serta adanya kelebihan pembayaran jam pada uang lembur pegawai.

Belanja Barang
Rp2.211.247.455.975,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.211.247.455.975,00 atau 73,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.989.838.772.000,00. Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan 39,18% dibandingkan realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.635.460.169.466,00. Penurunan belanja ini karena adanya efisiensi serta pagu blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada tabel 17.

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Bruto			
Belanja Barang Operasional	276.111.765.034	301.658.037.735	(8,47)
Belanja Barang Non Operasional	266.938.497.628	308.059.008.029	(13,35)
Belanja Barang Persediaan	16.235.363.828	41.286.970.581	(60,68)
Belanja Jasa	936.496.582.554	1.834.504.759.148	(48,95)
Belanja Pemeliharaan	142.829.505.615	135.189.625.734	5,65
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	259.404.492.884	564.784.606.521	(54,07)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	4.516.418.186	13.783.572.232	(67,23)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	45.841.107.871	149.547.745.904	(69,35)
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas	-	865.762.700	(100,00)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	266.502.096.241	289.053.246.804	(7,80)
Jumlah Belanja Bruto	2.214.875.829.841	3.638.733.335.388	(39,13)
Pengembalian Belanja			
Belanja Barang Operasional	35.587.243	43.714.637	(18,59)
Belanja Barang Non Operasional	10.435.075	18.928.550	(44,87)
Belanja Barang Persediaan	2.497.800	-	0,00
Belanja Jasa	655.587.701	125.180.754	423,71
Belanja Pemeliharaan	188.132.914	409.814.527	(54,09)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.482.080.785	2.251.053.174	10,26
Belanja Perjalanan Luar Negeri	188.496.128	424.474.280	(55,59)
Belanja Barang utk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	65.556.220	-	0,00
Jumlah Pengembalian Belanja	3.628.373.866	3.273.165.922	10,85
Jumlah Belanja Neto	2.211.247.455.975	3.635.460.169.466	(39,18)

Belanja Modal
Rp678.063.122.330,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp678.063.122.330,00 atau 71,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp953.259.243.000,00. Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 2,26% dibandingkan realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp663.065.672.926,00. Meskipun terjadi kenaikan realisasi anggaran namun karena adanya efisiensi serta pagu blokir sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 belanja modal tahun 2025 menjadi tidak optimal karena hanya terserap 71,13%.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per akun sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 terdapat pada Tabel 18.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Akun
s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

MAK	Uraian	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) (%)
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	590.351.582.179	546.333.581.481	8,06
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.126.116.520	15.945.113.521	63,85
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.088.260.300	769.825.000	301,16
5361	Belanja Modal Lainnya	58.497.163.331	100.033.520.138	(41,52)
Jumlah Belanja Bruto		678.063.122.330	663.082.040.140	2,26
Pengembalian Belanja Modal		-	16.367.214	(100,00)
Jumlah Belanja Neto		678.063.122.330	663.065.672.926	2,26

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp590.351.582.179,00*

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp590.351.582.179,00 dan Rp546.327.075.767,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 8,06% dibandingkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2024. Perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 terdapat pada Tabel 19.

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	589.799.611.890	543.210.707.156	8,58
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	551.970.289	3.122.874.325	(82,32)
Pengembalian			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	6.505.714	(100,00)
Jumlah Belanja Neto	590.351.582.179	546.327.075.767	8,06

*Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp26.126.116.520,00*

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp26.126.116.520,00 dan Rp15.945.113.521,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 63,85% dibandingkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024. Kenaikan belanja ini disebabkan adanya tambahan anggaran di TA 2025 untuk renovasi gedung beberapa satker, salah satunya yang paling besar pada satker Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 terdapat pada tabel 20.

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.776.334.007	187.685.000	1379,25
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	23.349.782.513	15.757.428.521	48,18
Jumlah Belanja Bruto	26.126.116.520	15.945.113.521	63,85
Pengembalian	-	-	0,00
Jumlah Belanja Neto	26.126.116.520	15.945.113.521	63,85

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp3.088.260.300,00*

B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.088.260.300,00 dan Rp769.825.000,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami Kenaikan sebesar 301,16% dibandingkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024. Kenaikan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ini sebagian besar pada satker Institut Pemerintahan Dalam Negeri berupa pembuatan irigasi saluran air pada barak praja dan Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II berupa pengaspalan jalan. Perbandingan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 terdapat pada tabel 21.

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	630.465.000	-	100,00
Belanja Modal Irigasi	2.100.652.800	-	100,00
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	308.302.500	-	100,00
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	48.840.000	769.825.000	(93,66)
Jumlah Belanja	3.088.260.300	769.825.000	301,16

*Belanja Modal
Lainnya
Rp58.497.163.331,00*

B.5.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp58.497.163.331,00 dan Rp100.023.658.638,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 41,52% dibandingkan realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	58.163.620.331	95.111.415.719	(38,85)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	333.543.000	4.922.104.419	(93,22)
Jumlah Belanja Bruto	58.497.163.331	100.033.520.138	(41,52)
Pengembalian	-	9.861.500	0,00
Jumlah Belanja Neto	58.497.163.331	100.023.658.638	(41,52)

B.6 Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja

Pada T.A. 2025 Kemendagri menerima alokasi anggaran sebesar Rp4.828.552.050.000,00 dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.769.888.073.000,00 atau 78,07% dari anggarannya dengan rincian menurut jenis satker pada tabel 23.

Tabel 23
Rincian Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja
s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025		31 Desember 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Satuan Kerja Pusat dan Daerah	4.827.340.708.000	3.772.521.064.551	5.306.271.772.000	5.126.335.123.319
Realisasi Pengembalian Belanja	-	3.838.304.498	-	3.436.475.347
Satker Pusat & Daerah Setelah Pengembalian	4.827.340.708.000	3.768.682.760.053	5.306.271.772.000	5.122.898.647.972
Dekonsentrasi	1.211.342.000	1.205.312.947	46.833.820.000	45.574.475.680
Realisasi Pengembalian Belanja	-	-	-	69.200.856
Dekonsentrasi Setelah Pengembalian	1.211.342.000	1.205.312.947	46.833.820.000	45.505.274.824
Tugas Pembantuan	-	-	931.974.000	931.406.400
Realisasi Pengembalian Belanja	-	-	-	292.800
Tugas Pembantuan Setelah Pengembalian	-	-	931.974.000	931.113.600
Jumlah Belanja	4.828.552.050.000	3.769.888.073.000	5.354.037.566.000	5.169.335.036.396

*Belanja Dana
Dekonsentrasi
Rp1.205.312.947,00*

1) Dana Dekonsentrasi

Pada T.A. 2025 Kemendagri mengalokasikan Dana Dekonsentrasi kepada Pemerintah Provinsi melalui program dan kegiatan yang terdapat pada Ditjen Bina Adwil sebesar Rp1.211.342.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.205.312.947,00 atau 99,50% dari anggaran, dengan pengembalian belanja sebesar Rp0,00, sehingga realisasi belanja netto sebesar Rp1.205.312.947,00. Penurunan belanja ini merupakan tindak lanjut Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Terdapat efisiensi pada Ditjen Bina Adwil sehingga dana dekonsentrasi yang awalnya dialokasikan kepada 181 satker dekonsentrasi, s.d. 31 Desember 2025 terdapat penarikan pagu ke pusat sehingga tersisa 18 satker

dekonsentrasi yang memperoleh alokasi anggaran.

Sebagai perbandingan, alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp46.833.820.000,00 dan terealisasi sebesar Rp45.574.475.680,00 atau 97,31% dari anggaran, dengan pengembalian belanja sebesar Rp69.200.856,00, sehingga realisasi belanja netto sebesar Rp45.505.274.824,00. Rincian realisasi Dana Dekonsentrasi disajikan pada tabel 24.

Tabel 24
Perbandingan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi per Eselon I
s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Eselon I	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
1	Ditjen Bina Adwil	1.205.312.947	45.574.475.680	(97,36)
	Pengembalian	-	69.200.856	(100,00)
	Belanja Neto	1.205.312.947	45.505.274.824	(97,35)

*Belanja Dana Tugas
Pembantuan Rp0,00*

2) Dana Tugas Pembantuan

Pada T.A. 2025 Kemendagri mengalokasikan anggaran Dana Tugas Pembantuan kepada Pemerintah kabupaten/kota melalui program kegiatan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp0,00.

Sebagai perbandingan, sampai dengan 31 Desember 2024 mengalokasikan anggaran Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp931.974.000,00, dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp931.406.400,00 atau 99,91% setelah dikurangi pengembalian sebesar Rp292.800,00. Rincian realisasi Dana Tugas Pembantuan disajikan pada tabel 25.

Tabel 25
Perbandingan Realisasi Belanja Dana Tugas Pembantuan
per Eselon I s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Eselon I	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
1	Ditjen Bina Adwil	-	931.406.400	(100,00)
	Pengembalian	-	292.800	(100,00)
	Jumlah	-	931.113.600	-100,00

B.7 Pengungkapan Lainnya

A. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG.

Pendapatan hibah adalah hibah yang diterima oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, Pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH, Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah langsung berupa kas, barang dan jasa baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri melakukan pengesahan atas pendapatan dan belanja sebagai dokumen sumber pencatatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Satker di Kementerian Negara/Lembaga membukukan dokumen sumber berupa Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) atas belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang dan membukukan dokumen sumber berupa Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) atas belanja yang bersumber dari hibah langsung berupa Barang/Jasa yang diterbitkan KPPN.

Dalam Bab II Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah menyebutkan bahwa tanggung jawab pelaksanaan penatausahaan pendapatan hibah berada pada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang secara struktural dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (EAS). Berdasarkan hal tersebut maka Laporan Realisasi Anggaran Kemendagri tidak menyajikan Pendapatan Hibah-LRA dan Laporan Operasional Kemendagri tidak menyajikan Pendapatan Hibah-LO.

Atas pengeluaran yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang, Kemendagri mencatat belanja pada Laporan Realisasi Anggaran pada saat dilakukan pengesahan oleh KPPN sebesar nilai yang disahkan oleh KPPN, dan mencatat beban pada Laporan Operasional pada saat resume tagihan sebesar nilai yang tercantum dalam resume tagihan. Kemendagri mencatat kas atas penerimaan hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Neraca.

Atas hibah dalam bentuk barang, Kemendagri mencatat aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan dari hibah pada saat aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan diterima oleh Kemendagri sebesar nilai aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan yang diterima oleh Kemendagri berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Atas hibah dalam bentuk jasa, Kemendagri mencatat beban jasa dari hibah tersebut pada saat resume tagihan sebesar nilai jasa yang diterima oleh

Kemendagri berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pada tahun 2025 Kemendagri melakukan Pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk uang/barang/jasa sebesar Rp144.836.754.354,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal menerima hibah langsung berupa Barang sebesar Rp24.595.310.000,00 dan Jasa sebesar Rp27.112.937.092,00.
2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri menerima hibah langsung berupa Barang sebesar Rp994.126.500,00.
3. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menerima hibah langsung berupa Barang sebesar Rp22.294.863.607,00.
4. Ditjen Bina Pembangunan Daerah menerima hibah langsung berupa Jasa sebesar Rp11.465.574.447,00 dan Uang sebesar Rp7.217.097.412,00.
5. Ditjen Otonomi Daerah menerima hibah langsung berupa Jasa sebesar Rp4.674.387.330,00.
6. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima hibah langsung berupa Uang sebesar Rp42.153.480.000,00.
7. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menerima hibah langsung berupa Jasa sebesar Rp4.328.977.966,00.

Rincian hibah langsung barang jasa dan uang tahun anggaran 2025 disajikan dalam **Lampiran III**.

Pada periode pelaporan Tahun 2025, Kemendagri memiliki Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu pada satker Ditjen Bina Bangda dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemerintah Australia memberikan hibah langsung dalam bentuk Jasa berupa hibah jasa dalam rangka *Synergies and Collaboration for Basic Service Delivery Acceleration* atau Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) sebesar Rp4.441.217.250,00 dengan Nomor Register 27BMXZ9A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor tanggal serta 02/BAST-KEMENDAGRI/05/2024 tanggal 29 Mei 2024.
2. UNFPA memberikan hibah langsung dalam bentuk Jasa dalam rangka *Implementation Of UNFPA-Funded Workplans Relating To The 2021-2025 UNFPA Country Programme For Republic Indonesia* sebesar Rp27.855.621,00 dengan Nomor Register 2TCK92FA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor IPA 17 .02.21 tanggal 17 Februari 2021 serta 280/RFP/12-2024 tanggal 13 Desember 2024.

Lanjutan Pengelolaan Hibah Langsung Tahun 2023.

Direktorat Bina Pembangunan Daerah menerima hibah langsung dalam bentuk uang dari Pemerintah Uni Emirat Arab untuk *Financing the Regional Development Program* pada Tahun 2023. Pendapatan hibah tersebut sudah disahkan pada Tahun 2023 sebesar USD15.000.000,00 atau Rp235.500.000.000,00 dengan Nomor Register Hibah 27YDNA6A serta Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Nomor GA.10.04.2023 tanggal 10 April 2023.

Pengesahan belanja yang bersumber dari hibah langsung Tahun 2023 sebesar Rp4.167.300.475,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp169.102.497.549,00, dan Tahun 2025 sebesar Rp47.845.293.245,00. Dengan demikian total realisasi belanja yang bersumber dari hibah langsung sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp221.115.091.269,00 dan saldo dana hibah per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.384.908.731,00.

B. PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI.

Kemendagri Tahun 2025 mengelola anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri untuk kegiatan pada satker dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ditjen Bina Pemerintahan Desa mengelola anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp11.043.879.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp11.006.661.168,00 atau 99,66% dari anggarannya yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. ***Proyek Improvement Village Service Delivery* atau Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).**

- 1) Tujuan Program. Program yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan atau institusi desa untuk memperbaiki kualitas belanja desa di lokasi proyek Program, melalui:
 - a) Perbaikan kinerja pemerintah dan aparat desa melalui penguatan sistem peningkatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan.
 - b) Perbaikan sistem pendampingan dan peningkatan kapasitas untuk masyarakat dalam rangka memperkuat pembangunan partisipatif.
 - c) Pengenalan sistem transfer insentif berbasis kinerja (*performance-based grant*, PBG) untuk menguji model dukungan melalui insentif untuk perbaikan kinerja di tingkat desa dan kabupaten.
 - d) Penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi untuk memperbaiki koordinasi, supervisi monitoring dan evaluasi kinerja desa serta mendorong pemakaian data dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat desa.

Dengan adanya Proyek P3PD ini pada akhirnya diharapkan akan berkontribusi terhadap perbaikan layanan dan dukungan sosial-ekonomi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat desa.

- 2) Lokasi Sasaran. Sesuai tujuan P3PD, maka kriteria pertama pemilihan kabupaten adalah kabupaten/kota yang mendapatkan Dana Desa. Selanjutnya, kabupaten/kota dinilai berdasarkan kapasitas pemerintah desa dan kabupaten yang diukur dari indikator sebagai berikut:
 - a) Peningkatan kapasitas pemerintah desa yang mempengaruhi status pembangunan di desa dan kabupaten. Indikator status pembangunan desa dan kapasitas pemerintah desa diproksi dari

variabel berikut ini:

- Akses ke sarana prasarana dasar berdasarkan data PODES 2018.
- Kapasitas pemerintah desa (latar belakang Pendidikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, dan kelengkapan komposisi aparat inti desa) – data PODES 2018.
- Kemampuan penganggaran pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas desa (dari alokasi desa untuk peningkatan kapasitas) – data SIPEDE 2018.

b) Kapasitas pemerintah desa dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah kabupaten dalam mendukung pemerintahan desa. Dalam hal ini proksi yang dapat dilakukan dengan mengacu pada alokasi ADD per desa – data Siskeudes.

3) Kelompok Sasaran.

Aparat desa di kabupaten terpilih akan mendapat manfaat dalam bentuk akses ke kegiatan pelatihan maupun dukungan pembinaan teknis yang akan dilaksanakan antara lain melalui *platform* digital (*e-learning*), forum belajar desa di tingkat kecamatan, kegiatan pelatihan tatap-muka, serta fasilitasi oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten. Masyarakat desa di kabupaten terpilih akan mendapat manfaat dalam bentuk akses ke kegiatan pelatihan dan pendampingan yang akan dilaksanakan antara lain melalui pembukaan akses terhadap *platform* Akademi Desa 4.0, akses terhadap pendampingan dan Forum Belajar Desa. Masyarakat juga akan mendapatkan akses kepada sistem penanganan keluhan dan pengawasan pembangunan desa berbasis digital.

Selain aparat dan masyarakat desa, pemerintah pusat dan daerah juga akan mendapat dukungan melalui penguatan koordinasi pembangunan desa serta pembuatan sistem informasi desa terintegrasi yang akan menggabungkan data penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta belanja desa dari kementerian/lembaga terkait. Sistem informasi terintegrasi ini akan menjadi sumber data untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan dan belanja desa serta kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Data dan analisis dari sistem informasi ini juga diharapkan akan menjadi masukan dalam pembahasan kebijakan terkait pemerintahan dan pembangunan desa kedepannya.

4) Pendanaan.

Selain dari dana pinjaman IBRD, pencapaian target sasaran P3PD memerlukan Dana Rupiah Murni (RM) yang bersumberkan dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan) dan APBDesa serta kontribusi masyarakat. Bentuk dana RM ini adalah salah satu wujud operasional atau pelaksanaan dari *platform* nasional pengembangan kapasitas pemerintahan dan pembangunan desa, yang mana dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pencapaian tujuan P3PD.

Selain dana RM, Kementerian dan Lembaga mengalokasikan dana

paralel dari Pemerintah Pusat (APBN RM), untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dialokasikan dari porsi pinjaman luar negeri, seperti biaya operasional dan gaji/tunjangan bagi pegawai negeri dalam pengelolaan P3PD atau porsi pembiayaan untuk kegiatan tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia.

Dana Rupiah Murni lainnya dapat dicatat dalam bentuk program atau kegiatan (bukan dalam bentuk *in cash* yang langsung disalurkan melalui P3PD), namun memberikan kontribusi atau dukungan terhadap pelaksanaan P3PD baik di tingkat pusat maupun daerah dan desa.

Porsi Rupiah Murni yang dapat dihitung ke dalam kontribusi pendanaan P3PD adalah sebagai berikut:

- a) APBN/APBD yang dikelola oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang terlibat dalam P3PD untuk operasional PMU/PIU dan Sekretariat terkait PNS, misalnya biaya pertemuan, honorarium narasumber, perdiem, biaya pemantauan dan supervisi.
 - b) APBN/APBD yang digunakan untuk membiayai sebagian kegiatan P3PD, seperti rapat koordinasi, lokakarya, pelatihan, bantuan teknis dan fasilitator, dan lainnya.
 - c) APBDesa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat desa.
- 5) Rincian Pinjaman.

Rincian pinjaman luar negeri dalam rangka pembiayaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) sebagai berikut:

Nomor ID Pinjaman	: IBRD 8941-ID
Pemberi Pinjaman	: <i>World Bank</i>
Tanggal Perjanjian	: 30 Januari 2020
Nomor Register	: 1CZ6CF2A
<i>Effective Date</i>	: 30 Januari 2020
Jumlah Pinjaman	: USD300.000.000,00
Nomor Reksus	: 601306411980
<i>Closing date</i>	: 30 Juni 2025
<i>Executing Agency</i>	: Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 untuk program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa sebesar Rp7.447.772.715,00 atau 99,98% dari anggarannya sebesar Rp7.449.581.000,00.

Tabel 26

Pagu dan Realisasi PLN P3PD periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025

Program/Kegiatan/Output					Pagu	Realisasi	%
No	Kode Program	Nama Program					
		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan				
			Kode Output	Nama Output			
1	2	3	4	5	6	7	8
	CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa					
		CM.6484	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa				
			BAH.001	Dukungan Manajemen P3PD	7.449.581.000	7.447.772.715	99,98
TOTAL					7.449.581.000	7.447.772.715	99,98

b. ***Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP).***

Integrated Land Administration and Spatial Planning merupakan inisiatif yang dimulai dengan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan data pertanahan dan sistem administrasi yang ada, agar semua lahan di Indonesia dapat terpetakan dengan jelas dan menghindari potensi masalah serupa di masa depan. ILASP juga akan melibatkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi untuk memperkuat implementasinya dan memperluas cakupannya.

Program ILASP diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam penyelesaian berbagai konflik lahan yang seringkali menghambat pembangunan dan investasi di Indonesia. Tumpang tindih lahan, terutama yang terjadi antara kawasan hutan dan perkebunan sawit, transmigrasi, serta perumahan, telah menimbulkan banyak masalah. Dengan adanya integrasi sistem dan data pertanahan yang lebih baik, diharapkan kedepannya masalah tersebut dapat diminimalisir dan pengelolaan lahan bisa lebih efisien.

Anggaran program ILASP yang dimulai tahun 2025 dan yang akan berakhir pada tahun 2029 bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Bank Dunia dengan jumlah pinjaman sebesar JPY94.877.700.000,00 sebagaimana tercantum dalam *Loan Agreement* 9732-ID. Kementerian Dalam Negeri yang bertindak sebagai *Project Implementation Unit* (PIU). Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 untuk program *Integrated Land Administration and Spatial Planning Project* (ILASP) sebesar Rp3.585.018.453,00 atau 99,74% dari anggarannya sebesar Rp3.594.298.000,00.

Tabel 27
Pagu dan Realisasi PLN ILASP periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025

Program/Kegiatan/Output					Pagu	Realisasi	%
No	Kode Program	Nama Program					
		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan				
			Kode Output	Nama Output			
1	2	3	4	5	6	7	8
	CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa					
		CM.1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa				
			UBB.007	Desa yang telah memiliki peta batas Desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta batas desa	3.594.298.000	3.585.018.453	99,74
TOTAL					3.594.298.000	3.585.018.453	99,74

2. Ditjen Bina Pembangunan Daerah mengelola anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp181.778.250.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp172.224.232.139,00 atau 94,74% dari anggarannya yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

a. *Improvement of Solid Waste Management Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP).*

1) Latar Belakang.

Improvement of Solid Waste Management Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mendukung gerakan Citarum Harum. Terdapat empat komponen kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan dalam pengelolaan sampah, dukungan dalam perencanaan yang terpadu dan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah dan dukungan dalam pelaksanaan program dan bantuan teknis.

Pengelolaan sampah yang kurang memadai akan berdampak pada berbagai aspek, seperti lingkungan, estetika, kesehatan manusia, serta dapat memberikan dampak lanjutan yang berujung pada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Umumnya, sampah yang tidak tertangani akan berakhir dengan cara dibakar secara terbuka, dikubur, ataupun dibuang bebas ke lingkungan tanpa pengolahan lebih lanjut. Hal tersebut menjadikan sampah yang tidak tertangani berpotensi menjadi sumber pencemaran yang signifikan, menurunkan produktivitas, dan mengganggu kesehatan serta memicu timbulnya penyakit, merusak estetika, hingga tingginya pengeluaran untuk biaya kesehatan. Sampah yang tidak tertangani yang masuk ke badan sungai pun akan menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir pada musim hujan. Di sisi lain, pencegahan banjir dengan pengerukan sampah pada saluran air pun menelan biaya yang cukup tinggi terutama bagi kota-kota yang berada di pesisir dimana sampah akan bermuara sehingga berpotensi dan

menghambat tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2) Tujuan Program.

Program Kegiatan *Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project* (ISWMP), merupakan program yang didesain untuk dapat membantu pembangunan dan pelaksanaan pengelolaan sampah yang layak dengan peningkatan keseluruhan aspek terkait dalam sektor pengelolaan sampah untuk mendukung upaya pencapaian target akses universal persampahan, khususnya di wilayah perkotaan.

Tujuan utama dari pengembangan program ISWMP adalah untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah bagi penduduk perkotaan pada 8 (delapan) kota terpilih di wilayah Indonesia diantaranya: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung barat, Kab. Cianjur, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, dan Kab. Karawang.

3) Dalam rangka mencapai tujuan utama di atas, maka program ini akan dilaksanakan melalui 4 komponen sebagai berikut:

- a) Komponen 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Sampah.
- b) Komponen 2. Perencanaan Terpadu dan Peningkatan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- c) Komponen 3. Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah.
- d) Komponen 4. Dukungan Pelaksanaan Program, Bantuan Teknis, dan Monitoring dan Evaluasi.

4) Target Program.

Penerima manfaat Program Kegiatan *Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project* (ISWMP) antara lain:

- a) Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab diberbagai aspek, baik teknis maupun administratif, dalam pengelolaan sampah.
- b) Pemerintah Provinsi yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah regional.
- c) Pemerintah Kabupaten/Kota prioritas.

5) Rincian Pinjaman.

Nomor Perjanjian	: IBRD 9021-ID
Nomor Register	: 1HFQ7GNA
Tanggal Penandatanganan	: 27 Desember 2019
Tanggal Efektif Perjanjian PHLN	: 3 April 2020
Closing Date	: 30 November 2025

Jumlah Pinjaman Luar Negeri : USD100.000.000,00
Executing Agency : Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum

6) Pelaksanaan Kegiatan.

Lembaga pelaksana kegiatan pada Program ISWMP terdiri dari Kementerian dan Lembaga, yaitu:

- a) *Executing Agency*: Direktur Jenderal Cipta Karya atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- b) *Steering Committee*: Bappenas, Kemenko Maritim, KemenPUPR, KemenKeu, Kemendagri.
- c) CPMU: Ditjen Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum.
- d) CPIU terdiri dari:
 - Direktorat PPLP, Ditjen Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum
 - Direktorat SUPD I & II Ditjen Bina Bangda, Kemendagri
 - Ditjen Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 – Kementerian LHK.

Peran CPIU Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam ISWMP, adalah:

- a) Membina Pemda dalam pengarusutamaan/prioritisasi pembangunan sektor persampahan;
- b) Mendorong penyusunan kebijakan dan panduan tingkat daerah dalam rangka pencapaian target pengelolaan persampahan;
- c) Mendorong peningkatan alokasi APBD untuk pengelolaan persampahan;
- d) Memfasilitasi Pemda kab/kota pilot dalam menetapkan target Proyek SWM sesuai kinerja Kab/Kota masing-masing.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp29.940.559.282,00 atau 98,25% dari anggarannya sebesar Rp30.473.276.000,00.

Tabel 28

Pagu dan Realisasi PLN ISWMP periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025

Program/Kegiatan/Output					Pagu	Realisasi	%
No	Kode Program	Nama Program					
		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan				
			Kode Output	Nama Output			
1	2	3	4	5	6	7	8
	CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa					
		CM.6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah				
			FBA.800	Fasilitasi Pengelolaan Sampah Terpadu di Kawasan Sungai Citarum (ISWMP)	30.473.276.000	29.940.559.282	98,25
TOTAL					30.473.276.000	29.940.559.282	98,25

b. *National Urban Flood Resilience Project (NUFReP).*

1) Tujuan NUFReP.

Tujuan NUFReP adalah mengurangi risiko banjir di kota-kota terpilih di Indonesia melalui peningkatan kapasitas di tingkat nasional dan kota serta investasi untuk pengelolaan risiko banjir perkotaan terpadu. Ketercapaian tujuan dari NUFReP diukur dengan Indikator Utama dan Indikator Antara yang meliputi:

a) Indikator Utama (*Project Development Objective/PDO Indicators*)

- Jumlah penduduk yang mendapat manfaat dari upaya ketangguhan banjir perkotaan terpadu di bawah proyek;
- Program nasional ketangguhan banjir perkotaan terbentuk yang panduannya diadopsi untuk pembiayaan investasi, penguatan kelembagaan, dan pertukaran pengetahuan;
- Tim koordinasi antar lembaga tingkat kota terkait ketangguhan banjir perkotaan terbentuk dan berfungsi; serta
- Peraturan perundangan dan/atau kebijakan mengenai ketangguhan banjir perkotaan terpadu yang diadopsi oleh pemerintah kota.

b) Indikator Antara (*Intermediate Results Indicators*)

- Kota-kota dengan model dan pemetaan risiko banjir yang diperbarui untuk mengatasi dampak urbanisasi dan perubahan iklim;
- Kota-kota dengan rencana aksi ketangguhan banjir perkotaan tahun jamak yang dikembangkan dengan langkah-langkah terpadu dan pertimbangan risiko iklim;
- Peningkatan atau perbaikan tepi sungai atau drainase;
- Kegiatan subproyek dengan infrastruktur hijau (*green infrastructure*) dan desain perkotaan yang ramah air (*water*

sensitive urban design);

- Kota-kota dengan sistem peringatan dini banjir yang ditingkatkan dan berfungsi;
 - Subproyek yang selesai (*completed*) memiliki rencana operasional dan pemeliharaan yang biayanya telah dimasukkan ke dalam anggaran tahunan;
 - Individu yang mendapat pelatihan tentang topik-topik pengelolaan risiko banjir yang relevan;
 - Keterwakilan perempuan dengan posisi pengambil keputusan dalam tim koordinasi ketangguhan banjir perkotaan di tingkat kota;
 - Penerima manfaat (perempuan) yang melaporkan bahwa mereka telah meningkat pengetahuannya untuk mengambil keputusan perihal banjir perkotaan setelah mengikuti pelatihan dan kegiatan kesiapsiagaan;
 - Jumlah kota yang mendapatkan dukungan teknis dari platform pengetahuan digital tingkat nasional;
 - Jumlah kota yang telah mengadopsi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) program nasional; dan
 - Penerima manfaat yang melaporkan bahwa kegiatan proyek telah mencerminkan kebutuhan mereka (dipilih berdasarkan gender).
- 2) Hasil pencapaian indikator akan dipilih berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, apabila relevan, dan sub-indikator akan dikuantifikasi jika memungkinkan untuk memastikan efektivitas pemantauan dan evaluasi proyek. Uraian deskripsi dari masing-masing Indikator Utama dan Indikator Antara yang digunakan dalam proses pemantauan dan evaluasi Proyek dapat dilihat pada POM Buku 2 Kerangka Kerja dan Monitoring Pencapaian Tujuan Proyek.
- 3) Ruang lingkup kegiatan NUFReP yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mulai dari Tahun 2023 sampai Tahun 2028, antara lain:
- a) Analisis dan perencanaan risiko banjir perkotaan di 6 (enam) kota dan kajian teknis di IKN;
 - b) Penanganan banjir perkotaan melalui tindakan struktural dan non-struktural untuk jangka pendek dan menengah yang mencakup integrasi infrastruktur abu-abu (*grey*) dengan biru-hijau (*blue-green*), solusi berbasis alam (*nature-based solutions*), perbaikan ruang publik perkotaan, dan desain perkotaan ramah air (*water-sensitive urban design*);
 - c) Pembentukan program nasional untuk memperkuat ketangguhan kota-kota di Indonesia terhadap banjir melalui

- pendekatan terpadu dan untuk meningkatkan mitigasi risiko banjir, investasi, dan tata kelola kota-kota yang berpartisipasi;
- d) Peningkatan kapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan risiko banjir termasuk meningkatkan kemitraan lokal dan partisipasi masyarakat yang keberlanjutan; dan
 - e) Kegiatan pendukung proyek.
- 4) NUFReP terdiri dari 3 komponen, yakni:
- a) Komponen 1: Perencanaan Penanganan dan Analisis Risiko Banjir. Kegiatan pada komponen ini mencakup pemetaan yang terperinci guna menunjukkan kedalaman genangan serta periode ulang (probabilitas) dengan menggunakan model permukaan digital resolusi tinggi/DTM, model hidrologi, dan model hidrodinamika, termasuk pemetaan probabilitas risiko banjir yang mempertimbangkan perubahan penggunaan lahan, penurunan muka tanah, dan dampak perubahan iklim (termasuk kenaikan muka air laut dan perubahan intensitas curah hujan) sehingga dapat disusun rencana penanganan risiko banjir perkotaan jangka pendek dan menengah dengan mengintegrasikan kegiatan prioritas struktural maupun non-struktural.
 - b) Komponen 2: Peningkatan Ketangguhan Banjir Perkotaan. Kegiatan pada komponen ini mencakup kegiatan fisik (konstruksi) tindakan struktural dan non-struktural termasuk subproyek prioritas yang menunjukkan dampak langsung pada pengurangan risiko banjir dan adaptasi iklim (*no-regret measures*). Komponen ini mengedepankan integrasi *grey infrastructure* (infrastruktur abu-abu) dengan *blue-green infrastructure* (infrastruktur biru-hijau) guna meningkatkan ketangguhan wilayah perkotaan secara keseluruhan.
 - c) Komponen 3: Manajemen Program dan Dukungan Pelaksanaan. Kegiatan pada komponen ini mencakup dukungan pelaksanaan NUFReP yang meliputi pembentukan dan operasionalisasi Program Nasional, pengelolaan proyek, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan proyek dalam pengelolaan risiko banjir perkotaan, dan peningkatan koordinasi antar lembaga.
- 5) Spesifikasi Pinjaman Luar Negeri Program *National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)* adalah sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------|-------------------|
| Nomor Perjanjian | : IBRD No.9459-ID |
| Nomor Register | : 1739NSEA |
| Tanggal Penandatanganan | : 11 Januari 2023 |
| Tanggal Efektif | : 27 Maret 2023 |
| <i>Closing Date</i> | : 31 Januari 2028 |

Jumlah Pinjaman Luar Negeri : USD2.000.000,00

Executing Agency Ditjen Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

6) Penerima Manfaat Proyek.

NUFReP akan memberikan manfaat kepada masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi lokasi sasaran sebagai berikut:

- a) Masyarakat yang berpotensi terdampak risiko banjir di Kota Bima, Banjarmasin, Manado, Medan, Gorontalo, Semarang, dan Ibu Kota Negara.
- b) Pemerintah pusat dan pemerintah kota yang terlibat dalam pengurangan risiko banjir di Kota Bima, Banjarmasin, Manado, Gorontalo, Medan, Semarang dan Ibu Kota Negara.

Di bawah Komponen 1 dan Komponen 2, Pemerintah Kota, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya akan mendapatkan manfaat langsung dari dukungan kegiatan perencanaan ketangguhan banjir yang komprehensif serta pembangunan infrastruktur banjir perkotaan yang terpadu

7) Lokasi Kegiatan Proyek.

Lokasi kegiatan NUFReP tersebar di 6 (enam) kota dan IKN, di wilayah sungai kewenangan pusat, dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, ketersediaan anggaran pembebasan lahan, dan dukungan pemerintah daerah. Adapun lokasi kegiatan NUFReP adalah sebagai berikut:

- a) Kota Bima meliputi DAS Rontu.
- b) Kota Manado meliputi DAS Tondano, DAS Sario, DAS Bailang, dan DAS Malalayang.
- c) Kota Medan meliputi DAS Belawan, DAS Deli, DAS Percut.
- d) Kota Banjarmasin meliputi DAS Martapura dan DAS Barito.
- e) Kota Semarang meliputi Sistem drainase Semarang Timur, Sistem drainase Semarang Tengah, Sistem drainase Semarang Barat dan Sistem drainase Mangkang.
- f) Kota Gorontalo meliputi DAS Limboto dan DAS Bolango-Bone.
- g) Ibu Kota Negara (IKN).

Rincian lokasi dan nama paket kegiatan ditetapkan dalam dokumen *Overall Work Plan* dan *Annual Work Plan*. Kegiatan di luar daftar DAS/sungai/kota yang telah disebutkan di atas, dapat diusulkan oleh Kementerian PUPR selaku *Executing Agency* untuk disetujui oleh Bank Dunia.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar

Rp3.598.816.305,00 atau 47,26% dari anggarannya sebesar Rp7.615.305.000,00.

Tabel 29

Pagu dan Realisasi PLN NUFReP periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025

Program/Kegiatan/Output					Pagu	Realisasi	%
No	Kode Program	Nama Program					
		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan				
			Kode Output	Nama Output			
1	2	3	4	5	6	7	8
	CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa					
		CM.6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah				
			FBA.801	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam Program Ketangguhan Banjir Perkotaan (NUFReP)	7.615.305.000	3.598.816.305	47,26
TOTAL					7.615.305.000	3.598.816.305	47,26

c. ***Flood Management and Coastal Protection in North Java Project (FMCPNJP).***

1) **Latar Belakang.**

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa antara tahun 2008 hingga tahun 2021, musibah banjir mengakibatkan 2.813 nyawa hilang, 109.958 orang terluka, 392.000 rumah rusak, dan 6,7 juta rumah terendam di seluruh Indonesia. Kerugian banjir rata-rata tahunan diperkirakan mencapai USD2,4 miliar.

Risiko banjir juga semakin memburuk. Jumlah orang yang tinggal di daerah rendah di pesisir diproyeksikan meningkat dari 39,3 juta (2000) menjadi 93,7 juta di tahun 2060, sedangkan jumlah orang yang hidup di dataran banjir dengan risiko kemungkinan banjir sekali per 100 tahun akan mencapai 14,5 juta orang di tahun 2060 karena naiknya muka air laut. Kerusakan tahunan akibat banjir pesisir diperkirakan akan meningkat 160 kali lipat di tahun 2080 jika tanpa upaya adaptasi. Jumlah kejadian banjir di Indonesia tiap tahunnya cenderung naik sejak tahun 2002 seperti ditunjukkan data BNPB.

Oleh karena itu, penanggulangan banjir melalui pembangunan fisik (*structural approach*), harus disinergikan dengan pembangunan non fisik (*non-structural approach*), dengan menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya partisipasi masyarakat, sehingga hasilnya bisa lebih optimal. Hal tersebut sejalan dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana desentralisasi pendelegasian wewenang secara bertahap dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah aliran sungai dimaksudkan untuk meningkatkan pelibatan masyarakat lokal mulai dari tahap perencanaan, implementasi, dan pengawasan.

Atas pertimbangan tersebut, sebagai institusi yang ditugaskan

melakukan pembinaan kepada daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya dalam bidang urusan pertanian dan pangan dengan terlibat sebagai *Central Project Implementation Unit (CPIU)* pada *Program Flood Management and Coastal Protection in North Java Project* (FMCPNJP/FMNJP) untuk fokus pada Pengelolaan Risiko Banjir Terpadu (PRBT).

Program Flood Management and Coastal Protection in North Java Project (FMCPNJP/FMNJP) dibiayai dari *Loan ADB 4410-INO* dengan fokus lokasi di Wilayah Sungai (WS) Cimanuk Cisanggarung dan WS Jratunseluna.

2) Program ini disusun menjadi 2 (dua) output:

- a) Operasionalisasi pengelolaan risiko banjir. Output ini akan membangun kapasitas organisasi daerah aliran sungai, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk lebih beradaptasi dengan dampak perubahan iklim yang diantisipasi. Proyek ini akan memperkenalkan EOS untuk memprediksi dan memantau banjir dan penurunan tanah di pantai Jawa Utara. EOS akan mendukung perencanaan FRM yang mengintegrasikan proyeksi perubahan iklim, dan penilaian kerusakan untuk menginformasikan dukungan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir. Output ini akan memodernisasi sistem hidrometeorologi untuk meningkatkan akuisisi data real-time di kedua wilayah sungai (RBT). Proyek ini akan mengembangkan kerangka kerja nasional untuk menyelaraskan teknologi untuk *Flood Forecasting, Early Warning and Flood Evaluation System (FFEFES)* di seluruh daerah aliran sungai di Indonesia.
- b) Meningkatnya infrastruktur ketahanan iklim serta Operasi dan Pemeliharaan (O&P). Kegiatan di bawah output ini akan secara langsung mengurangi risiko iklim fisik melalui pembangunan dan peningkatan perlindungan banjir dan fasilitas penyimpanan air. Output ini akan memperkuat kapasitas lembaga pelaksana dan pelaksana dalam manajemen proyek. Ini akan memperkenalkan lembaga pelaksana dan pelaksana praktik terbaik untuk mengarusutamakan adaptasi dan inovasi perubahan iklim dalam operasi mereka.

3) Penerima Manfaat.

- a) Kementerian/Lembaga.
Terlaksananya kebijakan program kegiatan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan program perlindungan kawasan pertanian di wilayah rawan bencana.
- b) Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
Terfasilitasi dan tersinkronisasinya pelaksanaan kebijakan

program kegiatan antara Kementerian/Lembaga dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program perlindungan kawasan pertanian di wilayah rawan bencana.

c) Pemerintah Daerah.

Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam perlindungan kawasan pertanian di wilayah rawan bencana.

d) Masyarakat.

Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam perlindungan kawasan pertanian di wilayah rawan bencana.

4) Strategi Pencapaian Keluaran.

a) Metode pelaksanaan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode swakelola dan kontraktual oleh Sub Direktorat Pertanian dan Pangan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I.

b) Tahapan pelaksanaan.

Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian serta Perlindungan Kawasan Pertanian di Wilayah Rawan Bencana (FMCPNJP/FMNJP) dilaksanakan melalui kegiatan:

- Rapat Koordinasi yang meliputi Rapat koordinasi Awal program Tahun Anggaran 2025 dan rapat-rapat koordinasi lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Tujuan dan *output*. Tujuan kegiatan ini agar terwujud koordinasi antar pengelola program terkait dengan penyelenggaraan program pada masing-masing tingkatan, sedangkan *output*-nya adalah berupa laporan rapat koordinasi pelaksanaan program perlindungan Kawasan Pertanian di Wilayah Rawan Bencana.
 - Kegiatan ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahap pelaporan.
 - Kegiatan akan melibatkan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan dan Provinsi serta kabupaten yang terlibat program FMCPNJP/FMNJP.
- Dukungan Tenaga Sekretariat CPIU Ditjen Bina Bangda:
Bertujuan untuk mendukung tugas kesekretariatan CPIU Ditjen Bina Bangda dalam mendukung terlaksananya program FMCPNJP/FMNJP.
- Supervisi, pengendalian dan pengawasan Program Perencanaan dan Pengendalian serta Perlindungan Kawasan Pertanian di Wilayah Rawan Bencana (FMCPNJP/FMNJP) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tujuan dan output. Meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program Manajemen Banjir dan *output*-nya Terlaksananya fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program Manajemen Banjir.
- Lokasi kegiatan dilaksanakan pada 16 Daerah.
- Pelaksana: Pelaksana supervisi, pengendalian dan pengawasan Program Perencanaan dan Pengendalian serta Perlindungan Kawasan Pertanian di Wilayah Rawan Bencana (FMCPNJP/FMNJP) yaitu beberapa Direktorat/Sub Direktorat di lingkungan CPIU Ditjen Bina Bangda, Kemendagri.
- Jasa *Technical Assistant Project Management and Technical Support Consulting Services* (CS – 04):
- Kegiatan bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan pengadaan konsultan (*Technical Assistant*) di CPIU Ditjen Bina Bangda dan menghasilkan output kegiatan berupa terfasilitasinya kebutuhan pengadaan konsultan (*Technical Assistant*) di Ditjen Bina Bangda.

c) Instansi yang dilibatkan.

Instansi yang dilibatkan di tingkat Pemerintah Pusat antara lain Bappenas Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan sedangkan di tingkat daerah yaitu Bappeda dan instansi terkait lainnya di lokasi pelaksanaan program FMCPNJP/FMNJP.

Untuk mendukung Program *Flood Management in North Java Project* (FMNJP), *Asian Development Bank* (ADB) memberikan pinjaman sebesar JPY36.055.200.000 dengan nomor perjanjian Pinjaman 4410-INO dengan Nomor Register 1NPBHBMA yang mulai efektif pada 9 Februari 2024 dan berakhir pada 30 Juni 2029.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp8.601.837.458,00 atau 63,46% dari anggarannya sebesar Rp13.555.466.000,00.

Tabel 30

Pagu dan Realisasi PLN FMCPNJP periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025

Program/Kegiatan/Output					Pagu	Realisasi	%
No	Kode Program	Nama Program					
		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan				
			Kode Output	Nama Output			
1	2	3	4	5	6	7	8
	CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa					
		CM.6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah				
			FBA.802	Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian serta Perlindungan Risiko Bencana di Kawasan Pertanian	13.555.466.000	8.601.837.458	63,46
TOTAL					13.555.466.000	8.601.837.458	63,46

d. *National Urban Development Project (NUDP)*

1) Latar Belakang.

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia mengembangkan *National Urban Development Project (NUDP)* atau Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional. Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2025. NUDP dikembangkan untuk mengatasi tantangan perkotaan di Indonesia, diantaranya yaitu:

- a) Pemanfaatan arus urbanisasi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah perkotaan;
- b) Upaya mengurangi kesenjangan infrastruktur yang dapat memberikan pelayanan perkotaan secara efisien;
- c) Penguatan sinergi perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang perkotaan, diantaranya melalui RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); dan
- d) Pengembangan akses pemerintah kota dan pelaku lokal dalam pembiayaan infrastruktur perkotaan.

2) Pelaksana Kegiatan.

NUDP akan dilaksanakan maksimal di 15 (lima belas) kota *pilot project* di Indonesia. Kegiatan ini dikembangkan sebagai *platform* nasional pembangunan kota yang selanjutnya dapat menjadi contoh untuk diperluas di seluruh kota-kota di Indonesia. NUDP dilaksanakan secara bersama oleh:

- a) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) sebagai *Executing Agency (EA)* proyek NUDP dan *Central Project Management Unit (CPMU)* dibentuk di bawah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) serta *Project Implementation Unit (PIU)* atau pelaksana untuk komponen tertentu;
- b) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai *Project Implementation Unit (PIU)* atau pelaksana untuk penguatan koordinasi dan kebijakan nasional, yang akan dikoordinasikan oleh Direktorat Pembangunan Daerah, Deputy Bidang Pengembangan Regional;
- c) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai *Project Implementation Unit (PIU)* atau pelaksana untuk komponen tertentu, yang terdiri dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II (SUPD II) dan Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi dan Pembangunan Daerah (PEIPD) pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- d) *National Urban Development Project (NUDP)* bertujuan untuk

meningkatkan perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta perencanaan investasi (*capital investment*). *National Urban Development Project* (NUDP) akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dalam kurun waktu 2020-2024 dengan biaya sebesar IDR 32,4 milyar berasal dari Rupiah Murni (APBN) dan USD 49,6 juta dari pinjaman Bank Dunia. Pembiayaan proyek seluruhnya digunakan untuk kegiatan bantuan teknis (*Technical Assistance*), tidak mencakup pembiayaan untuk investasi infrastruktur.

- e) Kesenjangan pembiayaan infrastruktur seringkali diidentifikasi sebagai faktor penghambat pengembangan kota, namun ternyata bukan penyebab tunggal atas masalah tersebut. Meskipun upaya peningkatan pembiayaan infrastruktur sudah banyak dilakukan, namun investasi yang dilakukan tidak efisien yang disebabkan oleh:
- Kurangnya keterpaduan dalam perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota; dan
 - Tidak adanya prioritas investasi infrastruktur yang didasarkan pada berbagai aspek pengembangan wilayah. NUDP melalui berbagai intervensi dan program peningkatan kapasitas yang diberikan, diharapkan dapat memfasilitasi terlaksananya berbagai inovasi dan pendekatan baru pada perencanaan pembangunan kota, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas integrasi kedua jenis perencanaan di tingkat kota.

3) **Komponen.**

NUDP terdiri dari empat komponen program, yaitu:

- a) Komponen 1 : Pengembangan kelembagaan dan kebijakan nasional perkotaan;
- b) Komponen 2 : Keterpaduan perencanaan untuk pembangunan perkotaan;
- c) Komponen 3 : Pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan; dan
- d) Komponen 4 : Dukungan pelaksanaan proyek.

Output Target dari NUDP ini adalah agar perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta penyusunan prioritas program investasi modal (*capital investment*) dapat ditingkatkan. Pencapaian target NUDP diukur dengan tiga indikator utama, sebagai berikut:

- a) Tersusunnya strategi nasional pembangunan infrastruktur perkotaan;
- b) Tersusunnya rencana dan program pembangunan perkotaan terpadu; dan

c) Keterpaduan antara kerangka perencanaan investasi dan penganggaran.

4) **Spesifikasi Pinjaman.**

Nomor Pinjaman PHLN : IBRD 8976-ID
 Nomor Registrasi : 1PF7SCLA
 Tanggal Penandatanganan : 14 November 2019
 Tanggal Efektif Perjanjian PHLN : 25 November 2019
 Closing Date : 31 Desember 2025
 Jumlah Pinjaman Luar Negeri : USD 49.6000.000
 Jumlah Intial Deposit : 2.562.500
 Nomor Rekening Khusus : 
 Executing Agency : Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp130.083.019.094,00 atau 99,96% dari anggarannya sebesar Rp130.134.203.000,00.

Tabel 31
Pagu dan Realisasi PLN NUDP periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025

Program/Kegiatan/Output					Pagu	Realisasi	%
No	Kode Program	Nama Program					
		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan				
			Kode Output	Nama Output			
1	2	3	4	5	6	7	8
	CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa					
		CM.6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah				
			FBA.803	Fasilitasi Perencanaan Terpadu dalam Pembangunan Daerah di Perkotaan (NUDP)	130.134.203.000	130.083.019.094	99,96
TOTAL					130.134.203.000	130.083.019.094	99,96

3. Ditjen Dukcapil mengelola anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri sebesar Rp1.072.864.748.000,00 untuk program **ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation (Identifikasi untuk Penyelenggaraan Layanan yang Inklusif dan Transformasi Digital)**.

Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar USD250.000.000,00 (sekitar Rp 3,7 triliun) kepada Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri. Pinjaman ini untuk memperkuat sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sekaligus meningkatkan penggunaan identifikasi digital. Tujuannya, guna

memperkuat pelayanan serta kepercayaan terhadap ekonomi digital di Indonesia. Pinjaman ini akan mendukung proyek *ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation* (Identifikasi untuk Penyelenggaraan Layanan yang Inklusif dan Transformasi Digital). Proyek tersebut akan mendukung Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri meningkatkan sistem kependudukan dan catatan sipil di Indonesia saat ini terutama memperluas cakupannya di 12 Provinsi prioritas dan di kalangan penduduk rentan di seluruh Indonesia.

Proyek ini akan mendukung pengembangan infrastruktur publik digital prioritas. Termasuk *platform* verifikasi identitas dan *electronic-Know Your Customer (e-KYC)*, aplikasi identifikasi digital, serta *platform* pertukaran data untuk memfasilitasi proses berbagi informasi antar lembaga pemerintah yang mudah dan aman. Proyek ini akan memodernisasi infrastruktur data pada Ditjen Dukcapil. Selain itu juga meningkatkan kemampuannya dalam menjamin keamanan di dunia maya maupun perlindungan terhadap data pribadi serta kerangka privasi. Proyek ini dapat mendukung peningkatan taraf hidup penduduk Indonesia dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga mereka dapat menggunakan NIK dengan mudah untuk melakukan transaksi dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, baik secara fisik maupun dalam jaringan (*daring/online*).

Proyek ini dapat membantu Indonesia terus menjaga keselamatan dan keamanan data kependudukan. Sistem identifikasi diketahui sebagai faktor kunci dalam pembangunan, kemampuan untuk memverifikasi identitas legal dapat meningkatkan akses kepada layanan dari pemerintah maupun swasta, seperti perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, layanan keuangan serta niaga elektronik (*e-commerce*). Selain itu, juga meningkatkan berbagai peluang ekonomi, misalnya, akses terhadap pekerjaan formal.

a. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Proyek.

1) Tujuan

Memperkuat sistem kependudukan dan pencatatan sipil dan meningkatkan penggunaan identifikasi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan penyampaian layanan sektor publik dan swasta prioritas untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dalam jangka panjang, tujuan Proyek Digital ID adalah adanya pelayanan pemerintah dan swasta akan menjadi lebih inklusif, efektif, efisien, inovatif, dan dapat diakses oleh seluruh warga negara dan penduduk Indonesia.

2) Sasaran

- a) Jumlah penduduk Indonesia di 12 provinsi prioritas yang telah memiliki NIK.
- b) Proporsi anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran.
- c) Jumlah penduduk Indonesia yang telah menginstal aplikasi ID

Digital dan melakukan autentikasi minimal satu kali.

- d) Jumlah orang yang telah menggunakan platform e-KYC untuk mengaktifkan layanan terpilih termasuk layanan keuangan.
- e) Selisih proporsi pria dan wanita Indonesia yang memiliki rekening bank.
- f) Jumlah pengguna institusional yang menggunakan verifikasi identitas baru dan platform e-KYC untuk autentikasi.

3) Manfaat Program

- a) Manfaat Proyek untuk Dukcapil: (a) Cakupan Administrasi Kependudukan (adminduk) yang universal; (b) Peningkatan keamanan data dan sistem; (c) Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ditingkatkan sesuai kebutuhan; (d) Peningkatan jumlah otentikasi dan layanan pemanfaatan data lainnya; (e) Penguatan efisiensi operasional; dan (f) Keberlanjutan Keuangan.
- b) Manfaat untuk Masyarakat: (a) Inklusi ekonomi dan sosial, terutama untuk masyarakat Indonesia yang rentan dan masyarakat di daerah tertinggal; (b) mengurangi biaya transaksi; (c) Akses jarak jauh terhadap layanan sektor publik dan swasta; (d) Layanan Adminduk yang lebih mudah diakses dan nyaman; (e) Kontrol yang lebih besar atas data pribadi; dan (f) Respon bencana yang lebih cepat dan lebih baik.
- c) Manfaat untuk Pemerintah dan Sektor Swasta: (a) Peningkatan penargetan program sosial; (b) Mengurangi biaya onboarding; (c) Mengurangi penipuan dan kebocoran; (d) Kualitas data yang lebih baik, termasuk statistik vital; (e) Pemberdayaan layanan online; (f) Layanan publik tersedia untuk lebih banyak masyarakat Indonesia; dan (g) Peluang untuk berinovasi produk dan layanan baru.

b. Spesifikasi Proyek (Data Proyek) adalah:

Nomor Pinjaman	:	IBRD Loan No.9520-ID
Nomor Register	:	1F2V2KKA
Tanggal Penandatanganan	:	30 Mei 2023
Tanggal efektif	:	12 Mei 2023
Tanggal penutupan	:	31 Desember 2027
Rekening Khusus	:	601 251 1
Jumlah Pinjaman	:	USD250.000.000,00 (IBRD 100%)
Pelaksana (Executing Agency)	Proyek :	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. Komponen

Pinjaman *ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation* (Identifikasi untuk Penyelenggaraan Layanan yang Inklusif dan Transformasi Digital) terdiri dari 5 Komponen sebagai berikut ;

- 1) Komponen 1 : Kependudukan dan pencatatan sipil. Komponen ini akan mendukung peningkatan cakupan Adminduk di antara populasi yang ada dengan fokus pada provinsi tertinggal dan populasi rentan dan proses reformasi dan sistem baru untuk membuat sistem Adminduk lebih mudah diakses, tangguh, dan efisien. Keluaran ini terutama akan membantu masyarakat Indonesia dan penduduk yang memenuhi syarat yang belum memiliki NIK, e-KTP atau dokumentasi identitas hukum lainnya (misalnya, akta kelahiran dan pernikahan) atau yang informasinya tidak mutakhir. Penerima manfaat akan dapat mengakses layanan dan menggunakan hak mereka dengan lebih mudah.
- 2) Komponen 2 : Verifikasi identitas, identifikasi digital, dan infrastruktur TIK. Komponen ini akan mendukung pengembangan platform verifikasi identitas dan e-KYC untuk transaksi tatap muka dan aplikasi ID digital nasional untuk transaksi online/jarak jauh, serta memodernisasi infrastruktur TIK Ditjen Dukcapil dan memperkuat kapabilitas keamanan siber. Keluaran ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, ketahanan, kinerja, keamanan, dan integritas seluruh operasi Dukcapil, mulai dari layanan PR/CR dan pemanfaatan hingga proses internal. Verifikasi identitas dan platform e-KYC dan aplikasi ID digital akan secara signifikan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dan penduduk untuk mengakses layanan sektor publik dan swasta, baik secara langsung maupun daring, serta kemampuan lembaga pemerintah dan bisnis untuk memberikan layanan tersebut.
- 3) Komponen 3 : Pemanfaatan dan adopsi. Komponen ini akan mempromosikan penggunaan berbagai platform untuk menjadikan pelayanan sektor publik dan swasta lebih inklusif dan efisien, seperti dengan meningkatkan cara mengelola lebih dari 5.400 pengguna institusional, mengembangkan platform pertukaran data yang aman dan transparan, dan mendukung badan Pemerintah Indonesia yang diprioritaskan agar terintegrasi dengan platform utama. Penyempurnaan sistem dan proses untuk mengelola hubungan dan akses pengguna institusional akan memberikan keuntungan efisiensi bagi Ditjen Dukcapil dan akan memberikan peningkatan prediktabilitas dan kemudahan integrasi bagi pengguna institusional.
- 4) Komponen 4 : Kapasitas kelembagaan dan manusia. Komponen ini akan membantu mendukung transformasi organisasi Dukcapil, reformasi hukum dan peraturan, dan peningkatan keterlibatan masyarakat untuk memungkinkan, mempertahankan, dan membangun reformasi yang didukung oleh Proyek. Penyederhanaan

proses internal dan struktur organisasi akan membuat sistem Adminduk lebih efisien (misalnya, mengurangi biaya dan waktu administrasi) dan memperkuat manajemen sumber daya manusia akan membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja Dinas dan Ditjen Dukcapil, yang dapat meningkatkan layanan garis depan dan mendorong inovasi dari dalam. Menjadi sangat penting yakni peluncuran program petugas perlindungan data akan meningkatkan kapasitas dan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data pribadi yang baru, sambil menumbuhkan budaya internal seputar privasi dan keamanan informasi.

- 5) Komponen 5 : Koordinasi dan pengelolaan proyek. Komponen ini akan mendukung operasional Unit Manajemen Proyek (PMU) untuk mendorong implementasi proyek, melakukan tanggung jawab pelaporan dan fidusia di bawah Proyek, bertindak sebagai sekretariat Komite Pengarah Proyek (PSC) dan Komite Koordinasi dan Konsultasi (CCC), dan meningkatkan teknis keahlian dalam kegiatan yang lebih kompleks. Konsultan manajemen proyek akan dilibatkan untuk membantu mengelola proses pengadaan, vendor, dan kontrak.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp305.668.944.375,00 atau 28,49% dari anggarannya sebesar Rp1.072.864.748.000,00. Realisasi belanja PLN *ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation* yang disampaikan *lender* dalam IFR (*Interim Financial Report*) periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp304.729.041.646,00 sehingga terdapat selisih Rp939.902.729,00. Selisih tersebut berasal dari perbedaan pengakuan terhadap pengembalian belanja Tahun 2024 yang disetorkan Tahun 2025. Kemendagri mengakui sebagai penerimaan kembali belanja sementara *lender* mengakui sebagai pengurang nilai realisasi belanja Tahun 2025.

Tabel 32
Pagu dan Realisasi PLN *ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation* periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025

Program/Kegiatan/Output					Pagu	Realisasi	%
No	Kode Program	Nama Program					
		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan				
			Kode Output	Nama Output			
1	2	3	4	5	6	7	8
	CP	Program Tata Kelola Kependudukan					
		010.08.CP	Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas		1.072.864.748.000	305.668.944.375	28,49
TOTAL					1.072.864.748.000	305.668.944.375	28,49

4. Ditjen Bina Pemdes mengelola anggaran yang bersumber dari Hibah Luar Negeri. Hibah tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan *Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Phase II*. INEY merupakan dukungan program bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan gizi untuk remaja putri, ibu hamil, dan anak 0-59 bulan untuk

percepatan penurunan *stunting* pada anak di bawah lima tahun. Program ini ditujukan untuk melanjutkan dan memperdalam kepemimpinan nasional dalam upaya pengurangan *stunting*, meningkatkan penyelenggaraan beragam intervensi yang berdampak-tinggi, spesifik-gizi dan peka-gizi, serta memperkuat koordinasi di tingkat daerah–masyarakat dalam konteks penurunan *stunting*. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* merupakan dasar hukum yang melandasi Program INEY *Phase II* dimana Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menjadi landasan kebijakan nasional dalam percepatan penurunan *stunting* melalui pendekatan terintegrasi, lintas sektor, dan lintas level pemerintahan. Perpres ini menegaskan bahwa penanganan *stunting* tidak hanya menjadi urusan sektor kesehatan, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui Perpres 72 Tahun 2021, *stunting* diposisikan sebagai isu strategis pembangunan sumber daya manusia nasional.

Anggaran program INEY *Phase II* bersumber dari Hibah Luar Negeri Bank Dunia dengan Perjanjian Hibah Nomor GFF TF0C1687 IHCATF0C3114 dengan Nomor Register 2HUXN2PA. Pagu anggaran yang diperoleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa di tahun 2025 sebesar Rp1.961.515.000,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp1.907.322.508,00 atau sebesar 97,24% dari total pagu anggaran.

Tabel 33
Pagu dan Realisasi HLN Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Phase II Ditjen Bina Pemdes periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025

Program/Kegiatan/Output					Pagu	Realisasi	%
No	Kode Program	Nama Program					
		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan				
			Kode Output	Nama Output			
1	2	3	4	5	6	7	8
	CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa					
		CM.1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa				
			UBB.006	Fasilitasi Pembinaan Kinerja Kelembagaan Posyandu di Desa	1.961.515.000	1.907.322.508	97,24
TOTAL					1.961.515.000	1.907.322.508	97,24

5. Ditjen Bina Pembangunan Daerah mengelola anggaran yang bersumber dari Hibah Luar Negeri. Hibah tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan *Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Phase II*.

a. Latar Belakang.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019 s.d. 2024 ditegaskan bahwa target penurunan prevalensi *stunting* sebesar 14% pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, telah ditetapkan Strategi Nasional (Stranas) percepatan penurunan *stunting* melalui 5 Pilar yaitu (1) Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa; (2)

Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; (3) Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa; (4) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan (5) Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Dalam upaya pelaksanaan Stranas dimaksud Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan dari Bank Dunia melalui program *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) dari tahun 2018. Melalui program tersebut, semua *stakeholders* berkolaborasi untuk menurunkan angka prevalensi *stunting* dengan diukur melalui *Disbursement Link Indicator* (DLI). Terdapat 9 DLI yang menjadi tugas masing-masing Kementerian/Lembaga, dimana Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah mendapatkan dana hibah untuk melaksanakan DLI ke-7 yaitu *Increased Predictability and Result-Oriented of Fiscal Transfers that Support Convergence*. Untuk melaksanakan DLI tersebut, Kementerian Dalam Negeri melakukan upaya manajerial melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah terkait dan multisektor. Aksi konvergensi penurunan *stunting* merupakan suatu instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi baik spesifik dan sensitif dalam percepatan penurunan *stunting* dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor agar program dan kegiatan intervensi gizi dengan lebih efektif.

Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan *stunting*, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Stranas percepatan penurunan *stunting* yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018, dimana peran Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah berdasarkan Stranas percepatan penurunan *stunting* yang tertuang pada Perpres dimaksud berada pada Pilar 1, Pilar 3 dan Pilar 5.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa program INEY akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2023, maka dalam upaya melakukan percepatan penurunan *stunting* dan untuk melihat program percepatan penurunan *stunting* bisa terlaksana secara berkelanjutan, Bank Dunia kembali memberikan dukungan melalui hibah program INEY *Phase II* yang direncanakan akan efektif pada tahun 2024 s.d. 2028, dimana Kementerian Dalam Negeri akan bertanggung jawab untuk melaksanakan DLI-8 yaitu Kabupaten/Kota yang mencapai kinerja baik dalam percepatan penurunan *stunting* meliputi *Disbursement Linked Result* (DLR) 8.1, 8.2 dan 8.3, dengan rincian sebagai berikut:

- a) DLR 8.1: Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan prioritas program penurunan *stunting* dalam RPJMD.
- b) DLR 8.2 : Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri menyampaikan laporan tahunan hasil penandaan dan realisasi anggaran pemda kabupaten/kota yang mendukung penurunan *stunting*.
- c) DLR 8.3 : Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mencapai kinerja baik dalam percepatan penurunan *stunting*.

b. Peranan.

Peran Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sangat strategis pada penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai implementasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pendampingan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di daerah dilakukan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah dari tahun 2020 melalui strategi percepatan penurunan *stunting* dengan melakukan peningkatan kualitas intervensi layanan yang menyasar setiap sasaran prioritas. Namun hal tersebut belum berjalan secara konvergen, dimana pendekatan 8 (delapan) aksi konvergensi masih dalam tahap konsolidasi atas komitmen pelaku, manajemen data dan pelaporan yang belum menyentuh esensi dari konvergensi yang sistemik, terstruktur dan menjamin keberlanjutan penurunan *stunting*.

Dalam rangka menindaklanjuti rencana implementasi program INEY *Phase II* oleh Bank Dunia pada tahun 2024 yang akan dilaksanakan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu *Project Implementing Unit* (PIU) di tingkat pusat sesuai dengan DLI 8 yaitu Kabupaten/Kota yang mencapai kinerja baik dalam percepatan penurunan *stunting*.

c. Tujuan.

Tujuan pelaksanaan hibah *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) *Phase II* di Ditjen Bina Pembangunan Daerah, kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- 1) Penguatan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengintegrasikan prioritas program penurunan *stunting* ke dalam RPJMD.
- 2) Peningkatan Pemerintah Daerah dalam melaporkan data hasil penandaan dan penggunaan anggaran daerah terhadap penurunan *stunting*.
- 3) Penguatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkinerja baik dalam pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan *stunting*.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan hibah *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) *Phase II* di Ditjen Bina Pembangunan Daerah,

kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- 1) Meningkatnya jumlah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan prioritas program penurunan *stunting* dalam RPJMD.
- 2) Meningkatnya jumlah Pemerintah Daerah yang menyampaikan laporan tahunan hasil penandaan dan realisasi anggaran pemda kabupaten/kota yang mendukung penurunan *stunting*.
- 3) Meningkatnya jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mencapai kinerja baik dalam pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan *stunting*.

Untuk mendukung Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Program *Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Phase II*, *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* atau *World Bank* memberikan hibah sebesar Rp77.000.000.000 dengan nomor perjanjian Hibah GFF TF0C1687 IHCA TF0C3114 dengan Nomor Register 2HUXN2PA yang mulai efektif pada 22 November 2023 dan berakhir pada 31 Agustus 2028.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp14.127.432.161,00 atau 99,22% dari anggarannya sebesar Rp14.238.560.000,00.

Tabel 34
Pagu dan Realisasi HLN *Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Phase II* Ditjen Bina Bangda periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025

Program/Kegiatan/Output					Pagu	Realisasi	%
No	Kode Program	Nama Program					
		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan				
			Kode Output	Nama Output			
1	2	3	4	5	6	7	8
	CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa					
		CM.6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah				
			FBA.900	Fasilitasi peningkatan kinerja Kabupaten/Kota dalam implementasi aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan Stunting di Daerah melalui program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Phase II	14.238.560.000	14.127.432.161	99,22
TOTAL					14.238.560.000	14.127.432.161	99,22

6. Ditjen Bina Keuangan Daerah mengelola anggaran yang bersumber dari Hibah Luar Negeri. Hibah tersebut telah berlangsung sejak Tahun 2024. Kegiatan yang dibiayai melalui hibah luar negeri ini merupakan Program *Technical Assistance Grant to Support SINERGIS Implementation Project Letter Agreement* dari *World Bank*. Hibah ini digunakan untuk membiayai Rincian Output Rancangan Standar Redesain Proses Bisnis SIPD RI Bidang Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025. Program ini dirancang untuk dilaksanakan sampai dengan Tahun 2025. Rincian Hibah luar negeri dapat dijabarkan sebagai berikut:

Nomor Pinjaman PHLN : TF0C4755

Nomor Registrasi : 2S9MDU8A

Tanggal Penandatanganan : 22 Mei 2024
 Tanggal Efektif Perjanjian PHLN : 22 Mei 2024
 Closing Date : 30 Juni 2025
 Jumlah Pinjaman Luar Negeri : Rp160.000.000,00;
 Nomor Rekening Khusus : XXXXXXXXXX
 Executing Agency : Direktorat Jenderal Perimbangan
 Keuangan Kementerian
 Keuangan.

Dana Hibah ini digunakan untuk mendukung kegiatan Penyusunan Redesain Proses Bisnis Pengembangan SIPD RI Bidang Keuangan Daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00. Realisasi belanja kegiatan ini sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp160.000.000,00 atau 100,00%.

C. CAPAIAN OUTPUT PER FUNGSI APBN.

Pelaksanaan APBN pada Kemendagri dapat diklasifikasikan dalam 1 fungsi, yaitu pelayanan umum. Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Per Eselon I untuk masing-masing Fungsi dan Sub Fungsi Tahun 2025.

Tabel 35

Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Per Eselon I untuk masing-masing Fungsi dan Sub Fungsi Tahun 2025

FUNGSI_SUB FUNGSI	ES I	KODE FUNGSI SUB FUNGSI	PAGU	REALISASI	%
Pelayanan Umum_Lembaga Eksekutif Dan Legislatif, Masalah Keuangan Dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri	01	01.01	615.818.260.000	610.365.714.986	99,11
	03	01.01	163.965.753.000	152.273.287.631	92,87
	07	01.01	27.400.000.000	14.210.924.700	51,86
	09	01.01	44.860.000.000	17.831.931.747	39,75
SUB TOTAL			852.044.013.000	794.681.859.064	93,27
Pelayanan Umum_Pelayanan Umum	01	01.03	587.633.643.000	586.075.867.880	99,73
	02	01.03	74.902.301.000	75.012.285.983	100,15
	03	01.03	64.851.124.000	64.847.095.235	99,99
	04	01.03	64.432.937.000	63.051.305.963	97,86
	05	01.03	121.770.559.000	118.027.856.475	96,93
	06	01.03	133.321.668.000	132.418.911.843	99,32
	07	01.03	67.799.015.000	57.229.468.695	84,41
	08	01.03	2.001.814.306.000	1.188.968.100.608	59,39
	09	01.03	64.526.087.000	60.418.666.098	93,63
	11	01.03	46.558.829.000	45.247.430.027	97,18
	12	01.03	182.553.383.000	182.067.915.348	99,73
SUB TOTAL			3.410.163.852.000	2.573.364.904.155	75,46
Pelayanan Umum_Pembangunan Daerah	04	01.06	119.857.679.000	43.349.875.506	36,17
	05	01.06	44.000.265.000	33.646.251.047	76,47
	06	01.06	283.626.988.000	224.397.629.430	79,12
	11	01.06	10.922.669.000	5.689.891.315	52,09
	12	01.06	75.630.297.000	76.370.392.513	100,98
SUB TOTAL			534.037.898.000	383.454.039.811	71,80
Pelayanan Umum_Pelayanan Umum Lainnya	04	01.90	32.306.287.000	22.225.574.468	68,80
SUB TOTAL			32.306.287.000	22.225.574.468	68,80
TOTAL			4.828.552.050.000	3.773.726.377.498	78,15

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output dan Target dari Masing-Masing Fungsi dan Sub Fungsi disajikan pada **Lampiran IV** (Rincian Fungsi dan Sub Fungsi APBN).

D. PRIORITAS NASIONAL (PN).

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Kemendagri terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN), yaitu pada PN I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII dari delapan PN yang ditetapkan dalam RKP.

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran Bruto dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. PN I Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaannya tersebar pada 1 (satu) Eselon I dengan pagu mencapai Rp4.794.140.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.243.511.944,00.

Tabel 36

Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional I

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Polpum	4.794.140.000	2.243.511.944	46,80
Total	4.794.140.000	2.243.511.944	46,80

2. PN II Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Pelaksanaannya tersebar pada 2 (dua) Eselon I dengan pagu mencapai Rp6.841.960.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.090.248.067,00.

Tabel 37

Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional II

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Bina Adwil	3.500.000.000	1.388.343.339	39,67
Ditjen Bina Bangda	3.341.960.000	701.904.728	21,00
Total	6.841.960.000	2.090.248.067	30,55

3. PN III Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi. Pelaksanaannya tersebar pada 1 (satu) Eselon I dengan pagu mencapai Rp1.472.048.000,00 dan realisasi sebesar Rp602.952.944,00.

Tabel 38
Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit
Eselon I Prioritas Nasional III

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Bina Bangda	1.472.048.000	602.952.944	40,96
Total	1.472.048.000	602.952.944	40,96

4. PN IV Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Pelaksanaannya tersebar pada 1 (satu) Eselon I dengan pagu mencapai Rp12.735.739.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.511.609.061,00.

Tabel 39
Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit
Eselon I Prioritas Nasional IV

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Bina Bangda	12.735.739.000	2.511.609.061	19,72
Total	12.735.739.000	2.511.609.061	19,72

5. PN V Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Pelaksanaannya tersebar pada 1 (satu) Eselon I dengan pagu mencapai Rp1.435.685.000,00 dan realisasi sebesar Rp387.375.103,00.

Tabel 40
Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit
Eselon I Prioritas Nasional V

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Bina Bangda	1.435.685.000	387.375.103	26,98
Total	1.435.685.000	387.375.103	26,98

6. PN VI Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Pelaksanaannya tersebar pada 5 (lima) Eselon I dengan pagu mencapai Rp43.800.784.000,00 dan realisasi sebesar Rp24.793.957.284,00.

Tabel 41
Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit
Eselon I Prioritas Nasional VI

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Bina Adwil	4.700.000.000	1.473.278.484	31,35
Ditjen Bina Pemdes	25.682.127.000	20.178.789.607	78,57
Ditjen Bina Bangda	5.746.016.000	1.426.241.520	24,82
Ditjen Dukcapil	6.172.641.000	615.801.147	9,98
BSKDN	1.500.000.000	1.099.846.526	73,32
Total	43.800.784.000	24.793.957.284	56,61

7. PN VII Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan

Penyelundupan. Pelaksanaannya tersebar pada 8 (delapan) Eselon I dengan pagu mencapai Rp439.215.131.000,00 dan realisasi sebesar Rp216.047.585.587,00.

Tabel 42
Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit
Eselon I Prioritas Nasional VII

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Polpum	140.871.462.000	139.199.175.664	98,81
Ditjen Bina Adwil	77.151.960.000	10.458.828.932	13,56
Ditjen Bina Bangda	45.016.644.000	20.283.480.711	45,06
Ditjen Otda	18.000.000.000	10.378.342.277	57,66
Ditjen Dukcapil	123.719.617.000	14.049.080.439	11,36
Ditjen Bina Keuda	21.567.688.000	7.762.471.744	35,99
BSKDN	1.762.844.000	1.662.180.201	94,29
BPSDM	11.124.916.000	12.254.025.619	110,15
Total	439.215.131.000	216.047.585.587	49,19

8. PN VIII Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Pelaksanaannya tersebar pada 3 (tiga) Eselon I dengan pagu mencapai Rp15.200.943.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.724.825.168,00.

Tabel 43
Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit
Eselon I Prioritas Nasional VIII

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Polpum	1.000.000.000	373.658.785	37,37
Ditjen Bina Adwil	10.852.466.000	5.808.382.987	53,52
Ditjen Bina Bangda	3.348.477.000	542.783.396	16,21
Total	15.200.943.000	6.724.825.168	44,24

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output dan Target dari Masing-Masing Kegiatan yang Menjadi Prioritas Nasional disajikan pada **Lampiran V** (Rincian Prioritas Nasional).

E. KESALAHAN PENGANGGARAN.

Pada Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2025 terdapat kesalahan penganggaran berupa Belanja barang menjadi ekstrakomptabel sebesar Rp5.512.900,00, Belanja Barang menjadi aset sebesar Rp533.622.700,00, Belanja Modal tidak menjadi aset sebesar Rp204.835.140,00 dan antar Belanja Modal sebesar Rp13.562.308.001,00. Rincian kesalahan penganggaran disajikan dalam **Lampiran VI**.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp777.785,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp777.785,00 dan Rp112.599.303,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Kas dikelola dalam bentuk mata uang rupiah. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I tersaji pada Tabel 44.

Tabel 44

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I

NO	ESELON I	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	-	109.599.303	(109.599.303)
2	Ditjen Bina Adwil	777.785	3.000.000	(2.222.215)
JUMLAH		777.785	112.599.303	(111.821.518)

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp777.785,00 yang merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran TUP. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satker disajikan pada **Lampiran VII**. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 terdapat pada Satker Ditjen Bina Adwil yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2025. Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran Setelah Tanggal Neraca terdapat pada **Lampiran VIII**.

Kas Lainnya dan Setara
Kas
Rp14.820.792.658,00

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp14.820.792.658,00 dan Rp64.956.638.835,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas Lainnya tersebut dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka kementerian negara/lembaga dan juga pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 terdiri atas Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp435.883.927,00 dan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp14.384.908.731,00. Kas dikelola dalam bentuk mata uang Rupiah. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I tersaji pada Tabel 45.

Tabel 45
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I

NO	ESELON I	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	14.722.146	132.689.889	(117.967.743)
2	Ditjen Bina Adwil	409.689.403	2.350.542.231	(1.940.852.828)
3	Ditjen Bina Pemdes	-	7.192.991	(7.192.991)
4	Ditjen Bina Bangda	14.385.038.731	62.443.949.377	(48.058.910.646)
5	Ditjen Otda	-	19.478.954	(19.478.954)
6	Ditjen Bina Keuda	-	2.260.705	(2.260.705)
7	Ditjen Dukcapil	-	-	-
8	BPSDM	11.342.378	524.688	10.817.690
JUMLAH		14.820.792.658	64.956.638.835	(50.135.846.177)

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Satker disajikan pada **Lampiran VII**.

Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran Setelah Tanggal Neraca terdapat pada **Lampiran VIII**.

Penjelasan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp14.820.792.658,00 adalah sebagai berikut:

- a) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp14.722.146,00 pada Eselon I Setjen merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas Belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum dibayarkan kepada penerima hak sampai dengan 31 Desember 2025 pada IPDN Jatinangor;
- b) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp409.689.403,00 pada Eselon I Ditjen Bina Adwil terdiri dari:
 - i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp397.356.643,00 merupakan pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025 pada Satker Ditjen Bina Adwil. Kas dari pungutan pajak tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2026;
 - ii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp12.322.700,00 merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran atas Belanja Perjalanan Dinas yang telah dicairkan dari kas negara namun belum dibayarkan kepada pihak penerima hak sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025. Kas tersebut telah diserahkan kepada penerima hak pada Tahun 2026.
 - iii. Sisa saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan mekanisme LS Bendahara sebesar Rp60,00 yang terdapat pada Satker Bappeda Provinsi Papua. Telah dilakukan penarikan tunai atas saldo kas tersebut pada Tahun 2026 dari rekening bendahara

pengeluaran yang selanjutnya diberikan kepada penerima hak;
dan

- iv. Sisa saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp10.000,00 yang merupakan kas yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran atas uji coba *Cash Management System* (CMS) pada Bappeda Provinsi Maluku Utara. Telah dilakukan penarikan tunai atas saldo kas tersebut pada Tahun 2026 dari rekening bendahara pengeluaran yang selanjutnya diberikan kepada penerima hak.
- c) Kas Lainnya dan Setara Kas pada Eselon I Ditjen Bina Bangda sebesar Rp14.385.038.731,00 terdiri dari:
 - i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp130.000,00 merupakan kas yang tersisa pada rekening Bendahara Pengeluaran Ditjen Bina Bangda atas Hibah Langsung Program UNICEF Tahun Anggaran 2025. Kas tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2026.
 - ii. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp14.384.908.731,00 yang merupakan saldo kas dari hibah langsung dalam bentuk uang yang tersisa dari *United Arab Emirates* (UAE) atas Program *Financing The Regional Development*. Terdapat realisasi belanja pada Tahun 2025 yang bersumber dari hibah langsung tersebut sebesar Rp47.845.293.245,00 dari saldo awal tahun sebesar Rp62.230.201.976,00 sehingga saldo dana hibah tersisa sebesar Rp14.384.908.731,00.
- d) Kas Lainnya dan Setara Kas pada Eselon I BPSDM sebesar Rp11.342.378,00 yang merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas realisasi belanja perjalanan dinas yang belum dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas sampai dengan 31 Desember 2025 pada Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri IV.

Penjelasan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp64.956.638.835,00 adalah sebagai berikut:

- a) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp132.689.889,00 pada Eselon I Setjen terdiri dari:
 - i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp75.767.076,00 pada Setjen Pusat yang merupakan pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp34.490.000,00 dan pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp41.277.076,00 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024. Sisa saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025;

- ii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp19.421.573,00 pada IPDN Jatinangor terdiri dari kelebihan pembayaran tunjangan istri dan beras Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025 sebesar Rp9.574.180,00 dan kelebihan pembayaran gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan fungsional dan tunjangan umum Tahun 2024 yang pengembaliannya dilakukan melalui mekanisme potongan SPM Tahun 2025 sebesar Rp9.847.393,00; dan
 - iii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp37.501.240,00 pada IPDN Kampus NTB terdiri dari kelebihan pembayaran uang makan PNS, uang lembur, tunjangan khusus/kegiatan/kinerja Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025 sebesar Rp30.788.740,00 dan pungutan pajak Tahun 2024 yang disetorkan pada Tahun 2025 sebesar Rp6.712.500,00;
- b) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp2.350.542.231,00 pada Eselon I Ditjen Bina Adwil terdiri dari:
- i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.341.253.194,00 pada Satker Ditjen Bina Adwil yang merupakan pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025 sebesar Rp204.858.218,00. Selain itu, terdapat sisa kas yang belum didistribusikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak yang berhak sebesar Rp2.136.394.976,00 terdiri dari SPM LS sebesar Rp487.834.734,00 dan TUP sebesar Rp1.648.560.242,00. Saldo sebesar Rp2.136.394.976,00 tidak tercatat di saldo rekening Bendahara Pengeluaran karena telah dipindahbukukan ke rekening pribadi Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2024. Namun, seluruh saldo telah didistribusikan kepada pihak yang berhak pada Tahun 2025;
 - ii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp8.213.384,00 merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran atas Belanja Perjalanan Dinas yang telah dicairkan dari kas negara namun belum dibayarkan kepada pihak penerima hak sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024 terdapat pada Satker Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kas tersebut telah diserahkan kepada penerima hak pada Tahun 2025;
 - iii. Sisa saldo kas pada Rekening satker Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2024 berdasarkan hasil pengujian data rekening pada Aplikasi SPRINT sebesar Rp25.984,00. Sisa saldo kas tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025;
 - iv. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar

- Rp1.006.909,00 merupakan pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024 terdapat pada Satker Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp170.000,00 dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp836.909,00;
- v. Sisa saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan mekanisme LS Bendahara sebesar Rp32.760,00 yang terdapat pada Satker Bappeda Provinsi Papua sebesar Rp60,00 dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp32.700,00; dan
 - vi. Sisa saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp10.000,00 yang merupakan kas yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran atas uji coba *Cash Management System* (CMS) pada Bappeda Provinsi Maluku Utara;
- c) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp7.192.991,00 pada Eselon I Ditjen Bina Pemdes Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas sisa Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025 yang terdapat pada Satker Ditjen Bina Pemdes;
- d) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp62.443.949.377,00 pada Eselon I Ditjen Bina Bangda terdiri dari:
- i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp213.746.402,00 yang merupakan saldo kas atas denda keterlambatan pekerjaan pemerintah Tahun 2024 pada program Hibah Langsung dari *United Arab Emirates* (UAE);
 - ii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp999,00 yang merupakan sisa saldo kas yang tersisa pada rekening atas Hibah Langsung dari UNICEF per 31 Desember 2024 berdasarkan hasil pengujian data rekening pada aplikasi SPRINT yang telah disetorkan pada Tahun 2025; dan
 - iii. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp62.230.201.976,00 yang merupakan saldo kas dari hibah langsung dalam bentuk uang yang tersisa dari *United Arab Emirates* (UAE) atas Program *Financing The Regional Development* pada Satker Ditjen Bina Bangda.
- e) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp19.478.954,00 pada Eselon I Ditjen Otda merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas sisa Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025 yang terdapat pada Satker Ditjen Otda;
- f) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp2.260.705,00 pada Eselon I Ditjen Bina Keuda merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas kelebihan belanja pegawai (tunjangan

husus/kegiatan/kinerja) Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara Tahun 2025 yang terdapat pada Satker Ditjen Bina Keuda; dan

- g) Kas Lainnya dan Setara kas sebesar Rp524.688,00 pada Eselon I BPSDM merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pengembalian kelebihan pembayaran gaji pokok PNS Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025.

Belanja Dibayar Dimuka
(Prepaid)

Rp1.078.586.075,00

C.3 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.078.586.075,00 dan Rp299.007.100,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun berjalan, namun barang atau jasa belum diterima. Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I terdapat pada Tabel 46.

Tabel 46

Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I

NO	ESELON I	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	1.078.586.075	49.007.100	1.029.578.975
2	Ditjen Bina Pemdes	-	250.000.000	(250.000.000)
JUMLAH		1.078.586.075	299.007.100	779.578.975

Tabel 47

Mutasi Belanja Dibayar Dimuka

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	299.007.100
Mutasi Tambah:	1.078.586.075
Jurnal penyesuaian Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2025	1.078.586.075
Mutasi Kurang:	(299.007.100)
Jurnal balik atas jurnal penyesuaian Belanja Dibayar Dimuka akhir Tahun 2024 pada Setjen Pusat	(49.007.100)
Jurnal balik atas jurnal penyesuaian Belanja Dibayar Dimuka akhir tahun 2024 pada Ditjen Bina Pemdes	(250.000.000)
Saldo per 31 Desember 2025	1.078.586.075

Penjelasan mutasi Belanja Dibayar Dimuka:

- a) Transaksi penambahan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp1.078.586.075,00 merupakan jurnal penyesuaian akhir tahun atas pengakuan Belanja Platform Digital LMS (*Learning Management System*) Bahasa Inggris Berbasis *Common European Framework for Reference for Languages* (CEFR) bagi Praja Angkatan XXXVI dengan nilai sebesar Rp1.109.402.820 yang memiliki masa berlaku 3 tahun atau 36 Bulan sejak pertama kali

aktivasi pada bulan Desember 2025, sehingga 35 bulan masa berlaku yang tersisa diakui sebagai Belanja Barang yang Dibayar Dimuka.

- b) Transaksi pengurangan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp49.007.100,00 merupakan jurnal balik pengakuan Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2024 atas Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 untuk *voucher* pembelian BBM yang masih tersisa sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- c) Transaksi pengurangan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp250.000.000,00 terdapat pada Ditjen Bina Pemdes merupakan jurnal balik pengakuan Belanja Dibayar Dimuka atas Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang berupa bantuan rehabilitasi bangunan kantor desa yang pertanggungjawabannya belum lengkap. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Belanja Dibayar Dimuka tersebut tidak disajikan dalam Neraca dan cukup diungkapkan dalam CaLK. Pengungkapan terkait Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang yang pertanggungjawabannya belum lengkap tersebut dijelaskan lebih lanjut pada **Catatan Penting Lainnya**.

*Pendapatan yang Masih
Harus Diterima
Rp34.616.450,00*

C.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp34.616.450,00 dan Rp94.651.450,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan, namun belum diterima tagihannya.

Tabel 48

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon I

NO	ESELON I	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	34.616.450	91.951.450	(57.335.000)
2	Ditjen Bina Bangsa	-	2.700.000	(2.700.000)
JUMLAH		34.616.450	94.651.450	(60.035.000)

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar sebesar Rp34.616.450,00 merupakan kelebihan pembayaran belanja tunjangan kinerja pada IPDN Kampus Sulawesi Utara yang terjadi pada Tahun 2022 dan sampai dengan 31 Desember 2025 masih belum terdapat setoran pengembalian.

Tabel 49

Mutasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024	94.651.450
Mutasi kurang:	(60.035.000)
Jurnal Balik atas Pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Setjen	(57.335.000)
Jurnal Balik atas Pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Ditjen Bina Bangda	(2.700.000)
Saldo per 31 Desember 2025	34.616.450

Pengurangan sebesar Rp57.335.000,00 pada Eselon I Setjen berasal dari jurnal balik pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada IPDN Jatinangor atas sewa ATM periode 2019 sampai dengan 2021 yang pembayarannya masih belum diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Telah dilakukan penyetoran ke kas negara atas pembayaran sewa tersebut pada Tahun 2025 sehingga dilakukan jurnal balik.

Pengurangan sebesar Rp2.700.000,00 pada Eselon I Ditjen Bina Bangda berasal dari jurnal balik penyesuaian akhir tahun pada Ditjen Bina Bangda atas pengakuan kekurangan pembayaran sewa atas penempatan mesin ATM karena kekurangan pembayaran tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025.

Piutang Bukan Pajak
Rp12.483.563.956,00

C.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp12.483.563.956,00 dan Rp12.640.675.594,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayaran. Piutang Bukan Pajak terdiri atas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Piutang Lainnya.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji pada Tabel 50.

Tabel 50

Rincian Piutang Bukan Pajak per Eselon I

No	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Setjen	12.445.738.924	12.640.675.594	(194.936.670)
2	Itjen	37.825.032	-	37.825.032
Jumlah		12.483.563.956	12.640.675.594	(157.111.638)

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp12.483.563.956,00 terdiri dari:

- Piutang Bukan Pajak pada Eselon I Setjen sebesar Rp12.445.738.924,00 merupakan Piutang Biaya Pendidikan Mahasiswa Pascasarjana sebesar Rp11.560.743.000,00 yang terdiri dari Piutang Mahasiswa Program Magister sebesar Rp7.363.575.000,00 dan Program Doktor sebesar

Rp4.197.168.000,00, Piutang Biaya Pendidikan Praja IPDN yang diberhentikan dari Tahun 2009 sampai dengan 2013 sebesar Rp884.995.924,00 pada IPDN Jatinangor;

- b) Piutang Lainnya pada Eselon I Itjen sebesar Rp37.825.032,00 yang merupakan Piutang Lainnya atas pengembalian kelebihan Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 yang disetorkan pada Tahun 2026; dan

Tabel 51
Mutasi Piutang Bukan Pajak per Jenis Transaksi

No	Jenis Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
PIUTANG PNB					
1	Pendapatan Pendidikan	12.640.675.594	-	(194.936.670)	12.445.738.924
PIUTANG LAINNYA					
1	Pengembalian Belanja Pemeliharaan TA 2025 yang disetorkan pada TA 2026	-	37.825.032	-	37.825.032
TOTAL PIUTANG BUKAN PAJAK		12.640.675.594	37.825.032	(194.936.670)	12.483.563.956

Penambahan sebesar Rp37.825.032,00 merupakan Piutang Lainnya atas setoran pengembalian kelebihan Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 yang disetorkan ke Kas Negara pada Tahun 2026 pada Itjen.

Pengurangan sebesar Rp194.936.670,00 terdiri dari:

Pelunasan Piutang PNB pada IPDN Jatinangor sebesar Rp177.100.000,00 terdiri dari pelunasan piutang Program Magister sebesar Rp64.350.000,00 dan Program Doktor sebesar Rp112.750.000,00; dan

Koreksi Pencatatan Rp17.836.670,00 terdiri dari koreksi tagihan Kewajiban Sidang Komisi Promotor Angkatan IV Gelombang 1 Program Doktor Pascasarjana sebesar Rp5.000.000,00 dan Koreksi Pencatatan Piutang Praja Yang diberhentikan Tahun 2019 sebesar Rp12.836.670,00.

Tabel 52
Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak

No	ANGKATAN	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi +/- karena tagihan dan pembayaran tahun ini		Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)
			Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	
1. SEKRETARIAT JENDERAL					
IPDN JATINANGOR					
1	XVII	242.650.000	-	-	242.650.000
2	XVIII	386.850.000	-	-	386.850.000
3	XIX	168.050.000	-	-	168.050.000
4	XX	276.950.000	-	-	276.950.000
5	XXI	860.375.000	-	-	860.375.000
6	XXII	448.275.000	-	(2.350.000)	445.925.000
7	XXIII	862.650.000	-	-	862.650.000
8	XXIV	261.625.000	-	-	261.625.000
9	XXV	436.250.000	-	-	436.250.000
10	XXVI	640.750.000	-	-	640.750.000
11	XXVII	273.750.000	-	-	273.750.000
12	XXVIII	407.000.000	-	-	407.000.000
13	XXIX	265.000.000	-	-	265.000.000
14	XXX	555.750.000	-	(22.250.000)	533.500.000
15	XXXI (I)	144.000.000	-	-	144.000.000
16	XXXI (II)	416.000.000	-	(13.000.000)	403.000.000
17	XXXII	203.750.000	-	(2.000.000)	201.750.000
18	XXXIII (I)	19.500.000	-	-	19.500.000
19	XXXIII (II)	29.500.000	-	-	29.500.000
20	XXXIV	11.500.000	-	-	11.500.000
21	XXXV	294.250.000	-	-	294.250.000
22	XXXVI	52.750.000	-	(18.250.000)	34.500.000
23	XXXVII	128.500.000	-	(6.500.000)	122.000.000
24	XXXVIII	20.750.000	-	-	20.750.000
25	XL	21.500.000	-	-	21.500.000
JUMLAH S2		7.427.925.000	-	(64.350.000)	7.363.575.000
1	S3-I	571.000.000	-	-	571.000.000
2	S3-II	377.750.000	-	-	377.750.000
3	S3-III	210.750.000	-	-	210.750.000
4	S3-IV	638.800.000	-	(38.500.000)	600.300.000
5	S3-IV (II)	18.750.000	-	-	18.750.000
6	S3-V (I)	344.993.000	-	-	344.993.000
7	S3- V (II)	229.250.000	-	-	229.250.000
8	S3- VI	237.750.000	-	-	237.750.000
9	S3- VII (I)	111.250.000	-	-	111.250.000
10	S3- VII (II)	208.500.000	-	-	208.500.000
11	S3-VIII	503.000.000	-	(15.750.000)	487.250.000
12	S3-IX	647.250.000	-	(30.000.000)	617.250.000
13	S3-X	178.500.000	-	(33.500.000)	145.000.000
14	S3-XI	37.375.000	-	-	37.375.000
JUMLAH S3		4.314.918.000	-	(117.750.000)	4.197.168.000
TOTAL PIUTANG PASCASARJANA		11.742.843.000	-	(182.100.000)	11.560.743.000
Piutang Praja		897.832.594	-	(12.836.670)	884.995.924
TOTAL PIUTANG SETJEN		12.640.675.594	-	(194.936.670)	12.445.738.924
2. INSPEKTORAT JENDERAL					
Pengembalian Belanja Pemeliharaan TA 2025		-	37.825.032	-	37.825.032
TOTAL		12.640.675.594	37.825.032	(194.936.670)	12.483.563.956

Dari Piutang Biaya Pendidikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.445.738.924,00, sebesar Rp11.218.688.272,00 atau 90,14% dari total piutang tersebut merupakan piutang dengan kualitas macet. Untuk mengelola dan menatausahakan piutang, IPDN telah

membentuk tim penatausahaan piutang berdasarkan keputusan Rektor IPDN Nomor 500.10.28.1-30 tanggal 10 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penatausahaan Piutang Negara Bukan Pajak Sekolah Pascasarjana IPDN Tahun Anggaran 2025. Tim penatausahaan piutang pada Sekolah Pascasarjana IPDN telah menindaklanjuti rekomendasi KPKNL Bandung pada kegiatan asistensi PUPN dalam penyelesaian piutang dengan melakukan pemilahan atas Piutang Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Magister angkatan XVII s.d. XXXV dan Piutang Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Doktor angkatan I s.d V dengan hasil sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp4.775.075.000,00 merupakan Piutang yang timbul akibat dari kesalahan pencatatan administrasi. Terkait piutang ini belum diterbitkan koreksi atas surat tagihan Penerimaan Bukan Pajak dan/atau pembetulan atas dokumen pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b) Sebesar Rp572.925.000,00 telah ditetapkan PPNTD oleh Direktur Sekolah Pasca Sarjana IPDN. Namun PPNTD tidak dapat diproses lebih lanjut untuk dilakukan usulan penghapusan secara bersyarat kepada Menteri Keuangan melalui Surat Menteri Dalam Negeri, karena belum direviu oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri;
- c) Sebesar Rp4.169.618.000,00 merupakan piutang yang dapat dilimpahkan penagihannya ke PUPN. Namun belum dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan KPKNL terkait pelimpahan penagihan piutang ke PUPN.

*Penyisihan Piutang Tak
Tertagih –Piutang Bukan
Pajak
Rp11.665.928.013,00*

C.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp11.665.928.013,00 dan Rp11.043.686.930,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Penyisihan piutang tak tertagih PNBPN terdapat pada IPDN Jatinangor.

Tabel 53

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

No	Angkatan	Total Piutang 31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)				Total Penyisihan 31 Desember 2025 (Rp)
			Macet	Diragukan	Kurang Lancar	Lancar	
SEKRETARIAT JENDERAL							
IPDN JATINANGOR							
1	XVII	242.650.000	242.650.000	-	-	-	242.650.000
2	XVIII	386.850.000	386.850.000	-	-	-	386.850.000
3	XX	168.050.000	168.050.000	-	-	-	168.050.000
4	XX	276.950.000	276.950.000	-	-	-	276.950.000
5	XXI	860.375.000	860.375.000	-	-	-	860.375.000
6	XXII	445.925.000	445.925.000	-	-	-	445.925.000
7	XXIII	862.650.000	862.650.000	-	-	-	862.650.000
8	XXIV	261.625.000	261.625.000	-	-	-	261.625.000
9	XXV	436.250.000	436.250.000	-	-	-	436.250.000
10	XXVI	640.750.000	640.750.000	-	-	-	640.750.000
11	XXVII	273.750.000	273.750.000	-	-	-	273.750.000
12	XXVIII	407.000.000	407.000.000	-	-	-	407.000.000
13	XXIX	265.000.000	265.000.000	-	-	-	265.000.000
14	XXX	533.500.000	533.500.000	-	-	-	533.500.000
15	XXX (I)	144.000.000	143.250.000	375.000	-	-	143.625.000
16	XXX (II)	403.000.000	401.000.000	1.000.000	-	-	402.000.000
17	XXXI	201.750.000	186.250.000	-	1.550.000	-	187.800.000
18	XXXII (I)	19.500.000	19.500.000	-	-	-	19.500.000
19	XXXII (II)	29.500.000	12.000.000	-	1.750.000	-	13.750.000
20	XXXIV	11.500.000	11.500.000	-	-	-	11.500.000
21	XXXV	294.250.000	294.000.000	125.000	-	-	294.125.000
22	XXXVI	34.500.000	21.500.000	-	-	65.000	21.565.000
23	XXXVII	122.000.000	6.000.000	17.000.000	8.200.000	-	31.200.000
24	XXXVIII	20.750.000	13.000.000	625.000	650.000	-	14.275.000
25	XXXIX	-	-	-	-	-	-
26	XL	21.500.000	-	3.500.000	1.450.000	-	4.950.000
Jumlah S2		7.363.575.000	7.169.325.000	22.625.000	13.600.000	65.000	7.205.615.000
1	S3-I	571.000.000	571.000.000	-	-	-	571.000.000
2	S3-II	377.750.000	377.750.000	-	-	-	377.750.000
3	S3-III	210.750.000	210.750.000	-	-	-	210.750.000
4	S3-IV	600.300.000	582.550.000	8.625.000	50.000	-	591.225.000
5	S3-IV (II)	18.750.000	18.750.000	-	-	-	18.750.000
6	S3-V (I)	344.993.000	344.993.000	-	-	-	344.993.000
7	S3- V (II)	229.250.000	194.500.000	-	-	173.750	194.673.750
8	S3- VI	237.750.000	201.750.000	18.000.000	-	-	219.750.000
9	S3- VII (I)	111.250.000	111.250.000	-	-	-	111.250.000
10	S3- VII (II)	208.500.000	208.500.000	-	-	-	208.500.000
11	S3-VIII	487.250.000	450.250.000	16.750.000	-	17.500	467.017.500
12	S3-IX	617.250.000	-	301.250.000	1.475.000	-	302.725.000
13	S3-X	145.000.000	-	-	14.500.000	-	14.500.000
14	S3-XI	37.375.000	-	4.750.000	2.787.500	-	7.537.500
15	S3-XII	-	-	-	-	-	-
Jumlah S3		4.197.168.000	3.272.043.000	349.375.000	18.812.500	191.250	3.640.421.750
Jumlah Total Pascasarjana		11.560.743.000	10.441.368.000	372.000.000	32.412.500	256.250	10.846.036.750
Piutang Praja		884.995.924	777.320.272	41.042.231	1.275.452	64.183	819.702.138
INSPEKTORAT JENDERAL							
Pengembalian Belanja Pemeliharaan TA 2025		37.825.032	-	-	-	189.125	189.125
Total		12.483.563.956	11.218.688.272	413.042.231	33.687.952	509.558	11.665.928.013

Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR
Rp375.796.795,00

C.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp375.796.795,00 dan Rp300.680.096,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji pada Tabel 54.

Tabel 54

Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I

No	Uraian	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Bagian Lancar TGR	Setjen	375.796.795	300.680.096
Jumlah			375.796.795	300.680.096

Mutasi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) periode 31 Desember 2025 tersaji pada Tabel 55.

Tabel 55
Mutasi Bagian Lancar TP/TGR sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024	300.680.096
Mutasi Tambah (Penyesuaian Akhir Tahun 2025):	375.796.795
Reklasifikasi Masuk dari Piutang TP/TGR pada Setjen (IPDN Kampus Sulawesi Utara)	375.796.795
Mutasi Kurang (Jurnal Balik Awal Tahun):	(300.680.096)
Reklasifikasi Keluar ke Piutang TP/TGR pada Setjen (IPDN Kampus Sulawesi Utara)	(300.680.096)
Saldo per 31 Desember 2025	375.796.795

Penjelasan mutasi Bagian Lancar TP/TGR sebagai berikut:

Transaksi penambahan sebesar Rp375.796.795,00 merupakan Reklasifikasi Masuk dari Piutang TP/TGR yang kemungkinan dapat diterima/diharapkan untuk diselesaikan dalam 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang merupakan TGR atas kerugian negara berdasarkan hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2023 pada IPDN Kampus Sulawesi Utara.

Transaksi pengurangan sebesar Rp300.680.096,00 merupakan Reklasifikasi Keluar ke Piutang TP/TGR atas jurnal balik awal tahun pada IPDN Kampus Sulawesi Utara.

*Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Bagian
Lancar TP/TGR
Rp1.878.984,00*

C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.878.984,00 dan Rp1.503.401,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo Penyisihan Piutang Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan TP/TGR terdapat pada Satker IPDN Kampus Sulawesi Utara.

*Persediaan
Rp371.259.721.410,00*

C.9 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp371.259.721.410,00 dan Rp338.870.256.976,00.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji pada Tabel 56.

Tabel 56
Rincian Persediaan

Kode Perkiraan	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
I. Persediaan yang akan menjadi Beban Persediaan pada saat digunakan			
117111	Barang Konsumsi	3.505.124.319	3.616.888.027
117199	Persediaan Lainnya	1.254.289.814	1.152.137.472
	Total	4.759.414.133	4.769.025.499
II. Persediaan yang akan menjadi Beban Pemeliharaan pada saat digunakan			
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	619.739.631	625.989.968
117114	Suku Cadang	81.679.487	83.808.068
	Total	701.419.118	709.798.036
III. Persediaan yang akan menjadi Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	16.151.172.954	21.391.184.913
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	54.136.639.215	33.349.858.276
117125	Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	28.585.616.694	28.860.434.489
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	135.560.257.780	71.066.062.000
117127	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	121.569.579.244	139.951.231.767
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	8.196.420.722	2.521.084.896
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	1.599.201.550	36.251.577.100
	Total	365.798.888.159	333.391.433.441
	TOTAL PERSEDIAAN	371.259.721.410	338.870.256.976

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Unit Eselon I tersaji pada Tabel 57.

Tabel 57
Rincian Persediaan per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Setjen	8.229.987.946	4.003.439.661	4.226.548.285
2	Itjen	127.342.800	249.276.380	(121.933.580)
3	Ditjen Polpum	5.500.000	-	5.500.000
4	Ditjen Bina Adwil	39.977.444.163	25.671.175.183	14.306.268.980
5	Ditjen Pemdes	13.217.368.956	14.230.579.154	(1.013.210.198)
6	Ditjen Bina Bangda	302.779.465.018	278.372.114.776	24.407.350.242
7	Ditjen Otda	1.488.915.033	1.678.218.300	(189.303.267)
8	Ditjen Dukcapil	4.826.752.463	14.228.224.513	(9.401.472.050)
9	Ditjen Keuda	144.973.170	35.357.450	109.615.720
10	BSKDN	243.177.093	124.821.163	118.355.930
11	BPSDM	218.794.768	277.050.396	(58.255.628)
	Jumlah	371.259.721.410	338.870.256.976	32.389.464.434

Rincian Persediaan per Satker disajikan pada **Lampiran IX**.

Tabel 58
Mutasi Persediaan

Akun Persediaan	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Per 31 Desember 2025 (Rp)
Barang Konsumsi	3.616.888.027	64.469.091.965	64.580.855.673	3.505.124.319
Bahan untuk Pemeliharaan	625.989.968	2.748.560.909	2.754.811.246	619.739.631
Suku Cadang	83.808.068	603.281.590	605.410.171	81.679.487
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	21.391.184.913	16.852.546.791	22.092.558.750	16.151.172.954
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	33.349.858.276	25.406.885.616	4.620.104.677	54.136.639.215
Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	28.860.434.489	-	274.817.795	28.585.616.694
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	71.066.062.000	76.443.855.000	11.949.659.220	135.560.257.780
Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	139.951.231.767	3.000.000.000	21.381.652.523	121.569.579.244
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	2.521.084.896	271.824.486.732	266.149.150.906	8.196.420.722
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	36.251.577.100	30.765.358.080	65.417.733.630	1.599.201.550
Bahan Baku	-	74.358.700	74.358.700	-
Persediaan Lainnya	1.152.137.472	2.358.281.433	2.256.129.091	1.254.289.814
TOTAL	338.870.256.976	494.546.706.816	462.157.242.382	371.259.721.410

Rincian Jenis Transaksi Mutasi Persediaan per Eselon I disajikan pada **Lampiran X**.

Rincian Jenis Transaksi Mutasi Persediaan per Akun disajikan pada **Lampiran XI**.

Terdapat Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang tidak berada dalam penguasaan Kementerian Dalam Negeri berupa persediaan yang telah diserahterimakan kepada Pemda namun sampai dengan tanggal Neraca belum terbit SK Penghapusannya sebesar Rp8.991.150.507,00 yang terdiri dari sebesar Rp2.527.445.984,00 pada Ditjen Bina Adwil berupa Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp1.395.007.844,00 dan Tanah Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp1.132.438.140,00, sebesar Rp1.465.122.684,00 pada Ditjen Bina Pemdes berupa Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat, sebesar Rp4.990.853.839,00 pada Ditjen Bina Bangda berupa Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat, sebesar Rp7.728.000,00 pada Ditjen Otda berupa Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat dengan rincian terlampir pada **Lampiran XII**.

Transaksi Koreksi Saldo Awal sebesar Rp2.968.660,00 merupakan transaksi dalam rangka koreksi kesalahan penginputan harga barang per unit dan kuantitas barang pada Satker IPDN Kampus Papua. Transaksi tersebut merupakan transaksi lanjutan dari Transaksi Keluar Lainnya sebesar Rp2.968.660,00.

Transaksi Hibah Masuk sebesar Rp27.120.173.607,00,00 terdapat pada:

- a) Setjen sebesar Rp4.825.310.000,00 merupakan Hibah Masuk

Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana daerah di Provinsi Aceh; dan

- b) Ditjen Bina Adwil sebesar Rp22.294.863.607,00 merupakan Hibah Masuk Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat yang terdiri dari:
 - i. Hibah Masuk berupa dua unit Mobil *Ambulance* sebesar Rp2.394.372.367,00 yang diterima dari *Gyeonggi Provincial Social Welfare Foundation GO & DO of The Republic of Korea*. Mobil *Ambulance* tersebut selanjutnya akan dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten Bombana;
 - ii. Hibah Masuk berupa dua unit Mobil Pompa Pemadam Kebakaran, satu unit Mobil Tangki air Pemadam Kebakaran, satu unit Mobil *Chemical* Pemadam Kebakaran, dua unit Mobil Komando Pemadam Kebakaran sebesar Rp13.724.571.240,00 yang diterima dari *Jeju Special Self-Governing Province*;
 - iii. Hibah Masuk berupa 20.000 unit pakaian tahan debu dan 200 unit pakaian penyelamatan kebakaran sebesar Rp6.068.320.000,00 dari *Social Welfare Foundation Go & Do*; dan
 - iv. Hibah Masuk berupa empat unit Mobil *Ambulance* sebesar Rp107.600.000,00 dari *Ehime Prefectural Government*.

Transaksi Perolehan Lainnya sebesar Rp5.978.637,00 terdapat pada:

- a) IPDN Jatinangor sebesar Rp1.198.692,00 yang merupakan koreksi dalam rangka memperbaiki kesalahan penginputan transaksi opname fisik yang seharusnya tidak dilakukan sehingga harga dan kuantitas dapat kembali ke keadaan semula sebelum kesalahan penginputan opname fisik.
- b) Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II sebesar Rp4.779.945,00 yang merupakan koreksi kurang catat persediaan obat-obatan untuk menyesuaikan pembukuan aplikasi dengan jumlah fisik persediaan.

Transaksi Reklasifikasi dari Aset sebesar Rp45.000.000,00 merupakan transaksi dalam rangka koreksi kesalahan penginputan kode barang pada saat perolehan persediaan yang semula tercatat sebagai Peralatan dan Mesin terdapat pada Satker Ditjen Bina Pemdes.

Transaksi Persediaan Dalam Proses Masuk sebesar Rp64.559.752.000,00 merupakan penambahan saldo Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda merupakan penyelesaian pekerjaan renovasi Gelanggang Olahraga

(GOR) Indoor Manahan dan Pasar Tunggul Sari yang dananya bersumber dari Hibah Langsung Luar Negeri dari *United Arab Emirates* (UAE) terdiri dari sebesar Rp35.325.925.120,00 yang sebelumnya telah tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses pada Tahun 2024, dan sebesar Rp29.233.826.880,00 berasal dari realisasi belanja Tahun 2025.

Transaksi Koreksi Nilai Tambah sebesar Rp2.240,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang merupakan koreksi dalam rangka memperbaiki kesalahan penginputan transaksi opname fisik yang seharusnya tidak dilakukan sehingga harga dan kuantitas dapat kembali ke keadaan semula sebelum kesalahan penginputan opname fisik.

Transaksi Barang Usang yang merupakan transaksi dalam rangka mengeluarkan persediaan dengan kondisi using dari Neraca sebesar Rp22.512.222,00 yang terdapat pada:

- a) IPDN Kampus Sulawesi Utara sebesar Rp13.340.000,00 berupa Handscoon Steril;
- b) IPDN Kampus Kalimantan Barat sebesar Rp1.106.850,00 berupa Obat-obatan; dan
- c) IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp8.065.372,00 berupa Obat-obatan dan Alat Kesehatan.

Transaksi Barang Rusak sebesar Rp69.550.000,00 merupakan transaksi dalam rangka mengeluarkan persediaan karena penghapusan sebab-sebab lain (*force majeure*) berupa Gedung Pertokoan Pasar Permanen pada Ditjen Bina Pemdes.

Transaksi Keluar Lainnya sebesar Rp15.549.653.290,00 terdapat pada:

- a) IPDN Kampus Papua sebesar Rp2.968.660,00 yang merupakan tindak lanjut dari koreksi saldo awal atas rangka koreksi kesalahan penginputan harga barang per unit dan kuantitas barang;
- b) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanimbar sebesar Rp857.981.630,00 yang merupakan transaksi dalam rangka koreksi pencatatan Persediaan yang telah terbit SK Penghapusan pada Tahun 2024 sehingga seharusnya telah keluar dari Neraca; dan
- c) Ditjen Bina Bangda sebesar Rp14.688.703.000,00 yang merupakan koreksi atas perolehan Persediaan yang berasal dari realisasi belanja yang bersumber dari hibah yang terutang pada 31 Desember 2024. Persediaan tersebut dicatat melalui menu perolehan lainnya pada Tahun 2024. Pencatatan melalui pembelian dilakukan pada Tahun 2025 dalam rangka realisasi belanja dari persediaan yang terutang pada Tahun 2024 tersebut

sehingga dilakukan koreksi lainnya atas Persediaan yang telah dicatat melalui menu perolehan lainnya agar tidak menimbulkan pencatatan ganda.

Transaksi Pencatatan Persediaan Tidak dikuasai sebesar Rp6.736.296.986,00 merupakan penyelesaian saldo Persediaan Eks Satker Tugas Pembantuan yang telah dipindahkan ke Satker Pusat pada:

- a) Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp1.465.122.684,00 yang merupakan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat berupa 4 unit Gedung Kantor Permanen dan 5 unit Bangunan Pasar Desa;
- b) Ditjen Bina Bangda sebesar Rp4.990.853.839,00 yang merupakan Aset Lain-lain untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda berupa 9 unit Gedung Kantor Permanen, 1 unit Gedung Pertemuan Permanen, dan Mess Wisma Bungalow Tempat Peristirahatan Permanen; dan
- c) Ditjen Otda sebesar Rp280.320.463,00 terdiri dari Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp5.502.668,00 berupa 15 Unit UPS dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp274.817.795,00 berupa Jembatan di Kabupaten Solok.

Sampai dengan 31 Desember 2025 masih belum terbit SK Penghapusan atas persediaan-persediaan tersebut sehingga masih disajikan pada Daftar Persediaan Tidak Dikuasai.

Transaksi Reklasifikasi ke Aset sebesar Rp203.089.200,00 terdiri dari sebesar Rp199.156.200,00 yang merupakan koreksi dalam rangka memperbaiki kesalahan pencatatan persediaan yang harusnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin sebesar Rp188.644.500,00, Lisensi sebesar Rp8.658.000,00, dan Ekstrakomptabel sebesar Rp1.853.700,00 pada Setjen, dan sebesar Rp3.933.000,00 yang merupakan koreksi dalam rangka memperbaiki kesalahan pendetailan persediaan yang seharusnya dicatat sebagai Aset Tetap pada Ditjen Bina Keuda.

Transaksi Koreksi Nilai Kurang sebesar Rp65.558.460,00 terdiri dari sebesar Rp2.240,00 yang merupakan koreksi dalam rangka memperbaiki kesalahan penginputan transaksi opname fisik yang seharusnya tidak dilakukan sehingga harga dan kuantitas dapat kembali ke keadaan semula sebelum kesalahan penginputan opname fisik pada IPDN Jatinangor, dan sebesar Rp65.556.220,00 yang merupakan koreksi dalam rangka pengurangan nilai persediaan yang diperoleh dari realisasi belanja Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari temuan pemeriksaan BPK RI pada Ditjen Bina Bangda.

Transaksi Koreksi Kuantitas Kurang sebesar Rp4.097.800,00 terdiri dari sebesar Rp2.497.800,00 yang merupakan koreksi persediaan

sebagai tindak lanjut dari pengembalian Belanja Tahun 2025 yang menjadi persediaan pada Ditjen Bina Pemdes, dan sebesar Rp1.600.000,00 yang merupakan koreksi persediaan sebagai tindak lanjut Void BAST atas kesalahan penginputan BAST yang telah dilanjutkan hingga pendetailan persediaan.

Terdapat persediaan berupa sepuluh unit tenda pleton Satpol PP pada Ditjen Bina Adwil yang telah dikeluarkan dari Neraca pada akhir Tahun 2024 karena telah diserahkan kepada sepuluh Pemda dan dilengkapi dengan BAST, namun sampai dengan pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2024 berakhir persediaan tersebut masih berada di Ditjen Bina Adwil.

Adapun rincian sepuluh Pemda penerima bantuan pemerintah berupa tenda pleton Satpol PP tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b) Pemerintah Provinsi Maluku;
- c) Pemerintah Kota Subulussalam;
- d) Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- e) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
- f) Pemerintah Kota Padang Sidempuan;
- g) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- h) Pemerintah Kabupaten Intan Jaya;
- i) Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- j) Pemerintah Kabupaten Nduga.

Empat unit tenda pleton Satpol PP telah diserahkan kepada Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Tapanuli Utara, Pemkab Pegunungan Bintang, dan Pemkab Nduga. Atas enam unit tenda yang tersisa Ditjen Bina Adwil telah menerbitkan surat Sesditjen Bina Adwil Nomor 300.5.6/e.152/BAK tanggal 30 Desember 2024 hal Percepatan Pengambilan Bantuan Pemerintah Sub Urusan Trantibum Tahun 2024 yang ditujukan pada Pemda terkait untuk segera mengambil tenda dimaksud, namun tidak ada respon dari Pemda terkait sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya, enam tenda tersebut dialihkan untuk diserahkan kepada daerah bencana yaitu Cilacap, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan sehingga semua tenda telah diserahkan seluruhnya kepada Pemda per 31 Desember 2025.

Tanah

Rp13.259.318.847.812,00

C.10 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.259.318.847.812,00 dan Rp13.251.627.720.522,00.

Rincian Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Unit Eselon I tersaji pada Tabel 59.

Tabel 59
Rincian Tanah per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Setjen	10.307.883.800.411	10.335.290.899.077	(27.407.098.666)
2	Itjen	142.267.725.000	142.267.725.000	-
3	Ditjen Pemdes	613.234.134.493	613.234.134.493	-
4	Ditjen Bina Bangda	479.054.657.019	479.054.657.019	-
5	Ditjen Dukcapil	35.098.225.956	-	35.098.225.956
6	BSKDN	224.894.826.500	224.894.826.500	-
7	BPSDM	1.456.885.478.433	1.456.885.478.433	-
Jumlah		13.259.318.847.812	13.251.627.720.522	7.691.127.290

Rincian Tanah per Satker disajikan pada **Lampiran XIII**.

Rincian Mutasi Tanah per Eselon I terdapat pada **Lampiran XIV**.

Tabel 60
Rincian Mutasi Tanah

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	13.251.627.720.522
Mutasi tambah:	162.343.201.202
Koreksi Saldo Awal	35.098.225.956
Transfer Masuk	127.244.975.246
Mutasi kurang:	(154.652.073.912)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(35.098.225.956)
Transfer Keluar	(119.553.847.956)
Saldo per 31 Desember 2025	13.259.318.847.812

Penjelasan transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Tanah sebagai berikut:

- Transaksi penambahan dari Koreksi Saldo Awal sebesar Rp35.098.225.956,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang merupakan koreksi pemecahan NUP Tanah dalam rangka transfer keluar sebagian Tanah ke Ditjen Dukcapil;
- Transaksi penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp127.244.975.246,00 terdapat pada IPDN Kampus Papua yang diterima dari Setjen atas Tanah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Papua pada Tahun 2024 sebesar Rp84.455.622.000,00, IPDN Kampus Sulsel Sebesar Rp7.691.127.290,00 yang diterima dari Kementerian Kesehatan dan Ditjen Dukcapil sebesar Rp35.098.225.956,00 yang diterima dari IPDN Jatinangor berupa tanah yang berlokasi di Jalan Ampera Raya Nomor 1 Kampus IPDN Jakarta;
- Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp35.098.225.956,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang merupakan koreksi pemecahan NUP Tanah dalam rangka transfer keluar sebagian Tanah ke Ditjen Dukcapil; dan
- Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar sebesar

Rp119.553.847.956,00 terdapat pada Setjen ke IPDN Kampus Papua atas Tanah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Papua pada Tahun 2024 sebesar Rp84.455.622.000,00 dan IPDN Jatinangor ke Ditjen Dukcapil sebesar Rp35.098.225.956,00 berupa tanah yang berlokasi di Jalan Ampera Raya Nomor 1 Kampus IPDN Jakarta

Peralatan dan Mesin
Rp4.639.205.845.247,00

C.11 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp4.639.205.845.247,00 dan Rp4.156.760.195.772,00.

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 61.

Tabel 61
Rincian Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Setjen	1.056.233.020.029	945.568.072.283	110.664.947.746
2	Itjen	26.437.852.827	27.007.975.396	(570.122.569)
3	Ditjen Polpum	19.041.914.546	17.595.012.477	1.446.902.069
4	Ditjen Bina Adwil	150.741.481.206	134.217.143.473	16.524.337.733
5	Ditjen Bina Pemdes	104.190.956.230	103.099.088.506	1.091.867.724
6	Ditjen Bina Bangda	68.715.386.757	67.403.183.914	1.312.202.843
7	Ditjen Otda	18.946.883.882	23.268.106.047	(4.321.222.165)
8	Ditjen Dukcapil	2.995.205.902.037	2.643.463.301.276	351.742.600.761
9	Ditjen Keuda	20.974.352.229	20.384.999.557	589.352.672
10	Badan Litbang	24.317.018.668	25.825.828.789	(1.508.810.121)
11	Badan PSDM	154.401.076.836	148.927.484.054	5.473.592.782
Jumlah		4.639.205.845.247	4.156.760.195.772	482.445.649.475

Rincian Peralatan dan Mesin per Satker disajikan pada **Lampiran XIII**.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XV**.

Tabel 62
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	4.156.760.195.772
Mutasi tambah:	633.775.441.228
Pembelian	337.520.900.737
Penyelesaian Pembangunan Langsung	41.144.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	837.916.368
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	255.331.942.908
Perolehan Lainnya	14.280.933.915
Koreksi Saldo Awal	254.748.673
Transfer Masuk	237.854.110
Hibah Masuk	20.489.245.000
Reklasifikasi Masuk	3.972.163.200
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	192.577.500
Koreksi Susulan	2.340.003
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	613.674.814
Mutasi kurang:	(151.329.791.753)
Koreksi Susulan	(541.008.720)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(809.313.722)
Penghapusan	(334.516.696)
Transfer Keluar	(47.309.800)
Hibah Keluar	(9.975.709.396)
Reklasifikasi Keluar	(3.872.574.000)
Koreksi Pencatatan	(64.789.213.303)
Penghapusan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	(11.877.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(70.948.269.116)
Saldo per 31 Desember 2025	4.639.205.845.247
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(3.705.153.139.089)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	934.052.706.158

Penjelasan transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan dari Pembelian sebesar Rp337.520.900.737,00 yang berasal dari realisasi Belanja Modal.

Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per satker terdapat pada **Lampiran XVI**;

- b) Transaksi penambahan dari Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp41.144.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang berasal dari realisasi Belanja Modal.
- c) Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp837.916.368,00 terdapat pada Setjen berasal dari realisasi Belanja Modal;
- d) Transaksi penambahan dari Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp255.331.942.908,00 terdapat pada Ditjen Bina Adwil sebesar Rp14.768.086.908,00 dan Ditjen Dukcapil sebesar Rp240.563.856.000,00;
- e) Transaksi penambahan dari Perolehan Lainnya sebesar Rp14.280.933.915,00 terdiri dari:
- i. Kesalahan penginputan koreksi dalam rangka

- menindaklanjuti temuan Itjen untuk mencatat Belanja TAYL yang seharusnya dicatat sebagai Aset Tetap sebesar Rp45.176.395,00 terdapat pada IPDN Kampus Sumbar. Telah dilakukan transaksi lanjutan melalui Koreksi Saldo Awal untuk memperbaiki kesalahan penginputan tersebut;
- ii. Koreksi kesalahan penginputan kode dan kuantitas barang perolehan Tahun 2025 sebesar Rp14.029.936.908,00 pada Ditjen Bina Adwil;
 - iii. Koreksi dalam rangka memperbaiki kesalahan pendetailan Gedung dan Bangunan perolehan Tahun 2025 yang seharusnya dicatat sebagai beberapa NUP Peralatan dan Mesin sebesar Rp167.714.312,00 pada Ditjen Bina Pemdes;
 - iv. Koreksi untuk mencatat realisasi Belanja Barang yang seharusnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.330.000,00 pada Ditjen Bina Pemdes; dan
 - v. Koreksi atas kesalahan pendetailan KDP yang seharusnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin sebesar Rp34.776.300,00 terdapat pada Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan.
- f) Transaksi penambahan dari Koreksi Saldo Awal sebesar Rp254.748.673,00 terdiri dari:
- i. Koreksi dalam rangka pencatatan Peralatan dan Mesin berupa 2 Unit Minibus perolehan TAYL yang baru dibukukan pada Tahun 2025 sebesar Rp110.724.000,00 terdapat pada Setjen Pusat. Nilai Koreksi Saldo Awal dicatat berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Nomor LAP-0018/1/PRO-01/KNL.0704/01.01.00/2025 tanggal 24 Februari 2025;
 - ii. Koreksi dalam rangka menindaklanjuti temuan Itjen untuk mencatat Belanja TAYL yang seharusnya dicatat sebagai Aset Tetap sebesar Rp45.176.395,00 yang terdapat pada IPDN Kampus Sumatera Barat;
 - iii. Koreksi dalam rangka memperbaiki kesalahan penginputan kode dan kuantitas atas barang perolehan Tahun Anggaran Yang Lalu yang semula tercatat sebagai satu NUP barang seharusnya dicatat sebagai beberapa unit Peralatan dan Mesin sebesar Rp98.848.278,00 pada Ditjen Bina Pemdes;
- g) Transaksi penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp237.854.110,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp190.544.310,00 yang diterima dari Perpustakaan Nasional RI Jakarta, Ditjen Bina Adwil sebesar Rp18.654.900,00 yang diterima dari Setjen, Ditjen Bina Bangda sebesar Rp18.654.900,00 yang diterima dari Setjen, dan Ditjen Otda sebesar Rp10.000.000,00 yang diterima dari Setjen Pusat;
- h) Transaksi penambahan dari Hibah Masuk sebesar

Rp20.489.245.000,00 terdapat pada:

- i. Setjen sebesar Rp19.642.644.000,00 terdiri dari 5 unit kursi dan tempat sampah yang diterima dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. sebesar Rp22.644.000,00 dan *Server* dan *Switch* yang diterima dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp19.620.000.000,00; dan
 - ii. IPDN Jatinangor sebesar Rp846.601.000,00 terdiri dari 100 unit Tempat Tidur/Ranjang Besi yang diterima dari Purna Praja IPDN sebesar Rp275.000.000,00, *Soundsystem* yang diterima dari IKAPTK Kota Medan sebesar Rp156.150.000,00, 100 unit Tempat Tidur/Ranjang Besi yang diterima dari IKAPTK Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp275.000.000,00, satu buah Rak Buku dari Gramedia Merdeka Bandung sebesar Rp40.450.000,00, dan Kursi Belajar yang diterima dari IKAPTK Halmahera Selatan sebesar Rp100.001.000,00.
- i) Transaksi penambahan dari Reklasifikasi Masuk sebesar Rp3.972.163.200,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp3.826.509.000,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp99.589.200,00, dan BSKDN sebesar Rp46.065.000,00;
 - j) Transaksi penambahan dari Reklasifikasi Masuk dari Persediaan sebesar Rp192.577.500,00 terdapat pada Setjen sebesar Rp188.644.500,00 dan pada Ditjen Bina Keuda sebesar Rp3.933.000,00 berupa koreksi dalam rangka mencatat Persediaan yang seharusnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin;
 - k) Transaksi penambahan dari Koreksi Susulan sebesar Rp2.340.003,00 merupakan koreksi pencatatan dalam rangka mencatat *Bracket* Televisi yang semula dicatat sebagai ekstrakomptabel menjadi penambahan nilai Televisi karena *Bracket* tersebut seharusnya dicatat satu kesatuan dengan Televisi pada Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II;
 - l) Transaksi penambahan dari Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif sebesar Rp613.674.814,00 terdapat pada Satker Setjen sebesar Rp275.254.314,00, sebesar Rp49.450.000,00 terdapat pada Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri IV, sebesar Rp9.775.000,00 terdapat pada Ditjen Bina Pemdes, sebesar Rp241.592.500,00 terdapat pada Ditjen Bina Bangda, dan sebesar Rp37.603.000,00 terdapat pada Balai Besar Pemdes Malang;
 - m) Transaksi pengurangan dari Koreksi Susulan sebesar Rp541.008.720,00 terdapat pada Setjen terdiri dari Rp539.429.370,00 yang merupakan koreksi atas penerimaan

kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu yang menjadi Peralatan dan Mesin, sebesar Rp530.400,00 yang merupakan tindak lanjut koreksi kesalahan penginputan peralatan dan mesin yang semula tercatat sebagai persediaan melalui Transaksi Reklasifikasi Masuk dari Persediaan dengan nilai yang berbeda dari pencatatan awalnya sehingga perlu dilakukan penambahan nilai Peralatan dan Mesin yang diterima, serta sebesar Rp1.048.950,00 yang merupakan koreksi atas transaksi Pengembangan Nilai Aset yang seharusnya tidak menambah nilai Peralatan dan Mesin namun menjadi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;

- n) Transaksi pengurangan dari Koreksi Nilai Berkurang sebesar Rp809.313.722,00 terdiri dari:
 - i. Koreksi atas transaksi Pengembangan Nilai Aset yang seharusnya tidak menambah nilai Peralatan dan Mesin namun menjadi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.604.500,00 pada Setjen;
 - ii. Koreksi nilai aset atas Temuan Pengembalian Belanja Modal TAYL yang menjadi Aset sebesar Rp763.109.222,00 yang terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp7.700.000,00, Ditjen Polpum sebesar Rp1.790.338,00, Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp2.612.578, dan Ditjen Dukcapil sebesar Rp751.006.306,00;
 - iii. Koreksi kesalahan pencatatan kuantitas dan nilai aset perolehan TAYL yang semula didetailkan sebagai satu unit barang, seharusnya dicatat sebagai beberapa barang dengan kodefikasi yang berbeda sebesar Rp39.600.000,00 terdapat pada Ditjen Bina Pemdes;
- o) Transaksi pengurangan dari Penghapusan sebesar Rp334.516.696,00 terdapat pada Ditjen Otda;
- p) Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp47.309.800,00 merupakan Transfer Keluar dari Setjen kepada Ditjen Otda sebesar Rp10.000.000,00, Ditjen Bina Adwil sebesar Rp18.654.900,00 dan Ditjen Bina Bangsa sebesar Rp18.654.900,00;
- q) Transaksi pengurangan dari Hibah Keluar sebesar Rp9.975.709.396,00 terdapat pada Setjen sebesar Rp3.775.955.000,00, Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp70.067.500,00, dan Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar sebesar Rp6.129.686.896,00;
- r) Transaksi pengurangan dari Reklasifikasi Keluar sebesar Rp3.872.574.000,00 terdapat pada Setjen sebesar Rp3.826.509.000,00 dan BSKDN sebesar Rp46.065.000,00;
- s) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar

Rp64.789.213.303,00 terdiri dari:

- i. Koreksi dalam rangka tindak lanjut kesalahan penginputan pencatatan koreksi dalam rangka menindaklanjuti temuan Itjen untuk mencatat Belanja TAYL yang seharusnya dicatat sebagai aset tetap melalui transaksi Perolehan Lainnya pada IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp45.176.395,00. Koreksi tersebut kemudian dilanjutkan dengan Koreksi Saldo Awal sebesar Rp45.176.395,00.
- ii. Koreksi kesalahan penginputan kode dan kuantitas barang perolehan Tahun 2025 sebesar Rp14.029.936.908,00 pada Ditjen Bina Adwil yang semula dicatat sebagai satu kesatuan Peralatan dan Mesin;
- iii. Koreksi Pencatatan kesalahan pendetailan Peralatan dan Mesin yang seharusnya dicatat sebagai KDP karena pekerjaan per termin sebesar Rp50.714.100.000,00 terdapat pada Ditjen Dukcapil;
- t) Transaksi pengurangan dari Penghapusan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra sebesar Rp11.877.000,00 merupakan koreksi dalam rangka Pengembalian Belanja Modal TAYL yang semula dicatat sebagai Peralatan dan Mesin, namun setelah dilakukan Koreksi Nilai Berkurang, nilai Peralatan dan Mesin tersebut menjadi di bawah batas minimum kapitalisasi sehingga tercatat sebagai ekstrakomptabel terdapat pada Ditjen Bina Pemdes;
- u) Transaksi pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp70.948.269.116,00 terdapat pada:
 - i. Setjen sebesar Rp21.892.639.841,00
 - ii. IPDN Jatinangor sebesar Rp9.199.769.662,00;
 - iii. IPDN Kampus Sulut sebesar Rp454.954.343,00;
 - iv. IPDN Kampus Papua sebesar Rp6.431.451.141,00;
 - v. IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp494.108.015,00;
 - vi. Itjen sebesar Rp824.090.439,00;
 - vii. Ditjen Polpum sebesar Rp51.268.234,00;
 - viii. Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp61.769.000,00;
 - ix. Balai Pemdes Malang sebesar Rp380.059.250,00;
 - x. Ditjen Bina Bangda sebesar Rp175.859.654,00;
 - xi. Ditjen Otda sebesar Rp4.056.560.425,00;
 - xii. Ditjen Dukcapil sebesar Rp24.344.473.311,00;
 - xiii. BSKDN sebesar Rp1.800.197.271,00;
 - xiv. Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II sebesar Rp43.350.000,00; dan
 - xv. Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri IV sebesar Rp737.718.530,00.

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari realisasi belanja tahun anggaran berjalan disajikan pada Tabel 63.

Tabel 63
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Berasal dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran Berjalan

Uraian	Nilai (Rp)	Asal Transaksi (Rp)					Keterangan
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Kode Akun 532xxxx)	Belanja Modal Selain Akun 532xxx	Belanja Barang	Tindak Lanjut Koreksi Kesalahan Pencatatan TAB	Transaksi Lainnya	
1. Pencatatan Secara Langsung Menjadi Peralatan dan Mesin							
Pembelian (Mutasi tambah)	337.520.900.737	337.414.340.737	106.560.000				-
Koreksi Pencatatan (Mutasi kurang)	(64.789.213.303)	-	-	-	(64.744.036.908)	(45.176.395)	Transaksi Pembelian sebesar Rp64.744.036.908,00: 1. Dikoreksi sebesar Rp50.714.100.000,00 menjadi KDP sebelum direklasifikasi menjadi Peralatan dan Mesin 2. Dikoreksi sebesar Rp14.029.936.908,00 untuk memperbaiki kesalahan pencatatan Kode dan Kuantitas Peralatan dan Mesin
Penyelesaian Pembangunan Langsung (Mutasi tambah)	41.144.000	41.144.000	-	-	-	-	-
Pengembangan Nilai Aset (Langsung) (Mutasi tambah)	837.916.368	551.422.918	278.840.000	7.653.450	-	-	Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp7.653.450,00 yang berasal dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Koreksi Susulan (Mutasi kurang)	(541.008.720)	-	-	(1.048.950)	(530.400)	(539.429.370)	Dikoreksi sebesar Rp1.048.950,00 melalui Koreksi Susulan dan sebesar Rp6.604.500,00 melalui Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang karena tidak memenuhi kriteria Aset Tetap sehingga diakui sebagai Beban Pemeliharaan
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(809.313.722)	-	-	(6.604.500)	-	(802.709.222)	
Subtotal		338.006.907.655	385.400.000	-			
2. Pencatatan Tidak Secara Langsung Menjadi Peralatan dan Mesin							
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (Mutasi tambah)	255.331.942.908	204.617.842.908	-	-	50.714.100.000	-	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp204.617.842.908,00 semua dicatat sebagai Perolehan/Pengembangan KDP
Perolehan Lainnya (Mutasi tambah)	14.280.933.915	34.776.300	167.714.312	3.330.000	14.029.936.908	45.176.395	Perolehan Lainnya sebesar Rp34.776.300,00 semua dicatat sebagai Perolehan KDP
Reklasifikasi Masuk (Mutasi tambah)	3.972.163.200	-	99.589.200	-	-	3.872.574.000	Transaksi Reklasifikasi Masuk sebesar Rp99.589.200,00 semua dicatat sebagai ATL melalui menu Pembelian
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan (Mutasi tambah)	192.577.500	3.402.600	188.644.500	-	530.400	-	Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.402.600,00 semua dicatat sebagai Persediaan dan telah keluar dari Neraca sebagai Beban Persediaan. Sebelum dilakukan reklasifikasi ke Aset Tetap, persediaan tersebut kemudian dicatat kembali melalui Opname Fisik dan menyebabkan perbedaan harga sebesar Rp530.400,00. Peralatan dan Mesin yang hasil reklasifikasi selanjutnya dikoreksi sebesar Rp530.400,00 agar sesuai dengan pencatatan perolehan awal Persediaan
Koreksi Susulan (Mutasi tambah)	2.340.003	2.340.003	-	-	-	-	Semua dicatat sebagai Ekstrakomptabel
Subtotal		204.658.361.811	455.948.012	3.330.000			
Total		542.665.269.466	841.348.012	3.330.000			

Rincian perhitungan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdapat pada Tabel 64.

Tabel 64
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Berasal dari Realisasi Belanja

Uraian Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi Peralatan dan Mesin	542.665.269.466
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak menjadi Peralatan dan Mesin	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin dicatat sebagai Dana di Rekening Penampungan atas Belanja dengan mekanisme RPATA karena sampai dengan Tahun Anggaran Berakhir masih belum ada progres penyelesaian pekerjaan	34.571.325.713
Belanja Modal Peralatan dan Mesin didetailkan sebagai Aset Tetap Renovasi	134.996.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin didetailkan sebagai Aset Tak Berwujud	12.774.608.489
Belanja Modal Peralatan dan Mesin didetailkan sebagai Ekstrakomptabel	204.835.140
Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Beban Pemeliharaan	547.371
Subtotal	47.686.312.713
Perhitungan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	590.351.582.179
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA (532xxx)	590.351.582.179
Selisih	-

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.639.205.845.247,00 tersebut diantaranya terdapat Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp31.412.042.896,00. Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri mengungkapkan adanya peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya, yaitu atas LHP LK Tahun 2022 pada tiga satker sebesar Rp2.525.519.691,00 dan Tahun 2023 pada 12 satker sebesar Rp28.886.523.205,00.

Gedung dan Bangunan
Rp2.939.685.514.821,00

C.12 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp2.939.685.514.821,00 dan Rp2.922.592.918.649,00. Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 65.

Tabel 65
Rincian Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I

No	Eselon I	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	2.108.572.437.456	2.084.074.148.806	24.498.288.650
2	Itjen	45.925.502.780	45.925.502.780	-
3	Ditjen Bina Adwil	1.576.390.000	1.576.390.000	-
4	Ditjen Bina Pemdes	189.538.780.982	188.820.033.099	718.747.883
5	Ditjen Bina Bangda	105.804.494.380	103.940.869.452	1.863.624.928
6	Ditjen Dukcapil	36.606.283.783	36.357.571.783	248.712.000
7	BSKDN	32.971.251.829	32.772.037.871	199.213.958
8	BPSDM	418.690.373.611	429.126.364.858	(10.435.991.247)
Jumlah		2.939.685.514.821	2.922.592.918.649	17.092.596.172

Rincian Gedung dan Bangunan per Satker disajikan pada **Lampiran XIII**.

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XVII**.

Tabel 66
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	2.922.592.918.649
Mutasi tambah:	44.438.977.050
Pembelian	3.436.624.291
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	12.484.003.087
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	6.670.112.787
Pengembangan Melalui KDP	9.308.898.904
Perolehan Lainnya	69.655.000
Koreksi Saldo Awal	6.954.624.000
Transfer Masuk	125.169.000
Hibah Masuk	127.356.000
Reklasifikasi Masuk	899.155.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	874.843.835
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	642.024.528
Koreksi Susulan	2.846.510.618
Mutasi kurang:	(27.346.380.878)
Koreksi Susulan	(5.968.088)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(826.679.499)
Transfer Keluar	(125.169.000)
Hibah Keluar	(22.734.023.000)
Reklasifikasi Keluar	(899.155.000)
Koreksi Pencatatan	(2.755.386.291)
Saldo per 31 Desember 2025	2.939.685.514.821
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(641.689.526.713)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	2.297.995.988.108

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan dari Pembelian sebesar Rp3.436.624.291,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp320.850.000,00, IPDN Kampus Sulsel sebesar Rp399.358.000,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp123.543.000,00, Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II sebesar Rp158.337.000,00, dan BPSDM sebesar Rp2.434.536.291,00 yang berasal dari Realisasi Belanja Modal;
- b) Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp12.484.003.087,00 terdapat pada Setjen sebesar Rp7.146.807.714,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp1.819.437.100,00, Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp887.167.545,00, Ditjen Bina Bangda sebesar Rp1.797.075.728,00, Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III sebesar Rp833.515.000,00 yang berasal dari Belanja Modal;

- c) Transaksi penambahan dari Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp6.670.112.787,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalbar;
- d) Transaksi penambahan dari Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp9.308.898.904,00 terdapat pada IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp260.659.796,00, BSKDN sebesar Rp199.213.958,00, Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II sebesar Rp1.129.876.000,00, Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III sebesar Rp1.134.583.114,00, dan Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan sebesar Rp6.584.566.036,00;
- e) Transaksi penambahan dari Perolehan Lainnya sebesar Rp69.655.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang merupakan koreksi dalam rangka mencatat Belanja Barang yang substansinya seharusnya merupakan Gedung dan Bangunan;
- f) Transaksi penambahan dari Koreksi Saldo Awal sebesar Rp6.954.624.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor dalam rangka penggantian Gedung Laundry yang telah dihapusbukukan;
- g) Transaksi penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp125.169.000,00 terdapat pada Ditjen Dukcapil atas Bangunan Gedung Pendidikan Permanen yang diterima dari IPDN Jatinangor;
- h) Transaksi penambahan dari Hibah Masuk sebesar Rp127.356.000,00 terdapat pada Setjen Pusat berupa *flexible workspace* dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.;
- i) Transaksi penambahan dari Reklasifikasi Masuk sebesar Rp899.155.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp393.405.000,00 dan Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III sebesar Rp505.750.000,00;
- j) Transaksi penambahan dari Koreksi Nilai Bertambah sebesar Rp874.843.835,00 terdiri dari:
 - i. Kesalahan penginputan koreksi dalam rangka memperbaiki kesalahan pendetailan Gedung dan Bangunan yang telah dicatat sebagai Gedung dan Bangunan baru seharusnya dicatat sebagai penambahan nilai Gedung dan Bangunan yang sebelumnya telah tercatat pada Neraca sebesar Rp320.850.000,00 pada IPDN Jatinangor. Kesalahan pencatatan tersebut telah diperbaiki melalui Transaksi Koreksi Nilai Berkurang dan selanjutnya dikoreksi melalui Transaksi Koreksi Susulan;

- ii. Koreksi dalam rangka mencatat Belanja Barang yang substansinya seharusnya dicatat sebagai Gedung dan Bangunan sebesar Rp196.786.000,00 yang terdapat pada IPDN Jatinangor;
 - iii. Koreksi dalam rangka menindaklanjuti temuan Itjen untuk mencatat Belanja TAYL yang seharusnya dicatat sebagai Aset Tetap sebesar Rp356.229.428,00 yang terdapat pada IPDN Kampus Sumbar;
 - iv. Koreksi kesalahan penginputan koreksi Nilai Aset atas Temuan Pengembalian Belanja Modal TAYL yang menjadi Aset sebesar Rp978.407,00 yang terdapat pada Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II;
- k) Transaksi penambahan dari Penerimaan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp642.024.528,00 yang terdapat pada Setjen;
- l) Transaksi Penambahan dari Koreksi Susulan sebesar Rp2.846.510.618,00 terdiri dari:
- i. Koreksi dalam rangka memperbaiki kesalahan pendetailan Gedung dan Bangunan yang telah dicatat sebagai Gedung dan Bangunan baru seharusnya dicatat sebagai penambahan nilai Gedung dan Bangunan yang sebelumnya telah tercatat pada Neraca sebesar Rp320.850.000,00 pada IPDN Jatinangor;
 - ii. Koreksi dalam rangka mencatat Belanja Barang yang seharusnya dicatat sebagai Gedung dan Bangunan sesuai dengan substansinya sebesar Rp66.549.200,00 pada Ditjen Bina Bangda;
 - iii. Koreksi dalam rangka memperbaiki kesalahan pendetilan Gedung dan Bangunan yang semula dicatat sebagai Gedung baru, seharusnya dicatat sebagai penambahan Nilai gedung yang sebelumnya telah tercatat pada Neraca sebesar Rp2.459.111.418,00 pada BPSDM;
- m) Transaksi pengurangan dari Koreksi Susulan sebesar Rp5.968.088,00 terdapat pada Setjen Pusat merupakan koreksi atas penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu yang menjadi Gedung dan Bangunan;
- n) Transaksi pengurangan dari Koreksi Nilai Berkurang sebesar Rp826.679.499,00 terdiri dari:
- i. Tindak lanjut kesalahan penginputan koreksi dalam rangka memperbaiki kesalahan pendetailan Gedung dan Bangunan yang telah dicatat sebagai Gedung dan Bangunan baru seharusnya dicatat sebagai penambahan nilai Gedung dan Bangunan yang sebelumnya telah tercatat pada Neraca sebesar Rp320.850.000,00 pada IPDN Jatinangor;
 - ii. Koreksi dalam rangka memperbaiki kesalahan pendetailan

Gedung dan Bangunan yang semula dicatat sebagai satu kesatuan Gedung dan Bangunan seharusnya dicatat sebagai beberapa unit Peralatan dan Mesin sebesar Rp167.714.312,00 pada Ditjen Bina Pemdes; dan

iii. Koreksi nilai aset atas temuan pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu yang menjadi aset yang terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp334.474.615,00, Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp705.350,00 dan Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II sebesar Rp1.956.814,00 merupakan koreksi atas penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu yang menjadi Gedung dan Bangunan; dan

iv. Koreksi dalam rangka memperbaiki kesalahan penginputan koreksi nilai aset atas temuan pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu yang menjadi aset terdapat pada Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II sebesar Rp978.408,00.

o) Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp125.169.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor ke Ditjen Dukcapil atas Bangunan Gedung Pendidikan Permanen;

p) Transaksi pengurangan dari Hibah Keluar sebesar Rp22.734.023.000,00 terdapat pada Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar;

q) Transaksi pengurangan dari Reklasifikasi Keluar sebesar Rp899.155.000,00 terdiri dari sebesar Rp393.405.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor dan sebesar Rp505.750.000,00 terdapat pada Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III; dan

r) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp2.755.386.291,00 terdiri dari sebesar Rp320.850.000,00 yang merupakan koreksi dalam rangka memperbaiki kesalahan pendetailan Gedung dan Bangunan yang telah dicatat sebagai Gedung dan Bangunan baru seharusnya dicatat sebagai penambahan nilai Gedung dan Bangunan yang sebelumnya telah tercatat pada Neraca, dan sebesar Rp2.434.536.291,00 yang merupakan koreksi dalam rangka memperbaiki kesalahan pendetilan Gedung dan Bangunan yang semula dicatat sebagai Gedung dengan baru, seharusnya dicatat sebagai penambahan Nilai gedung yang sebelumnya telah tercatat pada Neraca.

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari realisasi belanja tahun anggaran berjalan disajikan pada Tabel 67.

Tabel 67
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Berasal dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran Berjalan

Uraian	Nilai (Rp)	Asal Transaksi (Rp)					Keterangan
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Kode Akun 533xxx)	Belanja Modal Selain Akun 533xxx	Belanja Barang	Tindak Lanjut Koreksi Kesalahan Perekaman TAB	Transaksi Lainnya	
1. Pencatatan Secara Langsung Menjadi Gedung dan Bangunan							
Pembelian (Mutasi tambah)	3.436.624.291	3.313.081.291	123.543.000	-	-	-	Transaksi Koreksi Pembelian Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.755.386.291,00 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan Gedung dan Bangunan yang semula dicatat sebagai NUP Baru kemudian dikoreksi menjadi penambah nilai Gedung dan Bangunan yang sebelumnya telah tercatat pada Neraca karena substansi transaksi merupakan Pengembangan Nilai
Koreksi Pencatatan (Mutasi kurang)	(2.755.386.291)	-	-	-	(2.755.386.291)	-	Gedung dan Bangunan yang bertambah dari Transaksi Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp167.714.312,00 dikoreksi menjadi beberapa NUP Peralatan dan Mesin
Pengembangan Nilai Aset (Langsung) (Mutasi tambah)	12.484.003.087	12.316.288.775	-	-	167.714.312	-	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang (Mutasi kurang)	(826.679.499)	-	-	-	(167.714.312)	(658.965.187)	
Subtotal		15.629.370.066	123.543.000	-			
2. Pencatatan Tidak Secara Langsung Menjadi Gedung dan Bangunan							
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (Mutasi tambah)	6.670.112.787	1.070.072.111	-	-	-	5.600.040.676	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp1.070.072.111,00 semula dicatat sebagai Pengembangan KDP
Pengembangan Melalui KDP (Mutasi tambah)	9.308.898.904	9.234.384.904	-	-	-	74.514.000	Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp9.234.384.904,00 semula dicatat sebagai Pengembangan KDP
Perolehan Lainnya (Mutasi tambah)	69.655.000	-	-	69.655.000	-	-	Belanja semula dicatat sebagai Beban (52xxxx) kemudian dikoreksi menjadi Aset karena Belanja tersebut seharusnya dicatat sebagai Gedung dan Bangunan
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah (Mutasi tambah)	874.843.835	-	-	196.786.000	-	678.057.835	Belanja semula dicatat sebagai Beban (52xxxx) kemudian dikoreksi menjadi Aset karena Belanja tersebut seharusnya dicatat sebagai penambahan nilai Gedung dan Bangunan
Koreksi Susulan (Mutasi tambah)	2.846.510.618	24.575.127	-	66.549.200	-	2.755.386.291	1. Koreksi Susulan sebesar Rp24.575.127,00 merupakan transaksi lanjutan dari koreksi Transaksi Pembelian Ekstrakomptabel yang seharusnya dicatat sebagai penambahan Gedung dan Bangunan 2. Koreksi Susulan sebesar Rp66.549.200,00 merupakan transaksi lanjutan dari Belanja yang semula dicatat sebagai Beban (52xxxx) kemudian dikoreksi menjadi Aset karena Belanja tersebut seharusnya dicatat sebagai penambahan nilai Gedung dan Bangunan
Subtotal		10.329.032.142	-	332.990.200			
Total		25.958.402.208	123.543.000	332.990.200			

Rincian perhitungan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdapat pada Tabel 68.

Tabel 68
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Berasal dari Realisasi Belanja

Uraian Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menjadi Gedung dan Bangunan	25.958.402.208
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak menjadi Gedung dan Bangunan	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi Peralatan dan Mesin	167.714.312
Subtotal	167.714.312
Perhitungan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.126.116.520
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA (533xxx)	26.126.116.520
Selisih	-

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp295.425.617.843,00

C.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp295.425.617.843,00 dan Rp299.793.586.980,00.

Rincian Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31

Desember 2024 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 69.

Tabel 69
Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan) (Rp)
1	Setjen	250.139.405.354	247.236.106.832	2.903.298.522
2	Ditjen Bina Adwil	11.245.442.670	11.245.442.670	-
3	Ditjen Pemdes	3.058.859.874	3.058.859.874	-
4	Ditjen Bina Bangda	4.437.609.690	4.437.609.690	-
5	Ditjen Dukcapil	2.863.933.000	2.863.933.000	-
6	BSKDN	505.733.100	505.733.100	-
7	BPSDM	23.174.634.155	30.445.901.814	(7.271.267.659)
Jumlah		295.425.617.843	299.793.586.980	(4.367.969.137)

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Satker disajikan pada **Lampiran XIII**.

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XVIII**.

Tabel 70
Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	299.793.586.980
Mutasi tambah:	3.770.245.195
Pembelian	2.731.117.800
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	308.302.500
Transfer Masuk	546.531.335
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	184.293.560
Mutasi kurang:	(8.138.214.332)
Koreksi Susulan	(12.112.838)
Transfer Keluar	(546.531.335)
Hibah Keluar	(7.579.570.159)
Saldo per 31 Desember 2025	295.425.617.843
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(168.502.762.766)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	126.922.855.077

Penjelasan transaksi mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan dari Pembelian sebesar Rp2.731.117.800,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang berasal dari Realisasi Belanja Modal;
- b) Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp308.302.500,00 terdapat pada Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II berasal dari Realisasi Belanja Modal;
- c) Transaksi penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp546.531.335,00 terdapat pada Balai Satpol PP dan Damkar atas Jaringan yang diterima dari BPSDM;
- d) Transaksi penambahan dari Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah

sebesar Rp184.293.560,00 terdapat pada IPDN Kampus Sumatera Barat yang merupakan Koreksi dalam rangka menindaklanjuti temuan Itjen untuk mencatat Belanja TAYL yang seharusnya dicatat sebagai Aset Tetap;

- e) Transaksi pengurangan dari Koreksi Susulan sebesar Rp12.112.838,00 terdapat pada Setjen Pusat atas penerimaan kembali belanja modal TAYL yang menjadi Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- f) Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp546.531.335,00 terdapat pada BPSDM ke Balai Satpol PP dan Damkar atas Jaringan berupa Instalasi Air Tanah dalam Kapasitas Kecil, Jaringan Distribusi Tegangan 1 s.d. 20 KVA dan Jaringan Distribusi Lainnya; dan
- g) Transaksi pengurangan dari Hibah Keluar sebesar Rp7.579.570.159,00 terdapat pada Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar.

Mutasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari realisasi belanja tahun anggaran berjalan disajikan pada Tabel 71.

Tabel 71
Mutasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang Berasal dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran Berjalan

Uraian	Nilai (Rp)	Asal Transaksi (Rp)					Keterangan
		Belanja Modal JIJ (Kode Akun 534xxx)	Belanja Modal Selain Akun 534xxx	Belanja Barang	Tindak Lanjut Koreksi Kesalahan Perekaman TAB	Transaksi Lainnya	
1. Pencatatan Secara Langsung Menjadi Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan							
Pembelian (Mutasi tambah)	2.731.117.800	2.731.117.800	-	-	-	-	
Pengembangan Nilai Aset (Langsung) (Mutasi tambah)	308.302.500	308.302.500	-	-	-	-	
Subtotal		3.039.420.300	-	-			
2. Pencatatan Tidak Secara Langsung Menjadi Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan							
-							
Subtotal		-	-	-			
Total		3.039.420.300	-	-			

Rincian perhitungan realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan terdapat pada Tabel 72.

Tabel 72
Rincian Perhitungan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	
Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang menjadi Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan		3.039.420.300
Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak menjadi Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan		
Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan didetailkan sebagai Peralatan dan Mesin	48.840.000	
Subtotal		48.840.000
Perhitungan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan		3.088.260.300
Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan pada LRA (534xxx)		3.088.260.300
Selisih		-

Aset Tetap Lainnya
Rp80.846.861.744,00

C.14 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp80.846.861.744,00 dan Rp95.015.581.772,00 merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan.

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 73.

Tabel 73
Rincian Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I

No	Eselon I	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	31.579.222.008	31.037.584.948	541.637.060
2	Ditjen Polpum	-	642.024.528	(642.024.528)
3	Ditjen Bina Adwil	17.686.224.808	17.686.224.808	-
4	Ditjen Pemdes	13.467.763.830	13.580.320.108	(112.556.278)
5	Ditjen Bina Bangda	4.951.568.889	4.951.568.889	-
6	Ditjen Otda	-	14.521.363.182	(14.521.363.182)
7	Ditjen Dukcapil	7.667.328.361	7.196.688.361	470.640.000
8	Ditjen Keuda	2.011.421.358	1.913.718.758	97.702.600
9	BSKDN	517.106.736	519.862.436	(2.755.700)
10	BPSDM	2.966.225.754	2.966.225.754	-
Jumlah		80.846.861.744	95.015.581.772	(14.168.720.028)

Rincian Aset Tetap Lainnya per Satker disajikan pada **Lampiran XIII**.

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XIX**.

Tabel 74
Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	95.015.581.772
Mutasi tambah:	1.312.182.202
Pembelian	1.098.337.200
Koreksi Saldo Awal	85.282.042
Transfer Masuk	42.375.960
Hibah Masuk	85.465.500
Perolehan Lainnya	721.000
Koreksi Susulan	500
Mutasi kurang:	(15.480.902.230)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(12.397.400)
Transfer Keluar	(643.626.428)
Reklasifikasi Keluar	(99.589.200)
Koreksi Pencatatan	(145.526.320)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(14.579.762.882)
Saldo per 31 Desember 2025	80.846.861.744
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(8.343.074.288)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	72.503.787.456

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan dari Pembelian sebesar Rp1.098.337.200,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp193.102.000,00, IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp89.910.000,00, IPDN Kampus NTB sebesar Rp134.996.000,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp570.229.200,00, dan Ditjen Bina Keuda Rp110.100.000,00 yang berasal dari Belanja Modal;
- b) Transaksi penambahan dari Koreksi Saldo Awal sebesar Rp85.282.042,00 terdapat pada Ditjen Bina Pemdes merupakan koreksi pemecahan NUP atas perolehan aset TAYL;
- c) Transaksi penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp42.375.960,00 terdapat pada Setjen Rp1.601.900,00 dan IPDN Jatinangor sebesar Rp40.774.060,00;
- d) Transaksi penambahan dari Hibah Masuk sebesar Rp85.465.500,00 terdapat pada IPDN Jatinangor berupa 823 eksemplar buku cetak (Monografi) dari Purna Praja Angkatan 32 Adhimuktibara;
- e) Transaksi penambahan dari Perolehan Lainnya sebesar Rp721.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor;
- f) Transaksi penambahan dari Koreksi Susulan sebesar Rp500,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang merupakan koreksi

kesalahan penginputan nilai kuantitas barang pada saat pendetilan Monografi yang berasal dari Hibah Masuk;

- g) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp12.397.400,00 terdapat pada Ditjen Bina Keuda dalam rangka pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu;
- h) Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp643.626.428,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp1.601.900,00 dan Ditjen Polpum sebesar Rp642.024.528,00;
- i) Transaksi pengurangan dari Reklasifikasi Keluar sebesar Rp99.589.200,00 terdapat pada Ditjen Dukcapil;
- j) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp145.526.320,00 yang terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp996.000,00 yang merupakan koreksi kesalahan penginputan nilai kuantitas barang pada saat pendetilan Monografi yang berasal dari Hibah Masuk dan Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp144.530.320,00 yang merupakan koreksi pemecahan NUP atas perolehan aset TAYL;
- k) Transaksi pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp14.579.762.882,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp2.336.000,00 atas Alat Musik Tradisional/Daerah, Balai Besar PMD Malang sebesar Rp53.308.000,00 atas Monografi, Ditjen Otda sebesar Rp14.521.363.182,00 atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi, dan BSKDN sebesar Rp2.755.700,00 atas Lukisan Cat Minyak.

Mutasi Aset Tetap Lainnya yang berasal dari realisasi belanja tahun anggaran berjalan disajikan pada Tabel 75.

Tabel 75
Mutasi Aset Tetap Lainnya yang Berasal dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran Berjalan

Uraian	Nilai (Rp)	Asal Transaksi (Rp)					Keterangan
		Belanja Modal Lainnya (Kode Akun 536xxx) yang Menjadi ATL	Belanja Modal Selain Akun 536xxx yang Menjadi ATL	Belanja Barang	Tindak Lanjut Koreksi Kesalahan Perekaman TAB	Transaksi Lainnya	
1. Pencatatan Secara Langsung Menjadi Aset Tetap Lainnya							
Pembelian (Mutasi tambah)	1.098.337.200	863.752.000	134.996.000	-	99.589.200	-	ATL dari Transaksi Pembelian sebesar Rp99.589.200,00 dikoreksi menjadi
Reklasifikasi Keluar (Mutasi Kurang)	(99.589.200)	-	-	-	(99.589.200)	-	Peralatan dan Mesin melalui Reklasifikasi Keluar
Subtotal		863.752.000	134.996.000	-			
2. Pencatatan Tidak Secara Langsung Menjadi Aset Tetap Lainnya							
-							
Subtotal		-	-	-			
Total		863.752.000	134.996.000	-			

Rincian perhitungan realisasi Belanja Modal Lainnya yang Menjadi Aset Tetap Lainnya terdapat pada Tabel 76.

Tabel 76
Rincian Perhitungan Realisasi Belanja Modal Lainnya yang Menjadi Aset Tetap Lainnya

Uraian Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	
Realisasi Belanja Modal Lainnya yang menjadi ATL		863.752.000
Realisasi Belanja Modal Lainnya yang tidak menjadi ATL		
Belanja Modal Lainnya dicatat sebagai Dana di Rekening Penampungan atas Belanja dengan mekanisme RPATA karena sampai dengan Tahun Anggaran Berakhir masih belum ada progres penyelesaian pekerjaan	260.850.000	
Belanja Modal Lainnya menjadi Peralatan dan Mesin	436.149.200	
Belanja Modal Lainnya menjadi Gedung dan Bangunan	123.543.000	
Belanja Modal Lainnya menjadi ATB	56.812.869.131	
Subtotal		57.633.411.331
Perhitungan Realisasi Belanja Modal Lainnya yang Menjadi ATL		58.497.163.331
Realisasi Belanja Modal Lainnya pada LRA (536xxx)		58.497.163.331
Selisih		-

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp19.373.327.423,00

C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp19.373.327.423,00 dan Rp25.366.869.749,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 77.

Tabel 77
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	19.348.330.223	24.948.370.899	(5.600.040.676)
2	Ditjen Bina Pemdes	24.997.200	24.997.200	-
3	Badan PSDM	-	393.501.650	(393.501.650)
Jumlah		19.373.327.423	25.366.869.749	(5.993.542.326)

Rincian Mutasi KDP per Unit Eselon I terdapat pada Lampiran XX.

Rincian KDP per Satker disajikan pada **Lampiran XXI**.

Tabel 78
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

ESELON I	SATKER	URAIAN	NILAI (Rp)
Setjen	IPDN Kalbar (683070)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	19.348.330.223
Jumlah Setjen			19.348.330.223
Ditjen Bina Pemdes	Ditjen Bina Pemdes (027753)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	24.997.200
Jumlah Ditjen Bina Pemdes			24.997.200
JUMLAH KESELURUHAN			19.373.327.423

KDP senilai Rp19.373.327.423,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp19.348.330.223,00 dan Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp24.997.200,00, yang belum memperoleh alokasi anggaran untuk dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan dan dihentikan sementara waktu sehingga sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi 25: Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang tidak dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan seluruh saldo KDP tersebut dicatat sebagai KDP yang Dihentikan dari Operasi dan disajikan pada pos Aset Lain-lain. Reklasifikasi ke Aset Lainnya belum dapat diproses melalui Aplikasi SAKTI sehingga masih disajikan pada pos KDP.

Tabel 79
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	25.366.869.749
Mutasi tambah:	284.312.919.748
Perolehan Penambahan KDP	191.318.900.521
Pengembangan KDP	23.638.723.073
Koreksi Saldo Awal	5.600.040.676
Koreksi Nilai KDP Bertambah	63.755.255.478
Mutasi kurang:	(290.306.462.074)
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(262.002.055.695)
Pengembangan Melalui KDP	(9.308.898.904)
Penghapusan	(318.987.650)
Koreksi Pencatatan KDP	(13.076.479.149)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(5.600.040.676)
Saldo per 31 Desember 2025	19.373.327.423

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan KDP sebagai berikut:

- a) Transaksi Penambahan dari Perolehan Penambahan KDP sebesar Rp191.318.900.521,00 terdapat pada:

- i. Setjen sebesar Rp547.371,00;
 - ii. IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp20.244.846,00;
 - iii. IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp385.225.960,00;
 - iv. Ditjen Bina Adwil sebesar Rp14.768.086.908,00;
 - v. Ditjen Dukcapil sebesar Rp168.394.699.200,00;
 - vi. BSKDN sebesar Rp22.000.000,00;
 - vii. BPSDM sebesar Rp1.055.362.000,00;
 - viii. Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III sebesar Rp53.391.900,00; dan
 - ix. Balai Satpol PP dan Damkar sebesar Rp6.619.342.336,00.
- b) Transaksi penambahan dari Pengembangan KDP sebesar Rp23.638.723.073,00 terdapat pada IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp240.414.950,00, IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp684.846.151,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp21.455.056.800,00, BSKDN sebesar Rp177.213.958,00, dan Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III sebesar Rp1.081.191.214,00;
- c) Transaksi penambahan dari Koreksi Saldo Awal sebesar Rp5.600.040.676,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalbar yang merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas KDP TAYL;
- d) Transaksi Penambahan dari Koreksi Nilai KDP Bertambah sebesar Rp63.755.255.478,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp1.070.072.111,00 yang merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas KDP perolehan Tahun 2025 dan Ditjen Bina Adwil sebesar Rp11.971.083.367,00 yang merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas KDP perolehan TAYL, serta Ditjen Dukcapil sebesar Rp50.714.100.000,00 yang merupakan koreksi atas kesalahan pendetilan Peralatan dan Mesin yang seharusnya dicatat sebagai KDP karena pekerjaan dibagi ke dalam beberapa termin;
- e) Transaksi Pengurangan dari Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp262.002.055.695,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp6.670.112.787,00, Ditjen Bina Adwil sebesar Rp14.768.086.908,00, dan Ditjen Dukcapil sebesar Rp240.563.856.000,00;
- f) Transaksi Pengurangan dari Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp9.308.898.904,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp260.659.796,00, BSKDN sebesar Rp199.213.958,00, Balai Besar Pengembangan Kompetensi

Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II sebesar Rp1.129.876.000,00, Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III sebesar Rp1.134.583.114,00, dan Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan sebesar Rp6.584.566.036,00;

- g) Transaksi Pengurangan dari Penghapusan sebesar Rp318.987.650,00 terdapat pada BPSDM yang merupakan Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan;
- h) Transaksi Pengurangan dari Koreksi Pencatatan KDP sebesar Rp13.076.479.149,00 terdapat pada:
 - i. Setjen sebesar Rp547.371,00 yang merupakan koreksi dalam rangka memperbaiki pencatatan KDP yang seharusnya dicatat sebagai Beban Pemeliharaan;
 - ii. IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp1.070.072.111,00 yang merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas KDP perolehan Tahun 2025 berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan;
 - iii. Ditjen Bina Adwil sebesar Rp11.971.083.367,00 yang merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas KDP TAYL berupa Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan; dan
 - iv. Balai Satpol PP dan Damkar sebesar Rp34.776.300,00 yang merupakan koreksi atas kesalahan pendetilan KDP yang seharusnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin berupa Alat Pemadam Kebakaran.
- i) Transaksi Pengurangan dari Koreksi Nilai KDP Berkurang sebesar Rp5.600.040.676,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalbar yang merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas KDP TAYL berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari realisasi belanja tahun anggaran berjalan disajikan pada Tabel 80.

Tabel 80
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Berasal dari Realisasi Belanja
Tahun Anggaran Berjalan

Uraian	Nilai (Rp)	Asal Transaksi (Rp)					Keterangan
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Kode Akun 532xxx)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Kode Akun 533xxx)	Transaksi KDP yang Berasal dari Realisasi Belanja	Tindak Lanjut Koreksi Kesalahan Perekaman TAB	Transaksi Lainnya	
Pencatatan KDP dari Realisasi Belanja							
Perolehan/Perambahan KDP (Mutasi Tambah)	191.318.900.521	183.162.786.108	8.120.790.742	191.283.576.850	35.323.671	-	KDP yang berasal dari Perolehan/Perambahan KDP sebesar Rp35.323.671,00 dikoreksi menjadi Beban Pemeliharaan sebesar Rp547.371,00 dan Peralatan dan Mesin sebesar Rp34.776.300,00
Pengembangan KDP (Mutasi Tambah)	23.638.723.073	21.455.056.800	2.183.666.273	23.638.723.073	-	-	
Koreksi Pencatatan KDP (Mutasi Kurang)	(13.076.479.149)	-	-	-	(35.323.671)	(13.041.155.478)	
Koreksi Nilai KDP Bertambah (Mutasi Tambah)	63.755.255.478	50.714.100.000	-	50.714.100.000	-	13.041.155.478	
Subtotal		255.331.942.908	10.304.457.015	265.636.399.923			
Pencatatan Aset Tetap Definitif dari KDP							
Uraian	Nilai (Rp)	Transaksi KDP yang Berasal dari Realisasi Belanja (Rp)			Transaksi Lainnya (Rp)	Keterangan	
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Total			
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (Mutasi Kurang)	(262.002.055.695)	(255.331.942.908)	(1.070.072.111)	(256.402.015.019)	(5.600.040.676)	Saldo KDP yang direklasifikasi ke Aset Tetap Definitif sebesar Rp5.600.040.676,00 dan Rp74.514.000,00 berasal dari Realisasi Belanja TAYL	
Pengembangan Melalui KDP (Mutasi Kurang)	(9.308.898.904)	-	(9.234.384.904)	(9.234.384.904)	(74.514.000)		
Subtotal		(255.331.942.908)	(10.304.457.015)	(265.636.399.923)			
Selisih Pencatatan KDP yang Berasal dari Realisasi Belanja dengan Pencatatan Aset Tetap Definitif		-	-	-			

Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap

Rp4.523.688.502.856,00

C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp4.523.688.502.856,00 dan Rp4.211.432.344.941,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Satker disajikan pada **Lampiran XIII**.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 tersaji pada Tabel 81.

Tabel 81
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Peralatan dan Mesin	4.639.205.845.247	(3.705.153.139.089)	934.052.706.158
2	Gedung dan Bangunan	2.939.685.514.821	(641.689.526.713)	2.297.995.988.108
3	Jalan dan Jembatan	77.244.178.316	(60.173.907.946)	17.070.270.370
4	Irigasi	47.693.107.897	(32.384.637.603)	15.308.470.294
5	Jaringan	170.488.331.630	(75.944.217.217)	94.544.114.413
6	Aset Tetap Lainnya	80.846.861.744	(8.343.074.288)	72.503.787.456
Jumlah		7.955.163.839.655	(4.523.688.502.856)	3.431.475.336.799

Piutang Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR)

Rp17.850.089.235,00

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp17.850.089.235,00 dan Rp17.950.315.934,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji pada Tabel 82.

Tabel 82

Rincian Piutang TP/TGR per Eselon I

No	Eselon I	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	-	100.226.699	(100.226.699)
2	Ditjen Polpum	17.850.089.235	17.850.089.235	-
Jumlah		17.850.089.235	17.950.315.934	(100.226.699)

Mutasi tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 tersaji pada Tabel 83.

Tabel 83

Mutasi Tagihan TP/TGR sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024	17.950.315.934
Mutasi Tambah:	321.580.096
Reklasifikasi awal tahun dari Bagian Lancar Piutang TGR pada Setjen (IPDN Kampus Sulut)	300.680.096
Pengakuan Piutang TGR pada Itjen	20.900.000
Mutasi Kurang:	(421.806.795)
Reklasifikasi keluar dari Piutang TGR pada Setjen (IPDN Kampus Sulut) atas Jurnal Penyesuaian Akhir Tahun	(375.796.795)
Pembayaran Tagihan Piutang TGR pada Setjen (IPDN Kampus Sulut)	(25.110.000)
Pembayaran Tagihan Piutang TGR pada Itjen	(20.900.000)
Saldo per 31 Desember 2025	17.850.089.235

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan pada Setjen sebesar Rp300.680.096,00 berasal dari reklasifikasi masuk dari Bagian Lancar Piutang TP/TGR melalui jurnal balik awal tahun atas pengakuan Bagian Lancar Piutang TP/TGR pada Tahun 2025 pada IPDN Kampus Sulut;
- b) Transaksi penambahan pada Itjen Pusat sebesar Rp20.900.000,00 berasal dari pengakuan Piutang TP/TGR berdasarkan SKTJM Nomor 000.3.4/1020/IJ tanggal 20 Mei 2025 atas kehilangan kendaraan dinas;
- c) Transaksi pengurangan pada IPDN Kampus Sulut sebesar Rp375.796.795,00 berasal dari Reklasifikasi Keluar dari Piutang TP/TGR yang kemungkinan dapat diterima/diharapkan untuk diselesaikan dalam 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang merupakan TGR atas kerugian negara berdasarkan hasil temuan BPK RI pada Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2023;
- d) Transaksi pengurangan pada IPDN Kampus Sulut sebesar Rp25.110.000,00 terdiri dari pembayaran Piutang TGR yang diakui pada Tahun Anggaran 2025 atas temuan pemeriksaan BPK RI pada Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2024; dan
- e) Transaksi pengurangan pada Itjen Pusat sebesar Rp20.900.000,00 terdiri dari pembayaran Piutang TGR yang diakui pada Tahun Anggaran Berjalan atas kehilangan kendaraan dinas.

Terdapat Piutang berupa Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan pada Itjen sebesar Rp492.890.339,00 yang tidak dapat ditagihkan sejak bulan April 2017 telah diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui Surat Sekretaris Jenderal yang ditandatangani Kepala Biro Keuangan dan Aset Nomor 956/181/SJ tanggal 10 Januari 2019 hal penyerahan Pengurusan Piutang Negara. Berdasarkan Surat Ketua Panitia yang ditandatangani Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor SP3N-01/PUPNC.10.03/2019 tanggal 11 Januari 2019 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, maka kepengurusan piutang tersebut telah beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III. Selanjutnya berdasarkan Surat Ketua Panitia yang ditandatangani Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor PSBDT-71/PUPNC.10.03/2021 tanggal 11 November 2021 hal Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih, maka kepengurusan piutang tersebut dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih. Kemendagri telah mengajukan permohonan rekomendasi penghapusan piutang negara bersyarat melalui Surat Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 953/6675/SJ tanggal 30 November 2021 hal Permohonan Rekomendasi

Penghapusan Piutang Negara Bersyarat yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Utama Binbangkum PKN BPK RI. Berdasarkan Surat Wakil Ketua BPK RI Nomor 46/S/II/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 hal Rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara atas Nama Sdri. EI, dinyatakan bahwa BPK RI telah menyetujui permohonan rekomendasi penghapusan secara bersyarat piutang negara atas nama Sdri. EI. Menteri Keuangan telah menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KM.6/2023 tanggal 11 September 2023. Atas dasar Keputusan Menteri Keuangan tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan penghapusan secara bersyarat piutang negara atas nama Sdri. EI. dengan menghapuskan piutang negara tersebut dari pembukuan Inspektorat Jenderal. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan usulan penghapusan secara mutlak melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor x.900/81/SJ tanggal 31 Oktober 2025 hal Penyampaian Usulan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara a.n. EI kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Berdasarkan surat tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/MK/KN/2026 tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara pada Kementerian Dalam Negeri atas nama EI pada tanggal 10 Februari 2026, sehingga Inspektorat Jenderal melakukan penghapusan mutlak atas piutang tersebut.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan pada Ditjen Polpum sebesar Rp17.850.089.235,00 yang tidak dapat ditagihkan sejak bulan Januari 2012 telah diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui Surat Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tanggal 16 September 2020 hal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara. Berdasarkan Surat Ketua Panitia yang ditandatangani Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor SP3N-21/PUPNC.10.03/2020 tanggal 1 Juli 2020 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, maka kepengurusan piutang tersebut telah beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III.

Penyisihan Piutang
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp17.850.089.235,00

C.18 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp17.850.089.235,00 dan Rp17.850.590.368,00. Penyisihan piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel 84
Rincian Penyisihan Piutang TP/TGR per Eselon I

No	Komponen	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)
1	Ditjen Polpum	Macet	1	17.850.089.235	17.850.089.235
Total			1	17.850.089.235	17.850.089.235

Aset Tak Berwujud
Rp801.986.445.593,00

C.19 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp801.986.445.593,00 dan Rp830.510.381.843,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel 85
Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025

No	Uraian	Nilai per 31 Desember 2025 (Rp)	Nilai per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Software	703.634.528.415	756.371.780.413	(52.737.251.998)
2	Lisensi	93.796.633.828	69.533.433.080	24.263.200.748
3	Hasil Kajian/Penelitian	2.271.764.600	2.271.764.600	-
4	ATB Lainnya	2.283.518.750	2.333.403.750	(49.885.000)
Total Nilai Perolehan		801.986.445.593	830.510.381.843	(28.523.936.250)
Nilai Amortisasi ATB		(649.911.048.544)	(700.427.422.558)	50.516.374.014
Total Nilai Buku per 31 Desember 2025		152.075.397.049	130.082.959.285	21.992.437.764

Rincian Aset Tak Berwujud menurut Eselon I per 31 Desember 2025 tersaji pada Tabel 86.

Tabel 86
Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I

No	ESELON I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	122.461.268.939	73.437.842.168	49.023.426.771
2	Itjen	1.145.474.320	1.289.389.320	(143.915.000)
3	Ditjen Polpum	8.313.499.230	8.313.499.230	-
4	Ditjen Bina Adwil	3.758.937.210	1.034.120.800	2.724.816.410
5	Ditjen Bina Pemdes	17.583.975.880	17.583.975.880	-
6	Ditjen Bina Bangda	708.280.140	708.280.140	-
7	Ditjen Otda	2.487.407.950	2.487.407.950	-
8	Ditjen Dukcapil	637.217.400.447	684.831.981.546	(47.614.581.099)
9	Ditjen Bina Keuda	1.353.050.103	35.482.587.935	(34.129.537.832)
10	BSKDN	3.811.163.931	3.600.424.431	210.739.500
11	Badan PSDM	3.145.987.443	1.740.872.443	1.405.115.000
Jumlah		801.986.445.593	830.510.381.843	(28.523.936.250)

Rincian Aset Tak Berwujud per Satker disajikan pada **Lampiran XXII**.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XXIII**.

Tabel 87
Mutasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	830.510.381.843
Mutasi tambah:	76.018.559.085
Pembelian	51.548.808.886
Pengembangan Nilai Aset	12.459.964.884
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	1.016.859.900
Pengembangan Melalui KDP	4.574.143.950
Transfer Masuk	4.899.288.965
Hibah Masuk	55.834.500
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	8.658.000
Koreksi Susulan	1.455.000.000
Mutasi Kurang:	(104.542.495.335)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(499.687.054)
Koreksi Pencatatan	(1.467.300.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(102.575.508.281)
Saldo per 31 Desember 2025	801.986.445.593
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(649.911.048.544)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	152.075.397.049

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

- Transaksi penambahan dari Pembelian sebesar Rp51.548.808.886,00 terdapat pada Setjen sebesar Rp35.243.001.870,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp14.838.507.016,00, BSKDN sebesar Rp12.300.000,00, dan BPSDM sebesar Rp1.455.000.000,00 yang berasal dari Belanja Modal;
- Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp12.459.964.884,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp6.658.438.996,00 atas *Software* Komputer sebesar Rp6.531.604.812,00 serta perpanjangan Lisensi *Website* PPID Kemendagri sebesar Rp126.834.184,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp5.652.286.388,00 atas *Software* Komputer dan BSKDN sebesar Rp149.239.500,00 yang berasal dari Belanja Modal;
- Transaksi penambahan dari Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp1.016.859.900,00 terdapat pada Setjen Pusat sesuai dengan Kontrak Nomor 000.4/6731/Pusdatin/2025 tanggal 30 Oktober 2025;
- Transaksi penambahan dari Pengembangan Melalui KDP

sebesar Rp4.574.143.950,00 terdapat pada Setjen Rp4.512.643.950,00 dan BSKDN sebesar Rp61.500.000,00;

- e) Transaksi penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp4.899.288.965,00 terdapat pada DKPP sebesar Rp2.174.472.555,00 berupa *Software* Komputer Aplikasi SIETIK serta terdapat pada Ditjen BAK sebesar Rp2.724.816.410,00 berupa *Software* Komputer Aplikasi Satpol sebesar Rp1.362.408.205,00 dan *Software* Komputer Aplikasi Pemadam Kebakaran (Redkar dan Sipadam) sebesar Rp1.362.408.205,00 yang dialihstatuskan dari Kementerian Komdigi ke Kemendagri;
- f) Transaksi penambahan dari Hibah Masuk sebesar Rp55.834.500,00 terdapat pada IPDN Jatinangor berupa 442 eksemplar buku digital dari Purna Praja Angkatan 32 Adhimuktibara;
- g) Transaksi penambahan dari Reklasifikasi Masuk dari Persediaan sebesar Rp8.658.000,00 terdapat pada Setjen Pusat atas berupa koreksi dalam rangka mencatat mencatat Persediaan yang seharusnya dicatat sebagai ATB Lisensi;
- h) Transaksi penambahan dari Koreksi Susulan sebesar Rp1.455.000.000,00 terdapat pada BPSDM yang merupakan koreksi atas kesalahan pendetilan ATB *Software*. ATB tersebut sebelumnya dicatat sebagai *Software* dengan NUP baru, seharusnya dicatat sebagai penambahan Nilai Aset yang telah tercatat pada neraca;
- i) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp499.687.054,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp121.463.000,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp274.170.000,00, dan Ditjen Dukcapil sebesar Rp104.054.054,00 dalam rangka pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu;
- j) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.467.300.000,00 terdapat pada BSKDN sebesar Rp12.300.000,00 yang merupakan koreksi atas kesalahan pendetilan ATB *Software* yang seharusnya dicatat sebagai ATB Dalam Pengerjaan karena pekerjaan dibagi dalam beberapa termin dan BPSDM sebesar Rp1.455.000.000,00 yang merupakan koreksi atas kesalahan pendetilan ATB *Software*. ATB tersebut sebelumnya dicatat sebagai *Software* dengan NUP baru, seharusnya dicatat sebagai penambahan Nilai Aset yang telah tercatat pada neraca;
- k) Transaksi pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp102.575.508.281,00 terdapat pada:
 - i. Setjen Pusat sebesar Rp222.850.000,00 atas Lisensi dan

Rp28.000.000,00 atas *Software* Komputer;

ii. Itjen Pusat sebesar Rp143.915.000,00 atas *Software* Komputer;

iii. Ditjen Dukcapil sebesar Rp68.001.320.449,00 atas *Software* Komputer;

iv. Ditjen Bina Keuda sebesar Rp34.129.537.832,00 atas *Software* Komputer;

v. Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II sebesar Rp49.885.000,00 atas ATB Lainnya.

Mutasi Aset Tak Berwujud yang berasal dari realisasi belanja tahun anggaran berjalan disajikan pada Tabel 88.

Tabel 88
Mutasi Aset Tak Berwujud yang Berasal dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran Berjalan

Uraian	Nilai (Rp)	Asal Transaksi (Rp)					Keterangan
		Belanja Modal Lainnya (Kode Akun 536xxx) yang Menjadi ATB	Belanja Modal Selain Akun 536xxx yang Menjadi ATB	Belanja Barang	Tindak Lanjut Koreksi Kesalahan Perekaman TAB	Transaksi Lainnya	
1. Pencatatan Secara Langsung Aset Tak Berwujud							
Pembelian (Mutasi tambah)	51.548.808.886	38.761.900.397	12.774.608.489	-	12.300.000	-	1. ATB dari Pembelian dikoreksi sebesar Rp12.300.000,00 menjadi ATB Dalam Pengerjaan sebelum direklasifikasi menjadi ATB
Koreksi Pencatatan (Mutasi kurang)	(1.467.300.000)	-	-	-	(12.300.000)	(1.455.000.000)	2. ATB dari Pembelian dikoreksi sebesar Rp1.455.000.000,00 dalam rangka memperbaiki kesalahan pencatatan semula dicatat sebagai Software dengan NUP baru, seharusnya dicatat sebagai penambahan Nilai Aset yang sebelumnya telah tercatat pada neraca
Koreksi Susulan (Mutasi tambah)	1.455.000.000				1.455.000.000	-	
Pengembangan Nilai Aset (Langsung) (Mutasi tambah)	12.459.964.884	12.459.964.884	-	-	-	-	
Subtotal		51.221.865.281	12.774.608.489	-			
2. Pencatatan Tidak Secara Langsung Menjadi Aset Tak Berwujud							
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (Mutasi tambah)	1.016.859.900	1.016.859.900	-	-	-	-	
Pengembangan Melalui KDP	4.574.143.950	4.574.143.950	-	-	-	-	
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	8.658.000	-	-	8.658.000	-	-	
Subtotal		5.591.003.850	-	8.658.000			
Total		56.812.869.131	12.774.608.489	8.658.000			

Rincian perhitungan realisasi Belanja Modal Lainnya yang Menjadi Aset Tak Berwujud terdapat pada Tabel 89.

Tabel 89
Rincian Perhitungan Realisasi Belanja Modal Lainnya yang Menjadi Aset Tak Berwujud

Uraian Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	
Realisasi Belanja Modal Lainnya yang menjadi ATB		56.812.869.131
Realisasi Belanja Modal Lainnya yang tidak menjadi ATB		
Belanja Modal Lainnya dicatat sebagai Dana di Rekening Penampungan atas Belanja dengan mekanisme RPATA karena sampai dengan Tahun Anggaran Berakhir masih belum ada progres penyelesaian pekerjaan	260.850.000	
Belanja Modal Lainnya menjadi Peralatan dan Mesin	436.149.200	
Belanja Modal Lainnya menjadi Gedung dan Bangunan	123.543.000	
Belanja Modal Lainnya menjadi ATL	863.752.000	
Subtotal		1.684.294.200
Perhitungan Realisasi Belanja Modal Lainnya yang Menjadi ATB		58.497.163.331
Realisasi Belanja Modal Lainnya pada LRA (532xxx)		58.497.163.331
Selisih		-

*Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp228.247.203.927,00*

C.20 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp228.247.203.927,00 dan Rp384.325.357.961,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Dana di Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) Kementerian/Lembaga untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya disajikan pada **Lampiran XXIV**.

*Aset Lain-Lain
Rp339.285.684.989,00*

C.21 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp339.285.684.989,00 dan Rp182.864.064.500,00. Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kemendagri serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tabel 90
Rincian Aset Lain-Lain Menurut Uraian Akun per 31 Desember 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	182.452.165.714
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	156.833.519.275
Total		339.285.684.989

Rincian Aset Lain-Lain menurut Eselon I per 31 Desember 2025 tersaji pada Tabel 91.

Tabel 91
Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I

No	ESELON I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	40.995.979.660	23.278.604.600	17.717.375.060
2	Itjen	309.763.422	-	309.763.422
3	Ditjen Bina Adwil	2.713.589.380	2.832.484.380	(118.895.000)
4	Ditjen Pemdes	1.167.938.997	750.410.747	417.528.250
5	Ditjen Bina Bangda	48.544.290.381	48.785.882.881	(241.592.500)
6	Ditjen Otda	98.735.684.048	87.992.566.356	10.743.117.692
7	Ditjen Dukcapil	94.363.611.669	2.017.817.909	92.345.793.760
8	Ditjen Keuda	40.043.173.862	5.913.636.030	34.129.537.832
9	BSKDN	4.941.616.321	3.138.663.350	1.802.952.971
10	Badan PSDM	7.470.037.249	8.153.998.247	(683.960.998)
Jumlah		339.285.684.989	182.864.064.500	156.421.620.489

Rincian Aset Lain-Lain per Satker disajikan pada **Lampiran XXII**.

Rincian Mutasi Aset Lain-lain per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XXV**.

Tabel 92
Mutasi Aset Lain-Lain

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	182.864.064.500
Mutasi tambah:	189.241.794.963
Penghentian Aset dari Penggunaan	188.103.540.279
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	1.138.254.684
Mutasi kurang:	(32.820.174.474)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(613.674.814)
Penghapusan	(10.165.000)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(32.196.334.660)
Saldo per 31 Desember 2025	339.285.684.989
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi s.d 31 Desember 2025	(332.086.521.546)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	7.199.163.443

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Aset Lain-Lain sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan dari Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp188.103.540.279,00 terdapat pada:
 - i. Setjen Pusat sebesar Rp22.143.489.841,00;
 - ii. IPDN Jatinangor sebesar Rp9.202.105.662,00;
 - iii. IPDN Kampus Sulut sebesar Rp454.954.343,00;
 - iv. IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp494.108.015,00;
 - v. IPDN Kampus Papua sebesar Rp6.431.451.141,00;
 - vi. Itjen Pusat sebesar Rp968.005.439,00;
 - vii. Ditjen Polpum sebesar Rp51.268.234,00;
 - viii. Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp61.769.000,00;
 - ix. Balai Besar PMD Malang sebesar Rp433.367.250,00;
 - x. Ditjen Bina Bangda sebesar Rp175.859.654,00;
 - xi. Ditjen Otda sebesar Rp18.577.923.607,00;
 - xii. Ditjen Dukcapil sebesar Rp92.345.793.760,00;
 - xiii. Ditjen Bina Keuda sebesar Rp34.129.537.832,00;
 - xiv. BSKDN sebesar Rp1.802.952.971,00;
 - xv. Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II sebesar Rp93.235.000,00; dan
 - xvi. Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri IV sebesar Rp737.718.530,00.
- b) Transaksi penambahan dari Pencatatan Pembatalan yang Mau Dihapuskan sebesar Rp1.138.254.684,00 yang terdapat pada IPDN Kampus Kalbar;
- c) Transaksi pengurangan dari Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan dari Penggunaan Aktif sebesar Rp613.674.814,00 yang terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp275.254.314,00, Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp9.775.000,00, Balai Besar PMD Malang sebesar Rp37.603.000,00, Ditjen Bina Bangda sebesar Rp241.592.500,00, dan Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri IV sebesar Rp49.450.000,00;
- d) Transaksi pengurangan dari Penghapusan sebesar Rp10.165.000,00 yang terdapat pada Ditjen Bina Pemdes berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.3.4-2479 Tahun 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara

Karena Sebab-Sebab Lain Berupa Peralatan dan Mesin Hasil Kegiatan Urusan Bersama pada Ditjen Bina Pemdes;

- e) Transaksi pengurangan dari Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan sebesar Rp32.196.334.660,00 terdapat pada:
- Setjen Pusat sebesar Rp1.179.224.500,00;
 - IPDN Jatinangor sebesar Rp18.881.255.128,00;
 - IPDN Kampus Sulut sebesar Rp673.000.000,00;
 - IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp1.138.254.684,00;
 - Itjen Pusat sebesar Rp658.242.017,00;
 - Ditjen Polpum sebesar Rp51.268.234,00;
 - Ditjen BAK sebesar Rp118.895.000,00;
 - Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp20.065.000,00;
 - Ditjen Bina Bangda sebesar Rp175.859.654,00;
 - Ditjen Otda sebesar Rp7.834.805.915,00; dan
 - Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri IV sebesar Rp1.465.464.528,00.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp981.997.570.090,00

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp981.997.570.090,00 dan Rp875.727.657.235,00.

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya tersaji pada tabel 93.

Tabel 93

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	703.634.528.415	(633.601.535.937)	Rp 70.032.992.478
2	Lisensi	93.796.633.828	(16.309.512.607)	Rp 77.487.121.221
3	Hasil Kajian/Penelitian	2.271.764.600	-	Rp 2.271.764.600
4	ATB Lainnya	2.283.518.750	-	Rp 2.283.518.750
	Jumlah	Rp 801.986.445.593	Rp (649.911.048.544)	Rp 152.075.397.049
B	Aset Lain-lain			
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	182.452.165.714	(178.776.653.121)	Rp 3.675.512.593
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	156.833.519.275	(153.309.868.425)	Rp 3.523.650.850
	Jumlah	Rp 339.285.684.989	Rp (332.086.521.546)	Rp 7.199.163.443
	Total	Rp 1.141.272.130.582	Rp (981.997.570.090)	Rp 159.274.560.492

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per Satker disajikan pada **Lampiran XXII**.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp224.035.968.924,00

C.23 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp224.035.968.924,00 dan Rp401.816.267.044,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp224.035.968.924,00 terdiri dari:

- a) Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp30.830.786.970,00;
- b) Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp522.146.747,00;
- c) Utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp192.683.035.207,00 yang terdiri dari:
 - i. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp14.722.146,00 berasal dari Belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum dibayarkan kepada penerima hak sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada IPDN Jatinangor;
 - ii. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp12.322.700,00 berasal dari Belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum dibayarkan kepada penerima hak sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan telah diserahkan kepada penerima hak pada Tahun 2026 pada Ditjen Bina Adwil;
 - iii. Sisa saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp60,00 atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan mekanisme LS Bendahara yang terdapat pada Satker Bappeda Provinsi Papua;
 - iv. Sisa saldo pada rekening bendahara pengeluaran sebesar Rp10.000,00 yang merupakan kas yang diterima oleh bendahara pengeluaran atas uji coba *Cash Management System* (CMS);
 - v. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada Rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp11.342.378,00 atas realisasi belanja perjalanan dinas yang belum dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas sampai dengan 31 Desember 2025 pada Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri IV; dan
 - vi. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp192.644.637.923,00 merupakan kewajiban atas belanja yang dibayarkan dengan mekanisme RPATA yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum diserahkan kepada

pelaksana pekerjaan dan masih berada di dalam rekening penampungan.

Perbandingan rincian Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 94

Daftar Perbandingan Utang Pihak Ketiga per Unit Eselon I

No	ESELON I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	23.299.965.274	108.920.181.383	(85.620.216.109)
2	Itjen	1.893.034.684	1.425.437.942	467.596.742
3	Ditjen Polpum	1.503.900.890	1.319.946.454	183.954.436
4	Ditjen Bina Adwil	1.450.886.359	2.416.223.984	(965.337.625)
5	Ditjen Pemdes	3.779.492.845	32.223.490.651	(28.443.997.806)
6	Ditjen Bangda	26.070.410.022	20.618.132.350	5.452.277.672
7	Ditjen Otda	1.861.409.493	1.027.236.045	834.173.448
8	Ditjen Dukcapil	154.527.714.414	229.453.569.230	(74.925.854.816)
9	Ditjen Keuda	1.790.040.312	990.015.346	800.024.966
10	BSKDN	-	157.167.582	(157.167.582)
11	BPSDM	7.859.114.631	3.264.866.077	4.594.248.554
Jumlah		224.035.968.924	401.816.267.044	(177.780.298.120)

Rekapitulasi Utang Kepada Pihak Ketiga terdapat pada **Lampiran XXVI**.

C.24 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Di
Muka
Rp335.485.577.077,00

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp335.485.577.077,00 dan Rp160.307.263.241,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan PNPB yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Perbandingan rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Unit Eselon I tersaji pada tabel 95.

Tabel 95

Pendapatan Diterima di Muka

NO	ESELON I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	6.454.964.676	7.717.137.930	(1.262.173.254)
2	Itjen	23.909.667	2.652.944	21.256.723
3	Ditjen Bina Pemdes	-	28.817.528	(28.817.528)
4	Ditjen Bina Bangda	311.963.334	292.330.000	19.633.334
5	Ditjen Dukcapil	327.829.555.000	151.974.364.000	175.855.191.000
6	BPSDM	865.184.400	291.960.839	573.223.561
Jumlah		335.485.577.077	160.307.263.241	175.178.313.836

Rincian Pendapatan Diterima di Muka per Satker terdapat pada **Lampiran XXVII**.

Ditjen Dukcapil memiliki jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri. Pengguna jasa layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali Instansi Pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Koperasi, dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sesuai Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 yang telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, untuk dapat menggunakan jasa layanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, Pengguna layanan wajib memiliki hak akses. Hak akses merupakan hak yang diberikan kepada Pengguna untuk dapat mengakses basis data kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan. Hak Akses tersebut diberikan kepada Pengguna setelah terdapat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pengguna layanan dengan Ditjen Dukcapil, implementasi petunjuk teknis (juknis) oleh Pengguna, dan pelaksanaan proof of concept oleh Ditjen Dukcapil. Setelah diberikan hak akses, Pengguna layanan dapat melaksanakan pemanfaatan data kependudukan melalui akses aplikasi yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil memperhatikan ketentuan dan jangka waktu berlaku pada PKS serta juknis yang telah disepakati.

Pendapatan Diterima di Muka pada Ditjen Dukcapil sebesar Rp327.829.555.000,00 merupakan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi yang berasal dari voucher jasa layanan kependudukan yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2025. Namun diantaranya terdapat sisa voucher senilai Rp34.045.664.000,00 pada pengguna layanan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah berakhir masa berlakunya.

Dengan mempertimbangkan terpenuhinya aspek pelayanan kepada masyarakat, Kepmen No. 900.1/3.2-5299 Dukcapil Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengelolaan PNBP dalam Pelayanan Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan lingkup Ditjen Dukcapil belum dilaksanakan secara penuh, baik terhadap PKS yang telah maupun yang belum diajukan untuk perpanjangan. Dengan demikian sisa Voucher yang tidak didukung PKS aktif masih dapat digunakan.

Uang Muka dari KPPN
Rp777.785,00

C.25 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp777.785,00 dan Rp112.599.303,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang Jangka Pendek
Lainnya
Rp397.356.643,00

C.26 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp397.356.643,00 dan Rp7.719.409,00. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan pungutan pajak Tahun 2025 yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum disetorkan ke kas negara.

Tabel 96

Utang Jangka Pendek Lainnya

NO	ESELON I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	-	6.712.500	(6.712.500)
2	Ditjen Bina Adwil	397.356.643	1.006.909	396.349.734
Jumlah		397.356.643	7.719.409	389.637.234

Ekuitas
Rp16.926.155.644.156,00

C.27 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp16.926.155.644.156,00 dan Rp16.905.781.871.164,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp1.007.665.353.221

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.007.665.353.221,00 dan Rp922.205.703.793,00. Pendapatan-LO terdiri dari pendapatan yang diperoleh dari PNBP fungsional antara lain pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan pada Ditjen Dukcapil, penyelenggaraan pendidikan pascasarjana IPDN dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta PNBP umum yang berasal dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 97

Perbandingan Rincian PNBP Tahun 2025 dengan Tahun 2024

KODE AKUN	URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/TURUN (%)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.496.210.956	4.133.995.861	8,76
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	188.828.705	271.988.700	(30,57)
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	64.272.000	46.796.500	37,34
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	248.000.000	182.500.000	35,89
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	16.447.015.628	15.473.847.612	6,29
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian	1.124.000.000	-	100,00
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	368.969.000	454.942.900	(18,90)
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	59.806.240.000	58.681.374.000	1,92
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	4.889.212.000	11.219.224.000	(56,42)
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	919.211.899.000	831.384.646.000	10,56
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	130.000	203.832	(36,22)
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	798.234.027	292.285.431	173,10
425839	Pendapatan Denda Lainnya	500.000	5.437.000	(90,80)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	21.841.905	58.461.957	(62,64)
JUMLAH		1.007.665.353.221	922.205.703.793	9,27

Jumlah Pendapatan-LO dari kegiatan operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp1.007.665.353.221,00 sedangkan realisasi Pendapatan-LRA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp1.229.296.647.039,00 diantaranya sebesar Rp1.183.294.445.442,00 berasal dari kegiatan operasional. Dengan demikian terdapat perbedaan penyajian Pendapatan-LO Penerimaan Negara Bukan Pajak (basis akrual) dengan Pendapatan-LRA Penerimaan Negara Bukan Pajak (basis kas) sebesar Rp175.629.092.221,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 98
Selisih PNBP antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.837.278.420	4.496.210.956	(341.067.464)
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	188.828.705	188.828.705	-
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	64.272.000	64.272.000	-
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	248.750.000	248.000.000	(750.000)
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	15.658.456.000	16.447.015.628	788.559.628
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian	1.124.000.000	1.124.000.000	-
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	375.969.000	368.969.000	(7.000.000)
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	59.806.240.000	59.806.240.000	-
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	4.889.212.000	4.889.212.000	-
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	1.095.067.090.000	919.211.899.000	(175.855.191.000)
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	130.000	130.000
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.011.980.429	798.234.027	(213.746.402)
425839	Pendapatan Denda Lainnya	500.000	500.000	-
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	21.868.888	21.841.905	(26.983)
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		1.183.294.445.442	1.007.665.353.221	(175.629.092.221)

Penjelasan perbedaan pencatatan realisasi PNBP menurut basis kas dan basis akrual sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berbeda sebesar Rp341.067.464,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:

- a. Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Tahun 2024 atas bagian Tahun 2025 sebesar Rp2.573.649.369,00;
 - b. Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2025 sebesar Rp57.335.000,00; dan
 - c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2024 atas pengakuan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka sebesar Rp2.857.381.833,00.
2. Pelunasan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2024 sebesar Rp750.000,00.
 3. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Biaya Pendidikan berbeda sebesar Rp788.559.628,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:
 - a. Pelunasan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Biaya Pendidikan yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2024 sebesar Rp169.350.000,00; dan
 - b. Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka Tahun 2024 atas bagian tahun 2025 sebesar Rp957.909.628,00.
 4. Pelunasan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Pendidikan Lainnya yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2024 sebesar Rp7.000.000,00.
 5. Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi atas Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka sebesar Rp175.855.191.000,00.
 6. Pengakuan Pendapatan-LO atas sisa kas lainnya di rekening Bendahara Pengeluaran dari pendapatan penutupan rekening Program UNICEF Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp130.000,00.
 7. Pelunasan Pendapatan-LO dari penerimaan Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya atas penyelesaian pekerjaan pemerintah atas hibah langsung dari UAE tahun 2024 sebesar Rp213.746.402,00.
 8. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Anggaran Lain-lain berbeda sebesar Rp26.983,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:

- a. Jurnal Koreksi atas pencatatan sisa kas di rekening pada satker dekonsentrasi per 31 Desember 2025 berdasarkan hasil pengujian data rekening pada Aplikasi SPRINT sebesar Rp25.984,00; dan
- b. Sisa Kas Lainnya di Rekening Bendahara yang berasal dari Pembulatan atas pencairan yang tidak dapat ditarik, telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 23 April 2025 sebesar Rp999,00.

Pendapatan-LO dari kegiatan operasional pada Ditjen Dukcapil sebesar Rp919.211.899.000,00 merupakan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi yang berasal dari voucher jasa layanan kependudukan yang digunakan sampai dengan 31 Desember 2025. Namun diantaranya terdapat penggunaan voucher senilai Rp51.470.698.000,00 pada pengguna layanan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah berakhir masa berlakunya.

Dengan mempertimbangkan terpenuhinya aspek pelayanan kepada masyarakat, Kepmen No 900.1/3.2-5299 Dukcapil Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengelolaan PNB dalam Pelayanan Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan lingkup Ditjen Dukcapil belum dilaksanakan secara penuh, baik terhadap PKS yang telah maupun yang belum diajukan untuk perpanjangan. Dengan demikian sisa voucher yang tidak didukung PKS aktif masih dapat digunakan.

Beban Pegawai
Rp891.273.211.005

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp891.273.211.005,00 dan Rp864.086.036.643,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 99
Perbandingan Beban Pegawai Tahun 2025 dengan Tahun 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Gaji Pokok PNS	267.487.327.576	315.893.809.747	(15,32)
Beban Pembulatan Gaji PNS	3.585.080	4.623.853	(22,47)
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	15.727.383.237	15.950.645.354	(1,40)
Beban Tunjangan Anak PNS	4.163.444.521	4.309.855.155	(3,40)
Beban Tunjangan Struktural PNS	9.145.931.450	9.350.256.290	(2,19)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	24.141.986.171	22.058.276.800	9,45
Beban Tunjangan PPh PNS	3.160.174.944	3.211.056.808	(1,58)
Beban Tunjangan Beras PNS	11.563.941.110	13.167.006.090	(12,17)
Beban Uang Makan PNS	35.916.440.150	30.290.885.350	18,57
Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	70.275.000	57.050.000	23,18
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	254.690.000	208.660.000	22,06
Beban Tunjangan Umum PNS	6.592.546.883	10.715.482.540	(38,48)
Beban Tunjangan Profesi Dosen	10.211.776.300	8.943.487.983	14,18
Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	2.447.746.800	2.299.358.200	6,45
Beban Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/Polri	77.200.000	72.400.000	6,63
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	2.493.260.000	2.399.008.376	3,93
Beban Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti	-	348.272.400	(100,00)
Beban Gaji Pokok PPPK	24.720.604.500	1.830.121.500	1.250,76
Beban Pembulatan Gaji PPPK	411.851	29.664	1.288,39
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.512.330.446	78.805.870	1.819,06
Beban Tunjangan Anak PPPK	435.507.062	20.053.688	2.071,71
Beban Tunjangan Struktural PPPK	68.125.000	21.875.000	211,43
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	705.409.000	255.056.000	176,57
Beban Tunjangan Beras PPPK	1.499.075.895	81.834.600	1.731,84
Beban Uang Makan PPPK	5.268.402.850	326.798.600	1.512,13
Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	16.600.000	875.000	1.797,14
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	54.150.000	2.975.000	1.720,17
Belanja Tunjangan Umum PPPK	1.216.280.000	-	100,00
Beban Uang Lembur	12.269.222.700	15.924.009.960	(22,95)
Beban Uang Lembur PPPK	1.437.659.500	17.781.000	7.985,37
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	418.197.298.157	403.597.926.913	3,62
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	30.414.424.822	2.647.758.902	1.048,69
TOTAL	891.273.211.005	864.086.036.643	3,15

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp891.273.211.005,00, sedangkan realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp880.577.494.695,00, sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban Pegawai (basis akrual) dengan Belanja Pegawai (basis kas) sebesar Rp10.695.716.310,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 100
Selisih Beban Pegawai antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	267.624.663.436	267.487.327.576	(137.335.860)
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	3.583.523	3.585.080	1.557
511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	15.734.568.817	15.727.383.237	(7.185.580)
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	4.165.566.217	4.163.444.521	(2.121.696)
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	9.164.051.950	9.145.931.450	(18.120.500)
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	24.145.374.171	24.141.986.171	(3.388.000)
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	3.166.536.169	3.160.174.944	(6.361.225)
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	11.567.851.790	11.563.941.110	(3.910.680)
511129	Beban Uang Makan PNS	36.000.106.000	35.916.440.150	(83.665.850)
511135	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	70.275.000	70.275.000	-
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	254.690.000	254.690.000	-
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	6.611.656.883	6.592.546.883	(19.110.000)
511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	10.184.029.100	10.211.776.300	27.747.200
511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	2.447.746.800	2.447.746.800	-
511194	Beban Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/Polri	77.200.000	77.200.000	-
511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	2.493.260.000	2.493.260.000	-
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	24.945.942.513	24.720.604.500	(225.338.013)
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	411.861	411.851	(10)
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.549.776.696	1.512.330.446	(37.446.250)
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	435.507.062	435.507.062	-
511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	72.500.000	68.125.000	(4.375.000)
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	707.395.930	705.409.000	(1.986.930)
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	1.499.220.735	1.499.075.895	(144.840)
511628	Beban Uang Makan PPPK	4.648.472.000	5.268.402.850	619.930.850
511631	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	16.600.000	16.600.000	-
511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	54.150.000	54.150.000	-
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	1.279.370.000	1.216.280.000	(63.090.000)
512211	Beban Uang Lembur	12.382.997.550	12.269.222.700	(113.774.850)
512212	Beban Uang Lembur PPPK	1.419.880.000	1.437.659.500	17.779.500
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	411.443.056.153	418.197.298.157	6.754.242.004
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	26.411.054.339	30.414.424.822	4.003.370.483
BEBAN PEGAWAI		880.577.494.695	891.273.211.005	10.695.716.310

Perbedaan pencatatan beban pegawai menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Gaji Pokok PNS berbeda sebesar Rp137.335.860,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
 - a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp157.041.200,00 yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp154.041.200,00; dan
 - 2) Koreksi antar beban dari Beban Gaji Pokok PNS menjadi Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp3.000.000,00.
 - b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 sebesar Rp19.705.340,00.
2. Beban-LO untuk akun Beban Pembulatan Gaji PNS berbeda sebesar Rp1.557,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
 - a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp2.852,00; dan
 - b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 sebesar Rp4.409,00.
3. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Suami/Istri PNS berbeda sebesar Rp7.185.580,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
 - a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp7.900.210,00 yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.900.210,00; dan
 - 2) Koreksi antar beban dari Beban Tunj.Suami/Istri PNS menjadi Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp6.000.000,00.
 - b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 sebesar Rp714.630,00.
4. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Anak PNS berbeda sebesar Rp2.121.696,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
 - a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp2.356.030,00 yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp356.030,00; dan
- 2) Koreksi antar beban dari Beban Tunj. Anak PNS menjadi Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp2.000.000,00.
- b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 sebesar Rp234.334,00.
5. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Struktural PNS berbeda sebesar Rp18.120.500,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
 - a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp18.660.500,00 yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp10.660.500,00; dan
 - 2) Koreksi antar beban dari Beban Tunj. Struktural PNS menjadi Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp8.000.000,00.
 - b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 sebesar Rp540.000,00.
6. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Fungsional PNS berbeda sebesar Rp3.388.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
 - a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp29.925.000,00; dan
 - b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 sebesar Rp26.537.000,00.
7. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan PPh PNS berbeda sebesar Rp6.361.225,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
 - a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp7.296.608,00 yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.296.608,00; dan
 - 2) Koreksi antar beban dari Beban Tunjangan PPh PNS menjadi Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp6.000.000,00.

- b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 sebesar Rp935.383,00.
- 8. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Beras PNS berbeda sebesar Rp3.910.680,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
 - a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp3.983.100,00; dan
 - b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 sebesar Rp72.420,00.
- 9. Beban-LO untuk akun Beban Uang Makan PNS berbeda sebesar Rp83.665.850,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
 - a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp1.778.372.850,00 yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.725.372.850,00; dan
 - 2) Koreksi antar beban dari Beban Uang Makan PNS menjadi Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) sebesar Rp53.000.000,00.
 - b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 sebesar Rp1.694.707.000,00.
- 10. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Umum PNS berbeda sebesar Rp19.110.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
 - a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp19.125.000,00 yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp8.325.000,00; dan
 - 2) Koreksi antar beban dari Beban Tunjangan Umum PNS menjadi Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp10.800.000,00.
 - b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 sebesar Rp15.000,00.
- 11. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Profesi Dosen berbeda sebesar Rp27.747.200,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025.

12. Beban-LO untuk akun Beban Gaji Pokok PPPK berbeda sebesar Rp225.338.013,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
 - a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp4.462.500,00;
 - b. Koreksi antar beban dari Beban Gaji Pokok PPPK menjadi Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) sebesar Rp115.001.938,00; dan
 - c. Koreksi antar beban dari Beban Gaji Pokok PPPK menjadi Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp105.873.575,00.
13. Beban-LO untuk akun Beban Pembulatan Gaji PPPK berbeda sebesar Rp10,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025.
14. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK berbeda sebesar Rp37.446.250,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
 - a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp446.250,00; dan
 - b. Koreksi antar beban dari Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK menjadi Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp37.000.000,00.
15. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Struktural PPPK berbeda sebesar Rp4.375.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025.
16. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Fungsional PPPK berbeda sebesar Rp1.986.930,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat koreksi antar beban dari Beban Tunjangan Fungsional PPPK menjadi Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK.
17. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Beras PPPK berbeda sebesar Rp144.840,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025.
18. Beban-LO untuk akun Beban Uang Makan PPPK berbeda sebesar Rp619.930.850,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

- a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp18.057.600,00 yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp9.757.600,00; dan
 - 2) Koreksi antar beban dari Beban Uang Makan PPPK menjadi Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp8.300.000,00.
 - b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 sebesar Rp637.988.450,00.
19. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Umum PPPK berbeda sebesar Rp63.090.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat koreksi antar beban dari Beban Tunjangan Umum PPPK menjadi Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK.
20. Beban-LO untuk akun Beban Uang Lembur berbeda sebesar Rp113.774.850,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp161.202.000,00 yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp29.533.000,00; dan
 - 2) Koreksi antar beban dari Beban Uang Lembur menjadi Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) sebesar Rp131.669.000,00.
 - b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 sebesar Rp47.427.150,00.
21. Beban-LO untuk akun Beban Uang Lembur PPPK berbeda sebesar Rp17.779.500,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Koreksi antar beban dari Beban Uang Lembur PPPK menjadi Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp300.000,00; dan
 - b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 sebesar Rp18.079.500,00.
22. Beban-LO untuk akun Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) berbeda sebesar Rp6.754.242.004,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp18.168.923.514,00 yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp18.168.023.514,00; dan
 - 2) Koreksi antar beban dari Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) menjadi Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp900.000,00.
- b. Pengakuan Beban-LO sebesar Rp24.923.165.518,00 yang terdiri dari:
- 1) Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 sebesar Rp24.623.494.580,00; dan
 - 2) Koreksi antar beban dari Beban Uang Lembur, Beban Gaji Pokok PPPK, dan Beban Uang Makan PNS menjadi Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) sebesar Rp299.670.938,00.
23. Beban-LO untuk akun Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK berbeda sebesar Rp4.003.370.483,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp210.174.480,00.
 - b. Pengakuan Beban-LO sebesar Rp4.213.544.963,00 yang terdiri dari:
- 1) Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 sebesar Rp3.960.294.458,00.
 - 2) Koreksi antar beban dari Beban Uang Lembur PPPK, Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK, Beban Tunj. Suami/Istri PNS, Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja), Beban Tunjangan Umum PPPK, Beban Gaji Pokok PNS, Beban Tunj. Struktural PNS, Beban Tunjangan Umum PNS, Beban Tunj. Anak PNS, Beban Tunj. PPh PNS, Beban Tunjangan Fungsional PPPK, Beban Gaji Pokok PPPK, dan Beban Uang Makan PPPK menjadi Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp253.250.505,00.

Beban Persediaan
Rp16.551.402.319

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp16.551.402.319,00 dan Rp19.970.224.791,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Pemakaian/konsumsi atas persediaan dinilai menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini beban persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing persediaan yang terpakai. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 101
Perbandingan Beban Persediaan Tahun 2025 dengan Tahun 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Persediaan Konsumsi	14.329.974.520	17.694.547.822	(19,01)
Beban Persediaan Lainnya	2.221.427.799	2.275.676.969	(2,38)
TOTAL	16.551.402.319	19.970.224.791	(17,12)

Penjelasan hubungan mutasi kurang persediaan dengan beban persediaan sebagai berikut:

Tabel 102
**Penjelasan Hubungan Mutasi Kurang Persediaan dengan
Beban Persediaan Tahun 2025**

AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AWAL (Rp)	PEMBELIAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	PEMAKAIAN (Rp)	BEBAN PERSEDIAAN (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) + (d) - (e)	(g)	(h) = (f) - (g)
117111	Barang Konsumsi	3.616.888.027		3.505.124.319	111.763.708	14.329.974.520	(14.218.210.812)
117131	Bahan Baku	-		-	-	-	-
117199	Persediaan Lainnya	1.152.137.472		1.254.289.814	(102.152.342)	2.221.427.799	(2.323.580.141)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		15.636.990.944		15.636.990.944		15.636.990.944
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya		595.875.084		595.875.084		595.875.084
	JUMLAH	4.769.025.499	16.232.866.028	4.759.414.133	16.242.477.394	16.551.402.319	(308.924.925)

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 (saldo awal) sebesar Rp4.769.025.499,00 dan saldo Persediaan per 31 Desember 2025 (saldo akhir) sebesar Rp4.759.414.133,00. Selama Tahun Anggaran 2025 terdapat realisasi belanja barang persediaan sebesar Rp16.232.866.028,00 sehingga perhitungan pemakaian persediaan sebesar Rp16.242.477.394,00. Perbedaan sebesar Rp308.924.925,00 antara pemakaian persediaan sebesar Rp16.242.477.394,00 dengan Beban Persediaan sebesar Rp16.551.402.319,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 103
Penjelasan Selisih Mutasi Kurang Persediaan dengan Beban Persediaan

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526311) menjadi Persediaan	(44.899.500)
2	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523112) menjadi Persediaan	(1.764.008.901)
3	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523123) menjadi Persediaan	(213.035.847)
4	Belanja Persediaan menjadi Bahan untuk Pemeliharaan (117113)	1.387.444.246
5	Belanja Persediaan menjadi Suku Cadang (117114)	38.867.955
6	Jurnal Antar Beban	7.328.800
7	Reklasifikasi Keluar	83.762.596
8	Reklasifikasi Masuk	(26.052.696)
9	Usang	22.512.222
10	Reklasifikasi ke Aset	199.156.200
JUMLAH		(308.924.925)

Beban Barang Dan Jasa
Rp1.525.203.514.885

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.525.203.514.885,00 dan Rp2.478.607.689.361,00. Beban Barang dan Jasa merupakan konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 104
Perbandingan Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dengan Tahun 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Keperluan Perkantoran	168.474.243.052	174.031.249.117	(3,19)
Beban Pengadaan Bahan Makanan	39.884.566.839	42.864.902.905	(6,95)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1.697.550.593	2.292.124.238	(25,94)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	350.045.380	374.669.424	(6,57)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	9.844.532.000	11.816.135.250	(16,69)
Beban Barang Operasional Lainnya	55.834.606.157	64.341.047.141	(13,22)
Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	-	8.784.288.000	(100,00)
Beban Bahan	99.333.506.393	127.467.897.811	(22,07)
Beban Honor Output Kegiatan	9.651.193.000	18.352.382.750	(47,41)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	155.925.892.911	152.851.349.396	2,01
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	2.181.817.532	500.073.052	336,30
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomtabel	35.981.482	44.375.000	(18,91)
Beban Langganan Listrik	38.468.540.100	40.843.136.347	(5,81)
Beban Langganan Telepon	311.399.817	385.844.039	(19,29)
Beban Langganan Air	4.907.517.032	4.190.570.471	17,11
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	977.897.737	937.547.888	4,30
Beban Jasa Pos dan Giro	2.225.000	2.000.000	11,25
Beban Jasa Konsultan	222.922.287.983	248.891.368.043	(10,43)
Beban Sewa	109.716.612.654	107.122.387.382	2,42
Beban Jasa Profesi	32.672.896.028	46.101.374.279	(29,13)
Beban Jasa Lainnya	572.010.203.195	1.426.379.493.303	(59,90)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	33.473.525	(100,00)
TOTAL	1.525.203.514.885	2.478.607.689.361	(38,47)

Jumlah Beban Barang dan Jasa dalam kegiatan operasional secara normal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp1.525.203.514.885,00, sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan operasional secara normal sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.478.845.235.197,00. Dengan demikian terdapat perbedaan penyajian Beban Barang dan Jasa (basis akrual) dengan Belanja Barang dan Jasa (basis kas) untuk kegiatan operasional secara normal sebesar Rp46.358.279.688,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 105
Selisih Beban Barang dan Jasa antara Basis Kas dan Basis Akrua

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	168.461.217.622	168.474.243.052	13.025.430
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	39.884.566.839	39.884.566.839	-
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1.697.550.593	1.697.550.593	-
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	350.045.380	350.045.380	-
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	9.844.532.000	9.844.532.000	-
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	55.838.265.357	55.834.606.157	(3.659.200)
521211	Beban Bahan	99.333.506.393	99.333.506.393	-
521213	Beban Honor Output Kegiatan	9.651.193.000	9.651.193.000	-
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	155.925.892.911	155.925.892.911	-
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	1.981.488.767	2.181.817.532	200.328.765
521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomtabel	35.981.482	35.981.482	-
522111	Beban Langganan Listrik	38.955.610.496	38.468.540.100	(487.070.396)
522112	Beban Langganan Telepon	312.731.890	311.399.817	(1.332.073)
522113	Beban Langganan Air	4.891.932.384	4.907.517.032	15.584.648
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	980.625.907	977.897.737	(2.728.170)
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	2.225.000	2.225.000	-
522131	Beban Jasa Konsultan	223.510.283.465	222.922.287.983	(587.995.482)
522141	Beban Sewa	109.707.890.654	109.716.612.654	8.722.000
522151	Beban Jasa Profesi	32.672.896.028	32.672.896.028	-
522191	Beban Jasa Lainnya	524.806.799.029	572.010.203.195	47.203.404.166
BEBAN BARANG DAN JASA		1.478.845.235.197	1.525.203.514.885	46.358.279.688

Perbedaan pencatatan beban barang dan jasa dalam kegiatan operasional secara normal menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Keperluan Perkantoran berbeda sebesar Rp13.025.430,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
 - a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp24.420.000,00; dan
 - b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 sebesar Rp37.445.430,00.
2. Beban-LO untuk akun Beban Barang Operasional Lainnya berbeda sebesar Rp3.659.200,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

- a. Koreksi SPM akibat kesalahan penggunaan akun belanja sebesar Rp900.00,00;
 - b. Koreksi *audited* antar beban dalam rangka penginputan kekurangan pencatatan barang ekstrakomptabel sebesar Rp1.859.200,00; dan
 - c. Koreksi *audited* antar beban dalam rangka koreksi kesalahan pencatatan biaya ongkos kirim barang ekstrakomptabel yang semula dicatat sebagai Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar Rp900.000,00.
3. Beban-LO untuk akun Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel berbeda sebesar Rp200.328.765,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp16.519.275,00 disebabkan karena terdapat Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel yang menjadi Bahan untuk Pemeliharaan (kode akun 117113).
 - b. Pengakuan Beban-LO sebesar Rp216.848.040,00 yang terdiri dari:
 - 1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (kode akun 532111) sebesar Rp204.835.140,00;
 - 2) Penambahan Aset Ekstrakomptabel dari Hibah Masuk sebesar Rp6.500.000,00;
 - 3) Koreksi *audited* untuk mencatat aset tetap yang tidak memenuhi kriteria nilai kapitalisasi sehingga dicatat sebagai aset ekstrakomptabel sebesar Rp1.853.700,00;
 - 4) Koreksi *audited* dalam rangka penginputan kekurangan pencatatan barang ekstrakomptabel dari belanja barang operasional lainnya sebesar Rp1.859.200,00;
 - 5) Koreksi *audited* dalam rangka koreksi kesalahan pencatatan biaya ongkos kirim barang ekstrakomptabel yang semula dicatat sebagai persediaan bahan untuk pemeliharaan yang sudah keluar dari neraca, seharusnya dicatat sebagai penambahan nilai ekstrakomptabel sebesar Rp900.000,00; dan
 - 6) Koreksi *audited* dalam rangka koreksi kesalahan pencatatan biaya ongkos kirim barang ekstrakomptabel yang semula dicatat sebagai belanja barang operasional lainnya sebesar Rp900.000,00.

4. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Listrik berbeda sebesar Rp487.070.396,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
 - a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.204.406.190,00; dan
 - b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 sebesar Rp717.335.794,00.
5. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Telepon berbeda sebesar Rp1.332.073,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
 - a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp3.254.989,00.
 - b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 sebesar Rp1.922.916,00.
6. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Air berbeda sebesar Rp15.584.648,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
 - a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.423.846,00; dan
 - b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 sebesar Rp17.008.494,00.
7. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya berbeda sebesar Rp2.728.170,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025.
8. Beban-LO untuk akun Beban Jasa Konsultan berbeda sebesar Rp587.995.482,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
 - a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp609.781.137,00 yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp374.997.565,00;
 - 2) Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp219.283.572,00; dan
 - 3) Penihilan RPATA karena adanya perbedaan nilai SPM RPATA Penampungan dengan nilai realisasi kontrak pada SPM RPATA Pembayaran sebesar Rp15.500.000,00.

- b. Pengakuan Beban-LO dari Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp21.785.655,00.
9. Beban-LO untuk akun Beban Sewa berbeda sebesar Rp8.722.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat pengakuan Beban-LO dari Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025.
10. Beban-LO untuk akun Beban Jasa Lainnya berbeda sebesar Rp47.203.404.166,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
 - a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp4.904.186.246,00 yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025 sebesar Rp4.160.680,00;
 - 2) Jurnal koreksi Beban Jasa Lainnya atas Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dalam rangka kapitalisasi aset sebesar Rp66.549.200,00;
 - 3) Penihilan RPATA karena adanya perbedaan nilai SPM RPATA Penampungan dengan nilai realisasi kontrak pada SPM RPATA Pembayaran sebesar Rp41.021.416,00;
 - 4) Belanja Jasa Lainnya menjadi Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat (kode akun 117127) sebesar Rp3.000.000.000,00;
 - 5) Pekerjaan yang dibayarkan menggunakan mekanisme RPATA sebesar Rp2.855.475.500,00 yang sampai dengan akhir tahun pekerjaannya terselesaikan sebagian sebesar Rp2.141.606.625,00 sehingga menyebabkan selisih sebesar Rp713.868.875,00; dan
 - 6) Koreksi *audited* atas pengakuan Belanja Barang Yang Dibayar di Muka (*prepaid*) sebesar Rp1.078.586.075,00.
 - b. Pengakuan Beban-LO sebesar Rp52.107.590.412,00 yang terdiri dari:
 - 1) Pengakuan Beban-LO dari Belanja barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 sebesar Rp56.640.706,00;
 - 2) Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp47.581.876.835,00; dan
 - 3) Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp4.469.072.871,00.

Penjelasan hubungan mutasi aset ekstrakomtabel periode berjalan dengan beban aset ekstrakomtabel sebagai berikut:

Tabel 106
Penyajian Beban Aset Ekstrakomtabel

AKUN BEBAN			MUTASI ASET EKSTRAKOMTABEL PADA LBMN					PERBEDAAN ANTARA BEBAN DENGAN MUTASI ASET EKSTRAKOMTABEL (Rp)
BERAN PERALATAN DAN MESIN - EKSTRAKOMTABEL (52125) (Rp)	BERAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN (55112) (Rp)	BERAN GEDUNG DAN BANGUNAN - EKSTRAKOMTABEL (52125) (Rp)	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG		MUTASI NETTO EKSTRAKOMTABEL PADA LBMN (Rp)	
			URAIAN TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (Rp)	URAIAN TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (Rp)		
2.169.804.632	-	35.981.482	Pembelian	2.205.786.114			2.205.786.114	
6.500.000			Hibah Masuk	6.500.000			6.500.000	
1.853.700			Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	1.853.700			1.853.700	
2.159.200			Perolehan Lainnya	2.159.200			2.159.200	
1.500.000			Koreksi Susulan	1.500.000			1.500.000	
2.181.817.532	-	35.981.482		2.217.799.014		-	2.217.799.014	

Mutasi tambah dan mutasi kurang aset ekstrakomtabel sampai dengan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp2.217.799.014,00 dan Rp0,00 sehingga perhitungan mutasi neto aset ekstrakomtabel sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.217.799.014,00. Beban aset ekstrakomtabel untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 terdiri dari Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel sebesar Rp2.181.817.532,00, Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,00 dan Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomtabel sebesar Rp35.981.482,00. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan antara mutasi aset ekstrakomtabel dengan beban aset ekstrakomtabel.

*Beban Pemeliharaan
Rp141.900.113.486*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp141.900.113.486,00 dan Rp132.764.844.357,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 107
Perbandingan Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dengan Tahun 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	90.603.706.299	79.612.100.618	13,81
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4.444.370.345	5.119.706.116	(13,19)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.353.417.113	38.348.376.632	(5,20)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.000.000	15.000.000	(6,67)
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	197.000.000	(100,00)
Beban Pemeliharaan Jaringan	4.931.902.288	4.508.116.163	9,40
Beban Pemeliharaan Lainnya	2.229.658.824	1.051.341.948	112,08
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	2.717.798.446	3.361.353.173	(19,15)
Beban Persediaan Suku Cadang	605.260.171	551.849.707	9,68
TOTAL	141.900.113.486	132.764.844.357	6,88

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp141.900.113.486,00, sedangkan realisasi Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp142.641.372.701,00 sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban Pemeliharaan (basis akrual) dengan Belanja Pemeliharaan (basis kas) sebesar Rp741.259.215,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 108
Selisih Beban Pemeliharaan antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	90.907.972.331	90.603.706.299	(304.266.032)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.328.878.354	-	(2.328.878.354)
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4.444.370.345	4.444.370.345	-
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.307.192.642	36.353.417.113	46.224.471
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.477.397.917	-	(1.477.397.917)
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.000.000	14.000.000	-
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	4.931.902.288	4.931.902.288	-
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	2.229.658.824	2.229.658.824	-
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	2.717.798.446	2.717.798.446
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	-	605.260.171	605.260.171
BEBAN PEMELIHARAAN		142.641.372.701	141.900.113.486	(741.259.215)

Perbedaan pencatatan Beban Pemeliharaan menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berbeda sebesar Rp304.266.032,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
 - a. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi atas pemeliharaan gedung dan bangunan yang dikapitalisasi menambah nilai gedung dan bangunan sebesar Rp196.786.000,00;
 - b. Pencatatan Aset Bangunan yang berasal dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang memenuhi Nilai Kapitalisasi sebesar Rp69.655.000,00; dan
 - c. Koreksi *audited* pengakuan piutang lainnya atas pengembalian Belanja Pemeliharaan lewat tahun yang disetorkan ke kas negara pada Tahun 2026 sebesar Rp37.825.032,00.

2. Beban-LO untuk akun Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berbeda sebesar Rp46.224.471,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

- a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp10.983.450,00 yang terdiri dari:
 - 1) Belanja barang yang menjadi Aset sebesar Rp3.330.000,00; dan
 - 2) Koreksi SPM akibat kesalahan penggunaan akun belanja sebesar Rp7.653.450,00.
- b. Pengakuan Beban-LO sebesar Rp57.207.921,00 yang terdiri dari:
 - 1) Pengakuan Beban-LO atas Belanja Barang yang Dibayar Di muka (*prepaid*) Tahun 2025 sebesar Rp49.007.100,00;
 - 2) Belanja modal yang menjadi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp547.371,00; dan
 - 3) Koreksi *audited* dalam rangka tindak lanjut Koreksi SPM Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin yang semula dicatat sebagai Peralatan dan Mesin, dikoreksi menjadi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin karena tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar Rp7.653.450,00.

Penjelasan Perbedaan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.328.878.354,00, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.477.397.917,00, Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp2.717.798.446,00 dan Beban Persediaan Suku Cadang sebesar Rp605.260.171,00 secara lebih rinci digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 109

Penyajian Beban Pemeliharaan

AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AWAL (Rp)	PEMBELIAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	PEMAKAIAN (Rp)	BEBAN PEMELIHARAAN (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) + (d) - (e)	(g)	(h) = (f) - (g)
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	625.989.968	-	619.739.631	6.250.337	2.717.798.446	(2.711.548.109)
117114	Suku Cadang	83.808.068	-	81.679.487	2.128.581	605.260.171	(603.131.590)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		2.328.878.354		2.328.878.354		2.328.878.354
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		1.477.397.917		1.477.397.917		1.477.397.917
	JUMLAH	709.798.036	3.806.276.271	701.419.118	3.814.655.189	3.323.058.617	491.596.572

Saldo Persediaan Barang Pemeliharaan per 31 Desember 2024 (saldo awal) sebesar Rp709.798.036,00 dan saldo Persediaan Barang Pemeliharaan per 31 Desember 2025 (saldo akhir) sebesar Rp701.419.118,00. Selama Tahun Anggaran 2025 terdapat realisasi Belanja Barang Pemeliharaan sebesar Rp3.806.276.271,00 sehingga perhitungan pemakaian persediaan barang pemeliharaan sebesar Rp3.814.655.189,00. Perbedaan sebesar Rp491.596.572,00 antara pemakaian persediaan barang pemeliharaan sebesar Rp3.814.655.189,00 dengan Beban Pemeliharaan dari pemakaian persediaan sebesar Rp3.323.058.617,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 110

Penjelasan Selisih Pemakaian Persediaan dengan Beban Pemeliharaan

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	Beban Persediaan Bahan Baku (593131) menjadi Beban Persediaan Pemeliharaan	(3.632.500)
2	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) menjadi Persediaan Pemeliharaan	(1.426.312.201)
3	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (521252) menjadi Persediaan Pemeliharaan	(17.419.275)
4	Belanja Pemeliharaan menjadi Bahan Baku (117131)	27.604.000
5	Belanja Pemeliharaan menjadi Persediaan Barang Konsumsi (117111)	1.924.578.813
6	Belanja Pemeliharaan menjadi Persediaan Lainnya (117199)	24.611.935
7	Jurnal Antar Beban	(3.696.300)
8	Reklasifikasi Keluar	150.000
9	Reklasifikasi Masuk	(35.187.900)
10	Koreksi <i>Audited</i> Antar Beban dalam Rangka Koreksi Kesalahan Pencatatan Biaya Ongkos Kirim Barang Ekstrakomptabel	900.000
JUMLAH		491.596.572

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp261.160.085.157*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp261.160.085.157,00 dan Rp581.369.053.204,00. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk kegiatan operasional secara normal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 111
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dengan Tahun 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	204.219.192.916	358.225.906.045	(42,99)
Beban Perjalanan Dinas Tetap	979.294.610	2.367.306.425	(58,63)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.542.243.268	10.019.601.561	(24,73)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23.095.895.407	124.060.018.333	(81,38)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20.995.536.898	73.498.824.116	(71,43)
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	4.049.202.946	13.197.396.724	(69,32)
Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	278.719.112	-	100,00
TOTAL	261.160.085.157	581.369.053.204	(55,08)

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp261.160.085.157,00, sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp261.250.334.157,00, sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban Perjalanan Dinas (basis akrual) dengan Belanja Perjalanan Dinas (basis kas) sebesar Rp90.249.000,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 112
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	204.309.441.916	204.219.192.916	(90.249.000)
524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap	979.294.610	979.294.610	-
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.542.243.268	7.542.243.268	-
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23.095.895.407	23.095.895.407	-
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20.995.536.898	20.995.536.898	-
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	4.049.202.946	4.049.202.946	-
524219	Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	278.719.112	278.719.112	-
BEBAN PERJALANAN DINAS		261.250.334.157	261.160.085.157	(90.249.000)

Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Biasa berbeda sebesar Rp90.249.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2025.

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp294.351.949.651

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp294.351.949.651,00 dan Rp341.841.028.210,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan Barang Milik Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah atau kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 113
Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Tahun 2025 dengan Tahun 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang	-	1.500.000.000	(100,00)
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	5.436.558.750	809.474.825	571,62
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	1.815.504.677	3.965.713.605	(54,22)
Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada masyarakat	274.817.795	1.644.057.061	(83,28)
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat	19.530.942.523	34.174.108.918	(42,85)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	267.294.125.906	299.747.673.801	(10,83)
TOTAL	294.351.949.651	341.841.028.210	(13,89)

Penjelasan hubungan mutasi kurang Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat dengan beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 114
Penyajian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AWAL (Rp)	PEMBELIAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	PENYERAHAN (Rp)	BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN		SELISIH (Rp)
						AKUN	SALDO (Rp)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) + (d) - (e)	(g)	(h)	(i) = (f) - (h)
117122	Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	21.391.184.913		16.151.172.954	5.240.011.959	593122	5.436.558.750	(196.546.791)
117124	Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	33.349.858.276		54.136.639.215	(20.786.780.939)	593124	1.815.504.677	(22.602.285.616)
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	28.860.434.489		28.585.616.694	274.817.795	593125	274.817.795	-
117126	Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat	71.066.062.000		135.560.257.780	(64.494.195.780)			(64.494.195.780)
117127	Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat	139.951.231.767		121.569.579.244	18.381.652.523	593127	19.530.942.523	(1.149.290.000)
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan Ke Masyarakat	2.521.084.896		8.196.420.722	(5.675.335.826)	593128	267.294.125.906	(272.969.461.732)
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat - Dalam Proses	36.251.577.100		1.599.201.550	34.652.375.550			34.652.375.550
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda		2.995.100.000		2.995.100.000			2.995.100.000
526113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda		196.546.791		196.546.791			196.546.791
526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda		1.531.531.200		1.531.531.200			1.531.531.200
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda		41.052.373.660		41.052.373.660			41.052.373.660
526123	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang		-		-			-
526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah		-		-	526123	-	-
526311	Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda		266.502.096.241		266.502.096.241			266.502.096.241
JUMLAH		333.391.433.441	312.277.647.892	365.798.888.159	279.870.193.174		294.351.949.651	(14.481.756.477)

Saldo Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat per 31 Desember 2024 (saldo awal) sebesar Rp333.391.433.441,00 dan saldo Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat per 31 Desember 2025 (saldo akhir) sebesar Rp365.798.888.159,00. Selama Tahun Anggaran 2025 terdapat realisasi Belanja Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat sebesar Rp312.277.647.892,00 sehingga perhitungan penyerahan Persediaan kepada Pemda/Masyarakat sebesar Rp279.870.193.174,00. Perbedaan sebesar Rp14.481.756.477,00 antara perhitungan penyerahan Persediaan kepada Pemda/Masyarakat sebesar Rp279.870.193.174,00 dengan Beban Persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp294.351.949.651,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 115
Penjelasan Selisih Mutasi Persediaan yang Diserahkan dengan Beban Barang
untuk Diserahkan kepada Masyarakat

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat menjadi Barang Konsumsi (117111)	44.899.500
2	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat menjadi Peralatan dan Mesin (132111)	45.000.000
3	Belanja Jasa Lainnya (522191) menjadi Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	(3.000.000.000)
4	Hibah (Masuk)	(27.120.173.607)
5	Keluar Lainnya	857.981.630
6	Keluar Lainnya (Pengesahan Aset Hibah Langsung Luar Negeri Program UEA Yang menjadi Utang Pada Ta 2024)	14.688.703.000
7	Reklasifikasi dari Aset	(45.000.000)
8	Reklasifikasi Masuk	(22.422.000)
9	Rusak	69.255.000
10	Transfer Keluar	636.480.000
11	Transfer Masuk	(636.480.000)
12	Jurnal Balik 526123 pada 114112 (Belanja Barang yang Dibayar Di Muka (Prepaid))	(250.000.000)
13	Koreksi Audited atas Jurnal Balik Pengakuan Beban Dibayar Dimuka TAYL	250.000.000
JUMLAH		(14.481.756.477)

Beban Penyusutan dan
 Amortisasi
 Rp463.076.985.107

D8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp463.076.985.107,00 dan Rp376.790.972.933,00. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 116
Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2025 dengan Tahun 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	324.471.497.742	238.046.638.986	36,31
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	79.742.066.394	78.937.462.402	1,02
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	4.687.669.187	5.745.471.970	(18,41)
Beban Penyusutan Irigasi	1.121.684.391	2.990.082.329	(62,49)
Beban Penyusutan Jaringan	4.687.390.622	5.286.172.985	(11,33)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	73.955.098	57.080.598	29,56
Beban Amortisasi Software	39.595.673.606	40.184.935.861	(1,47)
Beban Amortisasi Lisensi	8.267.094.366	5.191.574.347	59,24
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	11.215.000	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	429.953.701	340.338.455	26,33
TOTAL	463.076.985.107	376.790.972.933	22,90

Penjelasan hubungan penyusutan periode berjalan dengan beban penyusutan sebagai berikut:

Tabel 117
Penjelasan Hubungan Penyusutan Periode Berjalan
dengan Beban Penyusutan

AKUN	URAIAN AKUN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2025 (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2024 (Rp)	PENYUSUTAN PERIODE BERJALAN (Rp)	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2025 (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) - (d)	(f)	(g) = (e) - (f)
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.705.153.139.089	3.460.735.603.007	244.417.536.082	324.471.497.742	(80.053.961.660)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	641.689.526.713	565.839.009.912	75.850.516.801	79.742.066.394	(3.891.549.593)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	60.173.907.946	58.539.429.759	1.634.478.187	4.687.669.187	(3.053.191.000)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	32.384.637.603	31.555.216.171	829.421.432	1.121.684.391	(292.262.959)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	75.944.217.217	71.913.355.442	4.030.861.775	4.687.390.622	(656.528.847)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	8.343.074.288	22.849.730.650	(14.506.656.362)	73.955.098	(14.580.611.460)
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	178.776.653.121	116.962.354.763	61.814.298.358	429.953.701	61.384.344.657
	JUMLAH	4.702.465.155.977	4.328.394.699.704	374.070.456.273	415.214.217.135	(41.143.760.862)

Terdapat perbedaan sebesar Rp41.143.760.862,00 antara penyusutan periode berjalan dengan beban penyusutan dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 118**Penjelasan Selisih Penyusutan Periode Berjalan dengan Beban Penyusutan**

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Hibah Keluar	(17.202.038.048)
2	Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	203.248.617
3	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(176.861.309)
4	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Koreksi Pencatatan	(144.530.320)
5	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan	(23.182.153.133)
6	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Penghapusan	(344.681.696)
7	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan	(51.268.234)
8	Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Saldo Awal	435.648.234
9	Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Transfer Masuk	332.035.884
10	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Transfer Keluar	(246.657.857)
11	Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Reklasifikasi Masuk	418.657.950
12	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Reklasifikasi Keluar	(1.185.160.950)
JUMLAH		(41.143.760.862)

Penjelasan hubungan amortisasi periode berjalan dengan beban amortisasi sebagai berikut:

Tabel 119**Penjelasan Hubungan Amortisasi Periode Berjalan dengan Beban Amortisasi**

AKUN	URAIAN AKUN	AKUMULASI AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2025 (Rp)	AKUMULASI AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2024 (Rp)	AMORTISASI PERIODE BERJALAN (Rp)	BEBAK AMORTISASI TAHUN 2025 (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) - (d)	(f)	(g) = (e) - (f)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	633.601.535.937	692.217.866.817	(58.616.330.880)	39.595.673.606	(98.212.004.486)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	16.309.512.607	8.209.555.741	8.099.956.866	8.267.094.366	(167.137.500)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	153.309.868.425	58.337.879.914	94.971.988.511	-	94.971.988.511
JUMLAH		803.220.916.969	758.765.302.472	44.455.614.497	47.862.767.972	(3.407.153.475)

Terdapat perbedaan sebesar Rp3.407.153.475,00 antara amortisasi periode berjalan dengan beban amortisasi dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 120
Penjelasan Selisih Amortisasi Periode Berjalan dengan Beban Amortisasi

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	Mutasi Kurang Akumulasi Amortisasi yang disebabkan Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(168.741.007)
2	Mutasi Kurang Akumulasi Amortisasi yang disebabkan Transaksi Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(7.497.922.270)
3	Mutasi Tambah Akumulasi Amortisasi yang disebabkan Transaksi Transfer Masuk	4.259.509.802
JUMLAH		(3.407.153.475)

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp662.024.750*

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp662.024.750,00 dan Rp1.426.661.534,00.

Tabel 121
**Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Tahun 2025 dengan Tahun 2024**

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Penyisihan Piutang PNPB	661.835.625	1.424.657.000	(53,54)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	189.125	-	100,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang-TP/TGR	-	2.004.534	(100,00)
TOTAL	662.024.750	1.426.661.534	(53,60)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban yang timbul sebagai akibat pembentukan cadangan piutang agar piutang dapat disajikan sesuai dengan tingkat ketertagihannya.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.517.896.232,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.895.780.699,00 atau terdapat perubahan sebesar Rp622.115.533,00. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp662.024.750,00 sehingga terdapat perbedaan antara perubahan penyisihan piutang tak tertagih dengan Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp39.909.217,00.

Tabel 122
Perbandingan Perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025
dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH					BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH			
AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AKHIR (PER 31 DESEMBER 2025) (Rp)	SALDO AWAL (PER 31 DESEMBER 2024) (Rp)	PERUBAHAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2025 (Rp)	AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AKHIR (PER 31 DESEMBER 2025) (Rp)	PERUBAHAN PENYISIHAN PIUTANG DENGAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) - (d)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e) - (h)
116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	11.665.738.888	11.043.686.930	622.051.958	594211	Beban Penyisihan Piutang PNB	661.835.625	(39.783.667)
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	189.125	-	189.125	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	189.125	-
116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.878.984	1.503.401	375.583	594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	-	375.583
156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	17.850.089.235	17.850.590.368	(501.133)	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	-	(501.133)
JUMLAH		29.517.896.232	28.895.780.699	622.115.533	JUMLAH		662.024.750	(39.909.217)

Penjelasan perbedaan perubahan penyisihan piutang tak tertagih dengan beban penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp39.909.217,00 sebagai berikut:

Tabel 123
Penjelasan Selisih Perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan Beban
Penyisihan Piutang Tak Tertagih

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	Koreksi Beban Penyisihan Piutang tidak tertagih-Piutang Lainnya menjadi Beban Penyisihan Piutang tidak tertagih-Piutang PNB atas koreksi Hapus Piutang	(1.283.667)
2	Koreksi saldo piutang dengan kualitas macet yang menyebabkan saldo piutang tersebut nihil sehingga seluruh saldo penyisihan atas debitor tersebut dilakukan koreksi	(38.500.000)
3	Jurnal Penyisihan Piutang atas Koreksi Lainnya yang disebabkan karena Pelunasan Piutang TAB lebih besar dari Pengakuan Piutang TAB	(125.550)
JUMLAH		(39.909.217)

Surplus/ Defisit Dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp1.515.934.874

D.10 Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 124
Perbandingan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Tahun 2025 dengan Tahun 2024

KODE AKUN	URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/TURUN (%)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	888.600	-	100,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.169.718.497	1.796.591.725	(34,89)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	640.548.092	144.820.000	342,31
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	37.824.050	(100,00)
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	20.900.000	437.866.795	(95,23)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	119.072.918	157.509.012	(24,40)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	20.616.902.249	12.018.765.361	71,54
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	2.000.000	7.000.000	(71,43)
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	21.785.655	22.269.550	(2,17)
Total Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		22.591.816.011	14.622.646.493	54,50
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	23.796.700.091	10.076.972.716	136,15
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	91.767.222	118.375.084	(22,48)
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	219.283.572	76.833.501	185,40
Total Beban dari Kegiatan Non Operasional		24.107.750.885	10.272.181.301	134,69
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(1.515.934.874)	4.350.465.192	(134,85)

Jumlah Pendapatan-LO dari kegiatan non operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp22.591.816.011,00, sedangkan realisasi Pendapatan-LRA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp1.229.296.647.039,00, diantaranya sebesar Rp46.002.201.597,00 berasal dari kegiatan non operasional. Pendapatan-LO dari kegiatan non operasional sebesar Rp22.591.816.011,00 yang diantaranya merupakan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL berupa pekerjaan pengawasan rehabilitasi sarana pendidikan atas pekerjaan Tahun 2015 sebesar Rp2.000.000,00 yang terdapat pada IPDN Kampus Sulawesi Utara. Dengan demikian terdapat perbedaan penyajian Pendapatan-LO dari kegiatan non operasional (basis akrual) dengan Pendapatan-LRA Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari kegiatan non operasional (basis kas) sebesar Rp23.410.385.586,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 125
Selisih Realisasi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional
antara Basis Kas dan Basis Akrua

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	888.600	888.600	-
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.169.718.497	1.169.718.497	-
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	640.548.092	640.548.092	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	46.010.000	20.900.000	(25.110.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yg Lalu	168.278.274	119.072.918	(49.205.356)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yg Lalu	41.794.217.382	20.616.902.249	(21.177.315.133)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yg Lalu	2.182.540.752	2.000.000	(2.180.540.752)
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	21.785.655	21.785.655
PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		46.002.201.597	22.591.816.011	(23.410.385.586)

Penjelasan perbedaan pencatatan realisasi pendapatan dari kegiatan non operasional menurut basis kas dan basis akrual sebagai berikut:

1. Pelunasan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi atas Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO Tahun 2025 sebesar Rp25.110.000,00.
2. Pengakuan Pendapatan-LO dari dari penerimaan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp49.205.356,00.
3. Pendapatan-LO untuk akun Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL berbeda sebesar Rp21.177.315.133,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:
 - a. Pelunasan Pendapatan-LO dari penerimaan Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya atas pengembalian belanja barang TAYL sebesar Rp79.557.426,00;
 - b. Pelunasan Pendapatan-LO dari penerimaan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pengembalian belanja barang TAYL sebesar Rp21.097.757.679,00; dan
 - c. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO Tahun 2025 atas transaksi Tahun 2024 sebesar Rp28,00 yang disebabkan karena adanya perbedaan nilai SPM RPATA dengan nilai realisasi kontrak pada SPM pembayaran dan penihilan RPATA.

4. Pengurangan Pendapatan-LO yang berasal dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi atas pengembalian belanja modal TAYL sebesar Rp2.180.540.752,00.
5. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi sebesar Rp21.785.655,00 berasal dari perbedaan selisih kurs saat pencatatan di modul komitmen (SPP) dan saat pembayaran (SP2D) atas belanja jasa konsultan dengan valuta asing sebesar 45.500 USD, 85,150 USD, dan 84,385 USD. Nilai tagihan dengan kurs rupiah yang berlaku saat penerbitan SPP sebesar Rp3.602.266.320,00, sedangkan nilai realisasi dengan kurs rupiah yang berlaku saat penerbitan SP2D sebesar Rp3.580.480.665,00.

Jumlah Beban dari kegiatan non operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp24.107.750.885,00, sedangkan LRA tidak menyajikan kegiatan non operasional, sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban dari kegiatan non operasional antara basis kas dan basis akrual dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 126
Selisih Realisasi Beban dari Kegiatan Non Operasional
antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	23.796.700.091	23.796.700.091
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	-	91.767.222	91.767.222
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	219.283.572	219.283.572
TOTAL		-	24.107.750.885	24.107.750.885

Penjelasan perbedaan pencatatan beban dari kegiatan non operasional menurut basis kas dan basis akrual sebagai berikut:

1. Beban-LO untuk akun Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp23.796.700.091,00 berasal dari transaksi Hibah Keluar sebesar Rp23.087.264.507,00, Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp390.447.934,00, dan Penghapusan/ Penghentian Permanen KDP sebesar Rp318.987.650,00;
2. Beban-LO untuk akun Beban Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp91.767.222,00 berasal dari nilai persediaan yang dikeluarkan dari Neraca berdasarkan hasil opname fisik karena rusak sebesar Rp69.255.000,00, usang sebesar Rp8.065.372,00, serta koreksi *audited* atas persediaan obat yang telah kadaluarsa namun masih tercatat sebagai persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.446.850,00; dan

3. Beban-LO untuk akun Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp219.283.572,00 berasal dari perbedaan selisih kurs saat pencatatan di modul komitmen (SPP) dan saat pembayaran (SP2D) atas belanja jasa konsultan dengan valuta asing sebesar 80.800 USD, 81.790 USD, 47.800 USD, 23.900 USD, 47.800 USD, dan 89.468 USD. Nilai tagihan dengan kurs rupiah yang berlaku saat penerbitan SPP sebesar Rp6.946.891.664,00, sedangkan nilai realisasi dengan kurs rupiah yang berlaku saat penerbitan SP2D sebesar Rp7.166.175.236,00.

Terhadap transaksi tersebut tidak terjadi arus kas keluar atau masuk sehingga realisasi belanja tidak tercatat pada Laporan Realisasi Anggaran.

Pos-Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.11 POS-POS LUAR BIASA

Pos Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 nihil.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp16.905.781.871.164*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp16.905.781.871.164,00 dan Rp16.599.721.292.944,00.

*Defisit LO
Rp2.588.029.868.013*

E.2 Surplus (Defisit) - LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar Rp2.588.029.868.013,00 dan Rp3.870.300.342.048,00. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Koreksi Nilai Persediaan
(Rp857.981.630)*

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar (Rp857.981.630,00) dan Rp395.757,00. Koreksi Nilai Persediaan sebesar (Rp857.981.630,00) terdapat pada satker Sekretariat Daerah Kabupaten Tanimbar (690639) yang merupakan koreksi atas penyelesaian hibah aset Tugas Pembantuan Unit Eselon I Ditjen Bina Adwil berdasarkan Surat Keputusan Mendari Nomor 000.3.4.4644 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Gedung dan Bangunan Hasil Kegiatan Tugas Pembantuan pada Ditjen Bina Adwil Kemendagri kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku.

*Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Rp8.331.320.763*

E.3.2 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp8.331.320.763,00 dan (Rp1.285.557.409,00). Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp8.162.579.756,00 dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp168.741.007,00. Penjelasan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut.

E.3.2.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan nilai perolehan atas aset tetap yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Akun ini juga menampung koreksi kuantitas dan/atau jenis barang milik negara, koreksi perhitungan akumulasi penyusutan, dan koreksi nilai aset tetap yang disebabkan adanya pengembalian realisasi belanja modal.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp8.162.579.756,00 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal (403200) sebesar Rp774.411.846,00, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (448302) sebesar Rp6.818.474.977,00, IPDN Kampus Sumatera Barat (677045) sebesar Rp378.864.546,00, IPDN Kampus Kalimantan Barat (683070) sebesar Rp63.711.595,00 Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (027210) sebesar Rp358.068,00, Ditjen Bina Pemerintahan Desa (027753) sebesar Rp1.577.285,00, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (634082) sebesar Rp124.851.263,00, dan Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II (403216) sebesar Rp330.176,00.

Penjelasan terkait Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat pada tabel 127.

Tabel 127
Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sampai dengan
31 Desember 2025

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	Koreksi tambah Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi pencatatan saldo awal atas kendaraan dinas sesuai Berita Acara Saldo Awal dengan Nomor 000.3/573/03/Rumga25 pada satker Setjen	110.724.000
2	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi pencatatan saldo awal atas kendaraan dinas sesuai Berita Acara Saldo Awal dengan Nomor 000.3/573/03/Rumga25 pada satker Setjen	(102.815.154)
3	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang berasal dari reklasifikasi masuk karena reklasifikasi kode BMN yang semula berupa A.C Sentral dan A.C Split menjadi Control Panel sesuai Berita Acara Reklasifikasi Kodefikasi BMN Nomor 000.3/4153/03/Rumga25 pada satker Setjen	766.503.000

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
4	Koreksi tambah Gedung dan Bangunan yang berasal dari koreksi pencatatan saldo awal atas Gedung Laundry pada satker IPDN Jatinangor. Koreksi tersebut berasal dari ganti kerugian dalam bentuk gedung dan bangunan pengganti (Gedung Laundry) sebagai dampak dari pembebasan jalan tol dengan nilai perolehan sebesar Rp6.954.624.000,00 dikurangi penyusutan sehingga nilai buku Gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp6.815.531.520,00. Ganti rugi tersebut berasal dari PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan dan Soreang Pasirkoja kepada IPDN sesuai dengan Berita Acara Serah terima Nomor TN.02.06/440357-16/22122020-1 tanggal 22 Desember 2020.	6.954.624.000
5	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang berasal dari koreksi saldo awal pada satker IPDN Jatinangor. Koreksi tersebut berasal dari ganti kerugian dalam bentuk gedung dan bangunan pengganti (Gedung Laundry) sebagai dampak dari pembebasan jalan tol dengan nilai perolehan sebesar Rp6.954.624.000,00 dikurangi penyusutan sehingga nilai buku Gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp6.815.531.520,00. Ganti rugi tersebut berasal dari PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan dan Soreang Pasirkoja kepada IPDN sesuai dengan Berita Acara Serah terima Nomor TN.02.06/440357-16/22122020-1 tanggal 22 Desember 2020.	(139.092.480)
6	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan karena penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan Perpustakaan yang berasal dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang memenuhi kriteria kapitalisasi pada satker IPDN Jatinangor	(6.024.060)
7	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena pengembalian belanja modal TAYL pada satker IPDN Jatinangor	770.000
8	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena pengembalian belanja modal TAYL pada satker IPDN Jatinangor	8.197.517
9	Koreksi tambah Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi pencatatan saldo awal karena kapitalisasi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin menjadi penambah nilai Peralatan dan Mesin sesuai rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal Nomor 700.1.2.8/149/IJ dan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Aset Direktur IPDN Kampus Sumbar Nomor 000.2.1.1/345/IPDN.22 pada satker IPDN Kampus Sumbar	45.176.395
10	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi pencatatan saldo awal karena kapitalisasi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin menjadi penambah nilai Peralatan dan Mesin sesuai rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal Nomor 700.1.2.8/149/IJ dan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Aset Direktur IPDN Kampus Sumbar Nomor 000.2.1.1/345/IPDN.22 pada satker IPDN Kampus Sumbar	(9.610.280)

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
11	Koreksi tambah Gedung dan Bangunan yang berasal dari koreksi pencatatan nilai bertambah karena kapitalisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi penambah nilai Gedung dan Bangunan sesuai rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal Nomor 700.1.2.8/149/IJ dan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Aset Direktur IPDN Kampus Sumbar Nomor 000.2.1.1/345/IPDN.22 pada satker IPDN Kampus Sumbar	356.229.428
12	Koreksi tambah Irigasi yang berasal dari koreksi pencatatan nilai bertambah karena kesalahan pembebanan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi penambah nilai Irigasi sesuai rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal Nomor 700.1.2.8/149/IJ dan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Aset Direktur IPDN Kampus Sumbar Nomor 000.2.1.1/345/IPDN.22 pada satker IPDN Kampus Sumbar	184.293.560
13	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang berasal dari koreksi pencatatan nilai bertambah karena kapitalisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi penambah nilai Gedung dan Bangunan sesuai rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal Nomor 700.1.2.8/149/IJ dan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Aset Direktur IPDN Kampus Sumbar Nomor 000.2.1.1/345/IPDN.22 pada satker IPDN Kampus Sumbar	(40.575.031)
14	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Irigasi yang berasal dari koreksi pencatatan nilai bertambah karena kesalahan pembebanan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi penambah nilai Irigasi sesuai rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal Nomor 700.1.2.8/149/IJ dan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Aset Direktur IPDN Kampus Sumbar Nomor 000.2.1.1/345/IPDN.22 pada satker IPDN Kampus Sumbar	(156.649.526)
15	Koreksi tambah Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan yang berasal dari koreksi Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan pada satker IPDN Kampus Kalbar	150.658.292
16	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan yang berasal dari koreksi Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan pada satker IPDN Kampus Kalbar	(86.946.697)
17	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena pengembalian belanja modal TAYL pada satker Ditjen Polpum	358.068
18	Pengembalian belanja modal TAYL pada satker Ditjen Bina Pemdes karena adanya temuan kekurangan volume atas peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan sehingga yang semula dicatat sebagai intrakomptabel kemudian menjadi ekstrakomptabel karena nilai perolehan baru setelah dilakukan koreksi dibawah batas kapitalisasi	14.017.928

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
19	Koreksi kurang Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena adanya pengembalian belanja modal TAYL pada satker Ditjen Bina Pemdes dimana yang semula dicatat sebagai intrakomptabel kemudian menjadi ekstrakomptabel karena nilai perolehan baru setelah dilakukan koreksi dibawah batas kapitalisasi	(14.489.578)
20	Koreksi kurang Gedung dan Bangunan yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena adanya pengembalian belanja modal TAYL pada satker Ditjen Bina Pemdes dimana yang semula dicatat sebagai intrakomptabel kemudian menjadi ekstrakomptabel karena nilai perolehan baru setelah dilakukan koreksi dibawah batas kapitalisasi	(705.350)
21	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena adanya pengembalian belanja modal TAYL pada satker Ditjen Bina Pemdes dimana yang semula dicatat sebagai intrakomptabel kemudian menjadi ekstrakomptabel karena nilai perolehan baru setelah dilakukan koreksi dibawah batas kapitalisasi	2.744.880
22	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena adanya pengembalian belanja modal TAYL pada satker Ditjen Bina Pemdes dimana yang semula dicatat sebagai intrakomptabel kemudian menjadi ekstrakomptabel karena nilai perolehan baru setelah dilakukan koreksi dibawah batas kapitalisasi	9.405
23	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena pengembalian belanja modal TAYL pada satker Ditjen Dukcapil	124.851.263
24	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena pengembalian belanja modal TAYL pada satker Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II	330.176
TOTAL		8.162.579.756

Rincian pada **Lampiran XXVIII** (Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi).

E.3.2.2 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan nilai perolehan atas aset lainnya yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Akun ini juga menampung koreksi kuantitas dan/atau jenis aset tak berwujud yang mempengaruhi perhitungan akumulasi amortisasi.

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang

berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp168.741.007,00 merupakan koreksi kurang Akumulasi Amortisasi Software yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena adanya pengembalian belanja modal TAYL pada satker Sekretariat Jenderal (403200) sebesar Rp121.463.000,00, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (448302) sebesar Rp34.271.250,00, serta Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (634082) sebesar Rp13.006.757,00.

*Koreksi Lain-Lain
(Rp227.927.453)*

E.3.3 Koreksi Lain - Lain

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi atas akun tersebut untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar (Rp227.927.453,00) dan (Rp151.375.250,00).

Koreksi Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar (Rp227.927.453,00) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Koreksi piutang praja sebesar (Rp11.553.003,00) yang merupakan koreksi piutang praja yang diberhentikan sesuai Surat Keterangan Nomor 900.1.3.5/139/IPDN.19 bulan Agustus 2025 pada satker Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
2. Koreksi piutang praja sebesar Rp33.500.000,00 yang merupakan koreksi pencatatan piutang yang terjadi karena kelebihan pencatatan tagihan pada satker Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
3. Koreksi beban penyisihan piutang tidak tertagih jangka panjang/tunjangan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi minus sebesar Rp125.550,00 IPDN Kampus Sulawesi Utara; dan
4. Jurnal Koreksi saldo Beban yang terbentuk dari Jurnal Balik pengakuan Beban Dibayar Dimuka TAYL sebesar Rp250.000.000,00 atas bantuan rehabilitasi bangunan kantor desa pada bukti pertanggungjawabannya belum lengkap karena sesuai dengan PMK Nomor 100 Tahun 2025 kejadian tersebut tidak lagi disajikan dalam Neraca, namun disajikan dalam daftar belanja yang belum dipertanggungjawabkan.

*Transaksi Antar Entitas
Rp2.601.158.229.325*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.601.158.229.325,00 dan Rp4.177.797.457.170,00. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat pada tabel 128.

Tabel 128
Rincian Transaksi Antar Entitas sampai dengan 31 Desember 2025

Akun	Uraian	Nominal
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	3.672.672.202.343
313121	Diterima dari Entitas Lain	(1.229.296.647.039)
313211	Transfer Keluar	(121.306.306.662)
313221	Transfer Masuk	129.783.153.458
391131	Pengesahan Hibah Langsung	145.099.779.942
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(263.025.588)
391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	4.469.072.871
JUMLAH		2.601.158.229.325

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar (Rp1.229.296.647.039,00) sedangkan DKEL sebesar Rp3.672.672.202.343,00.

E.4.2 Transfer Masuk/ Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp129.783.153.458,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 129
Rincian Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025

Akun	Uraian	Nominal
403200	Sekretariat Jenderal	643.626.428
448302	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	145.940.343
483005	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	299.177.113
677024	IPDN Kampus Sulawesi Selatan	7.691.127.290
683091	IPDN Kampus Papua	84.455.622.000
027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	340.602.050
027753	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	636.480.000
634082	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35.178.462.493
506138	Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan	392.115.741
Jumlah		129.783.153.458

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar (Rp121.306.306.662,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 130
Rincian Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025

Akun	Uraian	Nominal
403200	Sekretariat Jenderal	(85.092.102.000)
448302	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	(35.180.064.393)
027210	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	(642.024.528)
403231	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(392.115.741)
JUMLAH		121.306.306.662

Penjelasan selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk secara neto dan absolut untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Perbedaan saldo pada Neraca Percobaan antara akun Transfer Keluar sebesar (Rp121.306.306.662,00) dengan Transfer Masuk sebesar Rp129.783.153.458,00 menyebabkan terdapat selisih secara neto sebesar Rp8.476.846.796,00. Selisih tersebut berasal dari:
 - a. Transfer masuk berupa Tanah sebesar Rp7.691.127.290,00 pada satker IPDN Kampus Sulawesi Selatan (677024) Kemendagri yang berasal dari satker Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjudin Chalid Makassar (024.04.258462) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menu Monitoring Transfer Keluar/Masuk pada Aplikasi MonSAKTI menyajikan Transfer Keluar yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, namun Transfer Keluar tersebut tidak tercatat pada Laporan Keuangan Kemendagri.
 - b. Transfer masuk berupa Peralatan dan mesin sebesar Rp190.544.310,00, Aset Tetap Lainnya sebesar Rp40.774.060,00, dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp85.378.027,00) pada satker Institut Pemerintahan Dalam Negeri (448302) Kemendagri yang berasal dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta (057.01.531535). Menu Monitoring Transfer Keluar/Masuk pada Aplikasi MonSAKTI menyajikan Transfer Keluar yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, namun Transfer Keluar tersebut tidak tercatat pada Laporan Keuangan Kemendagri.

- c. Transfer masuk berupa *Software* sebesar Rp1.877.912.555,00 dan Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar (Rp1.578.735.442,00) pada satker Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (483005) Kemendagri yang berasal dari satker Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (059.04.664262) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Menu Monitoring Transfer Keluar/Masuk pada Aplikasi MonSAKTI menyajikan Transfer Keluar yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, namun Transfer Keluar tersebut tidak tercatat pada Laporan Keuangan Kemendagri.
 - d. Transfer masuk berupa *Software* sebesar Rp2.724.816.410,00 dan Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar (Rp2.384.214.360,00) pada satker Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (027486) Kemendagri yang berasal dari satker Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (059.04.664262) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Menu Monitoring Transfer Keluar/Masuk pada Aplikasi MonSAKTI menyajikan Transfer Keluar yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, namun Transfer Keluar tersebut tidak tercatat pada Laporan Keuangan Kemendagri.
 - e. Transfer masuk berupa *Software* sebesar Rp296.560.000,00 dan Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar (Rp296.560.000,00) pada satker Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (483005) Kemendagri yang berasal dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (115.01.500100). Menu Monitoring Transfer Keluar/Masuk pada Aplikasi MonSAKTI menyajikan Transfer Keluar yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, namun Transfer Keluar tersebut tidak tercatat pada Laporan Keuangan Kemendagri.
2. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk diperoleh melalui pengurangan kolom Transfer Keluar dan Transfer Masuk. Selanjutnya, hasil pengurangan yang bernilai negatif diabsolutkan atau hasilnya dibuat positif. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk secara absolut sebesar Rp1.284.049.056,00. Selisih tersebut berasal dari pemeliharaan gedung dan bangunan milik Sekretariat Jenderal oleh satker Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sebesar Rp642.024.528,00. Pada saat diserahterimakan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum mencatat Transfer Keluar ATR sebesar Rp642.024.528,00 dan Sekretariat Jenderal mencatat transfer masuk Gedung dan

Bangunan sebesar Rp642.024.528,00.

Rincian transaksi transfer masuk dan transfer keluar pada **Lampiran XXIX** (Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk).

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp145.099.779.942,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 131
Rincian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025

Akun	Uraian	Nominal
403200	Sekretariat Jenderal	51.708.247.092
448302	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	994.126.500
027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	22.294.863.607
039729	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	18.945.697.447
621892	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	4.674.387.330
634082	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	42.153.480.000
662766	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	4.328.977.966
JUMLAH		145.099.779.942

Hibah langsung tersebut sudah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar (Rp263.025.588,00) terdapat pada satker Ditjen Bina Pembangunan Daerah (039729) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. UNICEF memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa Program Kerja Sama Pemerintah RI-Unicef Periode 2021-2025 Lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri sebesar Rp4.494.693.200,00 dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar Rp262.463.088,00 sehingga hibah langsung yang diterima sebesar Rp4.232.230.112,00 dengan Nomor Register 2C7EJQHA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor CP-20.08.2021 tanggal 20 Agustus 2021.

2. UNFPA memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa *Implementation of UNFPA-Funded Workplans Relating To The 2021-2025 UNFPA Country Programme for Republic Indonesia* sebesar Rp2.985.429.800,00 dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar Rp562.500,00 sehingga hibah langsung yang diterima sebesar Rp2.984.867.300,00 dengan Nomor Register 2TCK92FA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor IPA-17 Feb 2021 tanggal 17 Februari 2025.

E.4.4 Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu

Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung yang diterima pada Tahun 2025 dan/tahun-tahun sebelumnya namun baru disahkan pada tahun anggaran berjalan. Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp4.469.072.871,00 terdapat pada satker Ditjen Bina Pembangunan Daerah (039729) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ditjen Bina Pembangunan Daerah menerima hibah langsung dalam bentuk jasa sebesar Rp4.441.217.250,00 dari Pemerintah Australia dalam rangka *Synergies and Collaboration for Basic Service Delivery Acceleration* atau Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) dalam BAST Hibah Jasa dari Pemerintah Australia kepada Ditjen Bina Bangda Nomor 02/BAST-KEMENDAGRI/05/2024 tanggal 29 Mei 2024. Nomor Register Hibah 27BMXZ9A.
2. Ditjen Bina Pembangunan Daerah menerima hibah langsung dalam bentuk Jasa sebesar Rp27.855.621,00 dari UNFPA dalam rangka *Implementation Of UNFPA-Funded Workplans Relating To The 2021-2025 UNFPA Country Programme For Republic Indonesia I* dalam BAST Hibah Jasa dari UNFPA kepada Ditjen Bina Bangda Nomor 280/RFP/12-2024 tanggal 13 Desember 2024. Nomor Register Hibah 2TCK92FA.

Ekuitas Akhir
Rp16.926.155.644.156

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp16.926.155.644.156,00 dan Rp16.905.781.871.164,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan pada Itjen sebesar Rp492.890.339,00 telah dihapus secara mutlak pada tanggal 10 Februari 2026 dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/MK/KN/2026 tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara pada Kementerian Dalam Negeri atas nama EI. Adapun tahapan penyelesaian penghapusan secara mutlak piutang dimaksud sebagai berikut:

1. Piutang tidak dapat ditagihkan sejak bulan April 2017 dan diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui Surat Sekretaris Jenderal yang ditandatangani Kepala Biro Keuangan dan Aset Nomor 956/181/SJ tanggal 10 Januari 2019 hal penyerahan Pengurusan Piutang Negara.
2. Kepengurusan piutang tersebut telah beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III) berdasarkan Surat Ketua Panitia yang ditandatangani Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor SP3N-01/PUPNC.10.03/2019 tanggal 11 Januari 2019 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara. Selanjutnya piutang tersebut dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih berdasarkan Surat Ketua Panitia yang ditandatangani Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor PSBDT-71/PUPNC.10.03/2021 tanggal 11 November 2021 hal Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.
3. Kemendagri mengajukan permohonan rekomendasi penghapusan piutang negara bersyarat melalui Surat Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 953/6675/SJ tanggal 30 November 2021 hal Permohonan Rekomendasi Penghapusan Piutang Negara Bersyarat yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Utama Binbangkum PKN BPK RI.
4. BPK RI menyetujui permohonan rekomendasi penghapusan secara bersyarat piutang negara atas nama Sdri. EI berdasarkan Surat Wakil Ketua BPK RI Nomor 46/S/II/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 hal Rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara atas Nama Sdri. EI.
5. Menteri Keuangan menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KM.6/2023 tanggal 11 September 2023. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, dilakukan penghapusan secara bersyarat piutang negara atas nama Sdri. EI dengan menghapuskan piutang negara tersebut dari pembukuan satker, namun tidak menghapuskan hak tagih Negara.
6. Usulan penghapusan secara mutlak atas piutang negara dapat diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Oleh sebab itu, pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 15 sampai dengan 17 September 2025 Tim Kemendagri dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III melaksanakan penelitian lapangan terhadap debitur/penanggung hutang atas nama EI yang bertempat di

Dusun Sindaghurip, Desa Sindangmukti, Kec. Panumbangan, Kab. Ciamis, Jawa Barat. Hasil penelitian lapangan memberikan informasi bahwa debitur dalam kondisi tidak mampu melunasi utang karena tidak memiliki harta dan penghasilan. Sdri. EI menderita penyakit sehingga tidak memiliki pekerjaan. Kondisi terkini debitur/penanggung hutang diperkuat oleh Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400.3.5.6/178-Pemdes yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sindangmukti, Kec. Panumbangan, Kab. Ciamis, Jawa Barat tertanggal 15 September 2025.

7. Kemendagri mengajukan usulan penghapusan piutang secara mutlak kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor x.900/81/SJ tanggal 31 Oktober 2025 hal Penyampaian Usulan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara a.n. EI, A.Md. dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dan SK Penghapusan Bersyarat.
8. Pada tanggal 10 Februari 2026 telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/MK/KN/2026 tentang Penghapusan secara Mutlak Piutang Negara pada Kementerian Dalam Negeri atas nama EI dengan nilai total piutang sebesar Rp492.890.339,00. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, maka piutang negara atas nama EI dilakukan penghapusan secara mutlak sehingga menghapuskan hak tagih negara atas piutang tersebut.

F.2 CATATAN PENTING LAINNYA

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mengatur perlakuan khusus terhadap Belanja Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial dan Belanja BLU yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang, yaitu Belanja Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial dan Belanja BLU yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang yang sudah dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara ke penerima manfaat, namun belum dipertanggungjawabkan, tidak disajikan dalam Neraca sebagai Beban/Belanja Dibayar di Muka. Belanja yang belum dipertanggungjawabkan tersebut cukup diungkapkan dalam CaLK dan disajikan dalam daftar belanja yang belum dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, maka Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang sebesar Rp250.000.000,00 pada Unit Eselon I Ditjen Bina Pemdes tidak disajikan sebagai Belanja Dibayar di Muka pada Neraca per 31 Desember 2025. Belanja tersebut merupakan belanja bantuan Pemerintah untuk rehabilitasi bangunan kantor desa pada Tahun 2019 yang belum lengkap bukti pertanggungjawabannya sampai dengan 31 Desember 2024. Informasi rincian desa yang belum lengkap bukti pertanggungjawabannya disajikan pada **Lampiran XXX**.
2. Terdapat Aset Tetap yang dikuasai/digunakan oleh pihak yang sudah tidak berhak menghungi/pihak lain yaitu:
 - a. Tanah Balai PMD Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Melati Kab. Sleman Yogyakarta yang diatasnya berdiri satu unit rumah ditempati oleh masyarakat eks Timor-Timur tanpa didukung perjanjian pinjam pakai. Langkah awal penyelesaian permasalahan tersebut ditindaklanjuti dengan pengamanan secara fisik berupa pemasangan papan kepemilikan Kemendagri di depan Asrama Eks Timor-Timur.

- b. Tanah seluas 258 m² beserta bangunan seluas 45 m² senilai Rp66.273.500,00 yang terletak di lingkungan perkantoran Ditjen Bina Pemdes dan awalnya merupakan kantor Ditjen Bina Pemdes dikuasai oleh pensiunan pegawai Ditjen Bina Pemdes dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4304/Kelurahan Pejaten Barat, tanggal 28 Maret 2022. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/4853/SJ tanggal 22 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hal Pembatalan atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4304/Kelurahan Pejaten Barat, tanggal 28 Maret 2022, seluas 258 m². Penyelesaian permasalahan tersebut masih menunggu keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. DKI Jakarta atas permohonan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk pembatalan Sertifikat Hak Milik dimaksud.
- c. Terdapat hunian warga (semi permanen) yang dibangun tanpa izin di atas sebidang tanah eks-rumah dinas milik Setjen yang terletak di Jalan Danau Indah XVI Blok B-6 Nomor 27 s.d. 30 Sunter Jaya. Kepala Biro Umum memberikan izin kepada petugas penjaga untuk menempati tanah tersebut sekaligus untuk mengawasi aset tanah Kemendagri berdasarkan Surat Izin Penghunian Nomor 012.7/4356/BU tanggal 2 Agustus 2019. Namun demikian, izin yang diberikan kepada petugas penjaga tidak termasuk pemberian izin dan/atau kewenangan kepada petugas penjaga untuk mengelola tanah maupun pembangunan hunian semi permanen untuk warga lainnya.
3. Terdapat satu bidang tanah milik Kemendagri yang masih bersertifikat atas nama PT. SAC Nusantara. Tanah tersebut terletak di Komplek Perumahan SAC Nusantara Blok I Kav. Nomor 34 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta. Kemendagri telah mendirikan pagar sebagai upaya pengamanan dan memproses balik nama sertipikat tanah menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Dalam Negeri.
4. Kementerian Dalam Negeri telah menindaklanjuti kebijakan pencatatan Barang Milik Negara pada satker inaktif bersaldo yang tidak dapat terselesaikan pada Tahun 2021 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-286/PB/2021 tanggal 21 November 2021 hal Penyelesaian Satker Inaktif Bersaldo (SIB). Kebijakan tersebut berupa penyelesaian hingga tuntas proses likuidasi Satker Inaktif Bersaldo (SIB) menjadi Satker Inaktif Tidak Bersaldo (SITB). Satker inaktif bersaldo dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang tidak dapat terselesaikan pada Tahun 2021, dilikuidasi dengan cara mengalihkan aset satker inaktif bersaldo tersebut ke satker pusat pada Unit Eselon I yang menjadi penanggung jawab proses likuidasi.
- Rincian jumlah satker dan saldo aset berupa barang milik negara yang dialihkan ke satker pusat per Unit Eselon I pada Tahun 2021 dan progres penyelesaian aset tersebut sampai dengan Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 132
Rekapitulasi Jumlah Satker Inaktif yang Dialihkan Saldo Asetnya ke Satker Pusat Tahun 2021
dan Progres Penyelesaiannya sampai dengan Tahun 2024

No	Eselon I	Jlh Satker	Saldo Persediaan per 31 Desember 2021	Aset Tetap per 31 Desember 2021		Aset Lainnya per 31 Desember 2021	
				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Ditjen Adwil	25	23.449.827.140	4.235.004.449	(4.235.004.449)	-	-
2	Ditjen Pemdes	348	14.722.362.945	2.793.319.365	(2.793.319.365)	-	-
3	Ditjen Bangda	97	191.707.612.750	597.752.000	(597.752.000)	17.881.146.014	(17.881.146.014)
4	Ditjen Otda	21	10.937.697.046	85.208.189.815	(85.208.189.815)	16.539.054.977	(16.539.054.977)
Jumlah		491	240.817.499.881	92.834.265.629	(92.834.265.629)	34.420.200.991	(34.420.200.991)
No	Eselon I	Jlh Satker	Saldo Persediaan per 31 Desember 2024	Aset Tetap per 31 Desember 2024		Aset Lainnya per 31 Desember 2024	
				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Ditjen Adwil	20	18.561.387.331	4.235.004.449	(4.235.004.449)	-	-
2	Ditjen Pemdes	341	14.141.386.945	2.753.489.365	(2.753.489.365)	-	-
3	Ditjen Bangda	60	115.408.242.322	-	-	11.325.460.879	(11.325.460.879)
4	Ditjen Otda	13	1.368.549.163	33.088.546.155	(33.088.546.155)	13.193.486.977	(13.193.486.977)
Jumlah		434	149.479.565.761	40.077.039.969	(40.077.039.969)	24.518.947.856	(24.518.947.856)
Perubahan		(57)	(91.337.934.120)	(52.757.225.660)	52.757.225.660	(9.901.253.135)	9.901.253.135

Penyelesaian aset eks. satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang disajikan sebagai persediaan berpedoman pada:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Kebijakan Akuntansi atas Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda untuk Diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dan Selanjutnya;
- Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 25 Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan; dan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mengatur perlakuan khusus terhadap persediaan yang tidak dikuasai, yaitu persediaan yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan telah diusulkan permohonan persetujuan pemindahtanganan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN, namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan BMN, tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK dan disajikan dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai.

Kementerian Dalam Negeri terus berupaya untuk menyelesaikan aset eks. satker Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama tersebut. Progres penyelesaian aset eks. satker Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama selama periode pelaporan Tahun 2025 *Audited* sebagai berikut.

Tabel 133
Rekapitulasi Progres Penyelesaiannya Aset Eks. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Selama Tahun 2025

No	Eselon I	Jlh Satker	Saldo Persediaan per 31 Desember 2024	Aset Tetap per 31 Desember 2024		Aset Lainnya per 31 Desember 2024	
				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Ditjen Adwil	20	18.561.387.331	4.235.004.449	(4.235.004.449)	-	-
2	Ditjen Pemdes	341	14.141.386.945	2.753.489.365	(2.753.489.365)	-	-
3	Ditjen Bangda	60	115.408.242.322	-	-	11.325.460.879	(11.325.460.879)
4	Ditjen Ottda	13	1.368.549.163	33.088.546.155	(33.088.546.155)	13.193.486.977	(13.193.486.977)
Jumlah		434	149.479.565.761	40.077.039.969	(40.077.039.969)	24.518.947.856	(24.518.947.856)

No	Eselon I	Jlh Satker	Saldo Persediaan per 31 Desember 2025	Aset Tetap per 31 Desember 2025		Aset Lainnya per 31 Desember 2025	
				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Ditjen Adwil	12	13.124.828.581	4.116.109.449	(4.116.109.449)	-	-
2	Ditjen Pemdes	326	12.603.972.761	2.653.191.865	(2.653.191.865)	-	-
3	Ditjen Bangda	59	113.626.787.322	-	-	11.325.460.879	(11.325.460.879)
4	Ditjen Ottda	10	1.088.228.700	28.212.791.277	(28.212.791.277)	11.112.802.473	(11.112.802.473)
Jumlah		407	140.443.817.364	34.982.092.591	(34.982.092.591)	22.438.263.352	(22.438.263.352)
Perubahan		(27)	(9.035.748.397)	(5.094.947.378)	5.094.947.378	(2.080.684.504)	2.080.684.504

Selama Tahun 2025, Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan aset tersebut yang disajikan pada akun Persediaan sebesar Rp9.035.748.397,00, Aset Tetap sebesar Rp5.094.947.378,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar (Rp5.094.947.378,00) dan Aset Lainnya sebesar Rp2.080.684.504,00 dengan akumulasi penyusutan/amortisasi sebesar (Rp2.080.684.504,00).

Rincian Aset Eks. Satker Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran XXXI.

- Kementerian Dalam Negeri memiliki sebanyak enam Satker Inaktif Bersaldo yang dikonsolidasi dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode pelaporan Tahun 2025 *Audited* melalui Aplikasi SAKTI. Satker Inaktif Bersaldo tersebut terdapat pada Unit Eselon I Ditjen Bina Adwil sebanyak dua satker Dekonsentrasi dan empat satker Tugas Pembantuan, serta Unit Eselon I BPSDM sebanyak satu satker UPT dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 134
Rekapitulasi Total Aset Satker Inaktif Bersaldo per 31 Desember 2025

NO	BAES1	Kode Satker	Nama Satker	JK	Akun	Uraian Akun	Saldo per 31 Desember 2025
1	0100	484205	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	DK	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	10.000
2	0100	484208	BAPPEDA PROVINDI PAPUA	DK	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	60
3	01004	240270	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAB. BELU	TP	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	865.762.700
4	01004	356000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU	TP	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.570.910.000
5	01004	417936	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI	TP	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.879.281.000
6	01012	352588	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KD	133111	Gedung dan Bangunan	75.632.942.000
					137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(13.892.616.728)
Total							66.056.289.032

Total nilai aset sebesar Rp66.056.289.032,00 tersebut masih dalam proses likuidasi.

6. Indikator kualitas data laporan keuangan yang perlu dijelaskan berdasarkan menu-menu pada Aplikasi MonSAKTI disajikan pada lampiran sebagai berikut:
 - a. Ketidaksesuaian Kode Akun Vs Kode Persediaan (Lampiran XXXII) dan
 - b. Ketidaksesuaian Kode Akun Vs Kode BMN (Lampiran XXXIII).
7. Daftar Rekening Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 disusun berdasarkan data Aplikasi Sprint dan hasil konfirmasi dengan Unit Eselon I terkait. Daftar rekening tersebut disajikan pada Lampiran XXXIV.

G. PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan. Penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan dan pengungkapan lainnya diperoleh berdasarkan dokumen sumber dan/atau laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) di lingkungan Kemendagri yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang diberikan.

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan, semoga tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pengguna laporan keuangan dapat tercapai.

Jakarta, 8 Mei 2026

MENTERI DALAM NEGERI,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



LAMPIRAN LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG CALK:



LAMPIRAN I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

ESELON I	SATKER	NAMA SATKER	JK	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETO	% REALISASI PENDAPATAN
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	1.448.052.000	1.232.879.858	-	1.232.879.858	85,14
01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	17.791.186.000	21.150.462.906	-	21.150.462.906	118,88
01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	KP	-	60.386.190	-	60.386.190	0,00
01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	KD	-	389.272.133	-	389.272.133	0,00
01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	KD	-	183.223.133	-	183.223.133	0,00
01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	-	35.320.500	-	35.320.500	0,00
01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	-	10.258.218	-	10.258.218	0,00
01	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	KD	-	424.564.180	-	424.564.180	0,00
01	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	KD	-	265.272.645	-	265.272.645	0,00
		KP :		19.239.238.000	22.443.728.954	-	22.443.728.954	116,66
		KD :		-	1.307.910.809	-	1.307.910.809	0,00
		Total Setjen :		19.239.238.000	23.751.639.763	-	23.751.639.763	123,45
02	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	KP	-	83.796.309	-	83.796.309	0,00
		KP :		-	83.796.309	-	83.796.309	0,00
		Total Itjen :		-	83.796.309	-	83.796.309	0,00
03	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	-	314.277.102	-	314.277.102	0,00
		KP :		-	314.277.102	-	314.277.102	0,00
		Total Ditjen Polpum :		-	314.277.102	-	314.277.102	0,00
04	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	KP	-	923.709.496	-	923.709.496	0,00
04	484167	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	DK	-	25.984	-	25.984	0,00
04	484197	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	DK	-	7.440	-	7.440	0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

ESELON I	SATKER	NAMA SATKER	JK	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETO	% REALISASI PENDAPATAN
		KP :		-	923.709.496	-	923.709.496	0,00
		DK :		-	33.424	-	33.424	0,00
		Total Ditjen Bina Adwil :		-	923.742.920	-	923.742.920	0,00
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	198.786.000	23.066.511.602	-	23.066.511.602	11603,69
05	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	KD	172.630.000	271.590.000	-	271.590.000	157,32
05	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	190.352.000	267.914.946	-	267.914.946	140,75
05	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	KD	175.305.000	94.040.120	-	94.040.120	53,64
		KP :		198.786.000	23.066.511.602	-	23.066.511.602	11603,69
		KD :		538.287.000	633.545.066	-	633.545.066	117,70
		Total Ditjen Bina Pemdes :		737.073.000	23.700.056.668	-	23.700.056.668	3215,43
06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	-	6.528.831.078	-	6.528.831.078	0,00
		KP :		-	6.528.831.078	-	6.528.831.078	0,00
		Total Ditjen Bina Bangda :		-	6.528.831.078	-	6.528.831.078	0,00
07	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	KP	-	332.388.676	-	332.388.676	0,00
		KP :		-	332.388.676	-	332.388.676	0,00
		Total Ditjen Otda :		-	332.388.676	-	332.388.676	0,00
08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	KP	464.890.871.000	1.107.113.298.287	-	1.107.113.298.287	238,14
		KP :		464.890.871.000	1.107.113.298.287	-	1.107.113.298.287	238,14
		Total Ditjen Dukcapil :		464.890.871.000	1.107.113.298.287	-	1.107.113.298.287	238,14
09	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	-	15.910.505	-	15.910.505	0,00
		KP :		-	15.910.505	-	15.910.505	0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

ESELON I	SATKER	NAMA SATKER	JK	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETO	% REALISASI PENDAPATAN
		Total Ditjen Bina Keuda :		-	15.910.505	-	15.910.505	0,00
11	403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	KP	-	104.784.760	-	104.784.760	0,00
		KP :		-	104.784.760	-	104.784.760	0,00
		Total BSKDN :		-	104.784.760	-	104.784.760	0,00
12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KP	17.780.636.000	19.402.854.461	-	19.402.854.461	109,12
12	506137	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	KD	9.186.038.000	10.972.830.381	-	10.972.830.381	119,45
12	403216	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	KD	16.603.571.000	18.428.534.023	-	18.428.534.023	110,99
12	027114	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	KD	9.434.555.000	9.735.300.708	-	9.735.300.708	103,19
12	027177	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	KD	6.385.848.000	6.481.252.604	-	6.481.252.604	101,49
12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI	KD	1.364.850.000	1.407.148.794	-	1.407.148.794	103,10
		KP :		17.780.636.000	19.402.854.461	-	19.402.854.461	109,12
		KD :		42.974.862.000	47.025.066.510	-	47.025.066.510	109,42
		Total BPSDM :		60.755.498.000	66.427.920.971	-	66.427.920.971	109,34
		KP :		502.109.531.000	1.180.330.091.230	-	1.180.330.091.230	235,07
		KD :		43.513.149.000	48.966.522.385	-	48.966.522.385	112,53
		DK :		-	33.424	-	33.424	0,00
		Total Kementerian :		545.622.680.000	1.229.296.647.039	-	1.229.296.647.039	225,30



LAMPIRAN II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	453.146.201.000	547.171.051.000	542.406.553.325	253.378.266	542.153.175.059	99,13	5.017.875.941
01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	438.497.020.000	423.391.008.000	421.839.916.013	142.500.571	421.697.415.442	99,63	1.693.592.558
01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	89.271.812.000	68.647.209.000	67.959.161.661	340.883.480	67.618.278.181	99,00	1.028.930.819
01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	28.332.237.000	25.698.341.000	25.695.752.370	983	25.695.751.387	99,99	2.589.613
01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	31.950.262.000	28.685.936.000	28.684.406.673	1.266.465	28.683.140.208	99,99	2.795.792
01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	25.358.807.000	24.124.588.000	24.122.235.008	1.804	24.122.233.204	99,99	2.354.796
01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	29.999.184.000	26.734.769.000	26.734.739.950	-	26.734.739.950	100,00	29.050
01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	30.461.186.000	28.281.918.000	28.281.877.135	2.370.535	28.279.506.600	100,00	2.411.400
01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	33.656.912.000	30.717.083.000	30.716.940.731	192	30.716.940.539	100,00	142.461
KP :				980.915.033.000	1.039.209.268.000	1.032.205.630.999	736.762.317	1.031.468.868.682	99,33	7.740.399.318
KD :				179.758.588.000	164.242.635.000	164.235.951.867	3.639.979	164.232.311.888	100,00	10.323.112
Total Setjen :				1.160.673.621.000	1.203.451.903.000	1.196.441.582.866	740.402.296	1.195.701.180.570	99,42	7.750.722.430
02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	84.400.737.000	74.902.301.000	75.012.285.983	132.773.348	74.879.512.635	100,15	22.788.365
KP :				84.400.737.000	74.902.301.000	75.012.285.983	132.773.348	74.879.512.635	100,15	22.788.365
Total Itjen :				84.400.737.000	74.902.301.000	75.012.285.983	132.773.348	74.879.512.635	100,15	22.788.365
03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	234.506.301.000	228.816.877.000	217.120.382.866	3.851.707	217.116.531.159	94,89	11.700.345.841
KP :				234.506.301.000	228.816.877.000	217.120.382.866	3.851.707	217.116.531.159	94,89	11.700.345.841
Total Ditjen Polpum :				234.506.301.000	228.816.877.000	217.120.382.866	3.851.707	217.116.531.159	94,89	11.700.345.841
04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	120.972.179.000	215.385.561.000	127.421.442.990	141.703.301	127.279.739.689	59,16	88.105.821.311
04	019080	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	376.431.000	-	-	-	-	-	-
04	020103	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	818.750.000	-	-	-	-	-	-
04	029134	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	1.919.869.000	-	-	-	-	-	-
04	030031	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	470.000.000	-	-	-	-	-	-
04	039667	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	2.012.403.000	32.000.000	32.000.000	-	32.000.000	100,00	-
04	039902	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH	392.845.000	-	-	-	-	-	-
04	045160	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI DI YOGYAKARTA	588.325.000	-	-	-	-	-	-
04	049061	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	1.670.624.000	-	-	-	-	-	-
04	050037	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JAWA TIMUR	884.129.000	-	-	-	-	-	-
04	059663	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	1.031.295.000	-	-	-	-	-	-
04	059667	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	470.000.000	-	-	-	-	-	-
04	060016	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI ACEH	777.922.000	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
04	060017	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ACEH	379.584.000	200.000.000	194.890.000	-	194.890.000	97,45	5.110.000
04	069084	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	1.970.899.000	-	-	-	-	-	-
04	079078	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	2.096.271.000	49.105.000	49.105.000	-	49.105.000	100,00	-
04	079108	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA UTARA	750.597.000	-	-	-	-	-	-
04	089106	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	1.916.636.000	-	-	-	-	-	-
04	090058	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RIAU	369.384.000	-	-	-	-	-	-
04	099403	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. RIAU	317.174.000	-	-	-	-	-	-
04	099438	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	2.118.909.000	88.520.000	88.318.940	-	88.318.940	99,77	201.060
04	100081	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. JAMBI	689.631.000	-	-	-	-	-	-
04	109074	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	1.832.800.000	96.176.000	96.176.000	-	96.176.000	100,00	-
04	110018	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	340.000.000	-	-	-	-	-	-
04	119082	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.784.910.000	203.562.000	203.450.766	-	203.450.766	99,95	111.234
04	119113	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN	728.618.000	-	-	-	-	-	-
04	129074	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	1.720.675.000	-	-	-	-	-	-
04	129097	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG	369.040.000	-	-	-	-	-	-
04	129098	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG	211.620.000	-	-	-	-	-	-
04	139078	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1.747.589.000	52.500.000	52.167.143	-	52.167.143	99,37	332.857
04	139103	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	350.000.000	-	-	-	-	-	-
04	139110	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KALIMANTAN BARAT	362.400.000	-	-	-	-	-	-
04	149072	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.653.560.000	-	-	-	-	-	-
04	149099	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	736.356.000	-	-	-	-	-	-
04	149130	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	162.296.000	-	-	-	-	-	-
04	159071	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.711.070.000	-	-	-	-	-	-
04	159182	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	687.141.000	-	-	-	-	-	-
04	159260	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. KALIMANTAN SELATAN	350.000.000	-	-	-	-	-	-
04	160035	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KALIMANTAN TIMUR	699.528.000	-	-	-	-	-	-
04	169185	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	838.924.000	-	-	-	-	-	-
04	170041	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SULAWESI UTARA	400.404.000	-	-	-	-	-	-
04	179088	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA	161.088.000	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
04	179223	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	2.035.232.000	53.000.000	53.000.000	-	53.000.000	100,00	-
04	179317	DK	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	569.747.000	-	-	-	-	-	-
04	189087	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.678.479.000	8.778.000	8.777.678	-	8.777.678	100,00	322
04	199080	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.833.518.000	57.948.000	57.947.500	-	57.947.500	100,00	500
04	199109	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN	772.600.000	-	-	-	-	-	-
04	200100	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. SULAWESI TENGGARA	350.000.000	-	-	-	-	-	-
04	209071	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1.417.242.000	-	-	-	-	-	-
04	209093	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	368.190.000	-	-	-	-	-	-
04	209095	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	176.331.000	-	-	-	-	-	-
04	219062	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROP. MALUKU	1.694.913.000	-	-	-	-	-	-
04	219162	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU	777.590.000	-	-	-	-	-	-
04	220015	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BALI	736.503.000	-	-	-	-	-	-
04	229068	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	1.670.692.000	33.890.000	33.889.040	-	33.889.040	100,00	960
04	229082	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI	400.000.000	-	-	-	-	-	-
04	239108	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	330.600.000	-	-	-	-	-	-
04	239236	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.827.734.000	-	-	-	-	-	-
04	239312	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	690.940.000	-	-	-	-	-	-
04	240055	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	420.000.000	-	-	-	-	-	-
04	249136	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.998.927.000	-	-	-	-	-	-
04	249138	DK	BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	569.746.000	8.416.000	8.415.235	-	8.415.235	99,99	765
04	249141	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	406.803.000	-	-	-	-	-	-
04	249174	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	267.924.000	-	-	-	-	-	-
04	250048	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	825.426.000	-	-	-	-	-	-
04	259084	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	148.193.000	-	-	-	-	-	-
04	259245	DK	BADAN PERBATASAN KERJASAMA DAERAH PROV. PAPUA	409.999.000	-	-	-	-	-	-
04	265165	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BENGKULU	330.000.000	-	-	-	-	-	-
04	269093	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU	1.804.312.000	-	-	-	-	-	-
04	289095	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	153.136.000	-	-	-	-	-	-
04	289174	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	1.693.555.000	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
04	289177	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI MALUKU UTARA	320.000.000	-	-	-	-	-	-
04	290033	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BANTEN	300.000.000	-	-	-	-	-	-
04	290100	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN	333.330.000	-	-	-	-	-	-
04	299348	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	1.608.468.000	-	-	-	-	-	-
04	309148	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG	1.651.100.000	-	-	-	-	-	-
04	309220	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	330.000.000	-	-	-	-	-	-
04	310097	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI GORONTALO	350.000.000	-	-	-	-	-	-
04	319061	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	1.627.421.000	163.000.000	162.900.000	-	162.900.000	99,94	100.000
04	319137	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO	360.840.000	-	-	-	-	-	-
04	320098	DK	BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	400.000.000	-	-	-	-	-	-
04	329116	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.637.070.000	-	-	-	-	-	-
04	330099	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PAPUA BARAT	459.856.000	-	-	-	-	-	-
04	339161	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	944.550.000	-	-	-	-	-	-
04	340166	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	1.634.812.000	-	-	-	-	-	-
04	340175	DK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI SULAWESI BARAT	350.000.000	-	-	-	-	-	-
04	349011	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT	146.113.000	21.325.000	21.155.904	-	21.155.904	99,21	169.096
04	350062	DK	BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	527.847.000	-	-	-	-	-	-
04	359002	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	144.629.000	-	-	-	-	-	-
04	417697	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.601.249.000	8.970.000	8.970.000	-	8.970.000	100,00	-
04	433316	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT	253.000.000	-	-	-	-	-	-
04	433317	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU	239.745.000	-	-	-	-	-	-
04	433318	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	222.487.000	-	-	-	-	-	-
04	433341	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI	238.077.000	23.806.000	23.806.000	-	23.806.000	100,00	-
04	433342	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	254.861.000	-	-	-	-	-	-
04	433343	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANGKA BELITUNG	145.584.000	-	-	-	-	-	-
04	433344	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	236.923.000	-	-	-	-	-	-
04	433345	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN	150.727.000	-	-	-	-	-	-
04	433347	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	153.083.000	-	-	-	-	-	-
04	433348	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	165.549.000	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
04	433349	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	147.035.000	-	-	-	-	-	-
04	433350	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	163.405.000	8.900.000	8.900.000	-	8.900.000	100,00	-
04	433351	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN	191.233.000	-	-	-	-	-	-
04	433352	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	156.799.000	-	-	-	-	-	-
04	433353	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU	159.165.000	-	-	-	-	-	-
04	484101	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH	269.330.000	-	-	-	-	-	-
04	484102	DK	BAPPEDA PROVINSI ACEH	428.387.000	-	-	-	-	-	-
04	484103	DK	INSPEKTORAT PROVINSI ACEH	289.116.000	-	-	-	-	-	-
04	484105	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA	281.331.000	-	-	-	-	-	-
04	484106	DK	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA (BAPPELITBANG PROVINSI SUMATERA UTARA)	491.278.000	-	-	-	-	-	-
04	484107	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA	304.764.000	-	-	-	-	-	-
04	484109	DK	BAPPEDA PROVINSI RIAU	433.081.000	-	-	-	-	-	-
04	484110	DK	INSPEKTORAT PROVINSI RIAU	254.995.000	-	-	-	-	-	-
04	484113	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	127.384.000	-	-	-	-	-	-
04	484115	DK	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	409.877.000	-	-	-	-	-	-
04	484116	DK	INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI	141.592.000	-	-	-	-	-	-
04	484118	DK	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	459.092.000	-	-	-	-	-	-
04	484119	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	269.926.000	-	-	-	-	-	-
04	484121	DK	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	434.541.000	-	-	-	-	-	-
04	484122	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	156.280.000	-	-	-	-	-	-
04	484124	DK	BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	399.613.000	-	-	-	-	-	-
04	484125	DK	INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	148.316.000	-	-	-	-	-	-
04	484127	DK	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	404.655.000	-	-	-	-	-	-
04	484128	DK	INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	136.955.000	-	-	-	-	-	-
04	484131	DK	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	357.561.000	-	-	-	-	-	-
04	484132	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	130.710.000	-	-	-	-	-	-
04	484134	DK	BAPPEDA PROVINSI BANTEN	394.578.000	-	-	-	-	-	-
04	484135	DK	INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN	120.959.000	-	-	-	-	-	-
04	484137	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT	276.487.000	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
04	484138	DK	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	470.727.000	-	-	-	-	-	-
04	484139	DK	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT	198.469.000	-	-	-	-	-	-
04	484145	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	218.617.000	-	-	-	-	-	-
04	484146	DK	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	452.663.000	-	-	-	-	-	-
04	484147	DK	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	193.541.000	-	-	-	-	-	-
04	484149	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIY	143.230.000	-	-	-	-	-	-
04	484150	DK	BAPPEDA PROVINSI DI YOGYAKARTA	387.265.000	-	-	-	-	-	-
04	484151	DK	INSPEKTORAT PROVINSI DI YOGYAKARTA	113.687.000	-	-	-	-	-	-
04	484153	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR	216.994.000	-	-	-	-	-	-
04	484154	DK	BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR	398.520.000	-	-	-	-	-	-
04	484155	DK	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	135.374.000	-	-	-	-	-	-
04	484157	DK	BAPPEDA PROVINSI BALI	400.144.000	-	-	-	-	-	-
04	484158	DK	INSPEKTORAT PROVINSI BALI	126.741.000	-	-	-	-	-	-
04	484160	DK	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	409.727.000	-	-	-	-	-	-
04	484161	DK	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	131.764.000	-	-	-	-	-	-
04	484163	DK	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	477.970.000	101.446.000	101.443.741	-	101.443.741	100,00	2.259
04	484164	DK	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	286.267.000	-	-	-	-	-	-
04	484166	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	968.951.000	-	-	-	-	-	-
04	484167	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	134.770.000	-	-	-	-	-	-
04	484169	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	413.996.000	-	-	-	-	-	-
04	484170	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	135.557.000	-	-	-	-	-	-
04	484172	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	158.618.000	-	-	-	-	-	-
04	484173	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	414.296.000	-	-	-	-	-	-
04	484176	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	235.095.000	-	-	-	-	-	-
04	484177	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	306.388.000	-	-	-	-	-	-
04	484178	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	244.180.000	-	-	-	-	-	-
04	484180	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	395.311.000	-	-	-	-	-	-
04	484181	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	116.502.000	-	-	-	-	-	-
04	484183	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA	456.173.000	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
04	484184	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA	180.127.000	-	-	-	-	-	-
04	484187	DK	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	391.480.000	-	-	-	-	-	-
04	484188	DK	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	119.545.000	-	-	-	-	-	-
04	484190	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT	386.956.000	-	-	-	-	-	-
04	484191	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT	116.669.000	-	-	-	-	-	-
04	484193	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	426.836.000	-	-	-	-	-	-
04	484194	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	162.663.000	-	-	-	-	-	-
04	484196	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	418.456.000	-	-	-	-	-	-
04	484197	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	117.052.000	-	-	-	-	-	-
04	484199	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	425.948.000	-	-	-	-	-	-
04	484200	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA	146.069.000	-	-	-	-	-	-
04	484202	DK	BAPPEDA PROVINSI MALUKU	901.382.000	-	-	-	-	-	-
04	484203	DK	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU	132.756.000	-	-	-	-	-	-
04	484205	DK	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	401.930.000	-	-	-	-	-	-
04	484206	DK	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA	123.322.000	-	-	-	-	-	-
04	484208	DK	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	303.099.000	-	-	-	-	-	-
04	484209	DK	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	123.645.000	-	-	-	-	-	-
04	484211	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT	208.814.000	-	-	-	-	-	-
04	484212	DK	BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT	296.527.000	-	-	-	-	-	-
04	484213	DK	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT	225.498.000	-	-	-	-	-	-
04	029142	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT	369.760.000	-	-	-	-	-	-
04	049073	DK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DI YOGYAKARTA	311.160.000	-	-	-	-	-	-
04	484174	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	125.722.000	-	-	-	-	-	-
04	484112	DK	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	389.252.000	-	-	-	-	-	-
KP :				120.972.179.000	215.385.561.000	127.421.442.990	141.703.301	127.279.739.689	59,16	88.105.821.311
DK :				105.500.000.000	1.211.342.000	1.205.312.947	-	1.205.312.947	99,50	6.029.053
Total Ditjen Bina Adwil :				226.472.179.000	216.596.903.000	128.626.755.937	141.703.301	128.485.052.636	59,39	88.111.850.364
05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	103.185.777.000	116.979.669.000	105.469.119.800	157.406.536	105.311.713.264	90,16	11.667.955.736
05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	17.807.583.000	18.154.587.000	16.848.967.517	7.100.898	16.841.866.619	92,81	1.312.720.381
05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	15.025.263.000	15.386.593.000	14.455.850.958	96.486.490	14.359.364.468	93,95	1.027.228.532

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	15.073.792.000	15.249.975.000	14.900.169.247	1.490.487	14.898.678.760	97,71	351.296.240
			KP :	103.185.777.000	116.979.669.000	105.469.119.800	157.406.536	105.311.713.264	90,16	11.667.955.736
			KD :	47.906.638.000	48.791.155.000	46.204.987.722	105.077.875	46.099.909.847	94,70	2.691.245.153
			Total Ditjen Bina Pemdes :	151.092.415.000	165.770.824.000	151.674.107.522	262.484.411	151.411.623.111	91,50	14.359.200.889
06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	223.283.824.000	416.948.656.000	356.816.541.273	253.366.209	356.563.175.064	85,58	60.385.480.936
			KP :	223.283.824.000	416.948.656.000	356.816.541.273	253.366.209	356.563.175.064	85,58	60.385.480.936
			Total Ditjen Bina Bangda :	223.283.824.000	416.948.656.000	356.816.541.273	253.366.209	356.563.175.064	85,58	60.385.480.936
07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	99.139.263.000	95.199.015.000	71.440.393.395	154.642.918	71.285.750.477	75,04	23.913.264.523
			KP :	99.139.263.000	95.199.015.000	71.440.393.395	154.642.918	71.285.750.477	75,04	23.913.264.523
			Total Ditjen Otda :	99.139.263.000	95.199.015.000	71.440.393.395	154.642.918	71.285.750.477	75,04	23.913.264.523
08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.223.059.937.000	2.001.814.306.000	1.188.968.100.608	614.720.508	1.188.353.380.100	59,39	813.460.925.900
			KP :	2.223.059.937.000	2.001.814.306.000	1.188.968.100.608	614.720.508	1.188.353.380.100	59,39	813.460.925.900
			Total Ditjen Dukcapil :	2.223.059.937.000	2.001.814.306.000	1.188.968.100.608	614.720.508	1.188.353.380.100	59,39	813.460.925.900
09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	110.291.004.000	109.386.087.000	78.250.597.845	88.810.340	78.161.787.505	71,54	31.224.299.495
			KP :	110.291.004.000	109.386.087.000	78.250.597.845	88.810.340	78.161.787.505	71,54	31.224.299.495
			Total Ditjen Bina Keuda :	110.291.004.000	109.386.087.000	78.250.597.845	88.810.340	78.161.787.505	71,54	31.224.299.495
11	403222	KP	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	58.608.338.000	57.481.498.000	50.937.321.342	5.819.988	50.931.501.354	88,62	6.549.996.646
			KP :	58.608.338.000	57.481.498.000	50.937.321.342	5.819.988	50.931.501.354	88,62	6.549.996.646
			Total BSKDN :	58.608.338.000	57.481.498.000	50.937.321.342	5.819.988	50.931.501.354	88,62	6.549.996.646
12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	118.584.140.000	124.879.480.000	125.458.647.824	1.418.914.508	124.039.733.316	100,46	839.746.684
12	027114	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	26.243.013.000	32.762.103.000	32.730.079.239	6.791.327	32.723.287.912	99,90	38.815.088
12	027177	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	21.718.866.000	22.896.330.000	22.893.928.322	2.846.864	22.891.081.458	99,99	5.248.542
12	403216	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	25.511.026.000	33.069.255.000	32.977.567.171	930.530	32.976.636.641	99,72	92.618.359
12	506137	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	17.370.812.000	23.224.312.000	23.079.913.327	7.541.161	23.072.372.166	99,38	151.939.834
12	506138	KD	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI	11.373.042.000	21.352.200.000	21.298.171.978	2.705.082	21.295.466.896	99,75	56.733.104
			KP :	118.584.140.000	124.879.480.000	125.458.647.824	1.418.914.508	124.039.733.316	100,46	839.746.684
			KD :	102.216.759.000	133.304.200.000	132.979.660.037	20.814.964	132.958.845.073	99,76	345.354.927
			Total BPSPDM :	220.800.899.000	258.183.680.000	258.438.307.861	1.439.729.472	256.998.578.389	100,10	1.185.101.611
			KP :	4.356.946.533.000	4.481.002.718.000	3.429.100.464.925	3.708.771.680	3.425.391.693.245	76,53	1.055.611.024.755
			KD :	329.881.985.000	346.337.990.000	343.420.599.626	129.532.818	343.291.066.808	99,16	3.046.923.192
			DK :	105.500.000.000	1.211.342.000	1.205.312.947	-	1.205.312.947	99,50	6.029.053
			Total Kementerian :	4.792.328.518.000	4.828.552.050.000	3.773.726.377.498	3.838.304.498	3.769.888.073.000	78,15	1.058.663.977.000



LAMPIRAN III

REKAPITULASI PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG SAMPAI DENGAN 2025

REKAPITULASI PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG SAMPAI DENGAN 2025

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	ESELON 1	KODE SATKER	SATKER	DONOR	JENIS HIBAH LANGSUNG	KETERANGAN HIBAH	NOMOR REGISTER HIBAH	NILAI HIBAH	NOMOR NASKAH PENJANJIAN HIBAH	TANGGAL NPH	NOMOR BAST	TANGGAL BAST
1	01	403200	Sekretariat Jenderal	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Barang	5 (lima) kursi dan 5 (lima) tempat sampah	2MZRG9ZA	22.644.000	B.27-/NS/03/2025 dan 900/111/KPA	5 Maret 2025	B.28-/NS/03/2025 dan 900/112/KPA	5 Maret 2025
2	01	403200	Sekretariat Jenderal	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Barang	bangunan flexible workspace	2ZXYZ9DA	127.356.000	B.26-/NS/03/2025 dan 100.4.7.1/1556/SJ	5 Maret 2025	B.29-/NS/03/2025 dan 100.4.7.1/1557/SJ	5 Maret 2025
3	01	403200	Sekretariat Jenderal	Pemerintah Australia	Jasa	<i>Synergies and Collaboration for Basic Service Delivery Acceleration atau Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)</i>	27BMXZ9A	107.883.500			04/BAST-KEMENDAGRI/2/2025	17 Februari 2025
4	01	403200	Sekretariat Jenderal	USAID	Jasa	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT)	2F5GEXNA	20.875.937.796			246/USAID-INA/BAST-Services/DRG	6 Februari 2025
5	01	448302	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	IKAPTK Kota Medan	Barang	Hibah Spekeae SLP Audio DGS15ST (6 set). Subwoofer SPL Audio BX18A (3 set). Microphone Wireless DGM30 (3 buah). Mixer SPL Audli DGM30 (3 buah) dan Handy Talky(10 buah)	2GSU5CGA	162.650.000				
6	01	448302	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	IKAPTK Kab Deli Serdang	Barang	100 buah tempat tidur / ranjang besi	2PFTSQYA	275.000.000			000.3.3.2/124/IPDN.19	6 Agustus 2025
7	01	448302	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Purna Praja Angkatan XX	Barang	100 buah tempat tidur / ranjang besi	2LS2FSAA	275.000.000			01/004/SK-HIBAH/VI/2025	23 Mei 2025
8	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	<i>Gyeonggi Provincial Social Welfare Foundation GO & DO of The Republic of Korea</i>	Barang	2 unit mobil ambulance	2W1KBTBA	2.394.372.367	000.3.3.2/2175/BAK	23 Desember 2024	000.3.3.2/198/BAK	7 Maret 2025
9	01	403200	Sekretariat Jenderal	Pemerintah Australia	Jasa	hibah jasa dalam rangka Synergies and Collaboration for Basic Service Delivery Acceleration atau Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)	27BMXZ9A	286.550.209			07/BAST-KEMENDAGRI/08/2025	11 Agustus 2025
10	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	<i>Jeju Special Self-Governing Province</i>	Barang	2 unit Mobil Pompa Pemadam Kebakaran, 1 unit Mobil Tanki air Pemadam Kebakaran, 1 unit Mobil Chemical Pemadam Kebakaran, 2 unit Mobil Komando Pemadam Kebakaran	23A8TT2A	13.724.571.240	000.3.3.2/262/BAK	14 Juli 2025	000.3.3.2/397/BAK	5 November 2025
11	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	<i>Social Welfare Foundation Go & Do</i>	Barang	hibah barang penyediaan pakaian pelindung kebakaran berupa 20.000 unit pakaian tahan debu dan 200 unit pakaian penyelamatan kebakaran	2ER31BDA	6.068.320.000	000.3.3.2/291/BAK	21 Agustus 2025	000.3.3.2/353/BAK	9 Oktober 2025
12	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	<i>Ehime Prefectural Government</i>	Barang	4 unit mobil ambulance	2ZWUGJWA	107.600.000	000.3.3.2/200/BAK	24 Maret 2025	000.3.3.2/396/BAK	5 November 2025
13	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Pemerintah Australia	Jasa	<i>Synergies and Collaboration for Basic Service Delivery Acceleration atau Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)</i>	27BMXZ9A	5.687.096.354			12/BAST-KEMENDAGRI/08/2025	11 Agustus 2025
14	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Pemerintah Australia	Jasa	<i>Synergies and Collaboration for Basic Service Delivery Acceleration atau Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)</i>	27BMXZ9A	5.755.464.825			05/BAST-KEMENDAGRI/2/2025	17 Februari 2025
15	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	UNICEF	Uang	Program Kerja Sama Pemerintah RI-Unicef Periode 2021-2025 Lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah	2C7EJQHA	4.494.693.200	CP-20.08.2021	20 Agustus 2021		
16	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	UNICEF	Uang	Program Kerja Sama Pemerintah RI-Unicef Periode 2021-2025 Lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah	2C7EJQHA	(262.463.088)	CP-20.08.2021	20 Agustus 2021		
17	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	UNFPA	Jasa	Implementation of UNFPA-Funded Workplans Relating To The 2021-2025 UNFPA Country Programme for Republic Indonesia	2TCK92FA	23.013.268			900.1.4/9690/BANG DA dan 499/RFP/12-2025	17 Desember 2025
18	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	UNFPA	Uang	Implementation of UNFPA-Funded Workplans Relating To The 2021-2025 UNFPA Country Programme for Republic Indonesia	2TCK92FA	2.985.429.800	IPA-17 Feb 2021	17 Februari 2025		

hu f

REKAPITULASI PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG SAMPAI DENGAN 2025

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	ESELON 1	KODE SATKER	SATKER	DONOR	JENIS HIBAH LANGSUNG	KETERANGAN HIBAH	NOMOR REGISTER HIBAH	NILAI HIBAH	NOMOR NASKAH PENJANJIAN HIBAH	TANGGAL NPH	NOMOR BAST	TANGGAL BAST
19	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	UNFPA	Uang	Implementation of UNFPA-Funded Workplans Relating To The 2021-2025 UNFPA Country Programme for Republic Indonesia	2TCK92FA	(562.500)	IPA-17 Feb 2021	17 Februari 2025		
20	01	403200	Sekretariat Jenderal	Pemerintah Australia	Jasa	Synergies and Collaboration for Basic Service Delivery Acceleration atau Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)	27BMXZ9A	2.089.667.496				
21	01	403200	Sekretariat Jenderal	Pemerintah Australia	Jasa	Synergies and Collaboration for Basic Service Delivery Acceleration atau Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)	27BMXZ9A	3.752.898.091				
22	01	403200	Sekretariat Jenderal	Pemprov. DKI Jakarta	Barang	Hibah server dan switch	2JWR4B3A	19.620.000.000	17 TAHUN 2025 dan 000.3.3.2/4804/SJ	1 September 2025	2 TAHUN 2025 dan 000.3.3.2/4853/SJ	3 September 2025
23	01	448302	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Gramedia	Barang	1 buah rak buku	28WEV1QA	40.450.000			000.3.3.2/230/IPDN.19	22 Oktober 2025
24	01	448302	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	IKAPTK Halmahera Selatan	Barang	55 buah kursi belajar	2AAFHH1A	100.001.000			000.3.3.2/204/IPDN.19	25 Oktober 2025
25	01	448302	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Purna Praja Angkatan 32 Adhimuktibrata	Barang	823 eksemplar buku cetak	2FD6D3LA	85.191.000			000.3.3.2/145/IPDN.19	4 September 2025
26	01	448302	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Purna Praja Angkatan 32 Adhimuktibrata	Barang	442 eksemplar buku digital	2JCWLNR	55.834.500			000.3.3.2/144/IPDN.19	4 September 2025
27	07	621892	Ditjen Otonomi Daerah	USAID	Jasa	Usaid Bilateral Development Cooperation Framework (BDCF) 497-Aa-040 (Local Governance Portfolio)	2F5GEXNA	4.674.387.330			247/USAID-INA/BAST-Service/DRG	10 April 2025
28	08	634082	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kota Manado	Uang	penyediaan blanko KTP-el sebanyak 49.000 keping	217BRSEA	498.918.000	800/D.08/DUKCAPIL/132/2025 dan 000.3.3.2/9932/SES	27 Agustus 2025		
29	08	634082	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Uang	penyediaan blanko KTP-el sebanyak 196.000 keping	22NE265A	1.995.672.000	470/40/438.5.12/2025 dan 400.8.1.2/4116/SES	10 April 2025		
30	08	634082	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kota Pontianak	Uang	penyediaan blanko KTP-el sebanyak 49.000 keping	27CBP2WA	498.918.000	94/NPHD-XI/2025 dan 000.3.3.2/13756/SES	5 November 2025		
31	08	634082	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Uang	penyediaan blanko KTP-el sebanyak 50.000 keping	27RUPRFA	509.100.000	B.541/Disdukcapil/Sat.1/900.1.13.5/03/2025 dan 400.8.1.2/3328/SES	17 Maret 2025		
32	08	634082	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kabupaten Kediri	Uang	penyediaan blanko KTP-el sebanyak 50.000 keping	2AC17H4A	509.100.000	000.4.3.2/3940/418.23/2025 dan 000.3.3.2/12087/SES	7 Oktober 2025		
33	08	634082	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kota Pekanbaru	Uang	penyediaan blanko KTP-el sebanyak 50.000 keping	2ERCHUDA	509.100.000	P.P.K.02.01/DUKCAPIL/724/2025 dan 000.3.3.2/8028/SES	22 Juli 2025		
34	08	634082	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	Uang	penyediaan blanko KTP-el sebanyak 55.000 keping	2F91LT2A	560.010.000	B-000.7.7.1/5997/Disdukcapil dafduk dan 000.3.3.2/8310/SES	28 Juli 2025		
35	08	634082	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kabupaten Indramayu	Uang	penyediaan blanko KTP-el sebanyak 35.000 keping	2L4JNUXA	356.370.000	400.12.1/6771/Discapil dan 000.3.3.2/12485/SES	15 Oktober 2025		
36	08	634082	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kota DKI Jakarta	Uang	penyediaan blanko KTP-el sebanyak 1.964.000 keping	2M2DRLHA	19.997.448.000	5884/UD.08.03 dan 000.3.3.2/11807/Ses	1 Oktober 2025		
37	08	634082	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kabupaten Luwu	Uang	penyediaan blanko KTP-el sebanyak 20.000 keping	2MASJMSA	203.640.000	470/145/Disdukcapil dan 000.3.3.2/4904/SES	2 Mei 2025		
38	08	634082	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kabupaten Bekasi	Uang	penyediaan blanko KTP-el sebanyak 146.000 keping	2NQVMEJA	1.486.572.000	400.12/4435/disdukcapil/2025 dan 000.3.3.2/13063/SES	23 Oktober 2025		
39	08	634082	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kabupaten Cianjur	Uang	penyediaan blanko KTP-el sebanyak 137.000 keping	2NT8ZHQA	1.394.934.000	900/648/disdukcapil/2025 dan 000.3.3.2/9931/SES	27 Agustus 2025		
40	08	634082	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kabupaten Malang	Uang	penyediaan blanko KTP-el sebanyak 100.000 keping	2P2VRGGA	1.018.200.000	400.12.2.1/6343/35.07.311/2025 dan 000.3.3.2/11805/SES	1 Oktober 2025		

REKAPITULASI PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG SAMPAI DENGAN 2025

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	ESELON 1	KODE SATKER	SATKER	DONOR	JENIS HIBAH LANGSUNG	KETERANGAN HIBAH	NOMOR REGISTER HIBAH	NILAI HIBAH	NOMOR NASKAH PENJANJIAN HIBAH	TANGGAL NPH	NOMOR BAST	TANGGAL BAST
41	08	634082	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kabupaten Kayong Utara	Uang	penyediaan blanko KTP-el sebanyak 10.000 keping	2PLURYBA	101.820.000	100/053/PEM/X/2025 dan 000.3.3.2/13352/SES	28 Oktober 2025		
42	08	634082	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kabupaten Tangerang	Uang	penyediaan blanko KTP-el sebanyak 785.000 keping	2QF7VN8A	7.997.961.000	T/400.12/1106.1/NPHD/VIII/Disdukcapil/2025 dan 000.3.3.2/8868/SES	4 Agustus 2025		
43	08	634082	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kota Balikpapan	Uang	penyediaan blanko KTP-el sebanyak 106.000 keping	2TA9F4JA	1.079.292.000	470/701/Disdukcapil dan 400.8.1.2/3444/SES	18 Maret 2025		
44	08	634082	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kota Batam	Uang	penyediaan blanko KTP-el sebanyak 200.000 keping	2TD42XZA	2.036.400.000	1163/400.12.1/IX.2025 dan 000.3.3.2/11055/SES	18 September 2025		
45	08	634082	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kota Samarinda	Uang	penyediaan blanko KTP-el sebanyak 50.000 keping	2THNQHYA	509.100.000	100.4.7/01/100.13/VII/2025 dan 000.3.3.2/7434/SES	7 Juli 2025		
46	08	634082	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kabupaten Mempawah	Uang	penyediaan blanko KTP-el sebanyak 19.500 keping	2VGD84WA	198.549.000	500.12/5512/kesbangpol dan 000.3.3.2/7969/SES	21 Juli 2025		
47	08	634082	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kabupaten Jember	Uang	penyediaan blanko KTP-el sebanyak 68.000 keping	2XQR7AXA	692.376.000	400.12.1/2159.1/35.09.320/2025 dan 000.3.3.2/12486/SES	15 Oktober 2025		
48	09	662766	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	Pemerintah Australia	Jasa	<i>Synergies and Collaboration for Basic Service Delivery Acceleration atau Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)</i>	27BMXZ9A	279.095.788			11/BAST-KEMENDAGRI/08/2025	11 Agustus 2025
49	09	662766	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	Pemerintah Australia	Jasa	<i>Synergies and Collaboration for Basic Service Delivery Acceleration atau Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)</i>	27BMXZ9A	1.063.533.228			07/BAST-KEMENDAGRI/08/2025	11 Agustus 2025
50	09	662766	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	USAID	Jasa	<i>Synergies and Collaboration for Basic Service Delivery Acceleration atau Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)</i>	2F5GEXNA	2.986.348.950			251/USAID-INA/BAST-Service/DRG	07 April 2025
51	01	403200	Sekretariat Jenderal	PT Koin Baju Global	Barang	Hibah Barang berupa pakaian untuk penanggulangan bencana di Provinsi Aceh	26H1CE3A	89.100.000	900/385/KPA	17 Desember 2025	900/386/KPA	17 Desember 2025
52	01	403200	Sekretariat Jenderal	PT Panca Prima Maju Bersama	Barang	Hibah Barang berupa pakaian untuk penanggulangan bencana di Provinsi Aceh	275778DA	900.000.000	900/375/KPA	17 Desember 2025	900/376/KPA	17 Desember 2025
53	01	403200	Sekretariat Jenderal	PT Daehan Global	Barang	Hibah Barang berupa pakaian untuk penanggulangan bencana di Provinsi Aceh	2FCN7X7A	994.500.000	900/390/KPA	26 Desember 2025	900/388/KPA	19 Desember 2025
54	01	403200	Sekretariat Jenderal	PT Daehan Global Brebes	Barang	Hibah Barang berupa pakaian untuk penanggulangan bencana di Provinsi Aceh	2J48EY9A	1.000.000.000	900/387/KPA	17 Desember 2025	900/389/KPA	24 Desember 2025
55	01	403200	Sekretariat Jenderal	PT Daehan Global	Barang	Hibah Barang berupa pakaian untuk penanggulangan bencana di Provinsi Aceh	2PGH92WA	548.025.000	900/377/KPA	17 Desember 2025	900/378/KPA	17 Desember 2025
56	01	403200	Sekretariat Jenderal	PT Daehan Global Brebes	Barang	Hibah Barang berupa pakaian untuk penanggulangan bencana di Provinsi Aceh	2XC1C5BA	1.293.685.000	900/379/KPA	17 Desember 2025	900/380/KPA	17 Desember 2025
								144.836.754.354				



LAMPIRAN IV

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.403200.SEKRETARIAT JENDERAL										
	Program Dukungan Manajemen									
		Layanan Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal								
			Kerjasama Dalam Negeri	500.669.000	500.481.694	99,96	15	Kesepakatan	15	100,00
			Kerjasama Luar Negeri	988.175.000	986.708.878	99,85	20	Kesepakatan	20	100,00
			Layanan Dukungan Manajemen Biro Hukum	1.018.241.000	1.021.676.250	100,34	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Dukungan Manajemen Pusat Fasilitas Kerja Sama	668.274.000	667.538.568	99,89	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Fasilitas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	2.013.076.000	2.015.767.731	100,13	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Fasilitas Telaahan Kebijakan Pusat dan Kebijakan Daerah	1.018.737.000	1.018.336.928	99,96	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Hukum	575.159.000	577.775.709	100,45	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Non Litigasi Hukum	266.050.000	266.050.000	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Rekomendasi Perjalanan Luar Negeri	226.505.000	226.339.900	99,93	1	layanan	1	100,00
			Layanan Umum	4.803.115.000	4.753.842.587	98,97	1	Layanan	1	100,00
			Penanganan Perkara Litigasi	1.614.023.000	1.614.023.000	100,00	80	Perkara	80	100,00
		Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal								
			Layanan BMN	606.077.000	605.328.691	99,88	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Dukungan Manajemen Biro Administrasi Pimpinan	1.456.578.000	1.455.549.910	99,93	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Dukungan Manajemen Biro Keuangan dan Aset	507.459.000	506.815.774	99,87	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Dukungan Manajemen Biro Perencanaan	2.969.177.000	2.967.168.854	99,93	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Dukungan Manajemen Biro Umum	89.963.000	88.098.249	97,93	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Ketatausahaan dan Koordinasi Tugas Pimpinan	20.505.418.000	20.496.184.323	99,95	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Manajemen Keuangan	929.103.000	928.750.321	99,96	1	Dokumen	1	100,00
			Layanan Manajemen Keuangan Kementerian Dalam Negeri	177.495.000	177.251.000	99,86	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	174.639.000	173.133.697	99,14	1	Dokumen	1	100,00
			Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Jenderal	333.217.000	332.265.472	99,71	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	484.171.000	480.636.101	99,27	1	Dokumen	1	100,00
			Layanan Penyusunan Dokumen Implementasi SAKIP, Manajemen Kinerja dan Penugasan Lainnya Bidang Monitoring dan Evaluasi lingkup Kemendagri	1.471.860.000	1.466.855.539	99,66	1	Dokumen	1	100,00
			Layanan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko lingkup Kemendagri	105.550.000	105.011.560	99,49	1	Dokumen	1	100,00
			Layanan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Sekretariat Jenderal	100.891.000	100.853.005	99,96	1	Dokumen	1	100,00
			Layanan Penyusunan Dokumen Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Jenderal	356.845.000	353.872.228	99,17	1	Dokumen	1	100,00
			Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Jenderal	429.362.000	426.766.625	99,40	1	Dokumen	1	100,00
			Layanan Penyusunan Dokumen SPIP lingkup Kemendagri	87.160.000	86.713.200	99,49	1	Dokumen	1	100,00
			Layanan Penyusunan Kebijakan Belanja Kegiatan Kementerian Dalam Negeri	1.320.685.000	1.320.136.626	99,96	1	Dokumen	1	100,00
			Layanan Penyusunan Kebijakan Program dan Kegiatan Kemendagri	1.520.140.000	1.519.587.137	99,96	1	Dokumen	1	100,00
			Layanan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) untuk Kementerian/Lembaga dengan Jumlah di atas 6 unit	110.791.000	110.598.095	99,83	1	Dokumen	1	100,00
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	159.175.000	159.060.456	99,93	3	Dokumen	3	100,00
			Layanan Perkantoran	285.247.957.000	280.992.348.374	98,51	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Prasarana Internal	7.152.178.000	7.146.807.714	99,92	5	Unit	5	100,00
			Layanan Protokol	3.764.286.000	3.761.329.600	99,92	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Sarana Internal	8.116.947.000	8.108.685.467	99,90	350	Unit	280	80,00
			Layanan Umum	1.540.944.000	1.531.527.401	99,39	1	Layanan	1	100,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal								
			Layanan Data dan Informasi	2.453.195.000	2.447.635.507	99,77	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Dukungan Manajemen Pusat Data dan Sistem Informasi	1.626.058.000	1.624.681.154	99,92	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Dukungan Manajemen Pusat Penerangan	496.045.000	495.958.930	99,98	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	112.000.000	111.770.200	99,79	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Pengaduan	489.263.000	489.254.258	100,00	1	layanan	1	100,00
			Layanan Publikasi	20.129.796.000	20.129.007.372	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Umum	620.347.000	619.869.438	99,92	1	Layanan	1	100,00
			Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan PPID Kemendagri	821.047.000	820.998.748	99,99	1	Layanan	1	100,00
			Pengadaan Data Center	134.779.095.000	134.479.094.034	99,78	1	Unit	1	100,00
			Pengadaan Jaringan	851.015.000	850.542.500	99,94	3	Unit	3	100,00
			Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5.073.356.000	5.072.097.724	99,98	3	Unit	3	100,00
			Pengadaan Sistem Keamanan	674.972.000	674.971.890	100,00	1	Unit	1	100,00
			Pengelolaan Aplikasi Situs Web ULA	70.235.000	70.149.000	99,88	1	Sistem Informas	1	100,00
			Pengelolaan dan Implementasi SI Manajemen	346.108.000	341.502.700	98,67	1	Sistem Informas	1	100,00
			Pengelolaan Implementasi SIPD	12.146.989.000	12.068.275.206	99,35	10	Sistem Informas	9	90,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal								
			Asistensi dan Supervisi Kelembagaan Sekretariat Daerah	127.309.000	126.909.000	99,69	38	Provinsi	38	100,00
			Asistensi dan Supervisi Ketatalaksanaan Pemda	12.999.000	12.799.000	98,46	38	Provinsi	38	100,00
			Asistensi dan Supervisi Reformasi Birokrasi Pemda	372.735.000	372.734.900	100,00	38	Provinsi	38	100,00
			Layanan Administrasi dan Konsultasi Pemda	143.750.000	143.750.000	100,00	38	Provinsi	38	100,00
			Layanan Dukungan Manajemen Biro Kepegawaian	537.379.000	537.189.673	99,96	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Dukungan Manajemen Biro Organisasi dan Tata Laksana	741.412.000	741.187.977	99,97	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Manajemen SDM	9.249.914.000	9.242.281.768	99,92	3.287	Orang	3.287	100,00
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.278.073.000	1.277.408.947	99,95	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi	600.445.000	599.265.900	99,80	1	layanan	1	100,00
			Penilaian Kompetensi Jabatan administrator, pengawas dan fungsional di Lingkungan Kemendagri	30.000	-	0,00	120	Orang	-	0,00
			Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemendagri	7.362.000	7.340.835	99,71	360	Orang	-	0,00
			Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemendagri	30.000	-	0,00	180	Orang	-	0,00
01.483005.DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU										
	Program Dukungan Manajemen									
		Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu								
			Layanan Bantuan Hukum	6.800.000	4.250.000	62,50	1	Layanan	-	0,00
			Layanan Data dan Informasi	51.950.000	44.530.000	85,72	1	Layanan	1	100,00

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	172.653.000	162.819.660	94,30	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Hukum	118.190.000	83.386.000	70,55	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	33.071.730.000	32.887.134.166	99,44	1	layanan	1	100,00
			Layanan Penilaian Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu	4.464.721.000	4.329.369.134	96,97	76	Lembaga	52	68,42
			Layanan Perkantoran	26.017.490.000	25.844.043.318	99,33	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Protokol	50.040.000	33.014.000	65,98	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.780.400.000	2.780.399.260	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Layanan Umum	1.913.235.000	1.790.216.123	93,57	1	Layanan	1	100,00
03.027210.DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM										
	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum									
		Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan								
			Bantuan Keuangan ke Partai Politik	134.489.125.000	134.489.125.000	100,00	8	Lembaga	8	100,00
			Bimbingan Teknis Tata Kelola Manajemen Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	2.000.000.000	777.386.034	38,87	2.000	Orang	2.000	100,00
			Fasilitasi dan Evaluasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	92.387.000	92.386.320	100,00	8	Laporan	8	100,00
			Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	500.000.000	280.568.000	56,11	19	rah (Prov/Kab/h	19	100,00
			Fasilitasi Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi	525.676.000	190.488.000	36,24	19	rah (Prov/Kab/h	19	100,00
			Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Partai Politik	261.352.000	193.123.638	73,89	8	Lembaga	8	100,00
			Forum Koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Bidang Politik Dalam Negeri	482.718.000	286.099.000	59,27	1	forum	1	100,00
			Indeks Kinerja Ormas	200.000.000	184.610.000	92,31	38	rah (Prov/Kab/h	38	100,00
			Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	1.707.550.000	1.707.542.442	100,00	2	pmendasi Kebij	2	100,00
			Kinerja daerah dalam pelayanan dan pengawasan ormas	1.150.000.000	1.056.161.874	91,84	38	rah (Prov/Kab/h	38	100,00
			Koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah bidang organisasi kemasyarakatan	1.950.000.000	886.292.066	45,45	5	forum	5	100,00
			Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Pasca Pilkada Serentak	240.000.000	90.713.880	37,80	3	Laporan	3	100,00
			Pembinaan Kelompok Masyarakat	700.000.000	265.173.220	37,88	220	ompok Masyara	220	100,00
			Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	600.000.000	263.048.359	43,84	400	Orang	400	100,00
			Pengembangan Literasi Politik Masyarakat	813.435.000	486.261.319	59,78	6	forum	6	100,00
			Penguatan Demokrasi Bagi Masyarakat	297.549.000	297.548.260	100,00	2	rah (Prov/Kab/h	2	100,00
			Peningkatan Kapasitas Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	479.333.000	334.227.945	69,73	38	rah (Prov/Kab/h	38	100,00
		Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya								
			Fasilitasi Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	288.750.000	157.468.021	54,53	20	rah (Prov/Kab/h	20	100,00
			Fasilitasi Pembinaan Kerukunan Antar dan Intra Suku , Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan, Ras dan Golongan	1.000.000.000	373.658.785	37,37	5	rah (Prov/Kab/h	5	100,00
			Fasilitasi penanganan ketahanan ekonomi dan Kesenjangan Ekonomi	333.035.000	182.326.439	54,75	38	rah (Prov/Kab/h	38	100,00
			Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.	1.000.000.000	317.010.324	31,70	38	rah (Prov/Kab/h	38	100,00
			Fasilitasi Penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	200.000.000	93.787.546	46,89	38	rah (Prov/Kab/h	38	100,00
			Fasilitasi Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan dalam Membangun Harmoni Kebangsaan untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	426.553.000	258.747.432	60,66	38	rah (Prov/Kab/h	38	100,00
			Fasilitasi penguatan Nasionalisme Bagi Generasi Muda Dalam Menggelorakan Nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	500.000.000	322.669.683	64,53	500	Orang	500	100,00
			Fasilitasi Penguatan Nilai- Nilai Sejarah Dalam Menumbuhkan semangat Nasionalisme Dalam Rangka Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	300.000.000	136.675.723	45,56	20	rah (Prov/Kab/h	20	100,00
			Fasilitasi Peningkatan Kesadaran Akan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Menjaga Keutuhan NKRI	276.860.000	149.974.731	54,17	20	rah (Prov/Kab/h	20	100,00
			Fasilitasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai- nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI Bagi Aparatur	841.911.000	413.652.795	49,13	180	Orang	180	100,00
			Fasilitasi Penguatan Seni dan Budaya Indonesia dalam rangka Ketahanan Identitas Bangsa	164.824.000	92.225.000	55,95	38	rah (Prov/Kab/h	38	100,00
			Indeks Harmoni Indonesia	400.000.000	236.829.115	59,21	1	Kajian	1	100,00
			Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	300.000.000	20.670.000	6,89	12	rah (Prov/Kab/h	12	100,00
			Kampanye Gerakan Menghalau Isu Hoax dan Isu SARA dalam rangka menjaga stabilitas politik dalam negeri, Trantibunlinmas	162.733.000	126.272.824	77,60	5	rah (Prov/Kab/h	5	100,00
			Komunikasi Sosial dan Pembahasan isu-isu strategis bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	613.887.000	437.805.780	71,32	38	rah (Prov/Kab/h	38	100,00
			Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan pembahasan isu strategis Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Dalam Menjaga Keutuhan NKRI	496.662.000	330.318.217	66,51	20	rah (Prov/Kab/h	20	100,00
			Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Daerah dalam Menjaga Persatuan dan Keutuhan Bangsa.	466.751.000	231.238.970	49,54	38	rah (Prov/Kab/h	38	100,00
			Penguatan Kinerja PPWK di daerah	200.000.000	98.797.051	49,40	38	rah (Prov/Kab/h	38	100,00
			Peningkatan Kesadaran Bela Negara melalui Kreatifitas Pemuda dalam menjaga Persatuan dan Keutuhan NKRI	297.499.000	200.834.999	67,51	15	rah (Prov/Kab/h	15	100,00
			Tim terpadu PKS daerah yang efektif	1.200.000.000	412.338.580	34,36	38	rah (Prov/Kab/h	38	100,00
			Workshop dan seminar wawasan kebangsaan di daerah otonomi baru	2.007.163.000	2.007.112.737	100,00	4	rah (Prov/Kab/h	4	100,00
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional								
			Deteksi Dini	100.000.000	64.442.420	64,44	417	laporan	417	100,00
			Fasilitasi kewaspadaan nasional	1.829.178.000	1.048.617.409	57,33	38	rah (Prov/Kab/h	38	100,00
			Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia	36.421.000	36.421.000	100,00	2	forum	2	100,00
			Kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	2.000.000.000	1.743.064.582	87,15	200	Orang	100	50,00
			Kebijakan / Regulasi Bidang Kewaspadaan Nasional	100.000.000	74.849.000	74,85	1	pmendasi Kebij	1	100,00
			Komunikasi Sosial Bidang Kewaspadaan Nasional	1.834.401.000	737.501.411	40,20	10	forum	10	100,00
			Terlaksananya fasilitasi pelayanan dan perizinan penelitian orang asing dan lokal	100.000.000	87.221.700	87,22	300	Orang	300	100,00
07.621892.DITJEN OTONOMI DAERAH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								
			Kabupaten/kota yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD)	249.736.000	249.700.000	99,99	234	rah (Prov/Kab/h	56	23,93
			Permendagri Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 terkait Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah	76.264.000	33.629.500	44,10	1	PerMen	-	0,00
			Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD)	2.529.810.000	1.420.538.694	56,15	16	rah (Prov/Kab/h	6	37,50

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Rekomendasi Peningkatan Kapasitas Kab/Kota Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	60.333.000	16.346.000	27,09	1	Rekomendasi Kebij	1	100,00
			Rekomendasi Peningkatan Kapasitas Provinsi Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	173.957.000	57.427.500	33,01	1	Rekomendasi Kebij	1	100,00
			Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	709.900.000	-	0,00	1	Sistem Informas	-	0,00
			Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa							
			Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penguatan Kapasitas dan Kinerja Daerah Bersifat Kekhususan dan Keistimewaan	6.000.000.000	5.234.558.301	87,24	10	Daerah (Prov/Kab/K	9	90,00
			Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian sengketa di DOB	3.000.000.000	1.550.697.442	51,69	4	Rekomendasi Kebij	4	100,00
			Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa							
			Daerah yang difasilitasi dalam penguatan kualitas Rancangan Perda dan Perkada yang telah sesuai dengan hasil review Kemendagri	2.000.000.000	1.247.059.105	62,35	38	Daerah (Prov/Kab/K	38	100,00
			Daerah yang memiliki Skor Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Perda berkategori Sangat Baik	1.000.000.000	377.896.418	37,79	15	Daerah (Prov/Kab/K	7	46,67
			Database Peraturan Daerah yang terintegrasi	1.000.000.000	301.093.390	30,11	1	Data	1	100,00
			Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perizinan di daerah	1.000.000.000	319.497.876	31,95	2	Rekomendasi Kebij	2	100,00
			Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah							
			Asosiasi Pemerintahan Daerah dan DPRD yang optimal	600.000.000	172.586.600	28,76	7	Lembaga	7	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi KDH dan DPRD	285.124.000	99.011.313	34,73	38	Provinsi	38	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian Administrasi Pemberhentian dan Pensiun KDH serta PAW Anggota DPRD	600.000.000	191.835.700	31,97	200	Daerah (Prov/Kab/K	200	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam Penyelesaian hasil Pilkada serentak 2024	700.000.000	195.685.500	27,96	38	Daerah (Prov/Kab/K	38	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam Penyelesaian permasalahan KDH dan DPRD dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah	750.000.000	536.119.200	71,48	38	Daerah (Prov/Kab/K	38	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam Penyelesaian permasalahan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah	1.081.700.000	344.447.351	31,84	38	Daerah (Prov/Kab/K	35	92,11
			Daerah yang Kepala Daerah dan DPRD-nya yang menyampaikan LKPJ dan rekomendasi LKPJ tepat waktu	564.876.000	137.129.000	24,28	38	Daerah (Prov/Kab/K	38	100,00
			Evaluasi Efektivitas Perangkat Daerah berdasarkan PP Perangkat Daerah eksisting	1.200.000.000	383.901.519	31,99	38	Daerah (Prov/Kab/K	8	21,05
			Indeks Kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah	358.300.000	212.969.495	59,44	1	Surat Keputusan	1	100,00
			Netralitas ASN di daerah pasca pilkada serentak	500.000.000	157.103.680	31,42	38	Daerah (Prov/Kab/K	38	100,00
			Rekomendasi Kebijakan Masukan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	2.000.000.000	675.435.220	33,77	1	Rekomendasi Kebij	1	100,00
			Rekomendasi kebijakan penguatan manajemen ASN daerah dalam rangka Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	800.000.000	288.203.006	36,03	1	Rekomendasi Kebij	1	100,00
			Sistem E-mutasi	160.000.000	8.052.890	5,03	1	Sistem Informas	1	100,00
09.662766.DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan dan Fasilitasi Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah							
			Daerah Yang Difasilitasi Dalam Memanfaatkan Pinjaman Daerah	2.000.000.000	303.006.860	15,15	110	Daerah (Prov/Kab/K	110	100,00
			Daerah Yang Difasilitasi Dalam Menerbitkan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah	1.000.000.000	178.886.028	17,89	110	Daerah (Prov/Kab/K	110	100,00
			Daerah yang Optimal Dalam Memanfaatkan Dana Transfer	3.944.870.000	1.604.272.763	40,67	480	Daerah (Prov/Kab/K	480	100,00
			Data dan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah	988.974.000	245.345.700	24,81	1	Data	1	100,00
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah							
			Basis Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2.000.000.000	579.664.235	28,98	1	Data	1	100,00
			Daerah Dengan Proporsi Kontribusi BUMD Meningkat Dalam APBD	3.400.000.000	1.772.777.331	52,14	300	Daerah (Prov/Kab/K	300	100,00
			Daerah Dengan Proporsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat	4.900.766.000	1.575.294.143	32,14	300	Daerah (Prov/Kab/K	300	100,00
			Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan LKPD	1.000.000.000	234.252.675	23,43	500	Daerah (Prov/Kab/K	500	100,00
			Daerah yang Difasilitasi Dalam Rangka Penerapan Cashless/Transaksi Non Tunai	1.500.000.000	402.912.713	26,86	110	Daerah (Prov/Kab/K	110	100,00
			Daerah Yang Melaksanakan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)	1.500.000.000	579.195.469	38,61	2	Daerah (Prov/Kab/K	2	100,00
			Daerah Yang Melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah Secara Wajar	3.266.922.000	1.065.210.710	32,61	500	Daerah (Prov/Kab/K	500	100,00
			Daerah yang Menerapkan PPK BLUD	988.974.000	288.218.285	29,14	546	Daerah (Prov/Kab/K	546	100,00
			Daerah Yang Menerapkan SIPD Bidang Keuangan Daerah	4.261.310.000	2.439.456.290	57,25	546	Daerah (Prov/Kab/K	546	100,00
			Data dan Informasi Publik Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	705.896.000	504.855.995	71,52	1	Data	1	100,00
			Data dan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	300.000.000	115.335.496	38,45	1	Data	1	100,00
			Data dan Informasi Publik Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	716.922.000	410.350.257	57,24	1	Data	1	100,00
			Konferensi dan Event Pengelolaan Keuangan Daerah	3.500.000.000	392.537.863	11,22	16	Kegiatan	16	100,00
			Modul Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	1.286.676.000	610.669.905	47,46	2	Modul Aplikasi	2	100,00
			Permendagri Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	200.000.000	61.202.432	30,60	1	PerMen	1	100,00
			Permendagri Bidang Pendapatan Daerah	200.000.000	121.931.245	60,97	1	PerMen	1	100,00
			Permendagri Bidang Pengelolaan BLUD	200.000.000	199.609.046	99,80	1	PerMen	1	100,00
			Permendagri Bidang Pengelolaan BMD	200.000.000	59.515.200	29,76	1	PerMen	1	100,00
			Permendagri Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	200.000.000	148.135.010	74,07	1	PerMen	1	100,00
			Peta Jalan Belanja Pegawai Di Daerah	1.000.000.000	319.260.648	31,93	1	Data	1	100,00
			Provinsi Yang Difasilitasi Dalam Pencapaian Realisasi Belanja secara Optimal	1.000.000.000	254.248.098	25,42	38	Provinsi	38	100,00
			Provinsi Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan APBD	1.938.690.000	1.311.169.960	67,63	38	Provinsi	38	100,00
			Provinsi Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.000.000.000	807.795.111	80,78	38	Provinsi	38	100,00
			Provinsi Yang Memenuhi Anggaran SPM	500.000.000	100.558.672	20,11	38	Provinsi	38	100,00
			Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	1.000.000.000	986.263.607	98,63	19	Provinsi	19	100,00
			Rancangan Standar Redesain Proses Bisnis SIPD RI Bidang Keuangan Daerah	160.000.000	160.000.000	100,00	1	NSPK	1	100,00
Total Sub Fungsi: Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri				852.044.013.000	794.681.859.064	93,27	14.153		13.065	92,31

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
1	2	3	4	Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
01.448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI									
	Program Dukungan Manajemen									
		Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN								
		Keputusan Menteri Dalam Negeri Terkait IPDN		36.259.000	36.248.050	99,97	2		2	100,00
		Layanan Bantuan Hukum		9.608.000	9.608.000	100,00	2		2	100,00
		Layanan Hukum		283.384.000	283.384.000	100,00	1		1	100,00
		Peraturan Rektor IPDN		82.493.000	82.407.400	99,90	4		4	100,00
		Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN		10.242.000	10.241.000	99,99	1		1	100,00
		Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Statuta IPDN		20.294.000	20.292.500	99,99	1		1	100,00
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN								
		Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN		464.645.000	464.633.150	100,00	8		8	100,00
		Layanan Manajemen Keuangan		403.397.000	401.507.503	99,53	1		1	100,00
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran		251.426.000	247.286.000	98,35	3		3	100,00
		Layanan Perkantoran		330.619.802.000	330.317.679.216	99,91	1		1	100,00
		Layanan Prasarana Internal		5.204.340.000	5.185.763.560	99,64	37		37	100,00
		Layanan Sarana Internal		19.351.132.000	18.314.102.075	94,64	6.179		6.179	100,00
		Layanan Umum		2.967.627.000	2.965.555.233	99,93	1		1	100,00
		Penyusunan Grand Design Pengembangan Smart Campus IPDN		352.950.000	347.174.500	98,36	1		1	100,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN								
		Layanan Data dan Informasi		31.843.000	30.707.325	96,43	1		1	100,00
		Layanan Kehumasan dan Informasi		191.809.000	191.808.861	100,00	1		1	100,00
		Layanan Keprotokolan		101.925.000	101.889.693	99,97	1		1	100,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN								
		Akreditasi Institusi dan Prodi		882.428.000	755.783.260	85,65	3		3	100,00
		Dokumen Pemantauan dan Evaluasi		129.768.000	129.767.445	100,00	2		2	100,00
		Kerjasama Dalam Negeri		102.195.000	102.194.600	100,00	7		7	100,00
		Kerjasama Luar Negeri		173.928.000	173.922.800	100,00	1		1	100,00
		Layanan Audit Internal		726.882.000	726.547.239	99,95	2		2	100,00
		Layanan Manajemen SDM		918.472.000	917.808.294	99,93	1.298		1.298	100,00
		Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN		328.764.000	328.680.350	99,97	3		3	100,00
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		205.377.000	205.051.594	99,84	5		5	100,00
		Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN								
		Layanan Pendidikan Kedinasan		32.461.948.000	32.421.062.998	99,87	2.821		2.821	100,00
		Layanan Pendidikan Program Pasca Sarjana		8.700.813.000	8.639.953.935	99,30	160		160	100,00
		Layanan Pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan		2.839.420.000	2.788.781.285	98,22	100		100	100,00
		Naskah Kebijakan Aktual Strategis		179.126.000	179.120.089	100,00	3		3	100,00
		Pengabdian Masyarakat		436.152.000	427.443.103	98,00	1		1	100,00
		Publikasi Bereputasi Nasional Hasil Riset dan Inovasi		1.075.553.000	1.075.446.931	99,99	10		10	100,00
		Seleksi Penerimaan Calon Praja		13.847.006.000	13.958.064.024	100,80	1.061		1.061	100,00
01.677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA									
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN								
		Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN		165.664.000	165.664.000	100,00	4		4	100,00
		Layanan Manajemen Keuangan		114.010.000	114.010.000	100,00	1		1	100,00
		Layanan Perkantoran		24.160.757.000	24.158.251.403	99,99	1		1	100,00
		Layanan Umum		199.476.000	199.465.145	99,99	1		1	100,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN								
		Layanan Data dan Informasi		12.458.000	12.458.000	100,00	1		1	100,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN								
		Kerjasama Dalam Negeri		19.361.000	19.349.906	99,94	1		1	100,00
		Layanan Manajemen SDM		104.054.000	104.022.940	99,97	53		53	100,00
		Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN		56.444.000	56.444.000	100,00	1		1	100,00
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		17.829.000	17.829.000	100,00	1		1	100,00
		Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN								
		Layanan Pendidikan Kedinasan		848.288.000	848.257.976	100,00	73		73	100,00
01.677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN									
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN								
		Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN		278.660.000	278.631.033	99,99	4		4	100,00
		Layanan Manajemen Keuangan		5.250.000	5.250.000	100,00	1		1	100,00
		Layanan Perkantoran		26.853.950.000	26.853.546.621	100,00	1		1	100,00
		Layanan Prasarana Internal		399.358.000	399.358.000	100,00	1		1	100,00
		Layanan Sarana Internal		615.948.000	615.007.500	99,85	7		7	100,00
		Layanan Umum		17.075.000	17.063.000	99,93	1		1	100,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN								
		Layanan Data dan Informasi		250.000	250.000	100,00	1		1	100,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN								
		Kerjasama Dalam Negeri		250.000	250.000	100,00	1		1	100,00
		Layanan Manajemen SDM		750.000	750.000	100,00	94		94	100,00
		Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN		23.972.000	23.971.069	100,00	1		1	100,00

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	500.000	500.000	100,00	1		1	100,00
			Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN							
			Layanan Pendidikan Kedinasan	489.973.000	489.829.450	99,97	143		143	100,00
01.677045.IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN							
			Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN	140.861.000	140.859.934	100,00	4		4	100,00
			Layanan Manajemen Keuangan	84.606.000	84.604.723	100,00	1		1	100,00
			Layanan Perkantoran	22.214.601.000	22.212.559.975	99,99	1		1	100,00
			Layanan Prasarana Internal	260.660.000	260.659.796	100,00	1		1	100,00
			Layanan Sarana Internal	421.000.000	420.818.749	99,96	5		5	100,00
			Layanan Umum	145.284.000	145.249.920	99,98	1		1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN							
			Layanan Data dan Informasi	3.575.000	3.575.000	100,00	1		1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN							
			Kerjasama Dalam Negeri	200.000	200.000	100,00	1		1	100,00
			Layanan Manajemen SDM	170.373.000	170.372.491	100,00	73		73	100,00
			Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	25.939.000	25.939.000	100,00	1		1	100,00
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2.087.000	2.087.000	100,00	1		1	100,00
			Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN							
			Layanan Pendidikan Kedinasan	655.402.000	655.308.420	99,99	142		142	100,00
01.683070.IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN							
			Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN	50.000	50.000	100,00	4		4	100,00
			Layanan Manajemen Keuangan	50.000	50.000	100,00	1		1	100,00
			Layanan Perkantoran	24.302.390.000	24.302.362.734	100,00	1		1	100,00
			Layanan Prasarana Internal	1.070.073.000	1.070.072.111	100,00	1		1	100,00
			Layanan Sarana Internal	653.724.000	653.724.000	100,00	803		803	100,00
			Layanan Umum	39.348.000	39.347.830	100,00	1		1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN							
			Layanan Data dan Informasi	6.180.000	6.180.000	100,00	1		1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN							
			Kerjasama Dalam Negeri	50.000	50.000	100,00	1		1	100,00
			Layanan Manajemen SDM	200.000	200.000	100,00	60		60	100,00
			Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	39.930.000	39.929.316	100,00	1		1	100,00
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100.000	100.000	100,00	1		1	100,00
			Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN							
			Layanan Pendidikan Kedinasan	622.674.000	622.673.959	100,00	145		145	100,00
01.683084.IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN							
			Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN	295.974.000	295.974.000	100,00	4		4	100,00
			Layanan Manajemen Keuangan	39.801.000	39.800.902	100,00	1		1	100,00
			Layanan Perkantoran	26.313.090.000	26.313.055.529	100,00	1		1	100,00
			Layanan Sarana Internal	533.500.000	533.497.511	100,00	281		281	100,00
			Layanan Umum	378.483.000	378.483.000	100,00	1		1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN							
			Layanan Data dan Informasi	7.152.000	7.151.600	99,99	1		1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN							
			Kerjasama Dalam Negeri	207.000	207.000	100,00	1		1	100,00
			Layanan Manajemen SDM	69.138.000	69.137.710	100,00	89		89	100,00
			Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	85.084.000	85.083.534	100,00	1		1	100,00
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	250.000	250.000	100,00	1		1	100,00
			Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN							
			Layanan Pendidikan Kedinasan	559.239.000	559.236.349	100,00	145		145	100,00
01.683091.IPDN KAMPUS PAPUA										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN							
			Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN	160.628.000	160.627.650	100,00	4		4	100,00
			Layanan Manajemen Keuangan	33.621.000	33.621.000	100,00	1		1	100,00
			Layanan Perkantoran	28.762.339.000	28.762.197.400	100,00	1		1	100,00
			Layanan Umum	83.835.000	83.835.000	100,00	1		1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN							
			Layanan Data dan Informasi	250.000	250.000	100,00	1		1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN							
			Kerjasama Dalam Negeri	250.000	250.000	100,00	1		1	100,00
			Layanan Manajemen SDM	145.460.000	145.459.951	100,00	43		43	100,00
			Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	39.789.000	39.789.000	100,00	1		1	100,00
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	500.000	500.000	100,00	1		1	100,00

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN							
			Layanan Pendidikan Kedinasan	1.490.411.000	1.490.410.730	100,00	72		72	100,00
02.027203.INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah							
			Peraturan Menteri terkait Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	122.697.000	122.676.308	99,98	1		1	100,00
			Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD							
			Penguatan Kapasitas PPUPD	320.655.000	320.654.688	100,00	35		35	100,00
			STANDARISASI HASIL KERJA PPUPD INSPEKTORAT	505.641.000	514.344.983	101,72	350		350	100,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah							
			Layanan Manajemen Keuangan	452.380.000	452.380.000	100,00	1		1	100,00
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	147.479.000	147.477.741	100,00	1		1	100,00
			Layanan Penyusunan Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal (SBKU)	3.941.000	3.922.630	99,53	1		1	100,00
			Layanan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satker Eselon I tanpa satker vertikal (SBKU)	20.421.000	20.420.008	100,00	1		1	100,00
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	27.216.000	27.216.000	100,00	1		1	100,00
			Layanan Perkantoran	60.089.182.000	60.096.834.677	100,01	2		2	100,00
			Layanan Sarana Internal	253.968.000	253.967.870	100,00	1		1	100,00
			Layanan Umum	327.101.000	327.098.461	100,00	1		1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah							
			Layanan Data dan Informasi	37.961.000	39.534.000	104,14	1		1	100,00
			Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	229.612.000	229.612.000	100,00	1		1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah							
			LAYANAN FASILITASI KOORDINASI DAN KERJASAMA PENGAWASAN	240.898.000	240.896.573	100,00	3		3	100,00
			Layanan Manajemen SDM	519.991.000	519.990.460	100,00	317		317	100,00
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	240.788.000	240.787.959	100,00	1		1	100,00
			Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus							
			Audit Kinerja Audit Kinerja BPSDM	22.680.000	22.680.000	100,00	1		1	100,00
			Audit Kinerja BNPP	23.800.000	23.800.000	100,00	1		1	100,00
			Audit Kinerja BSKDN	22.680.000	22.680.000	100,00	1		1	100,00
			Audit Kinerja Ditjen Bina ADWIL	24.360.000	24.360.000	100,00	1		1	100,00
			Audit Kinerja Ditjen Bina BANGDA	23.160.000	23.153.026	99,97	1		1	100,00
			Audit Kinerja Ditjen Bina KEUDA	22.800.000	22.798.550	99,99	1		1	100,00
			Audit Kinerja Ditjen Bina PEMDES	24.360.000	24.360.000	100,00	1		1	100,00
			Audit Kinerja Ditjen Bina POLPUM	18.130.000	18.130.000	100,00	1		1	100,00
			Audit Kinerja Ditjen DUKCAPIL	24.360.000	24.360.000	100,00	1		1	100,00
			Audit Kinerja Ditjen OTDA	23.300.000	23.300.000	100,00	1		1	100,00
			Audit Kinerja DKPP	21.384.000	21.383.500	100,00	1		1	100,00
			Audit Kinerja Inspektorat Jenderal	678.000	678.000	100,00	1		1	100,00
			Audit Kinerja IPDN	86.370.000	86.369.325	100,00	1		1	100,00
			Audit Kinerja Sekretariat Jenderal	22.680.000	22.680.000	100,00	1		1	100,00
			KOORDINASI PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH	537.306.000	537.000.750	99,94	38		38	100,00
			Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	60.525.000	60.525.000	100,00	1		1	100,00
			Pembangunan Integritas Lingkup Kemendagri dan Pemda	230.957.000	230.954.440	100,00	1		1	100,00
			PENANGANAN PEMERIKSAAN KHUSUS KEMENDAGRI DAN BNPP	245.397.000	245.396.340	100,00	2		2	100,00
			PENGAWASAN INTERNAL LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL	1.374.834.000	1.374.749.274	99,99	1		1	100,00
			Pengawasan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Daerah	1.430.571.000	1.434.675.358	100,29	38		38	100,00
			PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH INSPEKTORAT JENDERAL	5.589.608.000	5.641.128.055	100,92	38		38	100,00
			PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KHUSUS	1.285.650.000	1.322.530.657	102,87	8		8	100,00
			Pengelolaan Bersama Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) Kemendagri	244.320.000	244.319.750	100,00	38		38	100,00
			PENINGKATAN KAPASITAS INSPEKTORAT DAERAH	2.460.000	2.459.600	99,98	38		38	100,00
03.027210.DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum							
			Layanan Hukum	813.529.000	813.426.193	99,99	1		1	100,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum							
			Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	5.305.000	5.305.000	100,00	1		1	100,00
			Dokumen RKA Satker Eselon I tanpa satker vertikal (SBKU)	35.682.000	35.681.100	100,00	1		1	100,00
			Layanan Manajemen Keuangan	851.858.000	851.853.526	100,00	1		1	100,00
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	127.470.000	127.467.761	100,00	1		1	100,00
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.398.250.000	1.398.243.536	100,00	1		1	100,00
			Layanan Perkantoran	53.076.689.000	53.072.953.093	99,99	1		1	100,00
			Layanan Sarana Internal	1.500.000.000	1.499.960.641	100,00	178		178	100,00
			Layanan Umum	2.489.084.000	2.488.986.958	100,00	3		3	100,00
			Pembinaan Teknis Politik dan Pemerintahan Umum	2.390.833.000	2.390.829.013	100,00	38		38	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum							
			Layanan Data dan Informasi	1.197.313.000	1.197.310.384	100,00	1		1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum							
			Layanan Manajemen SDM	354.400.000	354.372.260	99,99	287		287	100,00
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	610.711.000	610.705.770	100,00	1		1	100,00

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04.027486.DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN										
	Program Dukungan Manajemen									
		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah								
			Layanan Hukum	617.427.000	617.201.700	99,96	1		1	100,00
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah								
			Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	17.300.000	16.396.700	94,78	1		1	100,00
			Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	51.700.000	51.699.220	100,00	1		1	100,00
			Layanan Manajemen Keuangan	1.192.027.000	1.185.708.448	99,47	1		1	100,00
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	458.345.000	454.614.906	99,19	1		1	100,00
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	366.330.000	361.858.100	98,78	1		1	100,00
			Layanan Perkantoran	54.803.412.000	54.517.234.016	99,48	1		1	100,00
			Layanan Sarana Internal	914.931.000	897.192.725	98,06	72		12	16,67
			Layanan Umum	4.478.651.000	3.451.062.804	77,06	1		1	100,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah								
			Layanan Data dan Informasi	455.499.000	441.499.700	96,93	1		1	100,00
			Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	24.268.000	23.658.800	97,49	1		1	100,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah								
			Layanan Manajemen SDM	509.063.000	495.198.555	97,28	275		275	100,00
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	543.984.000	537.980.289	98,90	1		1	100,00
05.027753.DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA										
	Program Dukungan Manajemen									
		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa								
			Layanan Hukum	1.082.440.000	1.072.637.527	99,09	1		1	100,00
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa								
			Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	274.006.000	273.926.890	99,97	1		1	100,00
			Layanan Manajemen Keuangan	1.518.436.000	1.505.818.260	99,17	2		2	100,00
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.635.506.000	3.622.505.262	99,64	2		2	100,00
			Layanan Perkantoran	73.468.008.000	71.636.801.435	97,51	2		2	100,00
			Layanan Prasarana Internal	1.004.320.000	887.167.545	88,34	5		5	100,00
			Layanan Protokol	1.141.822.000	1.140.901.456	99,92	1		1	100,00
			Layanan Sarana Internal	1.072.789.000	1.070.602.458	99,80	45		45	100,00
			Layanan Umum	853.872.000	668.631.865	78,31	2		2	100,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa								
			Layanan Data dan Informasi	649.111.000	631.452.033	97,28	1		1	100,00
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10.017.000	9.344.500	93,29	1		1	100,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa								
			Layanan Manajemen SDM	386.955.000	386.560.792	99,90	60		60	100,00
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	603.981.000	569.179.885	94,24	2		2	100,00
05.028449.BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA										
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa								
			Layanan Perkantoran	12.623.464.000	11.533.215.049	91,36	1		1	100,00
			Layanan Sarana Internal	234.692.000	225.600.004	96,13	39		39	100,00
05.028830.BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG										
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa								
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	269.000	268.200	99,70	1		1	100,00
			Layanan Perkantoran	11.629.756.000	11.426.826.645	98,26	1		1	100,00
			Layanan Umum	14.604.000	14.599.560	99,97	1		1	100,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa								
			Layanan Manajemen SDM	85.000	85.000	100,00	1		1	100,00
05.613629.BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG										
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa								
			Layanan Manajemen Keuangan	44.867.000	43.528.890	97,02	1		1	100,00
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	18.904.000	18.819.698	99,55	1		1	100,00
			Layanan Perkantoran	11.428.292.000	11.215.646.931	98,14	1		1	100,00
			Layanan Sarana Internal	44.951.000	44.380.000	98,73	15		15	100,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa								
			Layanan Manajemen SDM	18.462.000	18.461.940	100,00	8		8	100,00
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	10.950.000	10.894.650	99,49	1		1	100,00
06.039729.DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH										
	Program Dukungan Manajemen									
		Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah								
			Pelaksanaan dan Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	798.867.000	798.867.000	100,00	38		38	100,00
			Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	787.212.000	787.212.000	100,00	38		38	100,00
		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah								
			Layanan Hukum	614.624.000	614.581.460	99,99	1		1	100,00
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah								
			Layanan BMN	93.250.000	90.820.000	97,39	1		1	100,00
			Layanan Manajemen Keuangan	1.079.780.000	1.074.591.155	99,52	7		7	100,00
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	99.817.000	99.807.435	99,99	1		1	100,00
			Layanan Pembinaan Pembangunan Daerah	50.682.208.000	50.020.520.112	98,69	8		8	100,00

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Layanan Penyusunan Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal - SBKU	7.780.000	7.780.000	100,00	1		1	100,00
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	155.701.000	155.700.644	100,00	1		1	100,00
			Layanan Perkantoran	71.535.753.000	71.324.741.073	99,71	2		2	100,00
			Layanan Prasarana Internal	1.859.000.000	1.856.976.878	99,89	1		1	100,00
			Layanan Protokol	580.115.000	578.252.871	99,68	1		1	100,00
			Layanan Sarana Internal	1.330.618.000	1.325.565.097	99,62	14		14	100,00
			Layanan Umum	1.466.694.000	1.458.628.382	99,45	1		1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah							
			Layanan Data dan Informasi	289.111.000	288.660.995	99,84	1		1	100,00
			Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.500.000.000	1.499.999.996	100,00	2		2	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah							
			Layanan Manajemen SDM	72.845.000	71.677.485	98,40	302		302	100,00
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	357.093.000	353.599.260	99,02	1		1	100,00
			Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	11.200.000	10.930.000	97,59	1		1	100,00
07.621892.DITJEN OTONOMI DAERAH										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah							
			Layanan Hukum	1.180.891.000	329.634.113	27,91	1		1	100,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah							
			Layanan BMN	139.000.000	43.801.300	31,51	1		1	100,00
			Layanan Data dan Informasi	523.648.000	258.248.000	49,32	1		1	100,00
			Layanan Koordinasi dan Konsolidasi Rencana Program dan Kegiatan Lingkup Ditjen Otonomi Daerah	994.550.000	499.728.948	50,25	1		1	100,00
			Layanan Manajemen Keuangan	2.450.000.000	920.503.641	37,57	1		1	100,00
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	239.830.000	1.530.000	0,64	1		1	100,00
			Layanan penyusunan LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal	17.300.000	1.700.000	9,83	1		1	100,00
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	447.548.000	84.390.000	18,86	1		1	100,00
			Layanan Perkantoran	56.229.361.000	53.484.329.541	95,12	12		12	100,00
			Layanan Sarana Internal	1.032.285.000	59.854.956	5,80	1		1	100,00
			Layanan Umum	2.770.000.000	1.212.283.200	43,76	1		1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah							
			Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	256.000.000	96.384.300	37,65	1		1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah							
			Layanan Manajemen SDM	716.115.000	-	0,00	270		-	0,00
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	802.487.000	237.080.696	29,54	1		1	100,00
08.634082.DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
			Layanan Hukum	1.231.369.000	1.078.678.824	87,60	1		1	100,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
			Layanan BMN	139.000.000	64.367.360	46,31	1		1	100,00
			Layanan Koordinasi Isu Aktual lingkup Ditjen Dukcapil	5.473.237.000	5.051.825.008	92,30	1		1	100,00
			Layanan koordinasi penyelesaian aset dukcapil di daerah	1.102.099.000	1.099.058.245	99,72	1		1	100,00
			Layanan Manajemen Keuangan	860.850.000	749.497.777	87,06	3		3	100,00
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	186.450.000	186.450.000	100,00	1		1	100,00
			Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	318.440.000	65.278.590	20,50	1		1	100,00
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	108.344.000	105.841.252	97,69	1		1	100,00
			Layanan Perkantoran	57.848.207.000	57.134.493.073	98,77	1		1	100,00
			Layanan Prasarana Internal	2.600.000.000	2.445.001.052	94,04	1		1	100,00
			Layanan Sarana Internal	654.500.000	595.227.101	90,94	58		58	100,00
			Layanan Umum	4.342.344.000	3.193.294.778	73,54	1		1	100,00
			Pemeliharaan Perangkat KTP- el	516.600.000	373.820.375	72,36	1		1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
			Layanan Data dan Informasi	675.329.000	653.701.626	96,80	1		1	100,00
			Layanan Protokol	334.440.000	107.759.273	32,22	1		1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
			Layanan Manajemen SDM	7.451.773.000	7.014.247.334	94,13	500		500	100,00
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	50.200.000	27.573.719	54,93	1		1	100,00
			Program Tata Kelola Kependudukan							
			Pembinaan Administrasi Kependudukan							
			Akta Kelahiran yang diterbitkan	1.097.600.000	85.152.537	7,76	550.000		550.000	100,00
			Akta Kematian yang diterbitkan	594.500.000	82.102.949	13,81	400.000		400.000	100,00
			Akta Perceraian yang diterbitkan	832.000.000	70.321.218	8,45	4.500		4.500	100,00
			Akta Perkawinan yang diterbitkan	832.000.000	104.961.285	12,62	35.000		35.000	100,00
			Blangko KTP-el untuk daerah	266.763.330.000	266.726.536.670	99,99	26.140.000		26.140.000	100,00

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Rekomendasi Kebijakan masukan Revisi undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan	1.000.000.000	-	0,00	1		-	0,00
			Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							
			Daerah yang difasilitasi dalam Integrasi data kependudukan Daerah	3.649.233.000	1.024.963.715	28,09	552		552	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1.500.000.000	371.230.751	24,75	70		70	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	2.500.000.000	9.147.390	0,37	40		40	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.309.438.000	1.272.440.551	23,97	552		552	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif	911.041.000	346.218.717	38,00	5		5	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11.173.867.000	3.219.378.847	28,81	552		552	100,00
			Peraturan Menteri tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	200.000.000	180.063.879	90,03	1		1	100,00
			Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan							
			Daerah yang difasilitasi dalam Layanan Jaringan Komunikasi Data secara Online	204.393.449.000	203.097.219.073	99,37	552		552	100,00
			Fasilitasi Data Balikan Daerah	399.902.000	128.393.441	32,11	300		300	100,00
			Fasilitasi Data Balikan Nasional	2.198.609.000	806.067.463	36,66	1.000		1.000	100,00
			Fasilitasi Data Kependudukan Daerah	649.345.000	122.503.826	18,87	300		300	100,00
			Fasilitasi Data Kependudukan Nasional	2.509.461.000	1.772.268.452	70,62	1.000		1.000	100,00
			Lembaga yang difasilitasi dalam Integrasi data kependudukan Nasional	1.108.738.000	168.081.826	15,16	60		60	100,00
			Pelayanan Koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional	12.673.140.000	11.212.089.990	88,47	1.300		1.300	100,00
			Sarpras SIAK serta DC dan DRC Kependudukan	126.314.508.000	124.244.912.281	98,36	3		3	100,00
			Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	164.336.743.000	155.944.071.536	94,89	1		1	100,00
			Sistem Informasi Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	171.000.000	171.000.000	100,00	1		1	100,00
			Sistem Informasi Integrasi Data dan Dokumen Kependudukan Nasional	33.938.472.000	32.102.313.305	94,59	1		1	100,00
			Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital							
			Aplikasi ID digital	109.451.977.000	2.754.887.500	2,52	1		1	100,00
			Command center, dan peningkatan keamanan informasi dan siber Dukcapil	30.810.860.000	-	0,00	2		-	0,00
			Daerah yang di fasilitasi dalam Penerapan Rekomendasi Mekanisme Optimalisasi Sistem Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Secara inklusif	8.521.650.000	-	0,00	552		-	0,00
			Daerah yang difasilitasi dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	482.195.000	171.000.000	35,46	6		6	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam Pendaftaran Penduduk melalui layanan jemput bola di daerah 12 Provinsi dengan cakupan PRCR yang rendah	27.002.483.000	-	0,00	15		-	0,00
			Daerah yang difasilitasi dalam penyelenggaraan dan monitoring program jemput bola nasional untuk daerah 3T, daerah dengan cakupan kinerja rendah dan kelompok penduduk rentan	65.460.000.000	-	0,00	546		-	0,00
			Dukungan Manajemen PMU ID Digital	36.101.995.000	21.870.916.245	60,58	1		1	100,00
			Grand Desain Penyelenggaraan Adminduk	1.550.000.000	839.225.000	54,14	1		1	100,00
			Inisiatif Stragis Administrasi Kependudukan Pemerintah Daerah	2.380.000.000	241.300.000	10,14	2		2	100,00
			Pedoman teknis pemanfaatan data untuk mendukung lembaga pengguna berintegrasi dengan layanan Dukcapil	6.329.025.000	-	0,00	1		-	0,00
			Penguatan Infrastruktur TIK Dukcapil	427.494.234.000	275.135.181.713	64,36	159		159	100,00
			Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam penyelenggaraan layanan adminduk	16.462.218.000	600.000	0,00	1.200		1.200	100,00
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil	67.939.381.000	195.336.144	0,29	652		652	100,00
			Peningkatan Kapasitas Aparatur untuk Sertifikasi dan Pelatihan ISO	5.000.000.000	-	0,00	2.400		-	0,00
			Perangkat dan Jaringan Layanan Adminduk di daerah perbatasan dan 3T (terluar, terisolasi, tertinggal)	9.230.820.000	-	0,00	43		-	0,00
			Platform untuk berbagi dan pertukaran data Dukcapil	43.000.000.000	-	0,00	2		-	0,00
			Promosi interoperabilitas dan pengakuan ID digital skala nasional maupun internasional	1.152.000.000	-	0,00	1		-	0,00
			Rebranding Dukcapil	35.754.000.000	280.800.000	0,79	1		1	100,00
			Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Adminduk	13.018.880.000	116.766.000	0,90	3		2	66,67
			Rekomendasi Penegakan Hukum Penyelenggaraan Adminduk	750.000.000	210.000.000	28,00	1		1	100,00
			Rekomendasi Standarisasi peralatan pelayanan adminduk	711.197.000	1.470.000	0,21	1		1	100,00
			Roadmap pengadaan infrastruktur TIK dan informasi serta keamanan siber	11.291.460.000	-	0,00	1		-	0,00
			Roadmap Pengembangan Aplikasi ID Digital dan e-KYC	9.770.000.000	-	0,00	2		-	0,00

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sarana dan Prasarana Digitalisasi Dokumen Kependudukan	3.850.000.000	-	0,00	40		-	0,00
			Sarana dan Prasarana Pelayanan Adminduk	16.807.158.000	-	0,00	180		-	0,00
			Sistem baru dan implementasi proses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, e-KYC dan ID digital, serta pengelolaan lembaga pengguna	30.359.675.000	3.720.912.917	12,26	3		3	100,00
			Sistem Informasi Notifikasi Otomatis antara Layanan Adminduk dan Layanan Eksternal	11.750.000.000	-	0,00	1		-	0,00
			Sistem Informasi Pemanfaatan Data Kependudukan Daerah	6.000.000.000	-	0,00	1		-	0,00
			Sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM)	16.703.550.000	222.150.000	1,33	1		1	100,00
			Standar autentikasi biometrik dan teknologi deduplikasi adminduk	2.929.990.000	-	0,00	1		-	0,00
			Tanda tangan elektronik dan standardisasi data alamat	54.800.000.000	-	0,00	2		-	0,00
09.662766.DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah							
			Layanan Hukum	750.000.000	374.107.930	49,88	1		1	100,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah							
			Layanan BMN	139.000.000	84.937.001	61,11	1		1	100,00
			Layanan Manajemen Keuangan	708.819.000	421.633.046	59,48	1		1	100,00
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	240.000.000	137.559.325	57,32	1		1	100,00
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	530.959.000	247.772.237	46,67	1		1	100,00
			Layanan Perkantoran	57.176.281.000	56.356.312.712	98,57	1		1	100,00
			Layanan Sarana Internal	1.000.000.000	699.452.672	69,95	70		70	100,00
			Layanan Umum	2.061.000.000	1.162.195.415	56,39	1		1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah							
			Layanan Data dan Informasi	235.204.000	237.851.490	101,13	1		1	100,00
			Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	284.824.000	283.964.814	99,70	1		1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah							
			Layanan Manajemen SDM	700.000.000	155.659.367	22,24	300		300	100,00
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	700.000.000	257.220.089	36,75	1		1	100,00
11.403222.Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri							
			Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	113.800.000	113.738.755	99,95	1		1	100,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri							
			Dokumen Lakin Satker - Eselon I Tanpa Satker Vertikal	25.415.000	25.271.114	99,43	1		1	100,00
			Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	242.780.000	218.325.550	89,93	1		1	100,00
			Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker - Eselon I Tanpa Satker Vertikal	456.872.000	376.366.869	82,38	1		1	100,00
			Layanan Manajemen Keuangan	707.031.000	315.509.020	44,62	2		2	100,00
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	225.350.000	168.031.790	74,56	5		5	100,00
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	65.460.000	65.320.422	99,79	5		5	100,00
			Layanan Perkantoran	42.160.264.000	42.122.309.402	99,91	1		1	100,00
			Layanan Prasarana Internal	268.000.000	267.163.958	99,69	16		16	100,00
			Layanan Sarana Internal	224.400.000	223.437.150	99,57	25		25	100,00
			Layanan Umum	1.331.194.000	863.843.361	64,89	1		1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri							
			Layanan Data dan Informasi	14.770.000	14.754.508	99,90	1		1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri							
			Layanan Manajemen SDM	200.000.000	164.249.500	82,12	25		25	100,00
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	438.553.000	227.080.211	51,78	2		2	100,00
			Layanan Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko BSKDN Kemendagri	84.940.000	82.028.417	96,57	1		1	100,00
12.027114.PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10.652.000	10.451.500	98,12	1		1	100,00
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	69.649.000	69.551.000	99,86	1		1	100,00
			Layanan Perkantoran	22.105.653.000	22.102.736.372	99,99	1		1	100,00
			Layanan Sarana Internal	3.326.206.000	3.309.326.543	99,49	159		159	100,00
			Layanan Umum	136.724.000	136.374.050	99,74	1		1	100,00
			Pengelolaan keuangan	54.960.000	54.605.579	99,36	1		1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			Layanan Manajemen SDM	8.015.000	7.971.400	99,46	98		98	100,00
12.027177.PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	77.180.000	77.180.000	100,00	1		1	100,00
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	63.964.000	63.962.693	100,00	1		1	100,00
			Layanan Perkantoran	16.895.194.000	16.893.541.784	99,99	2		1	50,00
			Layanan Sarana Internal	1.023.507.000	1.022.982.500	99,95	67		66	98,51
			Layanan Umum	32.752.000	32.749.568	99,99	1		-	0,00
			Pengelolaan keuangan	48.584.000	48.582.846	100,00	1		1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			Layanan Manajemen SDM	113.284.000	113.229.410	99,95	65		64	98,46
12.403216.PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	22.466.000	22.463.600	99,99	1		1	100,00
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	67.510.000	67.412.388	99,86	1		1	100,00
			Layanan Perkantoran	17.297.960.000	17.281.518.816	99,90	1		1	100,00
			Layanan Sarana Internal	3.464.600.000	3.428.438.885	98,96	128		128	100,00
			Layanan Umum	121.420.000	121.192.194	99,81	1		1	100,00
			Pengelolaan keuangan	62.254.000	62.105.750	99,76	1		1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			Layanan Manajemen SDM	51.833.000	51.816.378	99,97	58		58	100,00
12.403231.BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			Layanan Hukum	130.089.000	128.977.380	99,15	1		1	100,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			Koordinasi, dan sinergitas program pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	1.814.570.000	1.790.663.230	98,68	3		3	100,00
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	315.852.000	314.808.159	99,67	1		1	100,00
			Layanan Penyusunan LAKIN untuk Unit Eselon I dengan jumlah satker 6	80.483.000	80.324.300	99,80	1		1	100,00
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	168.095.000	131.753.858	78,38	1		1	100,00
			Layanan Perkantoran	66.040.276.000	65.967.169.947	99,89	1		1	100,00
			Layanan Sarana Internal	7.483.760.000	7.474.303.239	99,87	1		1	100,00
			Layanan Umum	1.437.725.000	1.436.582.211	99,92	1		1	100,00
			Pengelolaan keuangan	733.344.000	732.524.211	99,89	3		3	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			Layanan Data dan Informasi	633.883.000	632.330.501	99,76	1		1	100,00
			Layanan Integrasi Sistem Informasi	150.980.000	107.071.000	70,92	1		1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			Layanan Manajemen SDM	265.737.000	252.000.700	94,83	206		206	100,00
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	183.074.000	180.193.605	98,43	5		5	100,00
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi							
			NSPK Standarisasi dan Sertifikasi	203.590.000	203.590.000	100,00	6		6	100,00
			Sertifikasi Jabatan Aparatur Kementerian Dalam Negeri (RM)	1.596.002.000	1.596.001.300	100,00	1.869		1.869	100,00
12.506137.PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10.000	-	0,00	1		1	100,00
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10.010.000	-	0,00	1		1	100,00
			Layanan Perkantoran	14.616.668.000	14.584.492.026	99,78	1		1	100,00
			Layanan Sarana Internal	1.159.360.000	1.109.327.401	95,68	271		271	100,00
			Layanan Umum	20.300.000	16.447.000	81,02	1		1	100,00
			Pengelolaan keuangan	50.000.000	-	0,00	1		1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			Layanan Manajemen SDM	442.338.000	441.243.000	99,75	51		51	100,00
12.506138.BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.125.000	4.125.000	100,00	1		1	100,00
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12.120.000	12.118.700	99,99	1		1	100,00
			Layanan Perkantoran	9.228.490.000	9.226.400.676	99,98	1		1	100,00
			Layanan Sarana Internal	10.631.400.000	10.580.687.148	99,52	10		10	100,00
			Layanan Umum	28.979.000	28.978.000	100,00	1		1	100,00
			Pengelolaan keuangan	7.185.000	7.040.000	97,98	1		1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			Layanan Manajemen SDM	50.571.000	50.569.500	100,00	31		31	100,00
TOTAL SUB FUNGSI: PELAYANAN UMUM				3.410.163.852.000	2.573.364.904.155	75,46	27.162.460	-	27.158.334	99,98

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
1	2	3	4	Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
5	6	7	8	9	10	11				
04.027486.DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			Daerah yang difasilitasi dalam penguatan peran kecamatan dalam koordinasi vertikal dan horizontal	1.500.000.000	570.898.586	38,06	80	Daerah (Prov/Kab/Kota)	80	100,00
			Daerah yang dikuatkan SDM dan Kelembagaan DTMTSP nya untuk mendukung iklim investasi yang kondusif	1.000.000.000	265.145.342	26,51	50	Daerah (Prov/Kab/Kota)	32	64,00
			Daerah yang diterapkan sebagai pilot kerja sama antar daerah untuk mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan	1.200.000.000	221.096.220	18,42	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			Daerah yang ditingkatkan pelimpahan kewenangan perizinan kepada DPMTSP	1.000.000.000	-	0,00	76	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	13,16
			Daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam penyediaan pelayanan publik	1.000.000.000	608.863.316	60,89	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
			Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	63.958.878.000	3.516.747.989	5,50	17	Provinsi	4	23,53
			Daerah yang menerapkan PTSP berbasis OSS	1.600.000.000	536.688.542	33,54	76	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	50,00
			Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan	9.079.721.000	8.979.880.226	98,90	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			Peraturan Menteri tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	200.000.000	-	0,00	1	PerMen	1	100,00
			Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat dan Evaluasi Kinerja Kecamatan	200.000.000	-	0,00	1	PerMen	1	100,00
			Rekomendasi Pelaksanaan Model Ideal Kewenangan dan Kelembagaan GWPP	1.000.000.000	338.406.400	33,84	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100,00
	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
			Bantuan sarpras Tibumtranmas	1.596.776.000	522.416.510	32,72	30	Unit	-	0,00
			Daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan	850.000.000	184.676.880	21,73	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			Daerah yang menerapkan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pasca bencana	1.000.000.000	232.583.750	23,26	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			Daerah yang menerapkan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	1.000.000.000	211.387.000	21,14	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Bencana berdasarkan Tipologi Daerah	5.852.466.000	4.338.235.132	74,13	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00
			Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Kebakaran berdasarkan Tipologi Daerah	3.000.000.000	1.026.177.105	34,21	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00
			Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Trantibum berdasarkan Tipologi Daerah	3.000.000.000	1.798.596.850	59,95	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00
			Fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	300.000.000	79.118.400	26,37	38	Provinsi	38	100,00
			Fasilitasi Satpol PP Dalam mendukung Pemerintah Daerah Bidang Trantibumlinmas	1.600.000.000	853.551.006	53,35	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB)	3.559.000.000	3.551.664.574	99,79	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			NSPK Urusan Trantibumlinmas	600.000.000	287.674.860	47,95	2	NSPK	2	100,00
			Pembentukan Layanan Kedaruratan	13.949.496.000	13.909.803.871	99,72	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			Peraturan Menteri tentang Pedoman Nomenklatur Satpol PP di Daerah	150.000.000	-	0,00	1	PerMen	1	100,00
			Peraturan Menteri tentang Sistem Informasi Pelaporan Satpol PP	150.000.000	-	0,00	1	PerMen	1	100,00
			Permendagri mengenai pakaian dinas lapangan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana	200.000.000	110.950.000	55,48	1	PerMen	1	100,00
			Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Administrasi Kewilayahan Dalam Mendukung Satu Data Indonesia	100.000.000	-	0,00	1	Sistem Informasi	-	0,00
04.039667.SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	32.000.000	32.000.000	100,00	1	Provinsi	-	0,00
04.060017.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ACEH										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	200.000.000	194.890.000	97,45	1	Provinsi	1	100,00
04.079078.SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	49.105.000	49.105.000	100,00	1	Provinsi	-	0,00
04.099438.SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
1	2	3	4	Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
5	6	7	8	9	10	11				
			Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	88.520.000	88.318.940	99,77	1	Provinsi	-	0,00
04.109074.SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	96.176.000	96.176.000	100,00	1	Provinsi	1	100,00
04.119082.SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	203.562.000	203.450.766	99,95	1	Provinsi	-	0,00
04.139078.SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	52.500.000	52.167.143	99,37	1	Provinsi	1	100,00
04.179223.SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	53.000.000	53.000.000	100,00	1	Provinsi	1	100,00
04.189087.SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	8.778.000	8.777.678	100,00	1	Provinsi	1	100,00
04.199080.SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	57.948.000	57.947.500	100,00	1	Provinsi	1	100,00
04.229068.SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	33.890.000	33.889.040	100,00	1	Provinsi	1	100,00
04.249138.BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	8.416.000	8.415.235	99,99	1	Provinsi	1	100,00
04.319061.SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
1	2	3	4	Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
			Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	163.000.000	162.900.000	99,94	1	Provinsi	1	100,00
04.349011.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	21.325.000	21.155.904	99,21	1	Provinsi	1	100,00
04.417697.SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	8.970.000	8.970.000	100,00	1	Provinsi	1	100,00
04.433341.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	23.806.000	23.806.000	100,00	1	Provinsi	1	100,00
04.433350.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	8.900.000	8.900.000	100,00	1	Provinsi	1	100,00
04.484163.BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	101.446.000	101.443.741	100,00	1	Provinsi	1	100,00
05.027753.DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa							
			Jumlah Aparatur Kecamatan yang mengikuti pelatihan PTPD melalui online dan tatap muka	455.733.000	321.955.000	70,65	100	Orang	100	100,00
			Kebijakan/Pedoman/Modul Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa	88.292.000	-	0,00	1	NSPK	1	100,00
			Penataan kelembagaan Desa							
			BPD yang mengimplementasikan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif	150.000.000	78.263.770	52,18	15	Lembaga	15	100,00
			Fasilitasi pembentukan dan penataan Lembaga Linmas	139.297.000	119.025.000	85,45	1	NSPK	1	100,00
			Fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan desa	517.557.000	-	0,00	10	Lembaga	-	0,00
			Lembaga PKK yang tertata	4.911.792.000	2.865.440.305	58,34	4.500	Lembaga	4.500	100,00
			Lembaga Posyandu yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam implementasi 6 SPM	2.500.000.000	678.837.000	27,15	1.500	Lembaga	1.500	100,00
			LKAD dan MHA yang tertata dan berdaya	139.149.000	59.650.900	42,87	50	Lembaga	50	100,00
			Penataan sistem pelayanan administrasi desa							
			Daerah yang Melaporkan Kerja Sama Desa	150.000.000	66.108.060	44,07	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15	100,00
			Desa dan Kelurahan yang melakukan pemutakhiran data Prodeskel	400.352.000	222.430.560	55,56	10.000	Desa/Kelurahan	10.000	100,00
			Desa dengan status kategori "Berkembang" dan "Cepat Berkembang"	1.268.947.000	971.419.943	76,55	10.000	Desa	10.000	100,00
			Desa yang difasilitasi dalam Inisiasi Kerja Sama Desa	850.000.000	555.704.775	65,38	90	Desa	90	100,00
			Desa yang difasilitasi dalam Penerapan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	850.000.000	463.283.760	54,50	50	Desa	50	100,00
			Desa yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran digital	1.000.000.000	443.453.500	44,35	100	Desa	100	100,00
			Desa yang menerapkan Model Perencanaan Pembangunan yang diintegrasikan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional	455.896.000	268.800.296	58,96	40	Desa	40	100,00
			Desa yang menerapkan pelayanan administrasi pemerintahan desa dan Standar pelayanan Minimal Desa	416.818.000	244.699.561	58,71	40	Desa	40	100,00
			Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	850.000.000	539.072.141	63,42	100	Desa	100	100,00
			Desa yang telah diasistensi usulan penataan desanya	121.564.000	32.222.930	26,51	45	Desa	45	100,00

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
1	2	3	4	Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
5	6	7	8	9	10	11				
			Desa yang Telah Difasilitasi dalam Penataan Kewenangan Desa dan Penyusunan Produk Hukum Desa	256.468.000	187.850.000	73,25	35	Desa	35	100,00
			Desa yang telah divalidasi dan diklarifikasi nama dan kode desanya	51.032.000	40.037.200	78,46	15	Desa	15	100,00
			Desa yang telah memiliki batas wilayah sesuai ketentuan	292.951.000	200.346.300	68,39	30	Desa	30	100,00
			Desa yang telah memiliki peta batas Desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta batas desa	3.594.298.000	3.585.018.453	99,74	37	Desa	37	100,00
			Desa yang telah terbit administrasi pengelolaan aset desa	1.000.000.000	490.600.223	49,06	125	Desa	125	100,00
			Dukungan Delegasi RI pada Sidang Internasional	573.052.000	173.052.000	30,20	1	Kegiatan	1	100,00
			Fasilitasi Pembinaan Kinerja Kelembagaan Posyandu di Desa	1.961.515.000	1.914.837.000	97,62	1.500	Desa	1.500	100,00
			Penguatan Teknis Pemerintahan Desa	134.112.000	23.708.500	17,68	10	Desa	10	100,00
			Sistem Informasi Desa Berbasis Prodeskel/Epdeskel yang Terintegrasi dengan SIPD	700.000.000	-	0,00	1	Sistem Informasi	-	0,00
			Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa							
			Dukungan Manajemen P3PD	7.449.581.000	7.447.772.715	99,98	11	layanan	11	100,00
05.028449.BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa							
			Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	5.296.431.000	5.090.152.464	96,11	1.500	Orang	1.478	98,53
05.028830.BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa							
			Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	3.741.879.000	3.014.071.553	80,55	780	Orang	770	98,72
05.613629.BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa							
			Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	3.683.549.000	3.548.437.138	96,33	960	Orang	900	93,75
06.039729.DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah							
			Daerah yang difasilitasi dalam Penyelarasan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	136.602.000	80.157.000	58,68	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			Optimalisasi Penerapan SIPD sebagai platform tunggal pemerintahan di daerah	23.087.332.000	13.804.095.896	59,79	1	Sistem Informasi	1	100,00
			Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Manajemen Resiko Pembangunan Nasional di Daerah	200.000.000	200.000.000	100,00	1	PerMen	1	100,00
			Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	122.149.000	49.625.000	40,63	1	PerMen	1	100,00
			Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah							
			Daerah yang dievaluasi dalam penerapan Prov/Kabupaten/Kota Layak Anak	999.514.000	77.356.528	7,74	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
			Daerah yang dievaluasi rancangan Perda Tata Ruangnya	846.583.000	519.369.466	61,35	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Perhutanan Sosial	190.990.000	88.119.898	46,14	24	Daerah (Prov/Kab/Kota)	24	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Reforma Agraria dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	397.444.000	130.608.974	32,86	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Ketenagakerjaan	4.846.629.000	4.335.289.916	89,45	20	Daerah (Prov/Kab/Kota)	20	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Daerah	191.340.000	-	0,00	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Penyelenggaraan Transmigrasi	189.309.000	11.045.000	5,83	4	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Rencana Induk Urusan Pemuda dan Olahraga	976.096.000	302.405.342	30,98	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Kesehatan berdasarkan Tipologi Daerah	2.429.367.000	478.126.742	19,68	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Tipologi Daerah	2.451.506.000	432.026.740	17,62	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pendidikan berdasarkan Tipologi Daerah	2.382.351.000	567.877.388	23,84	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Tipologi Daerah	2.393.051.000	1.017.633.975	42,52	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Sosial berdasarkan Tipologi Daerah	2.381.506.000	229.971.245	9,66	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Transbumihnas berdasarkan Tipologi Daerah	2.396.971.000	348.448.101	14,54	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam Pengembangan Potensi dan Kerjasama di Bidang Kelautan dan Perikanan	155.199.000	93.178.540	60,04	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Ketahanan Pangan Daerah	460.357.000	174.777.790	37,97	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	1.357.916.000	928.914.946	68,41	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Budaya Gemar Membaca	781.347.000	128.247.951	16,41	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Kinerja Kabupaten/Kota dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	633.009.000	461.561.239	72,92	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	514	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam Penyusunan dan Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis-KLHS ke dalam RPJMD	182.211.000	81.503.160	44,73	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam percepatan dan pengendalian pelaksanaan PBG berketahanan bencana	951.506.000	194.335.295	20,42	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam rangka Penurunan AKI di Daerah	3.145.029.000	3.042.484.450	96,74	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
			Daerah yang melaksanakan pengembangan UMKM, Seni dan Kerajinan Nasional (DEKRANAS)	2.500.000.000	2.492.893.500	99,72	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15	100,00
			Daerah yang melaksanakan Peningkatan mutu dan layanan SPM	1.815.684.000	859.209.218	47,32	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
1	2	3	4	Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
5	6	7	8	9	10	11				
			Daerah yang melaksanakan program kelapa sawit berkelanjutan	477.870.000	62.664.000	13,11	26	Daerah (Prov/Kab/Kota)	26	100,00
			Daerah yang menerapkan kebijakan tata kelola air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan permukiman	971.459.000	178.636.300	18,39	14	Daerah (Prov/Kab/Kota)	14	100,00
			Daerah yang menerapkan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di daerah	1.418.335.000	284.501.881	20,06	54	Daerah (Prov/Kab/Kota)	54	100,00
			Daerah yang menerapkan layanan perlindungan Perempuan dan Anak serta perlindungan dari kekerasan dan TPPO	929.741.000	126.520.100	13,61	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
			Daerah yang menerapkan manajemen sistem pengaduan pelayanan SPM	978.153.000	488.505.531	49,94	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
			Daerah yang Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Energi Baru Terbarukan (EBT)	513.621.000	187.175.861	36,44	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PRRG)	948.888.000	186.189.147	19,62	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
			Daerah yang menerapkan tata kelola persampahan	890.454.000	269.877.988	30,31	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
			Daerah yang menetapkan Upah Minimum Provinsi	940.519.000	184.852.878	19,65	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi	929.581.000	175.531.104	18,88	11	Daerah (Prov/Kab/Kota)	11	100,00
			Daerah yang menyusun rencana Aksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	910.022.000	415.927.944	45,71	6	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6	100,00
			Fasilitasi Pengelolaan Sampah Terpadu di Kawasan Sungai Citarum (ISWMP)	30.473.276.000	29.960.416.186	98,32	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15	100,00
			Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Jalan	1.435.685.000	387.375.103	26,98	18	Daerah (Prov/Kab/Kota)	18	100,00
			Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam Program Ketangguhan Banjir Perkotaan (NUFReP)	7.615.305.000	3.598.816.305	47,26	6	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6	100,00
			Fasilitasi peningkatan kinerja Kabupaten/Kota dalam implementasi aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan Stunting di Daerah melalui program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Phase II	14.238.560.000	14.136.099.241	99,28	100	Daerah (Prov/Kab/Kota)	100	100,00
			Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian serta Perlindungan Risiko Bencana di Kawasan Pertanian	13.555.466.000	8.611.153.813	63,53	16	Daerah (Prov/Kab/Kota)	16	100,00
			Fasilitasi Perencanaan Terpadu dalam Pembangunan Daerah di Perkotaan (NUDP)	130.134.203.000	130.083.033.094	99,96	23	Daerah (Prov/Kab/Kota)	23	100,00
			Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	562.026.000	187.025.000	33,28	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2	100,00
			Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Pilihan	5.082.654.000	1.192.193.131	23,46	8	Rekomendasi Kebijakan	8	100,00
			Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar	6.075.527.000	1.684.572.863	27,73	8	Rekomendasi Kebijakan	8	100,00
			Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Wajib Pelayanan Dasar	5.772.795.000	806.619.660	13,97	6	Rekomendasi Kebijakan	6	100,00
			Rekomendasi untuk penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah	171.850.000	60.679.000	35,31	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100,00
11.403222.Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan inovasi daerah							
			Daerah Metropolitan yang difasilitasi dalam Penerapan Pilot Project Inovasi Tematik	1.500.000.000	1.099.846.526	73,32	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2	100,00
			Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	1.762.844.000	1.662.180.201	94,29	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00
			Optimalisasi Difusi Inovasi Dalam Pengendalian Inflasi pada Pemerintah Daerah	427.156.000	-	0,00	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			Pembinaan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah							
			Fasilitasi dan Pembinaan Strategi Kebijakan di daerah	1.174.090.000	653.539.321	55,66	25	Daerah (Prov/Kab/Kota)	25	100,00
			Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri							
			Forum Diskusi Aktual/ Diskusi Publik	1.065.606.000	159.059.000	14,93	7	Rekomendasi Kebijakan	7	100,00
			Pengembangan/Pembangunan Layanan Digital IPKD	100.000.000	99.900.000	99,90	1	Sistem Informasi	1	100,00
			Penguatan Strategi Kebijakan Pusat dan Daerah	1.268.579.000	886.051.164	69,85	12	Rekomendasi Kebijakan	12	100,00
			Pengukuran Pengelolaan Keuangan Daerah	500.000.000	93.845.000	18,77	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			Penilaian Kepemimpinan Kepala Daerah	458.692.000	59.127.945	12,89	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00
			Penilaian Tata Kelola Pemerintahan Daerah	540.000.000	-	0,00	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	-	0,00
			Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri "Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah"	150.000.000	104.932.000	69,95	1	PerMen	1	100,00
			Rekomendasi Strategi Kebijakan lingkup Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik	434.394.000	109.470.490	25,20	3	Rekomendasi Kebijakan	3	100,00
			Rekomendasi Strategi Kebijakan Lingkup Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Desa	300.000.000	73.171.364	24,39	2	Rekomendasi Kebijakan	2	100,00
			Rekomendasi Strategi Kebijakan lingkup Pengembangan SDM, TI, dan Inovasi Pemdagri	150.000.000	95.991.000	63,99	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100,00
			Rekomendasi strategi kebijakan lingkup Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri	791.308.000	341.303.305	43,13	5	Rekomendasi Kebijakan	5	100,00
			Revisi Permendagri 17 Tahun 2016 "Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah"	150.000.000	101.473.999	67,65	1	PerMen	1	100,00
			Revisi Permendagri 19 Tahun 2020 "Tentang Pedoman IPKD"	150.000.000	150.000.000	100,00	1	PerMen	1	100,00
12.027114.PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri							
			Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	6.963.476.000	6.952.361.495	99,84	1.384	Orang	1.384	100,00

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	86.768.000	86.701.300	99,92	60	Orang	60	100,00
12.027177.PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri							
			Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	4.560.361.000	4.560.197.341	100,00	646	Orang	646	100,00
			Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	81.504.000	81.502.180	100,00	60	Orang	60	100,00
12.403216.PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri							
			Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	11.941.212.000	11.903.127.020	99,68	5.599	Orang	5.599	100,00
			Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	40.000.000	39.492.140	98,73	60	Orang	60	100,00
12.403231.BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri							
			Aparatur Mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis	4.581.155.000	4.469.129.685	97,55	1.741	Orang	1.741	100,00
			Aparatur mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	14.597.321.000	14.530.676.843	99,54	2.910	Orang	2.910	100,00
			Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 12 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	204.097.000	204.097.000	100,00	60	Orang	60	100,00
			Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	149.165.000	149.165.000	100,00	60	Orang	60	100,00
			Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Manajemen Kepemimpinan	149.080.000	146.495.000	98,27	60	Orang	60	100,00
			Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	152.735.000	152.615.900	99,92	60	Orang	60	100,00
			Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 6 Hari Bidang Standarisasi dan Sertifikasi	3.100.000	3.100.000	100,00	30	Orang	30	100,00
			Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan	12.912.544.000	12.758.794.256	98,81	2.819	Orang	2.819	100,00
			Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah	163.500.000	163.500.000	100,00	120	Orang	120	100,00
			Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Penyusunan Perda dan Perkada	43.450.000	40.454.000	93,10	150	Orang	150	100,00
			Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	173.536.000	173.535.750	100,00	120	Orang	120	100,00
			KDH dan WKDH yang mengikuti Orientasi	10.350.000.000	11.476.514.049	110,88	1.092	Orang	1.092	100,00
			Pejabat Fungsional Penata Perizinan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	99.390.000	99.329.700	99,94	360	Orang	360	100,00
			Sertifikasi Jabatan Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	62.947.000	62.947.000	100,00	240	Orang	240	100,00
12.506137.PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri							
			Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	6.838.858.000	6.835.407.400	99,95	1.891	Orang	1.891	100,00
			Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	86.768.000	92.996.500	107,18	60	Orang	60	100,00
12.506138.BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri							
			Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	1.389.330.000	1.388.252.954	99,92	468	Orang	468	100,00
TOTAL SUB FUNGSI: PEMBANGUNAN DAERAH				534.037.898.000	383.454.039.811	71,80	59.876		59.526	99,42

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

Fungsi Pelayanan Umum

Sub Fungsi Pelayanan Umum lainnya

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04.027486.DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi									
			Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian batas daerah	1.881.740.000	1.618.168.960	85,99	10	Rekomendasi Kebijakan	10	100,00
			Daerah yang dikuatkan tata kelola Smart City- nya di Wilayah Metropolitan	1.500.000.000	331.207.953	22,08	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
			Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan	1.000.000.000	280.502.755	28,05	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
			Daerah yang melakukan penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas K/L secara terpadu di Wilayah Metropolitan	1.000.000.000	640.471.556	64,05	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5	50,00
			Fasilitasi Daerah Mitra Dengan Otorita IKN	700.000.000	30.752.751	4,39	4	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4	100,00
			K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi pemerintahan	2.400.000.000	909.262.910	37,89	12	Kesepakatan	12	100,00
			Kelembagaan Sekeriat Pengelolaan Forum Pelaksana Kerjasama/ Perundingan Bilateral Wilayah Perbatasan Negara	500.000.000	186.069.000	37,21	5	Lembaga	5	100,00
			NSPK di Bidang Kawasan, Perkotaan, Batas Negara, Batas Wilayah, dan Toponimi	400.000.000	79.210.000	19,80	2	NSPK	2	100,00
			Optimalisasi Infrastruktur Dukungan Dashboard Spasial Ditjen Bina Adwil Sebagai Pendukung Layanan Kedaruratan	15.800.000.000	15.542.311.908	98,37	1	Unit	1	100,00
			Penanganan Konflik Pertanahan	1.500.000.000	351.581.781	23,44	25	Daerah (Prov/Kab/Kota)	25	100,00
			Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan kawasan khusus di daerah	1.136.287.000	652.760.122	57,45	8	Provinsi	8	100,00
			Penguatan Kerja Sama Pembangunan antar negara di bidang politik, ekonomi, sosial, antar budaya	2.000.000.000	577.145.227	28,86	3	Kesepakatan	3	100,00
			Penyelesaian Perjanjian terkait segmen batas darat antar negara	1.500.000.000	811.198.112	54,08	2	Kesepakatan	2	100,00
			Peraturan Menteri Bidang Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas	200.000.000	88.667.970	44,33	1	PerMen	1	100,00
			Peraturan Menteri Bidang Perkotaan	200.000.000	86.508.823	43,25	1	PerMen	1	100,00
			Peraturan Pemerintah Bidang Kawasan Khusus	260.000.000	-	0,00	1	PP	1	100,00
			Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Administrasi Kewilayahan Dalam Mendukung Satu Data Indonesia	328.260.000	39.754.640	12,11	2	Sistem Informasi	2	100,00
TOTAL SUB FUNGSI: PELAYANAN UMUM LAINNYA				32.306.287.000	22.225.574.468	68,80	107	-	102	95,33
TOTAL FUNGSI: PELAYANAN UMUM				4.828.552.050.000	3.773.726.377.498	78,15	27.236.596		27.231.027	99,98



LAMPIRAN V

**RINCIAN PAGU ANGGARAN,
REALISASI ANGGARAN,
OUTPUT, TARGET, DAN
KEGIATAN PRIORITAS
NASIONAL PER MASING-MASING
ESELON I**

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output, Target, dan Kegiatan Prioritas Nasional Per Masing-Masing Eselon I

Kementerian Dalam Negeri

Periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	DESKRIPSI KODE PRIORITAS NASIONAL	KODE ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE KRO	KODE RO	URAIAN RO	SATUAN	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	PROGRES CAPAIAN	PAGU BELANJA	REALISASI BELANJA	%
1	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	03	027210	Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum	CR	1233	QDC	001	Facilitasi penguatan Nasionalisme Bagi Generasi Muda Dalam Menggelorakan Nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	500	500	100	500.000.000	322.669.683	64,53
2	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	03	027210	Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum	CR	1233	UAC	001	Facilitasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai- nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI Bagi Aparatur	Orang	180	180	100	841.911.000	413.652.795	49,13
3	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	03	027210	Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum	CR	1233	UBA	003	Facilitasi Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan dalam Membangun Harmoni Kebangsaan untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	38	38	100	426.553.000	258.747.432	60,66
4	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	03	027210	Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum	CR	6145	QDC	002	Bimbingan Teknis Tata Kelola Manajemen Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	Orang	2000	2000	100	2.000.000.000	777.386.034	38,87
5	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	03	027210	Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum	CR	6145	UBA	001	Facilitasi penguatan demokrasi di daerah	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	19	19	100	500.000.000	280.568.000	56,11
6	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	03	027210	Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum	CR	6145	UBA	002	Facilitasi Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	19	19	100	525.676.000	190.488.000	36,24
7	02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	CM	1241	PEC	001	Penguatan Kerja Sama Pembangunan antar negara di bidang politik, ekonomi, sosial, antar budaya	Kesepakatan	3	3	100	2.000.000.000	577.145.227	28,86
8	02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	CM	1241	PEC	002	Penyelesaian Perjanjian terkait segmen batas darat antar negara	Kesepakatan	2	2	100	1.500.000.000	811.198.112	54,08
9	02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	003	Daerah yang menerapkan tata kelola persampahan	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	10	10	100	890.454.000	269.877.988	30,31
10	02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	200	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	546	546	100	2.451.506.000	432.026.740	17,62
11	03	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	202	Daerah yang menyusun rencana Aksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	6	6	100	910.022.000	415.927.944	45,71
12	03	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	303	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	2	2	100	562.026.000	187.025.000	33,28
13	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	300	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Kesehatan berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	546	546	100	2.429.367.000	478.126.742	19,68
14	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	305	Daerah yang menerapkan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di daerah	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	54	54	100	1.418.335.000	284.501.881	20,06
15	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	400	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pendidikan berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	546	546	100	2.382.351.000	567.877.388	23,84
16	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	401	Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	11	11	100	929.581.000	175.531.104	18,88
17	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	403	Daerah yang dievaluasi dalam penerapan Prov/Kabupaten/Kota Layak Anak	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	10	10	100	999.514.000	77.356.528	7,74
18	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	404	Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	10	10	100	948.888.000	186.189.147	19,62
19	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	405	Daerah yang menerapkan layanan perlindungan Perempuan dan Anak serta perlindungan dari kekerasan dan TPPO	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	10	10	100	929.741.000	126.520.100	13,61
20	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	406	Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Rencana Induk Urusan Pemuda dan Olahraga	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	10	10	100	976.096.000	302.405.342	30,98
21	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	407	Daerah yang menetapkan Upah Minimum Provinsi	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	34	34	100	940.519.000	184.852.878	19,65
22	04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	408	Daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Budaya Gemar Membaca	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	34	34	100	781.347.000	128.247.951	16,41
23	05	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	203	Facilitasi Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Jalan	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	18	18	100	1.435.685.000	387.375.103	26,98
24	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	CM	1237	UBA	004	Daerah yang diterapkan sebagai pilot kerja sama antar daerah untuk mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	1	0	58,34	1.200.000.000	221.096.220	18,42
25	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	CM	1241	UBA	001	Daerah yang melakukan penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas K/L secara terpadu di Wilayah Metropolitan	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	10	5	63,99	1.000.000.000	640.471.556	64,05
26	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	CM	1241	UBA	002	Daerah yang dikuatkan tata kelola Smart City- nya di Wilayah Metropolitan	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	10	10	100	1.500.000.000	331.207.953	22,08
27	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	CM	1241	UBA	003	Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	10	10	100	1.000.000.000	280.502.755	28,05
28	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	027753	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	CM	1244	UAB	001	Sistem Informasi Desa Berbasis Prodeskel/Epdeskel yang Terintegrasi dengan SIPD	Sistem Informasi	1	0	0,2	700.000.000	-	-
29	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	027753	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	CM	1244	UBB	001	Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa	Desa	125	125	100	1.000.000.000	490.600.223	49,06

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output, Target, dan Kegiatan Prioritas Nasional Per Masing-Masing Eselon I
Kementerian Dalam Negeri

Periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	DESKRIPSI KODE PRIORITAS NASIONAL	KODE ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE KRO	KODE RO	URAIAN RO	SATUAN	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	PROGRES CAPAIAN	PAGU BELANJA	REALISASI BELANJA	%
30	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	027753	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	CM	1244	UBB	002	Desa yang difasilitasi dalam Inisiasi Kerja Sama Desa	Desa	90	90	100	850.000.000	555.704.775	65,38
31	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	027753	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	CM	1244	UBB	003	Desa yang difasilitasi dalam Penerapan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	Desa	50	50	100	850.000.000	463.283.760	54,50
32	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	027753	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	CM	1244	UBB	004	Desa yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran digital	Desa	100	100	100	1.000.000.000	443.453.500	44,35
33	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	027753	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	CM	1244	UBB	005	Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	Desa	100	100	100	850.000.000	539.072.141	63,42
34	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	027753	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	CM	1244	UBB	006	Fasilitasi Pembinaan Kinerja Kelembagaan Posyandu di Desa	Desa	1500	1500	100	1.961.515.000	1.914.837.000	97,62
35	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	027753	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	CM	1244	UBB	007	Desa yang telah memiliki peta batas Desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta batas desa	Desa	37	37	100	3.594.298.000	3.585.018.453	99,74
36	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	027753	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	CM	6138	QDB	001	Lembaga Posyandu yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Implementasi 6 SPM	Lembaga	1500	1500	100	2.500.000.000	678.837.000	27,15
37	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	028449	Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta	CM	1248	UAC	004	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Orang	1440	1440	100	5.205.811.000	5.044.679.664	96,90
38	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	05	028830	Balai Besar Pemerintahan Desa Malang	CM	1248	UAC	004	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Orang	720	720	100	3.617.598.000	2.914.865.953	80,57
39	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	05	613629	Balai Pemerintahan Desa Lampung	CM	1248	UAC	004	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Orang	900	900	100	3.552.905.000	3.548.437.138	99,87
40	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	201	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	546	546	100	2.393.051.000	1.017.633.975	42,52
41	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	204	Daerah yang menerapkan kebijakan tata kelola air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan permukiman	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	14	14	100	971.459.000	178.636.300	18,39
42	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	301	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Sosial berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	546	546	100	2.381.506.000	229.971.245	9,66
43	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	08	634082	Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	CP	1269	QAA	002	Akta Perkawinan yang diterbitkan	Akta	35000	35000	100	832.000.000	104.961.285	12,62
44	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	08	634082	Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	CP	1269	QAA	003	Akta Perceraian yang diterbitkan	Akta	4500	4500	100	832.000.000	70.321.218	8,45
45	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	08	634082	Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	CP	1269	QAA	004	Akta Kelahiran yang diterbitkan	Akta	550000	550000	100	1.097.600.000	85.152.537	7,76
46	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	08	634082	Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	CP	1271	UBA	001	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	5	5	100	911.041.000	346.218.717	38,00
47	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	08	634082	Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	CP	1271	UBA	002	Daerah yang difasilitasi dalam Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	40	40	100	2.500.000.000	9.147.390	0,37
48	06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	11	403222	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	CM	1283	UBA	001	Daerah Metropolitan yang difasilitasi dalam Penerapan Pilot Project Inovasi Tematik	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	2	2	100	1.500.000.000	1.099.846.526	73,32
49	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03	027210	Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum	CR	1233	UBA	001	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	38	38	100	1.000.000.000	317.010.324	31,70
50	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03	027210	Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum	CR	1234	UAC	001	Kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	Orang	200	100	95	2.000.000.000	1.743.064.582	87,15
51	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03	027210	Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum	CR	6145	PBC	001	Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	Rekomendasi Kebijakan	2	2	100	1.707.550.000	1.707.542.442	100,00
52	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03	027210	Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum	CR	6145	PEB	001	Pengembangan Literasi Politik Masyarakat	forum	6	6	100	813.435.000	486.261.319	59,78
53	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03	027210	Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum	CR	6145	QDB	001	Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Partai Politik	Lembaga	8	8	100	261.352.000	193.123.638	73,89
54	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03	027210	Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum	CR	6145	QDC	001	Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	Orang	400	400	100	600.000.000	263.048.359	43,84
55	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	03	027210	Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum	CR	6145	QEI	001	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	Lembaga	8	8	100	134.489.125.000	134.489.125.000	100,00
56	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	CM	1237	PBL	001	Rekomendasi Pelaksanaan Model Ideal Kewenangan dan Kelembagaan GWPP	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1.000.000.000	338.406.400	33,84
57	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategoris sangat baik	Provinsi	17	4	10,09	63.958.878.000	3.516.747.989	5,50
58	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	CM	1237	UBA	002	Daerah yang difasilitasi dalam penguatan peran kecamatan dalam koordinasi vertikal dan horizontal	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	80	80	100	1.500.000.000	570.898.586	38,06
59	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	CM	1237	UBA	003	Daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	10	10	100	1.000.000.000	608.863.316	60,89
60	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	CM	1237	UBA	005	Daerah yang menerapkan PTSP berbasis OSS	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	76	38	33,51	1.600.000.000	536.688.542	33,54
61	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	CM	1237	UBA	006	Daerah yang dikuatkan SDM dan Kelembagaan DTMPSTP nya untuk mendukung iklim investasi yang kondusif	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	50	32	64	1.000.000.000	265.145.342	26,51
62	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	CM	1237	UBA	007	Daerah yang ditingkatkan pelimpahan kewenangan perizinan kepada DPMPSTP	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	76	10	13,16	1.000.000.000	-	-
63	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	CM	6136	UBA	003	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Transibum berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	546	546	100	3.000.000.000	1.798.596.850	59,95
64	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	CM	1241	PBL	001	Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian batas daerah	Rekomendasi Kebijakan	10	10	100	1.881.740.000	1.618.168.960	85,99
65	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	039667	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategoris sangat baik	Provinsi	1	0,01	100	32.000.000	32.000.000	100,00

hu f

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output, Target, dan Kegiatan Prioritas Nasional Per Masing-Masing Eselon I
Kementerian Dalam Negeri

Periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	DESKRIPSI KODE PRIORITAS NASIONAL	KODE ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE KRO	KODE RO	URAIAN RO	SATUAN	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	PROGRES CAPAIAN	PAGU BELANJA	REALISASI BELANJA	%
66	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	060017	Satuan Polisi Pamong Praja Aceh	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	Provinsi	1	1	56	200.000.000	194.890.000	97,45
67	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	079078	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	Provinsi	1	0	99,34	49.105.000	49.105.000	100,00
68	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	099438	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	Provinsi	1	0	99,77	88.520.000	88.318.940	99,77
69	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	109074	Sekretariat Daerah Provinsi Jambi	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	Provinsi	1	1	100	96.176.000	96.176.000	100,00
70	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	119082	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	Provinsi	1	0	99,95	203.562.000	203.540.766	99,95
71	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	139078	Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	Provinsi	1	1	100	52.500.000	52.167.143	99,37
72	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	179223	Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	Provinsi	1	1	100	53.000.000	53.000.000	100,00
73	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	189087	Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	Provinsi	1	1	100	8.778.000	8.777.678	100,00
74	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	199080	Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	Provinsi	1	1	100	57.948.000	57.947.500	100,00
75	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	229068	Sekretariat Daerah Provinsi Bali	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	Provinsi	1	1	100	33.890.000	33.889.040	100,00
76	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	249138	Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	Provinsi	1	1	100	8.416.000	8.415.235	99,99
77	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	319061	Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	Provinsi	1	1	100	163.000.000	162.900.000	99,94
78	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	349011	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	Provinsi	1	1	100	21.325.000	21.155.904	99,21
79	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	417697	Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	Provinsi	1	1	100	8.970.000	8.970.000	100,00
80	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	433341	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	Provinsi	1	1	100	23.806.000	23.806.000	100,00
81	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	484163	Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	Provinsi	1	1	100	101.446.000	101.443.741	100,00
82	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	04	433350	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	CM	1237	UBA	001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	Provinsi	1	1	100	8.900.000	8.900.000	100,00
83	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	1254	UAB	001	Optimalisasi Penerapan SIPD sebagai platform tunggal pemerintahan di daerah	Sistem Informasi	1	1	100	23.087.332.000	13.804.095.896	59,79
84	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	PBL	001	Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Rekomendasi Kebijakan	6	6	100	5.772.795.000	806.619.660	13,97
85	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	PBL	002	Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Wajib non- Pelayanan Dasar	Rekomendasi Kebijakan	8	8	100	6.075.527.000	1.684.572.863	27,73
86	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	PBL	003	Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Pilihan	Rekomendasi Kebijakan	8	8	100	5.082.654.000	1.192.193.131	23,46
87	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	001	Daerah yang melaksanakan Peningkatan mutu dan layanan SPM	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	10	10	100	1.815.684.000	859.209.218	47,32
88	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	002	Daerah yang menerapkan manajemen sistem pengaduan pelayanan SPM	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	10	10	100	978.153.000	488.055.531	49,94
89	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	100	Daerah yang dievaluasi rancangan Perda Tata Ruangnya	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	38	38	100	846.583.000	519.369.466	61,35
90	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	304	Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	38	38	100	1.357.916.000	928.914.946	68,41
91	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	621892	Ditjen Otonomi Daerah	CM	1259	PBL	001	Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian sengketa di DOB	Rekomendasi Kebijakan	4	4	100	3.000.000.000	1.550.697.442	51,69
92	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	621892	Ditjen Otonomi Daerah	CM	1259	UBA	001	Daerah yang Difasilitasi Dalam Penguatan Kapasitas dan Kinerja Daerah Bersifat Kekhususan dan Keistimewaan	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	10	9	86,02	6.000.000.000	5.234.558.301	87,24
93	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	621892	Ditjen Otonomi Daerah	CM	3991	PBL	001	Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perzinan di daerah	Rekomendasi Kebijakan	2	2	100	1.000.000.000	319.497.876	31,95
94	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	621892	Ditjen Otonomi Daerah	CM	3991	QMA	001	Database Peraturan Daerah yang terintegrasi	Data	1	1	100	1.000.000.000	301.093.390	30,11
95	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	621892	Ditjen Otonomi Daerah	CM	3991	UBA	001	Daerah yang difasilitasi dalam penguatan kualitas Rancangan Perda dan Perkada yang telah sesuai dengan hasil review Kemendagri	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	38	38	100	2.000.000.000	1.247.059.105	62,35
96	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	621892	Ditjen Otonomi Daerah	CM	3991	UBA	002	Daerah yang memiliki Skor Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Perda berkategori Sangat Baik	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	15	7	38,3	1.000.000.000	377.896.418	37,79
97	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	621892	Ditjen Otonomi Daerah	CM	6140	PBL	001	Rekomendasi kebijakan penguatan manajemen ASN daerah dalam rangka Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	800.000.000	288.203.006	36,03
98	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	621892	Ditjen Otonomi Daerah	CM	6140	PBL	002	Rekomendasi Kebijakan Masukan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	2.000.000.000	675.435.220	33,77
99	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	07	621892	Ditjen Otonomi Daerah	CM	6140	UBA	001	Evaluasi Efektivitas Perangkat Daerah berdasarkan PP Perangkat Daerah eksisting	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	38	8	33,64	1.200.000.000	383.901.519	31,99
100	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	08	634082	Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	CP	1268	QAB	001	Pelayanan Konektitas warehouse berbasis NIK Nasional	Lembaga	1300	1300	100	12.673.140.000	11.212.089.990	88,47
101	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	08	634082	Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	CP	1269	PBM	001	Rekomendasi Kebijakan masukan Revisi undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	55	1.000.000.000	-	-
102	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	08	634082	Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	CP	1269	QAA	001	Akta Kematian yang diterbitkan	Akta	400000	400000	100	594.500.000	82.102.949	13,81

hu f

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output, Target, dan Kegiatan Prioritas Nasional Per Masing-Masing Eselon I
Kementerian Dalam Negeri

Periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	DESKRIPSI KODE PRIORITAS NASIONAL	KODE ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE KRO	KODE RO	URAIAN RO	SATUAN	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	PROGRES CAPAIAN	PAGU BELANJA	REALISASI BELANJA	%
103	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	08	634082	Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	CP	6997	UAB	001	Aplikasi ID digital	Sistem Informasi	1	1	100	109.451.977.000	2.754.887.500	2,52
104	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	662766	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	CM	1276	UBA	001	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Menerbitkan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	110	110	100	1.000.000.000	178.886.028	17,89
105	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	662766	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	CM	1276	UBA	002	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Memanfaatkan Pinjaman Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	110	110	100	2.000.000.000	303.006.860	15,15
106	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	662766	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	CM	6141	QMA	001	Peta Jalan Belanja Pegawai Di Daerah	Data	1	1	100	1.000.000.000	319.260.648	31,93
107	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	662766	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	CM	6141	QMA	002	Basis Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Data	1	1	100	2.000.000.000	579.664.235	28,98
108	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	662766	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	CM	6141	UBA	011	Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Provinsi	19	19	100	1.000.000.000	986.263.607	98,63
109	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	662766	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	CM	6141	UBA	012	Daerah Dengan Proporsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	300	300	100	4.900.766.000	1.575.294.143	32,14
110	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	662766	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	CM	6141	UBA	013	Daerah Yang Melaksanakan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	2	2	100	1.500.000.000	579.195.469	38,61
111	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	662766	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	CM	6141	UBA	014	Daerah Dengan Proporsi Kontribusi BUMD Meningkat Dalam APBD	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	300	300	100	3.400.000.000	1.772.777.331	52,14
112	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	662766	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	CM	6141	UBA	015	Daerah Yang Melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah Secara Wajar	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	500	500	100	3.266.922.000	1.065.210.710	32,61
113	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	09	662766	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	CM	6141	UBA	016	Daerah yang Difasilitasi Dalam Rangka Penerapan Cashless/Transaksi Non Tunai	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	110	110	100	1.500.000.000	402.912.713	26,86
114	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	11	403222	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	CM	1283	UBA	002	Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	546	546	100	1.762.844.000	1.662.180.201	94,29
115	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	12	027114	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Di Yogyakarta	CM	6144	UAC	002	Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	Orang	60	60	100	86.768.000	86.701.300	99,92
116	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	12	027177	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar	CM	6144	UAC	002	Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	Orang	60	60	100	81.504.000	81.502.180	100,00
117	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	12	403216	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung	CM	6144	UAC	002	Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	Orang	60	60	100	40.000.000	39.492.140	98,73
118	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	12	403231	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	CM	6144	UAC	001	KDH dan WKDH yang mengikuti Orientasi	Orang	1092	1092	100	10.350.000.000	11.476.514.049	110,88
119	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	12	403231	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	CM	6144	UAC	002	Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	Orang	120	120	100	173.536.000	173.535.750	100,00
120	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	12	403231	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	CM	6144	UAC	004	Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah	Orang	120	120	100	163.500.000	163.500.000	100,00
121	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	12	403231	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	CM	6144	UAC	005	Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Penyusunan Perda dan Perkada	Orang	150	150	100	43.450.000	40.454.000	93,10
122	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	12	403231	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	CM	6144	UAC	007	Pejabat Fungsional Penata Perizinan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	360	360	100	99.390.000	99.329.700	99,94
123	07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	12	506137	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi	CM	6144	UAC	002	Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	Orang	60	60	100	86.768.000	92.996.500	107,18
124	08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	03	027210	Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum	CR	1233	UBA	002	Fasilitasi Pembinaan Kerukunan Antar dan Intra Suku , Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan, Ras dan Golongan	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	5	5	100	1.000.000.000	373.658.785	37,37
125	08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	CM	6136	UBA	001	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Bencana berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	546	546	100	5.852.466.000	4.338.235.132	74,13
126	08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	CM	6136	UBA	002	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Kebakaran berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	546	546	100	3.000.000.000	1.026.177.105	34,21
127	08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	CM	6136	UBA	004	Daerah yang menerapkan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	38	38	100	1.000.000.000	211.387.000	21,14
128	08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	04	027486	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	CM	6136	UBA	005	Daerah yang menerapkan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pasca bencana	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	38	38	100	1.000.000.000	232.583.750	23,26
129	08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	004	Daerah yang difasilitasi dalam percepatan dan pengendalian pelaksanaan PBG ketertahanan bencana	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	10	10	100	951.506.000	194.335.295	20,42
130	08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	06	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	CM	6139	UBA	302	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Transluminmas berdasarkan Tipologi Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kot a)	546	546	100	2.396.971.000	348.448.101	14,54
															525.496.430.000	255.402.065.158	48,60



LAMPIRAN VI

KESALAHAN PENGANGGARAN BELANJA BARANG DAN MODAL PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025

KESALAHAN PENGANGGARAN BELANJA BARANG DAN MODAL

PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ES I	SATKER	NAMA SATKER	AKUN BELANJA	NAMA AKUN	AKUN ASET	NAMA AKUN	SALDO
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.853.700
05	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3.659.200
BELANJA BARANG MENJADI EKSTRAKOMPTABEL							5.512.900
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	132111	Peralatan dan Mesin	6.604.500
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	132111	Peralatan dan Mesin	1.048.950
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	132111	Peralatan dan Mesin	188.644.500
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	162161	Lisensi	8.658.000
06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	522191	Belanja Jasa Lainnya	133111	Gedung dan Bangunan	66.549.200
01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	133111	Gedung dan Bangunan	69.655.000
01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	133111	Gedung dan Bangunan	196.786.000
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	132111	Peralatan dan Mesin	3.330.000
BELANJA BARANG MENJADI ASET							541.276.150
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.653.450
01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	800.000
12	027114	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2.275.000
12	506137	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	144.900.000
12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	56.860.140

KESALAHAN PENGANGGARAN BELANJA BARANG DAN MODAL

PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ES I	SATKER	NAMA SATKER	AKUN BELANJA	NAMA AKUN	AKUN ASET	NAMA AKUN	SALDO
BELANJA MODAL TIDAK MENJADI ASET							212.488.590
01	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135121	Aset Tetap Lainnya	134.996.000
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	132111	Peralatan dan Mesin	26.140.500
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	132111	Peralatan dan Mesin	22.699.500
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	536111	Belanja Modal Lainnya	132111	Peralatan dan Mesin	44.400.000
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	536111	Belanja Modal Lainnya	132111	Peralatan dan Mesin	62.160.000
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	536111	Belanja Modal Lainnya	132111	Peralatan dan Mesin	170.000.000
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	536111	Belanja Modal Lainnya	132111	Peralatan dan Mesin	60.000.000
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162161	Lisensi	12.597.999.990
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162161	Lisensi	2.608.500
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	132111	Peralatan dan Mesin	16.539.000
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	132111	Peralatan dan Mesin	32.967.000
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	132111	Peralatan dan Mesin	104.634.150
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	132111	Peralatan dan Mesin	13.574.162
08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162161	Lisensi	173.999.999
08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	536111	Belanja Modal Lainnya	132111	Peralatan dan Mesin	99.589.200
ANTAR BELANJA MODAL							13.562.308.001



LAMPIRAN VII

**RINCIAN KAS DI BENDAHARA
PENGELUARAN, KAS DI
BENDAHARA PENERIMAAN,
SERTA KAS LAINNYA, DAN
SETARA KAS PER SATKER**

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN SERTA KAS LAINNYA DAN SETARA KAS PER SATKER
PER 31 DESEMBER 2025

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DES 2025	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DES 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN TUP PER 31 DES 2025	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN TUP PER 31 DES 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN PER 31 DES 2025	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN PER 31 DES 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DES 2025	KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DES 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH 31 DES 2024	KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH 31 DES 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	-	-	-	-	109.599.303	(109.599.303)	-	-	-	-	75.767.076	(75.767.076)	-	-	-
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.722.146	19.421.573	(4.699.427)	-	-	-
4	01	483005	KD	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.501.240	(37.501.240)	-	-	-
10	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEMILAYAHAN	-	-	-	777.785	-	777.785	-	-	-	409.679.343	2.341.253.194	(1.931.573.851)	-	-	-
14	04	319061	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	04	349011	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	04	417697	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.213.384	(8.213.384)	-	-	-
17	04	484163	DK	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.000	(170.000)	-	-	-
18	04	484167	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.984	(25.984)	-	-	-
19	04	484173	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836.909	(836.909)	-	-	-
20	04	433349	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI	-	3.000.000	(3.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	04	484197	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.700	(32.700)	-	-	-
22	04	484205	DK	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-	-
23	04	484208	DK	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	-	-	-
24	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.192.991	(7.192.991)	-	-	-
25	05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	213.747.401	(213.617.401)	14.384.908.731	62.230.201.976	(47.845.293.245)
29	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.478.954	(19.478.954)	-	-	-
30	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.260.705	(2.260.705)	-	-	-
32	11	403222	KP	BADAN STRATEGI KEBIYAKKAN DALAM NEGERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	12	027114	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	12	027177	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.342.378	-	11.342.378	-	-	-
35	12	403216	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524.688	(524.688)	-	-	-
37	12	506137	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	12	506138	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL					-	3.000.000	(3.000.000)	777.785	109.599.303	(108.821.518)	-	-	-	435.883.927	2.726.436.859	(2.290.552.932)	14.384.908.731	62.230.201.976	(47.845.293.245)



LAMPIRAN VIII

RINCIAN PENYETORAN KAS SETELAH TANGGAL NERACA

RINCIAN PENYETORAN KAS SETELAH TANGGAL NERACA

NO	KODE ES.I	KODE SATKER	NAMA SATKER	Saldo Kas (Rp)	TANGGAL SETOR	NTPN	JUMLAH SETORAN (Rp)	KETERANGAN
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN								
1	04	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	777.785	7-Jan-26	3864F522FH3L6J2B	777.785	
JUMLAH KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN				777.785			777.785	
KAS LAINNYA DAN SETARA KAS								
1	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	14.722.146				Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas Belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum dibayarkan kepada penerima hak sampai dengan 31 Desember 2025
2	04	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	397.356.643	15-Jan-26	5F081684BQHM3EEH	170.100	
					15-Jan-26	9FC940TJD8L4S01B	824.000	
					15-Jan-26	8F5FC1Q0T2TBCDAE	64.800	
					15-Jan-26	507326848534MOBL	4.752.000	
					15-Jan-26	7322874HR584HSL	97.200	
					15-Jan-26	78C320TJB3U0C67P	72.900	
					17-Jan-26	9CFC0015T4RPNVCVC	2.213.505	
					17-Jan-26	89AFC74HS8IU95JB	3.397.742	
					17-Jan-26	789634F9C86V94F1	2.673.330	
					17-Jan-26	8E9F90TJBK1PHV91	1.114.410	
					17-Jan-26	30F251Q0S4SOL71S	1.157.626	
					17-Jan-26	1F4DD684BAUNRJ7V	11.635.019	
					17-Jan-26	3B118015R1NE97E0	742.500	
					17-Jan-26	526E780VBTAFL333	7.705.500	
					17-Jan-26	B8C0274HS8OHQ018	3.216.752	
					17-Jan-26	58E221Q0RH12MB3G	2.971.100	
					17-Jan-26	6802680VACQCS7N	1.974.500	
					17-Jan-26	121925BMRSSHHTKQ	19.367.425	
					17-Jan-26	88C1B4F9BCT1LMB9	4.317.500	
					17-Jan-26	9347380V999GGM1R	990.000	
					17-Jan-26	F0F94015RUNFMBIA	4.774.055	
					17-Jan-26	F41A62MEBD9QV6ON	7.290.030	
					17-Jan-26	ED59A0TJASPCPN7J	2.128.500	
					17-Jan-26	1BF54F9B32ODS1T	6.605.610	
					17-Jan-26	E01A980V97CUAUL3L	88.000	
					17-Jan-26	06920744HPFKAS4	97.200	
					17-Jan-26	498431Q0Q58CJ0BE	1.394.595	
					17-Jan-26	2DF31Q0S1LOT880	275.400	
					17-Jan-26	980742MEB7JB8P61	473.850	
					20-Jan-26	900E480V9T25ASP7	4.859.800	
					20-Jan-26	D9CDD3IRQ219T83M	2.455.640	
					20-Jan-26	3510D015QQCP1V8E	2.314.070	
					20-Jan-26	287BA2MECHVGOGT	5.299.360	
					20-Jan-26	AC01E0TJBMVMJ66V	15.756.757	
					20-Jan-26	32AAA1Q0RKJ9MMCIJ	5.424.584	
					20-Jan-26	F45C91Q0QMD2DCM6	14.841.310	
					20-Jan-26	683572MEC8LNDNOP	3.888.976	
					20-Jan-26	3CCB2MEB2HAGGK5	9.888.450	
					21-Jan-26	48B8F3IRS3N06QIE	2.787.250	
					21-Jan-26	9F4A174HPNSIG1V0	14.765.766	
					21-Jan-26	3B19B80VA3O0KMPT	19.577.525	
					21-Jan-26	EDAF92MEAHR60FB	9.874.150	
					21-Jan-26	E492D684B06645QD	7.788.000	
					21-Jan-26	4E3883IRR3MIC0BA	4.201.802	
					21-Jan-26	6341580VB1ETUI9	742.500	
					21-Jan-26	D0F5E74HR9NPNCCQ	75.254	
					21-Jan-26	38E020TJCHB1FA81	2.958.780	
					21-Jan-26	B4758015T07JG7PC	2.970.000	
					21-Jan-26	Bf9253IRQRS3P4K8	7.670.270	
					21-Jan-26	A09235BMSI99TNUU	4.873.000	
					21-Jan-26	532DE684B8Q70L2B	4.180.000	
					21-Jan-26	4E1300TJCO1I212N	9.768.643	
					21-Jan-26	96531015RBKS39G0	371.470	
					21-Jan-26	F680E0TJDACRS7AR	4.848.602	
					21-Jan-26	ED04B80V6SCLGMJ	3.135.496	
					21-Jan-26	413C73IRSTFMSN80	9.905.500	
					21-Jan-26	9411D884GH2CBMT	2.980.750	
					21-Jan-26	60EF61Q0QPAI2I KA	19.793.785	
					21-Jan-26	F59EE4F9BGDE64F9	3.220.580	
					21-Jan-26	A2B2174HPQN56HS8	2.266.000	
					21-Jan-26	19826015RFE0UCIK	20.898.150	
					21-Jan-26	686EF3IRR1THEVB6	440.000	
					21-Jan-26	98B614F9AO5PJUI5	1.683.058	
					21-Jan-26	B2D7C015TIEBLHCU	785.000	
					21-Jan-26	64D6980V6TG34BB	898.010	
					21-Jan-26	8CA053RQULGOM10	3.521.350	
					21-Jan-26	617643IRRJUM4BK0	536.960	
					21-Jan-26	D48A73IRQ4RKSNF0	584.864	
					21-Jan-26	D401E3IRQHUP3M72	1.795.300	
					21-Jan-26	B095E2MEAVP332H9	763.964	
					21-Jan-26	ACA4A80VA1FEMHK9	540.000	
					22-Jan-26	9D900684C1KGGJL8J	1.466.100	
					22-Jan-26	E0FC84F9AFQAQEI N	414.400	
					22-Jan-26	C57AD74HR01IPJ22	1.797.900	
					22-Jan-26	F010F58MOZGJK9MJ	1.394.595	
					22-Jan-26	9DA5C4F9AMEG571	2.789.190	
					22-Jan-26	A4C281Q0ROCT4RMO	1.778.981	
					22-Jan-26	591F90TJD3DC420F	1.776.117	
					22-Jan-26	04F382MEC9PU1CID	881.564	
					22-Jan-26	39F63684B9KAR8VT	570.090	
					22-Jan-26	C4F8F015T9BL672C	986.288	
					22-Jan-26	D43E15BMQJ72SAK8	446.480	
					22-Jan-26	92E4E015T8FGB16M	537.960	
					22-Jan-26	655952MEC634G575	1.800.000	
					22-Jan-26	E44004F9A08VJQGD	3.583.600	
					22-Jan-26	D59FF684B6JSB677	1.612.541	
					22-Jan-26	63AB22MECDIMNG11	455.000	
					22-Jan-26	349404F9C9NMOG5H7	3.586.160	
					22-Jan-26	FF6AC3IRRE78IEQK	364.000	
					22-Jan-26	6AA2B1Q0SGNTK8EQ	455.000	
					22-Jan-26	A5A13684ABA1PQ07	412.000	
					22-Jan-26	438B880VA1SFPP51	883.600	
					22-Jan-26	446C25BMPTVUJNTK	455.000	
					22-Jan-26	969A5015RQ8QP48S	3.598.870	
					22-Jan-26	D586674HCQ2KTM6	1.801.000	
					22-Jan-26	A4A192MEA11V31VH	538.320	
					22-Jan-26	AC4334F9B45K6D8P	2.023.815	
					22-Jan-26	0F00A5BMPOLKOGUK	570.000	
					22-Jan-26	8E1A1684BBCN394L	1.416.000	
					22-Jan-26	463EA2MEASRJ6DDB	6.373.290	
					22-Jan-26	AB47D015TETVKN60	2.013.514	
					22-Jan-26	75960015RQCCGK06	2.669.663	

RINCIAN PENYETORAN KAS SETELAH TANGGAL NERACA

NO	KODE ES.I	KODE SATKER	NAMA SATKER	Saldo Kas (Rp)	TANGGAL SETOR	NTPN	JUMLAH SETORAN (Rp)	KETERANGAN
					22-Jan-26	2FFE81Q0Q0G06MNGI	562.950	
					22-Jan-26	A73D2015SRJFVOTQ	102.600	
					22-Jan-26	454ED80VAVP4SP59	145.800	
					22-Jan-26	85CBF1Q0RHEE0QAQ	648.030	
					22-Jan-26	93EBB80VC0DUGV1F	290.250	
					22-Jan-26	67F7F4F99VQK0J7R	722.235	
					22-Jan-26	25B2F4F9A00TRD3L	940.432	
					22-Jan-26	C81B54F9AVV31TLB	1.400.400	
					22-Jan-26	9452658MQ0CVJRS8	97.200	
					22-Jan-26	149F12MECVTSJMLJ	291.600	
					22-Jan-26	53454015RC6919DS	97.200	
					22-Jan-26	522662MEBF3824TP	411.840	
					22-Jan-26	638FB2MECBJ67JNP	135.000	
					22-Jan-26	C01890TJB05NCSH	269.250	
					22-Jan-26	9C850015SKVFT80S	324.300	
					22-Jan-26	C22734F9B5IDT0T3	315.555	
					22-Jan-26	18DCA684B6J00KK7	439.170	
					22-Jan-26	3DA6580VBUT7GK0R	463.328	
					22-Jan-26	DA9913IRSEFHCCM2	2.884.865	
					22-Jan-26	128BC3IRSB1MT9IL	455.000	
					22-Jan-26	B25FB0TJC2QB8I5B	455.000	
					22-Jan-26	2410C80VC0K150R5	1.248.300	
					22-Jan-26	D8DAA2MEB4DHE8QJ	1.035.600	
					22-Jan-26	9313A015STB67TE	743.805	
				12.322.700				Kas dari SPM LS yang belum didistribusikan kepada yang berhak per 31 Desember 2025
3	04	484205	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	10.000				Sisa saldo pada rekening bendahara pengeluaran atas uji coba transaksi CMS. Telah dilakukan penarikan tunai atas kas tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada penerima hak
4	04	484208	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	60				Sisa saldo dana titipan pada rekening Bendahara Pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan mekanisme LS Bendahara. Telah dilakukan penarikan tunai atas kas tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada penerima hak
5	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	14.384.908.731				sisa hibah langsung dalam bentuk uang dari UAE atas Program <i>Financing The Regional Development</i>
6	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	130.000	7-Apr-26	3BF571JNGHJG3SSL	130.000	
7	12	027177	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	11.342.378				Kas yang berada di Bendahara Pengeluaran Pembantu atas realisasi belanja perjalanan dinas yang belum dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas sampai dengan 31 Desember 2025
JUMLAH KAS LAINNYA DAN SETARA KAS				14.820.792.658			397.486.643	
TOTAL				14.821.570.443			398.264.428	



LAMPIRAN IX

REKAPITULASI PERSEDIAAN PER SATKER MENURUT AKUN

REKAPITULASI PERSEDIAAN PER SATKER MENURUT AKUN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	KODE ES1	KODE SATKER	KODE KEWENANGAN	NAMA SATKER	AKUN PERSEDIAAN										SALDO PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2025		
					117111	117113	117114	117122	117124	117125	117126	117127	117128	117129		117199	
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	384.232.222	247.963.010	78.165.720	-	-	-	-	-	4.825.310.000	-	437.472.193	5.973.143.145	
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	670.316.158	294.536.600	-	-	-	-	-	-	-	-	247.278.189	1.212.130.947	
4	01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	434.852.978	6.295.020	-	-	-	-	-	-	-	-	343.878	441.491.876	
5	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	48.104.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.123.000	91.227.430	
6	01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	24.163.900	870.000	-	-	-	-	-	-	-	-	39.937.178	64.971.078	
7	01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	181.374.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.411.538	261.785.904	
8	01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	11.137.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.570.651	59.708.021	
9	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	28.152.119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.211.514	63.363.633	
10	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.165.912	62.165.912	
11	02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	127.342.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.342.800	
12	03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500.000	
13	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	6.879.225	116.550	-	9.937.682.563	22.539.706.831	3.177.105.294	-	-	-	-	-	35.661.490.463	
14	04	240270	DK	BADAN PENGELOAL PERBATASAN DAERAH KAB BELU	-	-	-	865.762.700	-	-	-	-	-	-	-	865.762.700	
15	04	356000	DK	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU	-	-	-	1.570.910.000	-	-	-	-	-	-	-	1.570.910.000	
16	04	417936	DK	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI	-	-	-	1.879.281.000	-	-	-	-	-	-	-	1.879.281.000	
17	04	690639	DK	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANIMBAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	114.067.364	-	-	-	-	-	-	12.526.537.311	515.355.000	-	16.010.578	13.171.970.253	
19	05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	22.205.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.643.419	24.849.373	
20	05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	15.177.655	1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.927.655	
21	05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	2.805.530	816.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.621.675	
22	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	276.638.470	7.731.750	1.854.000	1.897.536.691	31.596.932.384	25.408.511.400	135.560.257.780	106.420.451.233	-	1.599.201.550	10.349.760	302.779.465.018	
23	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	385.656.612	15.029.721	-	-	-	-	-	1.088.228.700	-	-	-	1.488.915.033	
24	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	409.106.441	27.528.300	-	-	-	-	-	1.534.362.000	2.855.755.722	-	-	4.826.752.463	
25	09	662766	KP	DITJEN KEUANGAN DAERAH	130.195.640	14.777.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.973.170	
26	11	403222	KP	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	49.224.753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.952.340	243.177.093
27	12	027114	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	12.956.494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.956.494	
28	12	027177	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	8.467.316	639.500	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.256.816	
29	12	403216	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.779.945	4.779.945	
30	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	116.523.692	1.685.505	1.509.767	-	-	-	-	-	-	-	31.873.219	151.592.183	
31	12	506137	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	29.759.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.759.060	
32	12	506138	KD	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	10.283.770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.500	10.450.270	
TOTAL					3.505.124.319	619.739.631	81.679.487	16.151.172.954	54.136.639.215	28.585.616.694	135.560.257.780	121.569.579.244	8.196.420.722	1.599.201.550	1.254.289.814	371.259.721.410	



LAMPIRAN X

RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER ESELON I

RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER ESELON I

LAMPIRAN X

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	Kode Transaksi	Setjen	Itjen	Ditjen Polpum	Ditjen BAK	Ditjen Bina Pemd	Ditjen Bina Bangda	Ditjen Otda	Ditjen Dukcapil	Ditjen Bina Keuda	BSKDN	BPSDM	TOTAL
Saldo 31 Desember 2024		4.003.439.661	249.276.380	-	25.671.175.183	14.230.579.154	278.372.114.776	1.678.218.300	14.228.224.513	35.357.450	124.821.163	277.050.396	338.870.256.976
Koreksi Saldo Awal	M01	2.968.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.968.660
Pembelian	M02	10.780.817.844	198.785.060	955.068.600	575.818.050	1.743.379.143	47.088.769.520	1.257.672.843	269.900.806.400	1.025.157.368	412.201.648	1.519.456.810	335.457.933.286
Transfer Masuk	M03	-	-	-	-	636.480.000	-	-	-	-	-	-	636.480.000
Hibah (Masuk)	M04	4.825.310.000	-	-	22.294.863.607	-	-	-	-	-	-	-	27.120.173.607
Perolehan Lainnya	M06	1.198.692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.779.945	5.978.637
Reklasifikasi Masuk	M10	83.057.318	-	-	-	24.460.000	16.657.036.000	-	-	-	48.302.060	35.055.900	16.847.911.278
Reklasifikasi Dari Aset	M11	-	-	-	-	45.000.000	-	-	-	-	-	-	45.000.000
Persediaan Dalam Proses Masuk	M15	-	-	-	-	-	64.559.752.000	-	-	-	-	-	64.559.752.000
Koreksi Nilai Tambah	M98	2.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.240
Hasil Opname Fisik	P01	49.866.574.108	-	-	-	-	-	-	-	3.933.000	-	-	49.870.507.108
Mutasi Tambah		65.559.928.862	198.785.060	955.068.600	22.870.681.657	2.449.319.143	128.305.557.520	1.257.672.843	269.900.806.400	1.029.090.368	460.503.708	1.559.292.655	494.546.706.816
Habis Pakai	K01	(6.557.111.666)	(320.718.640)	(949.568.600)	(7.706.431.047)	(1.901.193.857)	(1.153.785.239)	(1.166.655.647)	(279.302.278.450)	(915.541.648)	(293.845.718)	(1.580.892.383)	(301.848.022.895)
Transfer Keluar	K02	(636.480.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(636.480.000)
Hibah Keluar	K03	-	-	-	-	-	(1.781.455.000)	-	-	-	-	-	(1.781.455.000)
Usang	K04	(22.512.222)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22.512.222)
Rusak	K05	-	-	-	-	(69.255.000)	-	-	-	-	-	-	(69.255.000)
Keluar Lainnya	K06	(2.968.660)	-	-	(857.981.630)	-	(14.688.703.000)	-	-	-	-	-	(15.549.653.290)
Catat Persediaan tak Dikuasai	K09	-	-	-	-	(1.465.122.684)	(4.990.853.839)	(280.320.463)	-	-	-	-	(6.736.296.986)
Reklasifikasi Keluar	K10	(83.057.318)	-	-	-	(24.460.000)	(16.657.036.000)	-	-	-	(48.302.060)	(35.055.900)	(16.847.911.278)
Reklasifikasi ke Aset	K11	(199.156.200)	-	-	-	-	-	-	-	(3.933.000)	-	-	(203.089.200)
Persediaan Dalam Proses Keluar	K15	-	-	-	-	-	(64.559.752.000)	-	-	-	-	-	(64.559.752.000)
Koreksi Nilai Kurang	K98	(2.240)	-	-	-	-	(65.556.220)	-	-	-	-	-	(65.558.460)
Koreksi Kuantitas Kurang	K99	-	-	-	-	(2.497.800)	-	-	-	-	-	(1.600.000)	(4.097.800)
Hasil Opname Fisik	P01	(53.832.092.271)	-	-	-	-	(1.065.980)	-	-	-	-	-	(53.833.158.251)
Mutasi Kurang		(61.333.380.577)	(320.718.640)	(949.568.600)	(8.564.412.677)	(3.462.529.341)	(103.898.207.278)	(1.446.976.110)	(279.302.278.450)	(919.474.648)	(342.147.778)	(1.617.548.283)	(462.157.242.382)
Saldo 31 Desember 2025		8.229.987.946	127.342.800	5.500.000	39.977.444.163	13.217.368.956	302.779.465.018	1.488.915.033	4.826.752.463	144.973.170	243.177.093	218.794.768	371.259.721.410

hu f



LAMPIRAN XI

RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER AKUN

RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER AKUN

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	Kode Transaksi	Barang Konsumsi (117111)	Bahan untuk Pemeliharaan (117113)	Suku Cadang (117114)	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (117122)	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (117124)	Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat (117125)	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (117126)	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat (117127)	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat (117128)	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses (117129)	Bahan Baku (117131)	Persediaan Lainnya (117199)	TOTAL
Saldo 31 Desember 2024		3.616.888.027	625.989.968	83.808.068	21.391.184.913	33.349.858.276	28.860.434.489	71.066.062.000	139.951.231.767	2.521.084.896	36.251.577.100	-	1.152.137.472	338.870.256.976
Saldo Awal	M01	2.968.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.968.660
Pembelian	M02	14.623.152.064	2.674.373.009	603.281.590	196.546.791	3.044.600.009	-	11.884.103.000	3.000.000.000	266.362.696.732	30.765.358.080	74.358.700	2.229.463.311	335.457.933.286
Transfer Masuk	M03	-	-	-	-	-	-	-	-	636.480.000	-	-	-	636.480.000
Hibah (Masuk)	M04	-	-	-	-	22.294.863.607	-	-	-	4.825.310.000	-	-	-	27.120.173.607
Perolehan Lainnya	M06	1.273.692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.704.945	5.978.637
Reklasifikasi Masuk	M10	34.723.060	35.437.900	-	-	22.422.000	-	16.656.000.000	-	-	-	-	99.328.318	16.847.911.278
Reklasifikasi Dari Aset	M11	-	-	-	-	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000
Persediaan Dalam Proses Masuk	M15	-	-	-	16.656.000.000	-	-	47.903.752.000	-	-	-	-	-	64.559.752.000
Koreksi Nilai Tambah	M98	2.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.240
Hasil Opname Fisik	P01	49.806.972.249	38.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.784.859	49.870.507.108
Mutasi Tambah		64.469.091.965	2.748.560.909	603.281.590	16.852.546.791	25.406.885.616	-	76.443.855.000	3.000.000.000	271.824.486.732	30.765.358.080	74.358.700	2.358.281.433	494.546.706.816
Habis Pakai	K01	(11.382.223.091)	(2.142.332.446)	(605.260.171)	(5.436.558.750)	(1.810.002.009)	-	-	(13.074.966.000)	(265.512.670.906)	-	(11.148.800)	(1.872.860.722)	(301.848.022.895)
Transfer Keluar	K02	-	-	-	-	-	-	-	-	(636.480.000)	-	-	-	(636.480.000)
Hibah Keluar	K03	-	-	-	-	-	-	-	(1.781.455.000)	-	-	-	-	(1.781.455.000)
Usang	K04	(2.360.646)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.151.576)	(22.512.222)
Rusak	K05	-	-	-	-	-	-	-	(69.255.000)	-	-	-	-	(69.255.000)
Keluar Lainnya	K06	(2.968.660)	-	-	-	(2.804.600.000)	-	(11.884.103.000)	-	-	(857.981.630)	-	-	(15.549.653.290)
Catat Persediaan tak Dikuasai	K09	-	-	-	-	(5.502.668)	(274.817.795)	-	(6.455.976.523)	-	-	-	-	(6.736.296.986)
Reklasifikasi Keluar	K10	(81.693.228)	-	(150.000)	(16.656.000.000)	-	-	-	-	-	-	(62.534.900)	(47.533.150)	(16.847.911.278)
Reklasifikasi ke Aset	K11	(203.089.200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(203.089.200)
Persediaan Dalam Proses Keluar	K15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(64.559.752.000)	-	-	(64.559.752.000)
Koreksi Nilai Kurang	K98	(2.240)	-	-	-	-	-	(65.556.220)	-	-	-	-	-	(65.558.460)
Koreksi Kuantitas Kurang	K99	(4.097.800)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.097.800)
Hasil Opname Fisik	P01	(52.904.420.808)	(612.478.800)	-	-	-	-	-	-	-	-	(675.000)	(315.583.643)	(53.833.158.251)
Mutasi Kurang		(64.580.855.673)	(2.754.811.246)	(605.410.171)	(22.092.558.750)	(4.620.104.677)	(274.817.795)	(11.949.659.220)	(21.381.652.523)	(266.149.150.906)	(65.417.733.630)	(74.358.700)	(2.256.129.091)	(462.157.242.382)
Saldo 31 Desember 2025		3.505.124.319	619.739.631	81.679.487	16.151.172.954	54.136.639.215	28.585.616.694	135.560.257.780	121.569.579.244	8.196.420.722	1.599.201.550	-	1.254.289.814	371.259.721.410



LAMPIRAN XII

DAFTAR PERSEDIAAN TIDAK DIKUASAI PER 31 DESEMBER 2025

DAFTAR PERSEDIAAN TIDAK DIKUASAI PER 31 DESEMBER 2025

NO	KODE	URAIAN ESELON I	KODE	URAIAN SATKER EKS-TP	KODE	URAIAN AKUN	URAIAN BARANG	NILAI
1	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	179317	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN 179317	1.132.438.140
			170010	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA (TP)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	RUMAH DINAS CAMAT MIANGAS	702.568.212
					117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	KANTOR CAMAT PERBATASAN	692.439.632
			SUBTOTAL					
2	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	029367	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUKABUMI	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN PASAR RAISER IKAN HIAS	166.000.000
			029472	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAJALENGKA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI PASAR PERMANEN	80.925.000
			139335	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. KUBU RAYA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	GEDUNG KOPERASI PASAR	533.658.780
			239273	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. SUMBAWA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	604.669.664
					117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI PASAR PERMANEN	79.869.240
			SUBTOTAL					
3	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	141019	DINAS KIMPRASWIL KAB. GUNUNG MAS (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	4.249.178.699
							BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN	218.912.400
							MESS WISMA BUNGALOW TEMPAT PERISTIRAHATAN PERMANEN	522.762.740
			SUBTOTAL					
3	07	DITJEN OTDA	120730	BAPPEDA KAB. LAMPUNG TIMUR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	UNINTERRUPTED POWER SUPPLY (UPS)	7.728.000
			SUBTOTAL					
TOTAL PERSEDIAAN TIDAK DIKUASAI								8.991.150.507



LAMPIRAN XIII

REKAPITULASI ASET TETAP PER SATKER PER 31 DESEMBER 2025

REKAPITULASI ASET TETAP PER SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	KODE ES1	KODE SAKTER	KODE KEWENANGAN	NAMA SAKTER	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN DAN JEMBATAN	IRIGASI	JARINGAN	ASET TETAP RENOVASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	AKUMULASI PENYUSUTAN IRIGASI	AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA
ESELON I SEKRETARIAT JENDERAL																			
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	2.443.605.071.000	681.224.158.242	560.576.831.779	1.487.045.700	-	26.763.748.222	857.387.694	996.126.040	-	(458.025.162.588)	(109.696.098.562)	(1.262.014.890)	-	(14.417.307.091)	(206.406.424)
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	7.311.653.653.121	171.097.744.411	602.089.186.599	13.663.857.800	8.224.263.840	9.857.862.736	-	11.402.404.956	-	(137.625.127.587)	(162.738.653.692)	(10.044.489.949)	(3.532.193.997)	(8.146.845.101)	(1.291.167.642)
4	01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	-	28.010.131.819	-	-	-	-	5.597.607.638	-	-	-	-	-	-	-	-
5	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	29.609.419.000	17.377.825.283	100.675.987.844	4.792.195.000	202.033.000	15.439.902.461	-	2.314.510.500	-	(16.655.118.173)	(18.779.622.239)	(4.525.961.946)	(47.702.238)	(6.272.454.635)	(1.385.202.000)
6	01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	19.427.487.290	32.161.358.045	184.888.370.496	3.691.287.000	201.896.000	14.647.395.453	-	2.230.891.200	-	(31.459.486.793)	(35.032.928.486)	(3.137.593.950)	(50.474.003)	(6.419.409.335)	(1.095.686.000)
7	01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	67.384.464.000	31.055.995.623	127.141.045.579	7.971.764.000	572.395.560	14.895.342.304	-	2.517.594.110	-	(30.453.128.730)	(25.280.346.011)	(7.971.764.000)	(386.426.705)	(6.838.105.941)	(1.186.642.240)
8	01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	120.548.358.000	15.390.220.638	200.769.894.351	19.588.249.120	3.984.743.385	8.266.001.130	-	2.139.039.090	19.348.330.223	(14.022.771.610)	(25.280.346.011)	(10.490.802.429)	(1.498.727.750)	(1.694.586.925)	(1.025.898.500)
9	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	231.199.726.000	36.478.181.550	134.922.899.320	8.086.188.000	29.786.903.000	28.159.224.989	-	2.361.784.565	-	(36.019.018.719)	(24.102.714.796)	(6.401.037.200)	(24.682.998.302)	(12.903.507.471)	(1.110.740.690)
10	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	84.455.622.000	43.437.404.418	197.508.321.388	4.101.699.325	49.942.712	25.705.464.617	-	1.161.876.215	-	(43.381.537.738)	(33.604.009.411)	(3.343.344.044)	(7.491.405)	(8.075.784.075)	(377.293.000)
SUBTOTAL PER ESELON I					10.307.883.800.411	1.056.233.020.029	2.108.572.437.456	63.382.285.945	43.022.177.497	143.734.941.912	6.454.995.332	25.124.226.676	19.348.330.223	(784.862.275.609)	(434.847.876.479)	(47.177.008.408)	(30.206.014.400)	(64.768.000.574)	(7.679.036.496)
ESELON I INSPEKTORAT JENDERAL																			
11	02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	142.267.725.000	26.437.852.827	45.925.502.780	-	-	-	-	-	-	-	(19.252.125.868)	(9.013.274.148)	-	-	-
SUBTOTAL PER ESELON I					142.267.725.000	26.437.852.827	45.925.502.780	-	-	-	-	-	-	-	(19.252.125.868)	(9.013.274.148)	-	-	-
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM																			
12	03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	-	19.041.914.546	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.059.917.424)	-	-	-	-
SUBTOTAL PER ESELON I					-	19.041.914.546	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.059.917.424)	-	-	-	-
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN																			
13	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	-	150.741.481.206	1.576.390.000	-	-	11.245.442.670	-	17.686.224.808	-	(131.860.467.091)	(305.147.376)	-	-	(4.357.604.790)	-
SUBTOTAL PER ESELON I					-	150.741.481.206	1.576.390.000	-	-	11.245.442.670	-	17.686.224.808	-	(131.860.467.091)	(305.147.376)	-	-	(4.357.604.790)	-
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA																			
14	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	483.090.835.000	84.815.444.309	117.506.143.485	637.667.000	17.967.000	1.369.558.074	-	13.380.368.830	24.997.200	(81.483.421.569)	(38.371.844.032)	(637.667.000)	(5.873.823)	(901.138.036)	(214.213.042)
15	05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	34.042.849.000	10.600.541.130	39.822.425.497	-	-	13.230.000	-	-	-	(9.940.246.200)	(7.793.009.076)	-	-	(280.670.750)	(7.375.000)
16	05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	62.457.627.000	5.496.573.161	23.039.415.000	-	-	800.000	-	-	-	(5.217.763.562)	(6.558.019.148)	-	-	-	-
17	05	613629	KP	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	33.642.823.493	3.278.397.630	9.170.797.000	308.907.000	-	198.734.000	-	73.365.000	-	(13.165.219.386)	(1.897.314.704)	(308.907.000)	-	(79.493.600)	-
SUBTOTAL PER ESELON I					613.234.134.493	104.190.956.230	189.538.780.982	946.574.000	17.967.000	2.094.318.874	-	13.467.763.830	24.997.200	(99.806.650.717)	(54.620.186.960)	(946.574.000)	(5.873.823)	(1.261.302.386)	(221.588.042)
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH																			
18	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	479.054.657.019	68.715.386.757	105.804.494.380	2.057.890.800	1.572.044.000	807.674.890	-	4.951.568.889	-	(66.320.235.840)	(22.277.301.965)	(2.057.890.800)	(351.641.420)	(533.587.355)	-
SUBTOTAL PER ESELON I					479.054.657.019	68.715.386.757	105.804.494.380	2.057.890.800	1.572.044.000	807.674.890	-	4.951.568.889	-	(66.320.235.840)	(22.277.301.965)	(2.057.890.800)	(351.641.420)	(533.587.355)	-
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH																			
19	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	-	18.946.883.882	-	-	-	-	-	-	-	-	(18.002.545.717)	-	-	-	-
SUBTOTAL PER ESELON I					-	18.946.883.882	-	-	-	-	-	-	-	-	(18.002.545.717)	-	-	-	-
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																			
20	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35.098.225.956	2.995.205.902.037	36.606.283.783	-	2.084.000	2.861.849.000	7.621.133.861	46.194.500	-	(2.391.761.551.367)	(6.740.566.682)	-	(1.146.196)	(770.977.563)	(419.899.750)
SUBTOTAL PER ESELON I					35.098.225.956	2.995.205.902.037	36.606.283.783	-	2.084.000	2.861.849.000	7.621.133.861	46.194.500	-	(2.391.761.551.367)	(6.740.566.682)	-	(1.146.196)	(770.977.563)	(419.899.750)
ESELON I DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH																			
21	09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	-	20.974.352.229	-	-	-	-	1.791.534.675	219.886.683	-	(18.985.347.912)	-	-	-	-	-
SUBTOTAL PER ESELON I					-	20.974.352.229	-	-	-	-	1.791.534.675	219.886.683	-	(18.985.347.912)	-	-	-	-	-
ESELON I BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																			
22	11	403222	KP	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	224.894.826.500	24.317.018.668	32.971.251.829	121.615.000	336.689.400	47.428.700	-	517.106.736	-	(22.639.152.882)	(10.842.176.205)	(103.372.750)	(71.546.498)	(20.157.197)	-
SUBTOTAL PER ESELON I					224.894.826.500	24.317.018.668	32.971.251.829	121.615.000	336.689.400	47.428.700	-	517.106.736	-	(22.639.152.882)	(10.842.176.205)	(103.372.750)	(71.546.498)	(20.157.197)	-
ESELON I BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																			
23	12	027114	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	347.284.531.000	17.553.830.941	30.800.116.114	981.978.400	123.391.000	623.374.000	-	206.819.000	-	(15.639.051.213)	(12.694.157.202)	(981.978.400)	(34.077.707)	(217.132.089)	-
24	12	027177	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	40.926.454.000	10.530.746.468	34.616.293.260	2.653.448.000	573.132.000	862.362.170	-	348.650.229	-	(8.441.535.396)	(7.127.672.521)	(2.293.587.950)	(469.785.648)	(279.665.515)	-
25	12	352588	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	-	-	75.632.942.000	-	-	-	-	-	-	-	(13.892.616.728)	-	-	-	-
26	12	403216	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	119.023.192.923	18.715.236.625	44.488.510.185	2.970.053.500	193.060.000	1.657.662.471	-	587.930.500	-	(16.543.730.306)	(10.189.511.999)	(2.562.492.246)	(62.595.647)	(736.182.514)	-
27	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	706.789.350.510	69.027.446.151	148.733.123.112	-	33.753.000	4.085.237.140	-	1.385.222.775	-	(64.382.564.760)	(39.836.646.350)	-	(13.236.013)	(2.211.307.632)	(7.150.000)
28	12	506137	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	44.475.536.000	15.328.655.174	47.086.335.407	2.219.407.537	587.061.000	1.921.508.468	-	289.207.750	-	(12.661.476.929)	(9.934.238.212)	(2.219.407.537)	(587.061.000)	(620.134.231)	(15.400.000)
29	12	506138	KD	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	198.386.414.000	23.245.161.477	37.333.053.533	1.910.925.134	1.231.749.000	546.531.335	-	148.395.500	-	(17.934.510.058)	(9.368.153.886)	(1.831.595.855)	(581.659.251)	(168.165.371)	-
SUBTOTAL PER ESELON I					1.456.885.478.433	154.401.076.836	418.690.373.611	10.735.812.571	2.742.146.000	9.696.675.584	-	2.966.225.754	-	(135.602.866.662)	(103.042.996.898)	(9.889.061.988)	(1.748.415.266)	(4.232.587.352)	(22.550.000)
JUMLAH					13.259.318.847.812	4.639.205.845.247	2.939.685.514.821	77.244.178.316	47.693.107.897	170.488.331.630	15.867.663.868	64.979.197.876	19.373.327.423	(3.705.153.139.089)	(641.689.526.713)	(60.173.907.946)	(32.384.637.603)	(75.944.217.217)	(8.343.074.288)



LAMPIRAN XIV

RINCIAN MUTASI TANAH PER UNIT ESELON I

RINCIAN MUTASI TANAH PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	KODE TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	PEMDES	BANGDA	DUKCAPIL	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo per 31 Desember 2024		10.335.290.899.077	142.267.725.000	613.234.134.493	479.054.657.019	-	224.894.826.500	1.456.885.478.433	13.251.627.720.522
Koreksi Saldo Awal	100	35.098.225.956						-	35.098.225.956
Transfer Masuk	102	84.455.622.000				35.098.225.956		-	127.244.975.246
Mutasi Tambah		119.553.847.956	-	-	-		-	-	162.343.201.202
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(35.098.225.956)						-	(35.098.225.956)
Transfer Keluar	302	(119.553.847.956)						-	(119.553.847.956)
Mutasi Kurang		(154.652.073.912)	-	-	-		-	-	(154.652.073.912)
Saldo per 31 Desember 2025		10.300.192.673.121	142.267.725.000	613.234.134.493	479.054.657.019	-	224.894.826.500	1.456.885.478.433	13.259.318.847.812



LAMPIRAN XV

RINCIAN MUTASI PERALATAN DAN MESIN PER UNIT ESELON I

RINCIAN MUTASI PERALATAN DAN MESIN PER UNIT ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	KODE TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	DITJEN POLPUM	DITJEN BAK	DITJEN BINA PEMDES	DITJEN BINA BANGDA	DITJEN OTDA	DITJEN DUKCAPIL	DITJEN BINA KEUDA	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Saldo per 31 Desember 2024		945.568.072.283	27.007.975.396	17.595.012.477	134.217.143.473	103.099.088.506	67.403.183.914	23.268.106.047	2.643.463.301.276	20.384.999.557	25.825.828.789	148.927.484.054	4.156.760.195.772
Pembelian	101	131.337.269.481	253.967.870	1.499.960.641	1.737.595.925	1.340.582.462	1.227.815.097	59.854.956	186.888.735.178	585.950.072	291.387.150	12.297.781.905	337.520.900.737
Penyelesaian Pembangunan Langsung	113	41.144.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.144.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	202	837.916.368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837.916.368
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	105	-	-	-	14.768.086.908	-	-	-	240.563.856.000	-	-	-	255.331.942.908
Perolehan Lainnya	112	45.176.395	-	-	14.029.936.908	171.044.312	-	-	-	-	-	34.776.300	14.280.933.915
Koreksi Saldo Awal	100	155.900.395	-	-	-	98.848.278	-	-	-	-	-	-	254.748.673
Transfer Masuk	102	190.544.310	-	-	18.654.900	-	18.654.900	10.000.000	-	-	-	-	237.854.110
Hibah Masuk	103	20.489.245.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.489.245.000
Reklasifikasi Masuk	107	3.826.509.000	-	-	-	-	-	-	99.589.200	-	46.065.000	-	3.972.163.200
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	115	188.644.500	-	-	-	-	-	-	-	3.933.000	-	-	192.577.500
Koreksi Susulan	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.340.003	2.340.003
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	402	275.254.314	-	-	-	47.378.000	241.592.500	-	-	-	-	49.450.000	613.674.814
Mutasi Tambah		157.387.603.763	253.967.870	1.499.960.641	30.554.274.641	1.657.853.052	1.488.062.497	69.854.956	427.552.180.378	589.883.072	337.452.150	12.384.348.208	633.775.441.228
Koreksi Susulan	214	(540.478.320)	-	-	-	-	-	-	-	(530.400)	-	-	(541.008.720)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(14.304.500)	-	(1.790.338)	-	(42.212.578)	-	-	(751.006.306)	-	-	-	(809.313.722)
Penghapusan	301	-	-	-	-	-	-	(334.516.696)	-	-	-	-	(334.516.696)
Transfer Keluar	302	(47.309.800)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(47.309.800)
Hibah Keluar	303	(3.775.955.000)	-	-	-	(70.067.500)	-	-	-	-	-	(6.129.686.896)	(9.975.709.396)
Reklasifikasi Keluar	304	(3.826.509.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	(46.065.000)	-	(3.872.574.000)
Koreksi Pencatatan	305	(45.176.395)	-	-	(14.029.936.908)	-	-	-	(50.714.100.000)	-	-	-	(64.789.213.303)
Penghapusan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	369	-	-	-	-	(11.877.000)	-	-	-	-	-	-	(11.877.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	401	(38.472.923.002)	(824.090.439)	(51.268.234)	-	(441.828.250)	(175.859.654)	(4.056.560.425)	(24.344.473.311)	-	(1.800.197.271)	(781.068.530)	(70.948.269.116)
Mutasi Kurang		(46.722.656.017)	(824.090.439)	(53.058.572)	(14.029.936.908)	(565.985.328)	(175.859.654)	(4.391.077.121)	(75.809.579.617)	(530.400)	(1.846.262.271)	(6.910.755.426)	(151.329.791.753)
Saldo per 31 Desember 2025		1.056.233.020.029	26.437.852.827	19.041.914.546	150.741.481.206	104.190.956.230	68.715.386.757	18.946.883.882	2.995.205.902.037	20.974.352.229	24.317.018.668	154.401.076.836	4.639.205.845.247
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		(784.862.275.609)	(19.252.125.868)	(16.059.917.424)	(131.860.467.091)	(99.806.650.717)	(66.320.235.840)	(18.002.545.717)	(2.391.761.551.367)	(18.985.347.912)	(22.639.152.882)	(135.602.868.662)	(3.705.153.139.089)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		271.370.744.420	7.185.726.959	2.981.997.122	18.881.014.115	4.384.305.513	2.395.150.917	944.338.165	603.444.350.670	1.989.004.317	1.677.865.786	18.798.208.174	934.052.706.158



LAMPIRAN XVI

RINCIAN PEMBELIAN (101) PERALATAN DAN MESIN PER SATKER

RINCIAN PEMBELIAN (101) PERALATAN DAN MESIN PER SATKER

Es I	Kode	Nama Satker	Nilai
01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	17.780.376.099
01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	614.207.500
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	108.779.152.362
01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	420.818.749
01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	563.814.000
01	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	398.501.511
01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	2.780.399.260
02	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	253.967.870
03	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	1.499.960.641
04	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1.737.595.925
05	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	44.380.000
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	1.070.602.458
05	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	225.600.004
06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.227.815.097
07	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	59.854.956
08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	186.888.735.178
09	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	585.950.072
11	403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	291.387.150
12	506137	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	964.427.401
12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.560.191.821
12	027114	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	1.338.953.429
12	403216	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	1.506.742.082
12	027177	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	1.022.982.500
12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI	3.904.484.672
TOTAL			337.520.900.737



LAMPIRAN XVII

RINCIAN MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN PER UNIT ESELON I

RINCIAN MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XVII

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	DITJEN BAK	DITJEN BINA PEMDES	DITJEN BINA BANGDA	DITJEN DUKCAPIL	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo per 31 Desember 2024		2.084.074.148.806	45.925.502.780	1.576.390.000	188.820.033.099	103.940.869.452	36.357.571.783	32.772.037.871	429.126.364.858	2.922.592.918.649
Pembelian	101	720.208.000	-	-	-	-	123.543.000	-	2.592.873.291	3.436.624.291
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	202	8.966.244.814	-	-	887.167.545	1.797.075.728	-	-	833.515.000	12.484.003.087
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	105	6.670.112.787	-	-	-	-	-	-	-	6.670.112.787
Pengembangan Melalui KDP	208	260.659.796	-	-	-	-	-	199.213.958	8.849.025.150	9.308.898.904
Perolehan Lainnya	112	69.655.000	-	-	-	-	-	-	-	69.655.000
Koreksi Saldo Awal	100	6.954.624.000	-	-	-	-	-	-	-	6.954.624.000
Transfer Masuk	102	-	-	-	-	-	125.169.000	-	-	125.169.000
Hibah Masuk	103	127.356.000	-	-	-	-	-	-	-	127.356.000
Reklasifikasi Masuk	107	393.405.000	-	-	-	-	-	-	505.750.000	899.155.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	204	873.865.428	-	-	-	-	-	-	978.407	874.843.835
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	206	642.024.528	-	-	-	-	-	-	-	642.024.528
Koreksi Susulan	214	320.850.000	-	-	-	66.549.200	-	-	2.459.111.418	2.846.510.618
Mutasi Tambah		25.999.005.353	-	-	887.167.545	1.863.624.928	248.712.000	199.213.958	15.241.253.266	44.438.977.050
Koreksi Susulan	214	(5.968.088)	-	-	-	-	-	-	-	(5.968.088)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(655.324.615)	-	-	(168.419.662)	-	-	-	(2.935.222)	(826.679.499)
Transfer Keluar	302	(125.169.000)	-	-	-	-	-	-	-	(125.169.000)
Hibah Keluar	303	-	-	-	-	-	-	-	(22.734.023.000)	(22.734.023.000)
Reklasifikasi Keluar	304	(393.405.000)	-	-	-	-	-	-	(505.750.000)	(899.155.000)
Koreksi Pencatatan	305	(320.850.000)	-	-	-	-	-	-	(2.434.536.291)	(2.755.386.291)
Mutasi Kurang		(1.500.716.703)	-	-	(168.419.662)	-	-	-	(25.677.244.513)	(27.346.380.878)
Saldo per Saldo per 31 Desember 2025		2.108.572.437.456	45.925.502.780	1.576.390.000	189.538.780.982	105.804.494.380	36.606.283.783	32.971.251.829	418.690.373.611	2.939.685.514.821
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		(434.847.876.479)	(9.013.274.148)	(305.147.376)	(54.620.186.960)	(22.277.301.965)	(6.740.566.682)	(10.842.176.205)	(103.042.996.898)	(641.689.526.713)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		1.673.724.560.977	36.912.228.632	1.271.242.624	134.918.594.022	83.527.192.415	29.865.717.101	22.129.075.624	315.647.376.713	2.297.995.988.108

hu f



LAMPIRAN XVIII

RINCIAN MUTASI JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PER UNIT ESELON I

RINCIAN MUTASI JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN PER UNIT ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	DITJEN BAK	DITJEN BINA PEMDES	DITJEN BINA BANGDA	DITJEN DUKCAPIL	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo per 31 Desember 2024		247.236.106.832	11.245.442.670	3.058.859.874	4.437.609.690	2.863.933.000	505.733.100	30.445.901.814	299.793.586.980
Pembelian	101	2.731.117.800	-	-	-	-	-	-	2.731.117.800
Pengembangan Nilai Aset	202	-	-	-	-	-	-	308.302.500	308.302.500
Transfer Masuk	102	-	-	-	-	-	-	546.531.335	546.531.335
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	204	184.293.560	-	-	-	-	-	-	184.293.560
Mutasi Tambah		2.915.411.360	-	-	-	-	-	854.833.835	3.770.245.195
Koreksi Susulan	214	(12.112.838)	-	-	-	-	-	-	(12.112.838)
Transfer Keluar	302	-	-	-	-	-	-	(546.531.335)	(546.531.335)
Hibah Keluar	303	-	-	-	-	-	-	(7.579.570.159)	(7.579.570.159)
Mutasi Kurang		(12.112.838)	-	-	-	-	-	(8.126.101.494)	(8.138.214.332)
Saldo per 31 Desember 2025		250.139.405.354	11.245.442.670	3.058.859.874	4.437.609.690	2.863.933.000	505.733.100	23.174.634.155	295.425.617.843
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		(142.151.023.382)	(4.357.604.790)	(2.213.750.209)	(2.943.119.575)	(772.123.759)	(195.076.445)	(15.870.064.606)	(168.502.762.766)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		107.988.381.972	6.887.837.880	845.109.665	1.494.490.115	2.091.809.241	310.656.655	7.304.569.549	126.922.855.077



LAMPIRAN XIX

RINCIAN MUTASI ASET TETAP LAINNYA PER UNIT ESELON I

RINCIAN MUTASI ASET TETAP LAINNYA PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XIX

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	POLPUM	BAK	PEMDES	BANGDA	OTDA	DUKCAPIL	KEUDA	BSKDN	BPSPDM	JUMLAH
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo per 31 Desember 2024		31.037.584.948	642.024.528	17.686.224.808	13.580.320.108	4.951.568.889	14.521.363.182	7.196.688.361	1.913.718.758	519.862.436	2.966.225.754	95.015.581.772
Saldo Awal	100	-	-	-	85.282.042	-	-	-	-	-	-	85.282.042
Pembelian	101	418.008.000	-	-	-	-	-	570.229.200	110.100.000	-	-	1.098.337.200
Transfer Masuk	102	42.375.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.375.960
Hibah Masuk	103	85.465.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.465.500
Reklasifikasi Masuk	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perolehan Lainnya	112	721.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721.000
Likuidasi Masuk	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koreksi Susulan	214	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
Mutasi Tambah		546.570.960	-	-	85.282.042	-	-	570.229.200	110.100.000	-	-	1.312.182.202
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	-	-	-	-	-	-	-	(12.397.400)	-	-	(12.397.400)
Transfer Keluar	302	(1.601.900)	(642.024.528)	-	-	-	-	-	-	-	-	(643.626.428)
Reklasifikasi Keluar	304	-	-	-	-	-	-	(99.589.200)	-	-	-	(99.589.200)
Koreksi Pencatatan	305	(996.000)	-	-	(144.530.320)	-	-	-	-	-	-	(145.526.320)
Likuidasi Keluar	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penghentian Aset Dari Penggunaan	401	(2.336.000)	-	-	(53.308.000)	-	(14.521.363.182)	-	-	(2.755.700)	-	(14.579.762.882)
Mutasi Kurang		(4.933.900)	(642.024.528)	-	(197.838.320)	-	(14.521.363.182)	(99.589.200)	(12.397.400)	(2.755.700)	-	(15.480.902.230)
Saldo per 31 Desember 2025		31.579.222.008	-	17.686.224.808	13.467.763.830	4.951.568.889	-	7.667.328.361	2.011.421.358	517.106.736	2.966.225.754	80.846.861.744
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025		(7.679.036.496)	-	-	(221.588.042)	-	-	(419.899.750)	-	-	(22.550.000)	(8.343.074.288)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		23.900.185.512	-	17.686.224.808	13.246.175.788	4.951.568.889	-	7.247.428.611	2.011.421.358	517.106.736	2.943.675.754	72.503.787.456



LAMPIRAN XX

RINCIAN MUTASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan PER SATKER

RINCIAN MUTASI KDP PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	BAK	PEMDES	DUKCAPIL	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo per 31 Desember 2024		24.948.370.899	-	24.997.200	-	-	393.501.650	25.366.869.749
Saldo Awal	501	5.600.040.676	-	-	-	-	-	5.600.040.676
Perolehan Penambahan KDP	502	406.018.177	14.768.086.908	-	168.394.699.200	22.000.000	7.728.096.236	191.318.900.521
Pengembangan KDP	503	925.261.101	-	-	21.455.056.800	177.213.958	1.081.191.214	23.638.723.073
Koreksi Nilai KDP Bertambah	504	1.070.072.111	11.971.083.367	-	50.714.100.000	-	-	63.755.255.478
Perolehan Lainnya KDP	510	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Masuk KDP	514	-	-	-	-	-	-	-
Mutasi Tambah		8.001.392.065	26.739.170.275	-	240.563.856.000	199.213.958	8.809.287.450	284.312.919.748
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	105	(6.670.112.787)	(14.768.086.908)	-	(240.563.856.000)	-	-	(262.002.055.695)
Pengembangan Melalui KDP	208	(260.659.796)	-	-	-	(199.213.958)	(8.849.025.150)	(9.308.898.904)
Penghapusan	505	-	-	-	-	-	(318.987.650)	(318.987.650)
Reklasifikasi Keluar KDP	513	-	-	-	-	-	-	-
Koreksi Pencatatan KDP	517	(1.070.619.482)	(11.971.083.367)	-	-	-	(34.776.300)	(13.076.479.149)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	564	(5.600.040.676)	-	-	-	-	-	(5.600.040.676)
Mutasi Kurang		(13.601.432.741)	(26.739.170.275)	-	(240.563.856.000)	(199.213.958)	(9.202.789.100)	(290.306.462.074)
Saldo per 31 Desember 2025		19.348.330.223	-	24.997.200	-	-	-	19.373.327.423



LAMPIRAN XXI

RINCIAN KONSTRUKSI DALAM PENGGERJAAN PER SATKER

RINCIAN KDP PER SATKER

No	Kode ES.I	Kode Satker	Nama Satker	Nomor Kontrak	Jangka Waktu	Nilai Kontrak	% Penyelesaian	Nilai KDP posisi 31 Desember 2025	Keterangan	Penjelasan Belum Selesai	Apakah akan dilanjutkan atau tidak?
2	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/020/SPK.MK/IPDN.28.2	10 Maret sd 3 April 2020	195.450.000	100%	195.450.000	Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi untuk 4 NUP Gedung dan Bangunan berupa 2 Unit Wisma Putri, 1 Unit Auditorium, dan 1 Unit Posko Pengasuhan	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
3	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/023/SPK.KP/IPDN.28.2	10 Maret sd 30 April 2020	231.200.000	100%	231.200.000	Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi untuk 4 NUP Gedung dan Bangunan berupa 2 Unit Wisma Putri, 1 Unit Auditorium, dan 1 Unit Posko Pengasuhan	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
4	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR				100%	202.098.311	Honor Pengelola Kegiatan TA 2020 untuk 4 NUP Gedung dan Bangunan berupa 2 Unit Wisma Putri, 1 Unit Auditorium, dan 1 Unit Posko Pengasuhan	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
5	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	011/2711/PAKPA Tanggal 9 September			20%	5.429.180.237	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
6	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/150/SPK/IPDN.26.1 Tanggal 13 Oktober 2015			20%	6.488.726.913	Asrama Permanen	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
7	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/150/SPK/IPDN.26.1 Tanggal 13 Oktober 2015			20%	6.400.755.659	Asrama Permanen	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
8	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR		1 Januari s/d 31 Desember 2022			400.919.103	Lanjutan Pembangunan Gedung IPDN Kampus Kalimantan Barat TA 2022 (Biaya Pengelola Kegiatan Gedung Perpustakaan dan Gedung Pos Jaga Permanen)	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
JUMLAH SETJEN						426.650.000		19.348.330.223			
1	05	027753	DITJEN BINA PEMDES	6973/SPK/BPD/X/2023	1 TAHUN	24.997.200	100%	24.997.200	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Parkir Sepeda Motor dan Selasar Gedung Ditjen Bina Pemdes	Tidak mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Tidak Dilanjutkan
JUMLAH DITJEN BINA PEMDES						24.997.200		24.997.200			
TOTAL						451.647.200		19.373.327.423			



LAMPIRAN XXII

REKAPITULASI SALDO ASET LAINNYA SERTA AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2025

REKAPITULASI SALDO ASET LAINNYA SERTA AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	SOFTWARE	LISENSI	HASIL KAJIAN/ PENELITIAN	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENERJAAN	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	AKUMULASI AMORTISASI SOFTWARE	AKUMULASI AMORTISASI LISENSI	AKUMULASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	73.216.244.682	39.279.444.352	1.676.759.600	53.300.000	-	25.107.885.862	447.523.125	(22.868.708.119)	(40.288.840.960)	(7.408.985.837)	(447.523.125)
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	3.158.522.000	-	197.795.000	1.590.421.750	-	2.916.458.361	18.898.000	(2.637.192.371)	(2.511.307.438)	-	(18.898.000)
4	01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	3.174.472.555	-	-	-	-	234.819.113	-	(234.819.113)	(2.799.472.555)	-	-
5	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	-	-	-	-	-	462.019.343	-	(462.019.343)	-	-	-
6	01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	24.717.000	-	-	-	-	-	-	-	(24.717.000)	-	-
7	01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	70.120.000	-	-	-	-	2.559.667.160	23.000.000	(2.559.667.160)	(70.120.000)	-	(23.000.000)
8	01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	19.472.000	-	-	-	-	1.138.254.684	-	(1.074.543.089)	(19.472.000)	-	-
9	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	939.806.871	-	(939.806.871)	-	-	-
10	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	-	-	-	-	-	6.798.547.141	349.100.000	(6.798.547.141)	-	-	-
11	02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	1.145.474.320	-	-	-	-	165.848.422	143.915.000	(165.848.422)	(833.114.945)	-	(143.915.000)
12	03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	8.313.499.230	-	-	-	-	-	-	-	(8.313.499.230)	-	-
13	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	3.560.846.610	198.090.600	-	-	-	2.713.589.380	-	(2.713.589.380)	(3.494.877.460)	(69.331.710)	-
14	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	16.862.160.880	-	397.210.000	299.605.000	-	276.837.247	200.343.000	(274.728.668)	(11.357.546.261)	-	(200.343.000)
15	05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	(25.000.000)	-	-
16	05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	-	-	-	-	-	480.488.750	-	(417.011.878)	-	-	-
17	05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	-	-	-	-	-	210.270.000	-	(210.270.000)	-	-	-
18	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	708.280.140	-	-	-	-	28.587.138.289	19.957.152.092	(27.988.997.747)	(708.280.140)	-	(19.957.152.092)
19	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	2.487.407.950	-	-	-	-	70.399.269.621	28.336.414.427	(70.294.028.123)	(2.275.673.250)	-	(28.336.414.427)
20	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	582.680.792.571	54.316.843.876	-	219.764.000	-	24.464.669.220	69.898.942.449	(24.464.669.220)	(554.877.414.971)	(8.828.940.060)	(69.898.942.449)
21	09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	1.353.050.103	-	-	-	-	5.764.113.530	34.279.060.332	(5.555.484.960)	(1.353.050.103)	-	(34.279.060.332)
22	11	403222	KP	BADAN STRATEGI KEBUAKAN DALAM NEGERI	3.808.908.931	2.255.000	-	-	-	1.812.330.471	3.129.285.850	(1.809.574.771)	(3.742.340.181)	(2.255.000)	(4.620.000)
23	12	027114	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	-	-	-	-	-	2.698.000	-	(2.148.000)	-	-	-
24	12	027177	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	54.500.000	-	-	20.750.000	-	488.613.310	-	(488.613.310)	(54.500.000)	-	-
25	12	403216	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	-	-	-	-	-	43.350.000	49.885.000	(43.350.000)	-	-	-
26	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.971.059.443	-	-	99.678.000	-	6.664.760.539	-	(6.552.305.035)	(852.309.443)	-	-
27	12	506138	KD	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	-	-	-	-	-	218.948.400	-	(218.948.400)	-	-	-
28	12	506137	KD	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	-	-	-	-	-	1.782.000	-	(1.782.000)	-	-	-
TOTAL					703.634.528.415	93.796.633.828	2.271.764.600	2.283.518.750	-	182.452.165.714	156.833.519.275	(178.776.653.121)	(633.601.535.937)	(16.309.512.607)	(153.309.868.425)



LAMPIRAN XXIII

RINCIAN MUTASI ASET TAK BERWUJUD PER UNIT ESELON I

RINCIAN MUTASI ASET TAK BERWUJUD PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	POLPUM	BAK	PEMDES	BANGDA	OTDA	DUKCAPIL	KEUDA	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo per 31 Desember 2024		73.437.842.168	1.289.389.320	8.313.499.230	1.034.120.800	17.583.975.880	708.280.140	2.487.407.950	684.831.981.546	35.482.587.935	3.600.424.431	1.740.872.443	830.510.381.843
Pembelian	101	35.243.001.870							14.838.507.016		12.300.000	1.455.000.000	51.548.808.886
Transfer Masuk	102	2.174.472.555			2.724.816.410								4.899.288.965
Hibah Masuk	103	55.834.500											55.834.500
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	105	1.016.859.900											1.016.859.900
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	115	8.658.000											8.658.000
Pengembangan Nilai Aset	202	6.658.438.996			-				5.652.286.388		149.239.500		12.459.964.884
Pengembangan Melalui KDP	208	4.512.643.950									61.500.000		4.574.143.950
Koreksi Susulan	214											1.455.000.000	1.455.000.000
Mutasi Tambah		49.669.909.771	-	-	2.724.816.410	-	-	-	20.490.793.404	-	223.039.500	2.910.000.000	76.018.559.085
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(395.633.000)							(104.054.054)				(499.687.054)
Koreksi Pencatatan	305	-							-		(12.300.000)	(1.455.000.000)	(1.467.300.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	401	(250.850.000)	(143.915.000)	-					(68.001.320.449)	(34.129.537.832)	-	(49.885.000)	(102.575.508.281)
Mutasi Kurang		(646.483.000)	(143.915.000)	-	-	-	-	-	(68.105.374.503)	(34.129.537.832)	(12.300.000)	(1.504.885.000)	(104.542.495.335)
Saldo per 31 Desember 2025		122.461.268.939	1.145.474.320	8.313.499.230	3.758.937.210	17.583.975.880	708.280.140	2.487.407.950	637.217.400.447	1.353.050.103	3.811.163.931	3.145.987.443	801.986.445.593
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2025		(53.122.915.790)	(833.114.945)	(8.313.499.230)	(3.564.209.170)	(11.382.546.261)	(708.280.140)	(2.275.673.250)	(563.706.355.031)	(1.353.050.103)	(3.744.595.181)	(906.809.443)	(649.911.048.544)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		69.338.353.149	312.359.375	-	194.728.040	6.201.429.619	-	211.734.700	73.511.045.416	-	66.568.750	2.239.178.000	152.075.397.049



LAMPIRAN XXIV

RINCIAN DANA YANG DIBATASI PENGUNAANNYA

REKAPITULASI DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

LAMPIRAN XIV

No EES 1		Kode Sektir	Nama Sektir	Saldo awal di rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga (143139) per 31 Desember 2025	SPM Penampungan RP/ATA					Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RP/ATA					Saldo RP/ATA	Deskripsi Transaksi							
					No SPM	No SP/2	Tanggal SP/2	Akun Belanja	Akun Potongan		No SPM	No SP/2	Tanggal SP/2	Akun Belanja	Akun Potongan			No SPM						
1	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	5.083.783.190	020667/403200/2025	259990302022715	2025-12-24	536111	721.305.750	815619	(721.305.750)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/5/269/Pusdatin/2025 untuk Pengintegrasian Aplikasi ke SIPD RI	000707/403200/2026	261330000000286	2026-01-21	825619	460.455.750	411211	(45.630.750)	145.678.500	-	Pembayaran Pengintegrasian Aplikasi ke SIPD RI sesuai BAST Nomor 000.4/8/215/Pusdatin/2025 Tanggal 31 Desember 2025	
2	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL											000717/403200/2026	261330000000285	2026-01-21	825619		411124	(8.296.500)			Pemilihan RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/5/269/Pusdatin/2025 untuk Pengintegrasian Aplikasi ke SIPD RI	
3	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL											000477/403200/2026	2613300000002754	2026-01-19	825619	610.115.940	411211	(60.461.940)	538.660.930		Pembayaran Pengembangan Aplikasi Middleware Transaksi Perbankan sesuai BAST Nomor 000.4/8/214/Pusdatin/2025 Tanggal 31 Desember 2025	
4	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	020567/403200/2025	259990302022596	2025-12-24	536111	610.115.940	815619	(610.115.940)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/6/731/Pusdatin/2025 untuk Pengembangan Aplikasi Middleware Transaksi Perbankan	000477/403200/2026	2613300000002754	2026-01-19	825619	610.115.940	411211	(60.461.940)	538.660.930			Pembayaran Pengembangan Aplikasi Middleware Transaksi Perbankan sesuai BAST Nomor 000.4/8/214/Pusdatin/2025 Tanggal 31 Desember 2025	
5	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL													411124	(10.993.080)							
6	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	020537/403200/2025	259990302022709	2025-12-24	522191	163.180.192	815619	(163.180.192)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/8/366/Pusdatin/2024 untuk Pemeliharaan Perangkat Operasional LAN/WAN dan Data Center	000117/403200/2026	2613300000001234	2026-01-12	825619	163.180.192	411211	(16.171.010)	144.068.998	-		Pembayaran Pemeliharaan Perangkat Operasional LAN/WAN dan Data Center sesuai BAST Nomor 000.4/8/208/Pusdatin/2025 Tanggal 31 Desember 2025	
7	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL													411124	(2.940.184)							
8	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	020507/403200/2025	259990302022703	2025-12-24	522141	335.617.337	815619	(335.617.337)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/8/368/Pusdatin/2024 untuk Pengadaan Layanan Video Conference	000137/403200/2026	2613300000001241	2026-01-12	825619	335.617.337	411211	(33.259.375)	296.310.803			Pembayaran Pengadaan Layanan Video Conference sesuai BAST Nomor 000.4/8/202/Pusdatin/2025 Tanggal 31 Desember 2025	
9	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL													411124	(6.047.159)							
10	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	020527/403200/2025	259990302022714	2025-12-24	522191	120.374.604	815619	(120.374.604)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/8/370/Pusdatin/2024 untuk Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi dan Call Center	000127/403200/2026	2613300000001240	2026-01-12	825619	120.374.604	411211	(11.929.015)	106.276.677			Pembayaran Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi dan Call Center sesuai BAST Nomor 000.4/8/205/Pusdatin/2025 Tanggal 31 Desember 2025	
11	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL													411124	(2.168.912)							
12	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	020517/403200/2025	259990302022710	2025-12-24	522141	87.332.830	815619	(87.332.830)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/8/370/Pusdatin/2024 untuk Sewa Layanan Virtual Private Network	000107/403200/2026	2613300000001231	2026-01-12	825619	87.332.830	411124	(1.573.565)	85.759.265	-		Pembayaran Sewa Layanan Virtual Private Network sesuai BAST Nomor 000.4/8/213/Pusdatin/2025 Tanggal 31 Desember 2025	
13	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	020497/403200/2025	259990302022704	2025-12-24	522141	291.600.000	815619	(291.600.000)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/8/296/Pusdatin/2024 untuk Sewa Layanan Akses Internet Secondary	000337/403200/2026	2613300000001942	2026-01-14	825619	291.600.000	411124	(5.254.054)	286.345.946	-		Pembayaran Sewa Layanan Akses Internet Secondary sesuai BAST Nomor 000.4/8/219/Pusdatin/2025 Tanggal 31 Desember 2025	
14	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	020577/403200/2025	259990302022594	2025-12-24	536111	205.576.992	815619	(205.576.992)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/3/266/Pusdatin/2025 untuk Pengelolaan Helpdesk dan Operasional Layanan Aplikasi	000487/403200/2026	2613300000002740	2026-01-19	825619	205.576.992	411211	(20.372.495)	181.500.407	-		Pembayaran Pengelolaan Helpdesk dan Operasional Layanan Aplikasi sesuai BAST Nomor 000.4/8/211/Pusdatin/2025 Tanggal 31 Desember 2025	
15	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL													411124	(3.704.090)							
16	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	020487/403200/2025	259990302022711	2025-12-24	522141	291.666.666	815619	(291.666.666)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/8/298/Pusdatin/2024 untuk Sewa Layanan Akses Internet	000327/403200/2026	2613300000001940	2026-01-14	825619	291.666.666	411124	(5.255.255)	286.411.411	-		Pembayaran Sewa Layanan Akses Internet sesuai BAST Nomor 000.4/8/216/Pusdatin/2025 Tanggal 31 Desember 2025	
17	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	020587/403200/2025	259990302022593	2025-12-24	522191	69.999.951	815619	(69.999.951)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 100/KU/ROPEG/2025 untuk Pelaksanaan Perawatan Mesin Fingerprint di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	000147/403200/2026	2613300000001493	2026-01-13	825619	69.999.951	411211	(6.936.932)	61.801.759	-		Pembayaran Pelaksanaan Perawatan Mesin Fingerprint di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai BAST Nomor 711/KU/BiroGDM/2025 Tanggal 29 Desember 2025	
18	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL													411124	(1.261.260)							
19	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	020457/403200/2025	259990302019363	2025-12-24	523111	846.132.928	815619	(846.132.928)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 602/189/PPK/BU/2025 untuk Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor Pusat, Rumah Dinas, Gedung Arisp dan Gedung Pertemuan Cipayang	000077/403200/2026	2613300000000657	2026-01-08	825619	846.132.928	411211	(83.851.011)	747.036.279	-		Pembayaran Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor Pusat, Rumah Dinas, Gedung Arisp dan Gedung Pertemuan Cipayang sesuai BAST Nomor 602/4945/PPK/BU/2025 Tanggal 31 Desember 2025	
20	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL													411124	(15.245.638)							
21	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	020437/403200/2025	259990302019361	2025-12-24	522191	97.680.000	815619	(97.680.000)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor EP 01K3PCPKFBESAD98WBKQD/WXIT untuk Pengelolaan dan Produksi Konten Winning Content Media Sosial Kemendagri	000097/403200/2026	2613300000001226	2026-01-12	825619	97.680.000	411211	(9.680.000)	88.000.000	-		Pembayaran Pengelolaan dan Produksi Konten Winning Content Media Sosial Kemendagri sesuai BAST Nomor 2425/BASTHP/PPK/Puspen.2 Tanggal 30 Desember 2025	
22	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	020447/403200/2025	259990302019362	2025-12-24	522191	1.243.200.000	815619	(1.243.200.000)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor EP 01K3QD3PH9QWY0EPFBDMRSWX untuk Pengelolaan Strategi Komunikasi dan Kampanye Publik Kemendagri	000317/403200/2026	2613300000001246	2026-01-12	825619	1.243.200.000	411211	(123.200.000)	1.097.600.000	-		Pembayaran Pengelolaan Strategi Komunikasi dan Kampanye Publik Kemendagri sesuai BAST Nomor 2437/BASTHP/PPK/Puspen.2 Tanggal 30 Desember 2025	
23	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL													411124	(22.400.000)							
24	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	1.973.022.000	023197/448302/2025	259990302022509	2025-12-24	534111	291.245.000	815619	(291.245.000)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1724.4/SPK/BEK/2025 untuk Pekerjaan Paving Blok Trottoir Area Ksatrian dan Wisma Praja di IPDN Kampus Jatijangor	000137/448302/2026	269991302001145	2026-01-05	825619	291.245.000	411211	(28.862.117)	257.135.225	-		Pembayaran Pekerjaan Paving Blok Trottoir Area Ksatrian dan Wisma Praja di IPDN Kampus Jatijangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1782.4/BAST/BEK/2025 Tanggal 29-12-2025
25	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI													411124	(5.247.658)							
26	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	022757/448302/2025	259990302020832	2025-12-23	523111	143.232.000	815619	(143.232.000)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1715.4/SPK/BEK/2025 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Kamar Mandi Blok Kelas FMP dan Blok Kelas PPP di IPDN Kampus Jatijangor	000097/448302/2026	269991302001142	2026-01-05	825619	143.232.000	411211	(14.194.162)	126.457.081	-		Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Kamar Mandi Blok Kelas FMP dan Blok Kelas PPP di IPDN Kampus Jatijangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1784.4/BAST/BEK/2025 Tanggal 29-12-2025	
27	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI													411124	(2.580.757)							
28	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	023007/448302/2025	259990302020199	2025-12-24	523111	39.400.000	815619	(39.400.000)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1727.4/SPK/BEK/2025 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Kamar Mandi Blok Kelas FMP dan Blok Kelas PPP di IPDN Kampus Jatijangor	000117/448302/2026	269991302001146	2026-01-05	825619	39.400.000	411211	(3.904.505)	34.785.585	-		Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Kamar Mandi Blok Kelas FMP dan Blok Kelas PPP di IPDN Kampus Jatijangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1797.4/BAST/BEK/2025 Tanggal 29-12-2025	
29	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI													411124	(709.910)							

hu f

REKAPITULASI DANA YANG DIBAYAT PENGUNAANNYA

LAMPIRAN XIV

Saldo awal di rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (31/12/2025 per 31 Desember 2025)										SPM Penampungan-RPATA										SPM Pembayaran-RPATA										Saldo RPATA		Deskripsi Transaksi	
No	ES 1	Kode Satker	Nama Satker	No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D	Deskripsi Transaksi	No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D													
30	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	022947/448302/2025	259990302022500	2025-12-24	523119	177.149.000	815619	(177.149.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1727.5/SPK/BEK/NI/2025 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas B1 di IPDN Kampus Jatinangor	000187/448302/2026	260870000000105	2026-01-05	825619	177.149.000	411211	(17.555.306)	156.401.830	-			Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas B1 di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1788.c/BAST/BEK/NI/2025 Tanggal 30-12-2025									
31	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411124	(3.191.874)													
32	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	022917/448302/2025	259990302020507	2025-12-24	523133	95.875.000	815619	(95.875.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1715.a/SPK/BEK/NI/2025 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Grili Saluran Drainase di IPDN Kampus Jatinangor	000127/448302/2026	269991302001143	2026-01-05	825619	95.875.000	411211	(9.501.126)	84.646.397	-			Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Grili Saluran Drainase di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1792/BAST/BEK/NI/2025 Tanggal 30-12-2025									
33	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411124	(1.727.477)													
34	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	022857/448302/2025	259990302020503	2025-12-24	523111	110.667.000	815619	(110.667.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1725.b/SPK/BEK/NI/2025 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Kepegawaian, Ruang VVIP Presiden, Ruang Wark 2, Ruang Wark 3 dan Ruang Mushola ADM di IPDN Kampus Jatinangor	000107/448302/2026	269991302001141	2026-01-05	825619	110.667.000	411211	(10.967.000)	97.706.000	-			Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Kepegawaian, Ruang VVIP Presiden, Ruang Wark 2, Ruang Wark 3 dan Ruang Mushola ADM di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1784.c/BAST/BEK/NI/2025 Tanggal 29-12-2025									
35	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411124	(1.994.000)													
36	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	022767/448302/2025	259990302019218	2025-12-23	533121	320.850.000	815619	(320.850.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1715.a/SPK/BEK/NI/2025 untuk Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Kanopi Taman Baca Sekolah Pascasarjana di IPDN Kampus Jatinangor	000207/448302/2026	260870000000113	2026-01-06	825619	320.850.000	411211	(31.795.946)	281.394.122	-			Pembayaran Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Kanopi Taman Baca Sekolah Pascasarjana di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST Nomor 000.4.2/1782.b/BAST/BEK/NI/2025 Tanggal 29 Desember 2025									
37	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411128	(7.659.932)													
38	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	022747/448302/2025	259990302019217	2025-12-23	523111	194.226.000	815619	(194.226.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1723.b/SPK/BEK/NI/2025 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas B3 di IPDN Kampus Jatinangor	000147/448302/2026	260870000000127	2026-01-08	825619	194.226.000	411211	(19.247.622)	171.478.810	-			Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas B3 di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1782.c/BAST/BEK/NI/2025 Tanggal 29-12-2025									
39	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411124	(3.499.568)													
40	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	022697/448302/2025	259990302019439	2025-12-23	523119	156.880.000	815619	(156.880.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1717.a/SPK/BEK/NI/2025 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas A1 dan Rumah Dinas A2 di IPDN Kampus Jatinangor	000087/448302/2026	269991302001144	2026-01-05	825619	156.880.000	411211	(15.546.667)	138.506.666	-			Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas A1 dan Rumah Dinas A2 di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1786.a/BAST/BEK/NI/2025 Tanggal 29-12-2025									
41	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411124	(2.826.667)													
42	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	022687/448302/2025	259990302019437	2025-12-23	523111	63.993.000	815619	(63.993.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1723.a/SPK/BEK/NI/2025 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Toilet Wisma DKI Jakarta, Wisma Jawa Barat, Wisma Sumatera Utara dan Wisma Jawa Timur di IPDN Kampus Jatinangor	000077/448302/2026	269991302001139	2026-01-05	825619	63.993.000	411211	(6.341.649)	56.498.324	-			Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Toilet Wisma DKI Jakarta, Wisma Jawa Barat, Wisma Sumatera Utara dan Wisma Jawa Timur di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1786/BAST/BEK/NI/2025 Tanggal 30-12-2025									
43	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411124	(1.153.027)													
44	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	022677/448302/2025	259990302019438	2025-12-23	523111	220.392.000	815619	(220.392.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1721.a/SPK/BEK/NI/2025 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Menza, Dapur Gedung Administrasi, Rumah Dinas A3 dan Ruang Kelas Klungkung, Raja Ampat dan Sriwijaya di IPDN Kampus Jatinangor	000067/448302/2026	269991302001140	2026-01-05	825619	220.392.000	411211	21.840.649	246.203.676	-			Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Menza, Dapur Gedung Administrasi, Rumah Dinas A3 dan Ruang Kelas Klungkung, Raja Ampat dan Sriwijaya di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1784.a/BAST/BEK/NI/2025 Tanggal 29-12-2025									
45	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411124	3.971.027													
46	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	022427/448302/2025	259990302014661	2025-12-22	523111	159.113.000	815619	(159.113.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/8/IPDN.19 untuk Pemeliharaan Gedung dan Pertamanan IPDN Kampus Jakarta	000197/448302/2026	260870000000111	2026-01-06	825619	159.113.000	411211	(15.767.955)	140.478.144	-			Pembayaran Pemeliharaan Gedung dan Pertamanan IPDN Kampus Jakarta sesuai BAST/BAPP Nomor 027/1582/BA-PP/Bea/NI/2025 Tanggal 31-12-2025									
47	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI																411124	(2.866.901)													
48	01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYENGGARA PEMILU	438.709.749	003427/483005/2025	259990302014375	2025-12-22	522191	308.709.749	815619	(308.709.749)	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor REP-001WKSJ.787070743Z1CP0N25JIR untuk PENGADAAN TENAGA KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI, TENAGA PENGEMUDI, DAN TENISI GEDUNG SEKRETARIAT DKPP RI BULAN JUNI - DESEMBER 2025	000067/483005/2026	261330000000414	2026-01-06	825619	304.740.676	411211	(30.199.526)	265.081.254	-			Pembayaran PENGADAAN TENAGA KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI, TENAGA PENGEMUDI, DAN TENISI GEDUNG SEKRETARIAT DKPP RI BULAN JUNI - DESEMBER 2025 sesuai BAST Nomor 134/BAST/PPK-DKPP/NI/2025 Tanggal 31-12-2025									
49	01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYENGGARA PEMILU																411124	(5.490.823)													

hu f

REKAPITULASI DANA YANG DIBAYAR PENGUNAANNYA

LAMPIRAN XIV

No	EES 1	Kode Sektir	Nama Sektir	Saldo awal di rekening Penampungan Kementerian/Lembaga (31/12/2025)	SPM Penampungan RP/PA						Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RP/PA						Saldo RP/PA	Deskripsi Transaksi				
					No SPM	No SP/2	Tanggal SP/2	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan		Nilai Potongan	Nilai SP/2	No SPM	No SP/2	Tanggal SP/2	Akun Belanja			Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP/2
50														000081/483005/2026	261330000000415	2026-01-06	825619	3.969.073	425912	(3.969.073)		Pembelian RP/PA atas Kontrak Nomor BIP-011WB83G17B93VH21CPN0025R untuk PENGADAAN TENAGA KEBERSIHAN, PRAMUSABATI, TENAGA PENGEMUDI, DAN TEKNIISI GEDUNG SEKRETARIAT DKPP RI BULAN JUNI - OKTOBER 2025	
51	01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELINGGARA PEMILU		003411/483005/2025	259990302011368	2025-12-19	522191	130.000.000	815619	(130.000.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 212.29/PPK-DKPP/26/2024 untuk JASA PENYEDIA GP (INTERNET SERVICE PROVIDER TERMASUK DOMAIN DAN COLLOCATION) KANTOR DKPP RI	000041/483005/2026	261330000000348	2026-01-06	825619	130.000.000	411211	(12.882.883)	114.774.775	-	Pembayaran JASA PENYEDIA GP (INTERNET SERVICE PROVIDER TERMASUK DOMAIN DAN COLLOCATION) KANTOR DKPP RI sesuai BAST Nomor 131/BAST/PPK-DKPP/XII/2025 Tanggal 31-12-2025
52	01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELINGGARA PEMILU																411124	(2.342.342)			
53	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	516.227.214	005311/677010/2025	259990302026074	2025-12-29	523133	164.240.061	815619	(164.240.061)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor EP 01K9P4TZP8VQVQ59867DXBMWIA untuk Pekerjaan Instalasi Jaringan Air Bersih IPDN Kampus Sulawesi Utara TA 2025	000111/677010/2026	260490000000940	2026-01-14	825619	164.240.061	411211	(16.276.042)	145.374.649	-	Pembayaran Pekerjaan Instalasi Jaringan Air Bersih IPDN Kampus Sulawesi Utara TA 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4/324/BAST-PHWA/IPDN.23/2025 Tanggal 29-12-2025 dengan jaminan pemeliharaan nomor 11614040126000687 tanggal 06-01-2026
54	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA																411128	(2.589.370)			
55	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA		005151/677010/2025	259990302022995	2025-12-24	523111	141.500.000	815619	(141.500.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/303/SPK-PHWA/IPDN.23/2025 untuk Pekerjaan pemeliharaan wisma nusantara 4 IPDN Kampus Sulawesi Utara TA 2025	000091/677010/2026	260490000001033	2026-01-14	825619	141.500.000	411211	(14.022.522)	124.927.929	-	Pembayaran Pekerjaan pemeliharaan Wisma Nusantara 4 IPDN Kampus Sulawesi Utara TA 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4/323/BAST-PHWA/IPDN.23/2025 Tanggal 29-12-2025 jaminan pemeliharaan nomor 112001104012600051 tanggal 6 Januari 2026
56	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA																411124	(2.549.549)			
57	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA		005131/677010/2025	259990302017854	2025-12-23	523111	80.991.741	815619	(80.991.741)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/003/E-PURCHASING/PPK-JHP/IPDN.23.1/2024 untuk Pemeliharaan Halaman Pertamanan IPDN Kampus Sulawesi Utara Tahun 2025	000041/677010/2026	260490000000513	2026-01-12	825619	80.991.741	411211	(8.026.209)	71.506.221	-	Pembayaran Pemeliharaan Halaman Pertamanan IPDN Kampus Sulawesi Utara Tahun 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4/330/BAST-6/IPDN.23/2025 Tanggal 31-12-2025
58	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA																411124	(1.459.311)			
59	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA		005121/677010/2025	259990302017855	2025-12-23	522113	67.288.825	815619	(67.288.825)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/004/E-PURCHASING/PPK-BU/PPDN.23.1/2024 untuk Belanja Langganan Air Bersih IPDN Kampus Sulawesi Utara TA 2025	000101/677010/2026	260490000000763	2026-01-13	825619	67.288.825	411124	(1.345.777)	65.943.048	-	Pembayaran Belanja Langganan Air Bersih IPDN Kampus Sulawesi Utara TA 2025 Termin ke-13 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4/332/BAST-13/IPDN.23/2025 Tanggal 31-12-2025
60	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA		005111/677010/2025	259990302017856	2025-12-23	523111	62.206.587	815619	(62.206.587)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/002/E-PURCHASING/PPK-ICS/IPDN.23.1/2024 untuk Belanja Pemeliharaan Cleaning Service IPDN Kampus Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025	000071/677010/2026	260490000000775	2026-01-13	825619	62.206.587	411211	(6.164.617)	54.921.131	-	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Cleaning Service IPDN Kampus Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4/331/BAST-13/IPDN.23/2025 Tanggal 31-12-2025
61	01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA																411124	(1.120.839)			
62	01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	177.523.873	002821/677024/2025	259990302013474	2025-12-19	523111	85.891.441	815619	(85.891.441)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4.3/01/PPDN.24.1/2025 untuk PEMELIHARAAN GEDUNG SARANA DAN PRASARANA (JASA KEBERSIHAN TAMAN) IPDN KAMPUS SULSEL	000081/677024/2026	260540000000453	2026-01-07	825619	85.891.441	411211	(8.511.764)	75.832.083	-	Pembayaran PEMELIHARAAN GEDUNG SARANA DAN PRASARANA (JASA KEBERSIHAN TAMAN) IPDN KAMPUS SULSEL sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4/3/2179/BAST/IPDN.24.1/2025 Tanggal 31-12-2025
63	01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN																411124	(1.547.594)			
64	01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN		002831/677024/2025	259990302013477	2025-12-19	523111	91.632.432	815619	(91.632.432)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4.3/009/SPK/IPDN.24.1/2025 untuk PEMELIHARAAN GEDUNG SARANA DAN PRASARANA (JASA CS) IPDN KAMPUS SULSEL	000071/677024/2026	260540000000452	2026-01-07	825619	91.632.432	411211	(8.083.818)	82.078.829	-	Pembayaran PEMELIHARAAN GEDUNG SARANA DAN PRASARANA (JASA CS) IPDN KAMPUS SULSEL sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4/3/2183/BAST/IPDN.24.1/2025 Tanggal 31-12-2025
65	01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN																411124	(1.469.785)			
66	01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	186.281.000	003811/677045/2025	259990302016774	2025-12-23	523111	49.631.000	815619	(49.631.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4.3/80/SP-Chemical/PPK/IPDN.22.1 untuk Paket pengadaan Chemical dan Perlakuan Pemeliharaan kebersihan (Cleaning service) dan Pertamanan/Halaman Keras Tahun 2025	000041/677045/2026	260110000000113	2026-01-05	825619	49.631.000	411211	(4.918.387)	43.968.148	-	Pembayaran Paket pengadaan Chemical dan Perlakuan Pemeliharaan kebersihan termin XII TA 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.3/80/BAST/IPDN.22.1 Tanggal 31-12-2025 atas Kontrak No:000.4.3/79/SP-Chemical/PPK/IPDN.22.1 tgl 31-12-2024 Nk.Rp.595.572.000
67	01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT																411124	(744.465)			
68	01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT		003801/677045/2025	259990302016744	2025-12-23	523111	136.650.000	815619	(136.650.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4.3/79/SP-Cleanin/PPK/IPDN.22.1 untuk Paket pengadaan Man power/Tenaga pemeliharaan kebersihan (Cleaning Service) dan pemeliharaan pertamanan/Halaman Keras Tahun 2025	000031/677045/2026	260110000000112	2026-01-05	825619	136.650.000	411124	(2.733.000)	133.917.000	-	Pembayaran Paket pengadaan Man power dan pemeliharaan pertamanan termin XII Tahun 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.3/205/BAST/IPDN.22.1 Tanggal 31-12-2025 atas kontrak No:000.4.3/79/SP-Cleanin/PPK/IPDN.22.1 tgl 31-12-2024 Nk.L.639.800.000
69	01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	126.850.000	006821/683070/2025	259990302017138	2025-12-23	523111	42.500.000	815619	(42.500.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4.2/007/SP-1.TMN/KNR/IPDN.27.1 untuk Jasa Pertamanan dan Penebasan Rumput (Man Power) di Lingkungan IPDN Kampus Kalimantan Barat T.A 2025	000091/683070/2026	260420000000173	2026-01-06	825619	42.500.000	411211	(4.211.712)	37.531.522	-	Pembayaran Jasa Pertamanan dan Penebasan Rumput (Man Power) di Lingkungan IPDN Kampus Kalimantan Barat T.A 2025 sesuai BAST Nomor 000.4.2/481/BAST-JS.TMN/T.12/KNR/IPDN.27.1 Tanggal 31-12-2025

hu f

REKAPITULASI DANA YANG DIBAYAT PENGUNAANNYA

LAMPIRAN XIV

No	EES	Kode Sekt	Nama Sekt	Saldo awal di rekening Pemungutan-Kemeterian/Lembaga (31/12/2025)	SPM Penempatan RP/ATA							Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RP/ATA							Saldo RP/ATA	Deskripsi Transaksi		
					No SPM	No SP/2	Tanggal SP/2	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan		Nilai SP/2	No SPM	No SP/2	Tanggal SP/2	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan			Nilai Potongan	Nilai SP/2
70	01	683070	IPON KAMPUS KALIMANTAN BARAT															411124	(756.766)				
71	01	683070	IPON KAMPUS KALIMANTAN BARAT		006837/683070/2025	259990302017137	2025-12-23	523111	84.350.000	815619	(84.350.000)	-	000087/683070/2026	26042000000172	2026-01-06	825619	84.350.000	411211	(8.359.009)	74.471.171	-	Pembayaran JASA CLEANING SERVICE (MAN POWER) DI LINGKUNGAN IPON KAMPUS KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 sesuai BAST Nomor 000.4.2/479/BAST-1/C5/T.12/KNR/IPON.27.1 Tanggal 31-12-2025	
72	01	683070	IPON KAMPUS KALIMANTAN BARAT															411124	(1.519.820)				
73	01	683084	IPON KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	174.374.797	003611/683084/2025	259990302013000	2025-12-19	523111	174.374.797	815619	(174.374.797)	-	000037/683084/2026	269991302000699	2026-01-02	825619	174.374.797	411211	(17.280.386)	153.952.523	-	Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Kebersihan Gedung dan Halaman IPON kampus NTB Tahun Anggaran 2025	
74	01	683084	IPON KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT															411124	(3.141.888)				
75	05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	175.502.028	012077/027753/2025	259990302023158	2025-12-24	523111	175.502.028	815619	(175.502.028)	-	000127/027753/2026	261133000000406	2026-01-12	825619	175.502.028	411211	(2.213.974)	172.885.513	-	Pembayaran Pengadaan Jasa Kebersihan dalam rangka Belanja Pemeliharaan Gedung, Bangunan Ditem di lingkungan Ditem Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 5842/BAST/PPK/SEKRET/BPO/IX/2025 Tanggal 12-2025	
76	05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA															411124	(402.541)				
77	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	24.509.677.072	025411/039729/2025	259990302021695	2025-12-24	522131	90.011.210	815619	(90.011.210)	-	000057/039729/2026	261133000000181	2026-01-06	825619	90.011.210	411211	(8.920.030)	79.469.356	-	Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Bantuan Teknis Sekretariat Bersama DAK Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 5556/PPK-SET/IX/Bangda/2025 Tanggal 31-12-2025	
78	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH															411124	(1.621.824)				
79	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		025127/039729/2025	259990302018180	2025-12-22	522131	562.375.950	815619	(562.375.950)	-	000127/039729/2026	261133000000413	2026-01-06	825619	562.375.950	411211	(55.730.950)	496.512.100	-	Pembayaran BELANJA JASA KONSULTAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERAPAN SPO SEBAGAI PLATFORM TUNGGAL PEMERINTAHAN DAERAH, FIELD SUPPORT DAN HELPDESK MODUL INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH sesuai BAST No 900.1.3/1627/PPK/DIT. PEIPO/2025 Tgl 31-12-2025	
80	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH															411122	(10.132.900)				
81	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		025097/039729/2025	259990302017495	2025-12-22	522131	1.762.725.510	815619	(1.762.725.510)	-	000117/039729/2026	261133000000410	2026-01-06	825619	1.762.725.510	411211	(174.684.510)	1.556.280.180	-	Pembayaran JASA KONSULTAN DALAM RANGKA PENGUATAN DAN PENERAPAN MODUL INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH DALAM SPO sesuai BAST Nomor 900.1.3/1626/PPK/DIT. PEIPO/2025 Tanggal 31-12-2025	
82	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH															411122	(31.760.820)				
83	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		025117/039729/2025	259990302017534	2025-12-22	522131	1.168.182.000	815619	(1.168.182.000)	-	000107/039729/2026	261133000000411	2026-01-06	825619	1.168.182.000	-	-	1.168.182.000	-	Pembayaran Jasa Konsultan System Development for National Urban Development Project sesuai BAST Nomor 900.1.3/1624/PPK/DIT. PEIPO/2025 Tanggal 31-12-2025	
84	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		025107/039729/2025	259990302018113	2025-12-29	522131	7.551.611.438	815619	(7.551.611.438)	-	000097/039729/2026	261133000000412	2026-01-06	825619	7.551.611.438	-	-	7.551.611.438	-	Pembayaran JASA KONSULTAN CITY DEVELOPMENT PLANNING AND PROJECT MANAGEMENT CAPACITY sesuai BAST Nomor 900.1.3/1625/PPK/DIT. PEIPO/2025 Tanggal 31-12-2025	
85	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		025077/039729/2025	259990302018112	2025-12-29	522131	12.361.100.000	815619	(12.361.100.000)	-	000077/039729/2026	261133000000186	2026-01-06	825619	12.361.100.000	-	-	12.361.100.000	-	Pembayaran Capital Investment Planning (CIP) Framework and Implementation for National Urban Development Project (NUPD) Loan 8976-ID sesuai BAST Nomor 4156/SD. IV/DIT. SUPD. II/2025 Tanggal 31-12-2025	
86	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		025087/039729/2025	259990302018191	2025-12-22	522191	988.157.964	815619	(988.157.964)	-	000087/039729/2026	261133000000179	2026-01-06	825619	988.157.964	-	-	988.157.964	-	Pembayaran Jasa Lainnya Non-Consulting Services for Oversight Service Providers (OSP) for TMC Personnel in MoHA sesuai BAST Nomor 4155/SD. IV/DIT. SUPD. II/2025 Tanggal 31-12-2025	
87	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		024977/039729/2025	259990302015911	2025-12-22	522131	20.000.000	815619	(20.000.000)	-	000037/039729/2026	261133000000173	2026-01-06	825619	20.000.000	-	-	20.000.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Pengendalian Risiko Keamanan Sisi Informasi pada Bagian Perencanaan TA.2025 sesuai BAST Nomor 5579/PPK-PPK-SET/IX/2025 Tanggal 31-12-2025	
88	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		025067/039729/2025	259990302015909	2025-12-22	522191	5.513.000	815619	(5.513.000)	-	000047/039729/2026	261133000000172	2026-01-06	825619	5.513.000	-	-	5.513.000	-	Pembayaran Pengadaan Tenaga Pendukung Pengolah Data SPM pada Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 5580/PPK-PPK-SET/IX/2025 Tanggal 31-12-2025	

he f

REKAPITULASI DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

LAMPIRAN XIV

Kode ES 1 Kode Sektir Nama Sektir				Saldo awal di rekening Penampungan Kementerian/ Lembaga (Rp13139) per 31 Desember 2025	SPM Penampungan RP/PA						Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RP/PA						Saldo RP/PA	Deskripsi Transaksi				
					No SPM	No SP/2	Tanggal SP/2	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan		Nilai Potongan	Nilai SP/2	No SPM	No SP/2	Tanggal SP/2	Akun Belanja			Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP/2
89	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	189.865.461.345	023027/634082/2025	259990302028202	2025-12-29	536111	171.000.000	815619	(171.000.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1917/BAKPS untuk Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Database Dukcapil Daerah	001207/634082/2026	261330000000230	2026-01-15	825619	171.000.000	411211	(16.945.946)	151.743.243	-	Pembayaran Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Database Dukcapil Daerah sesuai BAST Nomor 900.1.3.3/2996/BAKPS Tanggal 31-12-2025
90	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411122	(2.310.811)				
91	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		023177/634082/2025	259990302027390	2025-12-31	522191	7.506.165.527	815619	(7.506.165.527)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor EP-01K6CBZDPT04TQEVQX80NACQIA untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025	001297/634082/2026	261330000000253	2026-01-15	825619	7.506.165.527	411124	(135.246.226)	7.370.919.301	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16938/PIAK Tanggal 31-12-2025
92	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		023057/634082/2025	259990302027653	2025-12-29	521811	132.090.000	815619	(132.090.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor EP-01K6CBZDPT04TQEVQX80NACQIA untuk Pengadaan Lisensi Zoom Meeting dan Microsoft Office 365	001157/634082/2026	261330000000258	2026-01-15	825619	132.090.000	411211	(13.090.000)	117.215.000	-	Pembayaran Pengadaan Lisensi Zoom Meeting dan Microsoft Office 365 sesuai BAST Nomor 000.4/16868/PIAK Tanggal 31-12-2025
93	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411122	(1.785.000)				
94	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		023037/634082/2025	259990302027389	2025-12-31	522191	5.506.888.430	815619	(5.506.888.430)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/16255/PIAK.2025 untuk Pekerjaan Masa Transisi Annual Technical Support Server dan Storage Data Center MMU Tahun 2025 Periode 1 Juni s.d 30 November 2025	001137/634082/2026	2613300000002574	2026-01-15	825619	5.469.836.087	411211	(542.055.828)	4.792.172.311	-	Pembayaran Pekerjaan Masa Transisi Annual Technical Support Server dan Storage Data Center MMU Tahun 2025 Periode 1 Juni s.d 30 November 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16719/PIAK Tanggal 31-12-2025
95	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(98.555.605)				
96													001167/634082/2026	2613300000002578	2026-01-15	825619	37.052.343	425912	(37.052.343)				Penhilan RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/16255/PIAK.2025 untuk Pekerjaan Masa Transisi Annual Technical Support Server dan Storage Data Center MMU Tahun 2025 Periode 1 Juni s.d 30 November 2022
97	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		023047/634082/2025	259990302027733	2025-12-29	522191	592.567.942	815619	(592.567.942)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/16255/PIAK.2025 untuk Pekerjaan Masa Transisi Annual Technical Support Server dan Storage Data Center MMU Tahun 2025 Periode 1 s.d. 22 Januari 2025	001147/634082/2026	2613300000002530	2026-01-15	825619	592.567.942	411211	(58.722.949)	523.168.093	-	Pembayaran Pekerjaan Masa Transisi Annual Technical Support Server dan Storage Data Center MMU Tahun 2025 Periode 1 s.d. 22 Januari 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16708/PIAK Tanggal 31-12-2025
98	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(10.676.900)				
99	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		023127/634082/2025	259990302026948	2025-12-31	532111	11.267.056.800	815619	(11.267.056.800)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/1483/PMU.2025 untuk Replikasi Perangkat Keras Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SAK Terpusat) Tahun 1	001197/634082/2026	2613300000002360	2026-01-15	825619	11.267.056.800	-	-	11.267.056.800	-	Pembayaran Replikasi Perangkat Keras Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SAK Terpusat) Tahun 1 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45717/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
100	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021377/634082/2025	259990302026688	2025-12-29	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/2441/PMU.2025 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025	000407/634082/2026	2613300000001525	2026-01-13	825619	7.500.000	411121	(18.750)	7.481.250	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025. sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45582/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
101	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021357/634082/2025	259990302026690	2025-12-29	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/2440/PMU.2025 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025	000397/634082/2026	2613300000001524	2026-01-13	825619	7.500.000	-	-	7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45576/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
102	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021307/634082/2025	259990302026734	2025-12-29	522131	2.481.705.006	815619	(2.481.705.006)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/29969/PMU.2025 untuk Project Management Consultant 2025	000427/634082/2026	2613300000002520	2026-01-15	825619	2.466.205.006	-	-	2.450.705.006	-	Pembayaran Project Management Consultant 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45619/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
103													000437/634082/2026	2613300000002521	2026-01-15	825619	15.500.000	425912	(15.500.000)				Penhilan RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/29969/PMU.2025 untuk Project Management Consultant 2025
104	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021447/634082/2025	259990302026691	2025-12-29	522131	10.500.000	815619	(10.500.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/32969/PMU.2025 untuk Tenaga Ahli Manajemen Proyek Junior	000347/634082/2026	2613300000002160	2026-01-14	825619	10.500.000	-	-	10.500.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Manajemen Proyek Junior sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45625/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
105	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021437/634082/2025	259990302026543	2025-12-29	522131	20.000.000	815619	(20.000.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/2484/PMU.2024 untuk Pengadaan Tenaga Ahli Budgeting dan Rencana Strategis	000157/634082/2026	2613300000002226	2026-01-15	825619	20.000.000	-	-	20.000.000	-	Pembayaran Pengadaan Tenaga Ahli Budgeting dan Rencana Strategis sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45606/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
106	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021397/634082/2025	259990302026693	2025-12-29	521111	5.513.000	815619	(5.513.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/2454/PMU.2025 untuk Pramuabdi Tahun Anggaran 2025	000137/634082/2026	2613300000002221	2026-01-15	825619	5.513.000	-	-	5.513.000	-	Pembayaran Pramuabdi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45673/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
107	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021427/634082/2025	259990302026689	2025-12-29	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/2444/PMU.2025 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025	000147/634082/2026	2613300000002223	2026-01-15	825619	7.500.000	-	-	7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45649/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
108	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021417/634082/2025	259990302026542	2025-12-29	522131	20.000.000	815619	(20.000.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/2483/PMU.2024 untuk Pengadaan Tenaga Ahli Budgeting dan Rencana Strategis	000207/634082/2026	2613300000002156	2026-01-14	825619	20.000.000	-	-	20.000.000	-	Pembayaran Pengadaan Tenaga Ahli Budgeting dan Rencana Strategis sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45612/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
109	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021407/634082/2025	259990302026735	2025-12-29	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/2445/PMU.2025 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025	000117/634082/2026	2613300000002218	2026-01-15	825619	7.500.000	-	-	7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45643/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
110	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021387/634082/2025	259990302026692	2025-12-29	521111	5.513.000	815619	(5.513.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/2452/PMU.2025 untuk Kelembhan Tahun Anggaran 2025	000127/634082/2026	2613300000002219	2026-01-15	825619	5.513.000	-	-	5.513.000	-	Pembayaran Tenaga Kelembhan Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45667/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
111	08	634082	DITJEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021327/634082/2025	259990302026695	2025-12-29	522191	6.065.000	815619	(6.065.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/2435/PMU.2025 untuk Pengemudi Tahun Anggaran 2025	000217/634082/2026	2613300000002157	2026-01-14	825619	6.065.000	-	-	6.065.000	-	Pembayaran Pengemudi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45685/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025

tu f

REKAPITULASI DANA YANG DIBAYAR PENGUNAANNYA

LAMPIRAN XIV

No	ES 1	Kode Sekt	Nama Sekt	Saldo awal di rekening Penampungan Kementerian/ Lembaga (31/12/2025 per 31 Desember 2025)	SPM Penampungan RP/PTA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RP/PTA								Saldo RP/PTA	Deskripsi Transaksi
					No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		
112	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021337/634082/2025	259990302026736	2025-12-29	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	Pengisian RP/PTA atas Kontrak Nomor 000.4/2443/PMU/2025 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025	000227/634082/2026	261330000002158	2026-01-14	825619	7.500.000	-	-	7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45661/PMU/2025 Tanggal 31-12-2025
113	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021367/634082/2025	259990302026544	2025-12-29	522131	35.000.000	815619	(35.000.000)	-	Pengisian RP/PTA atas Kontrak Nomor 000.4/2479/PMU/2024 untuk Pengadaan Tenaga Ahli Senior Budgeting dan Rencana Strategis	000107/634082/2026	261330000002217	2026-01-15	825619	35.000.000	-	-	35.000.000	-	Pembayaran Pengadaan Tenaga Ahli Senior Budgeting dan Rencana Strategis sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45660/PMU/2025 Tanggal 31-12-2025
114	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021317/634082/2025	259990302026694	2025-12-29	522191	6.065.000	815619	(6.065.000)	-	Pengisian RP/PTA atas Kontrak Nomor 000.4/2437/PMU/2025 untuk Pengemudi Tahun Anggaran 2025	000177/634082/2026	261330000002153	2026-01-14	825619	6.065.000	-	-	6.065.000	-	Pembayaran Pengemudi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45679/PMU/2025 Tanggal 31-12-2025
115	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021347/634082/2025	259990302026738	2025-12-29	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	Pengisian RP/PTA atas Kontrak Nomor 000.4/2442/PMU/2025 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025	000197/634082/2026	261330000002155	2026-01-14	825619	7.500.000	-	-	7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45631/PMU/2025 Tanggal 31-12-2025
116	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		023067/634082/2025	259990302028190	2025-12-29	522191	1.359.920.552	815619	(1.359.920.552)	-	Pengisian RP/PTA atas Kontrak Nomor EP 01K887ENTW2DIYVE4Y6BYHCSM untuk Pengadaan Jasa Kajian dan Revitalisasi Bangunan Gedung Command Center atau Data Center	000267/634082/2026	261330000002790	2026-01-19	825619	1.359.920.552	411124	(24.503.073)	1.199.290.656	-	Pembayaran Pengadaan Jasa Kajian dan Revitalisasi Bangunan Gedung Command Center atau Data Center sesuai BAST Nomor 000.4.2/11985/Ses Tanggal 31-12-2025
117	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411231	(134.766.902)			
118	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																425811	(1.359.921)			
119	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		023077/634082/2025	259990302028188	2025-12-29	521211	119.880.000	815619	(119.880.000)	-	Pengisian RP/PTA atas Kontrak Nomor EP 01K8C8DCPD2TMAWEEAGS1TGG8HMM untuk Pengadaan Cetakan kalender dinding, meja dan buku agenda Ditjen Dukcapil	000247/634082/2026	261330000002235	2026-01-15	825619	119.880.000	411211	(11.880.000)	106.380.000	-	Pembayaran Pengadaan Cetakan kalender dinding, meja dan buku agenda Ditjen Dukcapil sesuai BAST Nomor 000.4.2/11980/Ses Tanggal 12-2025
120	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411222	(1.620.000)			
121	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022997/634082/2025	259990302027751	2025-12-29	522191	397.380.000	815619	(397.380.000)	-	Pengisian RP/PTA atas Kontrak Nomor EP 01KCTMBG6GN2TAL8W1PQV9VV untuk Paket Pelayanan Peningkatan Kapasitas bagi Pegawai Ditjen Dukcapil dalam rangka Optimalisasi Penerapan PNPB.	000077/634082/2026	261330000001483	2026-01-13	825619	397.380.000	411211	(39.380.000)	350.840.000	-	Pembayaran Paket Pelayanan Peningkatan Kapasitas bagi Pegawai Ditjen Dukcapil dalam rangka Optimalisasi Penerapan PNPB, sesuai BAST Nomor 000.4.2/6081/DKN/2025 Tanggal 24-12-2025
122	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(7.160.000)			
123	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022987/634082/2025	259990302027702	2025-12-29	522191	397.380.000	815619	(397.380.000)	-	Pengisian RP/PTA atas Kontrak Nomor EP 01KCTFW57521PVSJ48RC1T277 untuk Paket Pelayanan Peningkatan Kapasitas bagi Pegawai Ditjen Dukcapil dalam rangka Optimalisasi Penerapan PNPB.	000067/634082/2026	261330000001481	2026-01-13	825619	397.380.000	411211	(39.380.000)	350.840.000	-	Pembayaran Paket Pelayanan Peningkatan Kapasitas bagi Pegawai Ditjen Dukcapil dalam rangka Optimalisasi Penerapan PNPB, sesuai BAST Nomor 000.4.2/6097/DKN/2025 Tanggal 24-12-2025
124	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(7.160.000)			
125	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022777/634082/2025	259990302027740	2025-12-29	522131	7.000.000	815619	(7.000.000)	-	Pengisian RP/PTA atas Kontrak Nomor 000.4/180/PIAK/2025 untuk Tenaga Ahli Administrasi Tata Kelola Tahun Anggaran 2025	001127/634082/2026	261330000002295	2026-01-15	825619	7.000.000	-	-	7.000.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Administrasi Tata Kelola Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16793/PIAK Tanggal 31-12-2025
126	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022767/634082/2025	259990302027644	2025-12-29	522131	20.950.000	815619	(20.950.000)	-	Pengisian RP/PTA atas Kontrak Nomor 000.4/27/PIAK/2025 untuk Tenaga Ahli Profesional Senior Tahun Anggaran 2025	001117/634082/2026	261330000002304	2026-01-15	825619	20.950.000	-	-	20.950.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Profesional Senior Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16785/PIAK Tanggal 31-12-2025
127	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022757/634082/2025	259990302027687	2025-12-29	522131	21.000.000	815619	(21.000.000)	-	Pengisian RP/PTA atas Kontrak Nomor 000.4/1777/PIAK/2025 untuk Tenaga Ahli Tata Kelola Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2025	001107/634082/2026	261330000002064	2026-01-14	825619	21.000.000	-	-	21.000.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Tata Kelola Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16789/PIAK Tanggal 31-12-2025
128	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022737/634082/2025	259990302027681	2025-12-29	522131	7.000.000	815619	(7.000.000)	-	Pengisian RP/PTA atas Kontrak Nomor 000.4/33/PIAK/2025 untuk Tenaga Ahli Desain Grafis	001087/634082/2026	261330000002063	2026-01-14	825619	7.000.000	-	-	7.000.000	-	Pembayaran Tenaga Desain Grafis sesuai BAST Nomor 000.4/16755/PIAK Tanggal 31-12-2025
129	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022747/634082/2025	259990302027750	2025-12-29	522191	1.087.840.000	815619	(1.087.840.000)	-	Pengisian RP/PTA atas Kontrak Nomor REF-01LTQBCHBGDA8E233NDF8P41X untuk Operasionalisasi Call Center Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	001097/634082/2026	261330000002641	2026-01-19	825619	1.087.840.000	411211	(107.803.964)	960.435.315	-	Pembayaran Operasionalisasi Call Center Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai BAST Nomor 000.4/16797/PIAK Tanggal 31-12-2025
130	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411124	(19.600.721)			
131	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022727/634082/2025	259990302027680	2025-12-29	522131	7.000.000	815619	(7.000.000)	-	Pengisian RP/PTA atas Kontrak Nomor 000.4/30/PIAK/2025 untuk Tenaga Ahli Programmer	001077/634082/2026	261330000002062	2026-01-14	825619	7.000.000	-	-	7.000.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Programmer sesuai BAST Nomor 000.4/16763/PIAK Tanggal 31-12-2025
132	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022707/634082/2025	259990302027684	2025-12-29	522131	19.000.000	815619	(19.000.000)	-	Pengisian RP/PTA atas Kontrak Nomor 000.4/501/PIAK/2025 untuk Paket Pelayanan Jasa Konsultan Perancangan Tenaga Ahli Administrator Database	001057/634082/2026	261330000002061	2026-01-14	825619	19.000.000	-	-	19.000.000	-	Pembayaran Paket Pelayanan Jasa Konsultan Perancangan Tenaga Ahli Administrator Database sesuai BAST Nomor 000.4/16751/PIAK Tanggal 31-12-2025
133	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022697/634082/2025	259990302027676	2025-12-29	522131	19.000.000	815619	(19.000.000)	-	Pengisian RP/PTA atas Kontrak Nomor 000.4/651/PIAK/2025 untuk Paket Pelayanan Jasa Konsultan Perancangan Tenaga Ahli Administrator Database	001047/634082/2026	261330000002060	2026-01-14	825619	19.000.000	-	-	19.000.000	-	Pembayaran Paket Pelayanan Jasa Konsultan Perancangan Tenaga Ahli Administrator Database sesuai BAST Nomor 000.4/16898/PIAK Tanggal 31-12-2025
134	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022717/634082/2025	259990302027677	2025-12-29	522131	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	Pengisian RP/PTA atas Kontrak Nomor 000.4/16/PIAK/2025 untuk Tenaga Operator Database	001067/634082/2026	261330000002301	2026-01-15	825619	7.500.000	-	-	7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Operator Database sesuai BAST Nomor 000.4/16759/PIAK Tanggal 31-12-2025
135	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022677/634082/2025	259990302027678	2025-12-29	522131	19.900.000	815619	(19.900.000)	-	Pengisian RP/PTA atas Kontrak Nomor 000.4/653/PIAK/2025 untuk Paket Pelayanan Jasa Konsultan Perancangan Tenaga Ahli Administrator Database Senior	001027/634082/2026	261330000002059	2026-01-14	825619	19.900.000	-	-	19.900.000	-	Pembayaran Paket Pelayanan Jasa Konsultan Perancangan Tenaga Ahli Administrator Database Senior sesuai BAST Nomor 000.4/16767/PIAK Tanggal 31-12-2025

hu f

REKAPITULASI DANA YANG DIBAYAR PENGUNAANNYA

LAMPIRAN XIV

No	ES 1	Kode Sekt	Nama Sekt	Saldo awal di rekening Penampungan-Rekening/Lembaga (163139) per 31 Desember 2025	SPM Penampungan RPATA					Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA					Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi					
					No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja		Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D	No SPM	No SP2D			Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan
136	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022667/634082/2025	2599903002027663	2025-12-29	522131	22.900.000	815619	(22.900.000)	-	001017/634082/2026	261330000002058	2026-01-14	825619	22.900.000	-	22.900.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perancangan Tenaga Ahli Data Analis sesuai BAST Nomor 000.4/16775/PIAK Tanggal 31-12-2025	
137	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022687/634082/2025	2599903002027685	2025-12-29	522131	19.000.000	815619	(19.000.000)	-	001037/634082/2026	261330000002292	2026-01-15	825619	19.000.000	-	19.000.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perancangan Tenaga Ahli Administrator Database Junior sesuai BAST Nomor 000.4/16771/PIAK Tanggal 31-12-2025	
138	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022637/634082/2025	2599903002027658	2025-12-29	522131	6.130.000	815619	(6.130.000)	-	000987/634082/2026	261330000001964	2026-01-14	825619	6.130.000	-	6.130.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Administrasi Dokumen Pengadaan Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16823/PIAK Tanggal 31-12-2025	
139	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022657/634082/2025	2599903002027661	2025-12-29	522131	6.130.000	815619	(6.130.000)	-	001007/634082/2026	261330000002291	2026-01-15	825619	6.130.000	-	6.130.000	-	Pembayaran Operator Data Center Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16829/PIAK Tanggal 31-12-2025	
140	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022647/634082/2025	2599903002027660	2025-12-29	522131	6.130.000	815619	(6.130.000)	-	000997/634082/2026	261330000001965	2026-01-14	825619	6.130.000	-	6.130.000	-	Pembayaran Operator Data Center Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16826/PIAK Tanggal 31-12-2025	
141	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022627/634082/2025	2599903002027739	2025-12-29	522131	6.130.000	815619	(6.130.000)	-	000977/634082/2026	261330000001963	2026-01-14	825619	6.130.000	-	6.130.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Administrasi Dokumen Pengadaan Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16835/PIAK Tanggal 31-12-2025	
142	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022617/634082/2025	2599903002027743	2025-12-29	522131	6.130.000	815619	(6.130.000)	-	000957/634082/2026	261330000002287	2026-01-15	825619	6.130.000	-	6.130.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Administrasi Dokumen Pengadaan Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16838/PIAK Tanggal 31-12-2025	
143	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022597/634082/2025	2599903002027748	2025-12-29	522131	7.160.000	815619	(7.160.000)	-	000947/634082/2026	261330000002289	2026-01-15	825619	7.160.000	-	7.160.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Hukum Kontrak Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/15847/PIAK Tanggal 31-12-2025	
144	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022607/634082/2025	2599903002027746	2025-12-29	522131	6.130.000	815619	(6.130.000)	-	000967/634082/2026	261330000002290	2026-01-15	825619	6.130.000	-	6.130.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Administrasi Dokumen Pengadaan Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16841/PIAK Tanggal 31-12-2025	
145	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022567/634082/2025	2599903002027742	2025-12-29	522131	7.675.000	815619	(7.675.000)	-	000917/634082/2026	261330000002055	2026-01-14	825619	7.675.000	-	7.675.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Programmer Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16853/PIAK Tanggal 31-12-2025	
146	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022587/634082/2025	2599903002027673	2025-12-29	522131	7.675.000	815619	(7.675.000)	-	000927/634082/2026	261330000002056	2026-01-14	825619	7.675.000	-	7.675.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Programmer Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16850/PIAK Tanggal 31-2025	
147	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022577/634082/2025	2599903002027738	2025-12-29	522131	7.675.000	815619	(7.675.000)	-	000937/634082/2026	261330000002057	2026-01-14	825619	7.675.000	-	7.675.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Programmer Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16856/PIAK Tanggal 31-12-2025	
148	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022547/634082/2025	2599903002027675	2025-12-29	522131	8.190.000	815619	(8.190.000)	-	000897/634082/2026	261330000001961	2026-01-14	825619	8.190.000	-	8.190.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Keamanan Jaringan Senior Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16820/PIAK Tanggal 31-12-2025	
149	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022557/634082/2025	2599903002027700	2025-12-29	522131	8.190.000	815619	(8.190.000)	-	000907/634082/2026	261330000001962	2026-01-14	825619	8.190.000	-	8.190.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Jaringan Teknologi Informasi Senior Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16811/PIAK Tanggal 31-12-2025	
150	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022527/634082/2025	2599903002027741	2025-12-29	522131	8.190.000	815619	(8.190.000)	-	000877/634082/2026	261330000001960	2026-01-14	825619	8.190.000	-	8.190.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Database Senior Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16844/PIAK Tanggal 31-12-2025	
151	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022537/634082/2025	2599903002027679	2025-12-29	522131	8.190.000	815619	(8.190.000)	-	000887/634082/2026	261330000002139	2026-01-14	825619	8.190.000	-	8.190.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Aplikasi Senior Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16817/PIAK Tanggal 31-12-2025	
152	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022517/634082/2025	2599903002027652	2025-12-29	522131	8.190.000	815619	(8.190.000)	-	000867/634082/2026	261330000001959	2026-01-14	825619	8.190.000	-	8.190.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Pengelola Data Center Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16832/PIAK Tanggal 31-12-2025	
153	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022507/634082/2025	2599903002027659	2025-12-29	522131	8.250.000	815619	(8.250.000)	-	000857/634082/2026	261330000001958	2026-01-14	825619	8.250.000	-	8.250.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Infrastruktur Senior Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16814/PIAK Tanggal 31-12-2025	
154	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022457/634082/2025	2599903002027651	2025-12-29	522191	1.096.731.489	815619	(1.096.731.489)	-	000807/634082/2026	261330000002649	2026-01-19	825619	1.096.731.489	411211	(108.685.103)	968.285.458	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage Data Center MMU sesuai BAST Nomor 000.4/16737/PIAK Tanggal 31-12-2025
155	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411224	(19.760.928)			
156	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022467/634082/2025	2599903002027754	2025-12-29	522191	963.303.341	815619	(963.303.341)	-	000817/634082/2026	261330000002527	2026-01-15	825619	963.303.341	411211	(95.462.493)	850.484.031	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Perangkat Jaringan dan Perangkat Keamanan Jaringan Data Center Kependudukan dan DHC Tahun 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16731/PIAK Tanggal 31-12-2025
157	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411224	(17.356.817)			

hu f

REKAPITULASI DANA YANG DIBAYAT PENGUNAANNYA

LAMPIRAN XIV

No	ES 1	Kode Sektir	Nama Sektir	Saldo awal di rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (SAG130) per 31 Desember 2025	SPM Penampungan RP/ATA							Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RP/ATA							Saldo RP/ATA	Deskripsi Transaksi		
					No SPM	No SP/2	Tanggal SP/2	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan		Nilai SP/2	No SPM	No SP/2	Tanggal SP/2	Akun Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan			Nilai SP/2	
158	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022497/634082/2025	259990302027664	2025-12-29	522191	106.320.000	815619	(106.320.000)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/20502/PIAK.2024 688/SP/A2/12/2024 untuk Layanan Managed Service DRC Batam Kerjasama Dengan BP Batam	000847/634082/2026	261330000002345	2026-01-15	825619	106.320.000			106.320.000	-	Pembayaran Layanan Managed Service DRC Batam Kerjasama Dengan BP Batam sesuai BAST Nomor 000.4/16781/PIAK Tanggal 31-12-2025
159	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022477/634082/2025	259990302027667	2025-12-29	521119	597.800.000	815619	(597.800.000)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor EP 01KCGE15RW8DQ8G00QKEETW3D5 untuk Pengadaan Perangkat Monitoring NOC	000827/634082/2026	261330000002200	2026-01-14	825619	597.800.000	411211	(59.241.441)	530.480.181	-	Pembayaran Pengadaan Perangkat Monitoring NOC sesuai BAST Nomor 000.4/16807/PIAK Tanggal 31-12-2025
160	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411122	(8.078.378)				
161	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022487/634082/2025	259990302027655	2025-12-29	522191	363.625.965	815619	(363.625.965)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/708/PIAK.2025 untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung Data Center Medan Merdeka Utara Tahun 2025	000837/634082/2026	261330000002536	2026-01-15	825619	363.625.965	411211	(36.035.006)	321.039.140	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung Data Center Medan Merdeka Utara Tahun 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16803/PIAK Tanggal 31-12-2025
162	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(6.551.819)				
163	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022437/634082/2025	259990302027744	2025-12-29	522191	2.990.000.340	815619	(2.990.000.340)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor EP 01K744RNHT6T5DPJ3Y93V12G6 untuk Annual Technical Support Perangkat Keamanan Informasi Dijeri Dukalpi	000787/634082/2026	261330000002199	2026-01-14	825619	2.990.000.340	411211	(296.306.340)	2.639.820.120	-	Pembayaran Annual Technical Support Perangkat Keamanan Informasi Dijeri Dukalpi sesuai BAST Nomor 000.4/16725/PIAK Tanggal 31-12-2025
164	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(53.873.880)				
165	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022447/634082/2025	259990302027734	2025-12-29	522191	2.788.275.912	815619	(2.788.275.912)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/2001/PIAK.2025 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage DRC	000797/634082/2026	261330000002650	2026-01-19	825619	2.788.275.912	411211	(276.315.631)	2.461.721.075	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage DRC sesuai BAST Nomor 000.4/16713/PIAK Tanggal 31-12-2025
166	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(50.239.206)				
167	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022417/634082/2025	259990302027674	2025-12-29	522191	7.000.000	815619	(7.000.000)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/249/PIAK.2025 untuk Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2025	000767/634082/2026	261330000001956	2026-01-14	825619	7.000.000	-	-	7.000.000	-	Pembayaran Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16862/PIAK Tanggal 31-12-2025
168	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022427/634082/2025	259990302027671	2025-12-29	522191	7.000.000	815619	(7.000.000)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/243/PIAK.2025 untuk Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2025	000777/634082/2026	261330000002198	2026-01-14	825619	7.000.000	-	-	7.000.000	-	Pembayaran Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16859/PIAK Tanggal 31-12-2025
169	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022397/634082/2025	259990302027698	2025-12-29	522131	14.960.000	815619	(14.960.000)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/31063/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Junior	000747/634082/2026	261330000001955	2026-01-14	825619	14.960.000	-	-	14.960.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Junior sesuai BAST Nomor 000.4/16745/PIAK Tanggal 31-12-2025
170	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022407/634082/2025	259990302027672	2025-12-29	522191	7.000.000	815619	(7.000.000)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/252/PIAK.2025 untuk Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2025	000757/634082/2026	261330000001957	2026-01-14	825619	7.000.000	-	-	7.000.000	-	Pembayaran Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16865/PIAK Tanggal 31-12-2025
171	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022367/634082/2025	259990302027654	2025-12-29	522191	185.055.000	815619	(185.055.000)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/31070/PIAK.2025 untuk Pemeliharaan Perangkat Pendukung Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan	001287/634082/2026	261330000002576	2026-01-15	825619	185.055.000	411211	(18.338.784)	163.381.892	-	Pembayaran Pemeliharaan Perangkat Pendukung Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/16950/PIAK Tanggal 31-12-2025
172	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(3.334.324)				
173	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022377/634082/2025	259990302027683	2025-12-29	522131	19.955.000	815619	(19.955.000)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/31070/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Senior	000727/634082/2026	261330000002197	2026-01-14	825619	19.955.000	-	-	19.955.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Senior sesuai BAST Nomor 000.4/16742/PIAK Tanggal 31-12-2025
174	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022387/634082/2025	259990302027747	2025-12-29	522131	19.600.000	815619	(19.600.000)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/704/PIAK.2025 untuk Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Professional IT Senior	000737/634082/2026	261330000002138	2026-01-14	825619	19.600.000	-	-	19.600.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Professional IT Senior sesuai BAST Nomor 000.4/16748/PIAK Tanggal 31-12-2025
175	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022357/634082/2025	259990302027703	2025-12-29	522191	327.672.000	815619	(327.672.000)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/31081/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025	001277/634082/2026	261330000002577	2026-01-15	825619	327.672.000	411124	(5.904.000)	321.768.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16941/PIAK Tanggal 31-12-2025
176	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022347/634082/2025	259990302027753	2025-12-29	522191	570.318.000	815619	(570.318.000)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor EP 01K7NP0HT3W569RCGP190Q7MD untuk Pemeliharaan Zimbra Mail Server	000717/634082/2026	261330000002526	2026-01-15	825619	570.318.000	411211	(56.518.000)	503.524.000	-	Pembayaran Pemeliharaan Zimbra Mail Server sesuai BAST Nomor 000.4/16911/PIAK Tanggal 31-12-2025
177	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(10.276.000)				
178	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022337/634082/2025	259990302027697	2025-12-29	522131	684.381.600	815619	(684.381.600)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/9901/PIAK.2025 untuk Layanan Keshlian Operasional Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan	001267/634082/2026	261330000002532	2026-01-15	825619	684.381.600	411211	(67.821.600)	604.228.800	-	Pembayaran Layanan Keshlian Operasional Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/16932/PIAK Tanggal 31-12-2025
179	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(12.331.200)				
180	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022327/634082/2025	259990302027696	2025-12-29	522191	816.300.000	815619	(816.300.000)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/31077/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025	000707/634082/2026	261330000002531	2026-01-15	825619	816.300.000	411124	(14.708.108)	801.591.892	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16944/PIAK Tanggal 31-12-2025
181	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022317/634082/2025	259990302028220	2025-12-29	522191	1.307.169.522	815619	(1.307.169.522)	-	Pengisian RP/ATA atas Kontrak Nomor 000.4/31060/PIAK.2024 untuk Operasionalisasi dan Pemeliharaan SAK Terpusat	001257/634082/2026	261330000002569	2026-01-15	825619	1.307.169.522	411211	(129.539.322)	1.154.077.596	-	Pembayaran Operasionalisasi dan Pemeliharaan SAK Terpusat sesuai BAST Nomor 000.4/16935/PIAK Tanggal 31-12-2025
182	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(23.552.604)				

he f

REKAPITULASI DANA YANG DIBAYAT PENGUNAANNYA

LAMPIRAN XIV

No	ES 1	Kode Sektir	Nama Sektir	Saldo awal di rekening Penampungan Kementerian/ Lembaga (31/12/2025 per 31 Desember 2025)	SPM Penampungan RPATA							Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA							Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi		
					No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan		Nilai SP2D	No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan			Nilai Potongan	Nilai SP2D
183	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022307/634082/2025	259990300208169	2025-12-29	522191	1.422.428.000	815619	(1.422.428.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-016KH6VQVQIT09W5GV0S58PXCIN untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025	001377/634082/2026	261330000002570	2026-01-15	825619	1.422.428.000	411124	(25.629.333)	1.396.798.667	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16920/PIAK Tanggal 31-12-2025
184	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022297/634082/2025	259990300208224	2025-12-29	522131	1.454.965.800	815619	(1.454.965.800)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/7755/PIAK.2025 untuk Pengembangan Aplikasi SIAP Terpusat	001247/634082/2026	261330000002571	2026-01-15	825619	1.454.965.800	411211	(144.185.800)	1.284.564.400	-	Pembayaran Pengembangan Aplikasi SIAP Terpusat sesuai BAST Nomor 000.4/16923/PIAK Tanggal 31-12-2025
185	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(26.215.600)				
186	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022287/634082/2025	259990300208227	2025-12-29	522191	1.520.549.928	815619	(1.520.549.928)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-016K6A98SGA272T2PREZT9YFYR untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025	000697/634082/2026	261330000002535	2026-01-15	825619	1.520.549.928	411124	(27.397.296)	1.493.152.632	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16929/PIAK Tanggal 31-12-2025
187	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022277/634082/2025	259990300208218	2025-12-29	522191	1.672.131.880	815619	(1.672.131.880)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01CKG14048B2HSMYTRNNWY183 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025	000687/634082/2026	261330000002651	2026-01-19	825619	1.672.131.880	411211	(165.706.763)	1.476.296.615	-	Pembayaran Annual Technical Support Perangkat Server Storage Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan
188	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(30.128.502)				
189	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022257/634082/2025	259990300208170	2025-12-29	522191	3.617.518.660	815619	(3.617.518.660)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/31073/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025	001237/634082/2026	261330000002534	2026-01-15	825619	3.617.518.660	411124	(65.180.516)	3.552.338.144	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16917/PIAK Tanggal 31-12-2025
190	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022267/634082/2025	259990300208203	2025-12-29	536111	2.371.352.098	815619	(2.371.352.098)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01KAT5SM5YQYQ840ITMMEKAPOD untuk Pengadaan Perangkat Lunak Pendukung Sistem SIAP Terpusat	001337/634082/2026	261330000002579	2026-01-15	825619	2.371.352.098	411211	(234.998.857)	2.104.307.942	-	Pembayaran Pengadaan Perangkat Lunak Pendukung Sistem SIAP Terpusat sesuai BAST Nomor 000.4/16908/PIAK Tanggal 31-12-2025
191	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411122	(32.045.299)				
192	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022237/634082/2025	259990300208334	2025-12-31	522191	5.448.574.029	815619	(5.448.574.029)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-016K6CW3MGGVBMT7HAYCYVZ83T untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025	000667/634082/2026	261330000002654	2026-01-19	825619	5.448.574.029	411124	(98.172.505)	5.350.401.524	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16926/PIAK Tanggal 31-12-2025
193	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022217/634082/2025	259990300208331	2025-12-31	522191	8.192.452.000	815619	(8.192.452.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01KAD5V3M3PMKZXSDXMDJ2DBN untuk Annual Technical Support Perangkat Server Storage Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan	000647/634082/2026	261330000002655	2026-01-19	825619	8.192.452.000	411211	(811.864.613)	7.232.975.639	-	Pembayaran Annual Technical Support Perangkat Server Storage Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/16902/PIAK Tanggal 31-12-2025
194	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(147.611.748)				
195	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022227/634082/2025	259990300208330	2025-12-31	522191	6.700.483.612	815619	(6.700.483.612)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/31056/PIAK.2024 untuk Pekerjaan Pengadaan furnitur kantor lainnya berupa lantai, dinding, furnitur, pencahayaan, dan elemen dekoratif	000657/634082/2026	261330000002652	2026-01-19	825619	6.700.483.612	411124	(120.729.434)	6.579.754.178	-	Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Annual Technical Support Aplikasi Biometrik KTP-el Tahun 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16703/PIAK Tanggal 31-12-2025
196	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022247/634082/2025	259990300208332	2025-12-31	522191	5.110.191.600	815619	(5.110.191.600)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/31085/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025	000677/634082/2026	261330000002656	2026-01-19	825619	5.110.191.600	411124	(92.075.524)	5.018.116.076	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/16947/PIAK Tanggal 31-12-2025
197	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022137/634082/2025	259990300208185	2025-12-29	536111	470.640.000	815619	(470.640.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01KXSD5VWPPN5T4M15MTDOK72 untuk Pengadaan furnitur kantor lainnya berupa lantai, dinding, furnitur, pencahayaan, dan elemen dekoratif	000257/634082/2026	261330000002236	2026-01-15	825619	470.640.000	411211	(46.640.000)	415.520.000	-	Pembayaran Pengadaan furnitur kantor lainnya berupa lantai, dinding, furnitur, pencahayaan, dan elemen dekoratif sesuai BAST Nomor 000.4.2/1981/Ses Tanggal 31-12-2025
198	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(8.480.000)				
199	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021557/634082/2025	259990300200022	2025-12-30	532111	29.853.000.000	815619	(29.853.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/40569/PMU.2025 untuk Paket Pekerjaan Penambahan Kapasitas Penyimpanan Data Center Medan Merdeka Utara (DC MMU)	000637/634082/2026	261330000002510	2026-01-15	825619	29.853.000.000	-	-	29.853.000.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Penambahan Kapasitas Penyimpanan Data Center Medan Merdeka Utara (DC MMU) sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45709/PMU/2025 Tanggal 31-12-2025
200	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021537/634082/2025	259990300209559	2025-12-30	532111	10.188.000.000	815619	(10.188.000.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/41485/PMU.2025 untuk Paket Pekerjaan Penguatan Keamanan Sistem dan Infrastruktur Administrasi Kependudukan	000477/634082/2026	261330000002511	2026-01-15	825619	10.188.000.000	-	-	10.188.000.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Keamanan Sistem dan Infrastruktur Administrasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45693/PMU/2025 Tanggal 31-12-2025
201	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021547/634082/2025	259990300200023	2025-12-30	532111	20.861.100.000	815619	(20.861.100.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/41173/PMU.2025 untuk Penambahan Server Biometrika Data Center Medan Merdeka Utara	000367/634082/2026	261330000002539	2026-01-15	825619	20.861.100.000	-	-	20.861.100.000	-	Pembayaran Penambahan Server Biometrika Data Center Medan Merdeka Utara sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45693/PMU/2025 Tanggal 31-12-2025
202	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021527/634082/2025	259990300209660	2025-12-30	532111	10.371.397.713	815619	(10.371.397.713)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/41485/PMU.2025 untuk Penguatan Perangkat Keras Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SIAP TERPUSAT)	001537/634082/2026	261330000004528	2026-01-29	825619	10.371.397.713	-	-	10.371.397.713	-	Pembayaran Penguatan Perangkat Keras Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SIAP TERPUSAT) sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/1057/PMU/2026 Tanggal 13-01-2026

hu f

REKAPITULASI DANA YANG DIBAYAT PENGUNAANNYA

LAMPIRAN XIV

No	ES 1	Kode Satker	Nama Satker	Saldo awal di rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2025	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi
					No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		
203	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021517/634082/2025	259990300206951	2025-12-30	532111	24.199.928.000	815619	(24.199.928.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1485/PMU.2025 untuk Penguatan Perangkat Keras Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SIAX TERPUSAT)	001527/634082/2026	261330000004524	2026-01-29	825619	24.199.928.000	-	-	24.199.928.000	-	Pembayaran Penguatan Perangkat Keras Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SIAX TERPUSAT) sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/1057/PMU.2026 Tanggal 13-01-2026
204	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021497/634082/2025	259990300208225	2025-12-29	522131	2.754.887.500	815619	(2.754.887.500)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/33371/PMU.2025 untuk Pengembangan Aplikasi IEO	001227/634082/2026	261330000002358	2026-01-15	825619	2.754.887.500	-	-	2.754.887.500	-	Pembayaran Pengembangan Aplikasi IEO sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45730/PMU.2025 Tanggal 31-12-2025
205	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022077/634082/2025	259990300207665	2025-12-29	522191	870.363.725	815619	(870.363.725)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/655/IDN/2025 untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Konektitas Data Warehouse Kependudukan.	000447/634082/2026	261330000002529	2026-01-15	825619	870.363.725	411211	(86.252.261)	768.429.235	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Konektitas Data Warehouse Kependudukan, sesuai BAST Nomor 000.4.2/6217/IDN/2025 Tanggal 31-12-2025
206	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(15.682.229)				
207	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022057/634082/2025	259990300207662	2025-12-29	536111	504.572.700	815619	(504.572.700)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/4077/IDN/2025 untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Manajemen Pemanfaatan Data Kependudukan.	000457/634082/2026	261330000002698	2026-01-19	825619	504.572.700	411211	(50.002.700)	445.478.600	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Manajemen Pemanfaatan Data Kependudukan, sesuai BAST Nomor 000.4.2/6225/IDN/2025 Tanggal 31-12-2025
208	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(9.091.400)				
209	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022047/634082/2025	259990300207701	2025-12-29	522191	2.855.475.500	815619	(2.855.475.500)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP 013AK82/ISCAQV7D930916PK00A untuk Paket Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Rekonsiliasi Transaksi PHBP.	-	-	-	-	-	-	-	2.855.475.500	-	
210	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022067/634082/2025	259990300207649	2025-12-29	536111	850.806.120	815619	(850.806.120)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/524/IDN/2025 untuk Paket Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Konektitas Data Warehouse Kependudukan untuk Lembaga Pengguna PHBP.	000087/634082/2026	261330000001486	2026-01-13	825619	850.806.120	411211	(84.314.120)	751.162.160	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Konektitas Data Warehouse Kependudukan untuk Lembaga Pengguna PHBP, sesuai BAST Nomor 000.4.2/6090/IDN/2025 Tanggal 24-12-2025
211	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(15.329.840)				
212	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022087/634082/2025	259990300207656	2025-12-29	536111	607.551.575	815619	(607.551.575)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/506/IDN/2025 untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Gateway/Middleware untuk Sistem Pengenalan Wajah (FR).	000097/634082/2026	261330000001230	2026-01-12	825619	607.551.575	411211	(60.207.814)	536.396.886	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Gateway/Middleware untuk Sistem Pengenalan Wajah (FR), sesuai BAST Nomor 000.4.2/6059/IDN/2025 Tanggal 21-12-2025
213	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(10.946.875)				
214	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022097/634082/2025	259990300207642	2025-12-29	522191	423.486.000	815619	(423.486.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/6836/IDN untuk Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Telekomunikasi.	000467/634082/2026	261330000002594	2026-01-15	825619	423.486.000	411211	(41.967.081)	373.888.541	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, sesuai BAST Nomor 000.4.2/6237/IDN/2025 Tanggal 31-12-2025
215	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(7.630.378)				
216	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022037/634082/2025	259990300207737	2025-12-29	522191	231.840.000	815619	(231.840.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/4504/IDN/2025 untuk Paket Pekerjaan Pengelolaan Konektitas SAM Online.	000537/634082/2026	261330000001899	2026-01-14	825619	231.840.000	411211	(22.975.135)	204.687.568	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengelolaan Konektitas SAM Online, sesuai BAST Nomor 000.4.2/6163/IDN/2025 Tanggal 31-12-2025
217	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(4.177.297)				
218	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021997/634082/2025	259990300207695	2025-12-29	522191	1.860.790.680	815619	(1.860.790.680)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP 013AKWV2MYXVZVHHBKEBHVFCVZ untuk Paket Pekerjaan Survei Kepuasan dan Compliance Layanan Dukcapil dan Penerapan PHBP.	000487/634082/2026	261330000002593	2026-01-15	825619	1.860.790.680	411211	(184.402.680)	1.642.860.240	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Survei Kepuasan dan Compliance Layanan Dukcapil dan Penerapan PHBP, sesuai BAST Nomor 000.4.2/6167/IDN/2025 Tanggal 31-12-2025
219	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(33.527.760)				
220	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022007/634082/2025	259990300207650	2025-12-29	522191	26.999.999	815619	(26.999.999)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/040/IDN/2025 untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung Pengelolaan dan Penerbitan Kartu SAM.	000507/634082/2026	261330000001376	2026-01-12	825619	26.999.999	411211	(2.675.676)	23.837.837	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung Pengelolaan dan Penerbitan Kartu SAM, sesuai BAST Nomor 000.4.2/6231/IDN/2025 Tanggal 31-12-2025
221	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(486.486)				
222	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022027/634082/2025	259990300207657	2025-12-29	522191	447.552.000	815619	(447.552.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/409/IDN/2025 untuk Paket Pekerjaan ATS Perangkat Key Management System (KMS) Blangko KTP el dan SAM.	000517/634082/2026	261330000001888	2026-01-14	825619	447.552.000	411211	(44.352.000)	395.136.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan ATS Perangkat Key Management System (KMS) Blangko KTP el dan SAM, sesuai BAST Nomor 000.4.2/6153/IDN/2025 Tanggal 31-12-2025
223	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(8.064.000)				
224	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		022017/634082/2025	259990300207699	2025-12-29	522191	448.492.800	815619	(448.492.800)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/185/IDN/2025 untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Penerbitan Kartu SAM, Pemanfaatan Card Reader dan Key Management System (KMS).	000527/634082/2026	261330000001898	2026-01-14	825619	448.492.800	411211	(44.445.232)	395.966.617	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pemeliharaan Penerbitan Kartu SAM, Pemanfaatan Card Reader dan Key Management System (KMS), sesuai BAST Nomor 000.4.2/6158/IDN/2025 Tanggal 31-12-2025
225	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411124	(8.080.951)				
226	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021967/634082/2025	259990300207682	2025-12-29	522131	6.687.000	815619	(6.687.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/005/IDN/2025 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli IT Support.	000607/634082/2026	261330000001380	2026-01-12	825619	6.687.000	-	-	6.687.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli IT Support, sesuai BAST Nomor 000.4.2/6196/IDN/2025 Tanggal 31-12-2025
227	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021957/634082/2025	259990300207686	2025-12-29	522131	6.687.000	815619	(6.687.000)	-	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/007/IDN/2025 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli IT Support.	000617/634082/2026	261330000001381	2026-01-12	825619	6.687.000	-	-	6.687.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli IT Support, sesuai BAST Nomor 000.4.2/6196/IDN/2025 Tanggal 31-12-2025

hu f

REKAPTULASI DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

LAMPIRAN XIV

No	ES 1	Kode Sekt	Nama Sekt	Saldo awal di rekening Penampungan Kementerian/ Lembaga (31/12/2025 per 31 Desember 2025)	SPM Penampungan RP/PA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RP/PA								Saldo RP/PA	Deskripsi Transaksi
					No SPM	No SP/2	Tanggal SP/2	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP/2		No SPM	No SP/2	Tanggal SP/2	Akun Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP/2			
228	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021947/634082/2025	259990302027669	2025-12-29	522131	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	000597/634082/2026	261330000001379	2026-01-12	825619	7.500.000	-	7.500.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perancangan Tenaga Ahli Junior Asisten Professional Staf. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6192/DKN/2025 Tanggal 31-12-2025		
229	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021937/634082/2025	259990302027670	2025-12-29	522131	6.900.000	815619	(6.900.000)	-	000577/634082/2026	261330000001377	2026-01-12	825619	6.900.000	-	6.900.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Tenaga Ahli Implementasi Aplikasi Konektivitas Data Warehouse Kependudukan. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6180/DKN/2025 Tanggal 31-12-2025		
230	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021927/634082/2025	259990302027736	2025-12-29	522131	6.900.000	815619	(6.900.000)	-	000587/634082/2026	261330000001378	2026-01-12	825619	6.900.000	-	6.900.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Tenaga Ahli Implementasi Aplikasi Konektivitas Data Warehouse Kependudukan. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6184/DKN/2025 Tanggal 31-12-2025		
231	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021917/634082/2025	259990302027643	2025-12-29	522131	18.400.000	815619	(18.400.000)	-	000567/634082/2026	261330000001375	2026-01-12	825619	18.400.000	-	18.400.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Tenaga Ahli Jaringan. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6188/DKN/2025 Tanggal 31-12-2025		
232	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021867/634082/2025	259990302027647	2025-12-29	522131	10.000.000	815619	(10.000.000)	-	000557/634082/2026	261330000001402	2026-01-12	825619	10.000.000	-	10.000.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Tenaga Ahli Junior Asisten Professional Staf. sesuai BAST Nomor 000.4.2/6176/DKN/2025 Tanggal 31-12-2025		
233	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021907/634082/2025	259990302026888	2025-12-29	522131	27.800.000	815619	(27.800.000)	-	000417/634082/2026	261330000001584	2026-01-13	825619	27.800.000	-	27.800.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Tenaga Ahli IKD Utilization Developer. sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45594/PMU/2025 Tanggal 31-12-2025		
234	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021877/634082/2025	259990302026906	2025-12-29	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	000187/634082/2026	261330000002154	2026-01-14	825619	7.500.000	-	7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45637/PMU/2025 Tanggal 31-12-2025		
235	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021897/634082/2025	259990302026902	2025-12-29	522131	30.000.000	815619	(30.000.000)	-	000627/634082/2026	261330000001585	2026-01-13	825619	30.000.000	-	30.000.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Individu utilization Cyber Security and Cryptography Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45588/PMU/2025 Tanggal 31-12-2025		
236	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021887/634082/2025	259990302026905	2025-12-29	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	000167/634082/2026	261330000002151	2026-01-14	825619	7.500.000	-	7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45655/PMU/2025 Tanggal 31-12-2025		
237	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021857/634082/2025	259990302026903	2025-12-29	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	000387/634082/2026	261330000001523	2026-01-13	825619	7.500.000	411121	(206.250)	7.293.750	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Tenaga Pendukung Administrasi sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/45570/PMU/2025 Tanggal 31-12-2025	
238	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021247/634082/2025	259990302026898	2025-12-29	522131	5.500.000	815619	(5.500.000)	-	000297/634082/2026	261330000001937	2026-01-14	825619	5.500.000	-	5.500.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi : Tenaga IT Support sesuai BAST Nomor 000.4.2/12806/DKD/2025 Tanggal 31-12-2025		
239	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021257/634082/2025	259990302026900	2025-12-29	522131	5.500.000	815619	(5.500.000)	-	000287/634082/2026	261330000001935	2026-01-14	825619	5.500.000	-	5.500.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi : Tenaga IT Support sesuai BAST Nomor 000.4.2/12810/DKD/2025 Tanggal 31-12-2025		
240	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021267/634082/2025	259990302026899	2025-12-29	522131	5.500.000	815619	(5.500.000)	-	000277/634082/2026	261330000001933	2026-01-14	825619	5.500.000	-	5.500.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi : Tenaga IT Support sesuai BAST Nomor 000.4.2/12814/DKD/2025 Tanggal 31-12-2025		
241	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021277/634082/2025	259990302026897	2025-12-29	522131	5.500.000	815619	(5.500.000)	-	000307/634082/2026	261330000001938	2026-01-14	825619	5.500.000	-	5.500.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi : Tenaga IT Support sesuai BAST Nomor 000.4.2/12818/DKD/2025 Tanggal 31-12-2025		
242	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021287/634082/2025	259990302026896	2025-12-29	522131	5.500.000	815619	(5.500.000)	-	000317/634082/2026	261330000001939	2026-01-14	825619	5.500.000	-	5.500.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi : Tenaga IT Support sesuai BAST Nomor 000.4.2/12802/DKD/2025 Tanggal 31-12-2025		
243	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		021297/634082/2025	259990302026887	2025-12-29	522131	24.642.000	815619	(24.642.000)	-	000327/634082/2026	261330000001941	2026-01-14	825619	24.642.000	-	24.642.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Analisis Keamanan Informasi sesuai BAST Nomor 000.4.2/12822/DKD/2025 Tanggal 31-12-2025		
244	12	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	96.645.000	004857/027177/2025	259990302014526	2025-12-19	522191	96.645.000	815619	(96.645.000)	-	000037/027177/2026	260540000000233	2026-01-06	825619	96.645.000	411211	(9.577.432)	87.067.568	-	Pembayaran Pengadaan Jasa Lainnya berupa penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar Tahun 2025 sesuai BAST Nomor 000.4/1138/PPK/PPSDM-2025 Tanggal 31-12-2025	
245	12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.557.902.645	014627/403231/2025	259990302030356	2025-12-31	533121	1.009.965.425	815619	(1.009.965.425)	-	000047/403231/2026	261330000000211	2026-01-06	825619	1.009.965.425	411211	(100.086.664)	893.955.883	-	Pembayaran Renovasi Ruang Auditorium Gedung F pada BPSDM Kemendagri sesuai BAST Nomor 000.4.2/5480/BA-ST/XII/2025 Tanggal 31-12-2025	
246	12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															411128	(15.922.878)				

hu f

REKAPTULASI DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

LAMPIRAN XIV

No	EES 1	Kode Sektir	Nama Sektir	Saldo Utang di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga (163130) per 31 Desember 2025	SPM Penampungan RP/PA						Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RP/PA						Saldo RP/PA	Deskripsi Transaksi			
					No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan		Nilai Potongan	Nilai SP2D	No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja			Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan
247	12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		014611/403231/2025	259990302029030	2025-12-29	521111	25.800.000	815619	(25.800.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 027/109/SP/2025 untuk Paket Pengisian Jasa Langganan Internet (Backup Provider) pada BPSPDM Kemendagri TA 2025	000061/403231/2026	261330000000500	2026-01-07	825619	25.800.000	411211	(2.556.757)	22.778.378	Pembayaran Paket Pengadaan Jasa Langganan Internet (Backup Provide) pada BPSPDM Kemendagri TA 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/547/BA-ST/20/2025 Tanggal 31-12-2025
248	12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															411124	(464.865)			
249	12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		014561/403231/2025	259990302027666	2025-12-29	521111	60.000.000	815619	(60.000.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 027/111/SP/2025 untuk Paket Pengisian Jasa Langganan Internet pada BPSPDM Kemendagri TA 2025	000031/403231/2026	261330000000136	2026-01-05	825619	60.000.000	411211	(5.945.946)	52.972.973	Pembayaran Paket Pengadaan Jasa Langganan Internet pada BPSPDM Kemendagri TA 2025 sesuai BAST Nomor 000.4.2/547/BA-ST/20/2025 Tanggal 31-12-2025
250	12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															411124	(1.081.081)			
251	12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		014541/403231/2025	259990302029028	2025-12-29	522191	462.137.220	815619	(462.137.220)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 027/185/SP/2025 untuk Sewa Jasa Petugas Kebersihan pada BPSPDM Kemendagri TA 2025	000051/403231/2026	261330000000216	2026-01-06	825619	462.137.220	411211	(45.797.382)	408.013.041	Pembayaran Sewa Jasa Petugas Kebersihan pada BPSPDM Kemendagri TA 2025 sesuai BAST Nomor 000.4.2/547/BA-ST/20/2025 Tanggal 31-12-2025
252	12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															411124	(8.326.797)			
253	12	506137	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	27.600.000	004011/506137/2025	259990302014900	2025-12-22	523111	27.600.000	815619	(27.600.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4.2/06/PPSPDM-BKT untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Cleaning Service Bulan Desember Tahun 2025 dan Aula Nusantara Pusat Pengembangan SDM Regional Bukittinggi Tahun 2025	000031/506137/2026	260110000000122	2026-01-06	825619	27.600.000	411124	(552.000)	27.048.000	Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Jasa Cleaning Service Bulan Desember Tahun 2025 sesuai dengan SPK No. 000.4.2/06/PPSPDM-BKT tanggal 2 Januari 2025 dan BAST No.000.1.7.2/2474/PPSPDM-BKT Tanggal 31 Desember 2025 Nk.Rp.317.400.000,-
254	12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	3.337.644.014	003871/506138/2025	259990302020369	2025-12-24	533121	3.193.269.000	815619	(3.193.269.000)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor EP-01K2BA264N9064MPY2BQDPJN untuk renovasi penambahan nilai gedung asrama	000121/506138/2026	2602300000001046	2026-01-14	825619	3.193.269.000	411211	(316.450.081)	2.826.474.588	Pembayaran renovasi penambahan nilai gedung asrama sesuai BAST Nomor 000.4/7158/e-CAT/BAST/Balai-KMG Tanggal 31-12-2025
255	12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN															411128	(50.344.331)			
256	12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		003841/506138/2025	259990302020370	2025-12-24	522191	11.194.776	815619	(11.194.776)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/61/e-CAT/SP/Balai-KMG untuk pengadaan jasa pengemudi/driver	000111/506138/2026	2602300000001047	2026-01-14	825619	11.194.776	411211	(1.109.392)	9.883.676	Pembayaran pengadaan jasa pengemudi/driver sesuai BAST Nomor 000.4/7145/e-CAT/BAST/Balai-KMG Tanggal 31 Desember 2025
257	12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN															411124	(201.708)			
258	12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		003851/506138/2025	259990302020371	2025-12-24	522191	83.960.820	815619	(83.960.820)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/61/e-CAT/SP/Balai-KMG untuk pengadaan jasa petugas kebersihan (cleaning service)	000041/506138/2026	2602300000000968	2026-01-13	825619	83.960.820	411211	(8.320.442)	74.127.570	Pembayaran pengadaan jasa petugas kebersihan (cleaning service) sesuai BAST Nomor 000.4/7144/e-CAT/BAST/Balai-KMG Tanggal 31 Desember 2025
259	12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN															411124	(1.512.808)			
260	12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		003861/506138/2025	259990302020372	2025-12-24	533121	49.219.418	815619	(49.219.418)	-	Pengisian RP/PA atas Kontrak Nomor 000.4/5943/SPK-PL/Balai-KMG untuk konsultan pengawas renovasi penambahan nilai gedung asrama	000131/506138/2026	2602300000001113	2026-01-14	825619	49.219.418	411211	(4.877.600)	43.454.982	Pembayaran konsultan pengawas renovasi penambahan nilai gedung asrama sesuai BAST Nomor 000.4/7155/BAST-PL/Balai-KMG Tanggal 31-12-2025
261	12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN															411124	(886.836)			

hu f

REKAPITULASI DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

LAMPIRAN XIV

No	EES 1	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Utang di Memerintag Perampungan Kementerian/ Lembaga (163139) per 31 Desember 2025	SPM Penampungan RP/ATA										Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RP/ATA										Saldo RP/ATA	Deskripsi Transaksi					
					SPM					SP2D						SP2D					SPM							SP2D				
					No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D	No SPM	No SP2D		Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D											
Jumlah				228.247.203.927					228.247.203.927		(228.247.203.927)	-					225.391.728.427	(7.478.698.079)	217.595.658.932	2.855.475.500												

he f



LAMPIRAN XXV

RINCIAN MUTASI ASET LAIN- LAIN PER UNIT ESELON I

RINCIAN MUTASI ASET LAIN-LAIN PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	POLPUM	BAK	PEMDES	BANGDA	OTDA	DUKCAPIL	KEUDA	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo per 31 Desember 2024		23.278.604.600	-	-	2.832.484.380	750.410.747	48.785.882.881	87.992.566.356	2.017.817.909	5.913.636.030	3.138.663.350	8.153.998.247	182.864.064.500
Penghentian Aset Dari Penggunaan	401	38.726.109.002	968.005.439	51.268.234	-	495.136.250	175.859.654	18.577.923.607	92.345.793.760	34.129.537.832	1.802.952.971	830.953.530	188.103.540.279
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	912	1.138.254.684											1.138.254.684
Mutasi Tambah		39.864.363.686	968.005.439	51.268.234	-	495.136.250	175.859.654	18.577.923.607	92.345.793.760	34.129.537.832	1.802.952.971	830.953.530	189.241.794.963
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	402	(275.254.314)				(47.378.000)	(241.592.500)					(49.450.000)	(613.674.814)
Penghapusan	301					(10.165.000)							(10.165.000)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	911	(21.871.734.312)	(658.242.017)	(51.268.234)	(118.895.000)	(20.065.000)	(175.859.654)	(7.834.805.915)	-	-	-	(1.465.464.528)	(32.196.334.660)
Mutasi Kurang		(22.146.988.626)	(658.242.017)	(51.268.234)	(118.895.000)	(77.608.000)	(417.452.154)	(7.834.805.915)	-	-	-	(1.514.914.528)	(32.820.174.474)
Saldo per 31 Desember 2025		40.995.979.660	309.763.422	-	2.713.589.380	1.167.938.997	48.544.290.381	98.735.684.048	94.363.611.669	40.043.173.862	4.941.616.321	7.470.037.249	339.285.684.989
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025		(38.064.724.332)	(309.763.422)	-	(2.713.589.380)	(1.102.353.546)	(47.946.149.839)	(98.630.442.550)	(94.363.611.669)	(39.834.545.292)	(1.814.194.771)	(7.307.146.745)	(332.086.521.546)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		2.931.255.328	-	-	-	65.585.451	598.140.542	105.241.498	-	208.628.570	3.127.421.550	162.890.504	7.199.163.443



LAMPIRAN XXVI

REKAPITULASI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Rekapitulasi Utang Kepada Pihak Ketiga

KODE ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	31 Desember 2025				31 Desember 2024			
			BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212111)	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212112)	UTANG PIHAK KETIGA LAINNYA (212191)	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212111)	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212112)	UTANG PIHAK KETIGA LAINNYA (212191)	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	5.919.119.318	-	4.822.933.190	10.742.052.508	5.042.551.780	-	98.020.945.752	103.063.497.532
01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	6.146.866.051	-	1.987.744.146	8.134.610.197	3.092.871.018	-	905.824.766	3.998.695.784
01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	114.619.045	56.440.706	434.740.676	605.800.427	291.258.561	52.264.679	258.080.276	601.603.516
01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	358.721.757	-	516.227.214	874.948.971	227.642.248	-	162.214.497	389.856.745
01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	528.811.199	65.304.164	177.523.873	771.639.236	191.875.866	-	267.117.303	458.993.169
01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	485.281.771	45.596.616	186.281.000	717.159.387	70.251.804	-	55.508.996	125.760.800
01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	409.435.151	53.643.407	126.850.000	589.928.558	57.759.305	36.657.061	-	94.416.366
01	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	597.330.773	8.264.090	174.374.797	779.969.660	-	24.420.000	162.937.471	187.357.471
01	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	71.436.030	12.420.300	-	83.856.330	-	-	-	-
02	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	1.893.034.684	-	-	1.893.034.684	1.425.437.942	-	-	1.425.437.942
03	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	1.503.900.890	-	-	1.503.900.890	1.319.042.470	903.984	-	1.319.946.454
04	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1.438.553.599	-	12.322.700	1.450.876.299	151.923.864	90.249.000	2.165.794.976	2.407.967.840
04	259084	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-
04	417697	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	8.213.384	8.213.384
04	484197	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	-	-	-	-	-	-	32.700	32.700
04	484205	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	-	-	10.000	10.000	-	-	10.000	10.000
04	484208	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	-	-	60	60	-	-	60	60
04	484213	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	2.393.855.518	255.910.062	175.502.028	2.825.267.608	1.652.914.106	292.836.172	29.456.067.958	31.401.818.236
05	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	328.045.789	-	-	328.045.789	279.228.395	37.070.435	-	316.298.830
05	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	310.483.102	2.997.000	-	313.480.102	231.125.056	18.240.298	-	249.365.354
05	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	291.128.944	21.570.402	-	312.699.346	233.451.134	22.557.097	-	256.008.231
06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.560.732.950	-	24.509.677.072	26.070.410.022	1.199.567.500	15.282.891.834	4.135.673.016	20.618.132.350

Rekapitulasi Utang Kepada Pihak Ketiga

LAMPIRAN XXVI

KODE ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	31 Desember 2025				31 Desember 2024			
			BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212111)	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212112)	UTANG PIHAK KETIGA LAINNYA (212191)	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212111)	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212112)	UTANG PIHAK KETIGA LAINNYA (212191)	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
07	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	1.861.409.493	-	-	1.861.409.493	1.027.236.045	-	-	1.027.236.045
08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	154.527.714.414	154.527.714.414	81.127.000	-	229.372.442.230	229.453.569.230
09	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	1.790.040.312	-	-	1.790.040.312	990.015.346	-	-	990.015.346
11	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-	157.167.582	-	-	157.167.582
12	027114	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	680.014.268	-	-	680.014.268	638.293.219	-	-	638.293.219
12	027177	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	455.411.229	-	107.987.378	563.398.607	452.320.573	-	-	452.320.573
12	403216	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	481.049.541	-	-	481.049.541	452.771.606	-	-	452.771.606
12	506137	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	-	-	27.600.000	27.600.000	-	-	20.400.000	20.400.000
12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.082.414.077	-	1.557.902.645	2.640.316.722	762.009.272	183.939.037	517.800.000	1.463.748.309
12	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	129.091.479	-	3.337.644.014	3.466.735.493	107.228.968	35.385.250	94.718.152	237.332.370
JUMLAH			30.830.786.970	522.146.747	192.683.035.207	224.035.968.924	20.135.070.660	16.077.414.847	365.603.781.537	401.816.267.044

he f



LAMPIRAN XXVII

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PER SATKER

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PER SATKER

ESELON I	SATKER	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2025	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
Setjen	Kantor Pusat (403200)	Penempatan 1 (satu) unit mesin ATM Bank Mandiri	19.881.000	39.762.000	
		Penempatan Kantor Kas Bank BRI	242.545.000	363.817.500	
		Penempatan 2 (dua) unit mesin ATM Bank BRI			
		BNI Gedung B Lantai I (Bank)	269.517.967	416.527.767	
		Penempatan 1 (satu) unit mesin ATM Bank BSI	18.458.917	19.643.000	
		Koperasi P (Kantin Gedung C)	102.732.200	154.098.300	
		Koperasi Prajamukti	131.013.900	189.242.300	
		DPP PP PAUD	49.706.400	62.133.000	
		Dharma Wanita	-	7.077.500	
		PT. DTN	242.314.800	27.272.727	
		PT. TBS	-	74.402.987	
	IPDN Jatinangor (448302)	PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. (Kampus Jakarta)	36.257.222		
		PT. BNI (PERSERO) Tbk. (Kampus Jakarta)	36.257.222	-	
		Koprasi BBP (Kampus Jakarta)	28.194.444	-	
		Café Praja (Kampus Jakarta)	30.265.889	-	
		Koprasi BBP (Kantin Kampus Jakarta)	-	26.972.344	
		Koprasi BBP (Koprasi Kampus Jakarta)	-	12.788.646	
		Bank BJB Jatinangor	56.414.400	83.179.250	
		Bank BJB	39.550.000	62.150.000	
		PT. STU	12.677.083	43.102.083	
		PT. STU	13.893.722	23.701.056	
		BNI Cabang PTB	-	17.820.000	
		Dharma Wanita Persatuan IPDN	18.000.000	30.000.000	
		CV. KMR	78.197.167	163.503.167	
		Koperasi KDKS	4.103.667	10.259.167	
		Koprasi BBP	-	13.012.292	
		Koprasi BBP	4.505.667	9.011.333	
		Koprasi BBP (Fitness Center)	9.313.333	14.901.333	
		Koprasi BBP (Kantin samping menza)	3.949.889	6.444.556	
		AYI cs	75.188	-	
		AYI cs	-	1.101.875	
		Rizalul Fauzi	3.958.333	5.208.333	
		Idin Bin Sobandi	73.458	-	
		Amuh	246.125	-	
		Bapak Uu	297.625	-	
		Ilm Abdul Rohim	246.125	-	
		Jajang Dani	157.250	-	
		PT. NDI	23.308.560	-	
		CV. MITRA	130.241.295	-	
		CV. BBS	47.270.583	62.601.583	
		KAMPUS PASCASARJANA	4.801.340.244	5.759.249.872	
		IPDN Kampus Sulsel (677024)	PT. BNI (PERSERO) Tbk.	-	7.790.292
		IPDN Kampus NTB (683084)	Koprasi Konsumen AP Mandalika	-	10.363.667
Total Setjen			6.454.964.676	7.717.137.930	
Itjen		Itjen (027203)	PT Bank Negara Indonesia	23.909.667	2.652.944
Total Itjen			23.909.667	2.652.944	
Ditjen Bina Pemdes		Ditjen Bina Pemdes (027753)	PT Bank Negara Indonesia	-	11.602.000
	PT Bank Mandiri		-	4.741.083	
	PT. Bank BRI		-	6.321.445	
Balai Besar PMD Malang (028830)	Koperasi RAS	-	6.153.000		
Total Ditjen Bina Pemdes			-	28.817.528	
Ditjen Bina Bangda	Ditjen Bina Bangda (039729)	PT Bank Negara Indonesia	38.958.667	-	
		PT. Bank Mandiri	10.000.000	25.000.000	
		PT. Bank BRI	11.250.000	26.250.000	
		Sewa Gedung Serbaguna	198.906.000	241.080.000	
		Sewa Koperasi PM	52.848.667	-	
Total Ditjen Bina Bangda			311.963.334	292.330.000	
Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil (634082)	Voucher Jasa Layanan Kependudukan	327.829.555.000	151.974.364.000	
Total Ditjen Dukcapil			327.829.555.000	151.974.364.000	
BPSDM	Kantor Pusat (403231)	PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk.	40.036.806	1.256.278	
		Koperasi PP-I Kemendagri	45.529.000	-	
		PT. Bank BRI (PERSERO) Tbk.	261.743.000	126.525.000	
		Said Fahrizal (Fotocopy)	15.002.500	-	
		PT. MSD	461.711.000	95.365.000	
	Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III (027114)	BPD DIY	26.819.683	37.917.483	
		KPN MELATI	6.065.078	6.065.078	
		Balai PK Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan (506138)	PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk.	8.277.333	24.832.000
Total BPSDM			865.184.400	291.960.839	
Total Keseluruhan			335.485.577.077	160.307.263.241	



LAMPIRAN XXVIII

RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

LAMPIRAN XXVIII

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
1	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	06-AUG-18	A01251	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	55.362.000	55.362.000
2	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	06-AUG-18	A01251	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.407.577	(51.407.577)
3	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	06-AUG-18	A01252	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	55.362.000	55.362.000
4	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	06-AUG-18	A01252	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.407.577	(51.407.577)
5	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	21-DEC-20	A08251	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	766.503.000	766.503.000
6	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	28-Mar-24	A01251	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	139.092.480	(139.092.480)
7	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	28-Mar-24	A01251	100	Saldo Awal	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	6.954.624.000	6.954.624.000
8	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	23-Jun-25	B21251	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	8.268	8.268
9	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	23-Jun-25	B21252	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	188.676	188.676
10	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	23-Jun-25	B21253	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.011.139	1.011.139
11	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	23-Jun-25	B21254	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	39.652	39.652
12	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	23-Jun-25	B21255	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	770.000	770.000
13	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	23-Jun-25	B21256	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	154.221	154.221
14	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	05-Jul-25	B212513	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	84.102	84.102
15	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	29-Sep-25	B212524	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	605.772	605.772
16	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	27-Nov-25	B04252	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.024.060	(6.024.060)
17	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	05-AUG-25	B212510	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	97.777	97.777
18	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	05-AUG-25	B212511	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	519.916	519.916
19	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	05-AUG-25	B212512	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	124.769	124.769
20	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	05-AUG-25	B212514	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	69.038	69.038
21	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	05-AUG-25	B212515	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	592.751	592.751
22	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	05-AUG-25	B212516	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	646.910	646.910
23	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	05-AUG-25	B212517	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	98.734	98.734
24	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	05-AUG-25	B212518	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	177.468	177.468
25	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	05-AUG-25	B212519	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	452.493	452.493
26	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	05-AUG-25	B212520	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	505.544	505.544
27	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	05-AUG-25	B212521	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	495.061	495.061
28	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	05-AUG-25	B212522	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	654.921	654.921
29	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	05-AUG-25	B212523	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	560.569	560.569
30	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	05-AUG-25	B21258	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	582.134	582.134
31	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	05-AUG-25	B21259	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	74.423	74.423
32	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	29-OCT-25	B212525	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	453.179	453.179
33	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	01-Jan-24	A01252	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.946.295	1.946.295
34	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	01-Jan-24	A01252	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	389.260	(389.260)
35	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	25-Jan-24	A01251	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	23.355.600	23.355.600
36	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	25-Jan-24	A01251	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.671.120	(4.671.120)
37	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	25-Mar-24	A01254	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	8.374.500	8.374.500
38	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	25-Mar-24	A01254	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.674.900	(1.674.900)

hu f

RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

LAMPIRAN XXVIII

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
39	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	05-Nov-25	B04251	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	134112	Irigasi	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	184.293.560	184.293.560
40	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	05-Nov-25	B04251	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	156.649.526	(156.649.526)
41	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	05-Nov-25	B04252	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	130.897.350	130.897.350
42	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	05-Nov-25	B04252	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.566.186	(4.566.186)
43	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	05-Nov-25	B04253	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	199.715.078	199.715.078
44	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	05-Nov-25	B04253	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.205.657	(31.205.657)
45	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	05-Nov-25	B04254	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	25.617.000	25.617.000
46	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	05-Nov-25	B04254	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.803.188	(4.803.188)
47	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	14-MAY-24	A01253	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	11.500.000	11.500.000
48	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	14-MAY-24	A01253	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.875.000	(2.875.000)
49	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022524	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	5.478.856	5.478.856
50	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022524	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	4.383.085	(4.383.085)
51	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022529	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	17.270.798	17.270.798
52	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022529	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	13.816.637	(13.816.637)
53	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022530	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	7.205.000	7.205.000
54	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022530	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	5.764.000	(5.764.000)
55	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022542	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3.212.910	3.212.910
56	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022542	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	2.570.328	(2.570.328)
57	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022543	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	7.880.083	7.880.083
58	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022543	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	6.304.069	(6.304.069)
59	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022546	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	9.736.089	9.736.089
60	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022546	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	7.788.871	(7.788.871)
61	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022554	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4.483.726	4.483.726
62	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022554	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3.586.981	(3.586.981)
63	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022559	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4.099.406	4.099.406
64	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022559	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3.279.525	(3.279.525)
65	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022564	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.331.537	2.331.537
66	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022564	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.865.230	(1.865.230)
67	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022578	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	10.020.080	10.020.080
68	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022578	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	5.010.040	(5.010.040)
69	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022579	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	10.020.080	10.020.080
70	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022579	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	5.010.040	(5.010.040)
71	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022580	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4.887.004	4.887.004

RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

LAMPIRAN XXVIII

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
72	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022580	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.954.800	(1.954.800)
73	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022581	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	40.020.450	40.020.450
74	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022581	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	16.008.180	(16.008.180)
75	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022582	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	16.008.182	16.008.182
76	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022582	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	6.403.274	(6.403.274)
77	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022583	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	8.004.091	8.004.091
78	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-25	J022583	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3.201.637	(3.201.637)
79	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	05-AUG-25	B21251	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	358.068	358.068
80	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	10-Jan-00			425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	14.017.928	14.017.928
81	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21251	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.262.000	(1.262.000)
82	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21251	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	252.400	252.400
83	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21252	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	578	(578)
84	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21252	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	116	116
85	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21253	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	2.497.500	(2.497.500)
86	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21253	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	312.188	312.188
87	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21254	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.350.000	(1.350.000)
88	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21254	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	135.000	135.000
89	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21255	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.692.750	(1.692.750)
90	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21255	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	423.188	423.188
91	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21256	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.692.750	(1.692.750)
92	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21256	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	423.188	423.188
93	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21257	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	5.994.000	(5.994.000)
94	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21257	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.198.800	1.198.800
95	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21258	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	705.350	(705.350)
96	1005	27753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	30-Jun-25	B21258	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	9.405	9.405
97	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	03-Nov-25	B212523	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	97.984	97.984
98	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	03-Nov-25	B212524	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	97.984	97.984
99	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	03-Nov-25	B212525	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	97.984	97.984
100	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	03-Nov-25	B212526	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	97.984	97.984
101	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	03-Nov-25	B212527	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	97.984	97.984
102	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	03-Nov-25	B212529	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	86.712	86.712
103	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	03-Nov-25	B212530	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	86.712	86.712
104	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	03-Nov-25	B212531	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	86.712	86.712
105	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	03-Nov-25	B212532	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	86.712	86.712
106	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	03-Nov-25	B212533	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	86.712	86.712
107	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	03-Nov-25	B212534	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.613.457	1.613.457
108	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	03-Nov-25	B212535	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	84.977.478	84.977.478
109	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	03-Nov-25	B212536	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	247.748	247.748
110	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	03-Nov-25	B212537	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	247.748	247.748
111	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	03-Nov-25	B212538	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	247.748	247.748

RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

LAMPIRAN XXVIII

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
112	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	03-Nov-25	B212539	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	247.748	247.748
113	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	03-Nov-25	B212540	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	247.748	247.748
114	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	03-Nov-25	B212541	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	98.108	98.108
115	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	31-DEC-25	B212542	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	18.000.000	18.000.000
116	1008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	31-DEC-25	B212543	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	18.000.000	18.000.000
117	1012	403216	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	KD	30-Jun-25	B21251	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	170.653	170.653
118	1012	403216	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	KD	30-Jun-25	B21252	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	159.523	159.523
TOTAL														8.162.579.756



LAMPIRAN XXIX

RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK

RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih	Selisih Absolut	Selisih Neto
1	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	131111	Tanah	84.455.622.000	'01001	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	84.455.622.000	-	-	-
2	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	132111	Peralatan dan Mesin	18.654.900	'01004	'027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	18.654.900	-	-	-
3	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(18.654.900)	'01004	'027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	(18.654.900)	-	-	-
4	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	636.480.000	'01005	'027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	636.480.000	-	-	-
5	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	132111	Peralatan dan Mesin	18.654.900	'01006	'039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	18.654.900	-	-	-
6	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(18.654.900)	'01006	'039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(18.654.900)	-	-	-
7	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	'01007	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	10.000.000	-	-	-
8	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	'01007	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(10.000.000)	-	-	-
9	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	135121	Aset Tetap Lainnya	1.601.900	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	1.601.900	-	-	-
10	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	131111	Tanah	35.098.225.956	'01008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35.098.225.956	-	-	-
11	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	133111	Gedung dan Bangunan	125.169.000	'01008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	125.169.000	-	-	-
12	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(44.932.463)	'01008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(44.932.463)	-	-	-
13	'01003	'027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	133111	Gedung dan Bangunan	-	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	642.024.528	(642.024.528)	642.024.528	-
14	'01003	'027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	135111	Aset Tetap Renovasi	642.024.528	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	-	642.024.528	642.024.528	-
15	'01012	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	134113	Jaringan	546.531.335	'01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	546.531.335	-	-	-
16	'01012	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(154.415.594)	'01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	(154.415.594)	-	-	-
17	'02404	258462	RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. TADJUDIN CHALID MAKASSAR	131111	Tanah	7.691.127.290	'01001	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	7.691.127.290	-	-	7.691.127.290
18	'05701	531535	PERPUSTAKAAN NASIONAL RI JAKARTA	132111	Peralatan dan Mesin	190.544.310	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	190.544.310	-	-	190.544.310
19	'05701	531535	PERPUSTAKAAN NASIONAL RI JAKARTA	135121	Aset Tetap Lainnya	40.774.060	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	40.774.060	-	-	40.774.060
20	'05701	531535	PERPUSTAKAAN NASIONAL RI JAKARTA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(85.378.027)	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	(85.378.027)	-	-	(85.378.027)
21	'05904	664262	DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA	162151	Software	1.877.912.555	'01001	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	1.877.912.555	-	-	1.877.912.555
22	'05904	664262	DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1.578.735.442)	'01001	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	(1.578.735.442)	-	-	(1.578.735.442)
23	'05904	664262	DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA	162151	Software	2.724.816.410	'01004	'027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	2.724.816.410	-	-	2.724.816.410
24	'05904	664262	DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(2.384.214.360)	'01004	'027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	(2.384.214.360)	-	-	(2.384.214.360)
25	11501	500100	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	162151	Software	296.560.000	'01001	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	296.560.000	-	-	296.560.000
26	11501	500100	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(296.560.000)	'01001	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	(296.560.000)	-	-	(296.560.000)
TOTAL						129.783.153.458	TOTAL			129.783.153.458	-	1.284.049.056	8.476.846.796



LAMPIRAN XXX

**RINCIAN DESA YANG BELUM
LENGKAP BUKTI
PERTANGGUNGJAWABANNYA
PER 31 DESEMBER 2025**

LAMPIRAN XXX

RINCIAN DESA YANG BELUM LENGKAP BUKTI PERTANGGUNGJAWABANNYA PER 31 DESEMBER 2025

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JUMLAH BANTUAN	KETERANGAN	LPJ	BAST	NOTA	BUKTI PAJAK	FOTO	KET DOKUMEN	NOMOR SK
1	Lampung	Pesawaran	Punduh Pedada	Pagar Jaya	50.000.000	Berkas LPJ sudah dikirim dan ada resi pengirimannya namun berkas tidak sampai dikarenakan salah nama sehingga diminta untuk dikirimkan ulang.	v	v	v	-	-	Kurang bukti pajak dan foto	SK PPK No. 140-257-Tahun 2019
2	Lampung	Pesawaran	Punduh Pedada	Pulau Legundi	50.000.000	Berkas LPJ sudah dikirim dan ada resi pengirimannya namun berkas tidak sampai dikarenakan salah nama sehingga diminta untuk dikirimkan ulang.	v	v	v	v	-	Kurang bukti pajak	SK PPK No. 140-255-Tahun 2019
3	Papua	Supiori	Supiori Utara	Mbrurwandi	50.000.000	Berkas sudah diterima berupa soft file, info dr bnpp bukti pajaknya tidak ada.	v	v	v	-	v	Kurang bukti pajak	SK PPK No. 410-788-Tahun 2019
4	Papua	Merauke	Naukenjerai	Kuler	50.000.000	Berkas berupa softfile.	-	-	v	-	v	Kurang LPJ, BAST dan bukti pajak	SK PPK No. 410-1001-Tahun 2019
5	Papua	Merauke	Naukenjerai	Tomer	50.000.000	Berkas berupa softfile.	v	v	v	-	-	Kurang bukti pajak dan foto	SK PPK No. 410-1001-Tahun 2019



LAMPIRAN XXXI

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT UNTUK PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
DITJEN BINA ADWIL											
1	01004	080054	TP	DINAS PRASJAL DAN TARUKIM PROPINSI SUMATERA BARAT	1.809.502.117	-	-	-	-	1.809.502.117	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
2	01004	130017	TP	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT (TP)	1.575.601.236	1.629.744.712	(1.629.744.712)	-	-	1.575.601.236	INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL
											RAK KAYU
											TELEVISI
											PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA LAINNYA
3	01004	170420	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE	-	795.460.000	(795.460.000)	-	-	-	SEPEDA MOTOR
											PERAHU PENUMPANG
											UNIT TRANCEIVER SSB PORTABLE
											P.C UNIT
											PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
4	01004	170520	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN TALAUD	-	18.000.000	(18.000.000)	-	-	-	SEPEDA MOTOR
5	01004	240149	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KUPANG	2.837.269.543	248.875.000	(248.875.000)	-	-	2.837.269.543	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
											GEDUNG POS JAGA PERMANEN
											RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A SEMI PERMANEN
											RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE B PERMANEN
											BANGUNAN DERMAGA
											SEPEDA MOTOR
											UNIT TRANCEIVER SsB PORTABLE
											P.C UNIT
											PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
6	01004	240260	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. B E L U	291.825.605	174.900.000	(174.900.000)	-	-	291.825.605	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
											MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)
7	01004	240342	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA	762.374.061	175.000.000	(175.000.000)	-	-	762.374.061	GEDUNG POS JAGA PERMANEN
											RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE B PERMANEN
											TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI NEGARA
											MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)
8	01004	240351	TP	BAPPEDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	367.994.675	-	-	-	-	367.994.675	GEDUNG POS JAGA PERMANEN
9	01004	250026	TP	BADAN PERBATASAN KERJASAMA DAERAH PROVINSI PAPUA (TP)	567.007.449	1.074.129.737	(1.074.129.737)	-	-	567.007.449	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) LAINNYA
											TELEVISI
											HANDY TALKY (HT)
											ALAT KOMUNIKASI RASIO SsB LAINNYA
											STELATH DIGITAL REPEATER
											RADIO LINK
											PORTABLE REPORTER LINK
											PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA LAINNYA
											SWITCHER/MENARA ANTENA LAINNYA
											PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF
											STATIONARY
											UNINTERUPTED POWER SUPPLY (UPS)
10	01004	251514	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOVEN DIGOEL	197.937.405	-	-	-	-	197.937.405	GEDUNG POS JAGA PERMANEN
											BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA LAINNYA
11	01004	251907	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	3.917.569.440	-	-	-	-	3.917.569.440	BANGUNAN GEDUNG KANTOR SEMI PERMANEN

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
						-	-	-	-	-	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
12	01004	255161	TP	BADAN PENGELOLA PERBATASAN KOTA JAYAPURA	797.747.050	-	-	-	-	797.747.050	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
DITJEN BINA PEMDES											
13	01005	239250	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LOMBOK TENGAH	144.164.028	-	-	-	-	144.164.028	P.C UNIT
14	01005	029367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUKABUMI	-	9.775.000	(9.775.000)	-	-	-	P.C UNIT
15	01005	029376	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BEKASI	499.000	9.800.000	(9.800.000)	-	-	499.000	P.C UNIT
											PENJEPIT KERTAS
											ORDNER DAN MAP
											KERTAS HVS
16	01005	029436	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TASIKMALAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
17	01005	029472	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAJALENGKA	-	10.120.000	(10.120.000)	-	-	-	P.C UNIT
18	01005	039438	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SEMARANG	170.461.250	-	-	-	-	170.461.250	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
19	01005	039438	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SEMARANG	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
20	01005	039443	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KENDAL	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
21	01005	039452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DEMAK	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
22	01005	039465	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PEKALONGAN	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
23	01005	039470	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BATANG	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
24	01005	039480	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TEGAL	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
25	01005	039490	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PATI	161.028.000	-	-	-	-	161.028.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
26	01005	039490	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PATI	-	10.125.000	(10.125.000)	-	-	-	P.C UNIT
27	01005	039500	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUDUS	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
28	01005	039504	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PEMALANG	-	10.145.000	(10.145.000)	-	-	-	P.C UNIT
29	01005	039514	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. REMBANG	164.716.820	-	-	-	-	164.716.820	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
30	01005	039514	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. REMBANG	-	10.147.500	(10.147.500)	-	-	-	P.C UNIT
31	01005	039519	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BLORA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
32	01005	039530	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas	37.850	9.900.000	(9.900.000)	-	-	37.850	P.C UNIT
											KERTAS HVS
33	01005	039538	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. CILACAP	79.444.800	-	-	-	-	79.444.800	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
34	01005	039538	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. CILACAP	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
35	01005	039546	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA	82.910.360	-	-	-	-	82.910.360	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
36	01005	039546	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
37	01005	039554	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANJARNEGARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
38	01005	039562	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAGELANG	-	9.320.000	(9.320.000)	-	-	-	P.C UNIT
39	01005	039568	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TEMANGGUNG	-	9.665.000	(9.665.000)	-	-	-	P.C UNIT
40	01005	039579	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. WONOSOBO	-	9.923.500	(9.923.500)	-	-	-	P.C UNIT
41	01005	039599	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
42	01005	039605	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KLATEN	74.629.350	-	-	-	-	74.629.350	PASAR DESA
43	01005	039605	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KLATEN	-	9.850.000	(9.850.000)	-	-	-	P.C UNIT
44	01005	039612	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali	-	9.700.000	(9.700.000)	-	-	-	P.C UNIT
45	01005	039621	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SRAGEN	302.500	-	-	-	-	302.500	BUKU TULIS ORDNER DAN MAP ALAT TULIS KANTOR LAINNYA KERTAS HVS
46	01005	039639	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. WONOGIRI	134.000	10.065.000	(10.065.000)	-	-	134.000	P.C UNIT KERTAS HVS
47	01005	049147	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTUL	417.809.252	-	-	-	-	417.809.252	KANTOR DESA/PASAR DESA
48	01005	049147	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTUL	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
49	01005	049173	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA PEREMPUAN & KB KAB. KULONPROGO	-	10.140.000	(10.140.000)	-	-	-	P.C UNIT
50	01005	059456	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. GRESIK	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
51	01005	059464	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MOJOKERTO	82.641.440	-	-	-	-	82.641.440	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
52	01005	059464	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MOJOKERTO	-	10.162.900	(10.162.900)	-	-	-	P.C UNIT
53	01005	059478	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. JOMBANG	-	10.105.000	(10.105.000)	-	-	-	P.C UNIT
54	01005	059491	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. JOMBANG	160.704.000	-	-	-	-	160.704.000	KANTOR DESA
55	01005	059498	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB KAB. SUMENEP	-	9.750.000	(9.750.000)	-	-	-	P.C UNIT
56	01005	059527	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA KAB. BANYUWANGI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
57	01005	059560	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LUMAJANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
58	01005	059586	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGANJUK	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
59	01005	059613	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MADIUN	165.438.090	-	-	-	-	165.438.090	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
60	01005	059620	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGAWI	81.331.700	-	-	-	-	81.331.700	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
61	01005	059620	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGAWI	-	9.915.000	(9.915.000)	-	-	-	P.C UNIT
62	01005	059623	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. MAGETAN	829.360.823	-	-	-	-	829.360.823	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
63	01005	059623	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. MAGETAN	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
64	01005	059630	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. PONOROGO	172.474.830	-	-	-	-	172.474.830	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
65	01005	059652	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB KAB. TUBAN	-	9.780.000	(9.780.000)	-	-	-	P.C UNIT
66	01005	059661	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LAMONGAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
67	01005	069280	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BESAR	80.776.430	-	-	-	-	80.776.430	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
68	01005	069280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BESAR	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
69	01005	069284	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. PIDIE	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
70	01005	069290	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH UTARA	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
71	01005	069303	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH SELATAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
72	01005	069309	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BARAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
73	01005	069321	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. ACEH TENGGARA	-	10.100.000	(10.100.000)	-	-	-	P.C UNIT
74	01005	069328	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SIMEULEU	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
75	01005	069334	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH SINGKIL	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
76	01005	069345	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KAB. ACEH BARAT DAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
77	01005	069352	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. GAYO LUES	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
78	01005	069356	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA GAMpong KAB. ACEH JAYA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
79	01005	069358	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. NAGAN RAYA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
80	01005	069362	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. ACEH TAMIANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
81	01005	069367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN PEREMPUAN KAB. BENER MERIAH	75.000	10.000.000	(10.000.000)	-	-	75.000	P.C UNIT
82	01005	069371	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. PIDIE JAYA	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	KERTAS HVS
83	01005	079353	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KARO	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
84	01005	079359	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KELURAHAN KAB. LANGKAT	82.165.850	-	-	-	-	82.165.850	PASAR DESA
85	01005	079359	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KELURAHAN KAB. LANGKAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
86	01005	079369	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEREMPUAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH	83.000.000	-	-	-	-	83.000.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
87	01005	079369	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEREMPUAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH	-	10.160.000	(10.160.000)	-	-	-	P.C UNIT
88	01005	079376	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH NAGORI KAB. SIMALUNGUN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
89	01005	079383	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN KAB. LABUHAN BATU	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
90	01005	079390	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DAIRI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
91	01005	079393	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. TAPANULI UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
92	01005	079395	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
93	01005	079413	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN KAB. NIAS	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
94	01005	079425	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN OTONOMI DESA (BPMPOD) KAB. SAMOSIR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
95	01005	079438	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANDAILING NATAL	165.751.000	-	-	-	-	165.751.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
96	01005	079438	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANDAILING NATAL	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
97	01005	079444	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PAK-PAK BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
98	01005	079447	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
99	01005	079450	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TOBA SAMOSIR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
100	01005	079457	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERDANG BEDAGAI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
101	01005	079459	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATUBARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
102	01005	079463	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PADANG LAWAS	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
103	01005	079471	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU SELATAN	-	9.436.000	(9.436.000)	-	-	-	P.C UNIT
104	01005	079473	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU UTARA	494.680.000	-	-	-	-	494.680.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
											BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
											GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
						-	-	-	-	-	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
105	01005	079473	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU UTARA	-	9.850.000	(9.850.000)	-	-	-	P.C UNIT
106	01005	089289	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LIMA PULUH KOTA	-	9.949.995	(9.949.995)	-	-	-	P.C UNIT
107	01005	089298	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SOLOK	-	9.965.000	(9.965.000)	-	-	-	P.C UNIT
108	01005	089305	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. PADANG PARIAMAN	162.530.600	-	-	-	-	162.530.600	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
109	01005	089305	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. PADANG PARIAMAN	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
110	01005	089313	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN NAGARI, KELUARGA BERENCANA & PEMEBRDAYAAN PEREMPUAN KAB. PESISIR SELATAN	-	10.155.000	(10.155.000)	-	-	-	P.C UNIT
111	01005	089319	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANAH DATAR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
112	01005	089338	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. DHARMAS RAYA	82.116.050	-	-	-	-	82.116.050	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
113	01005	089338	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. DHARMAS RAYA	-	9.850.000	(9.850.000)	-	-	-	P.C UNIT
114	01005	089345	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SOLOK SELATAN	-	10.015.000	(10.015.000)	-	-	-	P.C UNIT
115	01005	089356	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	-	10.015.000	(10.015.000)	-	-	-	P.C UNIT
116	01005	099452	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KAMPAR	161.747.080	-	-	-	-	161.747.080	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
117	01005	099452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KAMPAR	-	10.157.960	(10.157.960)	-	-	-	P.C UNIT
118	01005	099457	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKALIS	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
119	01005	099476	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. INDRAGIRI HILIR	157.805.820	-	-	-	-	157.805.820	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
120	01005	099476	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. INDRAGIRI HILIR	-	9.845.000	(9.845.000)	-	-	-	P.C UNIT
121	01005	099484	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PELALAWAN	164.489.400	-	-	-	-	164.489.400	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
122	01005	099484	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PELALAWAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
123	01005	099498	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ROKAN HULU	-	10.163.000	(10.163.000)	-	-	-	P.C UNIT
124	01005	099504	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIAK	159.489.000	-	-	-	-	159.489.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
125	01005	099504	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIAK	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
126	01005	099510	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUANTAN SINGINGI	78.282.280	-	-	-	-	78.282.280	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
127	01005	099510	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUANTAN SINGINGI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
128	01005	109222	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATANGHARI	152.031.100	-	-	-	-	152.031.100	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
											BANGUNAN PASAR IKAN HIGIENIS/PIH
129	01005	109222	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATANGHARI	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
130	01005	109234	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
131	01005	109238	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARO BUNGO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
132	01005	109247	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SAROLANGUN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
133	01005	109254	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KERINCI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
134	01005	109269	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
135	01005	109272	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TEBO	173.071.600	-	-	-	-	173.071.600	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
136	01005	109272	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TEBO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
137	01005	109280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARO JAMBI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
138	01005	119245	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. OGAN KOMERING ULU	-	10.015.000	(10.015.000)	-	-	-	P.C UNIT
139	01005	119252	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARA ENIM	72.658.200	-	-	-	-	72.658.200	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
140	01005	119252	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARA ENIM	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
141	01005	119265	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUSI RAWAS	170.000	10.165.000	(10.165.000)	-	-	170.000	P.C UNIT
142	01005	119274	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. OGAN KOMERING ILIR	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
143	01005	119288	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. OKU TIMUR	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
144	01005	119294	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. OKU SELATAN	171.565.320	-	-	-	-	171.565.320	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
145	01005	119294	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. OKU SELATAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
146	01005	119299	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. EMPAT LAWANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
147	01005	129235	DK	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG	71.678.000	-	-	-	-	71.678.000	ALAT TULIS ORDNER DAN MAP PENGGARIS ISI STAPLES BARANG CETAKAN KERTAS HVS BERBAGAI KERTAS CD/DVD BAHAN KOMPUTER LAINNYA
148	01005	129247	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG SELATAN	245.032.600	-	-	-	-	245.032.600	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
149	01005	129247	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG SELATAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
150	01005	129266	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN PEKON KAB. LAMPUNG BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
151	01005	129270	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN KELURAHAN KAB. TULANG BAWANG	82.087.000	-	-	-	-	82.087.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
152	01005	129270	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN KELURAHAN KAB. TULANG BAWANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
153	01005	129288	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
154	01005	129292	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. WAY KANAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
155	01005	129296	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PESAWARAN	233.945.280	-	-	-	-	233.945.280	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPRASI/PASAR LAINNYA
156	01005	129296	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PESAWARAN	-	9.965.000	(9.965.000)	-	-	-	P.C UNIT
157	01005	139250	DK	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALBAR	-	59.975.000	(59.975.000)	-	-	-	UPS (UNIT POWER SUPPLY) P.C UNIT LAPTOP PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
158	01005	139267	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SANGGAU	82.917.000	-	-	-	-	82.917.000	BANGUNAN INDUSTRI LAINNYA
159	01005	139267	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SANGGAU	754.500	10.165.000	(10.165.000)	-	-	754.500	P.C UNIT
											KERTAS HVS
160	01005	139274	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SINTANG	159.870.510	-	-	-	-	159.870.510	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
161	01005	139274	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SINTANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
162	01005	139285	TP	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PONTIANAK	75.558.620	-	-	-	-	75.558.620	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
163	01005	139285	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PONTIANAK	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
164	01005	139295	UB	BADAN PEMBERDAYAAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAPUAS HULU	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
165	01005	139313	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKAYANG	163.443.600	-	-	-	-	163.443.600	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
166	01005	139313	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKAYANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
167	01005	139325	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MELAWI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
168	01005	139328	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT KESATUAN BANGSA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SEKADAU	-	9.965.000	(9.965.000)	-	-	-	P.C UNIT
169	01005	139330	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAYONG UTARA	-	10.015.000	(10.015.000)	-	-	-	P.C UNIT
170	01005	149235	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.BARITO UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
171	01005	149242	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.BARITO SELATAN	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
172	01005	149257	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.KOTAWARINGIN BARAT	80.750.451	-	-	-	-	80.750.451	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
173	01005	149257	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.KOTAWARINGIN BARAT	-	9.880.000	(9.880.000)	-	-	-	P.C UNIT
174	01005	149267	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.SERUYAN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
175	01005	149270	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SUKAMARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
176	01005	149278	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN GUNUNG MAS	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
177	01005	149285	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PULANG PISAU	-	9.750.000	(9.750.000)	-	-	-	P.C UNIT
178	01005	159202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANJAR	225.500	9.790.000	(9.790.000)	-	-	225.500	P.C UNIT
											KERTAS HVS
179	01005	159214	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TAPIN	1.470.850	10.165.000	(10.165.000)	-	-	1.470.850	P.C UNIT
											KERTAS HVS
180	01005	159219	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
181	01005	159224	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HULU SUNGAI TENGAH	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
182	01005	159240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KOTA BARU	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
183	01005	159245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HULU SUNGAI UTARA	-	9.700.000	(9.700.000)	-	-	-	P.C UNIT
184	01005	159250	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TANAH BUMBU	82.709.500	-	-	-	-	82.709.500	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
185	01005	159255	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KB KAB. BALANGAN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
186	01005	169192	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PASER	-	9.999.900	(9.999.900)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
187	01005	169196	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BULUNGAN	-	10.035.000	(10.035.000)	-	-	-	P.C UNIT
188	01005	169202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. BERAU	-	9.850.000	(9.850.000)	-	-	-	P.C UNIT
189	01005	169206	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. NUNUKAN	140.722.920	-	-	-	-	140.722.920	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
190	01005	169206	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. NUNUKAN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
191	01005	169211	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. KUTAI BARAT	-	9.125.000	(9.125.000)	-	-	-	P.C UNIT
192	01005	169218	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PENAJAM PASER UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
193	01005	169223	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KUTAI KARTANEGARA	87.547.620	-	-	-	-	87.547.620	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPRASI/PASAR LAINNYA
											SALURAN DRAINASE
194	01005	169226	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TANA TIDUNG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
195	01005	179275	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. MINAHASA UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
196	01005	179280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. MINAHASA TENGGARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
197	01005	179283	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
198	01005	179296	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	468.985.950	-	-	-	-	468.985.950	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
199	01005	179296	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
200	01005	189223	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POSO	80.925.000	-	-	-	-	80.925.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
201	01005	189223	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POSO	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
202	01005	189229	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. DONGGALA	242.270.570	-	-	-	-	242.270.570	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
203	01005	189229	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. DONGGALA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
204	01005	189234	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TOLI-TOLI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
205	01005	189240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANGGAI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
206	01005	189243	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BUOL	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
207	01005	189249	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MOROWALI	162.000.000	-	-	-	-	162.000.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
208	01005	189249	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MOROWALI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
209	01005	189254	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANGGAI KEPULAUAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
210	01005	189260	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PARIGI MOUTONG	995.592.470	-	-	-	-	995.592.470	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
211	01005	189260	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PARIGI MOUTONG	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
212	01005	189271	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIGI	82.680.450	-	-	-	-	82.680.450	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR LAINNYA
213	01005	199398	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PINRANG	178.750	9.750.000	(9.750.000)	-	-	178.750	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
214	01005	199407	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. GOWA	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
215	01005	199415	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAJO	162.893.000	-	-	-	-	162.893.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
216	01005	199415	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAJO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
217	01005	199421	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BONE	83.000.000	-	-	-	-	83.000.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
218	01005	199421	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BONE	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
219	01005	199430	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN LEMBANG KAB. TANA TORAJA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
220	01005	199442	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAROS	149.400.000	-	-	-	-	149.400.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
221	01005	199442	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAROS	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
222	01005	199452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LUWU	55.000	10.165.000	(10.165.000)	-	-	55.000	P.C UNIT
223	01005	199488	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTAENG	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
224	01005	199499	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. JENEPONTO	265.000	10.165.000	(10.165.000)	-	-	265.000	P.C UNIT
225	01005	199508	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
226	01005	199515	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TAKALAR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
227	01005	199522	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BARRU	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
228	01005	199530	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIDENRENG RAPPANG	82.253.000	-	-	-	-	82.253.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
229	01005	199530	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIDENRENG RAPPANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
230	01005	199542	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
231	01005	199560	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ENREKANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
232	01005	199570	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara	840.500	10.115.000	(10.115.000)	-	-	840.500	P.C UNIT KERTAS HVS
233	01005	199574	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN DESA KAB. LUWU TIMUR	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
234	01005	199578	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TORAJA UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
235	01005	209209	UB	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BUTON	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
236	01005	209212	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUNA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
237	01005	209219	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KOLAKA	157.950.000	-	-	-	-	157.950.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
238	01005	209219	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KOLAKA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
239	01005	209227	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE SELATAN	82.975.930	-	-	-	-	82.975.930	BANGUNAN PASAR/RAISER IKAN HIAS
240	01005	209227	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE SELATAN	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
241	01005	209234	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAKATOBI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
242	01005	209239	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KOLAKA UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
243	01005	209244	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE	327.489.230	-	-	-	-	327.489.230	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR LAINNYA BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR LAINNYA
244	01005	209244	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
245	01005	209245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
246	01005	209250	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BUTON UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
247	01005	219188	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MALUKU TENGGARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
248	01005	219194	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
249	01005	219208	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KEPULAUAN ARU	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
250	01005	219214	UB	BAGIAN KESRA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA KAB. SERAM BAGIAN BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
251	01005	219217	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	173.238.430	-	-	-	-	173.238.430	BANGUN GEDUNG KANTOR PERMANEN
252	01005	219217	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
253	01005	219222	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BURU SELATAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
254	01005	229177	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BULELENG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
255	01005	229189	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, KB DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KLUNGKUNG	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
256	01005	229193	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. GIANJAR	-	7.160.000	(7.160.000)	-	-	-	P.C UNIT
257	01005	229223	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. TABANAN	418.821.685	-	-	-	-	418.821.685	PAS
258	01005	229223	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. TABANAN	-	9.800.000	(9.800.000)	-	-	-	P.C UNIT
259	01005	239244	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LOMBOK BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
260	01005	239250	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LOMBOK TENGAH	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
261	01005	239281	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. DOMPU	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
262	01005	239290	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUMBAWA BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
263	01005	239291	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LOMBOK UTARA	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
264	01005	249309	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. KUPANG	86.670.000	-	-	-	-	86.670.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
265	01005	249309	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. KUPANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
266	01005	249318	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BELU	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
267	01005	249325	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TIMOR TENGAH UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
268	01005	249335	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ALOR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
269	01005	249344	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SIKKA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
270	01005	249350	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. FLORES TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
271	01005	249357	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. ENDE	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
272	01005	249361	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. NGADA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
273	01005	249367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI	-	8.665.000	(8.665.000)	-	-	-	P.C UNIT
274	01005	249377	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SUMBA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
275	01005	249384	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA BARAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
276	01005	249390	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LEMBATA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
277	01005	249395	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. ROTE NDAO	165.422.652	-	-	-	-	165.422.652	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
278	01005	249399	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI BARAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
279	01005	249401	UB	BPMD,BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,PERLINDUNGAN ANAK,KB & KESBANG KAB. NAGEKEO	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
280	01005	249405	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA TENGAH	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
281	01005	249409	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA BARAT DAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
282	01005	249414	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
283	01005	259277	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. YAPEN WAROPEN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
284	01005	259291	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MERAUKE	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
285	01005	259305	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. PANIAI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
286	01005	259312	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. PUNCAK JAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
287	01005	259335	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. BOVEN DIGOEL	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
288	01005	259339	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. SARMI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
289	01005	259345	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. KEEROM	82.834.000	-	-	-	-	82.834.000	PASAR DESA
290	01005	259354	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MAMBERAMO RAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
291	01005	259359	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. WAROPEN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
292	01005	259363	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. YAHUKIMO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
293	01005	259369	UB	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMBERAMO TENGAH	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
294	01005	269204	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKULU UTARA	80.925.000	-	-	-	-	80.925.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
295	01005	269204	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKULU UTARA	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
296	01005	269214	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. BENGKULU SELATAN	78.112.130	-	-	-	-	78.112.130	P.C UNIT
297	01005	269214	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. BENGKULU SELATAN	-	9.970.000	(9.970.000)	-	-	-	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
298	01005	269224	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. REJANG	169.009.580	-	-	-	-	169.009.580	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
299	01005	269224	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. REJANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
300	01005	269227	UB	BADAN PMD, PEREMPUAN DAN KELUARGA BENCANA KAB. SELUMA	-	10.140.000	(10.140.000)	-	-	-	P.C UNIT
301	01005	269230	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
302	01005	269235	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. MUKO-MUKO	-	10.010.000	(10.010.000)	-	-	-	P.C UNIT
303	01005	269240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LEBONG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
304	01005	269245	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KEPAHANG	165.677.960	-	-	-	-	165.677.960	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
305	01005	269245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KEPAHANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
306	01005	289187	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TENGAH	80.925.000	-	-	-	-	80.925.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
307	01005	289187	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TENGAH	749.000	-	-	-	-	749.000	KERTAS HVS
308	01005	289190	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HALMAHERA UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
309	01005	289196	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA SELATAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
310	01005	289207	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
311	01005	289212	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
312	01005	290451	UB	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TANGERANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
313	01005	299452	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. SERANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
314	01005	299468	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANDEGLANG	638.050.190	-	-	-	-	638.050.190	KANTOR DESA/PASAR DESA
315	01005	299468	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANDEGLANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
316	01005	299477	TP	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. LEBAK	79.792.050	-	-	-	-	79.792.050	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
317	01005	299477	UB	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. LEBAK	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
318	01005	299483	TP	BADAN KETAHANAN PANGAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. TANGERANG	74.700.000	-	-	-	-	74.700.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
319	01005	299501	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG SELATAN	-	9.090.910	(9.090.910)	-	-	-	P.C UNIT
320	01005	309247	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BELITUNG TIMUR	162.597.000	-	-	-	-	162.597.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
321	01005	309247	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BELITUNG TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
322	01005	319176	UB	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. POHUWATO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
323	01005	329122	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , PEREMPUAN DAN KB KAB. BINTAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
324	01005	329137	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB.NATUNA	161.616.770	-	-	-	-	161.616.770	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
325	01005	329137	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB.NATUNA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
326	01005	329144	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LINGGA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
327	01005	329146	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KEP. ANAMBAS	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
328	01005	339176	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANOKWARI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
329	01005	339185	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SORONG	-	10.035.000	(10.035.000)	-	-	-	P.C UNIT
330	01005	339194	UB	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SORONG SELATAN	-	10.035.000	(10.035.000)	-	-	-	P.C UNIT
331	01005	339200	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. RAJA AMPAT	-	10.035.000	(10.035.000)	-	-	-	P.C UNIT
332	01005	339202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. TELUK BINTUNI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
333	01005	339210	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAIMANA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
334	01005	340170	DK	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI BARAT	-	78.930.200	(78.930.200)	-	-	-	P.C UNIT LAPTOP PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) PERALATAN PERSONAL KOMPUTER LAINNYA
335	01005	340244	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAMUJU	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
336	01005	340448	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POLEWALI MANDAR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
337	01005	340536	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAMASA	165.869.690	-	-	-	-	165.869.690	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
338	01005	340536	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAMASA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
DITJEN BINA BANGDA											
339	01006	052151	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB. BLITAR	1.877.956.850	-	-	-	-	1.877.956.850	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
340	01006	071519	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PAKPAK BARAT	1.595.071.168	-	-	249.500.000	(249.500.000)	1.595.071.168	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
341	1006	081021	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. DHARMAS RAYA (06)	1.229.483.605	-	-	193.634.400	(193.634.400)	1.229.483.605	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
342	01006	081219	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PASAMAN BARAT	2.473.039.371	-	-	370.670.000	(370.670.000)	2.473.039.371	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
343	01006	090256	TP	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB BENGKALIS	67.670.350	-	-	-	-	67.670.350	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KONTRAK PERENCANAAN)
344	01006	100729	TP	DINAS KIMPRASDA KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	1.222.663.310	-	-	239.766.400	(239.766.400)	1.222.663.310	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
345	01006	100930	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MUARO JAMBI	2.213.241.257	-	-	349.459.800	(349.459.800)	2.213.241.257	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
346	01006	140645	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KATINGAN (06)	3.171.799.345	-	-	335.790.000	(335.790.000)	3.171.799.345	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
347	01006	140727	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERUYAN	2.260.972.450	-	-	267.560.000	(267.560.000)	2.260.972.450	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
348	01006	140920	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LAMANDAU	1.869.300.944	-	-	298.000.000	(298.000.000)	1.869.300.944	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
349	01006	141019	TP	DINAS KIMPRASWIL KAB. GUNUNG MAS (06)	4.990.853.839	-	-	329.095.000	(329.095.000)	4.990.853.839	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
350	01006	141338	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BARITO TIMUR	2.851.322.966	-	-	448.853.000	(448.853.000)	2.851.322.966	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
351	01006	151126	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BALANGAN	1.246.208.645	-	-	153.659.600	(153.659.600)	1.246.208.645	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
352	01006	160626	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MALINAU	3.192.334.944	-	-	496.630.000	(496.630.000)	3.192.334.944	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
353	01006	160927	TP	DINAS KIMPRASWIL KAB. PENAJAM PASER UTARA	428.239.499	-	-	322.278.000	(322.278.000)	428.239.499	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
354	01006	180734	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN (06)	1.849.065.910	-	-	53.642.150	(53.642.150)	1.849.065.910	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
355	01006	180924	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TOJO UNA-UNA	1.095.340.500	-	-	-	-	1.095.340.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
356	01006	180925	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TOJO UNA-UNA (06)	1.419.376.840	-	-	172.341.800	(172.341.800)	1.419.376.840	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
357	01006	191426	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SELAYAR (06)	947.211.500	-	-	149.850.000	(149.850.000)	947.211.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
358	01006	191429	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SELAYAR	2.538.006.797	-	-	75.000.000	(75.000.000)	2.538.006.797	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
359	01006	192274	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LUWU UTARA	2.981.170.039	-	-	429.232.000	(429.232.000)	2.981.170.039	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
360	01006	200623	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOMBANA (06)	2.814.142.510	-	-	-	-	2.814.142.510	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
361	01006	200715	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. WAKATOBI (06)	1.888.382.030	-	-	239.551.500	(239.551.500)	1.888.382.030	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
362	01006	200816	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KOLAKA UTARA	2.241.171.436	-	-	324.751.850	(324.751.850)	2.241.171.436	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
363	01006	210156	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MALUKU TENGAH (06)	907.769.600	-	-	-	-	907.769.600	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
364	01006	210428	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PULAU BURU (06)	1.425.853.520	-	-	-	-	1.425.853.520	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
365	01006	210726	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	403.454.789	-	-	-	-	403.454.789	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
366	01006	210727	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR (06)	1.404.555.405	-	-	-	-	1.404.555.405	RUMAH NEGARA GOL.II TIPE A PERMANEN
367	01006	215128	TP	SEKRETARIAT DAERAH KOTA AMBON	446.822.000	-	-	-	-	446.822.000	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI
368	01006	240553	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. A L O R	233.085.375	-	-	-	-	233.085.375	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
369	01006	250936	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANIAI	1.638.600.005	-	-	234.500.000	(234.500.000)	1.638.600.005	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
370	01006	251128	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA	1.609.527.750	-	-	249.306.000	(249.306.000)	1.609.527.750	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
371	01006	251129	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA (06)	2.474.045.920	-	-	378.641.000	(378.641.000)	2.474.045.920	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
372	01006	251514	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOVEN DIGOEL	213.186.750	-	-	-	-	213.186.750	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
373	01006	251516	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOVEN DIGOEL	3.791.009.500	-	-	538.600.000	(538.600.000)	3.791.009.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
374	01006	251607	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SARMI (06)	3.573.969.688	-	-	469.761.000	(469.761.000)	3.573.969.688	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
375	01006	251717	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEEROM	2.636.985.383	-	-	405.882.950	(405.882.950)	2.636.985.383	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
376	01006	251721	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEEROM	264.262.500	-	-	-	-	264.262.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
377	01006	251812	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TOLIKARA	2.280.065.006	-	-	224.100.000	(224.100.000)	2.280.065.006	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
378	01006	251918	TP	BADAN PERBATASAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	5.357.304.290	-	-	703.999.885	(703.999.885)	5.357.304.290	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
379	01006	252318	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. WAROPEN	1.700.989.900	-	-	-	-	1.700.989.900	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN PERMANEN
380	01006	260830	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEPAHIANG	2.530.783.703	-	-	398.350.000	(398.350.000)	2.530.783.703	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
381	01006	265156	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BENGKULU	533.109.500	-	-	49.925.000	(49.925.000)	533.109.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
382	01006	280076	TP	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA (06)	5.774.912.835	-	-	-	-	5.774.912.835	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
383	01006	280253	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	1.039.440.340	-	-	-	-	1.039.440.340	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
384	01006	280322	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA	1.051.489.810	-	-	-	-	1.051.489.810	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
385	01006	280417	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. HALMAHERA SELATAN	3.241.547.215	-	-	698.997.544	(698.997.544)	3.241.547.215	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
386	01006	280424	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	1.061.420.000	-	-	-	-	1.061.420.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
387	01006	280525	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA	1.062.666.110	-	-	-	-	1.062.666.110	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
388	01006	280621	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	1.626.293.274	-	-	-	-	1.626.293.274	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
389	01006	280723	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT	1.398.942.800	-	-	-	-	1.398.942.800	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
390	01006	285125	TP	SEKRETARIAT DAERAH KOTA TERNATE	331.568.877	-	-	-	-	331.568.877	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
391	01006	310224	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOALEMO	2.523.955.206	-	-	396.261.000	(396.261.000)	2.523.955.206	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
392	01006	310321	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. POHUWATO	2.541.268.140	-	-	399.585.000	(399.585.000)	2.541.268.140	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
393	01006	330620	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK BINTUNI (06)	2.170.532.366	-	-	348.786.000	(348.786.000)	2.170.532.366	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
394	01006	330721	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK WONDAMA	2.256.803.760	-	-	329.500.000	(329.500.000)	2.256.803.760	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
395	01006	436044	TP	KPU KABUPATEN TANAH LAUT / POLEWALI MANDAR	2.757.039.900	-	-	-	-	2.757.039.900	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
396	01006	436096	TP	KAB SERAM BAGIAN TIMUR	1.519.500.000	-	-	-	-	1.519.500.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
397	01006	436122	TP	KAB HALMAHERA TENGAH	1.380.000.000	-	-	-	-	1.380.000.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
DITJEN OTDA											
398	01007	060082	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.088.228.700	10.000.000	(10.000.000)	-	-	1.088.228.700	HARD DISK
399	01007	070244	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO	-	-	-	2.076.889.018	(2.076.889.018)	-	HASIL KAJIAN/PENELITIAN
400	01007	075133	TP	BAPPEDA KOTA MEDAN	-	-	-	2.825.836.000	(2.825.836.000)	-	SOFTWARE KOMPUTER
											RAK-RAK PENYIMPANAN
											FILING CABINET BESI
											LCD PROJECTOR/INFOCUS
											KURSI DORONG
											MEJA KERJA (ALAT LABORATORIUM LAINNYA)
											P.C UNIT
											NOTE BOOK
											HARD DISK
											PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
											SOFTWARE KOMPUTER
401	01007	110097	DK	BAPPEDA PROP. SUMATERA SELATAN	-	-	-	624.800.000	(624.800.000)	-	SOFTWARE KOMPUTER
402	01007	120730	TP	BAPPEDA KAB. LAMPUNG TIMUR	-	-	-	1.438.332.000	(1.438.332.000)	-	LEMARI PENYIMPANAN
											RAK BESI
											FILING CABINET BESI
											LCD PROJECTOR/INFOCUS
											MEJA KERJA BESI/METAL
											KURSI BESI/METAL
											KURSI KAYU
											WIRELESS
											P.C UNIT
											HARD DISK
											PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
											SERVER
											PERALATAN JARINGAN LAINNYA
											SOFTWARE KOMPUTER
403	01007	190223	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA	-	1.480.000.000	(1.480.000.000)	-	-	-	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI
404	01007	205205	TP	SEKDA KOTA BAU-BAU	-	-	-	2.494.545.455	(2.494.545.455)	-	SOFTWARE KOMPUTER
405	01007	234007	DK	BAPPEDA PROP. NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	1.652.400.000	(1.652.400.000)	-	SOFTWARE KOMPUTER
406	01007	290355	TP	DINAS BINA MARGA KAB. LEBAK	-	16.742.666.277	(16.742.666.277)	-	-	-	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI
407	01007	080444	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SOLOK	-	9.980.125.000	(9.980.125.000)	-	-	-	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI
TOTAL					140.443.817.364	34.982.092.591	(34.982.092.591)	22.438.263.352	(22.438.263.352)	140.443.817.364	



LAMPIRAN XXXII

REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025

**REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

No	BAESI	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Keterangan
1	'01008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BAST KONTRAKTUAL	'000.4/14753/PIAK	19-11-2025	522191	Belanja Jasa Lainnya	Pengadaan Lisensi ABIS	1010501007	1.000.000	3.000	3.000.000.000	'259991320762931	Kesalahan Penganggaran yang berasal dari transaksi pembelian Persediaan berupa Lisensi ABIS yang menggunakan akun belanja 522191
2	'01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	BAST NONKONTRAKTUAL	'00038/UP_TUP/662766/2025	17-09-2025	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembayaran biaya pengadaan kebutuhan peralatan rumah tangga perkantoran berupa sendok dan garpu tanggal 12 September 2025	1010305009	1	391.175	391.175	'259991310688115	Kesalahan Penganggaran yang berasal dari transaksi pembelian Persediaan berupa peralatan rumah tangga perkantoran yang menggunakan akun belanja 521252
3	'01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	BAST NONKONTRAKTUAL	'00048/UP_TUP/662766/2025	22-10-2025	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembayaran Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 9 Oktober 2025	1010305009	6	462.500	2.775.000	'259991310974901	
4	'01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	BAST NONKONTRAKTUAL	'00048/UP_TUP/662766/2025	22-10-2025	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembayaran Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 9 Oktober 2025	1010305009	8	213.000	1.704.000	'259991310974901	
5	'01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	BAST NONKONTRAKTUAL	'00048/UP_TUP/662766/2025	22-10-2025	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembayaran Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 9 Oktober 2025	1010305009	6	163.500	981.000	'259991310974901	
6	'01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	BAST NONKONTRAKTUAL	'00048/UP_TUP/662766/2025	22-10-2025	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembayaran Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 9 Oktober 2025	1010305999	8	165.000	1.320.000	'259991310974901	
7	'01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	BAST NONKONTRAKTUAL	'00048/UP_TUP/662766/2025	22-10-2025	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembayaran Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 9 Oktober 2025	1010305004	6	180.000	1.080.000	'259991310974901	
8	'01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	BAST NONKONTRAKTUAL	'00048/UP_TUP/662766/2025	22-10-2025	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembayaran Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 9 Oktober 2025	1010305009	5	104.300	521.500	'259991310974901	
9	'01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	BAST NONKONTRAKTUAL	'00048/UP_TUP/662766/2025	22-10-2025	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembayaran Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 9 Oktober 2025	1010305009	3	273.700	821.100	'259991310974901	
10	'01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	BAST NONKONTRAKTUAL	'00048/UP_TUP/662766/2025	22-10-2025	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembayaran Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 9 Oktober 2025	1010305001	8	73.000	584.000	'259991310974901	
11	'01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	BAST NONKONTRAKTUAL	'00048/UP_TUP/662766/2025	22-10-2025	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembayaran Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 9 Oktober 2025	1010305002	6	67.000	402.000	'259991310974901	
12	'01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	BAST NONKONTRAKTUAL	'00048/UP_TUP/662766/2025	22-10-2025	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembayaran Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 9 Oktober 2025	1010305999	5	85.500	427.500	'259991310974901	
13	'01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	BAST NONKONTRAKTUAL	'00048/UP_TUP/662766/2025	22-10-2025	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembayaran Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 9 Oktober 2025	1010305009	10	116.000	1.160.000	'259991310974901	
14	'01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	BAST NONKONTRAKTUAL	'00048/UP_TUP/662766/2025	22-10-2025	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembayaran Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 9 Oktober 2025	1010305999	6	588.000	3.528.000	'259991310974901	
15	'01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	BAST NONKONTRAKTUAL	'00048/UP_TUP/662766/2025	22-10-2025	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembayaran Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 9 Oktober 2025	1010305009	5	76.000	380.000	'259991310974901	
16	'01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	BAST NONKONTRAKTUAL	'00048/UP_TUP/662766/2025	22-10-2025	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembayaran Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 9 Oktober 2025	1010305009	12	37.000	444.000	'259991310974901	



LAMPIRAN XXXIII

REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025

**REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

NO	BAES1	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Keterangan
1	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST NONKONTRAKTUAL	000.4/5439/Pusdat in/2025	10-09-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Pusat Data dan DRC	8010101002	44	264.500.000	11.638.000.000	259991310705892	Kesalahan menggunakan Akun Anggaran seharusnya menggunakan akun 536111 (Belanja Modal Lainnya)
2	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST NONKONTRAKTUAL	000.4/5439/Pusdat in/2025	10-09-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Pusat Data dan DRC	8010101002	10	95.999.999	959.999.990	259991310705892	
3	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST KONTRAKTUAL	000.4/7894/Pusdat in/2025	16-12-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Perangkat Operator Video Conference	8010101002	1	2.608.500	2.608.500	259991320870870	
4	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST NONKONTRAKTUAL	000.4/5576/Pusdat in/2025	12-09-2025	536111	Belanja Modal Lainnya	Pengadaan API Gateway SIPD	3100204024	1	60.000.000	60.000.000	259991320450070	Kesalahan menggunakan Akun Anggaran seharusnya menggunakan akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin)
5	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST NONKONTRAKTUAL	000.4/5576/Pusdat in/2025	12-09-2025	536111	Belanja Modal Lainnya	Pengadaan API Gateway SIPD	3100204001	1	170.000.000	170.000.000	259991320450070	
6	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST KONTRAKTUAL	000.4/7257/Pusdat in/2025	20-11-2025	536111	Belanja Modal Lainnya	Visualisasi Data Center	3100102002	2	31.080.000	62.160.000	259991311293040	
7	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST KONTRAKTUAL	000.4/7257/Pusdat in/2025	20-11-2025	536111	Belanja Modal Lainnya	Visualisasi Data Center	3060201004	1	44.400.000	44.400.000	259991311293040	
8	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST NONKONTRAKTUAL	00101/UP_TUP/4 03200/2025	15-09-2025	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	pembayaran pekerjaan penggantian peralatan jaringan switcher/patch panel ATS pada rumah dinas Mendagri dan panel ATS gedung f tgl 1 september 2025	3060323015	1	13.070.250	13.070.250	259991310745140	
9	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST NONKONTRAKTUAL	00101/UP_TUP/4 03200/2025	15-09-2025	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	pembayaran pekerjaan penggantian peralatan jaringan switcher/patch panel ATS pada rumah dinas Mendagri dan panel ATS gedung f tgl 1 september 2025	3060323015	1	13.070.250	13.070.250	259991310745140	
10	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST NONKONTRAKTUAL	00101/UP_TUP/4 03200/2025	15-09-2025	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	pembayaran pekerjaan penggantian peralatan jaringan switcher/patch panel ATS pada rumah dinas Mendagri dan panel ATS gedung f tgl 1 september 2025	3010304003	1	22.699.500	22.699.500	259991310745140	
11	01001	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	BAST NONKONTRAKTUAL	00024/UP_TUP/6 77024/2025	06-11-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan Perkantoran IPDN Kampus Sulawesi Selatan	3060101036	1	800.000	800.000	259991330387861	Seharusnya menggunakan akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel).
12	01001	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	BAST KONTRAKTUAL	000.4/30/BAST/IP DN.25/2025	18-07-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Sarana Ekstrakurikuler Alat Drumband di IPDN Kampus NTB Tahun Anggaran 2025	6020101002	3	19.000.000	57.000.000	259991320148643	Terjadi ketidaksesuaian antara kode akun belanja dengan kode barang pada pengadaan sarana ekstrakurikuler berupa alat drum band. Hal tersebut disebabkan karena akun yang digunakan pada saat penganggaran adalah akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin), seharusnya akun 536111 (Belanja Modal Lainnya).
13	01001	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	BAST KONTRAKTUAL	000.4/30/BAST/IP DN.25/2025	18-07-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Sarana Ekstrakurikuler Alat Drumband di IPDN Kampus NTB Tahun Anggaran 2025	6020101002	4	10.864.000	43.456.000	259991320148643	

**REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

NO	BAES1	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Keterangan
14	01001	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	BAST KONTRAKTUAL	000.4/30/BAST/IP DN.25/2025	18-07-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Sarana Ekstrakurikuler Alat Drumband di IPDN Kampus NTB Tahun Anggaran 2025	6020101002	5	3.000.000	15.000.000	259991320148643	Terjadi ketidaksesuaian antara kode akun belanja dengan kode barang pada pengadaan sarana ekstrakurikuler berupa alat drum band. Hal tersebut disebabkan karena akun yang digunakan pada saat penganggaran adalah akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin), seharusnya akun 536111 (Belanja Modal Lainnya).
15	01001	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	BAST KONTRAKTUAL	000.4/30/BAST/IP DN.25/2025	18-07-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Sarana Ekstrakurikuler Alat Drumband di IPDN Kampus NTB Tahun Anggaran 2025	6020101002	4	4.885.000	19.540.000	259991320148643	
16	01005	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	BAST NONKONTRAKTUAL	110/BAST/600/S DT-II/FLPKK	16-04-2025	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah dalam rangka Dukungan Fasilitas 10 Program Pokok PKK Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	3050205023	50	450.000	22.500.000	251331303003636	Kesalahan pencatatan di Modul Komitmen yang seharusnya dicatat sebagai persediaan dengan kode barang (1010501004)
17	01005	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	BAST NONKONTRAKTUAL	110/BAST/601/S DT-II/FLPKK	10-04-2025	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah dalam rangka Dukungan Fasilitas 10 Program Pokok PKK Bidang Pembinaan Karakter Keluarga	3190106999	100	225.000	22.500.000	251331303003635	
18	01008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BAST KONTRAKTUAL	000.4.2/11642/SE S	23-12-2025	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	Pemeliharaan dan Pembersihan Lahan Parkir	4010133001	1	123.543.000	123.543.000	259991320882488	Kesalahan menggunakan Akun Anggaran seharusnya menggunakan akun 533111 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan)
19	01008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BAST KONTRAKTUAL	000.4.2/4895/IDK N/2025	27-10-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Paket Pekerjaan Operating Sistem Linux.	8010101002	1	173.999.999	173.999.999	259991320595298	Kesalahan menggunakan Akun Anggaran seharusnya menggunakan akun 536111 (Belanja Modal Lainnya).
20	01012	027114	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	BAST KONTRAKTUAL	000.4.2/2036/PBJ-PPSDM	31-10-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran berupa 5 Unit Printer All In One, 6 Unit Printer Laser, 11 Unit PC, 2 Unit Harddisk dll Untuk Kantor PPSPDM Regional Yogyakarta	3050105038	7	325.000	2.275.000	259991330362919	Terdapat pembelian dibawah nilai kapitalisasi berupa Laser Printer sebanyak 7 barang @Rp325.000 dengan akun 53 yang seharusnya menggunakan akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel).
21	01012	403216	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	BAST NONKONTRAKTUAL	000.4.2/1816/BA ST-PL02/PPSDM/2025	07-08-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Air Conditioner (1 PK dan 2 PK) dan Smart TV & Bracket Tahun 2025	3050206080	3	780.001	2.340.003	259991320272798	Pembelian Bracket TV Rp780.001 yang semula tercatat sebagai Ekstrakomptabel karena merupakan satu kesatuan dengan barang lain, dikoreksi dengan melakukan kapitalisasi ke nilai aset (TV) yang telah dicatat sebagai Peralatan dan Mesin.

**REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

NO	BAES1	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Keterangan
22	01012	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BAST KONTRAKTUAL	000.4.2/4231/BA-ST/X/2025/R	15-10-2025	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Jasa Konsultasi Perencana Konstruksi Renovasi Gedung Auditorium dan Asrama Kantor	4010205001	1	24.575.127	24.575.127	259991310866997	Pekerjaan tersebut merupakan jasa perencana renovasi gedung yang dilaksanakan dalam satu kontrak untuk tiga gedung. Agar nilai pengeluaran dapat dikapitalisasi sebagai pengembangan gedung, maka pekerjaan harus dirinci berdasarkan masing-masing gedung. Namun, untuk salah satu gedung, nilai pekerjaan hanya sebesar Rp24.500.000, sehingga berada di bawah batas kapitalisasi pengembangan gedung sebesar Rp25.000.000. Oleh karena itu, pada awalnya pencatatan dilakukan dengan mengakui pengeluaran tersebut sebagai beban gedung ekstrakomptabel. Selanjutnya, dilakukan koreksi pencatatan dengan mengkapitalisasi nilai tersebut ke kode barang gedung yang direnovasi (gedung intrakomptabel).
23	01012	506137	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	BAST KONTRAKTUAL	900.1.7.2/3077/PP-SDM-BKT	10-12-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Furniture dan Meubelair Pusat Pengembangan SDM Regional Bukittinggi Tahun 2025	3050201003	150	950.000	142.500.000	259991340115819	Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan meubelair dengan nilai di bawah batas minimum kapitalisasi sehingga dicatat sebagai beban Ekstrakomptabel, seharusnya menggunakan akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel).
24	01012	506137	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	BAST KONTRAKTUAL	900.1.7.2/3077/PP-SDM-BKT	10-12-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Furniture dan Meubelair Pusat Pengembangan SDM Regional Bukittinggi Tahun 2025	3050201003	3	800.000	2.400.000	259991340115819	
25	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/6392/e-CAT/BAST/Balai-KMG	24-11-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan praktek pemadam kebakaran	3080141005	50	629.370	31.468.500	259991311238199	Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan alat pemadam kebakaran dengan nilai di bawah batas minimum kapitalisasi sehingga dicatat sebagai beban Ekstrakomptabel, seharusnya menggunakan akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel).
26	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/6392/e-CAT/BAST/Balai-KMG	24-11-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan praktek pemadam kebakaran	3080141005	6	996.780	5.980.680	259991311238199	
27	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/6392/e-CAT/BAST/Balai-KMG	24-11-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan praktek pemadam kebakaran	3080141005	6	475.200	2.851.200	259991311238199	
28	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/6392/e-CAT/BAST/Balai-KMG	24-11-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan praktek pemadam kebakaran	3080141005	2	654.900	1.309.800	259991311238199	

**REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

NO	BAES1	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Keterangan
29	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/6392/e-CAT/BAST/Balai-KMG	24-11-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan praktek pemadam kebakaran	3080141005	3	861.300	2.583.900	259991311238199	Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan alat pemadam kebakaran dengan nilai di bawah batas minimum kapitalisasi sehingga dicatat sebagai beban Ekstrakomptabel, seharusnya menggunakan akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel).
30	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/6392/e-CAT/BAST/Balai-KMG	24-11-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan praktek pemadam kebakaran	3080141005	16	495.000	7.920.000	259991311238199	Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan alat pemadam kebakaran dengan nilai di bawah batas minimum kapitalisasi sehingga dicatat sebagai beban Ekstrakomptabel, seharusnya menggunakan akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel).
31	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/6392/e-CAT/BAST/Balai-KMG	24-11-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan praktek pemadam kebakaran	3080141005	9	366.300	3.296.700	259991311238199	
32	01012	506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	BAST KONTRAKTUAL	000.4/6392/e-CAT/BAST/Balai-KMG	24-11-2025	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pengadaan peralatan praktek pemadam kebakaran	3080141005	3	483.120	1.449.360	259991311238199	



LAMPIRAN XXXIV

DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

I. REKENING YANG DIGUNAKAN

No	KPPN	BaEsI		Nama BaEsI	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
1	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		RPL 133 PS SETJEN KEMENDAGRI UTK DOM	BNI	30	S-1714/MK.5/2015	04/03/2015
2	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		RKK SETJEN KEMENDAGRI OPS	BNI	Rekening Induk	S-514/WPB.12/KP.04/2021	10/02/2021
3	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		RKK SETJEN KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1403/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
4	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		BPG 133 SETJEN KEMENDAGRI	BRI	50	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
5	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		BPP 133 BIRO HUKUM	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
6	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		BPP 133 BIRO KEPEGAWAIAN	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
7	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		BPP 133 BIRO ORTALA	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
8	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		BPP 133 BIRO UMUM	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
9	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		BPP 133 PUSAT FASKERJASAMA	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
10	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		BPP 133 BIRO KEUANGAN	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
11	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		BPP 133 PUSDATIN	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
12	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		BPP 133 BIRO ADMINISTRASI	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
13	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		BPP 133 PUSAT PENERANGAN	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
14	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU		BPG 133 DKPP	BRI	50	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
15	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		BPP 133 BIRO PERENCANAAN	BRI	51	S-4800/WPB.12/KP.0404/2021	19/11/2021
16	Sumedang	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		RKK SETJEN KEME	BJB	50	S-2173/KPN.1204/2025	04/12/2025
17	Sumedang	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BPG 087 IPDN	BJB	50	S-2173/KPN.1204/2025	04/12/2025
18	Sumedang	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BPP 087 Biro I	BJB	50	S-2173/KPN.1204/2025	04/12/2025
19	Sumedang	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BPP 087 Biro II	BJB	50	S-2173/KPN.1204/2025	04/12/2025
20	Sumedang	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BPP 087 Biro III	BJB	50	S-2173/KPN.1204/2025	04/12/2025
21	Sumedang	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BPP 087 Biro IV	BJB	50	S-2173/KPN.1204/2025	04/12/2025
22	Sumedang	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BPP 087 Kampus Jakarta	BJB	50	S-2173/KPN.1204/2025	04/12/2025
23	Sumedang	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BPP 087 Pascasarjana dan Profesi	BJB	50	S-2173/KPN.1204/2025	04/12/2025
24	Sumedang	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BPP 087 Fakultas	BJB	50	S-2173/KPN.1204/2025	04/12/2025
25	Manado	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA		BPG 049 IPDN KAMPUS SULUT	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
26	Makassar I	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN		BNP 054 IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	BNI	10	001980/050	13/01/2021
27	Makassar I	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN		BPG 054 IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
28	Bukittinggi	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT		BPG 011 IPDN KAMPUS BUKITTINGGI	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
29	Pontianak	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT		BPG 042 IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
30	Mataram	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT		BPG 038 IPDN KAMPUS NTB	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
31	Jayapura	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	683091	IPDN KAMPUS PAPUA		BPG 063 IPDN KAMPUS PAPUA	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
32	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT		RKK ITJEN KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1163/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
33	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT		BPG 133 ITJEN KEMENDAGRI	BRI	50	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
34	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT		BPP 133 INSPEKTORAT I	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
35	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT		BPP 133 Inspektora II	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
36	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT		BPP 133 Inspektora III	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
37	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT		BPP 133 Inspektora IV	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
38	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT		BPP 133 INSPEKTORAT KHUSUS	BRI	21	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
39	Jakarta IV	01002	02	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT		BPP 133 SETTJEN KEMENDAGRI	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
40	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM		RKK DITJEN POLPUM KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
41	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM		BPG 133 DITJEN POLPUM KEMENDAGRI	BRI	50	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
42	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM		BPP 133 SEKRETARIAT	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
43	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM		BPP 133 DIREKTORAT WASBANG	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
44	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM		BPP 133 DIREKTORAT POLDAGRI	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
45	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM		BPP 133 DIREKTORAT EKOSOSBUD	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
46	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM		BPP 133 DIREKTORAT ORMAS	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
47	Jakarta IV	01003	03	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM		BPP 133 DIREKTORAT WASNAS	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
48	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	019080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA		BPG 133 SETDA PROV DKI JAKARTA	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17/03/2021
49	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		RKK DITJEN BAK KEMENDAGRI OPS	BSI	Rekening Induk	S-1050/WPB.12/KP.04/2021/133	17/03/2021
50	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		RKK DITJEN BINA ADWIL OPS	BNI	Rekening Induk	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
51	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		BPG 133 DITJEN BINA ADM. KEWILAYAHAN	BNI	50	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
52	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		BPP 133 SEKRETARIAT DITJEN ADWIL	BNI	51	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
53	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		BPP 133 DIR. DEKONSENTRASI TP	BNI	51	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
54	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		BPP 133 DIREKTORAT WASKOBAN	BNI	51	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020

he f

DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

I. REKENING YANG DIGUNAKAN

No	KPPN	BaEsI		Nama BaEsI	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
55	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		BPP 133 DIR. POLPP DAN LINMAS	BNI	51	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
56	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		BPP 133 DIREKTORAT TOPOBAD	BNI	51	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
57	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		BPP 133 DIREKTORAT MPBK	BNI	51	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
58	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	029134	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT		BPG 022 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	BNI	50	S-2255/WPB.12/KP.04/2021	04 Juni 2021
59	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	039667	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH		BPG 026 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
60	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	049061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA		BPG 030 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DIY 04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
61	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	069084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH		BPG 001 SEKDA PROVINSI ACEH 04	BSI	50	S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
62	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	079078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA		BPG 123 SETDA PROVSU	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
63	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	089106	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT		BPG 010 SETDA PROV SUMBAR	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
64	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	099438	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU		BPG 008 SETDA PROV RIAU 04 DK	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
65	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	109074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI		BPG 012 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
66	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	119082	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN		BPG 014 SEKRETARIAT DAERAH PROV SUMSEL 2	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
67	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	129074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG		BPG 017 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
68	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	129098	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG		BPG 017 DPMPTSP LAMPUNG PROV LAMPUNG	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
69	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	139078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT		BPG 042 SETDA PROV. KALBAR 139078	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
70	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	149072	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		BPG 043 SETDA PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
71	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	149130	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		BPG 043 DPMPTSP PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
72	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	159071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		BPG 045 SEKDA PROV KAL SEL	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
73	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	160552	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN		BPG 152 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH NUNUKAN	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
74	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	169185	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		BPG 046 SETDA PROV KALTIM	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
75	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	179088	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA		BPG 049 DINAS PENANAMAN MODAL PTSPD PROV SULUT	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
76	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	179223	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA		BPG 049 SEKDA PROV SULUT BIRO PEMERINTAHAN HUMAS	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
77	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	189087	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH		BPG 051 SETDA PROV SULTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
78	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	199080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN		BPG 054 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
79	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	209071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA		BPG 060 SETDA PROV. SULTRA DK 04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
80	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	209095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA		BPG 060 DPMPTSP PROV SULTRA 04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
81	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	219062	SEKRETARIAT DAERAH PROP. MALUKU		BPG 061 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU 219062	BNI	50	S-1625/WPB.12/KP.04/2021	19/04/2021
82	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	229068	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI		BPG 037 SEKDA PROVINSI BALI	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
83	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	239236	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		BPG 038 SETDA PROV NTB	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
84	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	249136	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		BPG 039 SEKDA PROV NTT	BNI	50	S-2255/WPB.12/KP.04/2021	4 Juni 2021
85	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	249174	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		BPG 039 DPMPTSP PROV NTT 249174	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
86	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	259084	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA		BPG 063 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV. PAPUA	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
87	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	269093	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU		BPG 016 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
88	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	289095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA		BPG 062 DINAS PMPTSP PROV MALUT	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
89	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	289174	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA		BPG 062 SEKERETARIAT DAERAH PROV MALUKU UTARA 04 DK	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
90	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	299348	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN		BPG 020 SETDA PROV BANTEN	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
91	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	309148	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG		BPG 015 SETDA PROV.BABEL-04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
92	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	319061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO		BPG 050 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
93	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	329116	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU		BPG 009 SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAUES04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
94	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	339161	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT		BPG 065 SETDA PROV PAPUA BARAT	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021

he f

DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

I. REKENING YANG DIGUNAKAN

No	KPPN	BaEsI		Nama BaEsI	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
95	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	340166	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT		BPG 178 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
96	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	349011	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT		BPG 178 DINAS PMPTSP SULAWESI BARAT	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
97	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	356000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU		BPG 185 DUPRPKP KAB MALINAU	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
98	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	359002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA		BPG 185 DPMPTSP PROV KALTARA 359002	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
99	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	417697	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA		BPG 185 SEKDA KALTARA 04 417697	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
100	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433316	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT		BPG 010 DPMPTSP PROV SUMBAR	BNI	50	S-1625/WPB.12/KP.04/2021	19/04/2021
101	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433317	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU		BPG 008 DINAS PMPTSP PROV RIAU	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
102	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433318	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU		BPG 009 DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU	BNI	50	S-1730/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
103	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433341	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI		BPG 012 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI JAMBI	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
104	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433342	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN		BPG 014 DINAS PMPTSP SUMSEL	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
105	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433343	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANGKA BELITUNG		BPG 015 DPMPTSP BABEL	BNI	50	S-2871/WPB.12/KP.04/2021	19 Juli 2021
106	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433344	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU		BPG 016 DINAS PMPTSP PROV BENGKULU	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
107	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433345	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN		BPG 020 DINAS PMPTSP PROV BANTEN	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
108	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433347	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI		BPG 037 DINAS PMPTSP PROV BALI	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
109	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433348	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT		BPG 042 DINAS PMPTSP PROV KALBAR	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
110	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433349	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO		BPG 050 DPM-ESDM-TRANS GORONTALO	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
111	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433350	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH		BPG 051 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PROV SULTENG 433350	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
112	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433351	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN		BPG 054 DPMPTSP SULSEL	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
113	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433352	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		BPG 038 DPMPPT SATU PINTU PROV NTB	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
114	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433353	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU		BPG 061 DINAS PMPTSP PROV MALUKU	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
115	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484101	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH		BPG 001 DPM DAN PTSP PROV	BSI	50	S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
116	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484102	BAPPEDA PROVINSI ACEH		BPG 001 BAPPEDA PROV ACEH	BSI	50	S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
117	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484103	INSPEKTORAT PROVINSI ACEH		BPG 001 INSPEKTORAT PROV ACEH	BSI	50	S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
118	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484105	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA		BPG 004 DPMPTSP SUMUT	BNI	50	S-2255/WPB.12/KP.04/2021	04 Juni 2021
119	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484107	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA		BPG 123 INSPEKTORAT PROVINSI SUMUT	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
120	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484109	BAPPEDA PROVINSI RIAU		BPG 008 BAPPEDA RIAU	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
121	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484110	INSPEKTORAT PROVINSI RIAU		BPG 008 INSPEKTORAT PROV RIAU	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
122	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484112	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU		BPG 009 BAPPEDA PROV KEPRI	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
123	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484113	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU		BPG 009 INSPEKTORAT PROV KEPRI	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
124	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484115	BAPPEDA PROVINSI JAMBI		BPG 012 BAPPEDA PROVINSI JAMBI	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
125	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484116	INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI		BPG 012 INSPEKTORAT PROV JAMBI	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
126	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484118	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT		BPG 010 BAPPEDA PROV SUMBAR	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
127	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484119	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT		BPG 010 INSPEKTORAT PROV SUMBAR	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
128	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484121	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN		BPG 014 BAPPEDA PROV SUMSEL	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
129	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484122	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN		BPG 014 INSPEKTORAT SUMSEL	BNI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19 April 2021
130	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484124	BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG		BPG 017 BAPPEDA PROV LAMPUNG	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
131	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484125	INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG		BPG 017 INSPEKTORAT LAMPUNG	BNI	50	S-2871/WPB.12/KP.04/2021	19 Juli 2021
132	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484127	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU		BPG 016 BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
133	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484128	INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU		BPG 016 INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
134	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484131	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		BPG 015 BAPPEDABABEL 484131	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
135	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484132	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		BPG 015 INSPEKTORAT PROV. BABEL	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021

hu f

DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

I. REKENING YANG DIGUNAKAN

No	KPPN	BaEsI		Nama BaEsI	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
136	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484134	BAPPEDA PROVINSI BANTEN		BPG 020 BAPPEDA PROV BANTEN	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
137	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484135	INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN		BPG 001 INSPEKTORAT BANTEN	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
138	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484137	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT		BPG 022 DINAS PMPTSP JABAR	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
139	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484138	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT		BPG 022 BAPPEDA PROV JABAR	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
140	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484139	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT		BPG 022 INSPEKTORAT DAERAH PROV JABAR	BNI	50	S-2255/WPB.12/KP.04/2021	04 Juni 2021
141	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484145	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH		BPG 026 DINAS PMPTSP PROV JATENG	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
142	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484146	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH		BPG 026 BAPPEDA PROV JATENG	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
143	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484147	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH		BPG 026 INSPEKTORAT PROVINSI JATENG	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
144	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484149	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIY		BPG 030 DPMPSTP PROVINSI D.I YOGYAKARTA	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
145	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484150	BAPPEDA PROVINSI DI YOGYAKARTA		BPG 030 BAPPEDA PROVINSI DI YOGYAKARTA	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17/03/2021
146	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484151	INSPEKTORAT PROVINSI DI YOGYAKARTA		BPG 030 INSPEKTORAT PROV DIY	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17/03/2021
147	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484153	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR		BPG 135 DINAS PMPTSP JATIM	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
148	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484154	BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR		BPG 135 BAPPEDA PROV JATIM	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
149	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484157	BAPPEDA PROVINSI BALI		BPG 037 BAPPEDA PROV BALI	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
150	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484158	INSPEKTORAT PROVINSI BALI		BPG 037 INSPEKTORAT BALI	BNI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19/04/2021
151	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484160	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		BPG 038 BAPPEDA PROV NTB	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
152	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484161	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		BPG 038 INSPEKTORAT PROV NTB	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
153	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484163	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		BPG 039 DEKON BAPPELITBANGDA	BNI	50	S-3391/WPB.12/KP.04/2021	24 Agustus 2021
154	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484164	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		BPG 039 INSPEKTORAT PROV NTT	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23/04/2021
155	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484166	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		BPG 042 BAPPEDA PROVINSI KALBAR 484166	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
156	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484167	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT		BPG 042 INSPEKTORAT KALBAR	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
157	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484169	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		BPG 043 BAPPEDA PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
158	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484170	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		BPG 043 INSPEKTORAT PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
159	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484172	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		BPG 045 PMPTSP PROV KALSEL	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
160	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484173	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		BPG 045 BAPPEDA PROV KALSEL 484173	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
161	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484174	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		BPG 015 INSPEKTORAT KALSEL	BNI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19/04/2021
162	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484176	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		BPG 046 DINAS PMPTSP PROV KALTIM	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23/04/2021
163	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484177	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		BPG 046 BAPPEDA KALIMANTAN TIMUR	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
164	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484178	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		BPG 046 INSPEKTORAT KALTIM	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
165	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484180	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA		BPG 185 BAPPEDA PROV KALUT	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
166	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484181	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA		BPG 185 INSPEKTORAT PROV KALIMANTAN UTARA	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31/03/2021
167	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484183	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA		BPG 049 BAPPEDA PROV SULUT	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
168	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484184	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA		BPG 049 INSPEKTORAT PROV SULUT	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
169	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484187	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO		BPG 050 BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	BSI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
170	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484188	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO		BPG 050 INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	BSI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
171	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484190	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT		BPG 178 BAPPEDA PROV SULBAR	BSI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
172	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484191	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT		BPG 178 INSPEKTORAT PROV SULBAR	BSI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
173	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484193	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN		BPG 054 BAPPEDA SULSEL	BSI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19/04/2021
174	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484194	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN		BPG 054 INSPEKTORAT PROV SULSEL	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23/04/2021
175	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484196	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH		BPG 051 BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	BRI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
176	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484197	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH		BPG 051 ITDA PROV SULTENG	BRI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
177	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484199	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA		BPG 060 BAPPEDA PROV SULTRA	BRI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
178	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484200	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA		BPG 060 INSPEKTORAT DAERAH PROV SULTRA (04)	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17/03/2021
179	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484202	BAPPEDA PROVINSI MALUKU		BPG 061 BAPPEDA PROVINSI MALUKU	BNI	50	S-1730/WPB.12/KP.04/2021	23/04/2021
180	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484203	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU		BPG 061 INSPEKTORAT PROV MALUKU	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23/04/2021
181	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484205	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA		BPG 062 BAPPEDA PROV MALUT	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17/03/2021
182	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484206	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA		BPG 062 INSPEKTORAT PROV MALUT	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31/03/2021
183	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484208	BAPPEDA PROVINSI PAPUA		BPG 063 BAPPEDA PROV PAPUA	BNI	50	S-2433/KPN.1204/2022	18/08/2022
184	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484209	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA		BPG 063 INSPEKTORAT PROV PAPUA	BNI	50	S-1247/KPN.1204/2022	08/04/2022
185	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484211	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT		BPG 065 DPMPSTP PABAR	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17/03/2021
186	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484212	BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT		BPG 065 BAPPEDA PROV PABAR	BNI	50	S-2433/KPN.1204/2022	18/08/2022
187	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484213	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT		BPG 065 INSPEKTORAT PABAR	BNI	50	S-2871/WPB.12/KP.04/2021	19/07/2021
188	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	240270	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAB. BELU		BPG 172 BPPD KAB BELU	BNI	50	S-1469/KPN.1204/2024	09/08/2024
189	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA		RKK DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI OPS	BNI	Rekening Induk	S-1342/WPB.12/KP.04/2020	16/03/2020

he f

DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

I. REKENING YANG DIGUNAKAN

No	KPPN	BaEsI		Nama BaEsI	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
190	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA		RKK DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1344/WPB.12/KP.04/2020	16/03/2020
191	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA		RKK DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI OPS	BSI	Rekening Induk	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
192	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA		BPG 133 Ditjen Bina Pemdes Kemendagri	BSI	50	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
193	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA		BPP 133 Direktorat PAPD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
194	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA		BPP 133 Direktorat FPKAD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
195	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA		BPP 133 Direktorat FKAD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
196	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA		BPP 133 Direktorat KKD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
197	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA		BPP 133 Direktorat EPD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
198	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA		BPP 133 Sekretariat	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
199	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA				BPG 030 BALAI PEMERINTAHAN DESA YK	BNI	50	S-1342/WPB.12/KP.04/2020	16/03/2020
200	Yogyakarta	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA		BPN 030 BALAI PEMERINTAHAN DESA YK	BNI	10	000078/030	23/09/2024
201	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG		BPG 032 BBPMD MALANG	BRI	50	S-1343/WPB.12/KP.04/2020	16/03/2020
202	Malang	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG		BPN 032 BBPD MALANG	BRI	10	S-431/KPN.1604/2025	08/04/2025
203	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG		BPG 017 BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	BRI	50	S-1343/WPB.12/KP.04/2020	16/03/2020
204	Bandar Lampung	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG		BPN 017 BALAI PEMERINTAH DESA LAMPUNG	MANDIRI	10	S-758/KPN.0801/2024	16/05/2024
205	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		RKK DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI OPS	BNI	Rekening Induk	S-1559/WPB.12/KP.04/2020	03/04/2020
206	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		BPG: 133 DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI	BNI	50	S-1558/WPB.12/KP.0404/2020	03/04/2020
207	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		BPP: 133 SEKRETARIAT	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.0404/2020	03/04/2020
208	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		BPP: 133 DIREKTORAT PEIPD	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.0404/2020	03/04/2020
209	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		BPP: 133 Direktorat SUPD I	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.0404/2020	03/04/2020
210	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		BPP: 133 Direktorat SUPD II	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.0404/2020	03/04/2020
211	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		BPP 133: Direktorat SUPD III	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.0404/2020	03/04/2020
212	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		BPP: 133 Direktorat SUPD IV	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.0404/2020	03/04/2020
213	Khusus Pinjaman & Hibah	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		RPL 140 PDHL DITJEN BANGDA untuk 2TC92FA	MANDIRI	30	000105/140	16/03/2021
214	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		RPL 133 PDHL DITBINABANGDA UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005344/WPB.12/KP.04/2021	16/12/2021
215	Khusus Pinjaman & Hibah	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		RPL 140 PDHL BANGDA untuk 27YDNA6A	MANDIRI	30	WPB.12/KP00035608/2023	17/05/2023
216	Khusus Pinjaman & Hibah	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		RPL 140 PDH BANGDA untuk 27YDNA6A	MANDIRI	30	WPB.12/KP00040708/2023	30/10/2023
217	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		RPL 133 PDH BAPPEDA ACEH UTK 2C7EJQHA	BSI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
218	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		RPL 133 PDH BAPPEDA JTG UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
219	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		RPL 133 PDH BAPPEDA NTT UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
220	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		RPL 133 PDH BAPPEDA NTB UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
221	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		RPL 133 PDH BAPPEDA SULSEL UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
222	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		RPL 133 PDH BAPPEDA MALUKU UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
223	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		RPL 133 PDH BAPPEDA PAPUA UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
224	Jakarta IV	01006	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		RPL 133 PDH BAPPEDA PABAR UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
225	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH		RKK DITJEN OTDA KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1234/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
226	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH		BPG : 133 DITJEN OTDA KEMENDAGRI	BRI	50	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
227	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH		BPP : 133 SEKRETARIAT	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
228	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH		BPP : 133 DIR. PENATAAN DAERAH	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
229	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH		BPP 133 DIR. KEPALA DAERAH	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
230	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH		BPP : 133 DIR. KELEMBAGAAN	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
231	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH		BPP : 133 DIR. PRODUK HUKUM	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
232	Jakarta IV	01007	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH		BPP : 133 DIR. EVALUASI KINERJA	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
233	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL		RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2FWTYN9A	BNI	30	S-002342/KPN.1204/2022	08 Agustus 2023

DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

I. REKENING YANG DIGUNAKAN

No	KPPN	BaEsI		Nama BaEsI	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
234	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		RKK DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI OPS	BNI	Rekening Induk	S-1181/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
235	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		BPG 133 DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI	BNI	50	S-1175/WPB.12/KP.0404/2020	06 Maret 2020
236	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		BPP 133 SEKRETARIAT PEMERINTAH	BNI	51	S-1175/WPB.12/KP.0404/2020	06 Maret 2020
237	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		BPP 133 INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN DAERAH	BNI	51	S-1316/KPN.1204/2023	12 Juni 2023
238	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		BPP 133 PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL	BNI	51	S-1316/KON.1206/2023	12 Juni 2023
239	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		BPP 133 INFORMASI	BNI	51	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06 Maret 2020
240	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		BPP 133 INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL	BNI	51	S-1316/KPN.1204/2023	12 Juni 2023
241	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		BPP 133 BINA APARATUR PEMERINTAH	BNI	51	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06 Maret 2020
242	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		BPP 133 DUKCAPIL PHLN	BNI	51	S-2841/KPN.1204/2023	04 Desember 2023
243	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		BPP 133 DUKCAPIL PHLN 2	BNI	51	S-1132/KPN.1204/2024	25 Juni 2024
244	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		BPP 133 DUKCAPIL PHLN 3	BNI	51	S-1132/KPN.1204/2024	25 Juni 2024
245	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		BPP 133 DUKCAPIL PHLN 4	BNI	51	S-1132/KPN.1204/2024	26 Juni 2024
246	Jakarta IV	01008	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2MASJMSA	BNI		S-873/KPN.1204/2025	11/06/2025
247	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH		RKK DITJEN BINA KEUDA KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1251/WPB.12/KP.04/2020	10-03-2020
248	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH		BPG 133 DITJEN BINA KEUDA KEMENDAGRI	BRI	50	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
249	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH		BPP 133 SEKRETARIAT KEUDA	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
250	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH		BPP 133 DIREKTORAT PAD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
251	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH		BPP 133 DIREKTORAT PPKD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
252	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH		BPP 133 DIREKTORAT PD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
253	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH		BPP 133 DIREKTORAT FDPPD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
254	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH		BPP 133 DIT BUMD BLUD BMD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
255	Jakarta IV	01011	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		RKK BALITBANG KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1305/WPB.12/KP.04/2021	13/03/2020
256	Jakarta IV	01011	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		BPG 133 BALITBANG KEMENDAGRI	BRI	50	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	13/03/2020
257	Jakarta IV	01011	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		BPP 133 PUSLITBANG OTDAPOLPUM	BRI	51	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	13/03/2020
258	Jakarta IV	01011	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		BPP 133 PUSLITBANG ADWIL	BRI	51	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	13/03/2020
259	Jakarta IV	01011	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		BPP 133 PUSLITBANG KEUDA	BRI	51	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	13/03/2020
260	Jakarta IV	01011	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		BPP 133 PUSLITBANG INOVASI	BRI	51	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	13/03/2020
261	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		RKK BPSDM KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1114/WPB.12/KP.04/2020	4 Maret 2020
262	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		RKK BPSDM KEMENDAGRI OPS	BNI	Rekening Induk	S-1116/WPB.12/KP.04/2020	4 Maret 2020
263	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		BPG 133 BADAN PENGEMB. SDM KEMENDAGRI	BRI	50	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
264	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		BPP 133 Sekretariat	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
265	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		BPP 133 Pusat I	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
266	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		BPP 133 Pusat II	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
267	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		BPP 133 Pusat III	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
268	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		BPP 133 Pusat IV	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
269	Jakarta IV	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		BNP 133 BPSDM	MANDIRI	10	S-7197/WPB.12/KP.0404/2018	18/12/2018
270	Yogyakarta	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA		BPG 030 PPSDM REGIONAL YOGYAKARTA	BRI	50	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
271	Yogyakarta	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA		BNP 030 PUSDIKLAT REGIONAL YOGYAKARTA	MANDIRI	10	S-1156/WPB.15/KP/01/2015	26/02/2015
272	Makassar I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR		BNP 054 PPSDM REGIONAL MAKASSAR	BSI	40	001960/054	20/10/2020
273	Makassar I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR		BPG 054 PPSDM REGIONAL MAKASSAR	BNI	50	001117/054	04/03/2020
274	Makassar I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR		BPP 054 PPSDM MAKASSAR PNPB	BNI	51	002433/054	08/08/2025
275	Makassar I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR		BPP 054 PPSDM MAKASSAR RM	BNI	51	002433/054	08/08/2025
276	Bandung I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG		BNP 022 PUSDIKLAT REGIONAL BANDUNG	MANDIRI	10	S-414/WPB.13/KP.022/2015	02/03/2015
277	Bandung I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG		BPG 022 PPSDM REGIONAL BANDUNG	MANDIRI	50	S-1119/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020

he f

DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

I. REKENING YANG DIGUNAKAN

No	KPPN	BaEs1		Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
278	Bandung I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG		BPP 022 PPSDM BANDUNG TATA USAHA	MANDIRI	51	S-312/KPN.1204/2025	30/01/2025
279	Bandung I	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG		BPP 022 PPSDM BANDUNG KEGIATAN	MANDIRI	51	S-312/KPN.1204/2025	30/01/2025
280	Bukittinggi	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI		BPG 011 PPSDM REGIONAL BUKITTINGGI	BRI	50	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
281	Bogor	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		BPG023 BPSDM SATPOLPP DAMKAR	BRI	50	S-2782/WPB.12/KP.04/2021	13/07/2021
282	Bogor	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		BPB 023 BPSDM SATPOLPP DAMKAR	BRI	10	000415	20/09/2024

II. DATA REKENING YANG AKAN DITUTUP

No	KPPN	BaEs1		Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
1	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	299348	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN		BPG 020 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	BNI	20	S-1730/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
2	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	250048	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA		BPG 063 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	MANDIRI	20	WPB.12/KP00035608/2023	17 Mei 2023
3		01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	419638	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE		BPG 060 BPBD KAB KONAWE	BNI	50		
4		01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	209093	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA		BPG 060 SAT.POL.PP PROV. SULTRA	BPD SULTRA	50		
5		01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	199389	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI SULAWESI SELATAN		BPG 054 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SULSEL	BNI	50		
6	Tobelo	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	419064	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI		BPG 112 BP PERBATASAN MOROTAI	BRI	50	S-276/WPB.30/KP.0230/2017	10/04/2017
7	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	250048	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA		BPG 063 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	BTN	50	S-1508/KPN.1204/2023	11 Juli 2023
12	Jakarta IV	01005	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	259291	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MERAUKE		BPG 068 BPMK KAB MERAUKE	BPD PAPUA	20	S-729/WPB.33/KP.0430/2015	03/08/2015

III. DATA REKENING YANG SUDAH DITUTUP

No	KPPN	BaEs1		Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
1	Bogor	01012	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		RPL 023 KS BPKSP4K U DIKLAT II	MANDIRI	30		
2	Jakarta IV	01004	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	069084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH		BPG 001 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH (04)	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021 Surat Penutupan Rekening: KFBDA/0023	17 Maret 2021 Tanggal Surat Penutupan: 04/03/2024
3	Jakarta IV	01001	01	SEKRETARIAT JENDERAL	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA		BPG 133 IPDN KAMPUS JAKARTA	BRI	50	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020 Surat Penutupan Rekening: S-839/KPN.1204/2024	18/03/2020 Tanggal Surat Penutupan: 13/05/2024

VI. BUKAN REKENING SATKER KEMENDAGRI

1	Jakarta IV	01009	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH		BPP 133 DIREKTORAT PD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
---	------------	-------	----	-----------------------------	--------	--	--	-----------------------	-----	----	--------------------------	------------



LAMPIRAN-LAMPIRAN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN



NERACA PERCOBAAN AKRUAL (SALDO AWAL)

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. Cetak 07/05/2026
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	3,000,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	109,599,303	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2,726,436,859	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	62,230,201,976	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	299,007,100	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	94,651,450	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	12,640,675,594	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	300,680,096	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	11,043,686,930
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	1,503,401
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,616,888,027	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	625,989,968	0
0.0	117114	Suku Cadang	83,808,068	0
0.0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	21,391,184,913	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	33,349,858,276	0
0.0	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	28,860,434,489	0
0.0	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	71,066,062,000	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	139,951,231,767	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	2,521,084,896	0
0.0	117129	Persediaan Dalam Proses	36,251,577,100	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	1,152,137,472	0
0.0	131111	Tanah	13,251,627,720,522	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,156,760,195,772	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,922,592,918,649	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	79,358,601,816	0
0.0	134112	Irigasi	48,122,758,537	0
0.0	134113	Jaringan	172,312,226,627	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	30,462,708,978	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	64,552,872,794	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	25,366,869,749	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,460,735,603,007
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	565,839,009,912
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	58,539,429,759
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	31,555,216,171
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	71,913,355,442
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	22,849,730,650
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	17,950,315,934	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	17,850,590,368

hu f

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. Cetak 07/05/2026
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	162151	Software	756,371,780,413	0
0.0	162161	Lisensi	69,533,433,080	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	2,271,764,600	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	2,333,403,750	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	384,325,357,961	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	120,974,236,236	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	61,889,828,264	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	116,962,354,763
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	692,217,866,817
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	8,209,555,741
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	58,337,879,914
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	20,135,070,660
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	16,077,414,847
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	365,603,781,537
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	2,573,649,369
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	157,733,613,872
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	112,599,303
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	7,719,409
0.0	391111	Ekuitas	0	16,905,781,871,164
JUMLAH			22,584,081,503,036	22,584,081,503,036



NERACA PERCOBAAN AKRUAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 2:27 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	777,785	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	435,883,927	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	14,384,908,731	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	1,078,586,075	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	34,616,450	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	12,445,738,924	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	37,825,032	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	375,796,795	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	11,665,738,888
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	189,125
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan	0	1,878,984
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,505,124,319	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	619,739,631	0
0.0	117114	Suku Cadang	81,679,487	0
0.0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada	16,151,172,954	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	54,136,639,215	0
0.0	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada	28,585,616,694	0
0.0	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	135,560,257,780	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	121,569,579,244	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	8,196,420,722	0
0.0	117129	Persediaan Dalam Proses	1,599,201,550	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	1,254,289,814	0
0.0	131111	Tanah	13,259,318,847,812	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,639,205,845,247	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,939,685,514,821	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	77,244,178,316	0
0.0	134112	Irigasi	47,693,107,897	0
0.0	134113	Jaringan	170,488,331,630	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	15,867,663,868	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	64,979,197,876	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	19,373,327,423	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,705,153,139,089
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	641,689,526,713
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	60,173,907,946
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	32,384,637,603
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	75,944,217,217
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	8,343,074,288
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti	17,850,089,235	0

hu f

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 2:27 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan	0	17,850,089,235
0.0	162151	Software	703,634,528,415	0
0.0	162161	Lisensi	93,796,633,828	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	2,271,764,600	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	2,283,518,750	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	228,247,203,927	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	182,452,165,714	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	156,833,519,275	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	178,776,653,121
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	633,601,535,937
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	16,309,512,607
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	153,309,868,425
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	30,830,786,970
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	522,146,747
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	192,683,035,207
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	2,854,681,833
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	332,630,895,244
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	777,785
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	397,356,643
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,672,672,202,343
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,229,296,647,039	0
0.0	313211	Transfer Keluar	121,306,306,662	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	129,783,153,458
0.0	391111	Ekuitas	0	16,905,781,871,164
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	857,981,630	0
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	8,162,579,756
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	168,741,007
0.0	391119	Koreksi Lainnya	227,927,453	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	145,099,779,942
0.0	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	263,025,588	0
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,469,072,871
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	888,600
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,169,718,497
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	640,548,092
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,496,210,956
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	188,828,705
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	64,272,000
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	248,000,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 2:27 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	16,447,015,628
3.0	425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian	0	1,124,000,000
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	368,969,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	59,806,240,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	4,889,212,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	919,211,899,000
3.0	425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	130,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	20,900,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	798,234,027
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	500,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	119,072,918
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	20,616,902,249
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	2,000,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	21,841,905
3.0	491111	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	0	21,785,655
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	267,487,327,576	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	3,585,080	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	15,727,383,237	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	4,163,444,521	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	9,145,931,450	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	24,141,986,171	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	3,160,174,944	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	11,563,941,110	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	35,916,440,150	0
3.0	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	70,275,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	254,690,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	6,592,546,883	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	10,211,776,300	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	2,447,746,800	0
3.0	511194	Beban Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS	77,200,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	2,493,260,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	24,720,604,500	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	411,851	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,512,330,446	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	435,507,062	0
3.0	511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	68,125,000	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	705,409,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	1,499,075,895	0

hu f

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 2:27 PM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	5,268,402,850	0
3.0	511631	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	16,600,000	0
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	54,150,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	1,216,280,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	12,269,222,700	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	1,437,659,500	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	418,197,298,157	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	30,414,424,822	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	168,474,243,052	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	39,884,566,839	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1,697,550,593	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	350,045,380	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	9,844,532,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	55,834,606,157	0
3.0	521211	Beban Bahan	99,333,506,393	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	9,651,193,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	155,925,892,911	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,181,817,532	0
3.0	521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	35,981,482	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	38,468,540,100	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	311,399,817	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	4,907,517,032	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	977,897,737	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	2,225,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	222,922,287,983	0
3.0	522141	Beban Sewa	109,716,612,654	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	32,672,896,028	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	572,010,203,195	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	90,603,706,299	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4,444,370,345	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36,353,417,113	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,000,000	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	4,931,902,288	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	2,229,658,824	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	204,219,192,916	0
3.0	524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap	979,294,610	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,542,243,268	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23,095,895,407	0

hu f

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 2:27 PM

Halaman : 5

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20,995,536,898	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	4,049,202,946	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	278,719,112	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	324,471,497,742	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	79,742,066,394	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	4,687,669,187	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1,121,684,391	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	4,687,390,622	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	73,955,098	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	39,595,673,606	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	8,267,094,366	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	429,953,701	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	14,329,974,520	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,717,798,446	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	605,260,171	0
3.0	593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau	5,436,558,750	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	1,815,504,677	0
3.0	593125	Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk	274,817,795	0
3.0	593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada	19,530,942,523	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	267,294,125,906	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	2,221,427,799	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	661,835,625	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	189,125	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	23,796,700,091	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	91,767,222	0
3.0	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	219,283,572	0
JUMLAH			27,991,518,219,380	27,991,518,219,380

Keterangan :

FINAL



NERACA PERCOBAAN KAS

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 2:28 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,769,888,073,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,229,296,647,039	0
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	888,600
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,169,718,497
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	640,548,092
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,837,278,420
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	188,828,705
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	64,272,000
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	248,750,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	15,658,456,000
3.0	425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian	0	1,124,000,000
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	375,969,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	59,806,240,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	4,889,212,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	1,095,067,090,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	46,010,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,011,980,429
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	500,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	168,278,274
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	41,794,217,382
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	2,182,540,752
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	21,868,888
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	44,229,894
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	267,668,893,330	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3,643,839	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	60,316
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	3,286,334
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	15,737,855,151	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,165,992,082	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	425,865
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	9,178,777,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	14,725,050
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	43,850,829
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	24,189,225,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,166,536,169	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	11,568,841,530	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	989,740
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	36,000,106,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 2:28 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	70,275,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	254,690,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	6,695,040,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	83,383,117
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	10,184,029,100	0
3.0	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	2,447,746,800	0
3.0	511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS	77,200,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	2,493,260,000	0
3.1	511611	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	0	3,649,100
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	24,949,591,613	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	412,261	0
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	400
3.1	511621	Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	3,203,600
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,552,980,296	0
3.1	511622	Pengembalian Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	768,864
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	436,275,926	0
3.0	511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	72,500,000	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	707,395,930	0
3.1	511625	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	1,593,240
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,500,813,975	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	4,648,472,000	0
3.0	511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	16,600,000	0
3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	54,150,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,283,400,000	0
3.1	511633	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	4,030,000
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	12,385,673,000	0
3.1	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	0	2,675,450
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1,419,880,000	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan	0	2,020,274
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	411,445,076,427	0
3.1	512414	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan	0	1,038,559
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	26,412,092,898	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	168,496,804,865	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	35,587,243
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	39,884,566,839	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1,697,550,593	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	350,045,380	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	9,844,532,000	0

hu f

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 2:28 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	55,838,265,357	0
3.0	521211	Belanja Bahan	99,340,301,468	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	6,795,075
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	9,652,468,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,275,000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	155,928,257,911	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	2,365,000
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,981,488,767	0
3.0	521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	35,981,482	0
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	2,497,800
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	15,639,488,744	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	595,875,084	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	39,255,757,133	0
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	300,146,637
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	312,731,890	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	4,891,932,384	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	980,625,907	0
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	2,225,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	223,510,283,465	0
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	6,893,600
3.0	522141	Belanja Sewa	109,714,784,254	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	32,706,151,028	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	33,255,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	525,122,091,493	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	315,292,464
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	90,907,972,331	0
3.1	523112	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan	0	4,691,600
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	2,333,569,954	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4,444,370,345	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36,490,633,956	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	183,441,314
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	1,477,397,917	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,000,000	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4,931,902,288	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	2,229,658,824	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	2,396,639,356
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	206,706,081,272	0
3.0	524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	979,294,610	0

hu f

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 2:28 PM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,543,295,268	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,052,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23,159,019,657	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	63,124,250
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21,016,802,077	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	21,265,179
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	4,237,699,074	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	188,496,128
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	278,719,112	0
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	2,995,100,000	0
3.0	526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada	196,546,791	0
3.0	526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada	1,531,531,200	0
3.0	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	41,117,929,880	0
3.1	526115	Pengembalian Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk	0	65,556,220
3.0	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	266,502,096,241	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	589,799,611,890	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	551,970,289	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,776,334,007	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	23,349,782,513	0
3.0	534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	630,465,000	0
3.0	534121	Belanja Modal Irigasi	2,100,652,800	0
3.0	534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	308,302,500	0
3.0	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	48,840,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	58,163,620,331	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau	333,543,000	0
JUMLAH			5,003,023,024,537	5,003,023,024,537

Keterangan :

FINAL



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT JENIS BELANJA / AKUN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 07/05/26 2:28 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	263,403,712,000	267,990,927,000	267,668,893,330	44,229,894	267,624,663,436	99.88	366,263,564
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,736,000	4,095,000	3,643,839	60,316	3,583,523	88.98	511,477
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	15,987,736,000	15,779,343,000	15,737,855,151	3,286,334	15,734,568,817	99.74	44,774,183
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,520,435,000	4,180,781,000	4,165,992,082	425,865	4,165,566,217	99.65	15,214,783
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	9,330,337,000	9,226,142,000	9,178,777,000	14,725,050	9,164,051,950	99.49	62,090,050
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	23,120,714,000	24,211,231,000	24,189,225,000	43,850,829	24,145,374,171	99.91	65,856,829
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,120,121,000	3,337,818,000	3,166,536,169	0	3,166,536,169	94.87	171,281,831
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	11,719,390,000	11,586,845,000	11,568,841,530	989,740	11,567,851,790	99.84	18,993,210
511129	Belanja Uang Makan PNS	36,396,924,000	36,610,763,000	36,000,106,000	0	36,000,106,000	98.33	610,657,000
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	57,891,000	70,275,000	70,275,000	0	70,275,000	100	0
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	205,800,000	254,690,000	254,690,000	0	254,690,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	6,923,333,000	6,741,082,000	6,695,040,000	83,383,117	6,611,656,883	99.32	129,425,117
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	9,370,468,000	10,184,041,000	10,184,029,100	0	10,184,029,100	100	11,900
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	2,019,696,000	2,447,747,000	2,447,746,800	0	2,447,746,800	100	200
511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri	75,600,000	77,200,000	77,200,000	0	77,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	385,256,893,000	392,702,980,000	391,408,851,001	190,951,145	391,217,899,856	99.67	1,485,080,144
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	2,125,620,000	2,493,260,000	2,493,260,000	0	2,493,260,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	2,125,620,000	2,493,260,000	2,493,260,000	0	2,493,260,000	100	0
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511514	Belanja Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti Atau	0	580,454,000	0	0	0	0	580,454,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	0	580,454,000	0	0	0	0	580,454,000
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	2,391,761,000	25,148,172,000	24,949,591,613	3,649,100	24,945,942,513	99.21	202,229,487
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,062,000	1,724,000	412,261	400	411,861	23.91	1,312,139
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	126,716,000	1,700,449,000	1,552,980,296	3,203,600	1,549,776,696	91.33	150,672,304
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	33,583,000	515,009,000	436,275,926	768,864	435,507,062	84.71	79,501,938
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	61,250,000	76,875,000	72,500,000	0	72,500,000	94.31	4,375,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	339,672,000	880,108,000	707,395,930	0	707,395,930	80.38	172,712,070
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	108,757,000	1,754,843,000	1,500,813,975	1,593,240	1,499,220,735	85.52	255,622,265
511628	Belanja Uang Makan PPPK	526,309,000	4,871,649,000	4,648,472,000	0	4,648,472,000	95.42	223,177,000
511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	1,750,000	16,600,000	16,600,000	0	16,600,000	100	0
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	5,950,000	54,150,000	54,150,000	0	54,150,000	100	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 07/05/26 2:28 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	3,000	1,320,547,000	1,283,400,000	4,030,000	1,279,370,000	97.19	41,177,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	3,596,813,000	36,340,126,000	35,222,592,001	13,245,204	35,209,346,797	96.92	1,130,779,203
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	18,181,784,000	12,650,167,000	12,385,673,000	2,675,450	12,382,997,550	97.91	267,169,450
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	58,100,000	1,550,530,000	1,419,880,000	0	1,419,880,000	91.57	130,650,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	18,239,884,000	14,200,697,000	13,805,553,000	2,675,450	13,802,877,550	97.22	397,819,450
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	432,808,467,000	412,295,223,000	411,445,076,427	2,020,274	411,443,056,153	99.79	852,166,847
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	3,937,160,000	26,841,295,000	26,412,092,898	1,038,559	26,411,054,339	98.4	430,240,661
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	436,745,627,000	439,136,518,000	437,857,169,325	3,058,833	437,854,110,492	99.71	1,282,407,508
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	845,964,837,000	885,454,035,000	880,787,425,327	209,930,632	880,577,494,695	99.47	4,876,540,305
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	173,854,890,000	175,751,760,000	168,496,804,865	35,587,243	168,461,217,622	95.87	7,290,542,378
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	47,222,316,000	39,911,140,000	39,884,566,839	0	39,884,566,839	99.93	26,573,161
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2,650,596,000	1,699,161,000	1,697,550,593	0	1,697,550,593	99.91	1,610,407
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	975,137,000	353,044,000	350,045,380	0	350,045,380	99.15	2,998,620
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	17,509,361,000	10,107,761,000	9,844,532,000	0	9,844,532,000	97.4	263,229,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	61,770,257,000	57,647,154,000	55,838,265,357	0	55,838,265,357	96.86	1,808,888,643
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	303,982,557,000	285,470,020,000	276,111,765,034	35,587,243	276,076,177,791	96.72	9,393,842,209
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	143,332,566,000	126,814,415,000	99,340,301,468	6,795,075	99,333,506,393	78.34	27,480,908,607
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	20,281,658,000	10,555,444,000	9,652,468,000	1,275,000	9,651,193,000	91.45	904,251,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	162,806,570,000	156,347,403,000	155,928,257,911	2,365,000	155,925,892,911	99.73	421,510,089
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	474,020,000	2,259,880,000	1,981,488,767	0	1,981,488,767	87.68	278,391,233
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	24,000,000	35,991,000	35,981,482	0	35,981,482	99.97	9,518
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	10,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	326,928,814,000	296,013,133,000	266,938,497,628	10,435,075	266,928,062,553	90.18	29,085,070,447
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	33,279,496,000	19,397,402,000	15,639,488,744	2,497,800	15,636,990,944	80.63	3,760,411,056
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	1,500,000	10,000	0	0	0	0	10,000
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	600,260,000	595,877,000	595,875,084	0	595,875,084	100	1,916
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	33,881,256,000	19,993,289,000	16,235,363,828	2,497,800	16,232,866,028	81.2	3,760,422,972
5221	Belanja Jasa							

hu f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 07/05/26 2:28 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522111	Belanja Langganan Listrik	43,965,213,000	39,204,683,000	39,255,757,133	300,146,637	38,955,610,496	100.13	249,072,504
522112	Belanja Langganan Telepon	1,027,486,000	355,964,000	312,731,890	0	312,731,890	87.85	43,232,110
522113	Belanja Langganan Air	5,865,038,000	4,893,755,000	4,891,932,384	0	4,891,932,384	99.96	1,822,616
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,177,434,000	981,202,000	980,625,907	0	980,625,907	99.94	576,093
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	2,750,000	2,750,000	2,225,000	0	2,225,000	80.91	525,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	313,499,227,000	294,336,916,000	223,510,283,465	0	223,510,283,465	75.94	70,826,632,535
522141	Belanja Sewa	125,155,592,000	122,449,534,000	109,714,784,254	6,893,600	109,707,890,654	89.6	12,741,643,346
522151	Belanja Jasa Profesi	60,521,460,000	43,388,723,000	32,706,151,028	33,255,000	32,672,896,028	75.38	10,715,826,972
522191	Belanja Jasa Lainnya	675,724,898,000	856,999,231,000	525,122,091,493	315,292,464	524,806,799,029	61.27	332,192,431,971
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,226,939,098,000	1,362,612,758,000	936,496,582,554	655,587,701	935,840,994,853	68.73	426,771,763,147
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	79,618,201,000	91,709,128,000	90,907,972,331	0	90,907,972,331	99.13	801,155,669
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,474,672,000	2,334,930,000	2,333,569,954	4,691,600	2,328,878,354	99.94	6,051,646
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4,479,676,000	4,465,262,000	4,444,370,345	0	4,444,370,345	99.53	20,891,655
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41,416,192,000	37,553,929,000	36,490,633,956	183,441,314	36,307,192,642	97.17	1,246,736,358
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,877,745,000	1,510,471,000	1,477,397,917	0	1,477,397,917	97.81	33,073,083
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	100	0
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4,450,760,000	5,001,895,000	4,931,902,288	0	4,931,902,288	98.6	69,992,712
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,166,696,000	2,230,853,000	2,229,658,824	0	2,229,658,824	99.95	1,194,176
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	136,497,942,000	144,820,468,000	142,829,505,615	188,132,914	142,641,372,701	98.63	2,179,095,299
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	359,732,885,000	363,206,619,000	206,706,081,272	2,396,639,356	204,309,441,916	56.91	158,897,177,084
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4,671,477,000	1,189,297,000	979,294,610	0	979,294,610	82.34	210,002,390
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,630,530,000	9,176,718,000	7,543,295,268	1,052,000	7,542,243,268	82.2	1,634,474,732
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	185,305,429,000	89,741,951,000	23,159,019,657	63,124,250	23,095,895,407	25.81	66,646,055,593
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	83,731,692,000	65,956,397,000	21,016,802,077	21,265,179	20,995,536,898	31.86	44,960,860,102
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	646,072,013,000	529,270,982,000	259,404,492,884	2,482,080,785	256,922,412,099	49.01	272,348,569,901
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	28,152,388,000	22,004,902,000	4,237,699,074	188,496,128	4,049,202,946	19.26	17,955,699,054
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	11,218,984,000	11,497,727,000	278,719,112	0	278,719,112	2.42	11,219,007,888
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	39,371,372,000	33,502,629,000	4,516,418,186	188,496,128	4,327,922,058	13.48	29,174,706,942
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	0	2,995,100,000	2,995,100,000	0	2,995,100,000	100	0
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada	0	196,547,000	196,546,791	0	196,546,791	100	209
526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada	0	1,531,532,000	1,531,531,200	0	1,531,531,200	100	800

hu f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 07/05/26 2:28 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	0	41,117,930,000	41,117,929,880	65,556,220	41,052,373,660	100	65,556,340
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	500,000,000	46,341,109,000	45,841,107,871	65,556,220	45,775,551,651	98.92	565,557,349
5262	Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas							
526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5262	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	291,295,284,000	270,814,384,000	266,502,096,241	0	266,502,096,241	98.41	4,312,287,759
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	291,295,284,000	270,814,384,000	266,502,096,241	0	266,502,096,241	98.41	4,312,287,759
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,006,468,336,000	2,989,838,772,000	2,214,875,829,841	3,628,373,866	2,211,247,455,975	74.08	778,591,316,025
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	877,765,549,000	859,037,655,000	589,799,611,890	0	589,799,611,890	68.66	269,238,043,110
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	3,700,000,000	2,055,959,000	551,970,289	0	551,970,289	26.85	1,503,988,711
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	881,465,549,000	861,093,614,000	590,351,582,179	0	590,351,582,179	68.56	270,742,031,821
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,000,000,000	2,784,356,000	2,776,334,007	0	2,776,334,007	99.71	8,021,993
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	10,022,340,000	23,548,764,000	23,349,782,513	0	23,349,782,513	99.16	198,981,487
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	11,022,340,000	26,333,120,000	26,126,116,520	0	26,126,116,520	99.21	207,003,480
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	632,112,000	630,465,000	0	630,465,000	99.74	1,647,000
534121	Belanja Modal Irigasi	0	2,100,653,000	2,100,652,800	0	2,100,652,800	100	200
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	310,000,000	308,302,500	0	308,302,500	99.45	1,697,500
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	400,000,000	50,000,000	48,840,000	0	48,840,000	97.68	1,160,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	400,000,000	3,092,765,000	3,088,260,300	0	3,088,260,300	99.85	4,504,700
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	46,152,456,000	62,213,244,000	58,163,620,331	0	58,163,620,331	93.49	4,049,623,669
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	855,000,000	526,500,000	333,543,000	0	333,543,000	63.35	192,957,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	47,007,456,000	62,739,744,000	58,497,163,331	0	58,497,163,331	93.24	4,242,580,669
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	939,895,345,000	953,259,243,000	678,063,122,330	0	678,063,122,330	71.13	275,196,120,670
	JUMLAH BELANJA	4,792,328,518,000	4,828,552,050,000	3,773,726,377,498	3,838,304,498	3,769,888,073,000	78.15	1,058,663,977,000



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATKER

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 2:29 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	SEKRETARIAT JENDERAL							
010010100KP	BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA							
403200	SEKRETARIAT JENDERAL	453,146,201,000	547,171,051,000	542,406,553,325	253,378,266	542,153,175,059	99.08	5,017,875,941
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA	453,146,201,000	547,171,051,000	542,406,553,325	253,378,266	542,153,175,059	99.13	5,017,875,941
010010200KP	BA(010) ES1(01) JAWA BARAT							
448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	438,497,020,000	423,391,008,000	421,839,916,013	142,500,571	421,697,415,442	99.6	1,693,592,558
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) JAWA BARAT	438,497,020,000	423,391,008,000	421,839,916,013	142,500,571	421,697,415,442	99.63	1,693,592,558
010010800KD	BA(010) ES1(01) SUMATERA BARAT							
677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	25,358,807,000	24,124,588,000	24,122,235,008	1,804	24,122,233,204	99.99	2,354,796
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) SUMATERA BARAT	25,358,807,000	24,124,588,000	24,122,235,008	1,804	24,122,233,204	99.99	2,354,796
010011300KD	BA(010) ES1(01) KALIMANTAN BARAT							
683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	29,999,184,000	26,734,769,000	26,734,739,950	0	26,734,739,950	100	29,050
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) KALIMANTAN BARAT	29,999,184,000	26,734,769,000	26,734,739,950	0	26,734,739,950	100	29,050
010011700KD	BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA							
677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	28,332,237,000	25,698,341,000	25,695,752,370	983	25,695,751,387	99.99	2,589,613
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA	28,332,237,000	25,698,341,000	25,695,752,370	983	25,695,751,387	99.99	2,589,613
010011900KD	BA(010) ES1(01) SULAWESI SELATAN							
677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	31,950,262,000	28,685,936,000	28,684,406,673	1,266,465	28,683,140,208	99.99	2,795,792
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) SULAWESI SELATAN	31,950,262,000	28,685,936,000	28,684,406,673	1,266,465	28,683,140,208	99.99	2,795,792
010012300KD	BA(010) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT							
683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	30,461,186,000	28,281,918,000	28,281,877,135	2,370,535	28,279,506,600	99.99	2,411,400
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT	30,461,186,000	28,281,918,000	28,281,877,135	2,370,535	28,279,506,600	100	2,411,400
010012500KD	BA(010) ES1(01) PAPUA							
683091	IPDN KAMPUS PAPUA	33,656,912,000	30,717,083,000	30,716,940,731	192	30,716,940,539	100	142,461
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) PAPUA	33,656,912,000	30,717,083,000	30,716,940,731	192	30,716,940,539	100	142,461
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	89,271,812,000	68,647,209,000	67,959,161,661	340,883,480	67,618,278,181	98.5	1,028,930,819
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	89,271,812,000	68,647,209,000	67,959,161,661	340,883,480	67,618,278,181	99	1,028,930,819
	JUMLAH BELANJA 01	1,160,673,621,000	1,203,451,903,000	1,196,441,582,866	740,402,296	1,195,701,180,570	99.42	7750722430
02	INSPEKTORAT JENDERAL							
010020100KP	BA(010) ES1(02) DKI JAKARTA							
027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	84,400,737,000	74,902,301,000	75,012,285,983	132,773,348	74,879,512,635	99.97	22,788,365
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(02) DKI JAKARTA	84,400,737,000	74,902,301,000	75,012,285,983	132,773,348	74,879,512,635	100.15	22,788,365
	JUMLAH BELANJA 02	84,400,737,000	74,902,301,000	75,012,285,983	132,773,348	74,879,512,635	100.15	22788365

tu f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 2:29 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM							
010030100KP	BA(010) ES1(03) DKI JAKARTA							
027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	234,506,301,000	228,816,877,000	217,120,382,866	3,851,707	217,116,531,159	94.89	11,700,345,841
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(03) DKI JAKARTA	234,506,301,000	228,816,877,000	217,120,382,866	3,851,707	217,116,531,159	94.89	11,700,345,841
	JUMLAH BELANJA 03	234,506,301,000	228,816,877,000	217,120,382,866	3,851,707	217,116,531,159	94.89	11700345841
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN							
0003100DK	Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo							
319061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	1,627,421,000	163,000,000	162,900,000	0	162,900,000	99.94	100,000
	JUMLAH BELANJA Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo	1,627,421,000	163,000,000	162,900,000	0	162,900,000	99.94	100,000
010040100KP	BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA							
027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	120,972,179,000	215,385,561,000	127,421,442,990	141,703,301	127,279,739,689	59.09	88,105,821,311
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA	120,972,179,000	215,385,561,000	127,421,442,990	141,703,301	127,279,739,689	59.16	88,105,821,311
010040400	BA(010) ES1(04) DI YOGYAKARTA							
049061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	1,670,624,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) DI YOGYAKARTA	1,670,624,000	0	0	0	0		0
010040700	BA(010) ES1(04) SUMATERA UTARA							
079078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	2,096,271,000	49,105,000	49,105,000	0	49,105,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) SUMATERA UTARA	2,096,271,000	49,105,000	49,105,000	0	49,105,000	100	0
010040800	BA(010) ES1(04) SUMATERA BARAT							
089106	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	1,916,636,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) SUMATERA BARAT	1,916,636,000	0	0	0	0		0
010040900DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU							
099438	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	2,118,909,000	88,520,000	88,318,940	0	88,318,940	99.77	201,060
433317	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU	239,745,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	2,358,654,000	88,520,000	88,318,940	0	88,318,940	99.77	201,060
010041400DK	BA(010) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH Dekonsentrasi							
149072	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1,653,560,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH Dekonsentrasi	1,653,560,000	0	0	0	0		0
010041900	BA(010) ES1(04) SULAWESI SELATAN							
199080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	1,833,518,000	57,948,000	57,947,500	0	57,947,500	100	500
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) SULAWESI SELATAN	1,833,518,000	57,948,000	57,947,500	0	57,947,500	100	500
010042000	BA(010) ES1(04) SULAWESI TENGGARA							
209071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1,417,242,000	0	0	0	0	0	0

he f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 2:29 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) SULAWESI TENGGARA	1,417,242,000	0	0	0	0		0
010042100 219062	BA(010) ES1(04) MALUKU SEKRETARIAT DAERAH PROP. MALUKU	1,694,913,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) MALUKU	1,694,913,000	0	0	0	0		0
010042600 269093 433344	BA(010) ES1(04) BENGKULU SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	1,804,312,000 236,923,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) BENGKULU	2,041,235,000	0	0	0	0		0
010042900 299348	BA(010) ES1(04) BANTEN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	1,608,468,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) BANTEN	1,608,468,000	0	0	0	0		0
010043000 309148 433343	BA(010) ES1(04) BANGKA BELITUNG SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANGKA BELITUNG	1,651,100,000 145,584,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) BANGKA BELITUNG	1,796,684,000	0	0	0	0		0
010043400DK 340166	BA(010)ES(04) SULAWESI BARAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	1,634,812,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA BA(010)ES(04) SULAWESI BARAT	1,634,812,000	0	0	0	0		0
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
019080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	376,431,000	0	0	0	0	0	0
020103	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	818,750,000	0	0	0	0	0	0
029134	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	1,919,869,000	0	0	0	0	0	0
029142	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT	369,760,000	0	0	0	0	0	0
030031	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	470,000,000	0	0	0	0	0	0
039667	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	2,012,403,000	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	100	0
039902	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH	392,845,000	0	0	0	0	0	0
045160	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI DI YOGYAKARTA	588,325,000	0	0	0	0	0	0
049073	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DI YOGYAKARTA	311,160,000	0	0	0	0	0	0
050037	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JAWA TIMUR	884,129,000	0	0	0	0	0	0
059663	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	1,031,295,000	0	0	0	0	0	0
059667	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	470,000,000	0	0	0	0	0	0

hu f

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 2:29 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
060016	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI ACEH	777,922,000	0	0	0	0	0	0
060017	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ACEH	379,584,000	200,000,000	194,890,000	0	194,890,000	97.45	5,110,000
069084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	1,970,899,000	0	0	0	0	0	0
079108	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA UTARA	750,597,000	0	0	0	0	0	0
090058	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RIAU	369,384,000	0	0	0	0	0	0
099403	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. RIAU	317,174,000	0	0	0	0	0	0
100081	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. JAMBI	689,631,000	0	0	0	0	0	0
109074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	1,832,800,000	96,176,000	96,176,000	0	96,176,000	100	0
110018	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	340,000,000	0	0	0	0	0	0
119082	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	1,784,910,000	203,562,000	203,450,766	0	203,450,766	99.95	111,234
119113	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN	728,618,000	0	0	0	0	0	0
129074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	1,720,675,000	0	0	0	0	0	0
129097	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG	369,040,000	0	0	0	0	0	0
129098	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG	211,620,000	0	0	0	0	0	0
139078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1,747,589,000	52,500,000	52,167,143	0	52,167,143	99.37	332,857
139103	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	350,000,000	0	0	0	0	0	0
139110	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KALIMANTAN BARAT	362,400,000	0	0	0	0	0	0
149099	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	736,356,000	0	0	0	0	0	0
149130	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	162,296,000	0	0	0	0	0	0
159071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1,711,070,000	0	0	0	0	0	0
159182	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	687,141,000	0	0	0	0	0	0
159260	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. KALIMANTAN SELATAN	350,000,000	0	0	0	0	0	0
160035	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KALIMANTAN TIMUR	699,528,000	0	0	0	0	0	0
169185	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	838,924,000	0	0	0	0	0	0
170041	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SULAWESI UTARA	400,404,000	0	0	0	0	0	0
179088	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA	161,088,000	0	0	0	0	0	0
179223	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	2,035,232,000	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000	100	0
179317	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	569,747,000	0	0	0	0	0	0
189087	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	1,678,479,000	8,778,000	8,777,678	0	8,777,678	100	322
199109	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN	772,600,000	0	0	0	0	0	0

hu f

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 2:29 PM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
200100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. SULAWESI TENGGARA	350,000,000	0	0	0	0	0	0
209093	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	368,190,000	0	0	0	0	0	0
209095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	176,331,000	0	0	0	0	0	0
219162	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU	777,590,000	0	0	0	0	0	0
220015	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BALI	736,503,000	0	0	0	0	0	0
229068	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	1,670,692,000	33,890,000	33,889,040	0	33,889,040	100	960
229082	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI	400,000,000	0	0	0	0	0	0
239108	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	330,600,000	0	0	0	0	0	0
239236	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1,827,734,000	0	0	0	0	0	0
239312	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	690,940,000	0	0	0	0	0	0
240055	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	420,000,000	0	0	0	0	0	0
249136	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1,998,927,000	0	0	0	0	0	0
249138	BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	569,746,000	8,416,000	8,415,235	0	8,415,235	99.99	765
249141	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	406,803,000	0	0	0	0	0	0
249174	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	267,924,000	0	0	0	0	0	0
250048	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	825,426,000	0	0	0	0	0	0
259084	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	148,193,000	0	0	0	0	0	0
259245	BADAN PERBATASAN KERJASAMA DAERAH PROV. PAPUA	409,999,000	0	0	0	0	0	0
265165	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BENGKULU	330,000,000	0	0	0	0	0	0
289095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	153,136,000	0	0	0	0	0	0
289174	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	1,693,555,000	0	0	0	0	0	0
289177	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI MALUKU UTARA	320,000,000	0	0	0	0	0	0
290033	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BANTEN	300,000,000	0	0	0	0	0	0
290100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN	333,330,000	0	0	0	0	0	0
309220	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	330,000,000	0	0	0	0	0	0
310097	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI GORONTALO	350,000,000	0	0	0	0	0	0
319137	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO	360,840,000	0	0	0	0	0	0

hu f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 2:29 PM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
320098	BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	400,000,000	0	0	0	0	0	0
329116	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1,637,070,000	0	0	0	0	0	0
330099	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PAPUA BARAT	459,856,000	0	0	0	0	0	0
339161	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	944,550,000	0	0	0	0	0	0
340175	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI SULAWESI BARAT	350,000,000	0	0	0	0	0	0
349011	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT	146,113,000	21,325,000	21,155,904	0	21,155,904	99.21	169,096
350062	BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	527,847,000	0	0	0	0	0	0
359002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	144,629,000	0	0	0	0	0	0
417697	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1,601,249,000	8,970,000	8,970,000	0	8,970,000	100	0
433316	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT	253,000,000	0	0	0	0	0	0
433318	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	222,487,000	0	0	0	0	0	0
433341	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI	238,077,000	23,806,000	23,806,000	0	23,806,000	100	0
433342	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	254,861,000	0	0	0	0	0	0
433345	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN	150,727,000	0	0	0	0	0	0
433347	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	153,083,000	0	0	0	0	0	0
433348	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	165,549,000	0	0	0	0	0	0
433349	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	147,035,000	0	0	0	0	0	0
433350	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	163,405,000	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000	100	0
433351	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN	191,233,000	0	0	0	0	0	0
433352	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	156,799,000	0	0	0	0	0	0
433353	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU	159,165,000	0	0	0	0	0	0
484101	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH	269,330,000	0	0	0	0	0	0
484102	BAPPEDA PROVINSI ACEH	428,387,000	0	0	0	0	0	0
484103	INSPEKTORAT PROVINSI ACEH	289,116,000	0	0	0	0	0	0
484105	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA	281,331,000	0	0	0	0	0	0
484106	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA (BAPPELITBANG	491,278,000	0	0	0	0	0	0

hu f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 2:29 PM
Halaman : 7
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	PROVINSI SUMATERA UTARA)							
484107	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA	304,764,000	0	0	0	0	0	0
484109	BAPPEDA PROVINSI RIAU	433,081,000	0	0	0	0	0	0
484110	INSPEKTORAT PROVINSI RIAU	254,995,000	0	0	0	0	0	0
484112	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	389,252,000	0	0	0	0	0	0
484113	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	127,384,000	0	0	0	0	0	0
484115	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	409,877,000	0	0	0	0	0	0
484116	INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI	141,592,000	0	0	0	0	0	0
484118	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	459,092,000	0	0	0	0	0	0
484119	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	269,926,000	0	0	0	0	0	0
484121	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	434,541,000	0	0	0	0	0	0
484122	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	156,280,000	0	0	0	0	0	0
484124	BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	399,613,000	0	0	0	0	0	0
484125	INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	148,316,000	0	0	0	0	0	0
484127	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	404,655,000	0	0	0	0	0	0
484128	INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	136,955,000	0	0	0	0	0	0
484131	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	357,561,000	0	0	0	0	0	0
484132	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	130,710,000	0	0	0	0	0	0
484134	BAPPEDA PROVINSI BANTEN	394,578,000	0	0	0	0	0	0
484135	INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN	120,959,000	0	0	0	0	0	0
484137	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT	276,487,000	0	0	0	0	0	0
484138	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	470,727,000	0	0	0	0	0	0
484139	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT	198,469,000	0	0	0	0	0	0
484145	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	218,617,000	0	0	0	0	0	0
484146	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	452,663,000	0	0	0	0	0	0
484147	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	193,541,000	0	0	0	0	0	0
484149	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIY	143,230,000	0	0	0	0	0	0
484150	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH DIY	387,265,000	0	0	0	0	0	0
484151	INSPEKTORAT PROVINSI DI YOGYAKARTA	113,687,000	0	0	0	0	0	0
484153	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR	216,994,000	0	0	0	0	0	0
484154	BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR	398,520,000	0	0	0	0	0	0
484155	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	135,374,000	0	0	0	0	0	0

hu f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 2:29 PM
Halaman : 8
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
484157	BAPPEDA PROVINSI BALI	400,144,000	0	0	0	0	0	0
484158	INSPEKTORAT PROVINSI BALI	126,741,000	0	0	0	0	0	0
484160	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	409,727,000	0	0	0	0	0	0
484161	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	131,764,000	0	0	0	0	0	0
484163	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	477,970,000	101,446,000	101,443,741	0	101,443,741	100	2,259
484164	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	286,267,000	0	0	0	0	0	0
484166	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	968,951,000	0	0	0	0	0	0
484167	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	134,770,000	0	0	0	0	0	0
484169	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	413,996,000	0	0	0	0	0	0
484170	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	135,557,000	0	0	0	0	0	0
484172	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	158,618,000	0	0	0	0	0	0
484173	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	414,296,000	0	0	0	0	0	0
484174	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	125,722,000	0	0	0	0	0	0
484176	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	235,095,000	0	0	0	0	0	0
484177	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	306,388,000	0	0	0	0	0	0
484178	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	244,180,000	0	0	0	0	0	0
484180	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	395,311,000	0	0	0	0	0	0
484181	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	116,502,000	0	0	0	0	0	0
484183	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA	456,173,000	0	0	0	0	0	0
484184	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA	180,127,000	0	0	0	0	0	0
484187	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	391,480,000	0	0	0	0	0	0
484188	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	119,545,000	0	0	0	0	0	0
484190	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT	386,956,000	0	0	0	0	0	0
484191	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT	116,669,000	0	0	0	0	0	0
484193	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	426,836,000	0	0	0	0	0	0
484194	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	162,663,000	0	0	0	0	0	0
484196	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	418,456,000	0	0	0	0	0	0
484197	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	117,052,000	0	0	0	0	0	0
484199	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	425,948,000	0	0	0	0	0	0
484200	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA	146,069,000	0	0	0	0	0	0
484202	BAPPEDA PROVINSI MALUKU	901,382,000	0	0	0	0	0	0
484203	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU	132,756,000	0	0	0	0	0	0
484205	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	401,930,000	0	0	0	0	0	0

hu f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 2:29 PM
Halaman : 9
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
484206	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA	123,322,000	0	0	0	0	0	0
484208	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	303,099,000	0	0	0	0	0	0
484209	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	123,645,000	0	0	0	0	0	0
484211	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT	208,814,000	0	0	0	0	0	0
484212	BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT	296,527,000	0	0	0	0	0	0
484213	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT	225,498,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	82,149,962,000	852,769,000	847,041,507	0	847,041,507	99.33	5,727,493
	JUMLAH BELANJA 04	226,472,179,000	216,596,903,000	128,626,755,937	141,703,301	128,485,052,636	59.39	88111850364
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA							
010050100KP	BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA							
027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	103,185,777,000	116,979,669,000	105,469,119,800	157,406,536	105,311,713,264	90.03	11,667,955,736
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA	103,185,777,000	116,979,669,000	105,469,119,800	157,406,536	105,311,713,264	90.16	11,667,955,736
010050400KD	BA(010) ES1(05) DI YOGYAKARTA							
028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	17,807,583,000	18,154,587,000	16,848,967,517	7,100,898	16,841,866,619	92.77	1,312,720,381
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) DI YOGYAKARTA	17,807,583,000	18,154,587,000	16,848,967,517	7,100,898	16,841,866,619	92.81	1,312,720,381
010050500KD	BA(010) ES1(05) JAWA TIMUR							
028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	15,025,263,000	15,386,593,000	14,455,850,958	96,486,490	14,359,364,468	93.32	1,027,228,532
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) JAWA TIMUR	15,025,263,000	15,386,593,000	14,455,850,958	96,486,490	14,359,364,468	93.95	1,027,228,532
010051200KD	BA(010) ES1(05) LAMPUNG							
613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	15,073,792,000	15,249,975,000	14,900,169,247	1,490,487	14,898,678,760	97.7	351,296,240
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) LAMPUNG	15,073,792,000	15,249,975,000	14,900,169,247	1,490,487	14,898,678,760	97.71	351,296,240
	JUMLAH BELANJA 05	151,092,415,000	165,770,824,000	151,674,107,522	262,484,411	151,411,623,111	91.5	14359200889
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH							
010060100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada							
039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	223,283,824,000	416,948,656,000	356,816,541,273	253,366,209	356,563,175,064	85.52	60,385,480,936
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	223,283,824,000	416,948,656,000	356,816,541,273	253,366,209	356,563,175,064	85.58	60,385,480,936
	JUMLAH BELANJA 06	223,283,824,000	416,948,656,000	356,816,541,273	253,366,209	356,563,175,064	85.58	60385480936
07	DITJEN OTONOMI DAERAH							
010070100KP	BA(010) ES1(07) DKI JAKARTA							
621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	99,139,263,000	95,199,015,000	71,440,393,395	154,642,918	71,285,750,477	74.88	23,913,264,523
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(07) DKI JAKARTA	99,139,263,000	95,199,015,000	71,440,393,395	154,642,918	71,285,750,477	75.04	23,913,264,523
	JUMLAH BELANJA 07	99,139,263,000	95,199,015,000	71,440,393,395	154,642,918	71,285,750,477	75.04	23913264523
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
010080100KP	BA(010) ES1(08) DKI JAKARTA							

hu f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 2:29 PM
Halaman : 10
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,223,059,937,000	2,001,814,306,000	1,188,968,100,608	614,720,508	1,188,353,380,100	59.36	813,460,925,900
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(08) DKI JAKARTA	2,223,059,937,000	2,001,814,306,000	1,188,968,100,608	614,720,508	1,188,353,380,100	59.39	813,460,925,900
	JUMLAH BELANJA 08	2,223,059,937,000	2,001,814,306,000	1,188,968,100,608	614,720,508	1,188,353,380,100	59.39	813460925900
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH							
010090100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI							
662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	110,291,004,000	109,386,087,000	78,250,597,845	88,810,340	78,161,787,505	71.45	31,224,299,495
	JUMLAH BELANJA SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	110,291,004,000	109,386,087,000	78,250,597,845	88,810,340	78,161,787,505	71.54	31,224,299,495
	JUMLAH BELANJA 09	110,291,004,000	109,386,087,000	78,250,597,845	88,810,340	78,161,787,505	71.54	31224299495
11	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI							
010110100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI							
403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	58,608,338,000	57,481,498,000	50,937,321,342	5,819,988	50,931,501,354	88.61	6,549,996,646
	JUMLAH BELANJA SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	58,608,338,000	57,481,498,000	50,937,321,342	5,819,988	50,931,501,354	88.62	6,549,996,646
	JUMLAH BELANJA 11	58,608,338,000	57,481,498,000	50,937,321,342	5,819,988	50,931,501,354	88.62	6549996646
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
010120100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada							
403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	118,584,140,000	124,879,480,000	125,458,647,824	1,418,914,508	124,039,733,316	99.33	839,746,684
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	118,584,140,000	124,879,480,000	125,458,647,824	1,418,914,508	124,039,733,316	100.46	839,746,684
010120200KD	BA(010) ES1(12) JAWA BARAT							
403216	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	25,511,026,000	33,069,255,000	32,977,567,171	930,530	32,976,636,641	99.72	92,618,359
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) JAWA BARAT	25,511,026,000	33,069,255,000	32,977,567,171	930,530	32,976,636,641	99.72	92,618,359
010120400KD	BA(010) ES1(12) DI YOGYAKARTA							
027114	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	26,243,013,000	32,762,103,000	32,730,079,239	6,791,327	32,723,287,912	99.88	38,815,088
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) DI YOGYAKARTA	26,243,013,000	32,762,103,000	32,730,079,239	6,791,327	32,723,287,912	99.9	38,815,088
010120800KD	BA(010) ES1(12) SUMATERA BARAT							
506137	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	17,370,812,000	23,224,312,000	23,079,913,327	7,541,161	23,072,372,166	99.35	151,939,834
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) SUMATERA BARAT	17,370,812,000	23,224,312,000	23,079,913,327	7,541,161	23,072,372,166	99.38	151,939,834
010121900KD	BA(010) ES1(12) SULAWESI SELATAN							
027177	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	21,718,866,000	22,896,330,000	22,893,928,322	2,846,864	22,891,081,458	99.98	5,248,542
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) SULAWESI SELATAN	21,718,866,000	22,896,330,000	22,893,928,322	2,846,864	22,891,081,458	99.99	5,248,542
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI	11,373,042,000	21,352,200,000	21,298,171,978	2,705,082	21,295,466,896	99.73	56,733,104

hu f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 2:29 PM
Halaman : 11
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	KEWILAYAHAN							
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	11,373,042,000	21,352,200,000	21,298,171,978	2,705,082	21,295,466,896	99.75	56,733,104
	JUMLAH BELANJA 12	220,800,899,000	258,183,680,000	258,438,307,861	1,439,729,472	256,998,578,389	100.1	1185101611
	JUMLAH BELANJA	4,792,328,518,000	4,828,552,050,000	3,773,726,377,498	3,838,304,498	3,769,888,073,000	78.15	1,058,663,977,000

hu f



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 2:29 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	SEKRETARIAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	367,687,066,000	377,853,417,000	375,459,164,127	68,531,960	375,390,632,167	99.35	2,462,784,833
52	BELANJA BARANG	710,546,015,000	630,308,793,000	626,914,289,732	671,870,336	626,242,419,396	99.35	4,066,373,604
53	BELANJA MODAL	82,440,540,000	195,289,693,000	194,068,129,007	0	194,068,129,007	99.37	1,221,563,993
	JUMLAH BELANJA (01) SEKRETARIAT JENDERAL	1,160,673,621,000	1,203,451,903,000	1,196,441,582,866	740,402,296	1,195,701,180,570	99.42	7,750,722,430
02	INSPEKTORAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	44,963,728,000	47,723,663,000	47,729,890,044	25,954,699	47,703,935,345	99.96	19,727,655
52	BELANJA BARANG	37,884,509,000	26,924,670,000	27,028,428,069	106,818,649	26,921,609,420	99.99	3,060,580
53	BELANJA MODAL	1,552,500,000	253,968,000	253,967,870	0	253,967,870	100	130
	JUMLAH BELANJA (02) INSPEKTORAT JENDERAL	84,400,737,000	74,902,301,000	75,012,285,983	132,773,348	74,879,512,635	100.15	22,788,365
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM							
51	BELANJA PEGAWAI	37,819,994,000	41,208,168,000	41,204,449,967	3,851,707	41,200,598,260	99.98	7,569,740
52	BELANJA BARANG	195,186,307,000	186,108,709,000	174,415,972,258	0	174,415,972,258	93.72	11,692,736,742
53	BELANJA MODAL	1,500,000,000	1,500,000,000	1,499,960,641	0	1,499,960,641	100	39,359
	JUMLAH BELANJA (03) DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	234,506,301,000	228,816,877,000	217,120,382,866	3,851,707	217,116,531,159	94.89	11,700,345,841
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN							
51	BELANJA PEGAWAI	43,367,177,000	43,551,638,000	43,544,481,551	18,234,670	43,526,246,881	99.94	25,391,119
52	BELANJA BARANG	180,205,002,000	156,264,073,000	68,576,591,553	123,468,631	68,453,122,922	43.81	87,810,950,078
53	BELANJA MODAL	2,900,000,000	16,781,192,000	16,505,682,833	0	16,505,682,833	98.36	275,509,167
	JUMLAH BELANJA (04) DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	226,472,179,000	216,596,903,000	128,626,755,937	141,703,301	128,485,052,636	59.39	88,111,850,364
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA							
51	BELANJA PEGAWAI	61,731,784,000	71,662,810,000	69,946,929,562	22,229,638	69,924,699,924	97.57	1,738,110,076
52	BELANJA BARANG	86,818,522,000	91,751,262,000	79,499,427,953	240,254,773	79,259,173,180	86.38	12,492,088,820
53	BELANJA MODAL	2,542,109,000	2,356,752,000	2,227,750,007	0	2,227,750,007	94.53	129,001,993
	JUMLAH BELANJA (05) DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	151,092,415,000	165,770,824,000	151,674,107,522	262,484,411	151,411,623,111	91.5	14,359,200,889
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH							
51	BELANJA PEGAWAI	47,541,791,000	52,923,434,000	52,755,366,280	7,556,422	52,747,809,858	99.67	175,624,142
52	BELANJA BARANG	174,173,033,000	360,995,604,000	301,036,284,168	245,809,787	300,790,474,381	83.32	60,205,129,619
53	BELANJA MODAL	1,569,000,000	3,029,618,000	3,024,890,825	0	3,024,890,825	99.84	4,727,175
	JUMLAH BELANJA (06) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	223,283,824,000	416,948,656,000	356,816,541,273	253,366,209	356,563,175,064	85.58	60,385,480,936
07	DITJEN OTONOMI DAERAH							
51	BELANJA PEGAWAI	48,080,941,000	44,489,693,000	44,485,086,250	12,871,261	44,472,214,989	99.96	17,478,011
52	BELANJA BARANG	49,196,287,000	48,847,287,000	26,895,452,189	141,771,657	26,753,680,532	54.77	22,093,606,468
53	BELANJA MODAL	1,862,035,000	1,862,035,000	59,854,956	0	59,854,956	3.21	1,802,180,044

hu f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 2:29 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA (07) DITJEN OTONOMI DAERAH	99,139,263,000	95,199,015,000	71,440,393,395	154,642,918	71,285,750,477	75.04	23,913,264,523
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
51	BELANJA PEGAWAI	37,432,550,000	41,904,979,000	41,612,936,181	15,778,642	41,597,157,539	99.27	307,821,461
52	BELANJA BARANG	1,346,307,811,000	1,256,115,575,000	714,860,781,932	598,941,866	714,261,840,066	56.86	541,853,734,934
53	BELANJA MODAL	839,319,576,000	703,793,752,000	432,494,382,495	0	432,494,382,495	61.45	271,299,369,505
	JUMLAH BELANJA (08) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN	2,223,059,937,000	2,001,814,306,000	1,188,968,100,608	614,720,508	1,188,353,380,100	59.39	813,460,925,900
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH							
51	BELANJA PEGAWAI	45,991,664,000	46,186,381,000	46,184,570,633	18,241,462	46,166,329,171	99.96	20,051,829
52	BELANJA BARANG	63,299,340,000	62,199,706,000	31,366,574,540	70,568,878	31,296,005,662	50.32	30,903,700,338
53	BELANJA MODAL	1,000,000,000	1,000,000,000	699,452,672	0	699,452,672	69.95	300,547,328
	JUMLAH BELANJA (09) DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	110,291,004,000	109,386,087,000	78,250,597,845	88,810,340	78,161,787,505	71.54	31,224,299,495
11	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI							
51	BELANJA PEGAWAI	25,211,074,000	27,420,706,000	27,415,779,663	5,009,988	27,410,769,675	99.96	9,936,325
52	BELANJA BARANG	32,159,764,000	29,357,392,000	22,820,201,071	810,000	22,819,391,071	77.73	6,538,000,929
53	BELANJA MODAL	1,237,500,000	703,400,000	701,340,608	0	701,340,608	99.71	2,059,392
	JUMLAH BELANJA (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM	58,608,338,000	57,481,498,000	50,937,321,342	5,819,988	50,931,501,354	88.62	6,549,996,646
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
51	BELANJA PEGAWAI	86,137,068,000	90,529,146,000	90,448,771,069	11,670,183	90,437,100,886	99.9	92,045,114
52	BELANJA BARANG	130,691,746,000	140,965,701,000	141,461,826,376	1,428,059,289	140,033,767,087	99.34	931,933,913
53	BELANJA MODAL	3,972,085,000	26,688,833,000	26,527,710,416	0	26,527,710,416	99.4	161,122,584
	JUMLAH BELANJA (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	220,800,899,000	258,183,680,000	258,438,307,861	1,439,729,472	256,998,578,389	100.1	1,185,101,611
	JUMLAH BELANJA	4,792,328,518,000	4,828,552,050,000	3,773,726,377,498	3,838,304,498	3,769,888,073,000	78.15	1,058,663,977,000



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 07/05/26 2:29 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	121,200,000,000	82,949,941,000	16,243,039,568	37,678,524	16,205,361,044	1814.03	66,744,579,956
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	16,036,287,000	32,306,287,000	22,225,574,468	44,636,348	22,180,938,120	68.66	10,125,348,880
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	9,362,443,000	9,371,192,000	4,922,789,749	70,602,900	4,852,186,849	51.78	4,519,005,151
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	14,300,000,000	12,920,339,000	11,829,937,755	81,307,545	11,748,630,210	334.32	1,171,708,790
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	24,350,000,000	23,546,083,000	14,133,877,896	22,721,109	14,111,156,787	59.93	9,434,926,213
1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa	9,000,000,000	9,000,000,000	6,785,255,743	112,678,591	6,672,577,152	74.14	2,327,422,848
1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,800,000,000	3,800,000,000	1,777,641,694	2,530,800	1,775,110,894	46.71	2,024,889,106
1276	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah	8,000,000,000	7,933,844,000	2,331,511,351	0	2,331,511,351	29.39	5,602,332,649
1283	Pembinaan inovasi daerah	3,690,000,000	3,690,000,000	2,762,026,727	810,000	2,761,216,727	74.83	928,783,273
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	1,914,184,000	51,500,000	51,500,000	0	51,500,000	100	0
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	5,000,000,000	5,000,000,000	2,245,546,789	963,300	2,244,583,489	44.89	2,755,416,511
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18,100,000,000	36,907,738,000	27,106,835,938	35,575,108	27,071,260,830	73.35	9,836,477,170
6138	Penataan kelembagaan Desa	8,617,557,000	8,357,795,000	3,801,216,975	770,700	3,800,446,275	45.47	4,557,348,725
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	60,900,000,000	56,846,993,000	16,657,135,483	66,677,357	16,590,458,126	29.18	40,256,534,874
6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah	9,600,000,000	9,600,000,000	3,402,480,474	4,203,400	3,398,277,074	35.4	6,201,722,926
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	37,200,000,000	36,766,156,000	15,340,420,396	67,312,048	15,273,108,348	41.54	21,493,047,652
6142	Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	5,950,000,000	6,058,579,000	2,274,325,267	0	2,274,325,267	37.54	3,784,253,733
6143	Pembinaan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah	1,200,000,000	1,174,090,000	653,539,321	0	653,539,321	55.66	520,550,679

hu f

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 07/05/26 2:29 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	24,161,757,000	31,076,734,000	32,115,678,283	1,415,868,290	30,699,809,993	596.97	376,924,007
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	382,382,228,000	377,357,271,000	186,660,333,877	1,964,336,020	184,695,997,857	49.465	192,661,273,143
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
1268	Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan	400,170,679,000	396,168,907,000	379,526,461,590	221,520,187	379,304,941,403	95.74	16,863,965,597
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	229,073,850,000	228,965,950,000	224,915,594,659	0	224,915,594,659	98.23	4,050,355,341
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	25,721,074,000	25,243,579,000	6,423,443,850	819,945	6,422,623,905	25.44	18,820,955,095
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CP	654,965,603,000	650,378,436,000	610,865,500,099	222,340,132	610,643,159,967	93.925	39,735,276,033
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum							
1233	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	11,476,628,000	11,476,628,000	6,600,414,752	0	6,600,414,752	57.51	4,876,213,248
1234	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	6,000,000,000	6,000,000,000	3,792,117,522	0	3,792,117,522	63.2	2,207,882,478
6145	Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	146,489,125,000	146,489,125,000	141,880,755,357	0	141,880,755,357	96.85	4,608,369,643
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CR	163,965,753,000	163,965,753,000	152,273,287,631	0	152,273,287,631	92.869	11,692,465,369
WA	Program Dukungan Manajemen							
4255	Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	89,271,812,000	68,647,209,000	67,959,161,661	340,883,480	67,618,278,181	98.5	1,028,930,819
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal	15,800,000,000	13,692,024,000	13,648,541,245	9,472,835	13,639,068,410	99.61	52,955,590
6084	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal	325,368,201,000	339,718,068,000	335,401,335,419	240,363,284	335,160,972,135	98.66	4,557,095,865
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal	90,478,000,000	180,689,521,000	180,295,808,661	1,487,832	180,294,320,829	99.78	395,200,171
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal	21,500,000,000	13,071,438,000	13,060,868,000	2,054,315	13,058,813,685	99.9	12,624,315
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	752,092,000	442,280,000	442,180,950	0	442,180,950	99.98	99,050
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	518,989,155,000	516,233,582,000	514,896,036,803	33,930,302	514,862,106,501	699.58	1,371,475,499

hu f

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 07/05/26 2:29 PM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	1,108,436,000	355,442,000	354,270,479	0	354,270,479	699.63	1,171,521
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	10,956,739,000	4,009,993,000	4,008,533,939	0	4,008,533,939	699.94	1,459,061
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	75,478,644,000	52,471,725,000	52,544,707,179	111,680,248	52,433,026,931	699.88	38,698,069
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	660,000,000	122,697,000	122,676,308	0	122,676,308	99.98	20,692
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	60,814,741,000	61,321,688,000	61,329,317,387	27,441,699	61,301,875,688	99.97	19,812,312
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	372,738,000	267,573,000	269,146,000	1,573,268	267,572,732	100	268
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	1,675,617,000	1,001,677,000	1,001,674,992	2,365,000	999,309,992	99.76	2,367,008
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	1,190,250,000	826,296,000	834,999,671	8,704,583	826,295,088	100	912
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	19,687,391,000	11,362,370,000	11,454,471,625	92,688,798	11,361,782,827	99.99	587,173
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	1,500,000,000	813,529,000	813,426,193	0	813,426,193	99.99	102,807
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	64,640,548,000	61,875,171,000	61,871,280,628	3,851,707	61,867,428,921	99.99	7,742,079
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	2,500,000,000	1,197,313,000	1,197,310,384	0	1,197,310,384	100	2,616
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	1,900,000,000	965,111,000	965,078,030	0	965,078,030	100	32,970
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	1,965,552,000	617,427,000	617,201,700	665,000	616,536,700	99.86	890,300
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	65,908,340,000	62,282,696,000	60,935,766,919	22,802,161	60,912,964,758	97.8	1,369,731,242
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	1,362,000,000	479,767,000	465,158,500	0	465,158,500	96.96	14,608,500
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	1,900,000,000	1,053,047,000	1,033,178,844	346,160	1,032,832,684	98.08	20,214,316
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	1,000,000,000	1,082,440,000	1,072,637,527	25,092,000	1,047,545,527	96.78	34,894,473
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	113,582,889,000	118,958,262,000	115,280,690,588	49,737,526	115,230,953,062	385.01	3,727,308,938
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	1,920,000,000	659,128,000	640,796,533	69,608	640,726,925	97.21	18,401,075

hu f

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 07/05/26 2:29 PM

Halaman : 4

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	2,294,922,000	1,020,433,000	985,182,267	0	985,182,267	296.26	35,250,733
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	4,000,000,000	1,586,079,000	1,586,079,000	0	1,586,079,000	100	0
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	1,700,000,000	614,624,000	614,581,460	34,000	614,547,460	99.99	76,540
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	77,189,777,000	81,045,420,000	80,148,090,402	28,297,958	80,119,792,444	98.86	925,627,556
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	2,300,000,000	1,789,111,000	1,788,660,991	32,225,226	1,756,435,765	98.17	32,675,235
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	1,200,000,000	441,138,000	436,206,745	0	436,206,745	98.88	4,931,255
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	1,200,000,000	1,180,891,000	329,634,113	7,626,467	322,007,646	27.27	858,883,354
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	68,750,548,000	64,843,522,000	56,566,369,586	22,863,930	56,543,505,656	87.2	8,300,016,344
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	256,000,000	256,000,000	96,384,300	480,150	95,904,150	37.46	160,095,850
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	1,532,715,000	1,518,602,000	237,080,696	3,296,280	233,784,416	15.39	1,284,817,584
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,500,000,000	1,231,369,000	1,078,678,824	0	1,078,678,824	87.6	152,690,176
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83,599,930,000	74,150,071,000	71,064,154,611	300,779,232	70,763,375,379	95.43	3,386,695,621
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,347,240,000	1,009,769,000	761,460,899	0	761,460,899	75.41	248,308,101
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14,495,164,000	7,501,973,000	7,041,821,053	0	7,041,821,053	93.87	460,151,947
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	750,000,000	750,000,000	374,107,930	0	374,107,930	49.88	375,892,070
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	62,009,164,000	61,856,059,000	59,109,862,408	18,244,062	59,091,618,346	95.53	2,764,440,654
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	931,840,000	520,028,000	521,816,304	3,254,230	518,562,074	99.72	1,465,926
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	1,400,000,000	1,400,000,000	412,879,456	0	412,879,456	29.49	987,120,544
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	175,000,000	113,800,000	113,738,755	0	113,738,755	99.95	61,245
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	46,223,338,000	45,706,766,000	44,645,578,636	5,009,988	44,640,568,648	97.67	1,066,197,352

hu f

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 07/05/26 2:29 PM

Halaman : 5

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	20,000,000	14,770,000	14,754,508	0	14,754,508	99.9	15,492
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	1,350,000,000	723,493,000	473,358,128	0	473,358,128	65.43	250,134,872
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	200,000,000	130,089,000	128,977,380	75,620	128,901,760	99.09	1,187,240
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	154,671,927,000	173,003,020,000	172,774,068,458	15,465,066	172,758,603,392	599.12	244,416,608
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,200,000,000	784,863,000	739,401,501	7,137	739,394,364	94.21	45,468,636
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,285,000,000	920,936,000	903,222,493	705,112	902,517,381	595.16	18,418,619
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	2,025,865,710,000	2,038,330,300,000	2,005,462,407,069	1,413,574,264	2,004,048,832,805	98.388	34,281,467,195
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	3,227,179,294,000	3,230,031,760,000	2,955,261,528,676	3,600,250,416	2,951,661,278,260	91.493	278,370,481,740
02	PINJAMAN LUAR NEGERI							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	0	3,594,298,000	3,585,018,453	26,130,000	3,558,888,453	99.01	35,409,547
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	51,644,047,000	181,778,250,000	172,253,419,398	29,187,259	172,224,232,139	94.74	9,554,017,861
6484	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	0	7,449,581,000	7,447,772,715	0	7,447,772,715	99.98	1,808,285
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	51,644,047,000	192,822,129,000	183,286,210,566	55,317,259	183,230,893,307	95.055	9,591,235,693
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
6997	Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital	1,465,152,000,000	1,072,864,748,000	305,760,545,519	91,601,144	305,668,944,375	28.49	767,195,803,625
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CP	1,465,152,000,000	1,072,864,748,000	305,760,545,519	91,601,144	305,668,944,375	28.499	767,195,803,625
	JUMLAH BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI	1,516,796,047,000	1,265,686,877,000	489,046,756,085	146,918,403	488,899,837,682	38.639	776,787,039,318
04	PNBP							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							

hu f

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 07/05/26 2:29 PM

Halaman : 6

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	0	345,545,000	144,678,400	1,259,640	143,418,760	128.99	202,126,240
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	425,625,000	1,748,092,000	1,748,091,300	0	1,748,091,300	100	700
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	36,587,406,000	44,553,563,000	44,254,714,230	7,608,247	44,247,105,983	597.34	306,457,017
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	37,013,031,000	46,647,200,000	46,147,483,930	8,867,887	46,138,616,043	98.929	508,583,957
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
1268	Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan	0	152,524,460,000	150,242,459,603	0	150,242,459,603	98.5	2,282,000,397
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CP	0	152,524,460,000	150,242,459,603	0	150,242,459,603	98.504	2,282,000,397
WA	Program Dukungan Manajemen							
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	0	2,125,803,000	2,085,362,900	0	2,085,362,900	98.1	40,440,100
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	124,738,000	260,538,000	133,893,560	0	133,893,560	51.39	126,644,440
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	10,845,804,000	11,734,280,000	11,610,882,070	530,000	11,610,352,070	98.94	123,927,930
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	14,604,000	50,296,000	48,549,560	0	48,549,560	195.09	1,746,440
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	350,000,000	5,720,967,000	5,528,852,716	0	5,528,852,716	583.36	192,114,284
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,000,000	193,916,000	193,801,500	0	193,801,500	198.92	114,500
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	11,340,146,000	20,085,800,000	19,601,342,306	530,000	19,600,812,306	97.588	484,987,694
	JUMLAH BELANJA PNB	48,353,177,000	219,257,460,000	215,991,285,839	9,397,887	215,981,887,952	98.51	3,275,572,048
09	HIBAH LUAR NEGERI							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	0	1,961,515,000	1,914,837,000	7,514,492	1,907,322,508	97.24	54,192,492
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	0	14,238,560,000	14,136,099,241	8,667,080	14,127,432,161	99.22	111,127,839

hu f

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 07/05/26 2:29 PM

Halaman : 7

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	0	160,000,000	160,000,000	0	160,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	0	16,360,075,000	16,210,936,241	16,181,572	16,194,754,669	99.088	165,320,331
	JUMLAH BELANJA HIBAH LUAR NEGERI	0	16,360,075,000	16,210,936,241	16,181,572	16,194,754,669	99.088	165,320,331
10	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI							
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	0	42,153,480,000	42,153,480,000	0	42,153,480,000	100	0
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CP	0	42,153,480,000	42,153,480,000	0	42,153,480,000	100	0
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	0	42,153,480,000	42,153,480,000	0	42,153,480,000	100	0
11	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	0	7,217,102,000	7,217,097,412	0	7,217,097,412	100	4,588
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	0	7,217,102,000	7,217,097,412	0	7,217,097,412	100	4,588
WA	Program Dukungan Manajemen							
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	0	47,845,296,000	47,845,293,245	65,556,220	47,779,737,025	99.86	65,558,975
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	0	47,845,296,000	47,845,293,245	65,556,220	47,779,737,025	100	65,558,975
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	0	55,062,398,000	55,062,390,657	65,556,220	54,996,834,437	100	65,563,563
	JUMLAH	4,792,328,518,000	4,828,552,050,000	3,773,726,377,498	3,838,304,498	3,769,888,073,000	78.15	1,058,663,977,000



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/26 2:30 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	263,403,712,000	267,990,927,000	267,668,893,330	44,229,894	267,624,663,436	99.88	366,263,564
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,736,000	4,095,000	3,643,839	60,316	3,583,523	88.98	511,477
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	15,987,736,000	15,779,343,000	15,737,855,151	3,286,334	15,734,568,817	99.74	44,774,183
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,520,435,000	4,180,781,000	4,165,992,082	425,865	4,165,566,217	99.65	15,214,783
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	9,330,337,000	9,226,142,000	9,178,777,000	14,725,050	9,164,051,950	99.49	62,090,050
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	23,120,714,000	24,211,231,000	24,189,225,000	43,850,829	24,145,374,171	99.91	65,856,829
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,120,121,000	3,337,818,000	3,166,536,169	0	3,166,536,169	94.87	171,281,831
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	11,719,390,000	11,586,845,000	11,568,841,530	989,740	11,567,851,790	99.84	18,993,210
511129	Belanja Uang Makan PNS	36,396,924,000	36,610,763,000	36,000,106,000	0	36,000,106,000	98.33	610,657,000
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	57,891,000	70,275,000	70,275,000	0	70,275,000	100	0
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	205,800,000	254,690,000	254,690,000	0	254,690,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	6,923,333,000	6,741,082,000	6,695,040,000	83,383,117	6,611,656,883	99.32	129,425,117
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	9,370,468,000	10,184,041,000	10,184,029,100	0	10,184,029,100	100	11,900
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	2,019,696,000	2,447,747,000	2,447,746,800	0	2,447,746,800	100	200
511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri	75,600,000	77,200,000	77,200,000	0	77,200,000	100	0
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	2,125,620,000	2,493,260,000	2,493,260,000	0	2,493,260,000	100	0
511514	Belanja Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti Atau Telah Berakhir Masa Jabatannya	0	580,454,000	0	0	0	0	580,454,000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	2,391,761,000	25,148,172,000	24,949,591,613	3,649,100	24,945,942,513	99.21	202,229,487
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,062,000	1,724,000	412,261	400	411,861	23.91	1,312,139
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	126,716,000	1,700,449,000	1,552,980,296	3,203,600	1,549,776,696	91.33	150,672,304
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	33,583,000	515,009,000	436,275,926	768,864	435,507,062	84.71	79,501,938
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	61,250,000	76,875,000	72,500,000	0	72,500,000	94.31	4,375,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	339,672,000	880,108,000	707,395,930	0	707,395,930	80.38	172,712,070
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	108,757,000	1,754,843,000	1,500,813,975	1,593,240	1,499,220,735	85.52	255,622,265
511628	Belanja Uang Makan PPPK	526,309,000	4,871,649,000	4,648,472,000	0	4,648,472,000	95.42	223,177,000
511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	1,750,000	16,600,000	16,600,000	0	16,600,000	100	0
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	5,950,000	54,150,000	54,150,000	0	54,150,000	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	3,000	1,320,547,000	1,283,400,000	4,030,000	1,279,370,000	97.19	41,177,000
512211	Belanja Uang Lembur	18,181,784,000	12,650,167,000	12,385,673,000	2,675,450	12,382,997,550	97.91	267,169,450
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	58,100,000	1,550,530,000	1,419,880,000	0	1,419,880,000	91.57	130,650,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	432,808,467,000	412,295,223,000	411,445,076,427	2,020,274	411,443,056,153	99.79	852,166,847
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	3,937,160,000	26,841,295,000	26,412,092,898	1,038,559	26,411,054,339	98.4	430,240,661
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	845,964,837,000	885,454,035,000	880,787,425,327	209,930,632	880,577,494,695	99.47	4,876,540,305
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	173,239,614,000	175,136,484,000	168,373,130,624	35,587,243	168,337,543,381	96.14	6,798,940,619
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	47,222,316,000	39,911,140,000	39,884,566,839	0	39,884,566,839	99.93	26,573,161
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2,650,596,000	1,699,161,000	1,697,550,593	0	1,697,550,593	99.91	1,610,407

hu f

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/26 2:30 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	904,237,000	351,474,000	348,477,405	0	348,477,405	99.15	2,996,595
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	17,246,261,000	9,809,271,000	9,546,792,000	0	9,546,792,000	97.32	262,479,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	61,770,257,000	57,379,090,000	55,600,148,357	0	55,600,148,357	96.9	1,778,941,643
521211	Belanja Bahan	121,742,569,000	98,879,688,000	79,210,244,497	6,733,875	79,203,510,622	80.11	19,676,177,378
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	17,456,552,000	7,046,728,000	6,208,918,000	1,275,000	6,207,643,000	88.11	839,085,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	159,252,569,000	153,797,679,000	153,476,996,154	2,365,000	153,474,631,154	99.79	323,047,846
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	474,020,000	2,237,130,000	1,958,738,767	0	1,958,738,767	87.56	278,391,233
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	24,000,000	35,991,000	35,981,482	0	35,981,482	99.97	9,518
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	10,000,000	0	0	0	0	0	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	17,366,724,000	15,941,862,000	15,599,863,247	2,497,800	15,597,365,447	97.85	344,496,553
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	1,500,000	10,000	0	0	0	0	10,000
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	600,260,000	595,877,000	595,875,084	0	595,875,084	100	1,916
522111	Belanja Langganan Listrik	43,965,213,000	39,204,683,000	39,255,757,133	300,146,637	38,955,610,496	100.13	249,072,504
522112	Belanja Langganan Telepon	1,027,486,000	355,964,000	312,731,890	0	312,731,890	87.85	43,232,110
522113	Belanja Langganan Air	5,865,038,000	4,893,755,000	4,891,932,384	0	4,891,932,384	99.96	1,822,616
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,177,434,000	981,202,000	980,625,907	0	980,625,907	99.94	576,093
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	2,750,000	2,750,000	2,225,000	0	2,225,000	80.91	525,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	49,949,773,000	43,109,894,000	32,529,547,737	0	32,529,547,737	75.46	10,580,346,263
522141	Belanja Sewa	101,137,144,000	106,431,380,000	105,686,987,870	0	105,686,987,870	99.3	744,392,130
522151	Belanja Jasa Profesi	45,932,727,000	20,930,162,000	14,449,192,000	28,875,000	14,420,317,000	69.04	6,509,845,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	473,092,058,000	507,068,175,000	486,678,057,949	315,292,464	486,362,765,485	95.98	20,705,409,515
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	79,618,201,000	91,348,168,000	90,547,012,331	0	90,547,012,331	99.12	801,155,669
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,474,672,000	2,334,930,000	2,333,569,954	4,691,600	2,328,878,354	99.94	6,051,646
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4,479,676,000	4,465,262,000	4,444,370,345	0	4,444,370,345	99.53	20,891,655
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41,416,192,000	37,553,929,000	36,490,633,956	183,441,314	36,307,192,642	97.17	1,246,736,358
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,877,745,000	1,510,471,000	1,477,397,917	0	1,477,397,917	97.81	33,073,083
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	100	0
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4,450,760,000	5,001,895,000	4,931,902,288	0	4,931,902,288	98.6	69,992,712
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,166,696,000	2,230,853,000	2,229,658,824	0	2,229,658,824	99.95	1,194,176
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300,078,839,000	299,669,324,000	187,885,407,648	2,364,584,218	185,520,823,430	62.7	114,148,500,570
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4,671,477,000	1,189,297,000	979,294,610	0	979,294,610	82.34	210,002,390
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,855,773,000	8,420,318,000	6,908,635,268	1,052,000	6,907,583,268	82.05	1,512,734,732
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	169,714,629,000	74,106,656,000	18,091,085,665	41,674,250	18,049,411,415	24.41	56,057,244,585
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	54,603,657,000	34,710,344,000	15,563,808,878	5,208,399	15,558,600,479	44.84	19,151,743,521
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	7,123,395,000	6,290,092,000	3,878,526,990	96,894,984	3,781,632,006	61.66	2,508,459,994
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	278,743,000	278,719,112	0	278,719,112	99.99	23,888
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	226,745,800,000	225,165,904,000	224,348,616,241	0	224,348,616,241	99.64	817,287,759

hu f

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/26 2:30 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	Masyarakat/Pemda							
	JUMLAH BELANJA BARANG	2,254,902,610,000	2,081,589,736,000	1,817,726,980,946	3,390,319,784	1,814,336,661,162	87.32	267,253,074,838
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67,322,301,000	183,634,326,000	180,094,778,460	0	180,094,778,460	98.07	3,539,547,540
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2,200,000,000	555,959,000	551,970,289	0	551,970,289	99.28	3,988,711
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,000,000,000	2,624,356,000	2,617,997,007	0	2,617,997,007	99.76	6,358,993
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	10,022,340,000	22,285,813,000	22,097,402,513	0	22,097,402,513	99.15	188,410,487
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	632,112,000	630,465,000	0	630,465,000	99.74	1,647,000
534121	Belanja Modal Irigasi	0	2,100,653,000	2,100,652,800	0	2,100,652,800	100	200
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	310,000,000	308,302,500	0	308,302,500	99.45	1,697,500
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	400,000,000	50,000,000	48,840,000	0	48,840,000	97.68	1,160,000
536111	Belanja Modal Lainnya	44,512,206,000	50,268,270,000	47,963,170,834	0	47,963,170,834	95.41	2,305,099,166
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	855,000,000	526,500,000	333,543,000	0	333,543,000	63.35	192,957,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	126,311,847,000	262,987,989,000	256,747,122,403	0	256,747,122,403	97.63	6,240,866,597
	JUMLAH RUPIAH MURNI	3,227,179,294,000	3,230,031,760,000	2,955,261,528,676	3,600,250,416	2,951,661,278,260	91.49	278,370,481,740
02	PINJAMAN LUAR NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	615,276,000	615,276,000	123,674,241	0	123,674,241	20.1	491,601,759
521211	Belanja Bahan	7,923,636,000	8,689,834,000	1,171,088,922	0	1,171,088,922	13.48	7,518,745,078
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	26,830,000	26,830,000	0	0	0	0	26,830,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,169,200,000	112,234,000	94,822,715	0	94,822,715	84.49	17,411,285
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	15,882,372,000	3,414,828,000	0	0	0	0	3,414,828,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	263,549,454,000	244,507,443,000	184,273,331,620	0	184,273,331,620	75.37	60,234,111,380
522141	Belanja Sewa	22,610,020,000	13,994,067,000	2,020,634,580	0	2,020,634,580	14.44	11,973,432,420
522151	Belanja Jasa Profesi	4,196,000,000	4,393,900,000	403,200,000	0	403,200,000	9.18	3,990,700,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	201,935,628,000	326,916,662,000	15,956,071,320	0	15,956,071,320	4.88	310,960,590,680
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,769,698,000	51,596,594,000	7,014,978,294	17,810,479	6,997,167,815	13.6	44,599,426,185
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	106,600,000	113,060,000	4,590,000	0	4,590,000	4.06	108,470,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11,978,770,000	12,607,052,000	2,082,892,000	21,450,000	2,061,442,000	16.52	10,545,610,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	27,249,625,000	26,346,063,000	570,954,536	16,056,780	554,897,756	2.17	25,791,165,244
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	19,550,972,000	15,550,972,000	195,336,144	91,601,144	103,735,000	1.26	15,447,237,000
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	11,218,984,000	11,218,984,000	0	0	0	0	11,218,984,000
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	64,549,484,000	3,495,000,000	0	0	0	0	3,495,000,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	703,332,549,000	723,598,799,000	213,911,574,372	146,918,403	213,764,655,969	29.56	509,834,143,031
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	810,323,248,000	538,947,828,000	275,135,181,713	0	275,135,181,713	51.05	263,812,646,287
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000
536111	Belanja Modal Lainnya	1,640,250,000	1,640,250,000	0	0	0	0	1,640,250,000

tu f

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/26 2:30 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA MODAL	813,463,498,000	542,088,078,000	275,135,181,713	0	275,135,181,713	50.75	266,952,896,287
	JUMLAH PINJAMAN LUAR NEGERI	1,516,796,047,000	1,265,686,877,000	489,046,756,085	146,918,403	488,899,837,682	38.64	776,787,039,318
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	70,900,000	1,570,000	1,567,975	0	1,567,975	99.87	2,025
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	263,100,000	256,200,000	255,450,000	0	255,450,000	99.71	750,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	43,564,000	13,617,000	0	13,617,000	31.26	29,947,000
521211	Belanja Bahan	13,666,361,000	18,640,593,000	18,406,864,792	61,200	18,406,803,592	98.75	233,789,408
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,798,276,000	3,373,086,000	3,334,750,000	0	3,334,750,000	98.86	38,336,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,384,801,000	2,308,390,000	2,227,339,042	0	2,227,339,042	96.49	81,050,958
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	22,750,000	22,750,000	0	22,750,000	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30,400,000	40,712,000	39,625,497	0	39,625,497	97.33	1,086,503
522141	Belanja Sewa	1,408,428,000	1,374,269,000	1,361,235,000	0	1,361,235,000	99.05	13,034,000
522151	Belanja Jasa Profesi	10,392,733,000	17,265,647,000	17,069,656,000	4,380,000	17,065,276,000	98.86	200,371,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	697,212,000	14,376,009,000	13,896,379,491	0	13,896,379,491	96.66	479,629,509
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	14,443,000	14,443,000	0	14,443,000	100	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,884,348,000	8,493,651,000	8,362,144,888	4,956,687	8,357,188,201	98.45	136,462,799
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	668,157,000	643,340,000	630,070,000	0	630,070,000	97.94	13,270,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,612,030,000	2,076,003,000	2,032,802,000	0	2,032,802,000	97.92	43,201,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,878,410,000	1,980,219,000	1,977,937,000	0	1,977,937,000	99.88	2,282,000
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,478,021,000	163,838,000	163,835,940	0	163,835,940	100	2,060
	JUMLAH BELANJA BARANG	48,233,177,000	71,074,284,000	69,810,467,625	9,397,887	69,801,069,738	98.22	1,273,214,262
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120,000,000	136,455,501,000	134,569,651,717	0	134,569,651,717	98.62	1,885,849,283
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	160,000,000	158,337,000	0	158,337,000	98.96	1,663,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	1,262,951,000	1,252,380,000	0	1,252,380,000	99.16	10,571,000
536111	Belanja Modal Lainnya	0	10,304,724,000	10,200,449,497	0	10,200,449,497	98.99	104,274,503
	JUMLAH BELANJA MODAL	120,000,000	148,183,176,000	146,180,818,214	0	146,180,818,214	98.65	2,002,357,786
	JUMLAH PNBP	48,353,177,000	219,257,460,000	215,991,285,839	9,397,887	215,981,887,952	98.51	3,275,572,048
09	HIBAH LUAR NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	0	293,970,000	241,774,100	0	241,774,100	82.24	52,195,900
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000	100	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	5,564,724,000	5,552,550,800	0	5,552,550,800	99.78	12,173,200
522141	Belanja Sewa	0	643,818,000	639,926,804	6,893,600	633,033,204	99.4	10,784,796
522151	Belanja Jasa Profesi	0	96,510,000	81,600,000	0	81,600,000	84.55	14,910,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	6,935,726,000	6,888,924,533	0	6,888,924,533	99.33	46,801,467
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	1,963,483,000	1,959,985,213	9,287,972	1,950,697,241	99.82	12,785,759

tu f

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 07/05/26 2:30 PM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	854,344,000	838,674,791	0	838,674,791	98.17	15,669,209
	JUMLAH BELANJA BARANG	0	16,360,075,000	16,210,936,241	16,181,572	16,194,754,669	99.09	165,320,331
	JUMLAH HIBAH LUAR NEGERI	0	16,360,075,000	16,210,936,241	16,181,572	16,194,754,669	99.09	165,320,331
10	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	42,153,480,000	42,153,480,000	0	42,153,480,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	0	42,153,480,000	42,153,480,000	0	42,153,480,000	100	0
	JUMLAH HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	0	42,153,480,000	42,153,480,000	0	42,153,480,000	100	0
11	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	42,290,000	42,290,000	0	42,290,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	224,500,000	224,500,000	0	224,500,000	100	0
521211	Belanja Bahan	0	310,330,000	310,329,157	0	310,329,157	100	843
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	108,800,000	108,800,000	0	108,800,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	121,600,000	121,600,000	0	121,600,000	100	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	1,154,855,000	1,154,853,308	0	1,154,853,308	100	1,692
522141	Belanja Sewa	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	0	702,504,000	702,503,028	0	702,503,028	100	972
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	1,702,659,000	1,702,658,200	0	1,702,658,200	100	800
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	346,517,000	346,517,000	0	346,517,000	100	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	1,483,567,000	1,483,565,229	0	1,483,565,229	100	1,771
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	952,240,000	952,239,992	0	952,239,992	100	8
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	2,065,427,000	2,065,426,872	0	2,065,426,872	100	128
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	2,995,100,000	2,995,100,000	0	2,995,100,000	100	0
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	196,547,000	196,546,791	0	196,546,791	100	209
526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	1,531,532,000	1,531,531,200	0	1,531,531,200	100	800
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	41,117,930,000	41,117,929,880	65,556,220	41,052,373,660	100	65,556,340
	JUMLAH BELANJA BARANG	0	55,062,398,000	55,062,390,657	65,556,220	54,996,834,437	100	65,563,563
	JUMLAH HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	0	55,062,398,000	55,062,390,657	65,556,220	54,996,834,437	100	65,563,563
	TOTAL	4,792,328,518,000	4,828,552,050,000	3,773,726,377,498	3,838,304,498	3,769,888,073,000	78.15	1,058,663,977,000



**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN BELANJA MENURUT
FUNGSI / SUB FUNGSI /
PROGRAM / KEGIATAN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tanggal : 07/05/26 2:30 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_fsfpk_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	PELAYANAN UMUM							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1259	Fasilitas Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa	126,000,000,000	126,000,000,000	94,993,580,402	1,577,500,274	93,416,080,128	74.14	32,583,919,872
1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	53,200,000,000	53,200,000,000	24,886,983,716	35,431,200	24,851,552,516	46.71	28,348,447,484
1276	Pembinaan dan Fasilitas Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah	112,000,000,000	111,073,816,000	32,641,158,914	0	32,641,158,914	29.39	78,432,657,086
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	70,000,000,000	70,000,000,000	31,437,655,046	13,486,200	31,424,168,846	44.89	38,575,831,154
6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah	67,200,000,000	67,200,000,000	23,817,363,318	29,423,800	23,787,939,518	35.4	43,412,060,482
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	260,400,000,000	258,483,092,000	108,502,942,772	471,184,336	108,031,758,436	41.79	150,451,333,564
	JUMLAH PROGRAM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	688,800,000,000	685,956,908,000	316,279,684,168	2,127,025,810	314,152,658,358	46.11	371,804,249,642
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum							
1233	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	22,953,256,000	22,953,256,000	13,200,829,504	0	13,200,829,504	57.51	9,752,426,496
1234	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	12,000,000,000	12,000,000,000	7,584,235,044	0	7,584,235,044	63.2	4,415,764,956
6145	Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	146,489,125,000	146,489,125,000	141,880,755,357	0	141,880,755,357	96.85	4,608,369,643
	JUMLAH PROGRAM Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	181,442,381,000	181,442,381,000	162,665,819,905	0	162,665,819,905	89.65	18,776,561,095
WA	Program Dukungan Manajemen							
4255	Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1,963,979,864,000	1,510,238,598,000	1,495,101,556,542	7,499,436,560	1,487,602,119,982	98.5	22,636,478,018
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal	173,800,000,000	150,612,264,000	150,133,953,695	104,201,185	150,029,752,510	99.61	582,511,490
6084	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal	3,579,050,211,000	3,736,898,748,000	3,689,414,689,609	2,643,996,124	3,686,770,693,485	98.66	50,128,054,515
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal	995,258,000,000	1,987,584,731,000	1,983,253,895,271	16,366,152	1,983,237,529,119	99.78	4,347,201,881
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal	236,500,000,000	143,785,818,000	143,669,548,000	22,597,465	143,646,950,535	99.9	138,867,465
	JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen	6,948,588,075,000	7,529,120,159,000	7,461,573,643,117	10,286,597,486	7,451,287,045,631	99.1	77,833,113,369
	JUMLAH SUBFUNGSI LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	7,818,830,456,000	8,396,519,448,000	7,940,519,147,190	12,413,623,296	7,928,105,523,894	94.57	468,413,924,106
03	PELAYANAN UMUM							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	32,757,326,000	25,194,288,000	25,194,278,200	0	25,194,278,200	100	9,800
	JUMLAH PROGRAM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	32,757,326,000	25,194,288,000	25,194,278,200	0	25,194,278,200	100	9,800
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
1268	Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan	800,341,358,000	1,097,386,734,000	1,059,537,842,386	443,040,374	1,059,094,802,012	96.51	38,291,931,988
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	458,147,700,000	542,238,860,000	534,138,149,318	0	534,138,149,318	98.51	8,100,710,682
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	51,442,148,000	50,487,158,000	12,846,887,700	1,639,890	12,845,247,810	25.44	37,641,910,190

he f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tanggal : 07/05/26 2:30 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_fsfpkg_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
6997	Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital	1,465,152,000,000	1,072,864,748,000	305,760,545,519	91,601,144	305,668,944,375	28.49	767,195,803,625
	JUMLAH PROGRAM Program Tata Kelola Kependudukan	2,775,083,206,000	2,762,977,500,000	1,912,283,424,923	536,281,408	1,911,747,143,515	69.21	851,230,356,485
WA	Program Dukungan Manajemen							
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	8,273,012,000	4,865,080,000	4,863,990,450	0	4,863,990,450	99.98	1,089,550
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	5,708,880,705,000	5,701,953,235,000	5,686,795,396,733	373,233,322	5,686,422,163,411	99.73	15,531,071,589
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	12,192,796,000	3,909,862,000	3,896,975,269	0	3,896,975,269	99.67	12,886,731
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	121,896,247,000	46,975,841,000	45,566,702,489	0	45,566,702,489	97	1,409,138,511
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	949,568,928,000	706,266,055,000	705,711,481,739	1,234,312,728	704,477,169,011	99.75	1,788,885,989
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	7,260,000,000	1,349,667,000	1,349,439,388	0	1,349,439,388	99.98	227,612
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	668,962,151,000	674,538,568,000	674,622,491,257	301,858,689	674,320,632,568	99.97	217,935,432
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	4,100,118,000	2,943,303,000	2,960,606,000	17,305,948	2,943,300,052	100	2,948
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	18,431,787,000	11,018,447,000	11,018,424,912	26,015,000	10,992,409,912	99.76	26,037,088
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	13,092,750,000	9,089,256,000	9,184,996,381	95,750,413	9,089,245,968	100	10,032
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	216,561,301,000	124,986,070,000	125,999,187,875	1,019,576,778	124,979,611,097	99.99	6,458,903
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	16,500,000,000	8,948,819,000	8,947,688,123	0	8,947,688,123	99.99	1,130,877
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	711,046,028,000	680,626,881,000	680,584,086,908	42,368,777	680,541,718,131	99.99	85,162,869
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	27,500,000,000	13,170,443,000	13,170,414,224	0	13,170,414,224	100	28,776
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	20,900,000,000	10,616,221,000	10,615,858,330	0	10,615,858,330	100	362,670
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	21,621,072,000	6,791,697,000	6,789,218,700	7,315,000	6,781,903,700	99.86	9,793,300
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	724,991,740,000	685,109,656,000	670,293,436,109	250,823,771	670,042,612,338	97.8	15,067,043,662
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	14,982,000,000	5,277,437,000	5,116,743,500	0	5,116,743,500	96.96	160,693,500
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	20,900,000,000	11,583,517,000	11,364,967,284	3,807,760	11,361,159,524	98.08	222,357,476
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	11,000,000,000	11,906,840,000	11,799,012,797	276,012,000	11,523,000,797	96.78	383,839,203
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	1,249,572,423,000	1,309,094,138,000	1,268,621,641,628	547,112,786	1,268,074,528,842	96.87	41,019,609,158
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	21,120,000,000	7,250,408,000	7,048,761,863	765,688	7,047,996,175	97.21	202,411,825
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	25,244,142,000	11,224,763,000	10,837,004,937	0	10,837,004,937	96.55	387,758,063
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	44,000,000,000	17,446,869,000	17,446,869,000	0	17,446,869,000	100	0
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	18,700,000,000	6,760,864,000	6,760,396,060	374,000	6,760,022,060	99.99	841,940
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	849,087,547,000	1,417,797,876,000	1,407,927,220,117	1,032,395,958	1,406,894,824,159	99.23	10,903,051,841
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang	25,300,000,000	19,680,221,000	19,675,270,901	354,477,486	19,320,793,415	98.17	359,427,585

tu f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tanggal : 07/05/26 2:30 PM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_fsfpk_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	Pembangunan Daerah							
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	13,200,000,000	4,852,518,000	4,798,274,195	0	4,798,274,195	98.88	54,243,805
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	13,200,000,000	12,989,801,000	3,625,975,243	83,891,137	3,542,084,106	27.27	9,447,716,894
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	756,256,028,000	713,278,742,000	622,230,065,446	251,503,230	621,978,562,216	87.2	91,300,179,784
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	2,816,000,000	2,816,000,000	1,060,227,300	5,281,650	1,054,945,650	37.46	1,761,054,350
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	16,859,865,000	16,704,622,000	2,607,887,656	36,259,080	2,571,628,576	15.39	14,132,993,424
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27,500,000,000	13,545,059,000	11,865,467,064	0	11,865,467,064	87.6	1,679,591,936
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	919,599,230,000	815,650,781,000	781,705,700,721	3,308,571,552	778,397,129,169	95.43	37,253,651,831
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25,819,640,000	11,107,459,000	8,376,069,889	0	8,376,069,889	75.41	2,731,389,111
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	159,446,804,000	82,521,703,000	77,460,031,583	0	77,460,031,583	93.87	5,061,671,417
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	8,250,000,000	8,250,000,000	4,115,187,230	0	4,115,187,230	49.88	4,134,812,770
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	682,100,804,000	680,416,649,000	650,208,486,488	200,684,682	650,007,801,806	95.53	30,408,847,194
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	10,250,240,000	5,720,308,000	5,739,979,344	35,796,530	5,704,182,814	99.72	16,125,186
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	15,400,000,000	15,400,000,000	4,541,674,016	0	4,541,674,016	29.49	10,858,325,984
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	1,925,000,000	1,251,800,000	1,251,126,305	0	1,251,126,305	99.95	673,695
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	508,456,718,000	502,774,426,000	491,101,364,996	55,109,868	491,046,255,128	97.67	11,728,170,872
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	220,000,000	162,470,000	162,299,588	0	162,299,588	99.9	170,412
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	14,850,000,000	7,958,423,000	5,206,939,408	0	5,206,939,408	65.43	2,751,483,592
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,200,000,000	1,430,979,000	1,418,751,180	831,820	1,417,919,360	99.09	13,059,640
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,705,241,197,000	1,965,963,857,000	1,961,332,132,914	170,115,726	1,961,162,017,188	99.76	4,801,839,812
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	13,200,000,000	8,633,493,000	8,133,416,511	78,507	8,133,338,004	94.21	500,154,996
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	14,190,000,000	12,263,372,000	12,067,263,923	7,756,232	12,059,507,691	98.34	203,864,309
	JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen	16,442,666,273,000	16,394,874,496,000	16,087,976,603,974	9,739,386,118	16,078,237,217,856	98.13	316,637,278,144
	JUMLAH SUBFUNGSI PELAYANAN UMUM	19,250,506,805,000	19,183,046,284,000	18,025,454,307,097	10,275,667,526	18,015,178,639,571	93.97	1,167,867,644,42
06	PEMBANGUNAN DAERAH							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	1,696,800,000,000	1,161,299,174,000	227,402,553,952	527,499,336	226,875,054,616	19.54	934,424,119,384
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	131,074,202,000	208,978,070,000	145,917,032,828	1,459,463,488	144,457,569,340	69.13	64,520,500,660
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus	200,200,000,000	185,722,376,000	167,644,626,170	1,155,940,590	166,488,685,580	89.64	19,233,690,420

hu f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tanggal : 07/05/26 2:30 PM

Halaman : 4

Prg ID : lap_lra_fsfpk_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	Kelembagaan Desa							
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	340,900,000,000	329,645,162,000	197,874,290,544	318,095,526	197,556,195,018	59.93	132,088,966,982
1283	Pembinaan inovasi daerah	51,660,000,000	51,660,000,000	38,668,374,178	11,340,000	38,657,034,178	74.83	13,002,965,822
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	126,700,000,000	258,354,166,000	189,747,851,566	249,025,756	189,498,825,810	73.35	68,855,340,190
6138	Penataan kelembagaan Desa	60,322,899,000	58,504,565,000	26,608,518,825	5,394,900	26,603,123,925	45.47	31,901,441,075
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	787,808,329,000	1,820,566,335,000	1,471,846,260,738	731,721,872	1,471,114,538,866	80.81	349,451,796,134
6142	Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	41,650,000,000	42,410,053,000	15,920,276,869	0	15,920,276,869	37.54	26,489,776,131
6143	Pembinaan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah	8,400,000,000	8,218,630,000	4,574,775,247	0	4,574,775,247	55.66	3,643,854,753
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	425,244,141,000	529,412,079,000	534,592,747,591	9,964,335,759	524,628,411,832	99.1	4,783,667,168
6484	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	0	52,147,067,000	52,134,409,005	0	52,134,409,005	99.98	12,657,995
	JUMLAH PROGRAM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	3,870,759,571,000	4,706,917,677,000	3,072,931,717,513	14,422,817,227	3,058,508,900,286	65.29	1,648,408,776,714
	JUMLAH SUBFUNGSI PEMBANGUNAN DAERAH	3,870,759,571,000	4,706,917,677,000	3,072,931,717,513	14,422,817,227	3,058,508,900,286	65.29	1,648,408,776,71
90	PELAYANAN UMUM LAINNYA							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	224,508,018,000	452,288,018,000	311,158,042,552	624,908,872	310,533,133,680	68.66	141,754,884,320
	JUMLAH PROGRAM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	224,508,018,000	452,288,018,000	311,158,042,552	624,908,872	310,533,133,680	68.8	141,754,884,320
	JUMLAH SUBFUNGSI PELAYANAN UMUM LAINNYA	224,508,018,000	452,288,018,000	311,158,042,552	624,908,872	310,533,133,680	68.8	141,754,884,320
	JUMLAH FUNGSI PELAYANAN UMUM	31,164,604,850,000	32,738,771,427,000	29,350,063,214,352	37,737,016,921	29,312,326,197,431	89.65	3,426,445,229,56



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 07/05/26 2:31 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	888,600	0	888,600	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	250,750,000	1,169,718,497	0	1,169,718,497	466.49
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	640,548,092	0	640,548,092	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,049,796,000	4,837,278,420	0	4,837,278,420	460.78
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	199,266,000	188,828,705	0	188,828,705	94.76
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	1,499,812,000	6,837,262,314	0	6,837,262,314	455.87
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan					
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	28,672,000	64,272,000	0	64,272,000	224.16
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4253	28,672,000	64,272,000	0	64,272,000	224.16
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	200,000,000	248,750,000	0	248,750,000	124.37
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	16,033,260,000	15,658,456,000	0	15,658,456,000	97.66
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat	1,116,000,000	1,124,000,000	0	1,124,000,000	100.72
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	291,846,000	375,969,000	0	375,969,000	128.82
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	56,483,200,000	59,806,240,000	0	59,806,240,000	105.88
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	5,079,019,000	4,889,212,000	0	4,889,212,000	96.26
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	79,203,325,000	82,102,627,000	0	82,102,627,000	103.66
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	464,890,871,000	1,095,067,090,000	0	1,095,067,090,000	235.55
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	464,890,871,000	1,095,067,090,000	0	1,095,067,090,000	235.55
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	46,010,000	0	46,010,000	0

hu f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 07/05/26 2:31 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	46,010,000	0	46,010,000	0
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,011,980,429	0	1,011,980,429	0
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	500,000	0	500,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	1,012,480,429	0	1,012,480,429	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	168,278,274	0	168,278,274	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	41,794,217,382	0	41,794,217,382	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,182,540,752	0	2,182,540,752	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	21,868,888	0	21,868,888	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	44,166,905,296	0	44,166,905,296	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	545,622,680,000	1,229,296,647,039	0	1,229,296,647,039	225.3
	JUMLAH PENDAPATAN	545,622,680,000	1,229,296,647,039	0	1,229,296,647,039	225.3



**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT ESELON I / WILAYAH /
SATUAN KERJA**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 07/05/26 2:31 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	SEKRETARIAT JENDERAL					
010010100KP	BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA					
403200	SEKRETARIAT JENDERAL	1,448,052,000	1,232,879,858	0	1,232,879,858	85.14
	JUMLAH PENDAPATAN 010010100KP BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA	1,448,052,000	1,232,879,858	0	1,232,879,858	85.14
010010200KP	BA(010) ES1(01) JAWA BARAT					
448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	17,791,186,000	21,150,462,906	0	21,150,462,906	118.88
	JUMLAH PENDAPATAN 010010200KP BA(010) ES1(01) JAWA BARAT	17,791,186,000	21,150,462,906	0	21,150,462,906	118.88
010010800KD	BA(010) ES1(01) SUMATERA BARAT					
677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	0	35,320,500	0	35,320,500	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010010800KD BA(010) ES1(01) SUMATERA BARAT	0	35,320,500	0	35,320,500	
010011300KD	BA(010) ES1(01) KALIMANTAN BARAT					
683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	0	10,258,218	0	10,258,218	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010011300KD BA(010) ES1(01) KALIMANTAN BARAT	0	10,258,218	0	10,258,218	
010011700KD	BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA					
677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	0	389,272,133	0	389,272,133	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010011700KD BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA	0	389,272,133	0	389,272,133	
010011900KD	BA(010) ES1(01) SULAWESI SELATAN					
677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	0	183,223,133	0	183,223,133	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010011900KD BA(010) ES1(01) SULAWESI SELATAN	0	183,223,133	0	183,223,133	
010012300KD	BA(010) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT					
683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	0	424,564,180	0	424,564,180	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010012300KD BA(010) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT	0	424,564,180	0	424,564,180	
010012500KD	BA(010) ES1(01) PAPUA					

hu f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 07/05/26 2:31 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
683091	IPDN KAMPUS PAPUA	0	265,272,645	0	265,272,645	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010012500KD BA(010) ES1(01) PAPUA	0	265,272,645	0	265,272,645	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	0	60,386,190	0	60,386,190	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	60,386,190	0	60,386,190	
	JUMLAH PENDAPATAN 01 SEKRETARIAT JENDERAL	19,239,238,000	23,751,639,763	0	23,751,639,763	123.45
02	INSPEKTORAT JENDERAL					
010020100KP	BA(010) ES1(02) DKI JAKARTA					
027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	0	83,796,309	0	83,796,309	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010020100KP BA(010) ES1(02) DKI JAKARTA	0	83,796,309	0	83,796,309	
	JUMLAH PENDAPATAN 02 INSPEKTORAT JENDERAL	0	83,796,309	0	83,796,309	
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM					
010030100KP	BA(010) ES1(03) DKI JAKARTA					
027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	0	314,277,102	0	314,277,102	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010030100KP BA(010) ES1(03) DKI JAKARTA	0	314,277,102	0	314,277,102	
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	0	314,277,102	0	314,277,102	
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN					
010040100KP	BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA					
027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	0	923,709,496	0	923,709,496	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010040100KP BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA	0	923,709,496	0	923,709,496	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
484167	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0	25,984	0	25,984	0
484197	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	0	7,440	0	7,440	0

hu f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 07/05/26 2:31 PM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	33,424	0	33,424	
	JUMLAH PENDAPATAN 04 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	0	923,742,920	0	923,742,920	
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA					
010050100KP	BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA					
027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	198,786,000	23,066,511,602	0	23,066,511,602	11603.69
	JUMLAH PENDAPATAN 010050100KP BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA	198,786,000	23,066,511,602	0	23,066,511,602	11,603.69
010050400KD	BA(010) ES1(05) DI YOGYAKARTA					
028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	172,630,000	271,590,000	0	271,590,000	157.32
	JUMLAH PENDAPATAN 010050400KD BA(010) ES1(05) DI YOGYAKARTA	172,630,000	271,590,000	0	271,590,000	157.32
010050500KD	BA(010) ES1(05) JAWA TIMUR					
028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	190,352,000	267,914,946	0	267,914,946	140.75
	JUMLAH PENDAPATAN 010050500KD BA(010) ES1(05) JAWA TIMUR	190,352,000	267,914,946	0	267,914,946	140.75
010051200KD	BA(010) ES1(05) LAMPUNG					
613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	175,305,000	94,040,120	0	94,040,120	53.64
	JUMLAH PENDAPATAN 010051200KD BA(010) ES1(05) LAMPUNG	175,305,000	94,040,120	0	94,040,120	53.64
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	737,073,000	23,700,056,668	0	23,700,056,668	3,215.43
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH					
010060100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada					
039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	0	6,528,831,078	0	6,528,831,078	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010060100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	0	6,528,831,078	0	6,528,831,078	
	JUMLAH PENDAPATAN 06 DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	0	6,528,831,078	0	6,528,831,078	
07	DITJEN OTONOMI DAERAH					
010070100KP	BA(010) ES1(07) DKI JAKARTA					

hu f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 07/05/26 2:31 PM

Halaman : 4

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	0	332,388,676	0	332,388,676	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010070100KP BA(010) ES1(07) DKI JAKARTA	0	332,388,676	0	332,388,676	
	JUMLAH PENDAPATAN 07 DITJEN OTONOMI DAERAH	0	332,388,676	0	332,388,676	
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
010080100KP	BA(010) ES1(08) DKI JAKARTA					
634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	464,890,871,000	1,107,113,298,287	0	1,107,113,298,287	238.14
	JUMLAH PENDAPATAN 010080100KP BA(010) ES1(08) DKI JAKARTA	464,890,871,000	1,107,113,298,287	0	1,107,113,298,287	238.14
	JUMLAH PENDAPATAN 08 DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	464,890,871,000	1,107,113,298,287	0	1,107,113,298,287	238.14
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH					
010090100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI					
662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	0	15,910,505	0	15,910,505	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010090100KP SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	0	15,910,505	0	15,910,505	
	JUMLAH PENDAPATAN 09 DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	0	15,910,505	0	15,910,505	
11	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI					
010110100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI					
403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	0	104,784,760	0	104,784,760	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010110100KP SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	0	104,784,760	0	104,784,760	
	JUMLAH PENDAPATAN 11 BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	0	104,784,760	0	104,784,760	
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
010120100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada					
403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17,780,636,000	19,402,854,461	0	19,402,854,461	109.12
	JUMLAH PENDAPATAN 010120100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	17,780,636,000	19,402,854,461	0	19,402,854,461	109.12
010120200KD	BA(010) ES1(12) JAWA BARAT					

hu f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 07/05/26 2:31 PM

Halaman : 5

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
403216	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II	16,603,571,000	18,428,534,023	0	18,428,534,023	110.99
	JUMLAH PENDAPATAN 010120200KD BA(010) ES1(12) JAWA BARAT	16,603,571,000	18,428,534,023	0	18,428,534,023	110.99
010120400KD	BA(010) ES1(12) DI YOGYAKARTA					
027114	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI III	9,434,555,000	9,735,300,708	0	9,735,300,708	103.19
	JUMLAH PENDAPATAN 010120400KD BA(010) ES1(12) DI YOGYAKARTA	9,434,555,000	9,735,300,708	0	9,735,300,708	103.19
010120800KD	BA(010) ES1(12) SUMATERA BARAT					
506137	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I	9,186,038,000	10,972,830,381	0	10,972,830,381	119.45
	JUMLAH PENDAPATAN 010120800KD BA(010) ES1(12) SUMATERA BARAT	9,186,038,000	10,972,830,381	0	10,972,830,381	119.45
010121900KD	BA(010) ES1(12) SULAWESI SELATAN					
027177	BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV	6,385,848,000	6,481,252,604	0	6,481,252,604	101.49
	JUMLAH PENDAPATAN 010121900KD BA(010) ES1(12) SULAWESI SELATAN	6,385,848,000	6,481,252,604	0	6,481,252,604	101.49
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
506138	BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1,364,850,000	1,407,148,794	0	1,407,148,794	103.1
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	1,364,850,000	1,407,148,794	0	1,407,148,794	103.1
	JUMLAH PENDAPATAN 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	60,755,498,000	66,427,920,971	0	66,427,920,971	109.34
	JUMLAH PENDAPATAN	545,622,680,000	1,229,296,647,039	0	1,229,296,647,039	225.3



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN MENURUT ESELON I / AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 07/05/26 2:31 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	SEKRETARIAT JENDERAL					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	185,750,000	659,001,144	0	659,001,144	354.78
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	376,304,000	0	376,304,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	875,010,000	1,112,089,350	0	1,112,089,350	127.09
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	550	0	550	0
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	9,672,000	10,302,000	0	10,302,000	106.51
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	200,000,000	248,750,000	0	248,750,000	124.38
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	16,033,260,000	15,658,456,000	0	15,658,456,000	97.66
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat	1,116,000,000	1,124,000,000	0	1,124,000,000	100.72
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	291,846,000	375,969,000	0	375,969,000	128.82
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	527,700,000	0	0	0	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	25,110,000	0	25,110,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	17,009,488	0	17,009,488	0
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	500,000	0	500,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	108,812,416	0	108,812,416	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,738,017,904	0	2,738,017,904	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,297,317,911	0	1,297,317,911	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 SEKRETARIAT JENDERAL	19,239,238,000	23,751,639,763	0	23,751,639,763	123.45
02	INSPEKTORAT JENDERAL					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	888,600	0	888,600	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	20,980,000	0	20,980,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	40,988,000	0	40,988,000	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	20,900,000	0	20,900,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	787	0	787	0

hu f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 07/05/26 2:31 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	38,922	0	38,922	0
	JUMLAH PENDAPATAN 02 INSPEKTORAT JENDERAL	0	83,796,309	0	83,796,309	
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	264,244,092	0	264,244,092	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	48,242,672	0	48,242,672	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,790,338	0	1,790,338	0
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN	0	314,277,102	0	314,277,102	
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,692,679	0	2,692,679	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,949,235	0	3,949,235	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	917,075,022	0	917,075,022	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	25,984	0	25,984	0
	JUMLAH PENDAPATAN 04 DITJEN BINA ADMINISTRASI	0	923,742,920	0	923,742,920	
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	65,000,000	30,342,446	0	30,342,446	46.68
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	174,786,000	332,243,800	0	332,243,800	190.09
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	21,447,000	7,973,000	0	7,973,000	37.18
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	19,000,000	53,970,000	0	53,970,000	284.05
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	456,840,000	223,344,000	0	223,344,000	48.89
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	486,820	0	486,820	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	185,000	0	185,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	23,037,493,674	0	23,037,493,674	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	14,017,928	0	14,017,928	0
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	737,073,000	23,700,056,668	0	23,700,056,668	3,215.43

hu f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 07/05/26 2:31 PM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	88,444,000	0	88,444,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,830,927,000	0	1,830,927,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	977,399,732	0	977,399,732	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,632,059,347	0	3,632,059,347	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	999	0	999	0
	JUMLAH PENDAPATAN 06 DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	0	6,528,831,078	0	6,528,831,078	
07	DITJEN OTONOMI DAERAH					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	298,846,375	0	298,846,375	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	847	0	847	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	33,541,454	0	33,541,454	0
	JUMLAH PENDAPATAN 07 DITJEN OTONOMI DAERAH	0	332,388,676	0	332,388,676	
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	464,890,871,000	1,095,067,090,000	0	1,095,067,090,000	235.55
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	9,574,480	0	9,574,480	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,130,000	0	2,130,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	11,179,443,447	0	11,179,443,447	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	855,060,360	0	855,060,360	0
	JUMLAH PENDAPATAN 08 DITJEN KEPENDUDUKAN DAN	464,890,871,000	1,107,113,298,287	0	1,107,113,298,287	238.14
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,445,705	0	2,445,705	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,067,400	0	1,067,400	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,397,400	0	12,397,400	0
	JUMLAH PENDAPATAN 09 DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	0	15,910,505	0	15,910,505	

tu f

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 07/05/26 2:31 PM

Halaman : 4

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
11	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	38,065,432	0	38,065,432	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	66,719,328	0	66,719,328	0
	JUMLAH PENDAPATAN 11 BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM	0	104,784,760	0	104,784,760	
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	72,104,532	0	72,104,532	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,521,030,270	0	1,521,030,270	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	177,819,000	180,855,155	0	180,855,155	101.71
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	56,026,360,000	59,582,896,000	0	59,582,896,000	106.35
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	4,551,319,000	4,889,212,000	0	4,889,212,000	107.42
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,817,230	0	4,817,230	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,688,852	0	12,688,852	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	140,518,212	0	140,518,212	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,956,815	0	1,956,815	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	21,841,905	0	21,841,905	0
	JUMLAH PENDAPATAN 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	60,755,498,000	66,427,920,971	0	66,427,920,971	109.34
	JUMLAH PENDAPATAN	545,622,680,000	1,229,296,647,039	0	1,229,296,647,039	225.3



**KERTAS KERJA TELAAH
LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2025 AUDITED**

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)
AUDITED TA 2025

Kode dan Nama K/L : (010) Kementerian Dalam Negeri

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	v		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	v		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	v		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua! Saldo Awal	v		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua!	v		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	v		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	v		Ada

KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI

	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	v		Sama

Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	v		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	v		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	v		Sama

PENGECHEKAN PADA MONSAKTI

	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		v	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	v		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		v	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		v	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	v		Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		v	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		v	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		v	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	v		Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		v	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		v	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		v	Tidak

Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah

	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		v	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		v	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		v	Tidak
	a. Pagu/DIPA		v	Tidak
	b. Estimasi PNB		v	Tidak
	c. Belanja		v	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		v	Tidak
	e. Pendapatan		v	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		v	Tidak

	g. Kas BLU		v	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		v	Tidak
	i. Kas Hibah		v	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		v	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		v	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		v	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		v	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		v	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		v	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		v	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		v	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		v	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		v	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		v	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	v		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	v		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	v		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	v		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		v	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		v	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		v	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		v	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		v	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		v	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		v	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		v	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		v	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		v	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		v	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		v	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tisi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		v	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		v	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		v	Tidak

3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		v	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		v	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		v	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		v	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		v	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		v	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		v	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		v	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		v	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	-	-	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	-	-	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	-	-	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	-	-	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	-	-	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	1.284.049.056		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	8.476.846.796		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		v	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?	v		Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		v	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akruel?	-	-	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		v	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)	-	-	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		v	Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	v		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	v		Ya

3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	v		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	N/A	N/A	Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	-	-	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		v	Tidak
7	Bandungkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	v		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		v	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL

	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		v	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx), atau akun-akun lainnya yang		v	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		v	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	v		Ya
5	Bandungkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		v	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	v		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	v		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		v	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		v	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	N/A		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	N/A		Ya

PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)

	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		v	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		v	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		v	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		v	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		v	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		v	Tidak

TELAHAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	v		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	v		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	N/A		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		v	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak

	- Beban Persediaan (di LO)	v		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	v		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	v		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	v		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	v		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	v		Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	v		Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		v	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	-	-	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	v		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	v		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan

- Terdapat ketidaksesuaian antara kode akun Vs kode barang persediaan pada akun Belanja Jasa Lainnya (522191) pada Ditjen Dukcapil, kesalahan penganggaran atas transaksi pembelian Persediaan berupa Lisensi ABIS yang menggunakan akun belanja 522191 dan Ditjen Bina Keuda pada akun Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel (521252), kesalahan Penganggaran tersebut berasal dari transaksi pembelian Persediaan berupa peralatan rumah tangga perkantoran yang menggunakan akun belanja 521252.
- Berdasarkan data pada Aplikasi MonSAKTI terdapat ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB untuk periode pelaporan Tahun 2025 sebagai berikut:
 - Terdapat kesalahan penggunaan akun pada Satker Setjen (403200) sebesar Rp12.600.608.490,00 yang seharusnya menggunakan akun 536111 (Belanja Modal Lainnya), dan sebesar Rp48.840.000,00 & Rp336.560.000,00 atas kesalahan menggunakan Akun Anggaran seharusnya menggunakan akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin).
 - Kesalahan Penganggaran yang berasal dari pekerjaan Pengadaan Sarana Ekstrakurikuler Alat Drumband di IPDN Kampus NTB Tahun Anggaran 2025 yang seharusnya menggunakan akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel) pada satker IPDN Kampus Sulawesi Selatan (677024).
 - Terjadi ketidaksesuaian antara kode akun belanja dengan kode barang pada pengadaan sarana ekstrakurikuler berupa alat drum band. Hal tersebut disebabkan karena akun yang digunakan pada saat penganggaran adalah akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin), seharusnya akun 536111 (Belanja Modal Lainnya) pada satker IPDN Kampus NTB (683084).
 - Kesalahan pencatatan di Modul Komitmen yang seharusnya dicatat sebagai persediaan dengan kode barang (1010501004) pada satker Ditjen Bina Pemdes (027753) sebesar Rp45.000.000,00.
 - Terdapat Kesalahan Penganggaran yang berasal dari Pemeliharaan dan Pembersihan Lahan Parkir yang seharusnya menggunakan akun 536111 (Belanja Modal Lainnya) dan paket Pekerjaan Operating Sistem Linux yang seharusnya menggunakan akun 536111 (Belanja Modal Lainnya) pada Ditjen Dukcapil (634082).
 - Terdapat pembelian dibawah nilai kapitalisasi berupa Laser Printer sebanyak 7 barang @Rp325.000 dengan akun 53 yang seharusnya menggunakan akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel) pada satker Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III (027114).
 - Pembelian Bracket TV Rp780.001 yang semula tercatat sebagai Ekstrakomptabel karena merupakan satu kesatuan dengan barang lain, dikoreksi dengan melakukan kapitalisasi ke nilai aset (TV) yang telah dicatat sebagai Peralatan dan Mesin pada satker Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II (403216).
 - Pekerjaan tersebut merupakan jasa perencana renovasi gedung yang dilaksanakan dalam satu kontrak untuk tiga gedung. Agar nilai pengeluaran dapat dikapitalisasi sebagai pengembangan gedung, maka pekerjaan harus dirinci berdasarkan masing-masing gedung. Namun, untuk salah satu gedung, nilai pekerjaan hanya sebesar Rp24.500.000, sehingga berada di bawah batas kapitalisasi pengembangan gedung sebesar Rp25.000.000. Oleh karena itu, pada awalnya pencatatan dilakukan dengan mengakui pengeluaran tersebut sebagai beban gedung ekstrakomptabel. Selanjutnya, dilakukan koreksi pencatatan dengan mengkapitalisasi nilai tersebut ke kode barang gedung yang direnovasi (gedung intrakomptabel) pada satker BPSDM (403231).
 - Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan meubelair dengan nilai di bawah batas minimum kapitalisasi sehingga dicatat sebagai beban Ekstrakomptabel, seharusnya menggunakan akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel) pada satker Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri I (506137).
 - Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan alat pemadam kebakaran dengan nilai di bawah batas minimum kapitalisasi sehingga dicatat sebagai beban Ekstrakomptabel, seharusnya menggunakan akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel) pada satker Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (506138)

- 3 Berdasarkan perhitungan selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk secara absolut sebesar Rp1.284.049.056,00. Selisih tersebut berasal dari pemeliharaan gedung dan bangunan milik Sekretariat Jenderal oleh satker Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sebesar Rp642.024.528,00. Pada saat diserahterimakan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum mencatat Transfer Keluar ATR sebesar Rp642.024.528,00 dan Sekretariat Jenderal mencatat transfer masuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp642.024.528,00.
- 4 Perbedaan saldo pada Neraca Percobaan antara akun Transfer Keluar sebesar (Rp121.306.306.662,00) dengan Transfer Masuk sebesar Rp129.783.153.458,00 menyebabkan terdapat selisih secara netto sebesar Rp8.476.846.796,00. Selisih tersebut berasal dari:
- a. Transfer masuk berupa Tanah sebesar Rp7.691.127.290,00 pada satker IPDN Kampus Sulawesi Selatan (677024) Kemendagri yang berasal dari satker Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjudin Chalid Makassar (024.04.258462) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
 - b. Transfer masuk berupa Peralatan dan mesin sebesar Rp190.544.310,00, Aset Tetap Lainnya sebesar Rp40.774.060,00, dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp85.378.027,00) pada satker Institut Pemerintahan Dalam Negeri (448302) Kemendagri yang berasal dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta (057.01.531535).
 - c. Transfer masuk berupa Software sebesar Rp1.877.912.555,00 dan Akumulasi Amortisasi Software sebesar (Rp1.578.735.442,00) pada satker Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (483005) Kemendagri yang berasal dari satker Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (059.04.664262) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
 - d. Transfer masuk berupa Software sebesar Rp2.724.816.410,00 dan Akumulasi Amortisasi Software sebesar (Rp2.384.214.360,00) pada satker Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (027486) Kemendagri yang berasal dari satker Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (059.04.664262) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
 - e. Transfer masuk berupa Software sebesar Rp296.560.000,00 dan Akumulasi Amortisasi Software sebesar (Rp296.560.000,00) pada satker Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (483005) Kemendagri yang berasal dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (115.01.500100).
- 5 Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913) sebesar Rp2.180.540.752,00 yang terdapat pada 7 satker telah dilakukan koreksi aset tetap, kecuali satker IPDN Kampus Sulut sebesar Rp2.000.000,00 berupa setoran untuk pengembalian kelebihan pembayaran atas belanja pemeliharaan gedung yang masih belum lunas.

Diperiksa oleh:

Kepala Subbagian Akuntansi dan
Pelaporan II,



Rahmad Akbar, S.S.P, M.A.P
NIP. 19940907 201708 1 005

Jakarta, 4 Mei 2026

Penelaah,



Cicilia Eka Yunita, A.Md.Ak
NIP. 20000609 202302 2 004

Mengetahui
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan,



I Nengah Sandiyasa, M.Ak
NIP. 19741208 200604 1 001



**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2025 AUDITED**